



**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

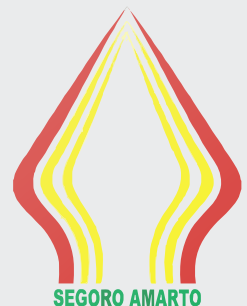
**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**RPJMD**

**KOTA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2017-2022**



## **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165

Phone : + 62 274 514448

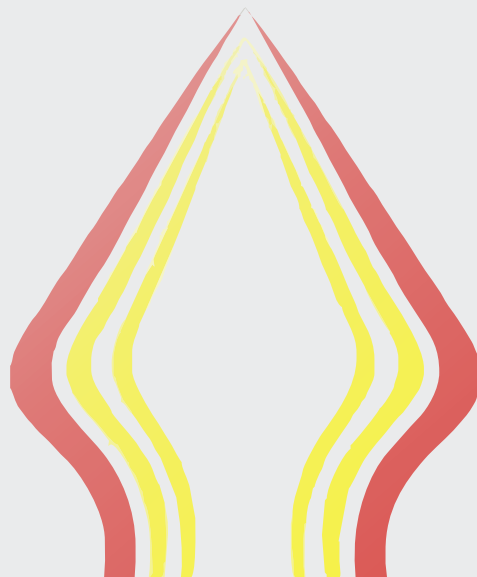
+ 62 274 515865

+ 62 274 515866

Faximile :+62 274 520332

Website : <http://www.jogjakota.go.id>

Email : walikota (at) jogjakota.go.id



**SEGORO AMARTO**



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat RPJPD DIY adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD DIY adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II  
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
  - a. visi dan misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; dan
  - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
  - a. RPJMD DIY;
  - b. RTRW; dan
  - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III  
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

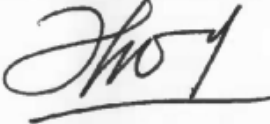
- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 November 2017  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

  
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

  
TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 11.  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (11,63/2017).

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN  
2017-2022

I. UMUM.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es (economy, efficiency and effectiveness)* dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada awalnya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun dalam perjalanannya, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 25 September 2017. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini mengalami penyesuaian mengikuti aturan tersebut, sejak tanggal diundangkannya.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

---

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I   1</b>
1.1. <b>LATAR BELAKANG</b> .....	<b>I   1</b>
1.2. <b>DASAR HUKUM PENYUSUNAN</b> .....	<b>I   2</b>
1.3. <b>HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA</b> .....	<b>I   2</b>
1.4. <b>SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	<b>I   3</b>
1.5. <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b> .....	<b>I   4</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II   1</b>
2.1. <b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b> .....	<b>II   1</b>
2.1.1. Aspek Geografi .....	<b>II   1</b>
A. Letak, Batas, dan Luas Wilayah .....	<b>II   1</b>
B. Kondisi Topografi .....	<b>II   4</b>
C. Kondisi Geologi .....	<b>II   6</b>
D. Kondisi Hidrologi .....	<b>II   6</b>
E. Kondisi Klimatologi .....	<b>II   6</b>
F. Penggunaan Lahan .....	<b>II   7</b>
G. Potensi Pengembangan Wilayah .....	<b>II   9</b>
H. Wilayah Rawan Bencana .....	<b>II   12</b>
2.1.2. Aspek Demografi .....	<b>II   13</b>
A. Struktur Penduduk .....	<b>II   13</b>
1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	<b>II   13</b>
2. Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ) .....	<b>II   14</b>
3. Kepadatan Penduduk .....	<b>II   15</b>
4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	<b>II   16</b>
B. Migrasi .....	<b>II   17</b>
C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan .....	<b>II   18</b>
D. Penduduk Menurut Agama .....	<b>II   19</b>
2.2. <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> .....	<b>II   20</b>
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	<b>II   20</b>
A. Pertumbuhan PDRB .....	<b>II   20</b>

B.	Laju Inflasi .....	II   24
C.	PDRB Per Kapita.....	II   25
D.	Indeks Gini .....	II   26
E.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia.....	II   27
F.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah).....	II   29
G.	Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan.....	II   32
H.	Angka Kriminalitas.....	II   34
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat .....	II   34
A.	Pendidikan.....	II   34
1.	Angka Melek Huruf.....	II   34
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	II   35
3.	Angka Partisipasi Kasar .....	II   36
4.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan .....	II   38
5.	Angka Partisipasi Murni .....	II   40
6.	Program Indonesia Pintar.....	II   41
B.	Kesehatan .....	II   42
1.	Angka Kematian Bayi.....	II   42
2.	Angka Kematian Balita.....	II   43
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan .....	II   44
4.	Angka Usia Harapan Hidup.....	II   46
5.	Prevalensi Balita Gizi Buruk.....	II   47
6.	Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS).....	II   48
C.	Ketenagakerjaan .....	II   48
1.	Rasio Penduduk yang Bekerja .....	II   48
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II   50
A.	Kebudayaan .....	II   50
1.	Jumlah Grup Kesenian.....	II   50
2.	Jumlah Gedung Kesenian.....	II   51
B.	Pemuda dan Olahraga .....	II   52
1.	Jumlah Klub Olahraga.....	II   52
2.	Jumlah Gedung Olahraga .....	II   53
2.3.	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM.....</b>	<b>II   54</b>

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar .....	II   54
A. Pendidikan.....	II   54
1. Pendidikan Dasar.....	II   54
1.1.Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs .....	II   54
1.2.Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs .....	II   54
1.3.Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs.....	II   57
1.4.Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTs .....	II   58
2. Fasilitas Pendidikan .....	II   61
2.1.Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik.....	II   61
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	II   62
4. Angka Putus Sekolah.....	II   63
5. Angka Kelulusan .....	II   64
5.1.Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs.....	II   64
5.2.Angka Melanjutkan.....	II   66
5.3.Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.....	II   67
B. Kesehatan .....	II   69
1. Rasio Posyandu per Satuan Balita.....	II   69
2. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk .....	II   71
3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk .....	II   72
4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .....	II   74
5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk.....	II   75
6. Rasio Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Per Satuan Penduduk .....	II   76
7. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani .....	II   78
8. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.....	II   80
9. Cakupan Desa/ Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) .....	II   81
10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan .....	II   82
11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA .....	II   83
12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.....	II   85
13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin .....	II   87

14. Cakupan Kunjungan Bayi.....	II   89
15. Cakupan Puskesmas .....	II   90
16. Cakupan Puskesmas Pembantu .....	II   91
17. Jaminan Kesehatan .....	II   92
C. Pekerjaan Umum.....	II   93
1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan .....	II   93
2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pemeluk Agama.....	II   95
3. Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola Pemerintah Kota .....	II   96
4. Rasio permukiman layak huni .....	II   97
5. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk .....	II   98
6. Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota (Aksesibilitas).....	II   99
7. Panjang dan Kondisi Trotoar.....	II   100
8. Luas Areal Permukiman di Bantaran.....	II   100
9. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat .....	II   101
10. Persentase Kualitas Talud/Bronjong dan Saluran Pengairan .....	II   102
D. Penataan Ruang .....	II   103
1. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah.....	II   103
2. Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan .....	II   104
3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya .....	II   105
E. Perumahan.....	II   105
1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.....	II   106
2. Rumah Tangga Pengguna Listrik.....	II   107
3. Penyediaan Sanitasi .....	II   109
3.1.Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai.....	II   110
3.2.Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota.....	II   110
3.3 Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan.....	II   111
4. Lingkungan Pemukiman Kumuh .....	II   112
5. Persentase Rumah layak huni .....	II   113



F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	II   115
1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk.....	II   115
2. Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk.....	II   116
3. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan .....	II   118
4. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah.....	II   119
5. Penegakan Peraturan Daerah.....	II   120
6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP.....	II   121
7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota .....	II   123
8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota .....	II   124
9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota .....	II   125
10. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).....	II   125
11. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik.....	II   127
12. Sistem Informasi Manajemen Pemda .....	II   127
13. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat .....	II   128
G. Sosial .....	II   129
1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi.....	II   129
2. PKMS yang memperoleh bantuan sosial .....	II   130
3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .....	II   131
4. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina .....	II   132
H. Perencanaan Pembangunan.....	II   133
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah.....	II   133
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada.....	II   134
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada.....	II   135
4. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD.....	II   136
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II   137
A. Ketenagakerjaan .....	II   137
1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja.....	II   137

2.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun.....	II   138
3.	Pencari Kerja yang Ditempatkan.....	II   139
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II   140
5.	Keselamatan dan Perlindungan .....	II   141
6.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.....	II   142
B.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II   142
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah .....	II   142
2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.....	II   144
3.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	II   145
4.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	II   147
5.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan .....	II   147
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II   149
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	II   150
C.	Ketahanan Pangan.....	II   151
1.	Regulasi Ketahanan Pangan.....	II   151
2.	Ketahanan Pangan Utama .....	II   151
3.	Pola Pangan Harapan .....	II   152
D.	Pertanahan.....	II   152
1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah.....	II   153
2.	Penyelesaian Kasus Tanah.....	II   154
3.	Penyelesaian Izin Lokasi.....	II   155
E.	Lingkungan Hidup .....	II   156
1.	Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke TPA.....	II   156
2.	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum.....	II   158
3.	Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu .....	II   159
4.	Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya .....	II   160
5.	Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha .....	II   161
6.	Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R .....	II   163
7.	Penegakan Hukum Lingkungan .....	II   165

F.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	II   165
1.	Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk .....	II   165
2.	Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk.....	II   165
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah .....	II   167
4.	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota .....	II   168
5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.....	II   169
G.	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan .....	II   169
1.	Jumlah LPMK.....	II   169
2.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK .....	II   170
3.	Jumlah LSM .....	II   171
4.	LPMK Berprestasi .....	II   172
5.	PKK Aktif.....	II   173
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat .....	II   174
7.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat.....	II   176
H.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	II   177
1.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga .....	II   177
2.	Cakupan Peserta KB Aktif.....	II   178
3.	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera.....	II   179
I.	Perhubungan.....	II   180
1.	Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kota.....	II   180
2.	Rasio Ijin Trayek .....	II   182
3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum.....	II   182
4.	Kepemilikan KIR angkutan umum .....	II   183
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR).....	II   185
6.	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum.....	II   185
7.	Jumlah Terminal Bus Dan Stasiun Kereta Api .....	II   186
8.	Presentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan .....	II   187
9.	Pemasangan Rambu-Rambu.....	II   188
10.	Kinerja Lalu-Lintas .....	II   189

11. Kecepatan Lalu-Lintas Rata-Rata .....	II   190
12. Fasilitas Kecelakaan Lalu-Lintas.....	II   190
J. Komunikasi dan Informatika .....	II   191
1. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk.....	II   191
2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal .....	II   192
3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal .....	II   193
4. Website Milik Pemerintah Daerah .....	II   193
5. Pameran/Expo .....	II   194
K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .....	II   195
1. Koperasi Aktif .....	II   195
2. Jumlah BPR/LKM.....	II   196
3. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah .....	II   197
L. Penanaman Modal .....	II   197
1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) .....	II   197
2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).....	II   198
3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.....	II   199
4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN.....	II   200
M. Kepemudaan dan Olahraga .....	II   200
1. Jumlah Organisasi Pemuda .....	II   200
2. Jumlah Organisasi Olahraga.....	II   201
3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan .....	II   201
4. Jumlah Kegiatan Olahraga.....	II   202
5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) .....	II   202
6. Lapangan Olahraga .....	II   203
N. Kebudayaan .....	II   203
1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni Dan Budaya .....	II   203
2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya .....	II   204
3. Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan.....	II   205
O. Perpustakaan .....	II   206
1. Rasio Jumlah Perpustakaan .....	II   206
2. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk.....	II   208

3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun .....	II   210
4.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah .....	II   210
P.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	II   212
1.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP .....	II   212
2.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah .....	II   212
Q.	Statistik .....	II   213
R.	Kearsipan .....	II   214
2.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II   215
A.	Pertanian .....	II   215
1.	Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar .....	II   215
2.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB .....	II   216
3.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) .....	II   217
4.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Perkebunan) Terhadap PDRB .....	II   218
5.	Cakupan Bina Kelompok Petani .....	II   219
B.	Energi dan Sumberdaya Mineral .....	II   220
1.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Penggalan Terhadap PDRB .....	II   220
C.	Pariwisata .....	II   221
1.	Kunjungan Wisata .....	II   221
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB .....	II   221
D.	Perdagangan .....	II   222
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB .....	II   222
2.	Ekspor Bersih Perdagangan .....	II   223
3.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal .....	II   224
E.	Perindustrian .....	II   224
1.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB .....	II   224
2.	Pertumbuhan Industri .....	II   225
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin .....	II   225
F.	Perikanan .....	II   226
1.	Produksi Perikanan Darat .....	II   226
2.	Konsumsi Ikan .....	II   227
3.	Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya .....	II   227

G. Ketransmigrasian .....	II   228
1. Jumlah Transmigran Swakarsa .....	II   228
<b>2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH .....</b>	<b>II   229</b>
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II   229
A. Pengeluaran Konsumsi per Kapita .....	II   229
B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita .....	II   229
C. Produktivitas Total Daerah .....	II   230
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II   231
A. Perhubungan .....	II   231
1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan .....	II   232
2. Rasio Angkutan Umum yang Melewati Kota Yogyakarta per 1000 Penduduk .....	II   233
3. Jumlah orang/barang melalui terminal dan stasiun .....	II   233
B. Penataan Ruang .....	II   235
1. Persentase Luas Wilayah Produktif .....	II   236
2. Persentase Luas Wilayah Industri .....	II   237
3. Persentase Luas Wilayah Genangan .....	II   238
C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian .....	II   238
1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang .....	II   238
2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang .....	II   239
3. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran .....	II   240
4. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel .....	II   240
D. Komunikasi dan Informatika .....	II   241
1. Persentase Ketersediaan Daya Listrik .....	II   241
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .....	II   242
A. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk .....	II   243
B. Jumlah Demo .....	II   243
C. Lama Proses Perizinan .....	II   244
1. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah .....	II   245
2. Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha .....	II   246
2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia .....	II   247
A. Ketenagakerjaan .....	II   247
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 .....	II   247

2. Rasio Ketergantungan .....	II   248
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>III   1</b>
<b>3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....</b>	<b>III   1</b>
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III   1
A. Pendapatan Daerah .....	III   2
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	III   7
2. Dana Perimbangan .....	III   12
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	III   15
B. Belanja Daerah.....	III   17
1. Belanja Tidak Langsung.....	III   21
2. Belanja Langsung .....	III   22
C. Pembiayaan Daerah.....	III   23
3.1.2. Neraca Daerah .....	III   26
A. Aset .....	III   26
B. Kewajiban.....	III   26
C. Ekuitas Dana .....	III   27
<b>3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU .....</b>	<b>III   32</b>
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III   32
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III   33
<b>3.3. KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>III   35</b>
3.3.1. Proyeksi Keuangan 2017-2022 .....	III   35
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH .....</b>	<b>IV   1</b>
<b>4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .....</b>	<b>IV   1</b>
4.1.1. Kesenjangan Ekonomi .....	IV   1
4.1.2. Kemampuan Bersaing Pelaku Perdagangan Kecil Masih relatif Rendah Dibandingkan dengan Pelaku Perdagangan Besar .....	IV   3
4.1.3. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Belum Optimal .....	IV   3
4.1.4. Perlunya Peningkatan Potensi Pariwisata.....	IV   5
4.1.5. Pengawasan Perijinan Investasi Belum Optimal .....	IV   6
4.1.6. Masih Adanya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	IV   6
4.1.7. Masih Rendahnya Sarana Prasarana Pendukung olahraga dan Kepemudaan .....	IV   8
4.1.8. Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik .....	IV   8
4.1.9. Masalah Ketertiban dan Keamanan.....	IV   8
a. Keterbatasan Pembentukan Rescue Linmas .....	IV   9

b.	Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Masih Dilakukan Secara Parsial .....	IV   9
c.	Penurunan Kualitas Siskamling di Kota Yogyakarta .....	IV   9
4.1.10.	Tingginya Minat untuk bersekolah Di Kota Yogyakarta.....	IV   10
4.1.11.	Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Belum Optimal .....	IV   10
4.1.12.	Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera Belum Optimal.....	IV   11
4.1.13.	Jumlah Taman dan RTH Belum Menunjukkan Peningkatan.....	IV   11
4.1.14.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan untuk jasa dan Perusahaan.....	IV   12
4.1.15.	Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum optimal .....	IV   12
4.1.16.	Kinerja Pelayanan Air Minum/Bersih Masih Rendah.....	IV   13
4.1.17.	Pencemaran Air Sungai Maish Terjadi.....	IV   13
4.1.18.	Permasalahan transportasi Perkotaan.....	IV   13
4.1.19.	Belum Optimalnya Pelayanan terkait Kebencanaan .....	IV   16
4.1.20.	Masalah tertib Administrasi Kependudukan dan Kepadatan Penduduk.....	IV   16
4.1.21.	Belum Optimalnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih .....	IV   17
a.	Perubahan regulasi yang Berlangsung Secara Cepat, Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan, dan hubungan Antar Perangkat daerah dan Unit Kerja Menghadapi Kompleksitas Untuk mencapai Sinkronisasi Baik Pada Level Perencanaan, Implementasi, penyerapan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengawasan Maupun Evaluasi .....	IV   18
b.	Agenda <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi yang Belum Selesai dari Segi Implementasi.....	IV   19
c.	Belum Optimalnya Sistem Monitoring Evaluasi/Komunikasi di dalam Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Sehingga Kurang Terakomodasinya Rekam Jejak Pemberdayaan yang Dilakukan Secara Menyeluruh .....	IV   19
d.	Keberlanjutan Inovasi Daerah.....	IV   19
4.1.22.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.....	IV   19
a.	Belum Optimalnya Pengembangan Pola Karir Pegawai Berdasar kompetensi .....	IV   20
b.	Penempatan SDM yang Belum Sepenuhnya Berbasis Kompetensi.....	IV   20
4.1.23.	Belum Optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Produk Hukum .....	IV   20
4.1.24.	Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi .....	IV   21
a.	Belum Optimalnya Fasilitas teknologi Informasi Kepada Seluruh Perangkat Daerah.....	IV   21
b.	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.....	IV   21
c.	Belum Optimalnya Pemanfaatan Arsip Sebagai bagian Dari Audit.....	IV   21
<b>4.2.</b>	<b>ISU STRATEGIS.....</b>	<b>IV   22</b>
4.2.1.	Kemiskinan .....	IV   22
4.2.2.	Keberdayaan Masyarakat.....	IV   23
4.2.3.	Ketahanan Pangan Masyarakat .....	IV   24
4.2.4.	Ketimpangan Pendapatan.....	IV   24
4.2.5.	Pertumbuhan Ekonomi.....	IV   27



4.2.6. Investasi di Kota Yogyakarta.....	IV   28
4.2.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	IV   28
4.2.8. Kualitas Pendidikan.....	IV   29
4.2.9. Harapan Hidup Masyarakat.....	IV   30
a. Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat .....	IV   31
b. Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular .....	IV   32
c. Pengelolaan Limbah Medis .....	IV   33
d. Pemenuhan Standar Layanan Kesehatan .....	IV   34
e. Jaminan Layanan Kesehatan bagi Seluruh Warga Kota Yogyakarta .....	IV   34
4.2.10. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya. ....	IV   34
4.2.11. Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang. ....	IV   35
4.2.12. Kualitas Lingkungan hidup. ....	IV   36
4.2.13. Infrastruktur Wilayah. ....	IV   37
4.2.14. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.....	IV   44
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>V   1</b>
<b>5.1 VISI .....</b>	<b>V   1</b>
<b>5.2 MISI.....</b>	<b>V   3</b>
<b>5.3 TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>V   3</b>
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>VI   1</b>
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>VII   1</b>
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VIII   1</b>
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>IX   1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.A.1	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta .....	II   3
Tabel 2.1.1.B.1	Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan.....	II   4
Tabel 2.1.1.B.2	Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Ketinggian .....	II   5
Tabel 2.1.1.E.1	Kondisi Klimatologi Kota Yogyakarta Tahun 2016 .....	II   7
Tabel 2.1.1.E.2	Kondisi Klimatologi Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   7
Tabel 2.1.1.F.1	Luas Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2012 – 2016 .....	II   8
Tabel 2.1.2.A.1	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2012 – 2016 .....	II   13
Tabel 2.1.2.A.2	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2016 ...	II   14
Tabel 2.1.2.A.3	Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   15
Tabel 2.1.2.A.4	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2016 .....	II   16
Tabel 2.1.2.B.1	Migrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   18
Tabel 2.1.2.C.1	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2012 – 2015 .....	II   19
Tabel 2.1.2.D.1	Persentase Penduduk menurut Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2016 .....	II   20
Tabel 2.2.1.A.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   21
Tabel 2.2.1.A.2	Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   23
Tabel 2.2.1.A.3	Inflasi Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2012 – 2016 .....	II   24
Tabel 2.2.1.A.4	PDRB ADHK per Kapita menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   25
Tabel 2.2.1.A.5	Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   27
Tabel 2.2.1.A.6	Indikator Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   28
Tabel 2.2.1.A.7	Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   30
Tabel 2.2.1.A.8	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .	II   33
Tabel 2.2.1.A.9	Perbandingan Penduduk Miskin Versi BPS dan JPS .....	II   33
Tabel 2.2.1.A.10	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   34
Tabel 2.2.2.A.1	Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   35
Tabel 2.2.2.A.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   36
Tabel 2.2.2.A.3	Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   37

Tabel 2.2.2.A.4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 (menurut BPS.....)	II   38
Tabel 2.2.2.A.5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   39
Tabel 2.2.2.A.6	Angka Partisipasi Murni Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   40
Tabel 2.2.2.A.7	Daftar Rekap Penerima Beasiswa PIP 2017 .....	II   41
Tabel 2.2.2.A.8	Daftar Rekap Penerima Beasiswa 2015-2017 per Jenjang Pendidikan.....	II   42
Tabel 2.2.2.B.1	Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   43
Tabel 2.2.2.B.2	Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   44
Tabel 2.2.2.B.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   45
Tabel 2.2.2.B.4	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   46
Tabel 2.2.2.B.4	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   47
Tabel 2.2.2.B.5	Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat.....	II   48
Tabel 2.2.2.C.1	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   49
Tabel 2.2.3.A.1	Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   50
Tabel 2.2.3.A.2	Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   51
Tabel 2.2.3.B.1	Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   52
Tabel 2.2.3.B.2	Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   53
Tabel 2.3.1.A.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .	II   54
Tabel 2.3.1.A.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   55
Tabel 2.3.1.A.3	Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   57
Tabel 2.3.1.A.4	Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   58
Tabel 2.3.1.A.5	Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   60
Tabel 2.3.1.A.6	Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   61
Tabel 2.3.1.A.7	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   62
Tabel 2.3.1.A.8	Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   63
Tabel 2.3.1.A.9	Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   65
Tabel 2.3.1.A.10	Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   66
Tabel 2.3.1.A.11	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   67
Tabel 2.3.1.A.12	Jumlah Guru PNS Berdasarkan Status Sekolah .....	II   68
Tabel 2.3.1.A.13	Kualifikasi Guru Berjenjang .....	II   69
Tabel 2.3.1.A.14	Jumlah Guru Tersertifikasi .....	II   69
Tabel 2.3.1.B.1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   70
Tabel 2.3.1.B.2	Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   71
Tabel 2.3.1.B.3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   73
Tabel 2.3.1.B.4	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   74

Tabel 2.3.1.B.5	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   75
Tabel 2.3.1.B.6	Rasio Perawat Gigi Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   76
Tabel 2.3.1.B.7	Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   77
Tabel 2.3.1.B.8	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   78
Tabel 2.3.1.B.9	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016...	II   79
Tabel 2.3.1.B.10	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   80
Tabel 2.3.1.B.11	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   82
Tabel 2.3.1.B.12	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   83
Tabel 2.3.1.B.13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   84
Tabel 2.3.1.B.14	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   86
Tabel 2.3.1.B.15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   87
Tabel 2.3.1.B.16	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   89
Tabel 2.3.1.B.17	Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   91
Tabel 2.3.1.B.18	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   91
Tabel 2.3.1.C.1	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   93
Tabel 2.3.1.C.2	Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   95
Tabel 2.3.1.C.3	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   95
Tabel 2.3.1.C.4	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   96
Tabel 2.3.1.C.5	Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   97
Tabel 2.3.1.C.6	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   98
Tabel 2.3.1.C.7	Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota Yogyakarta (Aksesibilitas) Tahun 2012 - 2016.....	II   99
Tabel 2.3.1.C.8	Jumlah Panjang Jalan yang Dilengkapi Trotoar dan Kondisi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   100
Tabel 2.3.1.C.9	Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   100

Tabel 2.3.1.C.10	Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   101
Tabel 2.3.1.C.11	Persentase Kualitas Talud atau Bronjong dan Saluran Pengairan Tahun 2012 - 2016.....	II   102
Tabel 2.3.1.D.1	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   103
Tabel 2.3.1.D.2	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ....	II   104
Tabel 2.3.1.D.3	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   105
Tabel 2.3.1.E.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   106
Tabel 2.3.1.E.2	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   107
Tabel 2.3.1.E.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   108
Tabel 2.3.1.E.4	Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2016.....	II   109
Tabel 2.3.1.E.5	Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai Tahun 2013 - 2016 ...	II   110
Tabel 2.3.1.E.6	Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2012 - 2016.....	II   110
Tabel 2.3.1.E.7	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, Selama 6 Jam) lebih dari 2 Kali Setahun Tahun 2012 - 2016.....	II   111
Tabel 2.3.1.E.8	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   112
Tabel 2.3.1.E.9	Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   113
Tabel 2.3.1.E.10	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   114
Tabel 2.3.1.F.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   115
Tabel 2.3.1.F.2	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   117
Tabel 2.3.1.F.3	Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   118
Tabel 2.3.1.F.4	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   120
Tabel 2.3.1.F.5	Persentase Peningkatan Penegakan Perda di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   122
Tabel 2.3.1.F.6	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   123
Tabel 2.3.1.F.7	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   123
Tabel 2.3.1.F.8	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   124
Tabel 2.3.1.F.9	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   125

Tabel 2.3.1.F.10	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   126
Tabel 2.3.1.F.11	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   126
Tabel 2.3.1.F.12	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   127
Tabel 2.3.1.F.13	Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   127
Tabel 2.3.1.F.14	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   128
Tabel 2.3.1.G.1	Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   129
Tabel 2.3.1.G.2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   130
Tabel 2.3.1.G.3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   131
Tabel 2.3.1.G.4	Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   132
Tabel 2.3.1.G.5	Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta .....	II   132
Tabel 2.3.1.H.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   133
Tabel 2.3.1.H.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   135
Tabel 2.3.1.H.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   135
Tabel 2.3.1.H.4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016....	II   136
Tabel 2.3.2.A.1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   137
Tabel 2.3.2.A.2	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   138
Tabel 2.3.2.A.3	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   139
Tabel 2.3.2.A.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   140
Tabel 2.3.2.A.5	Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   141
Tabel 2.3.2.A.6	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   142
Tabel 2.3.2.B.1	Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   143
Tabel 2.3.2.B.2	Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   144
Tabel 2.3.2.B.3	Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   145
Tabel 2.3.2.B.4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   147
Tabel 2.3.2.B.5	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   148

Tabel 2.3.2.B.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   149
Tabel 2.3.2.B.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   150
Tabel 2.3.2.C.1	Regulasi Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   151
Tabel 2.3.2.C.2	Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   152
Tabel 2.3.2.D.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   153
Tabel 2.3.2.D.2	Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   154
Tabel 2.3.2.D.3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   155
Tabel 2.3.2.E.1	Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun 2012 - 2016 .....	II   156
Tabel 2.3.2.E.2	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   158
Tabel 2.3.2.E.3	Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu Tahun 2012 - 2016.....	II   160
Tabel 2.3.2.E.4	Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan perkiraan Luasnya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   161
Tabel 2.3.2.E.5	Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   162
Tabel 2.3.2.E.6	Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2012 - 2016.....	II   163
Tabel 2.3.2.E.7	Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   165
Tabel 2.3.2.F.1	Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   166
Tabel 2.3.2.F.2	Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   166
Tabel 2.3.2.F.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   168
Tabel 2.3.2.F.4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   168
Tabel 2.3.2.F.5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   169
Tabel 2.3.2.G.1	Jumlah LPMK di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   170
Tabel 2.3.2.G.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   171
Tabel 2.3.2.G.3	Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   171
Tabel 2.3.2.G.4	Jumlah LPM Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   173
Tabel 2.3.2.G.5	Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   174
Tabel 2.3.2.G.6	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   175
Tabel 2.3.2.G.7	Pemeliharaan Pasca Program Pemdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   176
Tabel 2.3.2.H.1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   177
Tabel 2.3.2.H.2	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   178

Tabel 2.3.2.H.3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   179
Tabel 2.3.2.I.1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.....	II   183
Tabel 2.3.2.I.2	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   184
Tabel 2.3.2.I.3	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015.....	II   185
Tabel 2.3.2.I.4	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   185
Tabel 2.3.2.I.5	Jumlah Terminal Bis, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   186
Tabel 2.3.2.I.6	Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2012 – 2016.....	II   188
Tabel 2.3.2.I.7	Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   188
Tabel 2.3.2.I.8	Nilai Rata-Rata Perbandingan Volume Lalu-lintas dengan Kapasitas Jalan Berdasarkan Kelas Jalan.....	II   190
Tabel 2.3.2.I.9	Kecepatan Lalu-lintas Rata-rata (km/jam) Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014.....	II   190
Tabel 2.3.2.J.1	Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   191
Tabel 2.3.2.J.2	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   193
Tabel 2.3.2.J.3	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   193
Tabel 2.3.2.J.4	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   194
Tabel 2.3.2.J.5	Jumlah Pameran/Expo Perdagangan yang Dilaksanakan per Tahun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016.....	II   195
Tabel. 2.3.2.K.1	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 – 2016.....	II   195
Tabel 2.3.2.K.2	Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   196
Tabel 2.3.2.K.3	Banyaknya Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   197
Tabel 2.3.2.L.1	Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   198
Tabel 2.3.2.L.2	Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   199
Tabel 2.3.2.L.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   199
Tabel 2.3.2.L.4	Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   200
Tabel 2.3.2.M.1	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   201
Tabel 2.3.2.M.2	Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   201
Tabel 2.3.2.M.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   202
Tabel 2.3.2.M.4	Jumlah Kegiatan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2016.....	II   202
Tabel 2.3.2.M.5	Gelanggang Remaja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   203
Tabel 2.3.2.M.6	Lapangan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   203



Tabel 2.3.2.N.1	Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   204
Tabel 2.3.2.N.2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   205
Tabel 2.3.2.N.3	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   205
Tabel 2.3.2.O.1	Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   206
Tabel 2.3.2.O.1	Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   207
Tabel 2.3.2.O.2	Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   208
Tabel 2.3.2.O.3	Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   209
Tabel 2.3.2.O.4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016....	II   210
Tabel 2.3.2.O.5	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   211
Tabel 2.3.2.P.1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016II   212	
Tabel 2.3.2.P.2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   213
Tabel 2.3.2.Q.1	Publikasi Buku Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   213
Tabel 2.3.2.R.1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   214
Tabel 2.3.2.R.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   214
Tabel 2.3.3.A.1	Produksi Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   215
Tabel 2.3.3.A.2	Luas Panen Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016.....	II   215
Tabel 2.3.3.A.3	Total Produktivitas Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   216
Tabel 2.3.3.A.4	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016... II   217	
Tabel 2.3.3.A.5	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB ADHK Pertanian/Perkebunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   218
Tabel 2.3.3.A.6	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   219
Tabel 2.3.3.A.7	Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   219
Tabel 2.3.3.B.1	Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   220
Tabel 2.3.3.C.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   221
Tabel 2.3.3.C.2	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   222
Tabel 2.3.3.D.1	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   223
Tabel 2.3.3.D.2	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   223

Tabel 2.3.3.D.3	Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   223
Tabel 2.3.3.E.1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   225
Tabel 2.3.3.E.1	Pertumbuhan Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   225
Tabel 2.3.3.E.3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   226
Tabel 2.3.3.F.1	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   226
Tabel 2.3.3.F.2	Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   227
Tabel 2.3.3.F.3	Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   228
Tabel 2.3.3.G.1	Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   228
Tabel 2.4.1.A.1	Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015.....	II   229
Tabel 2.4.1.A.2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015 .....	II   230
Tabel 2.4.1.A.3	Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015 .....	II   231
Tabel 2.4.2.A.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   232
Tabel 2.4.2.A.2	Rasio Jumlah Angkutan Darat per Penumpang Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   233
Tabel 2.4.2.A.3	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   234
Tabel 2.4.2.A.4	Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelasnya Tahun 2012 - 2016.....	II   235
Tabel 2.4.2.A.5	Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015.....	II   235
Tabel 2.4.2.B.1	Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   236
Tabel 2.4.2.B.2	Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   237
Tabel 2.4.2.B.3	Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   237
Tabel 2.4.2.B.4	Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2016 .....	II   238
Tabel 2.4.2.B.5	Jumlah Titik Genangan di Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2016.....	II   238
Tabel 2.4.2.C.1	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2012 - 2016 .....	II   239
Tabel 2.4.2.C.2	Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   239
Tabel 2.4.2.C.3	Jumlah Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   240
Tabel 2.4.2.C.4	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   241
Tabel 2.4.2.D.1	Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2015.....	II   241
Tabel 2.4.3.A.1	Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   243
Tabel 2.4.3.B.1	Jumlah Demo di Kota Yogyakarta Tahun 2012 -2 016 .....	II   244
Tabel 2.4.3.C.1	Lama Proses Perizinan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   245

Tabel 2.4.3.C.1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 ....	II   246
Tabel 2.4.3.C.2	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   246
Tabel 2.4.3.C.3	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   247
Tabel 2.4.4.A.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   248
Tabel 2.4.4.A.2	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2014 .....	II   248
Tabel 2.4.4.A.3	Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   249
Tabel 2.5.2.F.1	Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta.....	II   264
Tabel 3.1.1.A.1	Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016 .....	III   3
Tabel 3.1.1.A.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   4
Tabel 3.1.1.A.3	Struktur Pendapatan Daerah Beberapa Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 .....	III   6
Tabel 3.1.1.A.4	Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Beberapa Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   7
Tabel 3.1.1.A.5	Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   8
Tabel 3.1.1.A.6	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   9
Tabel 3.1.1.A.7	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   9
Tabel 3.1.1.A.8	Struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   12
Tabel 3.1.1.A.9	Capaian Target Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   14
Tabel 3.1.1.A.10	Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   14
Tabel 3.1.1.A.11	Struktur Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   15
Tabel 3.1.1.A.12	Pertumbuhan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   16
Tabel 3.1.1.A.13	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   17
Tabel 3.1.1.B.1	Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016.....	III   18
Tabel 3.1.1.B.2	Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   20
Tabel 3.1.1.B.3	Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   21
Tabel 3.1.1.B.4	Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   22
Tabel 3.1.1.B.5	Struktur Belanja Langsung Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   22
Tabel 3.1.1.C.1	Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016 .....	III   23
Tabel 3.1.1.C.2	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   24
Tabel 3.1.1.C.1	Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   26
Tabel 3.1.2.1	Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   28

Tabel 3.1.2.1.	Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 (Juta Rupiah) .....	III   29
Tabel 3.2.1.1	Proporsi Belanja Aparatur Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   32
Tabel 3.2.2.1	Defisit dan Surplus Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	III   34
Tabel 3.2.2.2	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	III   34
Tabel 3.3.1.1	Proyeksi Realisasi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 .....	III   36
Tabel 4.1.9.A.1	PDRB Per Kapita dan Pemerataan Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013.....	IV   8
Tabel 4.1.9.B.1	Jumlah dan Proporsi Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2011 – 2014 .....	IV   9
Tabel 4.1.9.B.2	Jumah Sarana Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2013.....	IV   10
Tabel 5. 1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Kota Yogyakarta.....	V   4
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Yogyakarta.....	VI   2
Tabel 6.2.1	Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	VI   27
Tabel 6.2.2	Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta	VI   30
Tabel 6.2.3	Misi 3: Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	VI   32
Tabel 6.2.4	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya	VI   33
Tabel 6.2.5	Misi 5: Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan	VI   37
Tabel 6.2.6	Misi 6: Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman	VI   38
Tabel 6.2.7	Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih	VI   40
Tabel 7.2.1	Urusan Wajib.....	VII   2
Tabel 7.2.2	Urusan Pilihan.....	VII   23
Tabel 7.2.2	Urusan Penunjang.....	VII   25
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	VIII   2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah.....	I   3
Gambar 2.1.1.A.1	Peta Administrasi Kota Yogyakarta .....	II   2
Gambar 2.1.1.F.1	Persentase Luas Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	II   9
Gambar 2.1.2.A.1.	Grafik Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2016.....	II   17
Gambar 2.1.2.A.1.	Grafik Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015.....	II   18
Gambar 2.2.1.A.1.	Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015.....	II   24
Gambar 2.2.1.A.2.	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015 .....	II   27
Gambar 2.2.1.A.3.	Grafik Persentase Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015 .....	II   29
Gambar 2.2.1.A.4.	Grafik Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015 .....	II   32
Gambar 2.2.2.A.1.	Grafik Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   35
Gambar 2.2.2.A.2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015.....	II   36
Gambar 2.2.2.A.3.	Angka Partisipasi Kasar Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   37
Gambar 2.2.2.A.4.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 .....	II   39
Gambar 2.2.2.A.5.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   40
Gambar 2.2.2.A.6.	Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   41
Gambar 2.2.2.B.1.	Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   43
Gambar 2.2.2.B.2.	Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   44
Gambar 2.2.2.B.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   45
Gambar 2.2.2.B.4.	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015.....	II   47
Gambar 2.2.2.B.5.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   48
Gambar 2.2.2.C.1.	Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   49
Gambar 2.2.3.A.1.	Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   51
Gambar 2.2.3.A.2.	Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   52
Gambar 2.2.3.B.1.	Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   53
Gambar 2.2.3.B.2.	Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015 .....	II   54
Gambar 2.3.1.A.1	Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   55
Gambar 2.3.1.A.2	Grafik Rasio Ketersediaan /Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.....	II   56
Gambar 2.3.1.A.3	Rasio Guru/Murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   58
Gambar 2.3.1.A.4	Grafik Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   59

Gambar 2.3.1.A.5	Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   60
Gambar 2.3.1.A.6.	Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   62
Gambar 2.3.1.A.7	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   63
Gambar 2.3.1.A.8	Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   64
Gambar 2.3.1.A.9	Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   65
Gambar 2.3.1.A.10	Grafik Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   67
Gambar 2.3.1.A.11	Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   68
Gambar 2.3.1.B.1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   70
Gambar 2.3.1.B.2	Grafik Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   72
Gambar 2.3.1.B.3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   73
Gambar 2.3.1.B.4	Grafik Rasio Praktek Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   75
Gambar 2.3.1.B.5	Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   79
Gambar 2.3.1.B.6	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   81
Gambar 2.3.1.B.7	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   84
Gambar 2.3.1.B.8	Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   87
Gambar 2.3.1.B.9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   88
Gambar 2.3.1.B.10	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   90
Gambar 2.3.1.B.11	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   92
Gambar 2.3.1.C.1	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   94
Gambar 2.3.1.C.2	Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   102
Gambar 2.3.1.D.1	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   104
Gambar 2.3.1.D.2	Jumlah Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   105
Gambar 2.3.1.E.1	Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   107
Gambar 2.3.1.E.2	Grafik Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   108

Gambar 2.3.1.E.3	Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016 .....	II   109
Gambar 2.3.1.E.4	Grafik Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2012 - 2016 .....	II   111
Gambar 2.3.1.E.5	Grafik Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   113
Gambar 2.3.1.E.6	Grafik Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   114
Gambar 2.3.1.F.1	Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   116
Gambar 2.3.1.F.2	Grafik Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   118
Gambar 2.3.1.F.3	Grafik Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   119
Gambar 2.3.1.F.4	Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   121
Gambar 2.3.1.F.5	Grafik Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   122
Gambar 2.3.1.F.6	Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   123
Gambar 2.3.1.G.1	Grafik Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   130
Gambar 2.3.1.G.2	Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   131
Gambar 2.3.1.G.3	Grafik Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   132
Gambar 2.3.2.A.1	Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   138
Gambar 2.3.2.A.2	Grafik Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   140
Gambar 2.3.2.A.3	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   141
Gambar 2.3.2.B.1	Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   144
Gambar 2.3.2.B.2	Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   145
Gambar 2.3.2.B.3	Grafik Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   146
Gambar 2.3.2.B.4	Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   147
Gambar 2.3.2.B.5	Grafik Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   148
Gambar 2.3.2.B.6	Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015 .....	II   149
Gambar 2.3.2.B.7	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015 .....	II   150
Gambar 2.3.2.D.1	Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   154

Gambar 2.3.2.D.2	Grafik Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016.....	II   155
Gambar 2.3.2.E.1.	Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) .....	II   157
Gambar 2.3.2.E.2.	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   159
Gambar 2.3.2.E.3.	Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   162
Gambar 2.3.2.E.4.	Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   165
Gambar 2.3.2.E.5.	Jumlah Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   167
Gambar 2.3.2.F.1	Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   169
Gambar 2.3.2.F.2	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 .....	II   170
Gambar 2.3.2.G.1	Grafik Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   172
Gambar 2.3.2.G.2	Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 .....	II   175
Gambar 2.3.2.H.1.	Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   179
Gambar 2.3.2.H.2.	Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta.....	II   180
Gambar 2.3.2.I.1	Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2016.....	II   183
Gambar 2.3.2.I.2.	Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   184
Gambar 2.3.2.I.3	Grafik Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2012 – 2016.....	II   188
Gambar 2.3.2.I.4.	Grafik Pemasangan Rambu-rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 .....	II   189
Gambar 2.3.2.J.1.	Grafik Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   192
Gambar 2.3.2.K.1	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016.....	II   196
Gambar 2.3.2.L.1	Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015 .....	II   198
Gambar 2.3.2.N.1.	Grafik Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   204
Gambar 2.3.2.N.2.	Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   206
Gambar 2.3.2.O.1.	Grafik Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   207
Gambar 2.3.2.O.2.	Grafik Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 .....	II   208
Gambar 2.3.2.O.3.	Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta.....	II   209
Gambar 2.3.2.O.4.	Grafik Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   210
Gambar 2.3.2.O.5.	Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	II   211
Gambar 2.3.2.O.6.	Grafik Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta.....	II   205
Gambar 2.4.2.A.1	Grafik Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.....	II   232



Gambar 2.4.2.A.2	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 -2016 .....	II   234
Gambar 2.4.2.D.1	Grafik Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2015. ....	II   242
Gambar 2.4.4.A.1	Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 .....	II   249
Gambar 3.1.1.A.1.	Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016 .....	III   3
Gambar 3.1.1.A.2.	Perkembangan Proporsii Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016 .....	III   6
Gambar 3.1.1.A.3.	Perkembangan Kontribusi Komponen PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016.....	III   8
Gambar 3.1.1.A.4.	Komponen Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 .....	III   10
Gambar 3.1.1.A.5.	Perkembangan Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kota Yogyakarta.....	III   13
Gambar 3.1.1.A.6.	Perkembangan Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016.....	III   16
Gambar 3.1.1.B.1.	Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016 .....	III   19
Gambar 3.1.1.C.1.	Perkembangan Pembiayaan Netto dan SILPA Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016 .....	III   25
Gambar 3.2.1.1.	Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur Kota Yogyakarta.....	III   33
Gambar 3.2.1.1.	Dinamika Surplus dan Defisit Anggaran Daerah Kota Yogyakarta.....	III   34

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 telah habis masa berlakunya pada tahun 2016, sehingga perlu segera disusun RPJMD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2017 – 2022 yang merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Bappeda dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

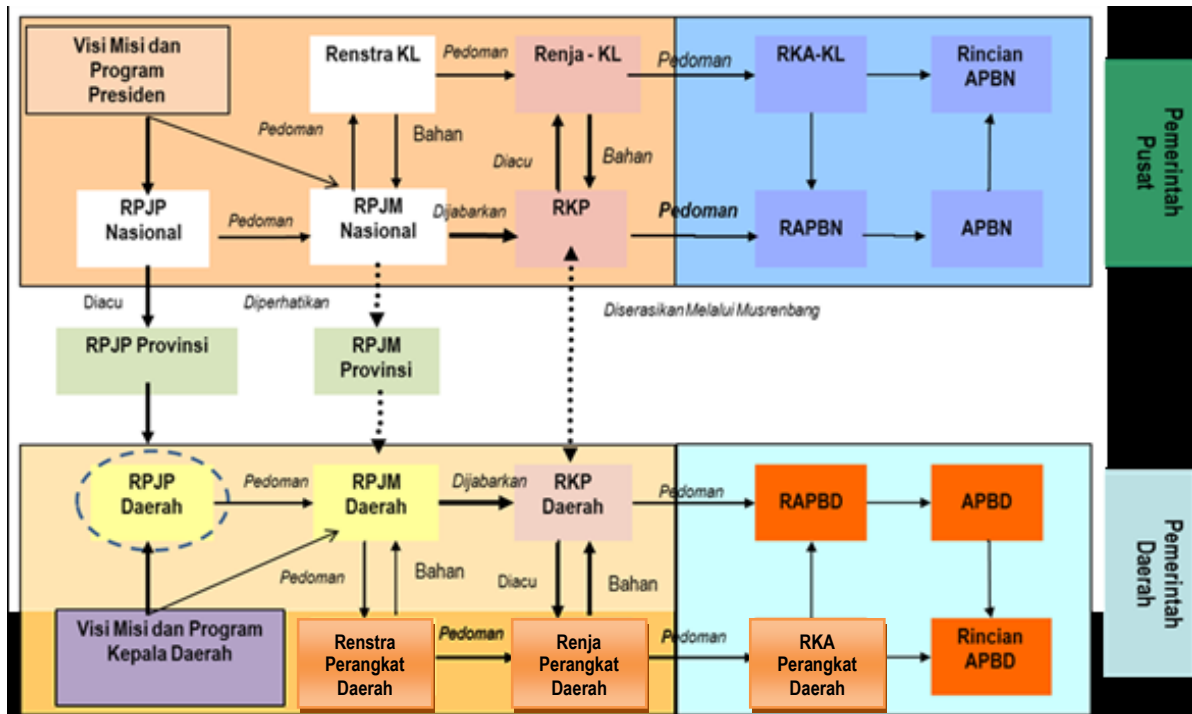
Kedudukan dan dasar hukum Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPN, RPJP Provinsi DIY, RPJPD Kota Yogyakarta, RPJMN Nasional, RPJMD Provinsi DIY, RTRWN, RTRW Provinsi DIY dan RTRW Kota Yogyakarta agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang, untuk itu penyusunan RPJMD tersebut harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RTRW Kota Yogyakarta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPJMD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPJMD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA SKPD), hubungan tersebut tergambar di Gambar 1.3.1.



Gambar 1.3.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Keluaran dari Pekerjaan Penyusunan Draft RPJMD adalah berupa RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

##### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
  - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
  - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
  - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

**1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih ke dalam perencanaan strategik yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi misi, tujuan, dan sasaran RPJMD.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPd yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat induktif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kota Yogyakarta memiliki *image* sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota perjuangan. Hal tersebut berdasar pada sektor-sektor yang mendominasi maupun secara umum menggambarkan wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, nilai keistimewaan di Kota Yogyakarta utamanya didukung dengan adanya Kraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Pura Kadipaten Paku Alaman. Secara lebih lanjut, gambaran wilayah Kota Yogyakarta didasarkan pada kondisi geografis atau karakteristik fisik dan kondisi sosial kependudukan atau demografi, menurut kondisi *eksisting* maupun kecenderungan dan potensi pengembangan.

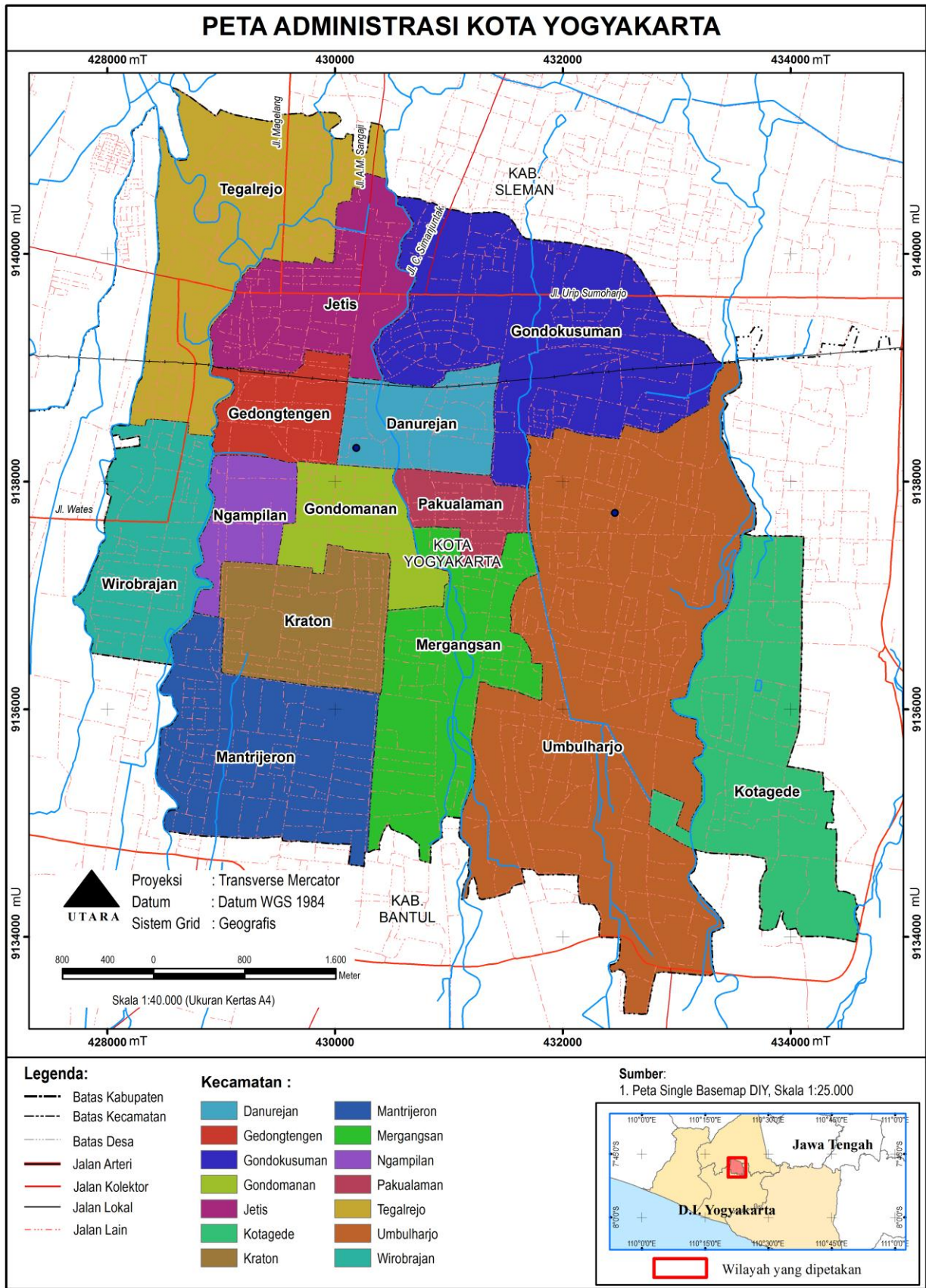
#### 2.1.1. Aspek Geografi

##### A. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Kota Yogyakarta merupakan Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di bagian tengah, tepatnya diantara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Hal tersebut menjadikan lokasi Kota Yogyakarta sangat strategis. Fungsi wilayah Kota Yogyakarta tidak hanya sebagai pusat pelayanan politik dan administrasi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, dan sosial budaya.

Letak wilayah Kota Yogyakarta secara absolut (posisi astronomis) adalah di antara 110° 24' 19" Bujur Timur - 110° 28' 53" Bujur Timur, dan 7° 49' 26" Lintang Selatan - 7° 15' 24" Lintang Selatan. Rentang jarak wilayahnya dari utara ke selatan adalah sejauh kurang lebih 7,5 kilometer, sedangkan rentang jarak dari barat ke timur adalah kurang lebih 5,6 kilometer. Batas wilayah Kota Yogyakarta secara lebih rinci adalah sebagai berikut dan disajikan pada Gambar 2.1.:1.A.1.

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati)
- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kecamatan Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kecamatan Kasihan)



Gambar 2.1.1.A.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW), dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Kota Yogyakarta memiliki luas 32,50 km<sup>2</sup> atau 1,02 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan unit kecamatan, luas paling besar yaitu Kecamatan Umbulharjo (8,12 km<sup>2</sup> atau 24,98 persen). Sementara itu, luas wilayah kecamatan paling kecil yaitu Kecamatan Pakualaman (0,63 km<sup>2</sup> atau 1,94 persen). Pembagian administrasi Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.1.1.A.1.

Tabel 2.1.1.A.1

## Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	Gedongkiwo	0,90	18	86
		Suryodiningratan	0,85	17	70
		Mantrijeron	0,86	20	75
			<b>2,61</b>	<b>55</b>	<b>231</b>
2.	Kraton	Patehan	0,40	10	44
		Panembahan	0,66	18	78
		Kadipaten	0,34	15	53
			<b>1,40</b>	<b>43</b>	<b>175</b>
3.	Mergangsan	Brontokusuman	0,93	23	84
		Keparakan	0,53	13	58
		Wirogunan	0,85	24	76
			<b>2,31</b>	<b>60</b>	<b>218</b>
4.	Umbulharjo	Giwangan	1,26	13	42
		Sorosutan	1,68	18	70
		Pandean	1,38	13	52
		Warungboto	0,83	9	38
		Tahunan	0,78	12	50
		Muja-muju	1,53	12	55
		Semaki	0,66	10	34
			<b>8,12</b>	<b>87</b>	<b>341</b>
5.	Kotagede	Prenggan	0,99	13	57
		Purbayan	0,83	14	58
		Rejowinangun	1,25	13	49
			<b>3,07</b>	<b>40</b>	<b>164</b>
6.	Gondokusuman	Baciro	1,06	21	87
		Demangan	0,74	12	44
		Klitren	0,68	16	63
		Kotabaru	0,71	4	20
		Terban	0,80	12	58
			<b>3,99</b>	<b>65</b>	<b>272</b>
7.	Danurejan	Suryatmajan	0,28	14	43
		Tegalpanggung	0,35	16	66
		Bausasran	0,47	12	49
			<b>1,10</b>	<b>42</b>	<b>158</b>
8.	Pakualaman	Purwokinanti	0,33	10	47
		Gunungketur	0,30	9	36
			<b>0,63</b>	<b>19</b>	<b>83</b>



No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah RW	Jumlah RT
9.	Gondomanan	Prawirodirjan	0,67	18	61
		Ngupasan	0,45	13	49
			<b>1,12</b>	<b>31</b>	<b>110</b>
10.	Ngampilan	Notoprajan	0,37	8	50
		Ngampilan	0,45	13	70
			<b>0,82</b>	<b>21</b>	<b>120</b>
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan	0,44	10	51
		Wirobrajan	0,67	12	58
		Pakuncen	0,65	12	56
			<b>1,76</b>	<b>34</b>	<b>165</b>
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,46	22	85
		Sosromenduran	0,50	14	54
			<b>0,96</b>	<b>36</b>	<b>139</b>
13.	Jetis	Bumijo	0,58	13	57
		Gowongan	0,46	13	52
		Cokrodingratan	0,66	11	57
			<b>1,70</b>	<b>37</b>	<b>166</b>
14.	Tegalrejo	Tegalrejo	0,82	12	47
		Bener	0,57	7	26
		Kricak	0,82	13	61
		Karangwaru	0,70	14	56
			<b>2,91</b>	<b>46</b>	<b>190</b>
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>32,50</b>	<b>616</b>	<b>2.532</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2016

## B. Kondisi Topografi

Wilayah Kota Yogyakarta sebagian besar berada pada kemiringan 0-2persen yakni dengan luas 2.890,93 hektar atau mencapai 88,94 persen wilayah Kota Yogyakarta. Sementara itu, 313,32 hektar (9,64 persen) berada pada kemiringan 2-15%, dan 35,34 hektar (1,09 persen) berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 10,94 hektar (0,34 persen) berada pada kemiringan diatas 40%. Wilayah dengan kemiringan diatas 40% terdapat di bantaran sungai. Kondisi topografi tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi wilayah Kota Yogyakarta ada pada relief datar. Kondisi wilayah yang datar menjadi suatu potensi serta konsekuensi dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah, diantaranya dalam perkembangan perkotaan maupun permukiman. Kecamatan Kraton dan Kecamatan Pakualaman tercatat memiliki wilayah yang 100 persen berada pada kemiringan 0-2%. Secara rinci kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 2.1.1.B.1.

Tabel 2.1.1.B.1

### Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Ha)			
		0 – 2%	2 – 15%	15 – 40 %	>40 %
1.	Mantrijeron	244,43	12,18	4,3858	0
2.	Kraton	140	0	0	0
3.	Mergangsan	105,05	25,94	0	0
4.	Umbulharjo	764,54	45,04	1,66	0,73

No	Kecamatan	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Ha)			
		0 – 2%	2 – 15%	15 – 40 %	>40 %
5.	Kotagede	277,8	23,26	2,52	3,94
6.	Gondokusuman	328,58	67,76	2,66	0
7.	Danurejan	75,86	27,64	5,94	0,56
8.	Pakualaman	63	0	0	0
9.	Gondomanan	105,92	6,08	0	0
10.	Ngampilan	50,92	31,08	0	0
11.	Wirobrajan	147,35	21,26	6,06	1,33
12.	Gedongtengen	84,44	8,32	2,82	0,42
13.	Jetis	148,32	20,74	0,48	0,46
14.	Tegalrejo	254,66	24,02	8,82	3,5
<b>Jumlah</b>		<b>2.890,39</b>	<b>313,32</b>	<b>35,34</b>	<b>10,94</b>
<b>Persentase</b>		<b>88,92</b>	<b>9,63</b>	<b>1,07</b>	<b>0,33</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2016

Kondisi wilayah Kota Yogyakarta secara fisik juga dapat dianalisis berdasarkan ketinggian wilayahnya. Wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan ketinggian dapat diklasifikasi menjadi dua, yakni kurang dari 100 meter dan antara 100 hingga 200 meter di atas permukaan air laut (dpal). Wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 100 meter dpal luasnya mencapai 1.657 hektar atau 50,98 persen. Sebagian lainnya seluas 1.593 hektar atau 49,02 persen berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpal. Sebagian besar kecamatan (8 kecamatan) memiliki wilayah homogen dengan satu kategori wilayah ketinggian, tetapi terdapat pula beberapa kecamatan (6 kecamatan) yang memiliki dua kategori ketinggian wilayah. Data ketinggian wilayah secara lengkap tersaji pada Tabel 2.1.1.B.2.

Tabel 2.1.1.B.2

Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Ketinggian

No	Kecamatan	Luas Wilayah berdasarkan Ketinggian (Ha)	
		< 100 m dpal	100 - 200 m dpal
1.	Mantrijeron	261	0
2.	Kraton	140	0
3.	Mergangsan	202	29
4.	Umbulharjo	607	206
5.	Kotagede	302	5
6.	Gondokusuman	0	399
7.	Danurejan	0	110
8.	Pakualaman	0	63
9.	Gondomanan	42	70
10.	Ngampilan	31	51
11.	Wirobrajan	72	103
12.	Gedongtengen	0	96
13.	Jetis	0	170
14.	Tegalrejo	0	291
<b>Jumlah</b>		<b>1.657</b>	<b>1.593</b>
<b>Persentase</b>		<b>50,98</b>	<b>49,02</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017

### C. Kondisi Geologi

Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran aluvial Gunungapi Merapi. Material utama penyusunnya adalah dari material Gunungapi Merapi yang tersedimentasi setelah melalui aliran Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Winongo. Berasal dari proses vulkanik (erupsi gunung berapi), sebagian besar wilayah Kota Yogyakarta memiliki jenis tanah berupa tanah Regosol, sementara formasi geologi berupa batuan sedimen *old* andesit. Dalam klasifikasi tanah menurut sistem taksonomi tanah United States Department of Agriculture (USDA, 1975), jenis tanah Regosol termasuk dalam ordo Entisol atau Inseptisol. Ciri-ciri jenis tanah Regosol yaitu tanah muda, baik tingkat permulaan (Entisol) atau telah lebih berkembang (Inseptisol) yang belum mengalami perkembangan lanjut, bertekstur kasar, cenderung gembur, peka terhadap erosi, kemampuan menyerap air yang tinggi, dan bersifat cukup subur karena kaya akan unsur hara. Formasi geologi berupa batuan sedimen *old* andesit (endapan vulkanik tua) juga merupakan hasil material vulkanik yang terendapkan, dengan jenis andesit (batuan beku vulkanik).

### D Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Yogyakarta secara umum dipengaruhi oleh tiga aliran sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak Oyo, terutama Sub DAS Opak dan Sub DAS Winongo. Sungai-sungai di Kota Yogyakarta termasuk dalam sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun dengan debit aliran yang bervariasi. Sungai Code dan Sungai Winongo memiliki debit 500-1.000 liter/detik. Kondisi aliran tersebut dipengaruhi oleh tingginya curah hujan di bagian hulu, topografi, dan tanah yang memiliki permeabilitas tinggi. Aliran dasar (*base/ow*) dari air tanah cukup tinggi, sehingga dapat mendukung aliran air sungai pada musim kemarau.

Selain air permukaan, kondisi air tanah juga mempengaruhi kondisi hidrologi di Kota Yogyakarta. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan muka freatik, dimana permukaan freatik merupakan batas zona jenuh air dengan zona tidak jenuh air. Akuifer lereng merapi dibagi menjadi empat zona, yakni (1) zona akuifer bagian utara, (2) zona akuifer bagian tengah, (3) zona akuifer bagian selatan, serta (4) zona akuifer wates dan gumuk pasir. Potensi air tanah tinggi karena terdapat pada daerah cekungan Yogyakarta.

### E. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat didasarkan pada komponen suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2016 terjadi pada bulan November, yaitu sebanyak 508,2 mm. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, November sebesar 89 % dan terendah pada bulan Agustus sebesar 84 %. Tekanan udara rata-rata sebesar 1.014,03 mb dan suhu udara rata-rata 26,71 derajat Celsius (°C). Secara lebih detail, kondisi klimatologi Kota Yogyakarta tahun 2016 berdasarkan komponennya disajikan pada Tabel 2.1.1.E.1.

Tabel 2.1.1.E.1

## Kondisi Klimatologi Kota Yogyakarta Tahun 2016

No	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	24,1-33,0	86	1.014,8	152,0
2	Februari	23,7-31,2	89	1.014,5	323,0
3	Maret	23,9-32,3	89	1.014,8	425,0
4	April	24,2-32,5	88	1.013,9	184,8
5	Mei	24,2-32,5	88	1.013,7	137,8
6	Juni	23,2-31,4	88	1.014,8	296,5
7	Juli	23,1-31,8	86	1.013,9	105,9
8	Agustus	22,6-31,5	84	1.014,3	94,5
9	September	23,1-32,0	85	1.013,9	237,2
10	Oktober	23,5-31,9	87	1.013,4	324,2
11	November	23,5-31,0	89	1.013,4	508,2
12	Desember	23,5-30,8	87	1.012,3	267,8

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017

Kondisi klimatologi di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, perubahan kondisi iklim yang terjadi dari tahun ke tahun di Kota Yogyakarta tidak begitu signifikan. Perubahan paling signifikan pada rentang tahun 2012 – 2016 yaitu pada tahun 2012 dan 2103. Pada tahun 2012, rata-rata suhu udara tertinggi (27,1°C), serta rata-rata kelembaban dan tekanan udara pada kondisi terendah, yaitu 80,18 persen dan 929,71 mb. Sementara itu pada tahun 2013, rata-rata suhu udara terendah (26,8°C), serta rata-rata kelembaban dan tekanan udara pada kondisi tinggi, yaitu 86,20 % dan 1.014,78 mb. Pada kondisi curah hujan, rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2016 yaitu 254,74 mm, sedangkan rata-rata curah hujan terendah pada tahun 2014 sebesar 137,92 mm. Tabel 2.1.1.E.2 menunjukkan perkembangan kondisi klimatologi Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1.1.E.2

## Kondisi Klimatologi Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Tahun	Rerata			
		Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)	Curah Hujan (mm)
1	2012	27,10	80,18	929,71	152,40
2	2013	26,08	86,20	1.014,78	151,08
3	2014	26,30	83,58	997,21	137,92
4	2015	26,55	82,75	998,01	166,58
5	2016	26,71	87,17	1.014,03	254,74

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013 – 2017

## F. Penggunaan Lahan

Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan di DIY memiliki ciri khas wilayah perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari jenis penggunaan lahan yang didominasi lahan terbangun. Penggunaan lahan di kota Yogyakarta pada didominasi oleh perumahan, yaitu seluas 2.101,79 hektar. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), Kota Yogyakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, terutama jasa pelayanan. Sektor jasa mengalami peningkatan luas menurut jenis penggunaan lahannya. Luas lahan untuk kegiatan jasa meningkat dari 279,59 hektar pada tahun 2012 menjadi 281,33 hektar pada tahun 2016. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa. Pemanfaatan lahan untuk perusahaan juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai 309,77 hektar pada tahun 2016. Kondisi sebaliknya pada jenis penggunaan lahan pertanian yang secara umum mengalami penurunan luasan. Lahan pertanian memiliki penurunan luasan yang cukup besar, yakni 111,81 hektar pada tahun 2012 menjadi 101,10 hektar pada tahun 2016 atau menurun 9,58 persen dalam periode 2012 – 2016. Sementara itu, luasan lahan produktif juga menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, mengindikasikan penggunaan/ pemanfaatan lahan yang lebih efektif. Berikut disajikan data penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 pada Tabel 2.1.1.F.1.

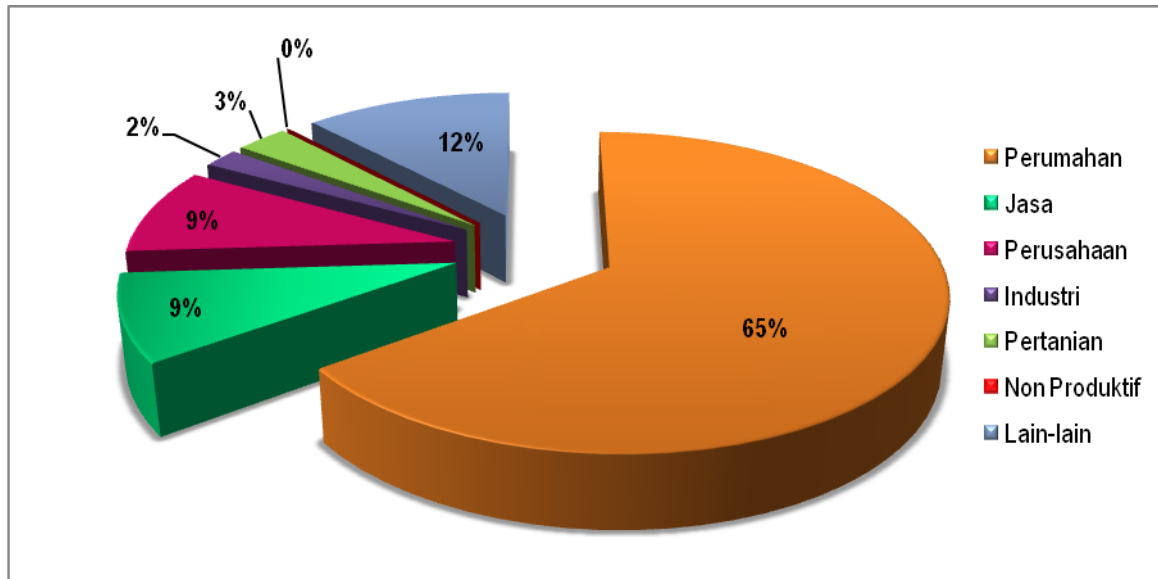
Tabel 2.1.1.F.1

Luas Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2012 – 2016

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							Jumlah
	Perumahan	Jasa	Perusahaan	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-Lain	
2012	2.105,07	279,59	294,19	52,23	111,81	18,94	388,16	3.250
2013	2.100,72	280,57	300,73	52,23	109,15	18,43	388,16	3.250
2014	2.102,12	281,06	303,25	52,23	105,60	17,59	388,16	3.250
2015	2.099,93	281,33	307,99	52,23	102,77	17,59	388,16	3.250
2016	2.101,79	281,33	309,77	52,23	101,10	15,62	388,16	3.250

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013 - 2017

Gambar 2.1.1.F.1 menunjukkan persentase penggunaan lahan pada tahun 2016. Persentase paling besar yaitu perumahan, sebesar 65 persen, dan persentase paling besar kedua yaitu lain-lain sebesar 12 persen. Sementara itu, sektor jasa dan perusahaan sebagai salah satu sektor unggulan di Kota Yogyakarta memiliki persentase luasan penggunaan lahan sebesar 9 persen (jasa) dan 9 persen (perusahaan). Penggunaan lahan pertanian (sebagian besar berupa sawah) memiliki persentase sebesar 3 persen. Sementara itu, dua jenis penggunaan lahan dengan persentase terendah yaitu industri (2 persen) dan lahan non produktif atau tanah kosong (0 persen).



Gambar 2.1.1.F.1

Persentase Luas Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017

## G. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari pengembangan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2029 antara lain:

### 1. Pengembangan Struktur Ruang Kota dan Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota

#### a. Pengembangan struktur ruang kota meliputi:

- 1) Peningkatan fungsi kawasan pusat kota di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan.
- 2) Pengembangan wisata budaya di Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Kotagede.
- 3) Pengembangan kawasan prioritas di Kecamatan Umbulharjo.

#### b. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi:

- 1) Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedontengen, dan Kecamatan Gondomanan.
- 2) Sub pusat kota tersebar di masing-masing kecamatan.
- 3) Pusat pelayanan lingkungan di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman.

### 2. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

#### c. Pengembangan fasilitas angkutan darat, meliputi:

- 1) Terminal penumpang tipe A dan sub terminal barang di Giwangan yang didukung keberadaan ruas jalan arteri jalan lingkar selatan.
- 2) Stasiun angkutan penumpang di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.

d. Pengembangan sistem jaringan jalan, meliputi:

1) Jaringan arteri primer

Pemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yang terdiri atas jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan *ring road* lintas selatan.

2) Jaringan jalan arteri sekunder

a) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yang terdiri atas :

i. Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo.

ii. Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridor Jalan RE Martadinata.

b) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar kota, yang terdiri atas jaringan lintas Kota Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jalan Patangpuluhan.

3) Jembatan

Pembangunan jembatan *fly over* pada persimpangan dengan jalur KA, yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono.

3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

e. Pengembangan sistem jaringan energi, meliputi:

1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

f. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

3) Jaringan pelayanan *feeder*, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

g. Pengembangan sistem drainase, meliputi:

1) Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan rawan genangan.

2) Ketentuan setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan.

3) Penyambungan jaringan pembuangan air hujan.

h. Pengembangan jaringan sumberdaya air (SDA), meliputi:

Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

i. Pengembangan jaringan persampahan, meliputi:

1) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

2) Pengelolaan persampahan cara setempat (tingkat rumah tangga) meliputi pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah.

3) Pengelolaan persampahan cara komunal dengan armada angkutan sampah.

- j. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
  - 1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - 2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - 3) Pengadaan toilet *mobile*, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.
- k. Pengembangan jaringan air bersih, melalui:
  - 1) Pengembangan instalasi air bersih, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - 2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- 4. Pengembangan Kawasan
  - l. Pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
    - 1) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah diarahkan untuk industri yang ramah lingkungan.
    - 2) Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang di kawasan Malioboro dan Kraton; klaster-klaster kawasan pariwisata di kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum; pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan objek dan benda cagar budaya.
    - 3) Kawasan peruntukan permukiman, melalui pengoptimalan fungsi bangunan dan penataan/peningkatan kualitas ruang; peremajaan perumahan di kawasan padat; penataan kawasan kumuh; relokasi dan konsolidasi lahan.
    - 4) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, diarahkan pada pertumbuhan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder, serta penyediaan parkir dan jadwal penyaluran barang.
    - 5) Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi/olahraga, perkantoran, dan pemakaman.
  - m. Pelestarian Citra Kota, meliputi:
    - 1) Sumbu Krapyak Kraton Tugu sebagai jalur kota dengan citra filosofis dan peninggalan budaya..
    - 2) Masjid Besar Kauman, Masjid Mataram Kotagede, Gereja Antonius Kotabaru, Gereja Santo Yusuf Bintaran, dan Kelenteng Gondomanan sebagai citra religio-kultural.
    - 3) Kraton Yogyakarta, Puro Paku Alaman, dan Tugu sebagai citra peninggalan sejarah budaya, dan lain-lain.
  - n. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Non Hijau Kota
  - o. Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki (pedestrian), Angkutan Umum, Parkir, Kegiatan Sektor Informal, dan Ruang Evakuasi Bencana



## H. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kota Yogyakarta memiliki kerentanan terhadap bencana, diantaranya yaitu erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, kebakaran, banjir lahar, banjir genangan, dan longsor. Berikut ini deskripsi tentang bencana yang berpotensi terjadi di Kota Yogyakarta:

### 1. Gempa Bumi (Gempa Tektonik)

Kondisi fisik Kota Yogyakarta secara umum dipengaruhi oleh kondisi fisik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara umum. Wilayah Kota Yogyakarta memiliki beberapa sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan gempa bumi. Gempa Bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 disebabkan adanya gerakan sesar aktif di wilayah DIY yang kemudian disebut sebagai Sesar Kali Opak. Pusat gempa diperkirakan di bagian selatan Kabupaten Bantul. Akibat gempa tersebut, banyak bangunan yang mengalami kerusakan terutama di wilayah Kota Yogyakarta bagian Selatan yaitu Kecamatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Mergangsan, dan Kecamatan Mantriweron.

### 2. Erupsi Gunung Merapi

Keberadaan Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Sleman yang terletak di sebelah utara Kota Yogyakarta memberi pengaruh pada potensi bencana yang mungkin terjadi. Gunung Merapi memiliki aktivitas yang cukup tinggi dan beberapa kali mengalami erupsi yang dampaknya dapat dirasakan hingga wilayah di sekitarnya. Beberapa kejadian erupsi yang terjadi, yakni tahun 1994, 1997, 1998, 2001, 2006, dan 2010 menimbulkan bahaya hingga ke Kota Yogyakarta.

Bahaya letusan gunung Merapi terdiri atas bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung (awan panas). Sedangkan bahaya sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan. Ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kota Yogyakarta akibat aktivitas Gunung Merapi adalah hujan abu, hingga banjir lahar yang juga sering terjadi terutama di sekitar Sungai Code dan Sungai Winongo.

### 3. Banjir

Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Winongo, serta Sungai Belik menjadikan kerentanan yang cukup tinggi akan terjadinya genangan, terutama jika sungai meluap. Hujan dengan intensitas yang tinggi dalam waktu cukup lama dapat mengakibatkan permukiman di bantaran sungai dilanda banjir, terutama jika di bagian hulu sungai-sungai tersebut juga mengalami hujan deras dan lama.

### 4. Longsor Tebing

Kondisi topografi wilayah Kota Yogyakarta secara umum adalah datar. Akan tetapi, terdapat beberapa lokasi yang memiliki kerentanan terhadap bencana longsor. Bencana tanah longsor di Kota Yogyakarta terutama terjadi di beberapa lokasi di bantaran sungai, yang berupa jenis longsor tebing sungai.

## 5. Kebakaran

Bencana kebakaran sering terjadi di Kota Yogyakarta, hampir setiap tahun terjadi bencana kebakaran. Data BPS menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016 tercatat terjadi 14 kejadian kebakaran. Penyebab utama terjadinya bencana kebakaran adalah korsleting jaringan listrik, ledakan kompor dan lainnya. Potensi kejadian bencana kebakaran semakin tinggi akibat permukiman yang begitu padat di Kota Yogyakarta.

### 2.1.2. Aspek Demografi

#### A. Struktur Penduduk

##### 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 menurut data BPS mencapai 417.744 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Menurut kecamatan, jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Umbulharjo (88.667 jiwa atau 21,22 persen), selanjutnya yaitu Kecamatan Gondokusuman (47.160 jiwa atau 11,29 persen). Sementara itu, jumlah penduduk paling rendah yaitu di Kecamatan Pakualaman (9.341 jiwa atau 2,24 persen), selanjutnya yaitu Kecamatan Gondomanan (13.603 jiwa atau 3,26 persen). Tinggi atau rendah jumlah penduduk di Kota Yogyakarta lebih dipengaruhi oleh luas wilayah, di mana Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman dengan jumlah penduduk yang tinggi, memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kecamatan lain. Begitu pula sebaliknya, Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Gondomanan yang berada di bagian tengah Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk yang rendah, memiliki luas wilayah yang lebih kecil. Pola yang sama juga ditunjukkan jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, terjadi peningkatan sebesar 0,88 persen dari tahun 2011. Peningkatan jumlah penduduk lebih besar yaitu pada tahun 2013, yang meningkat 2,18 persen dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, hal yang berbeda terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2014, jumlah penduduk menurun sebesar 0,55 persen dari tahun 2013. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya migrasi penduduk, serta faktor-faktor lainnya. Penurunan jumlah penduduk terjadi pada hampir semua kecamatan, kecuali Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede yang tetap mengalami pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk kembali terjadi pada tahun 2015 dengan peningkatan terbesar dalam periode 2012 – 2015, yaitu 3,01 persen. Selanjutnya, jumlah penduduk pada tahun 2016 meningkat 1,21 persen dari tahun 2015.

Tabel 2.1.2.A.1

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk 2012 – 2016 (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Mantrijeron	31.695	32.383	31.901	32.791	33.103	1,087
2	Kraton	17.561	17.874	17.217	17.547	17.564	0,004
3	Mergangsan	29.448	29.965	29.537	30.275	30.475	0,857
4	Umbulharjo	78.831	81.073	83.031	86.580	88.667	2,940
5	Kotagede	32.052	32.986	33.811	35.285	36.165	3,018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk 2012 – 2016 (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
6	Gondokusuman	45.526	46.335	45.697	46.840	47.160	0,882
7	Danurejan	18.433	18.764	18.454	18.905	19.019	0,782
8	Pakualaman	9.366	9.533	9.164	9.336	9.341	-0,067
9	Gondomanan	13.097	13.327	13.171	13.507	13.603	0,948
10	Ngampilan	16.402	16.696	16.429	16.829	16.932	0,795
11	Wirobrajan	24.969	25.411	25.039	25.662	25.831	0,849
12	Gedongtengen	17.273	17.583	17.549	18.042	18.216	1,329
13	Jetis	23.570	23.992	23.331	23.834	23.911	0,359
14	Tegalrejo	35.789	36.757	36.136	37.271	37.757	1,338
<b>Jumlah</b>		<b>394.012</b>	<b>402.679</b>	<b>400.467</b>	<b>412.704</b>	<b>417.744</b>	<b>1,462</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013 – 2017

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Ukuran laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu parameter kondisi kependudukan di suatu wilayah, serta dapat bermanfaat dalam menentukan proyeksi penduduk maupun berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta pada 2012 – 2016 yaitu 1,46 persen. Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif berarti bahwa jumlah penduduk meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan jumlah penduduk menurun. Menurut tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi pertama yaitu Kecamatan Kotagede (3,02 persen), kemudian tertinggi kedua yaitu Kecamatan Umbulharjo (2,94 persen). Sementara itu, terdapat kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk negatif, yaitu Kecamatan Pakualaman (-0,07). Laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat berkaitan dengan tinggi atau rendahnya pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi penduduk.

## 2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kota Yogyakarta adalah sebesar 95,30 persen, menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Begitu pula *sex ratio* menurut kecamatan, sebagian besar memiliki nilai kurang dari 100 persen. Berbeda dengan kecamatan lainnya, Kecamatan Wirobrajan memiliki *sex ratio* sebesar 102,98 persen, menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sementara itu, *sex ratio* paling rendah dimiliki oleh Kecamatan Ngampilan (87,59 persen). Tabel 2.1.2.A.2 menunjukkan *sex ratio* per kecamatan di Kota Yogyakarta tahun 2016.

Tabel 2.1.2.A.2

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Sex Ratio (%)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Mantrijeron	16.122	16.981	94,94
2	Kraton	8.394	9.170	91,54
3	Mergangsan	14.993	15.482	96,84

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Sex Ratio (%)
		Laki-laki	Perempuan	
4	Umbulharjo	42.989	45.678	94,11
5	Kotagede	18.057	18.108	99,72
6	Gondokusuman	22.876	24.284	94,20
7	Danurejan	9.376	9.643	97,23
8	Pakualaman	4.541	4.800	94,60
9	Gondomanan	6.380	7.223	88,33
10	Ngampilan	7.906	9.026	87,59
11	Wirobrajan	13.105	12.726	102,98
12	Gedongtengen	8.690	9.526	91,22
13	Jetis	11.703	12.208	95,86
14	Tegalrejo	18.713	19.044	98,26
<b>Jumlah</b>		<b>203.845</b>	<b>213.899</b>	<b>95,30</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017

### 3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Angka rata-rata kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta antara tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014 yang menurun bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2013. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta yaitu 12.854 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 yaitu 1,36 persen. Berdasarkan unit kecamatan, Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Gedongtengen merupakan dua kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, melebihi rata-rata Kota Yogyakarta. Kepadatan penduduk paling rendah yaitu di Kecamatan Umbulharjo dan paling rendah kedua yaitu Kecamatan Kotagede. Jumlah penduduk yang besar di kedua kecamatan tersebut juga didukung oleh wilayah yang luas dibandingkan dengan kecamatan lain, sehingga kepadatan penduduk cenderung rendah. Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.1.2.A.3. Berdasarkan lokasinya, kecamatan dengan kepadatan tinggi sebagian besar tersebar di bagian tengah Kota Yogyakarta, di mana sebagai pusat perekonomian. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan rendah tersebar di bagian tenggara dan selatan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1.2.A.3

Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Mantrijeron	12.144	12.407	12.223	12.564	12.683
2	Kraton	12.544	12.767	12.298	12.534	12.546
3	Mergangsan	12.748	12.972	12.787	13.106	13.193
4	Umbulharjo	9.696	9.972	10.213	10.649	10.920
5	Kotagede	10.440	10.745	11.013	11.493	11.780
6	Gondokusuman	11.410	11.613	11.453	11.739	11.820

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
		2012	2013	2014	2015	2016
7	Danurejan	16.757	17.058	16.776	17.186	17.290
8	Pakualaman	14.867	15.132	14.546	14.819	14.827
9	Gondomanan	11.694	11.899	11.760	12.060	12.146
10	Ngampilan	20.002	20.361	20.035	20.523	20.649
11	Wirobrajan	14.268	14.521	14.308	14.664	14.677
12	Gedongtengen	17.993	18.316	18.280	18.794	18.975
13	Jetis	13.865	14.113	13.724	14.020	14.065
14	Tegalrejo	12.299	12.631	12.418	12.808	12.975
<b>Jumlah</b>		<b>12.123</b>	<b>12.390</b>	<b>12.322</b>	<b>12.699</b>	<b>12.854</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013 – 2017

#### 4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/ usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/ tidak produktif.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.1.2.A.4, penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2016 menunjukkan dominasi pada penduduk usia produktif. Penduduk pada kelompok umur 20 – 24 tahun jumlahnya paling banyak, yakni mencapai 51.813 jiwa (12,40 persen), sedangkan penduduk kelompok umur 70 – 74 tahun merupakan yang paling sedikit, yakni 7.414 jiwa (1,77 persen). Apabila dilihat dari kelompok penduduk menurut umur, maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*). Perbandingan kelompok penduduk usia produktif (15-65 tahun) dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun) di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah 35,16 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 35 – 36 orang yang tidak produktif. Angka ketergantungan tersebut dapat dikatakan cukup rendah dalam arti rasio penduduk produktif lebih dominan. Kondisi ini cukup berimbang, antara penduduk laki-laki dan perempuan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.2.A.1.

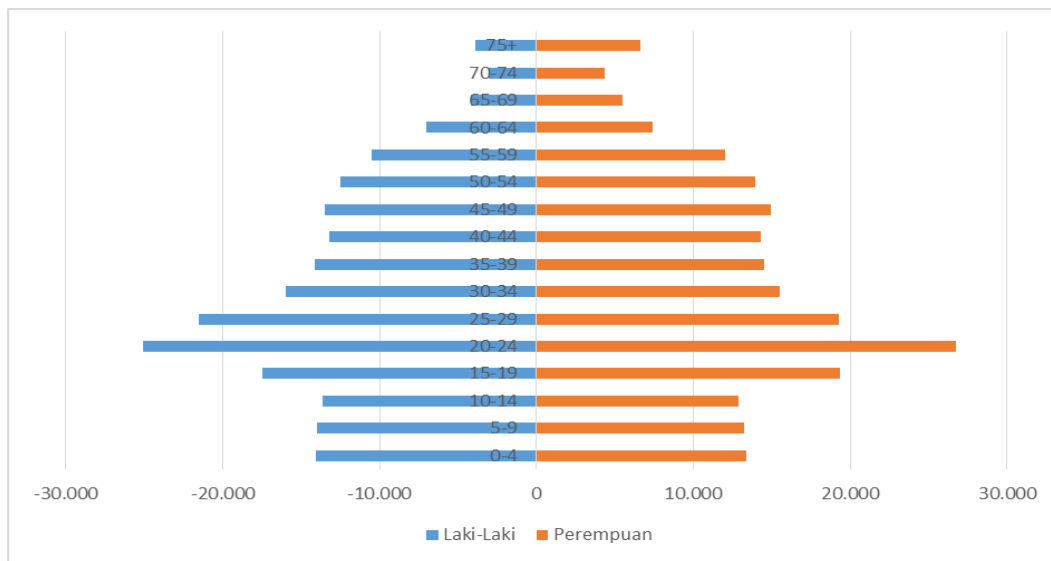
Tabel 2.1.2.A.4

Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	0-4	14.043	13.355	27.398
2	5-9	13.973	13.228	27.201
3	10-14	13.640	12.853	26.493
4	15-19	17.511	19.327	36.838
5	20-24	25.056	26.757	51.813
6	25-29	21.522	19.302	40.824
7	30-34	15.980	15.503	31.483

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
8	35-39	14.157	14.517	28.674
9	40-44	13.232	14.272	27.504
10	45-49	13.526	14.915	28.441
11	50-54	12.530	13.974	26.504
12	55-59	10.493	12.034	22.527
13	60-64	7.059	7.406	14.465
14	65-69	4.192	5.448	9.640
15	70-74	3.047	4.367	7.414
16	75+	3.884	6.641	10.525
<b>Jumlah</b>		<b>203.845</b>	<b>213.899</b>	<b>417.744</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017



Gambar 2.1.2.A.1. Grafik Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## B. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu, terdiri dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Yogyakarta, secara keseluruhan jumlah migrasi keluar lebih banyak dibandingkan dengan migrasi masuk. Pada tahun 2012 dan 2013, jumlah migrasi keluar lebih besar dibandingkan migrasi masuk, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 jumlah migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar. Hal tersebut menunjukkan perubahan tren atau kecenderungan migrasi di Kota Yogyakarta. Migrasi masuk paling tinggi pada tahun 2015 dan paling rendah pada tahun 2013, sementara migrasi keluar paling tinggi pada tahun 2015 dan paling rendah pada tahun 2012. Jumlah tersebut merupakan hasil pencatatan administrasi penduduk. Pertumbuhan rata-rata migrasi pada periode 2012 – 2016 menunjukkan pertumbuhan migrasi masuk sebesar 34,61 persen, sedangkan migrasi keluar sebesar 10,27 persen. Hal ini menunjukkan arus migrasi masuk Kota Yogyakarta yang besar disebabkan daya tarik yang tinggi dari Kota Yogyakarta, baik dari aspek ekonomi, sosial,

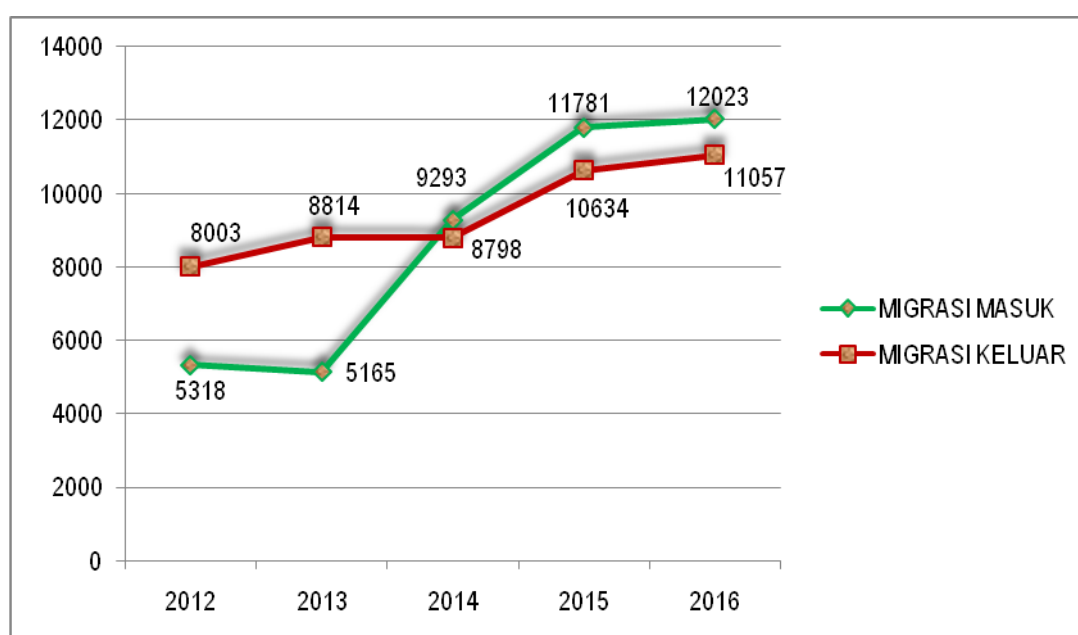
maupun budaya, atau pun dari aspek kenyamanan hunian. Akan tetapi, diperlukan kebijakan terkait migrasi ini, sehingga perencanaan hunian, fasilitas, transportasi, dan lainnya dapat dilakukan dengan lebih baik dengan menunjung nilai keistimewaan. Secara lebih rinci data migrasi dan grafik fluktuasi migrasi disajikan pada Tabel dan Gambar 2.1.2.B.1.

Tabel 2.1.2.B.1

Migrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Migrasi	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Migrasi Masuk	Jiwa	5.318	5.165	9.293	11.781	12.023	26,46
2.	Migrasi Keluar	Jiwa	8.003	8.814	8.798	10.634	11.057	8,69
<b>Jumlah</b>		<b>Jiwa</b>	<b>13.321</b>	<b>13.979</b>	<b>18.091</b>	<b>22.415</b>	<b>23.080</b>	<b>24,39</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017



Gambar 2.1.2.A.1. Grafik Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di wilayah Kota Yogyakarta. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha.lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian; (2) Sektor sekunder

berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; serta (3) Sektor tersier berupa jasa. Tabel 2.1.2.C.1 menunjukkan jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 – 2015.

Tabel 2.1.2.C.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2012 – 2015

No	Lapangan Pekerjaan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Agriculture (Pertanian)	Jiwa	756	471	1.314	3.379	NA
2	Manufacture (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, air dan Bangunan/ Kontruksi)	Jiwa	30.897	31.753	40.462	34.726	NA
3	Service (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan)	Jiwa	169.987	162.512	174.212	184.213	NA
<b>Jumlah</b>		<b>Jiwa</b>	<b>201.640</b>	<b>194.736</b>	<b>216.168</b>	<b>222.318</b>	<b>NA</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013 – 2016; Statistik Daerah Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan data di atas, lapangan pekerjaan bidang perdagangan, jasa dan keuangan mendominasi jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2015, sebesar 82,86 % pada tahun 2015. Sementara itu, pada tahun 2015 penduduk yang bekerja di sektor primer (pertanian) sebesar 1,52 % dan sektor sekunder (industri manufaktur) sebesar 15,62 %. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebesar 3,42 % dari tahun 2013 ke 2012. Sementara itu, peningkatan jumlah terjadi pada tahun 2014, yaitu 11,01 % dari tahun 2013; dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 2,84 %. Jumlah penduduk yang bekerja pada masing-masing sektor juga mengalami fluktuasi dengan pola yang sama. Pada sektor pertanian, meskipun memiliki persentase yang kecil dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor pertanian memiliki pertumbuhan paling besar, terutama pada tahun 2014 yang mencapai lebih dari 100 %.

#### D. Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kota Yogyakarta, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Kategori lainnya dapat berupa Khonghucu maupun kepercayaan lain. Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta beragama Islam (82,84 persen), berikutnya agama Katolik (10,27 persen). Sementara itu, persentase paling kecil yaitu kepercayaan lain sebesar 0,01 persen. Persentase lainnya yaitu Kristen (6,44 persen), Budha (0,32 persen), dan Hindu (0,13 persen). Semua kecamatan memiliki penduduk dengan agama yang beragam, sementara kategori lainnya tidak terdapat di seluruh kecamatan (beberapa kecamatan saja). Dengan adanya keberagaman agama di Kota Yogyakarta, diharapkan kerukunan antar umat beragama dapat senantiasa terjaga. Tabel Tabel 2.1.2.D.1 menunjukkan distribusi persentase jumlah penduduk menurut agama yang dianut pada tiap kecamatan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016.



Tabel 2.1.2.D.1

Persentase Penduduk menurut Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2016

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Mantrijeron	83,75	3,95	12,00	0,08	0,22	0,01
2.	Kraton	85,22	2,59	12,09	0,10	0,00	0,00
3.	Mergangsan	84,33	6,10	9,19	0,17	0,20	0,01
4.	Umbulharjo	88,63	4,17	6,95	0,08	0,15	0,00
5.	Kotagede	93,78	2,75	3,32	0,09	0,07	0,00
6.	Gondokusuman	75,23	12,71	11,49	0,28	0,27	0,02
7.	Danurejan	82,75	6,34	10,52	0,09	0,28	0,02
8.	Pakualaman	78,17	6,67	14,56	0,29	0,32	0,00
9.	Gondomanan	73,56	11,43	13,55	0,09	1,37	0,00
10.	Ngampilan	85,59	5,29	8,56	0,13	0,44	0,00
11.	Wirobrajan	81,34	4,30	13,98	0,14	0,23	0,00
12.	Gedongtengen	76,91	8,29	13,65	0,13	1,00	0,02
13.	Jetis	75,12	9,80	14,29	0,08	0,66	0,04
14.	Tegalrejo	81,24	8,42	10,00	0,10	0,22	0,02
<b>Persentase (%)</b>		<b>82,84</b>	<b>6,44</b>	<b>10,27</b>	<b>0,13</b>	<b>0,32</b>	<b>0,01</b>

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, kemiskinan, kriminalitas); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha. Total PDRB Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan total PDRB di DIY. Persentase kontribusi PDRB Kota Yogyakarta terhadap PDRB DIY terus meningkat, yaitu sekitar lebih dari 26 persen. Sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kota Yogyakarta, sedangkan nilai PDRB paling rendah pada sektor pertambangan dan penggalan. Tabel 2.2.1.A.1 menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016. Berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2016, sektor informasi dan komunikasi memiliki

kontribusi paling tinggi, yaitu 13,94 persen dengan nilai 3,28 triliun rupiah, disusul sektor industri pengolahan (13,27 persen dengan nilai 3,12 triliun rupiah) serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (11,64 persen dengan nilai 2,74 triliun rupiah). Ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi sumbangan pada nilai PDRB Kota Yogyakarta. Sementara itu, tiga sektor yang memiliki kontribusi paling rendah yaitu pertambangan dan penggalian (0,004 persen dengan nilai 856,14 juta rupiah); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,14 persen dengan nilai 33,53 miliar rupiah); serta pertanian, kehutanan dan perikanan (0,16 persen dengan nilai 36,38 miliar rupiah).

Tabel 2.2.1.A.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)					Kontribusi 2016 (%)
		2012	2013	2014	2015*	2016**	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.709,06	36.100,01	35.733,80	36.052,73	36.377,25	0,155
B	Pertambangan dan Penggalian	837,12	839,01	850,01	851,20	856,14	0,004
C	Industri Pengolahan	2.630.976,55	2.813.952,74	2.943.904,47	2.996.573,36	3.123.936,80	13,272
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45.056,66	47.598,97	50.700,55	51.794,65	58.012,78	0,246
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.166,76	30.711,95	31.963,43	32.797,84	33.527,34	0,142
F	Konstruksi	1.526.571,76	1.600.097,49	1.674.189,00	1.722.508,07	1.783.818,87	7,578
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.326.260,65	1.407.238,62	1.480.894,06	1.569.644,79	1.656.673,72	7,038
H	Transportasi dan Pergudangan	785.335,19	815.841,32	838.086,92	870.914,46	895.462,92	3,804
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.183.269,65	2.320.365,42	2.444.064,84	2.589.749,81	2.740.135,53	11,641
J	Informasi dan Komunikasi	2.654.507,77	2.779.291,38	2.898.953,30	3.035.921,59	3.280.050,08	13,935
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.077.853,46	1.196.258,93	1.273.749,79	1.374.111,34	1.446.289,76	6,144
L	Real Estate	1.782.655,30	1.848.546,31	1.972.048,79	2.074.601,90	2.167.878,81	9,210
M,N	Jasa Perusahaan	238.288,91	245.485,72	259.521,02	278.211,87	285.922,72	1,215
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.729.732,87	1.813.729,60	1.914.203,73	2.021.480,12	2.139.899,80	9,091
P	Jasa Pendidikan	1.889.249,14	1.960.166,16	2.088.605,79	2.235.519,73	2.313.155,32	9,827
Q	Jasa Kesehatan	721.038,85	766.206,62	818.611,50	879.118,73	920.126,76	3,909

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)					Kontribusi 2016 (%)
		2012	2013	2014	2015*	2016**	
	dan Kegiatan Sosial						
S,T,U	Jasa Lainnya	531.565,10	557.127,40	581.682,55	623.162,34	655.987,18	2,787
<b>PDRB Kota Yogyakarta ADHK</b>		<b>19.189.074,78</b>	<b>20.239.557,65</b>	<b>21.307.763,56</b>	<b>22.393.014,53</b>	<b>23.538.101,79</b>	
<b>PDRB Provinsi DIY ADHK</b>		<b>71.702.449,00</b>	<b>75.627.450,00</b>	<b>79.536.000,00</b>	<b>83.474.000,00</b>	<b>87.688.000,00</b>	

Keterangan:

\*) sementara

\*\*\*) sangat sementara

Sumber:

1. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2017
3. Hasil Olah, 2017

Rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 menunjukkan nilai yang positif untuk masing-masing sektor, berarti secara umum terdapat peningkatan nilai PDRB pada masing-masing sektor dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB per tahun Kota Yogyakarta yaitu 5,27 %, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB per tahun DIY (5,20 %). Menurut sektor, rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu pengadaan listrik dan gas (7,33 %); selanjutnya yaitu jasa keuangan dan asuransi (6,95 %) serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (6,65 %). Hal tersebut menunjukkan kecenderungan sektor jasa yang semakin meningkat. Sektor informasi dan komunikasi sebagai sektor unggulan juga memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB di atas rata-rata Kota Yogyakarta, yaitu 6,53 %. Sementara itu, pertumbuhan paling rendah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,51 %) serta sektor pertambangan dan penggalian (0,60 %). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang juga termasuk memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB yang rendah dibandingkan sektor lainnya (2,78 %).

Berdasarkan pertumbuhan PDRB per tahun, beberapa sektor mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor industri pengolahan pada tahun 2012 (-2,87 %); serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2014 (-1,01 %). Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika per tahun pada masing-masing sektor. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa mulai mengalami pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan mulai tahun 2012. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 didominasi oleh sektor-sektor tersier. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, sektor primer menjadi sektor dengan kontribusi terendah di Kota Yogyakarta disebabkan semakin minimnya lahan pertanian maupun perikanan, yang semakin banyak dikonversi menjadi lahan terbangun. Pertumbuhan PDRB di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 2.2.1.A.2 dan Gambar 2.2.1.A.1. Berdasarkan grafik pada gambar tersebut, terlihat bahwa PDRB Kota Yogyakarta semakin meningkat, meskipun dengan pertumbuhan per tahun yang relatif menurun sejak tahun 2013, sementara peningkatan pertumbuhan terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2013, serta pada 2015 – 2016.

Tabel 2.2.1.A.2

Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata Pertumbuhan PDRB per Tahun (%)
		2012	2013	2014	2015*	2016**	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,66	1,09	-1,01	0,89	0,90	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,23	1,31	0,14	0,58	0,60
C	Industri Pengolahan	-2,87	6,95	4,62	1,79	4,25	2,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,32	5,64	6,52	2,16	12,01	7,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	1,81	4,07	2,61	2,22	2,78
F	Konstruksi	4,70	4,82	4,63	2,89	3,56	4,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	6,11	5,23	5,99	5,54	5,84
H	Transportasi dan Pergudangan	1,75	3,88	2,73	3,92	2,82	3,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,28	5,33	5,96	5,81	6,11
J	Informasi dan Komunikasi	10,89	4,70	4,31	4,72	8,04	6,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	10,99	6,48	7,88	5,25	6,95
L	Real Estate	7,39	3,70	6,68	5,20	4,50	5,49
M,N	Jasa Perusahaan	8,95	3,02	5,72	7,20	2,77	5,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	4,86	5,54	5,60	5,86	5,83
P	Jasa Pendidikan	5,81	3,75	6,55	7,03	3,47	5,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	6,26	6,84	7,39	4,66	6,65
S,T,U	Jasa Lainnya	5,33	4,81	4,41	7,13	5,27	5,39
<b>Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta</b>		<b>5,40</b>	<b>5,47</b>	<b>5,28</b>	<b>5,09</b>	<b>5,11</b>	<b>5,27</b>
<b>Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY</b>		<b>5,37</b>	<b>5,47</b>	<b>5,17</b>	<b>4,95</b>	<b>5,05</b>	<b>5,20</b>

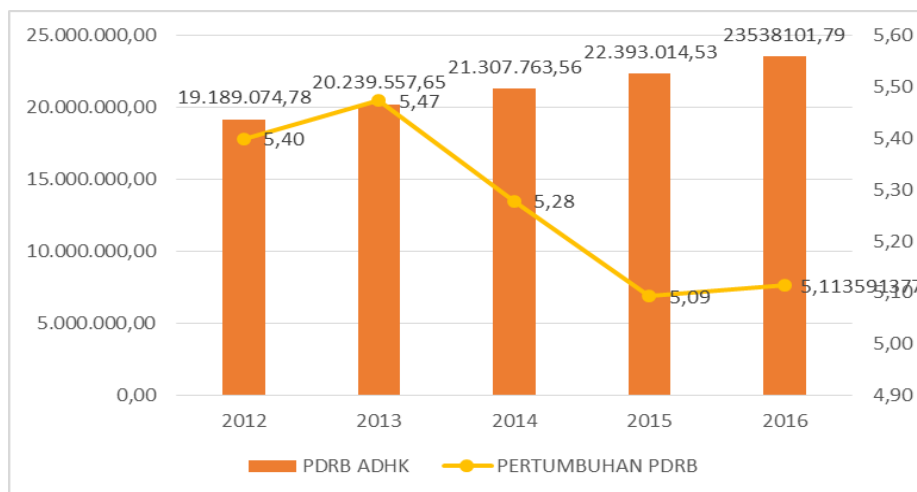
Keterangan:

\*) sementara

\*\*) sangat sementara

Sumber:

1. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2016
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016
3. Hasil Olahan, 2017



Gambar 2.2.1.A.1. Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## B. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun yang merupakan salah satu indikator yang berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah. Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut berakibat pada turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Tabel 2.2.1.A.3 menunjukkan persentase inflasi di Kota Yogyakarta menurut kelompok pengeluaran dan tahun.

Tabel 2.2.1.A.3

Inflasi Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2012 – 2016

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Bahan Makanan	%	8,10	12,31	7,70	4,95	4,77	-12,40
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	6,90	8,15	2,95	5,04	3,84	-13,63
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	2,99	5,18	8,92	4,41	1,64	-13,94
4	Sandang	%	3,56	0,00	3,61	5,87	3,04	-3,87
5	Kesehatan	%	1,93	3,08	5,49	4,21	4,17	21,24
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	1,43	3,17	2,37	1,36	2,40	13,82
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	1,30	10,45	9,36	2,51	-2,06	12,00
<b>Inflasi Kota Yogyakarta</b>		%	<b>4,31</b>	<b>7,32</b>	<b>6,59</b>	<b>3,09</b>	<b>2,29</b>	<b>-14,62</b>
<b>Inflasi Nasional</b>		%	<b>4,30</b>	<b>8,38</b>	<b>8,36</b>	<b>3,35</b>	<b>3,02</b>	<b>-8,46</b>

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank Indonesia, 2012 - 2016)

Laju inflasi Kota Yogyakarta secara umum lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional. Pada periode 2012 – 2016, laju inflasi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, laju inflasi sebesar 4,31 persen meningkat menjadi 7,32 persen pada tahun 2013. Inflasi tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu pada tahun 2013, sejalan dengan inflasi pada tingkat nasional. Kemudian terjadi penurunan secara beruntun, yaitu menjadi 6,59 persen pada tahun 2014; 3,91 persen pada tahun 2015; dan 2,29 persen pada tahun 2016.

Pertumbuhan rata-rata per tahunnya yaitu -14,62 persen. Pertumbuhan rata-rata per tahun paling tinggi yaitu pada kelompok pengeluaran kesehatan (21,24 persen), selanjutnya yaitu pendidikan, rekreasi dan olahraga (13,82 persen). Kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang nilai inflasi tertinggi pada tahun 2016, yaitu 4,77 persen. Kelompok pengeluaran bahan makanan juga memiliki nilai inflasi tertinggi pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014, inflasi tertinggi pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan; sedangkan pada tahun 2015 yaitu kelompok pengeluaran sandang. Sementara itu, inflasi terendah pada tahun 2016 yaitu pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan (-2,06 persen). Pertumbuhan rata-rata per tahun paling rendah yaitu kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (-13,94 persen).

### C. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dimana jumlah penduduk berbanding terbalik dengan jumlah PDRB per kapita, semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Seperti nilai PDRB, Kota Yogyakarta memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita DIY. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Yogyakarta sebesar 56,35 juta rupiah; sementara PDRB per kapita DIY sebesar 23,57 juta rupiah (41,82 persen dari Kota Yogyakarta). Berdasarkan data tahun 2016, PDRB per kapita Kota Yogyakarta tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi (13,94 persen); selanjutnya yaitu sektor industri pengolahan (13,27 persen), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (11,64 persen). Tiga sektor dengan kontribusi terendah pada PDRB per kapita yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,004 persen); sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,142 persen); serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,154 persen).

Tabel 2.2.1.A.4

PDRB ADHK per Kapita menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,091	0,090	0,089	0,087	0,087	-0,991
B	Pertambangan dan Penggalian	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-0,881
C	Industri Pengolahan	6,677	6,988	7,351	7,261	7,478	2,903
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,114	0,118	0,127	0,126	0,139	5,064
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,077	0,076	0,080	0,079	0,080	1,206
F	Konstruksi	3,874	3,974	4,181	4,174	4,270	2,479
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,366	3,495	3,698	3,803	3,966	4,190
H	Transportasi dan Pergudangan	1,993	2,026	2,093	2,110	2,144	1,839
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	5,541	5,762	6,103	6,275	6,559	4,314

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	Minum						
J	Informasi dan Komunikasi	6,737	6,902	7,239	7,356	7,852	3,922
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,736	2,971	3,181	3,330	3,462	6,081
L	Real Estate	4,524	4,591	4,924	5,027	5,189	3,513
M,N	Jasa Perusahaan	0,605	0,610	0,648	0,674	0,684	3,165
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,390	4,504	4,780	4,898	5,123	3,944
P	Jasa Pendiidkan	4,795	4,868	5,215	5,417	5,537	3,687
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,830	1,903	2,044	2,130	2,203	4,754
S,T,U	Jasa Lainnya	1,349	1,384	1,453	1,510	1,570	3,872
<b>PDRB per Kapita Kota Yogyakarta ADHK</b>		<b>48,702</b>	<b>50,262</b>	<b>53,207</b>	<b>54,259</b>	<b>56,346</b>	<b>3,722</b>
<b>PDRB per Kapita Provinsi DIY ADHK</b>		<b>20,184</b>	<b>21,038</b>	<b>21,868</b>	<b>22,688</b>	<b>23,566</b>	<b>3,949</b>

Sumber:

1. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Tabel 2.2.1.A.4 menunjukkan besaran PDRB per kapita dan pertumbuhan rata-rata per tahun. Secara umum, pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB per kapita Kota Yogyakarta yaitu 3,72 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan DIY yang memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB per kapita sebesar 3,95 persen. Masing-masing sektor memiliki perkembangan PDRB per kapita yang berbeda-beda. Pertumbuhan rata-rata paling tinggi dimiliki sektor jasa keuangan dan asuransi (6,08 persen); selanjutnya yaitu sektor pengadaan listrik dan gas (5,06 persen) serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (4,75 persen). Pertumbuhan rata-rata paling rendah dimiliki oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (-0,99 persen) serta pertambangan dan penggalian (-0,88 persen). Kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan PDRB per kapita negatif, yang berarti nilai PDRB per kapita terus menurun. Sementara itu, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain, yaitu sebesar 1,21 persen per tahun. Sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan nilai PDRB per kapita yang rendah menunjukkan pertumbuhan nilai PDRB yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan nilai PDRB yang jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk.

#### D. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 – 1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1

maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

- a) Indeks Gini < 0,3 = ketimpangan rendah
- b) 0,3=< Indeks Gini <=0,5 = ketimpangan sedang (moderat)
- c) Indeks Gini >0,5 = ketimpangan tinggi

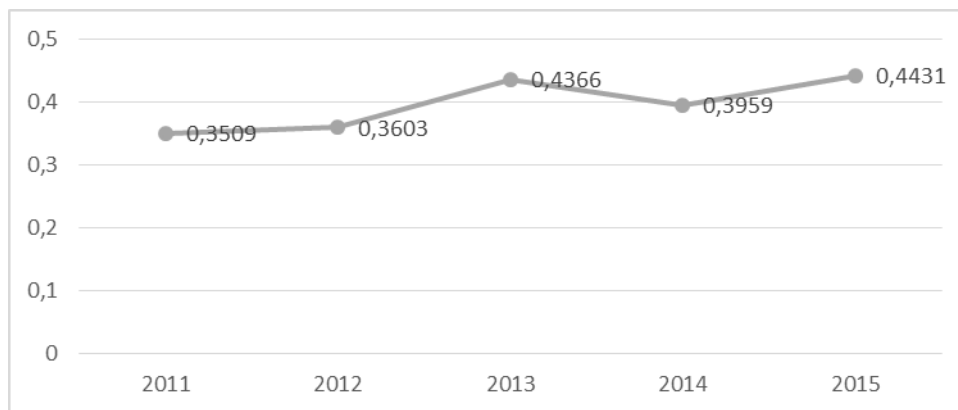
0-18Tabel 2.2.1.A.5

Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Indeks Gini	0,3603	0,4366	0,3959	0,4431	0,4214	4,38
<b>Kriteria Ketimpangan</b>	<b>Moderat</b>	<b>Moderat</b>	<b>Moderat</b>	<b>Moderat</b>	<b>Moderat</b>	

Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2016 (BPS Kota Yogyakarta, 2014 – 2017)

Tabel 2.2.1.A.5 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Yogyakarta memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2012 – 2016. Indeks gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2012 – 2016 secara umum mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,38 persen per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa semakin terjadi ketimpangan pendapatan penduduk, dimana peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20 persen teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40 persen terbawah. Meskipun demikian, kategori ketimpangan pendapatan Kota Yogyakarta masih tergolong dalam kategori sedang (moderat). Berikut Gambar 2.2.1.A.2 menunjukkan perkembangan nilai Indeks Gini Kota Yogyakarta.



6Gambar 2.2.1.A.2. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### E. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia digunakan untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan versi Bank Dunia, pendapatan penduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu (a) kelompok 40 persen berpendapatan terendah, (b) 40 persen berpendapatan menengah, dan (c) 20 persen berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian



pendapatan yang dapat dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Ketimpangan rendah: 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- b) Ketimpangan sedang (moderat): 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 – 17 persen jumlah pendapatan
- c) Ketimpangan tinggi: 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan.

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menikmati lebih dari sama dengan 17 persen dari total pendapatan yang ada. Tabel 2.2.1.A.6 menunjukkan persentase pendapatan menurut kelompok penghasilan penduduk versi Bank Dunia.

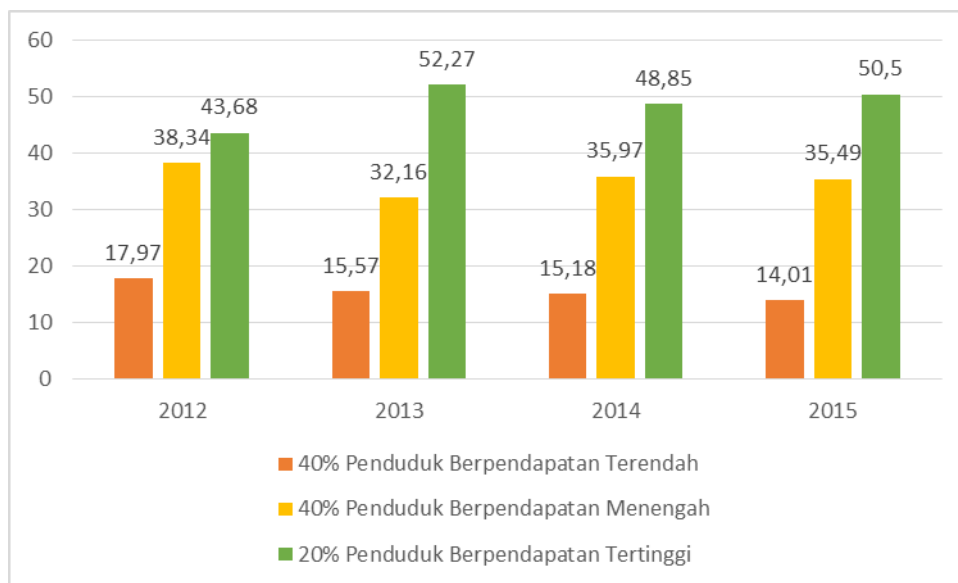
Tabel 2.2.1.A.6

Indikator Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Kelompok Penduduk	Persentase Pendapatan (%)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	40% Penduduk Berpendapatan Terendah	17,97	15,57	15,18	14,01	NA	-7,96
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	38,34	32,16	35,97	35,49	NA	-2,54
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	43,68	52,27	48,85	50,50	NA	4,95
<b>Kriteria Ketimpangan</b>		<b>Rendah</b>	<b>Moderat</b>	<b>Moderat</b>	<b>Moderat</b>		

Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahu 2012, 2013, dan 2014 (BPS Kota Yogyakarta, 2013, 2014, 2015), diolah

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memiliki persentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata adalah -7,96 persen per tahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah ada pada kategori ketimpangan rendah (17,97 persen). Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013 persentase tersebut menurun menjadi 15,57 persen. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada tahun 2014 menjadi 15,18 persen dan pada tahun 2015 menjadi 14,01 persen. Sementara itu, kategori 40% penduduk berpendapatan menengah juga menunjukkan kecenderungan persentase yang menurun (pertumbuhan rata-rata -2,54 persen per tahun), sedangkan kategori 20% penduduk berpendapatan tinggi cenderung meningkat (pertumbuhan rata-rata 4,95 persen per tahun). Dengan demikian, Kota Yogyakarta termasuk pada kategori ketimpangan moderat berdasarkan indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia.



7Gambar 2.2.1.A.3. Grafik Persentase Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan antara penduduk dengan pendapatan 40 persen terbawah dengan penduduk yang berpendapatan 20 persen teratas tidak sebanding, dimana pertumbuhan penduduk dengan penghasilan 20 persen teratas lebih cepat. Hal tersebut menunjukkan pembangunan yang dilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, hal ini patut menjadi perhatian karena besarnya perbedaan pendapatan oleh kelompok-kelompok penduduk yang ada mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang semakin besar.

#### F. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan wilayah adalah indeks Williamson. Perhitungan indeks Williamson Kota Yogyakarta didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Semakin indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan pembangunan ekonomii semakin besar. Hasil pengukuran dari Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- $IW < 0,4$  = tingkat ketimpangan rendah
- $0,4 < IW < 0,5$  = tingkat ketimpangan sedang (moderat)
- $IW > 0,5$  = tingkat ketimpangan tinggi.

Nilai indeks Williamson Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.2.1.A.7. Secara umum, Kota Yogyakarta memiliki kategori ketimpangan wilayah yang tinggi menurut indeks Williamson, yaitu 0,505 (lebih dari 0,5) pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata indeks Williamson selama rentang waktu 2012 – 2015 adalah sebesar -0,05 persen per tahun, yang menunjukkan tren penurunan indeks Williamson. Indeks Williamson Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebesar 0,506, meningkat sebesar 1,38 persen menjadi 0,513 pada tahun 2013. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,78 persen menjadi 0,517. Pada tahun 2015, indeks Williamson Kota Yogyakarta menurun cukup tajam menjadi 0,505. Kecenderungan indeks Williamson

yang menurun diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik (ketimpangan wilayah semakin rendah). Ketimpangan wilayah yang tinggi di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sebaran PDRB per kapita pada tingkat kecamatan di Kota Yogyakarta tidak merata antar kecamatan.

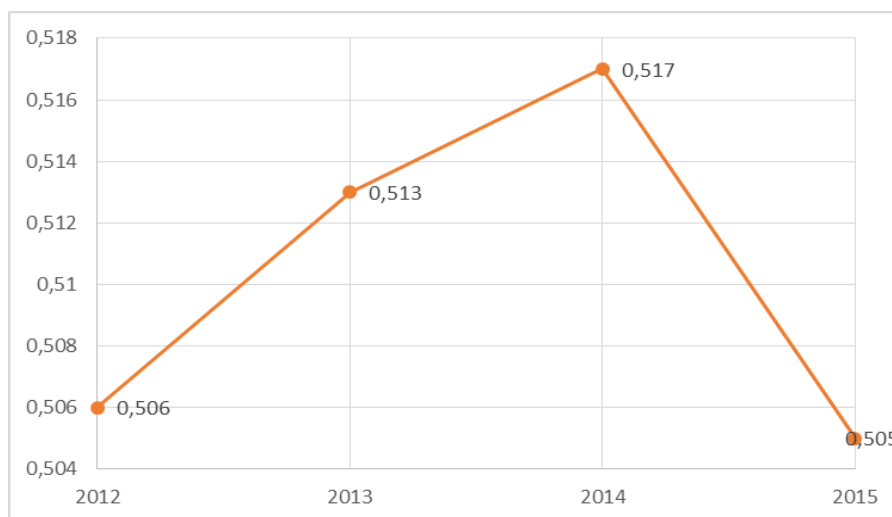
Tabel 2.2.1.A.7

Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Indeks Williamson (%)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Indeks Williamson	0,506	0,513	0,517	0,505	NA	-0,05
<b>Kategori Ketimpangan</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>		

Sumber: Hasil Olahan, 2017

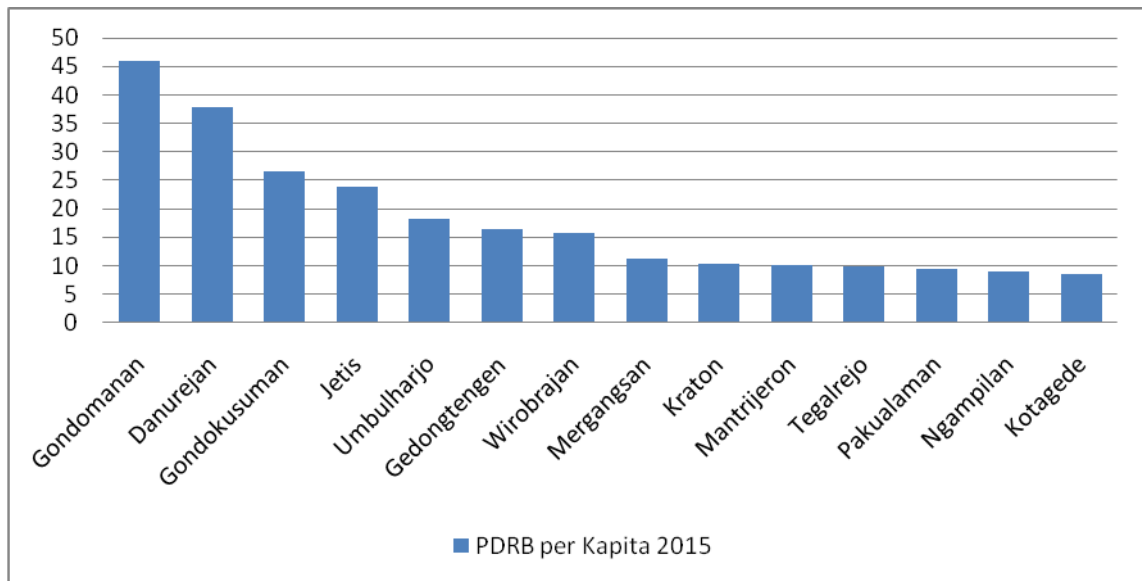
Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang maju secara ekonomi, tetapi masih terdapat daerah-daerah yang relatif tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin melebar. Grafik fluktuasi indeks Williamson Kota Yogyakarta ditunjukkan Gambar 2.2.1.A.4.



8Gambar 2.2.1.A.4. Grafik Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015

Sumber: BPS, 2016, Hasil Olahan, 2017

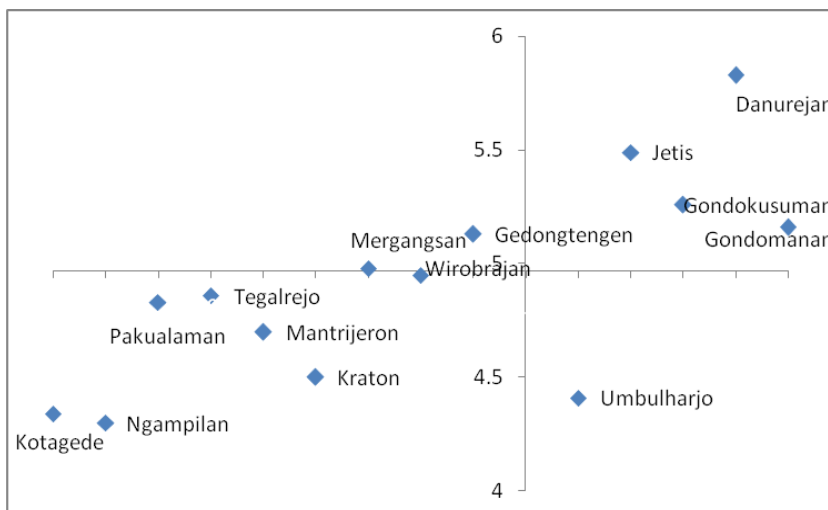
Ketimpangan wilayah dapat dideteksi dengan membandingkan PDRB per kapita dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Data PDRB per kapita kecamatan tahun 2015 menunjukkan 3 kecamatan dengan PDRB perkapita tertinggi adalah Kecamatan Gondodmanan, Danurejan dan Gondokusuman. Sedangkan 3 kecamatan dengan PDRB per kapita terendah adalah Pakualaman, Ngampilan dan Kotagede.



Untuk melihat sektor dominan yang ada di Kecamatan dapat dilakukan dengan analisis Location Quotient (LQ). Analisis LQ masih mendasarkan perhitungan berdasarkan PDRB per kapita kecamatan dengan basis 9 sektor. Hasil analisis LQ menunjukkan 3 kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi mempunyai sektor unggulan pada sektor tertier yaitu jasa-jasa, perdagangan hotel dan restoran, serta keuangan, jasa perusahaan dan sewa. Untuk 3 kecamatan dengan pdrb per kapita terendah mempunyai sektor unggulan pada sektor industri pengolahan serta listrik gas dan air bersih.

Untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan Ekonomi masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta dapat diketahui dengan menggunakan analisis tipologi Klassen. Pada dasarnya Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah.

Pada tahun 2015, Kecamatan yang ada di kuadran I adalah Kecamatan Danurejan, Jetis, Gondokusuman dan Gondomanan. Kecamatan pada kuadran I adalah kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh. Kecamatan di kuadran I mempunyai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita kota Yogyakarta. Kecamatan yang ada di kuadran II hanya kecamatan Umbulharjo. Kecamatan pada kuadran II mempunyai pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari kota Yogyakarta tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Kecamatan yang ada pada kuadran III adalah kecamatan Mergangsan dan Gedongtengen. Kecamatan pada kuadran III adalah kecamatan berkembang cepat, yaitu kecamatan dengan pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding dengan angka di Kota Yogyakarta. Kecamatan yang ada pada kuadran IV adalah kecamatan Wirobrajan, Tegalrejo, Pakualaman, Mantrijeron, Kraton, Ngampilan dan Kotagede. Kecamatan pada kuadran IV adalah kecamatan relatif tertinggal, yaitu kecamatan dengan pertumbuhan tinggi dan tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding dengan angka di Kota Yogyakarta.



9Gambar 2.2.1.A.4. Tipologi Klassen Kota Yogyakarta Tahun 2015

Sumber: BPS, 2016, Hasil Olahan, 2017

### G. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Yogyakarta yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2012, garis kemiskinan Kota Yogyakarta setara Rp. 333.232/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2013 setara Rp Rp 353.602/kapita/bulan, meningkat lagi menjadi Rp 366.520/kapita/bulan pada tahun 2014. Kota Yogyakarta memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan pada tingkat DIY. Selama rentang tahun 2012 – 2016, persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan 0,46 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin yang semakin menurun. Pada tahun 2012, penduduk miskin sebesar 9,38 persen, terus berkurang menjadi 8,82 persen pada tahun 2013 dan 8,67 persen pada tahun 2014. Persentase jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2016 menjadi 7,70 persen, sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 8,61 persen. Pada tahun 2016, persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 92,30 persen. Tabel 2.2.1.A.8 menunjukkan data garis kemiskinan, penduduk miskin, dan penduduk diatas garis kemiskinan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tingkat DIY.

Tabel 2.2.1.A.8

Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kota Yogyakarta</b>						
Garis Kemiskinan	Rp/kapita/bulan	333.232	353.602	366.520	383.966	401.193
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	37,40	35,60	36,60	36	32,06
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Persen	9,38	8,82	8,67	8,75	7,70
<b>Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan</b>	<b>Persen</b>	<b>90,62</b>	<b>91,18</b>	<b>91,33</b>	<b>91,39</b>	<b>92,30</b>
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>						
Garis Kemiskinan	Rp/kapita/bulan	270.110	303.843	321.056	347.721	360.169
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	565,7	541,9	532,59	485,56	488,83
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Persen	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10
<b>Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan</b>	<b>Persen</b>	<b>84,12</b>	<b>84,97</b>	<b>85,45</b>	<b>86,84</b>	<b>86,90</b>

Sumber :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2013, 2014, 2015, 2017
2. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013, 2014, 2015, 2017
3. Bappeda Kota Yogyakarta, 2017

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan pada tingkat DIY. Hal tersebut juga mengindikasikan persentase jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan DIY. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan DIY juga menunjukkan tren yang positif, berarti persentase penduduk miskin semakin menurun. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta sudah banyak berhasil, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang kehendaki. Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun terakhir juga menunjukkan fluktuasi, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta perlu dievaluasi dan dioptimalkan. Sedangkan perbandingan jumlah penduduk miskin dari data JPS disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.1.A.9

Perbandingan penduduk miskin versi BPS dan JPS

TAHUN	BPS			JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL			DIY		NASIONAL
	∑ Penduduk Miskin	∑ Penduduk	%	∑ Penduduk Miskin	∑ Penduduk	%	∑ Penduduk Miskin	%	%
2012	37.600	394.012	9,54	68.188	427.591	15,95	565.350	15,83	11,66
2013	35.516	402.679	8,82	64.699	406.660	15,91	541.900	15,03	11,47
2014	35.006	400.467	8,67	60.230	413.936	14,60	532.590	14,55	11,25
2015	36.112	412.704	8,75	60.195	409.487	14,70	550.230	14,9	11,22
2016	32.060	416.363	7,70	60.215	411.282	14,64	494.940	13,34	10,70

Sumber: Badan perencanaan Pembangunan Daerah, 2017

## H. Angka Kriminalitas

Kriminalitas termasuk variabel yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat menjadi indikator tidak sejahteranya masyarakat. Jadi terdapat hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kriminalitas yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan, sehingga angka kriminalitas harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Berikut adalah angka kriminalitas Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 2.2.1.A.10

Tabel 2.2.1.A.10

Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	457	2.078	1.956	2002	1640
Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282
<b>Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk</b>	<b>Kasus</b>	<b>10,69</b>	<b>51,1</b>	<b>47,25</b>	<b>48,89</b>	<b>39,88</b>

Sumber: Poltabes Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016

Angka kriminalitas yang dimaksud meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk pada rentang tahun 2012 – 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, angka kriminalitas sebesar 10,69 meningkat tajam pada tahun 2013 menjadi 51,1, sekaligus sebagai angka kriminalitas tertinggi pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2014, angka kriminalitas menurun menjadi 47,25, kemudian meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 48,89, dengan jumlah tindak kriminal yang meningkat pula. Pada tahun 2016, terjadi penurunan jumlah tindak kriminal dan juga angka kriminal menurun menjadi 39,88. Angka kriminalitas ini perlu ditekan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan.

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

### A. Pendidikan

#### 1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel 2.2.2.A.1 menyajikan Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 .

Tabel 2.2.2.A.1

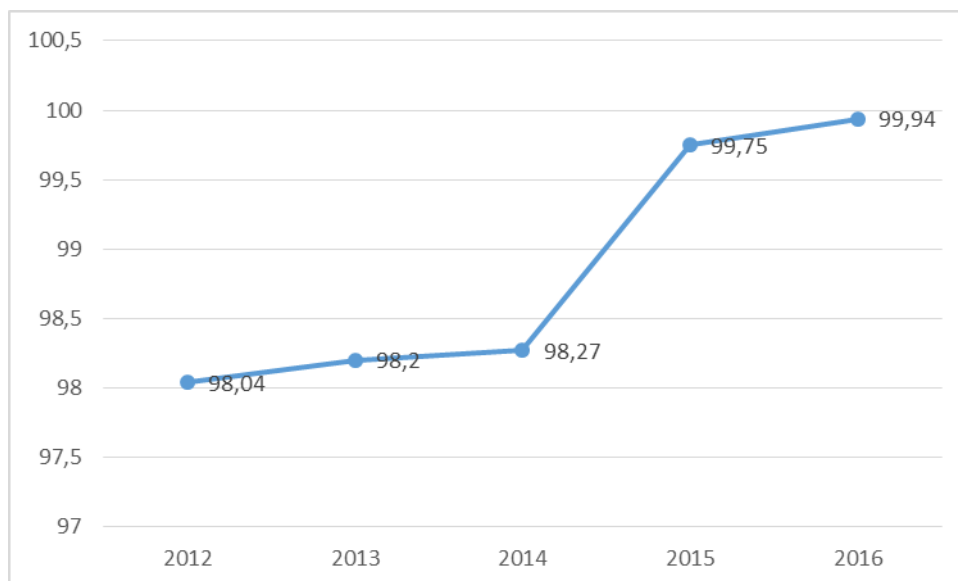
Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka Melek Huruf	Persen	98,04	98,20	98,27	99,75	99,94	0,48

Sumber :

1. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013
2. LAKIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2013-2015
3. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2017
4. Hasil Olahan, 2017

Angka melek huruf Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0,48 persen pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2012 – 2014, angka melek huruf di Kota Yogyakarta sebesar lebih dari 98 persen, kemudian meningkat menjadi 99,75 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, angka melek huruf kembali meningkat menjadi 99,94 persen. Peningkatan paling tinggi yaitu pada tahun 2015. Angka melek huruf yang mendekati 100 persen terutama tahun 2016 menggambarkan kemampuan hampir seluruh penduduk mampu membaca dan menulis. Persentase angka melek huruf yang meningkat tersebut diiringi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik. Berikut Gambar 2.2.2.A.1 yang menggambarkan grafik peningkatan angka melek huruf Kota Yogyakarta.



Gambar 2.2.2.A.1. Grafik Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas



pendidikan semakin baik. Tabel 2.2.2.A.2 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 menurut jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2.2.A.2

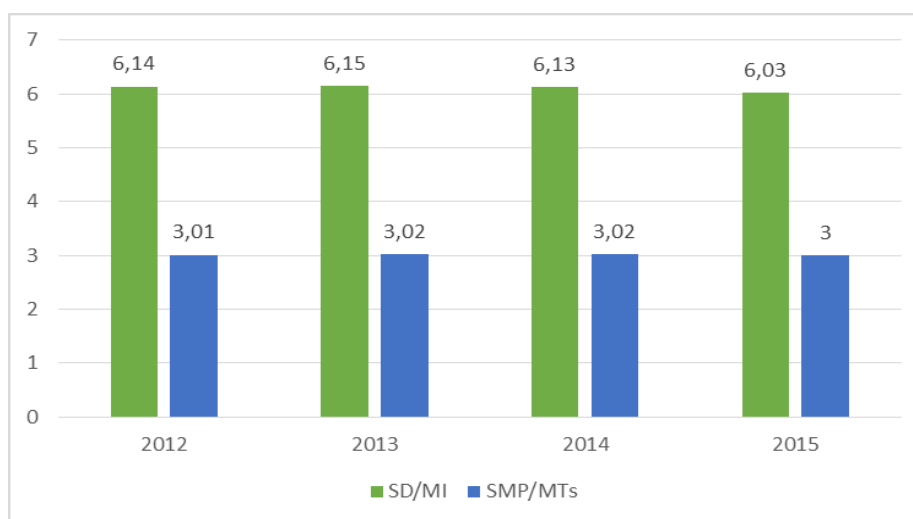
Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	Tahun	6,14	6,15	6,13	6,03	NA	-0,60
2.	SMP/MTs	Tahun	3,01	3,02	3,02	3,00	NA	-0,11

Sumber :

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2014
2. Hasil Olahan, 2017

Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam periode 2012 – 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI yang ditempuh selama 6 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan angka 6,03 pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata -0,60 persen per tahun. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sudah menunjukkan angka ideal pada tahun 2015, yaitu 3 tahun, dengan pertumbuhan rata-rata -0,11 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata yang bernilai negatif pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan angka rata-rata lama sekolah yang semakin menurun, yang berarti pula pada peningkatan kualitas pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah hendaknya berada pada kondisi yang ideal sebagai indikator kualitas pendidikan yang baik. Grafik rata-rata lama sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs ditunjukkan pada Gambar 2.2.2.A.2.



Gambar 2.2.2.A.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### 3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar

jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Tabel 2.2.2.A.3 menunjukkan APK di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.2.2.A.3

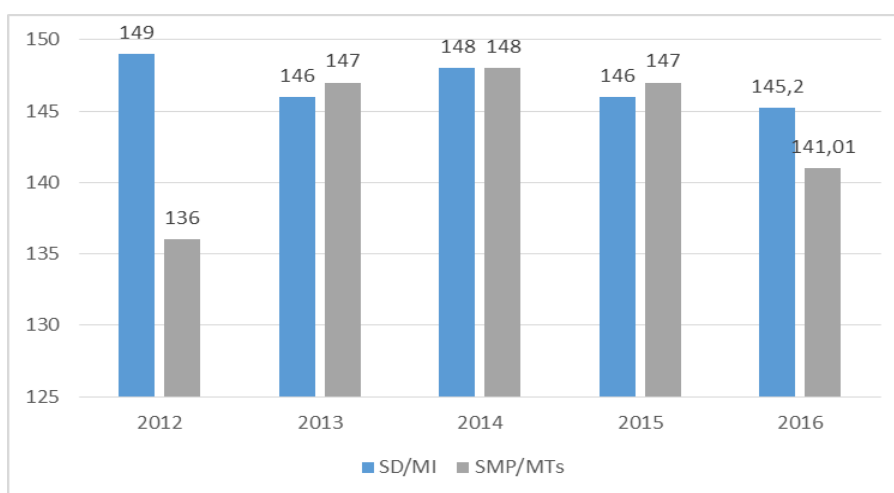
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	Persen	149	146	148	146	145,20	-0,64
2.	SMP/MTs	Persen	136	147	148	147	141,01	1,00

Sumber :

1. Profil Pendidikan Kota Yogyakarta, 2013 – 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Pada jenjang SD/MI, APK memiliki kecenderungan menurun, dengan pertumbuhan negatif (-0,64 persen per tahun), tetapi terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Sementara itu, APK SMP/MTs mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, APK SD/MI sebesar 146 persen dan APK SMP/MTs sebesar 147 persen. Pada tahun 2016, APK pada semua jenjang pendidikan menurun, yaitu APK SD/MI sebesar 145,20 persen; APK SMP/MTs sebesar 141,01 persen. APK sebesar lebih dari 100 persen menunjukkan banyaknya siswa dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat disebabkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang dianggap lebih baik daripada daerah di sekitarnya. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh terdapatnya penduduk di luar batasan usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan, yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, karena siswa memiliki usia dini pada waktu masuk jenjang sekolah tertentu, atau pun karena siswa tidak berhasil melanjutkan ke tingkat kelas selanjutnya. Berikut Gambar 2.2.2.A.3 menunjukkan diagram APK di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016.



Gambar 2.2.2.A.3. Angka Partisipasi Kasar Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

#### 4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Kota Yogyakarta. Berikut Tabel 2.2.2.A.4 menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2014.

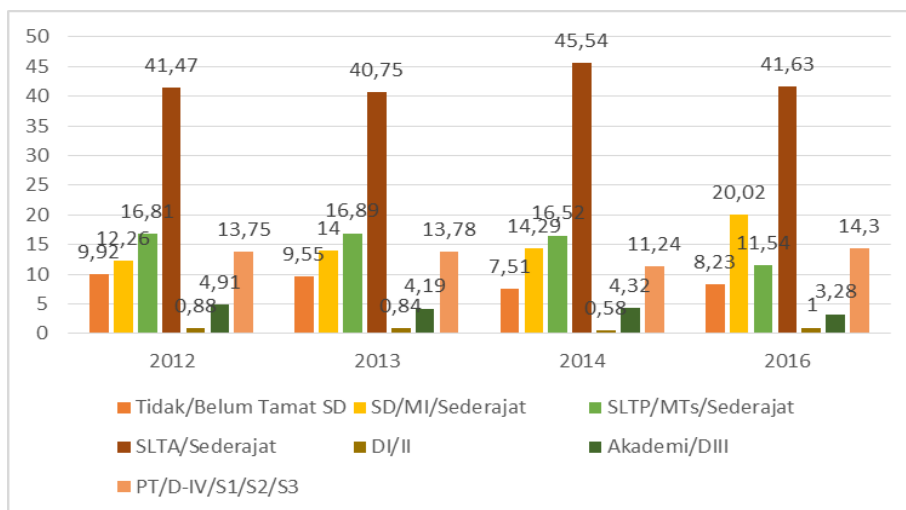
Tabel 2.2.2.A.4

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 (menurut BPS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1	Tidak/Belum Tamat SD	Persen	9,92	9,55	7,51	NA	8,23	-5,17
2	SD/MI/Sederajat	Persen	12,26	14,00	14,29	NA	20,02	18,79
3	SLTP/MTs/Sederajat	Persen	16,81	16,89	16,52	NA	11,54	-10,62
4	SLTA/Sederajat	Persen	41,47	40,75	45,54	NA	41,63	0,48
5	DI/II	Persen	0,88	0,84	0,58	NA	1,00	12,30
6	Akademi/DIII	Persen	4,91	4,19	4,32	NA	3,28	-11,88
7	PT/D-IV/S1/S2/S3	Persen	13,75	13,78	11,24	NA	14,30	3,00

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013 – 2017

Persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2013 ke 2014. Sementara itu, pertumbuhan positif terdapat pada jenjang SD/MI/Sederajat, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada jenjang SLPT/MTs/Sederajat, terjadi pertumbuhan yang negatif, sedangkan pada jenjang SLTA/Sederajat menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan negatif pada jenjang SLTP/MTs/Sederajat dapat disebabkan karena lebih banyak penduduk yang menamatkan pendidikannya hingga tingkat SLTA/Sederajat. Pertumbuhan negatif juga terdapat pada jenjang Akademi/DIII karena adanya penurunan persentase dari tahun 2014 – 2016. Persentase penduduk yang tamat Perguruan Tinggi juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 3 persen per tahun, mencapai 14,30 persen pada tahun 2016, yang menunjukkan kondisi yang baik dengan peningkatan penduduk yang memperoleh pendidikan tinggi. Berikut Gambar 2.2.2.A.4 menunjukkan diagram angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.2.2.A.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 (menurut BPS)

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Selain bersumber dari BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga mengeluarkan data angka pendidikan yang ditamatkan, yang lebih terklarifikasi ke tiap-tiap jenjang pendidikan. Angka pendidikan yang ditamatkan versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan pada Tabel 2.2.2.A.5, yang mencakup tahun 2012 - 2016. Kategori tidak/ belum sekolah dan belum tamat SD/ sederajat terus mengalami penurunan, menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang menempuh dan menamatkan pendidikan. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun, terdapat tren pertumbuhan positif pada jenjang SD/ sederajat, Diploma I/II, Strata II, dan Strata III. Pertumbuhan rata-rata paling tinggi yaitu pada jenjang Strata III (16,58 persen). Hal tersebut menunjukkan kecenderungan yang baik, baik pada penamatan pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Pada periode 2012 – 2016, sebagian besar persentase pendidikan yang ditamatkan yaitu pada jenjang SLTA/ sederajat (30,51 persen), selanjutnya yaitu Diploma IV/ Strata I (14,87 persen). Grafik angka pendidikan yang ditamatkan versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan pada Gambar 2.2.2.A.5.

Tabel 2.2.2.A.5

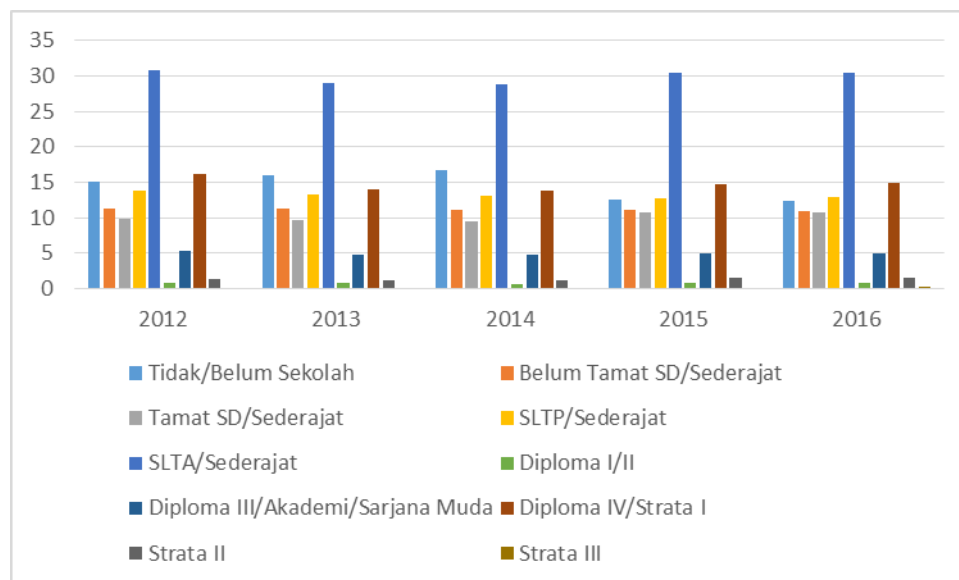
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

(menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1	Tidak/Belum Sekolah	Persen	15,15	16,01	16,64	12,63	12,46	-3,96
2	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen	11,25	11,28	11,09	11,21	11,03	-0,49
3	Tamat SD/Sederajat	Persen	9,78	9,63	9,57	10,68	10,70	2,41
4	SLTP/Sederajat	Persen	13,76	13,24	13,13	12,83	12,89	-1,61
5	SLTA/Sederajat	Persen	30,80	29,03	28,86	30,41	30,51	-0,16
6	Diploma I/II	Persen	0,78	0,73	0,72	0,84	0,83	1,92
7	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	Persen	5,38	4,77	4,73	4,96	4,94	-1,93
8	Diploma IV/Strata I	Persen	16,19	13,95	13,90	14,76	14,87	-1,82

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
9	Strata II	Persen	1,38	1,24	1,25	1,50	1,58	4,00
10	Strata III	Persen	0,11	0,11	0,11	0,17	0,19	16,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017



Gambar 2.2.2.A.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

(menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 5. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut Tabel 2.2.2.A.5 menunjukkan angka partisipasi murni di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.2.2.A.6

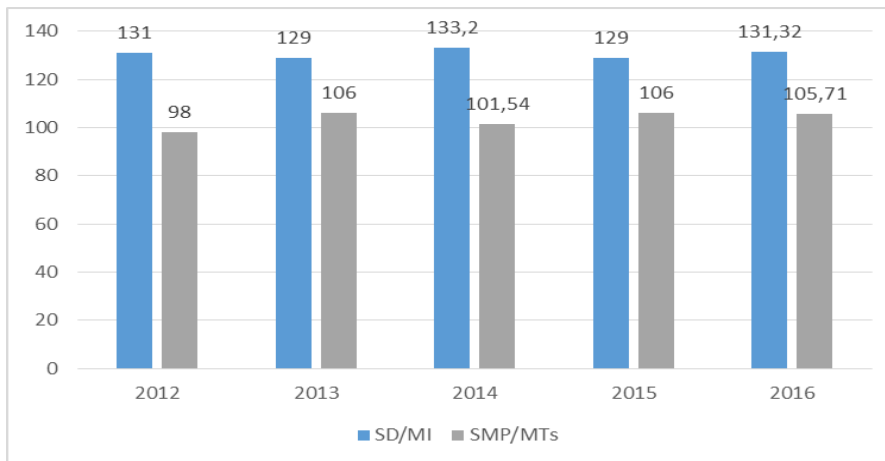
Angka Partisipasi Murni Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen	131	129	133,2	129	131,32	0,09
2.	SMP/MTs	Persen	98	106	101,54	106	105,71	2,02

Sumber :

1. Profil Pendidikan Kota Yogyakarta, 2012 – 2016
2. Hasil Olahan, 2017

Angka partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu 0,09 persen untuk jenjang SD/MI dan 2,02 persen untuk jenjang SMP/MTs. Tahun 2016 APM Kota Yogyakarta berada di atas angka 100 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar dari penduduk usia sekolah setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut juga menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.



Gambar 2.2.2.A.6. Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 6. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6 – 21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Berikut Tabel 2.2.2.A.7 menunjukkan daftar rekap penerima beasiswa PIP 2017 dan tabel 2.2.2.A.8 menunjukkan daftar rekap penerima beasiswa PIP 2017 per jenjang pendidikan.

Tabel 2.2.2.A.7

Daftar Rekap Penerima Beasiswa PIP 2017

No	Jenjang	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	Tahap 6	Tahap 7	Tahap 8	Tahap 9	Jumlah
1.	SD	60	207	3.190	67	13	230	98	4.629	-	8.494
2.	SMP	36	519	308	124	1.575	390	-	249	351	3.552
	TOTAL	96	726	3.498	191	1.588	620	98	4.878	351	12.046

Sumber :

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2017

Penerima beasiswa PIP pada jenjang SD untuk tahap 1 berasal dari data Dapodik dan panti asuhan, tahap 2 Dapodik dan yatim piatu, tahap 3 dan tahap 4 Dapodik dan KIP, dan tahap 5 Dapodik dan yatim piatu.

Tabel 2.2.2.A.8

## Daftar Rekap Penerima Beasiswa 2015 – 2017 per Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	2015	2016	2017
1.	SD	9.117	8.632	8.494
2.	SMP	5.980	2.963	3.552
3.	SMA	1.390	653	
4.	SMK	5.257	4.205	
	TOTAL	21.744	16.453	12.046

Sumber :

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Agustus 2017

Penerima beasiswa per jenjang pendidikan dari tahun 2015 ke tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 total penerima beasiswa 21.744 siswa dan berkurang menjadi 12.046 siswa pada tahun 2017. Pada jenjang SD penerima beasiswa tahun 2015 sejumlah 9.117 siswa dan mengalami sedikit penurunan menjadi 8.494 siswa pada tahun 2017. Hal ini juga terjadi pada dengan jumlah penerima beasiswa pada jenjang pendidikan SMP. Pada tahun 2015 jumlah penerima beasiswa SMP sejumlah 5.980 siswa dan menurun menjadi 3.522 pada tahun 2017. Pada jenjang SMA dan SMK tahun 2016 jumlah penerima beasiswa juga mengalami penurunan dari tahun 2015 dan mulai tahun 2017 urusan Pendidikan pada jenjang SMA dan SMK dilimpahkan ke DIY.

## B. Kesehatan

### 1. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dari dalam) dan eksogen (faktor dari luar). Faktorr endogen merupakan faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data AKB ini dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut Tabel 2.2.2.B.1 menunjukkan AKB di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.2.2.B.1

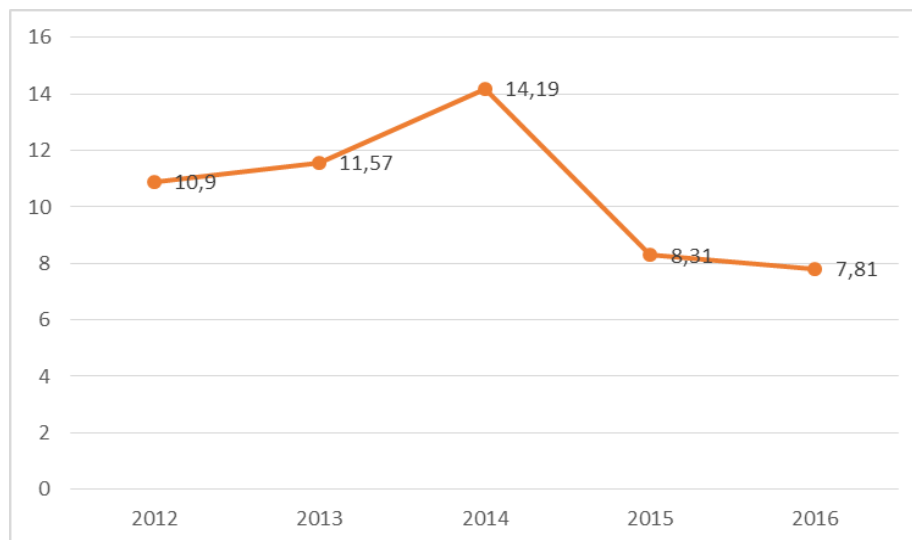
## Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi		51	51	62	33	30	-8,57
2.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	4.658	4.406	4.369	3.972	3.841	-4,66
3.	<b>Angka kematian bayi</b>	<b>per 1.000 kelahiran hidup</b>	<b>10,90</b>	<b>11,57</b>	<b>14,19</b>	<b>8,31</b>	<b>7,81</b>	<b>-4,67</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Kota Yogyakarta, 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2012 - 2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, pada tahun 2014 mencapai 14,19 per 1.000 kelahiran hidup. Sebelumnya, pada tahun 2012 sejumlah 10,90 per 1.000 kelahiran hidup, sementara pada tahun 2013 sejumlah 11,57 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015, terjadi penurunan AKB yang cukup signifikan, menjadi 8,31 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun lagi menjadi 7,81 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Secara umum, pertumbuhan rata-rata AKB di Kota Yogyakarta yaitu -4,67 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi. Capaian penurunan AKB harus terus dilakukan melalui program-program pemerintah untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Grafik AKB di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.2.2.B.1.



Gambar 2.2.2.B.1. Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. AKABA di Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan AKB. Tabel 2.2.2.B.2 berikut ini menunjukkan data angka kematian balita di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016.



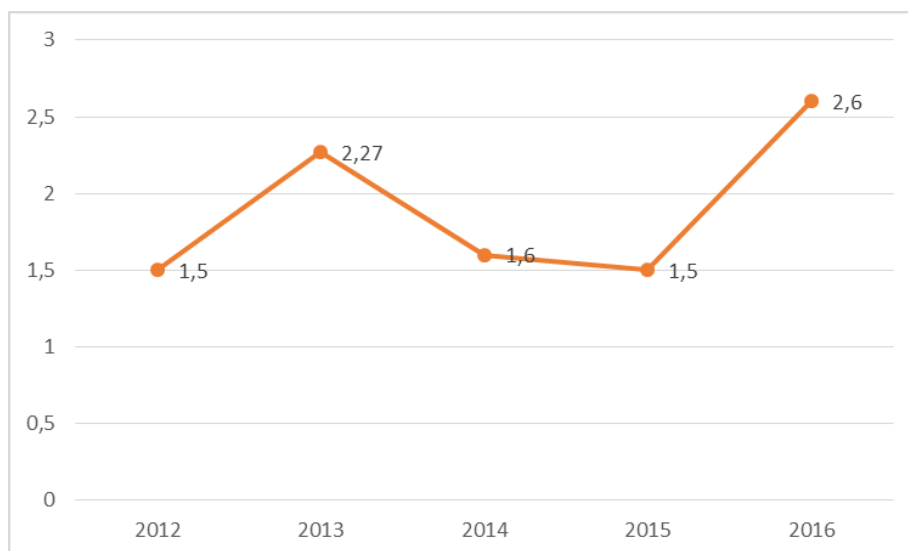
Tabel 2.2.2.B.2

## Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian balita		7,0	10,0	7,0	6,0	10,0	16,31
2.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	4.658	4.406	4.369	3.972	3.841	-4,66
3.	<b>Angka kematian balita</b>	<b>per 1.000 kelahiran hidup</b>	<b>1,50</b>	<b>2,27</b>	<b>1,60</b>	<b>1,50</b>	<b>2,60</b>	<b>22,23</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017

Angka kematian balita di Yogyakarta dalam periode 2012 – 2016 menunjukkan kecenderungan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2012, terdapat 1,5 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat lebih dari 50 persen menjadi 2,3 kematian balita pada tahun 2013. Selanjutnya, terjadi penurunan yang terus menerus menjadi 1,6 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 dan 1,5 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Akan tetapi, pada tahun 2016 terjadi peningkatan AKABA menjadi 2,6 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, menjadi AKABA paling tinggi pada periode 2012 – 2016. Pertumbuhan rata-rata AKABA di Kota Yogyakarta sebesar 22,23 persen per tahun. Angka kematian balita di Kota Yogyakarta harus terus diturunkan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan, serta fasilitas dan pelayanan kesehatan. Berikut Gambar 2.2.2.B.2 menunjukkan grafik AKABA di Kota Yogyakarta, dengan fluktuasinya dari tahun ke tahun.



Gambar 2.2.2.B.2. Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 ditunjukkan pada Tabel 2.2.2.B.3

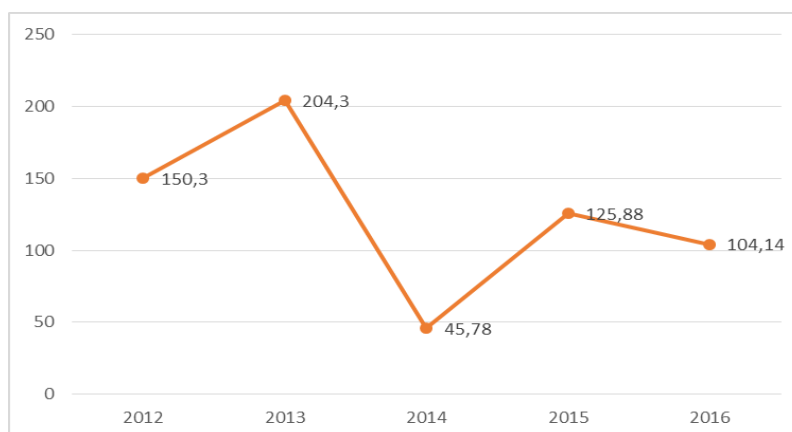
Tabel 2.2.2.B.3

Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian ibu melahirkan		7,00	9,00	2,00	5,00	4,00	20,20
2.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	4.658	4.406	4.369	3.972	3.841	-4,66
3.	<b>Angka kematian ibu melahirkan</b>	<b>per 100.000 kelahiran hidup</b>	<b>150,3</b>	<b>204,3</b>	<b>45,78</b>	<b>125,88</b>	<b>104,14</b>	<b>29,01</b>

Sumber: Profil Kesehatan, 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

Angka kematian ibu melahirkan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan meningkat (pertumbuhan rata-rata per tahun yaitu 29,01 persen). Pada tahun 2012, jumlah AKI yaitu 150 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat lebih dari 30 persen pada tahun 2013 menjadi 204 per 100.000 kelahiran hidup, sekaligus sebagai AKI tertinggi pada periode 2012 – 2015. Pada tahun 2014, perkembangan yang baik ditunjukkan dengan penurunan AKI yang signifikan, menjadi 46 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, peningkatan AKI kembali terjadi pada tahun 2015 menjadi 126 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan kondisi derajat kesehatan terutama ibu melahirkan yang menurun. Pada tahun 2016, terdapat peningkatan positif, yaitu AKI menurun menjadi 104 per 100.000 kelahiran hidup. Grafik AKI digambarkan pada Gambar 2.2.2.B.3.



Gambar 2.2.2.B.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Angka kematian ibu yang cenderung mengalami peningkatan dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ibu hamil tidak pernah ANC rutin di Puskesmas, pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan pada saat menjelang melahirkan saja sehingga meningkatkan risiko bagi ibu dan bayi. Selain itu, adanya penyakit menular juga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, serta Program Perencanaan Pertolongan dan

Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya. Pada tahun 2014, jumlah kematian ibu melahirkan menurun cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya manual rujukan untuk periksa kehamilan maupun melahirkan, selain itu juga terdapat dukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan kesehatan serta kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kenaikan AKI pada tahun 2015, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian. Selain itu, ditemukan pula penyebab kematian Ibu pada tahun 2015, yaitu terdapatnya penyakit TBC Milier, TBC HIV, pendarahan, dan sepsis. Penyakit yang menyebabkan kematian ibu tersebut dominan dialami oleh ibu yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta.

#### 4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta, ditunjukkan Tabel 2.2.2.B.4.

Tabel 2.2.2.B.4

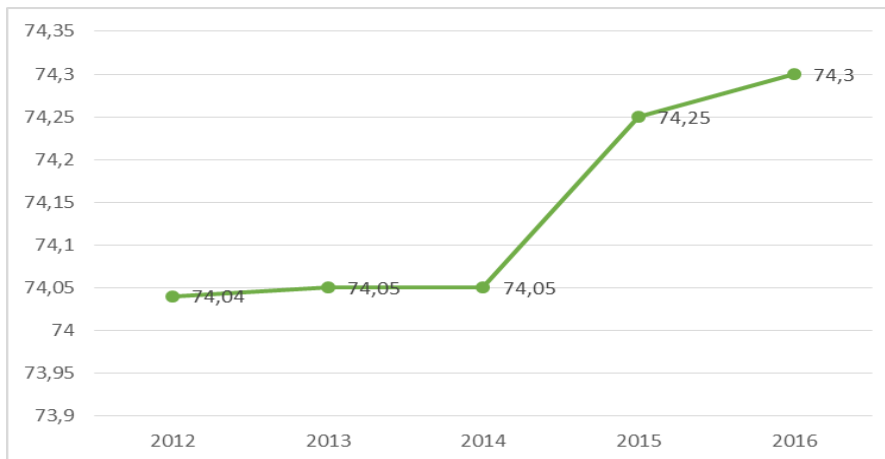
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,04	74,05	74,05	74,25	74,30	0,09

Sumber:

1. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta (BPS Kota Yogyakarta, 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Penduduk Kota Yogyakarta secara umum memiliki angka usia harapan hidup 74 tahun atau lebih. Fluktuasi angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta tidak terlalu besar. Pada tahun 2016, angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta paling tinggi pada periode 2012 – 2016, yaitu 74,30 tahun. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jamkesda (jaminan kesehatan khusus pemegang KTP Yogyakarta), jamkesmas (jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dimana keanggotaannya ditentukan melalui TNP2K), dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.2.2.B.4.



Gambar 2.2.2.B.4. Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 5. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaaan program penanganan masalah gizi buruk di Kota Yogyakarta. Berikut ini data prevalensi balita gizi buruk di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 2.2.2.B.5.

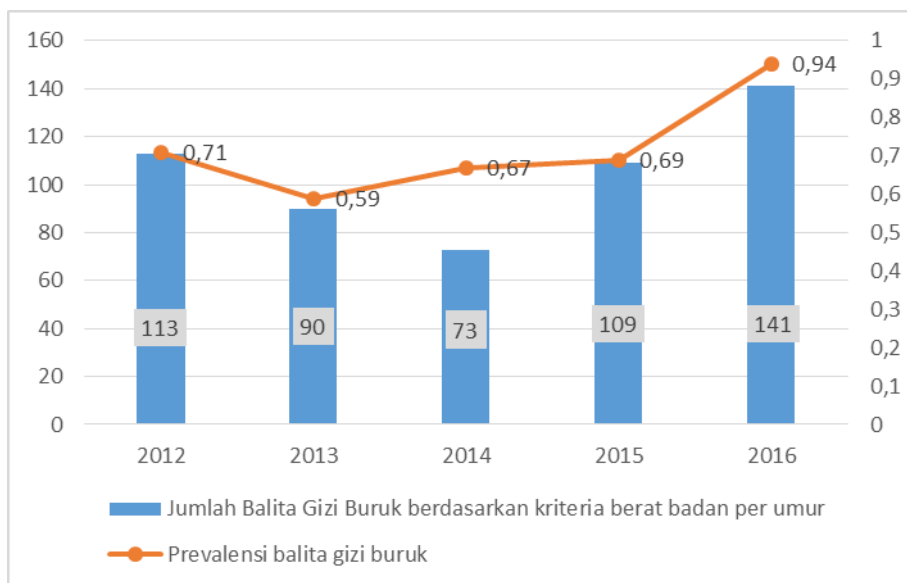
Tabel 2.2.2.B.4

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur	Anak	113	90	73	109	141	9,86
2.	Jumlah Balita yang ditimbang	Anak	15.967	15.270	10.845	15.832	15.074	1,96
3.	<b>Prevalensi balita gizi buruk</b>	<b>Persen</b>	<b>0,71</b>	<b>0,59</b>	<b>0,67</b>	<b>0,69</b>	<b>0,94</b>	<b>8,97</b>

Sumber: Profil Kesehatan Kota Yogyakarta, 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)

Jumlah balita yang mengalami gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 berjumlah 109 anak. Pada tahun 2016, jumlah balita yang mengalami gizi buruk meningkat signifikan menjadi 141 anak. Sementara itu, prevalensi balita gizi buruk juga mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, prevalensi balita gizi buruk di Kota Yogyakarta sebesar 0,71 persen, menurun lebih dari 15 persen menjadi 0,59 persen pada tahun 2013. Peningkatan terjadi pada tahun 2014, menjadi sebesar 0,67 persen, kemudian pada tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk kembali meningkat menjadi 0,69 persen. Pada tahun 2016, prevalensi balita gizi buruk meningkat sekitar 36 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 0,94 persen. Peningkatan prevalensi balita gizi buruk harus diatasi dengan program-program terutama di bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi balita.



Gambar 2.2.2.B.5. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan analisis dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Yogyakarta tahun 2016, terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang yang disebabkan adanya kesulitan pemantauan status gizi karena beberapa orang tua/ keluarga tidak membawa anaknya ke posyandu/ puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak dapat terpantau oleh kader pendamping maupun oleh tenaga kesehatan. Selain itu, angka prevalensi balita gizi buruk juga dipengaruhi oleh tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga terdapatnya pendatang yang memiliki balita gizi buruk pun menambah hitungan pada indikator ini.

### 5. Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya. Kepemilikan KIS di Kota Yogyakarta tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.B.5

#### Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat

No	Indikator	Tahun	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penerima JKN-KIS	Unit	266.076	325.457	367.021	391.699

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

## C. Ketenagakerjaan

### 1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap

dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 2.2.2.C.1.

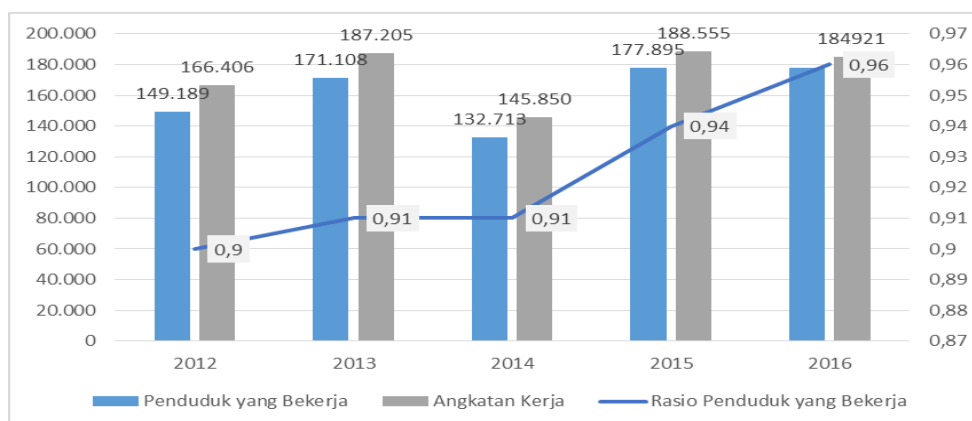
Tabel 2.2.2.C.1

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	149.189	171.108	132.713	177.895	178.200	6,62
2	Angkatan Kerja	Jiwa	166.406	187.205	145.850	188.555	184.921	4,44
3	<b>Rasio Penduduk yang Bekerja</b>		<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,94</b>	<b>0,96</b>	<b>1,63</b>

Sumber: Profil Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2012 – 2017; Hasil Olahan, 2017

Jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik, yaitu lebih dari 90 persen. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,90; meningkat menjadi 0,91 pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,94. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2016, menjadi 0,96. Hal tersebut berarti 96 persen dari total angkatan kerja di Kota Yogyakarta telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 4 persen yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berikut Gambar 2.2.2.C.1 menunjukkan grafik rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.2.2.C.1. Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### A. Kebudayaan

##### 1. Jumlah Grup Kesenian

Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya memiliki perkembangan dalam bidang seni dan budaya yang perlu diperhatikan. Perhitungan jumlah grup kesenian yaitu jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Perhitungan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan untuk bidang kebudayaan Kota Yogyakarta. Berikut merupakan jumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta, ditunjukkan pada Tabel 2.2.3.A.1.

Tabel 2.2.3.A.1

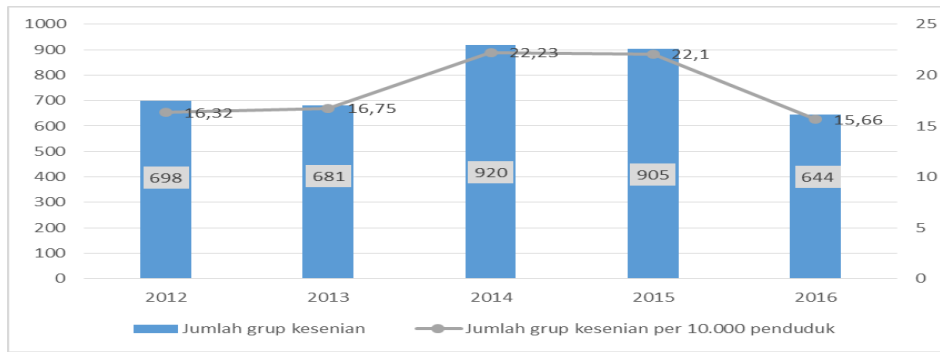
#### Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah grup kesenian	Unit	698	681	920	905	644	0,55
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	42,76	40,67	41,39	40,95	41,13	-0,94
3.	<b>Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk</b>	<b>Unit</b>	<b>16,32</b>	<b>16,75</b>	<b>22,23</b>	<b>22,10</b>	<b>15,66</b>	<b>1,41</b>

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2013 – 2016
2. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Jumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi pada periode 2012 – 2016, meskipun secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jumlah grup kesenian pada tahun 2012 yaitu 698 unit, menurun menjadi 681 unit pada tahun 2013. Peningkatan sekitar 35 persen terjadi pada tahun 2014, menjadi 920 unit. Pada tahun 2015, terjadi kembali penurunan menjadi sejumlah 905 unit. Penurunan yang signifikan pada tahun 2016, jumlah grup kesenian menjadi 644 unit, jumlah paling rendah pada periode 2012 – 2016. Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan negatif. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk memiliki pertumbuhan positif dengan persentase pertumbuhan per tahun 1,41 persen. Pada tahun 2012 – 2014 terjadi peningkatan, hingga sejumlah 22,23 unit kesenian per 10.000 penduduk pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 0,58 persen menjadi sejumlah 22,10 unit. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016, jumlah grup kesenian menjadi 15,66 unit per 10.000 penduduk. Peningkatan jumlah grup kesenian secara umum merupakan dampak positif dari ikon Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya. Kota Yogyakarta mempunyai banyak warisan budaya yang sangat kental, oleh karena itu terdapat banyak seniman dengan bakat seni yang beragam. Akan tetapi, penurunan jumlah grup kesenian pada setahun terakhir hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar eksistensi grup kesenian di Kota Yogyakarta masih lestari. Gambar 2.2.3.A.1 menunjukkan grafik perkembangan jumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.2.3.A.1. Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 2. Jumlah Gedung Kesenian

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa Kota Yogyakarta merupakan Kota Budaya, sehingga pembangunan dalam bidang seni dan budaya di Kota Yogyakarta merupakan hal yang penting untuk menjaga citra kota. Disisi lain, pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. Tabel 2.2.3.A.2 menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2.3.A.2

Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah gedung kesenian	Unit	2	2	2	2	2	0,00
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	42,76	40,67	41,39	40,95	41,13	-0,94
3.	<b>Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk</b>	<b>Unit</b>	<b>0,047</b>	<b>0,049</b>	<b>0,048</b>	<b>0,049</b>	<b>0,049</b>	<b>1,01</b>

Sumber:

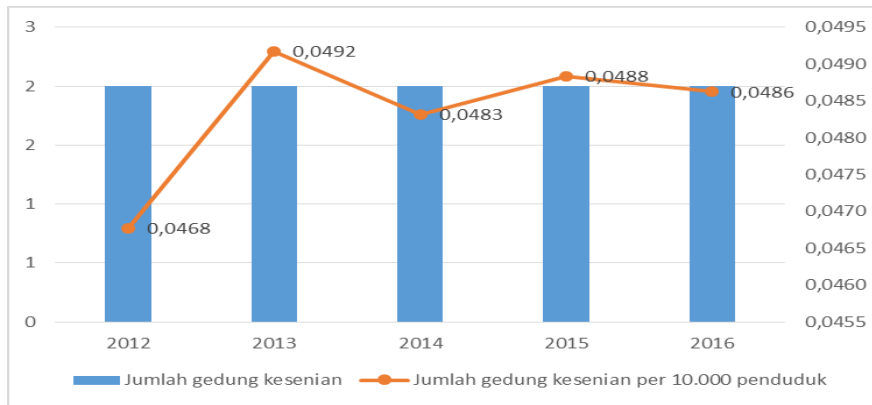
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2013 – 2016

2. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2017

3. Hasil Olahan, 2017

Kota Yogyakarta memiliki dua gedung kesenian, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Akan tetapi, penyelenggaraan pertunjukan kesenian tidak harus selalu diadakan di gedung kesenian, melainkan ruang terbuka publik lainnya dapat menjadi wadah untuk berekspresi bagi para seniman. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat peningkatan jumlah gedung kesenian. Kedua gedung kesenian tersebut dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Gedung kesenian di Kota Yogyakarta seringkali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Gedung kesenian juga merupakan tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Grafik jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk ditunjukkan pada Gambar 2.2.3.A.2.





Gambar 2.2.3.A.2. Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## B. Pemuda dan Olahraga

### 1. Jumlah Klub Olahraga

Indikator jumlah klub olahraga dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan sumber daya manusia melalui kegiatan olahraga. Semakin banyak jumlah klub olahraga maka semakin baik perkembangan dalam bidang kepemudaan dan olahraga, serta semakin membutuhkan pengelolaan yang baik. Jumlah klub olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut adalah jumlah klub olahraga di Kota Yogyakarta, ditunjukkan pada Tabel 2.2.3.B.1.

Tabel 2.2.3.B.1

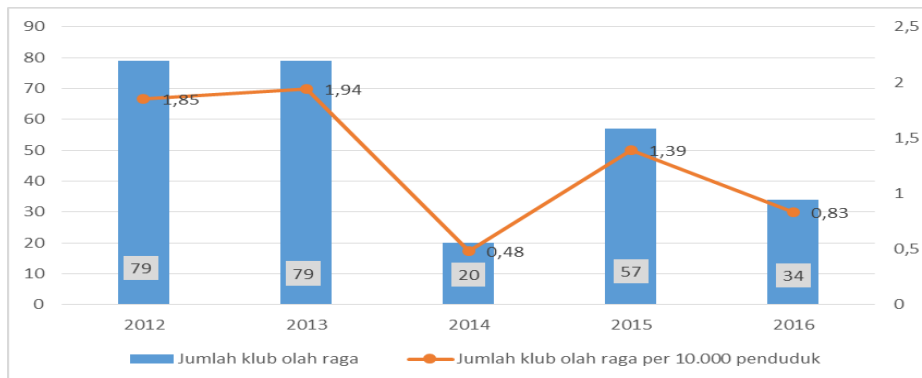
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah klub olahraga	Unit	79	79	20	57	34	17,49
2.	Jumlah penduduk/ 10.000	Jiwa	42,76	40,67	41,39	40,95	41,13	-0,94
3.	<b>Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk</b>	<b>Unit</b>	<b>1,85</b>	<b>1,94</b>	<b>0,48</b>	<b>1,39</b>	<b>0,83</b>	<b>19,72</b>

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

Pada tabel diatas terlihat bahwa, jumlah klub olahraga di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 – 2013 jumlah klub olahraga sebanyak 79 klub, yang kemudian turun menjadi 20 klub pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah klub olahraga bertambah menjadi 57 klub. Penambahan ini terjadi akibat adanya pendataan ulang dan pedefinisian ulang klub olahraga, sehingga terdapat perbedaan jumlah yang signifikan. Jumlah klub olahraga pada tahun 2016 menurun signifikan, menjadi 34 klub. Pada indikator jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk juga mengalami fluktuasi, akibat fluktuasi jumlah penduduk maupun perubahan jumlah klub olahraga. Pada tahun 2012, terdapat rasio 1,85 klub olahraga per 10.000 penduduk, yang kemudian meningkat menjadi 1,94 klub pada tahun 2013 karena penurunan jumlah penduduk, sedangkan jumlah klub olahraga tetap. Penurunan yang

signifikan terjadi pada tahun 2014, menjadi 0,38 klub per 10.000 penduduk, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 1,39 klub pada tahun 2015. Pada tahun 2016, jumlah klub menurun kembali menjadi 0,83 unit per 10.000 penduduk. Gambar 2.2.3.B.1 menunjukkan perkembangan klub olahraga di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.2.3.B.1. Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Analisis, 2017

## 2. Jumlah Gedung Olahraga

Gedung olahraga adalah suatu sarana pendukung kegiatan olahraga warga kota Yogyakarta. Penghitungan indikator jumlah gedung olahraga ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlah gedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut merupakan data jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta pada Tabel 2.2.3.B.2.

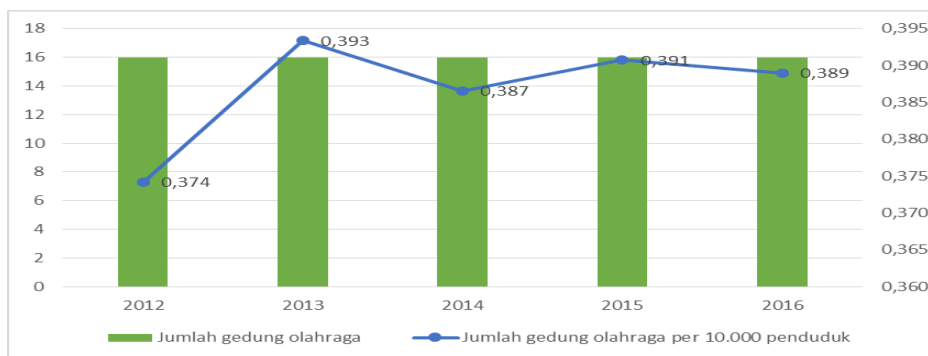
Tabel 2.2.3.B.2

Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah gedung olahraga	Unit	16	16	16	16	16	0,00
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	42,76	40,67	41,39	40,95	41,13	-0,94
3.	<b>Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk</b>	<b>Unit</b>	<b>0,374</b>	<b>0,393</b>	<b>0,386</b>	<b>0,391</b>	<b>0,389</b>	<b>1,01</b>

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2016

Jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 mempunyai jumlah yang tetap, yaitu 16 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, secara umum terdapat peningkatan rasio karena fluktuasi jumlah penduduk. Pada tahun 2012, jumlah gedung olahraga 0,374 per 10.000 penduduk, meningkat menjadi 0,393 gedung per 10.000 penduduk pada tahun 2013. Fluktuasi rasio pada tahun 2014 – 2016 tidak begitu signifikan. Jumlah gedung olahraga yang tidak berkurang menunjukkan adanya pemanfaatan sarana olahraga secara baik, sehingga tidak adanya perubahan fungsi atau pemanfaatan bangunan. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa jumlah gedung olahraga tersebut tidak serta merta menggambarkan stagnannya kegiatan olahraga yang dilakukan warga kota, karena warga kota Yogyakarta pun dapat memanfaatkan ruang terbuka sebagai sarana berolahraga.



Gambar 2.2.3.B.2. Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

#### A. Pendidikan

##### 1. Pendidikan Dasar

##### 1.1. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS SD/MI di Kota Yogyakarta dihitung berdasarkan jumlah siswa SD/MI yang berusia 7 – 12 tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlah penduduk Kota Yogyakarta berusia 7 – 12 tahun. Begitu juga dengan APS SMP/MTs disesuaikan dengan perhitungan usia SMP/MTs (13 – 15 tahun). Tabel 2.3.1.A.1 merupakan angka partisipasi sekolah di Kota Yogyakarta disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3.1.A.1

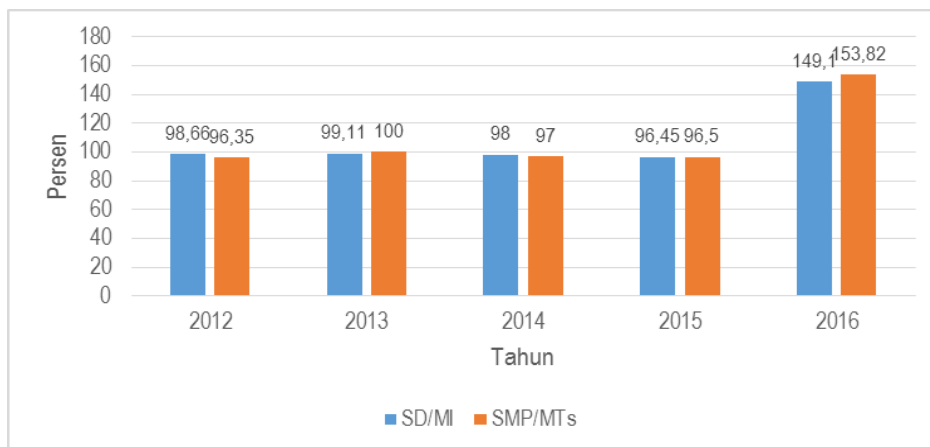
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen	98,66	99,11	98	96,45	149,1	13,09
2.	SMP/MTs	Persen	96,35	100,00	97	96,50	153,82	14,92

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016 cenderung mengalami fluktuasi. Penurunan angka partisipasi sekolah dapat dimungkinkan terjadi karena beberapa anak di daerah perbatasan kota memilih sekolah yang tidak jauh dari rumahnya dimana sekolah yang dipilih secara administratif termasuk dalam kabupaten/kota lain. Secara umum, angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan pada tingkat SD/MI. Dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yang pertumbuhan rata-rata meningkat 13,09 persen tetapi Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMP/MTs rata-rata terus mengalami peningkatan sebesar 14,92 persen. disajikan pada Gambar 2.3.1.A.1.



Gambar 2.3.1.A.1 Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016  
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Gambar 2.3.1.A.1, angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI di Kota Yogyakarta memiliki persentase 98,66% persen pada periode tahun 2012, peningkatan terjadi pada tahun 2013 yang kemudian penurunan pada periode tahun 2014 dan 2015. Kemudian terjadi peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2016. Angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta paling tinggi pada tahun 2016 (149,11 persen), sedangkan paling rendah pada tahun 2015 (96,45 persen). Angka partisipasi sekolah SMP/MTs di Kota Yogyakarta cenderung mengalami fluktuasi. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2013 memiliki persentase 100 persen pada tahun 2013, dimana pada tahun sebelumnya 96,35 persen. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 dan 2015 nilai angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP/MTs kembali menurun. Angka partisipasi sekolah SMP/MTs di Kota Yogyakarta paling tinggi pada tahun 2016 (153,82 persen), sedangkan paling rendah pada tahun 2012 (96,35 persen).

### 1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 -15 tahun. Tabel 2.3.1.A.2 merupakan data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.A.2  
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs  
di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

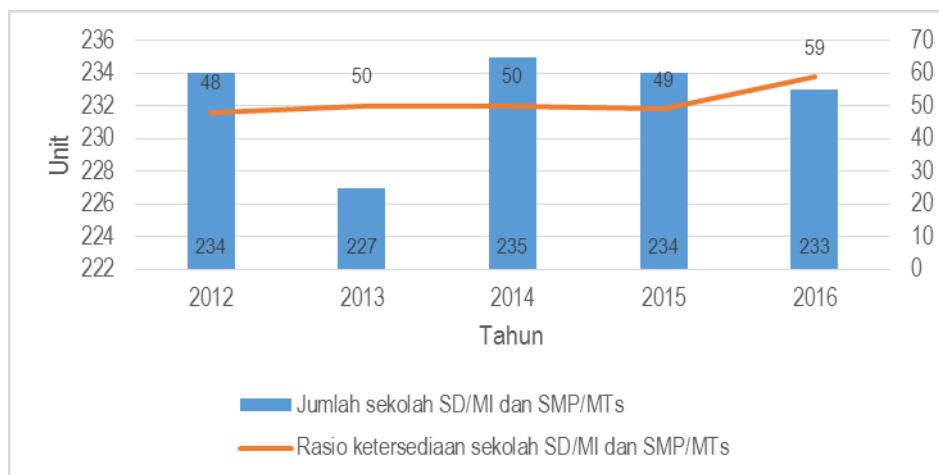
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	234	227	235	234	233	-0,08
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Orang	48.424	45.756	47.197	47.838	39.604	-4,55

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
3.	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs		48	50	50	49	59	5,64

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan pada Tabel 2.3.1.A.2, rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 terdapat 48 sekolah pendidikan dasar setiap 10.000 penduduk dan pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah kembali naik menjadi 50 sekolah namun dengan kondisi jumlah sekolah yang berkurang (227 unit) serta menurunnya jumlah penduduk usia sekolah. Kurangnya murid di beberapa sekolah disebabkan karena tingginya persaingan kualitas sekolah yang mengakibatkan orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap paling baik dan terjangkau. Jumlah sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 235 unit, begitu pula dengan jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun, sedangkan rasio ketersediaan sekolah tidak mengalami perubahan (50 sekolah). Sementara itu, rasio ketersediaan sekolah kembali mengalami penurunan menjadi 49 sekolah pada tahun 2015, disebabkan jumlah sekolah yang menurun, sedangkan jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun meningkat. Grafik rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/ MTs di Kota Yogyakarta disajikan pada Gambar 2.3.1.A.2.



Gambar 2.3.1.A.2 Grafik Rasio Ketersediaan /Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016  
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Gambar 2.3.1.A.2 diketahui bahwa jumlah sekolah mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013, yang kemudian meningkat pada tahun 2014 dan menurun lagi pada tahun 2015 dan 2016. Peningkatan jumlah sekolah yang terjadi disebabkan adanya beberapa pembangunan sekolah baru khususnya swasta yang menawarkan fasilitas yang cenderung lebih baik dan lebih berkualitas. Rata-rata rasio ketersediaan

SD/MI dan SMP/MTs adalah 48 sekolah pada tahun 2012, dengan rasio ketersediaan paling banyak adalah 50 sekolah pada tahun 2013, dan 2014.

### 1.3. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar mutu pengajaran tercapai. Jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs yang dihitung adalah baik guru PNS maupun swasta (non-PNS). Formula untuk menghitung rasio guru/murid adalah jumlah murid dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.A.3

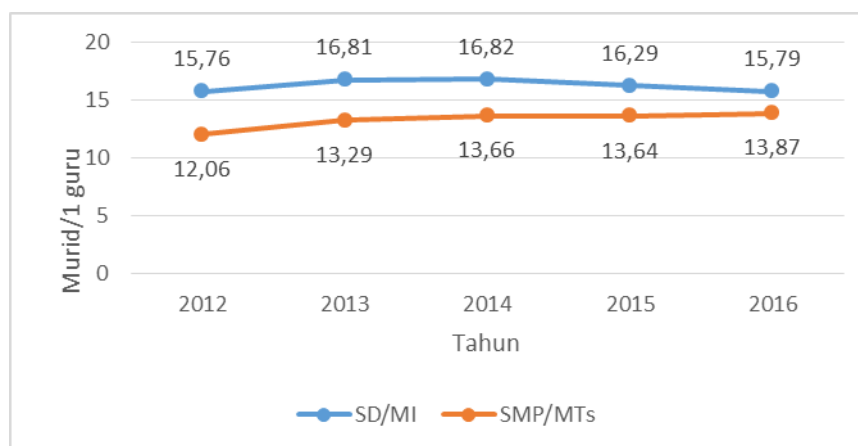
Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	murid/ 1 guru	15,76	16,81	16,82	16,29	15,79	0,13
2.	SMP/MTs	murid/ 1 guru	12,06	13,29	13,66	13,64	13,87	3,63

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.3, rasio guru/murid SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2014 cenderung mengalami peningkatan, dengan perubahan yang tidak begitu signifikan. Rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2012 – 2015 yaitu 16,29, berarti bahwa satu orang guru mengajar 16 sampai 17 murid. Rata-rata rasio guru/murid SMP/MTs lebih rendah pada periode waktu yang sama, yaitu 13,64 yang berarti satu guru mengajar 13 sampai 14 murid. Hal tersebut dikarenakan guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas, tetapi merupakan guru matapelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam satu kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan semakin lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif. Grafik rasio guru/murid di Kota Yogyakarta ditunjukkan dalam Gambar 2.3.1.A.3.



Gambar 2.3.1.A.3 Rasio Guru/Murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Gambar 2.3.1.A.3, rasio guru/murid SD/MI di Kota Yogyakarta paling rendah pada periode tahun 2012, yaitu rata-rata 15 – 16 murid. Pada tahun 2013 – 2015 mengalami peningkatan menjadi 16 – 17 murid, meskipun pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Pada SMP/MTs dengan rasio guru/murid yang lebih rendah, pada periode 2012 memiliki rata-rata 12 – 13 murid, yang kemudian terus meningkat pada periode 2013 – 2015 menjadi 13 – 14 murid. Rasio guru/murid di Kota Yogyakarta cenderung meningkat, baik SD/MI maupun SMP/MTs, dengan peningkatan pada tingkat SMP/MTs lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan semakin banyaknya murid yang diampu atau diasuh oleh satu orang guru, sehingga dapat diasumsikan menjadi semakin tidak efektif.

#### 1.4. Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTs

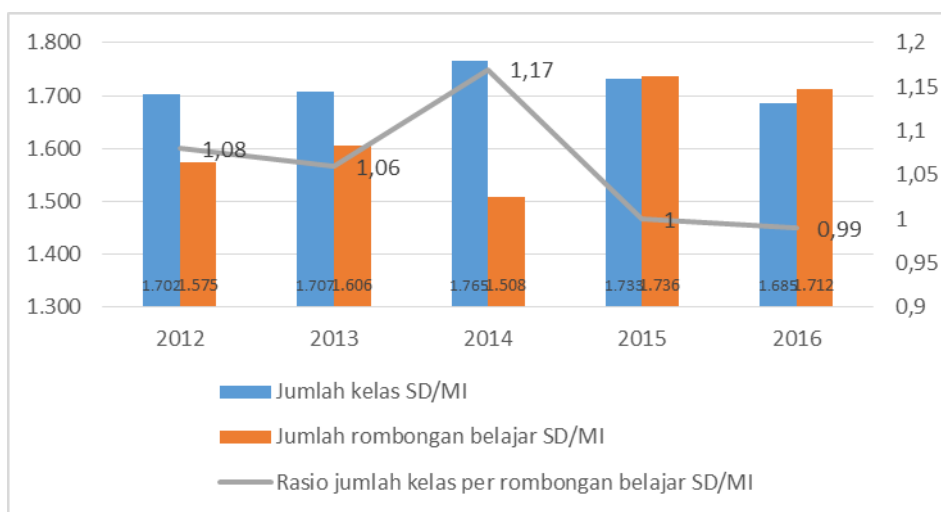
Indikator rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Tabel 2.3.1.A.4 merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.A.4  
Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kelas SD/MI	Unit	1.702	1.707	1.765	1.733	1.685	-0,22
2.	Jumlah rombongan belajar SD/MI	Kelompok	1.575	1.606	1.508	1.736	1.712	2,40
3.	Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI	Unit/ kelompok	1,08	1,06	1,17	1,00	0,99	-1,75

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017; Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.4, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan peningkatan jumlah kelas. Semakin mendekati angka 1 maka akan semakin ideal (efektif) karena terdapat kesesuaian antara jumlah kelas dan jumlah rombongan belajar. Pada tahun 2012 – 2014 rasio jumlah kelas per rombongan belajar sudah mengalami peningkatan menjadi sama dengan atau lebih dari 1, yang menunjukkan seluruh rombongan belajar sudah mempunyai kelas masing-masing atau kebutuhan kelas sudah tercukupi. Tahun 2015 terdapat penurunan rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI walau tidak signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut grafik yang menunjukkan jumlah kelas, jumlah rombongan belajar, dan rasio antar keduanya.



Gambar 2.3.1.A.4 Grafik Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Gambar 2.3.1.A.4, Jumlah kelas SD/MI di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan pada periode tahun 2012 – 2014, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 ke 2015. Jumlah kelas SD/MI paling besar pada tahun 2014, yaitu 1.765 unit. Jumlah rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada periode tahun 2012 – 2015. Jumlah rombongan belajar tersebut menurun pada tahun 2013 ke 2014, kemudian mengalami peningkatan lebih dari 10 persen pada tahun 2014 ke 2015. Jumlah rombongan belajar SD/MI paling besar pada tahun 2015, yaitu 1.736 kelompok. Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI paling besar pada tahun 2014, yaitu 1,17 karena terdapat selisih yang besar antara jumlah kelas dan jumlah rombongan belajar. Pada tahun 2014 tersebut, kelas dalam jumlah terbesar sedangkan rombongan belajar dalam jumlah terkecil dalam periode 2015. Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs dihitung berdasarkan jumlah kelas SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta. Idealnya, dalam satu kelas SMP/MTs terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Tabel 2.3.1.A.5 merupakan data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta.



Tabel 2.3.1.A.5

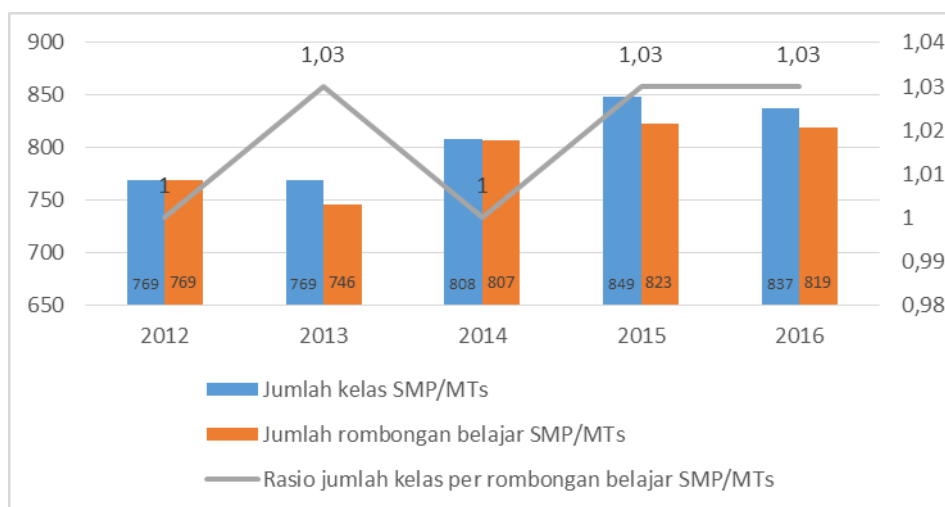
## Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kelas SMP/MTs	Unit	769	769	808	849	837	2,18
2.	Jumlah rombongan belajar SMP/MTs	Kelompok	769	746	807	823	819	1,67
3.	<b>Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs</b>	<b>unit/ kelompok</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>0,77</b>

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.5, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan meningkatnya jumlah kelas SMP/MTs, seperti pada tingkat SD/MI pula. Rata-rata rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta adalah 1, hal ini menunjukkan kesesuaian jumlah kelas dalam menampung rombongan belajar dalam jumlah yang ideal. Berikut grafik yang menunjukkan jumlah kelas, jumlah rombongan belajar, dan rasio antar keduanya.



Gambar 2.3.1.A.5 Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Secara umum berdasarkan Gambar 2.3.1.A.5 maka jumlah kelas SMP/MTs di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Jumlah kelas paling banyak yaitu pada tahun 2015, sebesar 849 unit. Jumlah rombongan belajar mengalami fluktuasi, tetapi pada umumnya mengalami peningkatan. Jumlah rombongan belajar yang menurun yaitu pada tahun 2012 ke 2013, yang kemudian kembali meningkat pada tahun 2014. Jumlah rombongan belajar paling banyak pada tahun 2016, sebesar 823 kelompok. Pada periode 2012 – 2016, rasio kelas dan rombongan belajar mengalami fluktuasi yang kecil, dengan nilai rasio disekitar angka 1.

## 2. Fasilitas Pendidikan

### 2.1. Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan. Data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik. Data jumlah kelas dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 2.3.1.A.6.

Tabel 2.3.1.A.6

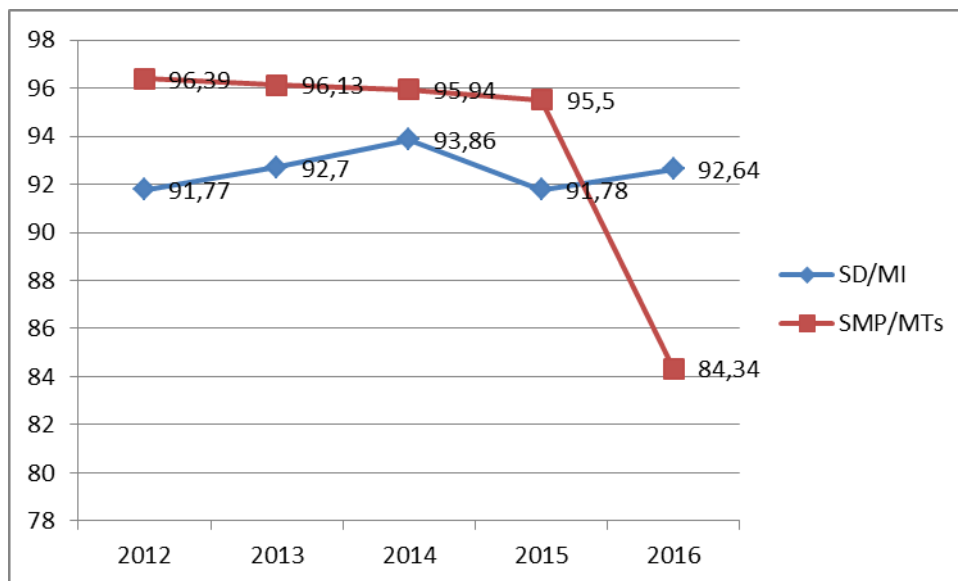
Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
	Jumlah Kelas Kondisi Baik							
1	SD/MI	Unit	1573	1575	1606	1508	1561	-0,12
2	SMP/MTs	Unit	747	769	803	807	706	-1,16
	Jumlah Seluruh Kelas							
1	SD/MI	Unit	1714	1699	1711	1643	1685	-0,397
2	SMP/MTs	Unit	775	800	837	845	837	1,965
	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik							
1	SD/MI	Persen	91,77	92,7	93,86	91,78	92,64	0,246
2	SMP/MTs	Persen	96,39	96,13	95,94	95,5	84,34	-3,153

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data pada Tabel 2.3.1.A.6 dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruang kelas pada semua jenjang pendidikan sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang semuanya menunjukkan angka di atas 90 persen. Hasil dari indikator ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkan hingga mencapai angka 100 persen agar para pelajar di Kota Yogyakarta dapat terfasilitasi dengan baik, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut Gambar 2.3.1.A.6 yang menunjukkan grafik persentase ruang kelas dalam kondisi baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.1.A.6. Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 – 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 – 6 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Tabel 2.3.1.A.7 merupakan data PAUD di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.3.1.A.7

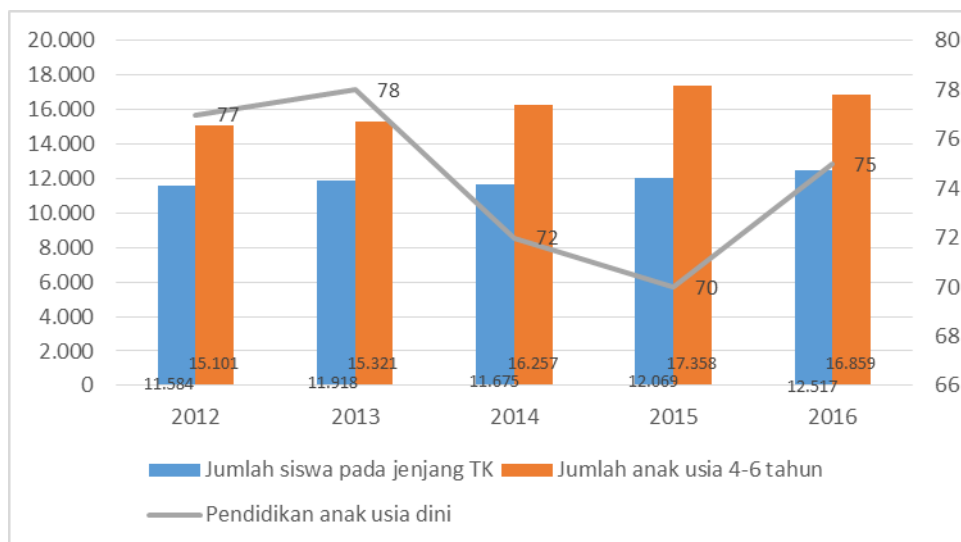
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK	Anak	11.584	11.918	11.675	12.069	12.517	1,98
2.	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Anak	15.101	15.321	16.257	17.358	16.859	2,87
3.	<b>Pendidikan anak usia dini</b>	<b>Persen</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>-0,51</b>

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.7 jumlah siswa TK di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, terutama tahun 2014 – 2016. Sementara itu, jumlah anak usia 4 – 6 tahun juga mengalami fluktuasi pula, dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan, sedangkan penurunan rasio terjadi pada tahun 2015 – 2016. Secara diagramatis, ditunjukkan sengan grafik pada Gambar 2.3.1.A.7.



Gambar 2.3.1.A.7 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Gambar 2.3.1.A.7 menunjukkan fluktuasi pendidikan anak usia dini yang cukup signifikan. Meskipun mengalami fluktuasi jumlah, jumlah siswa pada jenjang TK pada periode 2012 – 2016 memiliki jumlah antara 11.000 – 12.000 anak, sedangkan jumlah anak usia 4 – 6 tahun memiliki jumlah antara 15.000 – 17.000. Rasio pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan pada tahun 2012 ke 2013, yaitu dari 77 persen menjadi 78 persen, yang kemudian terus menurun di tahun 2014 dan 2015, hingga menjadi 72 persen, hingga kemudian meningkat lagi di tahun 2016. Rasio PAUD paling besar yaitu pada tahun 2013, sebesar 78 persen.

#### 4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.3.1.A.8.

Tabel 2.3.1.A.8

Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

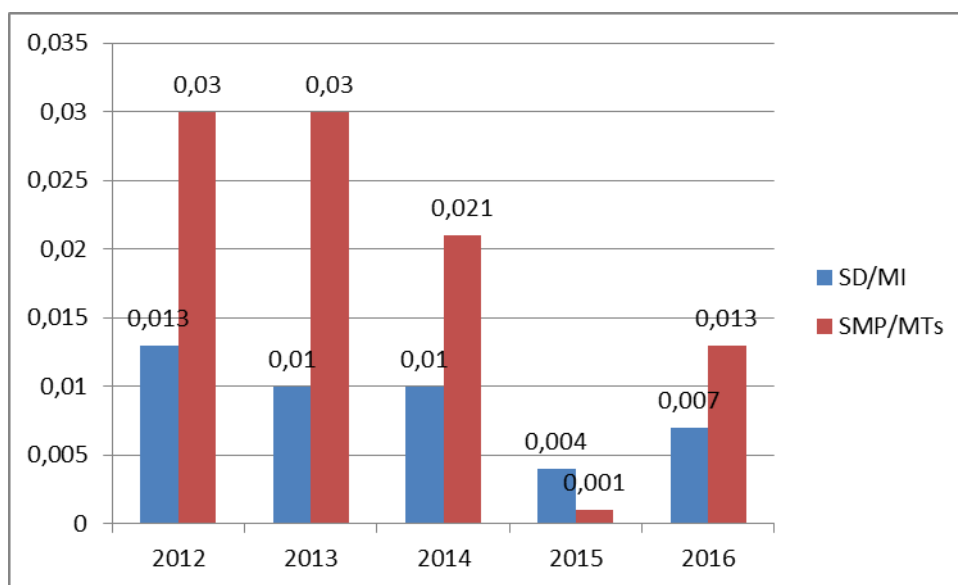
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	Persen	0,013	0,01	0,01	0,004	0,007	-2,02
2.	SMP/MTs	Persen	0,03	0,03	0,021	0,001	0,013	214,95

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.8, Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung menurun. Pada tahun 2012, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,13 persen dan terus mengalami penurunan hingga 0,007 persen pada tahun 2016. Berbeda dengan kondisi

angka putus sekolah jenjang SMP/MTs yang mengalami peningkatan, dari 0,03 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,013 persen. Namun jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata pada tiap jenjang pun menunjukkan angka negatif, yang mengisyaratkan adanya rata-rata penurunan angka putus sekolah. Hal tersebut mengisyaratkan kondisi yang baik di tiap jenjang pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada umumnya, angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA memiliki persentase paling tinggi. Grafik angka putus sekolah di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.3.1.A.8.



Gambar 2.3.1.A.8 Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Grafik 2.3.1.A.8 menunjukkan sebagaimana yang terlihat dalam kolom pertumbuhan rata-rata per tahun, pertumbuhan rata-rata Angka Putus sekolah menunjukkan bilangan negatif yang menggambarkan kondisi yang baik. Hal tersebut menjadi sebuah prestasi bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah melakukan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu di masa yang akan datang diharapkan upaya yang terus menerus dari Dinas Pendidikan untuk mendorong masyarakat agar semakin tertarik bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga mampu menekan angka putus sekolah hingga 0,000 persen. Pada tahun berikutnya, angka putus sekolah tidak lagi dinyatakan dalam persentase, melainkan dalam jumlah siswa. Sehingga diharapkan jumlah siswa yang putus sekolah dapat diketahui secara lebih riil.

## 5. Angka Kelulusan

### 5.1. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan

prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Data angka kelulusan di Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.3.1.A.9.

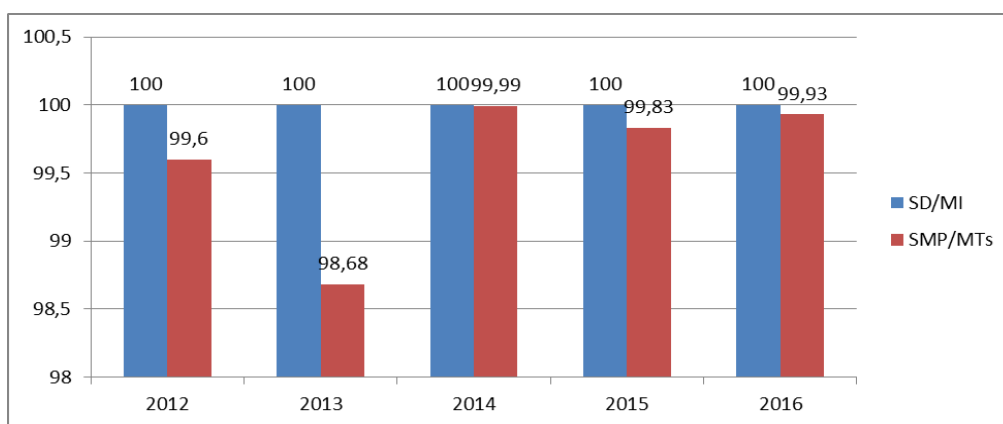
Tabel 2.3.1.A.9  
Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	0,00
2.	SMP/MTs	Persen	99,6	98,68	99,99	99,83	99,93	0,09

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.9, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung mengalami kenaikan. Angka kelulusan tingkat SD/MI selama delapan tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Kondisi ini harus dipertahankan agar angka kelulusan tidak turun dan tetap pada kondisi siswa lulus seluruhnya. Angka kelulusan tingkat SMP/MTs mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hingga mencapai 99,99 persen pada tahun 2015. Kecenderungan yang meningkat untuk kelulusan semua tingkat pendidikan ini mengindikasikan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan angka kelulusan tersebut. Gambar 2.3.1.A.9 menunjukkan grafik angka kelulusan di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.1.A.9 Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Grafik 2.3.1.A.9 menunjukkan kecenderungan angka kelulusan di Kota Yogyakarta yang semakin meningkat. Tahun 2012-2016, angka kelulusan SD/MI meningkat menjadi 100 persen, dan dapat dipertahankan dalam kelulusan seluruhnya hingga tahun-tahun selanjutnya. Angka kelulusan SMP/MTs juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 – 2016. Pada tahun 2014, angka kelulusan SMP/MTs meningkat signifikan menjadi lebih dari 99,98 persen, dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 99,83 persen. Angka kelulusan SMP/MTs paling tinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 99,99 persen, yang menurun pada tahun 2015 menjadi 99,83 persen. Peningkatan angka kelulusan secara umum dari tahun ke tahun di Kota Yogyakarta ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan.

## 5.2. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.A.10.

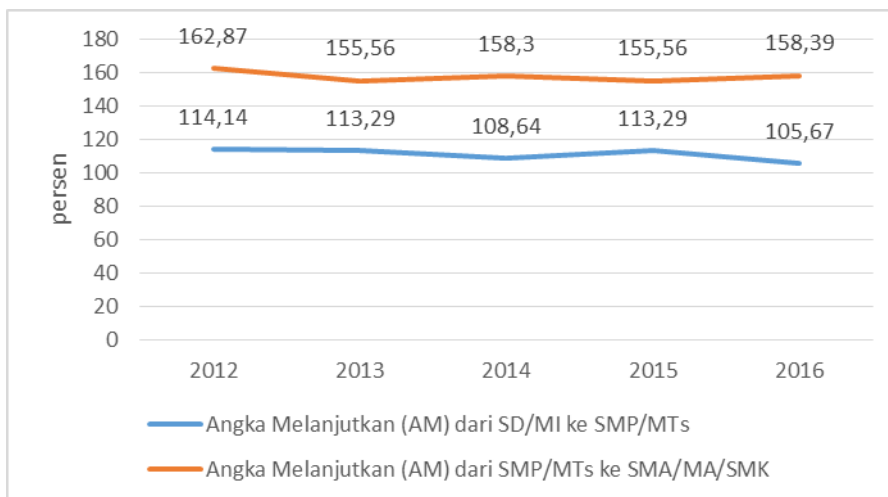
Tabel 2.3.1.A.10  
Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	114,14	113,29	108,64	108,64	105,67	-1,90
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Persen	162,87	155,56	158,3	158,3	158,39	-0,67

Sumber:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.10, angka melanjutkan baik dari SD/MI ke SMP/MTs maupun dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK di Kota Yogyakarta cenderung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Angka melanjutkan sekolah yang lebih dari 100 persen disebabkan banyaknya pelajar dari luar kota yang melanjutkan sekolah di Kota Yogyakarta. Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta masih dianggap lebih baik dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Rata-rata angka melanjutkan di Kota Yogyakarta lebih besar dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, menunjukkan banyaknya siswa dari luar daerah yang memilih sekolah SMA/MA/SMK di Kota Yogyakarta. Grafik angka melanjutkan di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.3.1.A.10.



Gambar 2.3.1.A.10. Grafik Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Gambar 2.3.1.A.10 menunjukkan grafik fluktuasi angka melanjutkan di Kota Yogyakarta, dengan fluktuasi yang tidak begitu signifikan. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs paling tinggi pada tahun 2015, yaitu 113,29 persen, sedangkan pada tahun 2015 merupakan angka paling rendah, yaitu 105,67 persen. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK paling tinggi pada tahun 2012, yaitu 162,87 persen, sedangkan paling rendah pada tahun 2009, yaitu 155,56 persen.. Fluktuasi jumlah angka melanjutkan tersebut juga dapat merepresentasikan meningkat atau berkurangnya jumlah siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Serta, dengan tingginya angka melanjutkan (lebih dari 100 persen) menunjukkan kualitas pendidikan yang baik di Kota Yogyakarta.

### 5.3. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazal minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.A.11.

Tabel 2.3.1.A.11

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

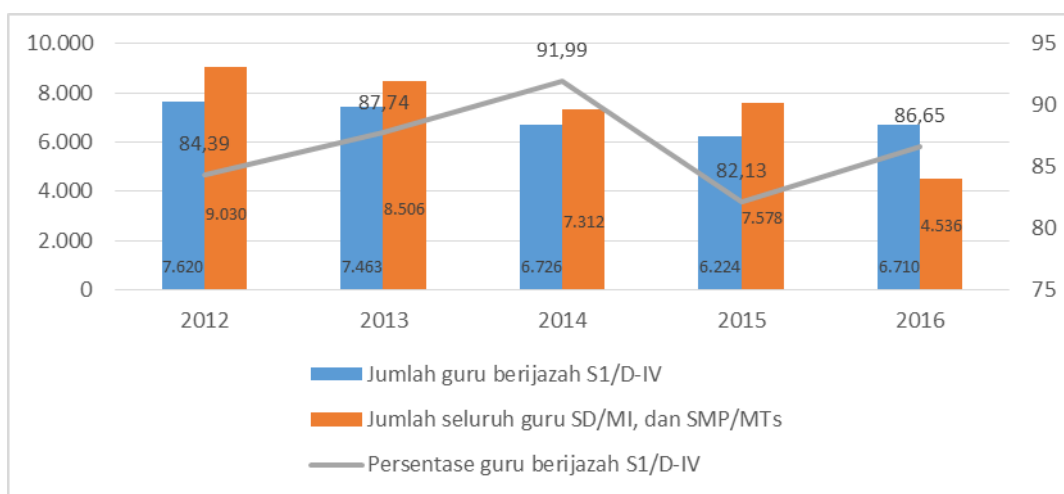
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru berijazah S1/D-IV	Orang	7.620	7.463	6.726	6.224	6.710	-2,90
2.	Jumlah seluruh guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Orang	9.030	8.506	7.312	7.578	4.536	-14,09
3.	Persentase guru berijazah S1/D-IV	Persen	84,39	87,74	91,99	82,13	86,85	0,96

Sumber:



1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.A.11, persentase guru berijazah S1/D-IV di Kota Yogyakarta dalam periode 2012 – 2016 cenderung mengalami penurunan. Jumlah guru berijazah S1/D-IV maupun jumlah guru secara keseluruhan mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, jumlah guru berijazah S1/D-IV memiliki jumlah paling tinggi, yaitu 7.620 orang, selain itu jumlah guru keseluruhan juga memiliki jumlah paling tinggi, yaitu 9.030 orang. Rata-rata persentase guru berijazah S1/D-IV pada periode 2012 – 2016 sebesar lebih dari 80 persen, dengan persentase paling tinggi pada tahun 2014 sebesar 91,99 persen. Grafik persentase guru berijazah S1/D-IV di Kota Yogyakarta disajikan pada Gambar 2.3.1.A.11.



Gambar 2.3.1.A.81. Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Sedangkan gambaran kondisi guru tersaji dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3.1.A.12** Jumlah Guru PNS Berdasarkan status sekolah

Status	L/P	Jenjang				Total
		SD	MI	SMP	MTs	
Negeri	L	297	10	176	10	1049
	P	726	8	348	30	1797
Swasta	L	21	2	31	9	128
	P	51	2	94	13	269
Jumlah		1095	22	649	62	3243

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Jumlah guru PNS perempuan mendominasi di setiap jenjang pendidikan dengan guru terbanyak dengan status negeri pada jenjang SD, sedangkan pada status swasta guru terbanyak pada jenjang SMP.

**Tabel 2.3.1.A.13 Kualifikasi Guru Berjenjang**

Status	L/P	Jenjang				Total	%
		SD	MI	SMP	MTs		
<S1	L	103	1	63	0	167	7,63
	P	111	2	53	13	179	
S1	L	759	7	506	73	1345	86,93
	P	1684	19	819	76	2598	
>S1	L	43	2	43	19	107	5,45
	P	53	3	68	16	140	
Jumlah		2753	34	1552	197	4539	100

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Jenjang kualifikasi guru paling banyak adalah S1 sejumlah 86,93% sedangkan dibawah S1 dan diatas S1 hampir sama.

**Tabel 2.3.1.A.14 Jumlah Guru Tersertifikasi**

Kondisi	Jenjang		Total	%
	SD	SMP		
Jumlah guru	2753	1552	4305	
Guru yang diangkat setelah tahun 2005	970	340	1310	
Guru tersertifikasi	1689	1145	2834	
Persentase	96,59	95,68	96,26	
			belum	3,74
			sudah	96,26

Sumber : Dinas Pendidikan, 2017

Guru yang mempunyai sertifikasi hampir semuanya yaitu 96,26% dari total jumlah guru yaitu 4305 orang.

## B. Kesehatan

### 1. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai.

Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi 4 macam, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal tersebut ditujukan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.B.1

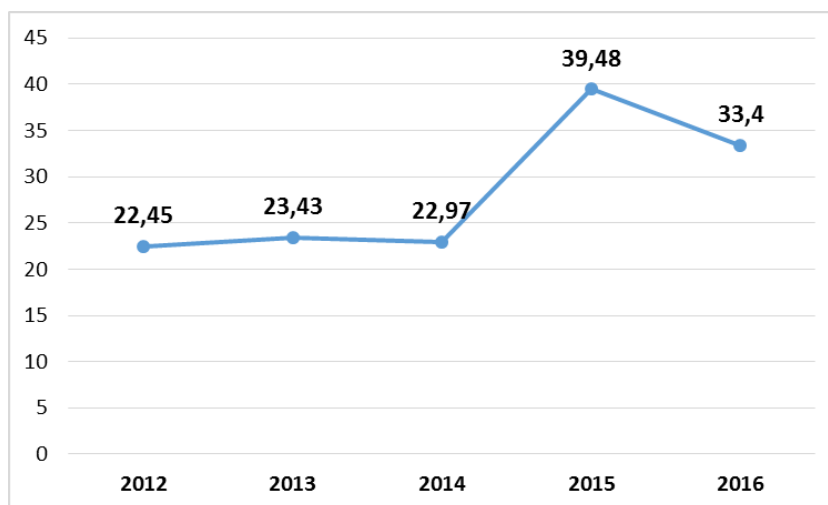
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Posyandu	Unit	622	625	625	625	625	0,12
2.	Jumlah Balita	Anak	27.701	26.671	27.209	15.832	18.713	-6,33
3.	<b>Rasio posyandu per satuan balita</b>	<b>Per 1.000 balita</b>	<b>22,45</b>	<b>23,43</b>	<b>22,97</b>	<b>39,48</b>	<b>33,40</b>	<b>14,72</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.1, rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2015. Pada tahun 2015, rasio posyandu per satuan balita sebesar 39,48, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 39 posyandu. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan pada layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 45 kelurahan. Selain itu, pada tahun 2015, terjadi penurunan jumlah balita yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, jumlah posyandu sebesar 625 unit dan jumlah balita sebanyak 15.832 anak (jumlah balita paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya). Grafik rasio posyandu di Kota Yogyakarta disajikan pada Gambar 2.3.1.B.1.



Gambar 2.3.1.B.1 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 mengalami fluktuasi yang bervariasi. Pada periode 2012 – 2014, fluktuasi rasio posyandu tersebut tidak begitu signifikan. Dapat dilihat pada grafik di atas, bahwa pada rentang tahun 2012 – 2014, rasio posyandu berada pada angka 21 – 23. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2015, yang meningkat lebih dari 70 persen dari tahun sebelumnya. Semakin besar rasio posyandu merepresentasikan semakin baiknya daya layanan fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan balita.

## 2. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.2.

Tabel 2.3.1.B.2

Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Puskesmas	Unit	18	18	18	18	18	0,00
	Puskesmas Pembantu	Unit	11	10	8	9	9	-4,15
	Klinik	Unit	23	65	46	74	86	57,62
	Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik	Unit	52	93	72	101	113	27,11
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3.	<b>Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk</b>	<b>Per 100.000 jiwa</b>	<b>12,16</b>	<b>22,87</b>	<b>17,39</b>	<b>24,67</b>	<b>27,48</b>	<b>29,34</b>

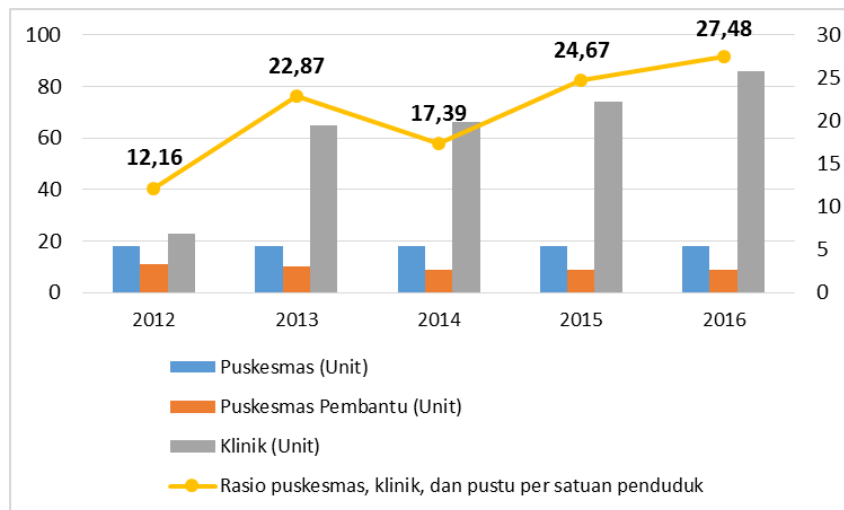
Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2010-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.3, rasio puskesmas, klinik, dan pustu di Kota Yogyakarta dalam periode 2012 – 2016 mengalami kenaikan rasio, meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2015. Pada tahun 2016, rasio puskesmas, klinik, dan pustu memiliki angka paling tinggi dalam periode 2012 – 2016, yaitu 27,48. Rasio tersebut berarti sekitar 24 – 25 puskesmas/ klinik/ pustu melayani 100.000 penduduk atau satu puskesmas/ klinik/ pustu melayani 4.000 penduduk. Meningkatnya rasio puskesmas, klinik, pustu disebabkan oleh meningkatnya jumlah puskesmas, klinik, dan pustu. Sementara itu, jumlah penduduk pada periode 2012 – 2016 mengalami kecenderungan menurun. Jumlah puskesmas, klinik, dan pustu memiliki kecenderungan meningkat, hingga berjumlah 101 pada tahun 2015. Peningkatan tersebut khususnya terdapat pada jumlah klinik, sedangkan jumlah puskesmas tetap dan jumlah pustu menurun.

Komposisi jumlah pada tahun 2015 yaitu persentase puskesmas sebesar 17,82 persen; pustu sebesar 8,91 persen; dan klinik sebesar 73,27 persen. Rata-rata komposisi jumlah pada periode 2012 – 2016 yaitu persentase puskesmas sebesar 24,20 persen; pustu sebesar 13,40 persen; dan klinik sebesar 62,40 persen. Berdasarkan komposisinya, pada tahun 2015 rasio puskesmas sebesar 4,46; rasio pustu sebesar 2,23; dan rasio

klirik sebesar 18,32. Rasio tersebut berarti 100.000 penduduk dapat dilayani oleh empat sampai lima puskesmas, dua pustu, dan 18 klinik. Hal tersebut berarti pula bahwa satu puskesmas melayani 25.000 penduduk, satu pustu melayani 50.000 penduduk, dan satu klinik melayani 5.556 penduduk. Standard nasional pelayanan minimal adalah satu puskesmas melayani 30.000 jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta telah memenuhi standard nasional tersebut. Grafik rasio puskesmas, pustu, dan klinik di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.3.1.B.2.



Gambar 2.3.1.B.2 Grafik Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rasio Puskesmas, Klinik, dan Pustu di Kota Yogyakarta meningkat pada periode 2013 – 2016. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2013, dengan peningkatan lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, rasio tersebut menurun pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 kembali meningkat hingga mencapai rasio 24,67. Bertambahnya jumlah puskesmas, klinik, dan pustu di Kota Yogyakarta adalah hal yang sangat baik. Puskesmas, klinik, dan pustu yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Semakin meningkatnya rasio ini diharapkan dapat semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

### 3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.3.

Tabel 2.3.1.B.3

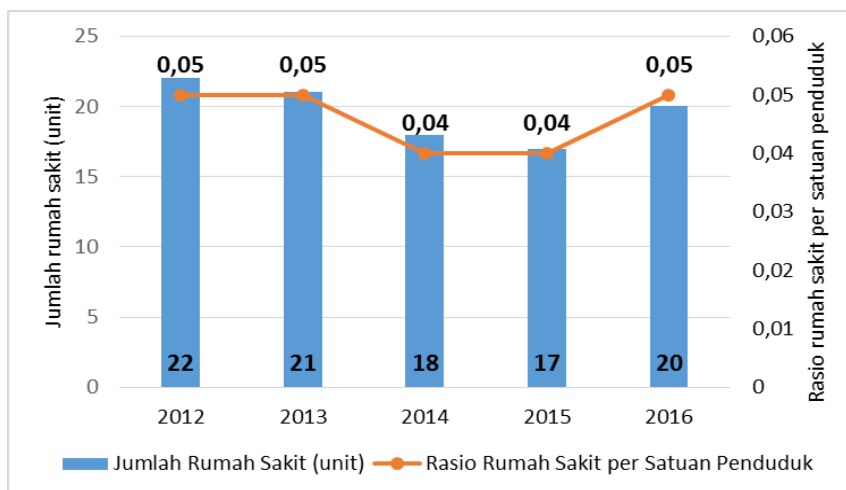
## Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Rumah Sakit	unit	22	21	18	17	20	-1,68
2.	Jumlah penduduk	jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3.	<b>Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>1,25</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012 – 2015 cenderung mengalami penurunan, dan meningkat lagi di tahun 2016. Pada tahun 2015, rasio rumah sakit sebesar 0,04, berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,04 rumah sakit, atau setiap 100.000 penduduk dilayani 4 rumah sakit, atau setiap 1 rumah sakit mampu melayani 25.000 jiwa. Penurunan rasio rumah sakit disebabkan jumlah rumah sakit yang juga menurun hampir setiap tahunnya pada periode tahun 2010 – 2015. Sementara itu, jumlah penduduk juga mengalami penurunan. Grafik rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.3.



Gambar 2.3.1.B.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rasio rumah sakit paling tinggi yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 2016, sebesar 0,05. Pada tahun 2012, jumlah rumah sakit di Kota Yogyakarta juga merupakan jumlah paling banyak pada periode 2012 – 2016, yaitu 22 unit. Jumlah tersebut terus menurun, dengan penurunan yang paling signifikan pada tahun 2013 ke 2014, dari 21 unit menjadi 18 unit. Rasio rumah sakit pada tahun 2012 – 2013 tetap, yaitu 0,05. Kemudian pada tahun 2014 –

2015 rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta kembali menurun, menjadi 0,04. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum, tingkat pelayanan rumah sakit dalam cakupan wilayah kabupaten/ kota adalah satu unit rumah sakit melayani 240.000 jiwa. Berdasarkan standar tersebut, pelayanan rumah sakit di Kota Yogyakarta telah memenuhi karena satu unit rumah sakit mampu melayani 25.000 jiwa.

#### 4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta. Rasio praktek dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.4.

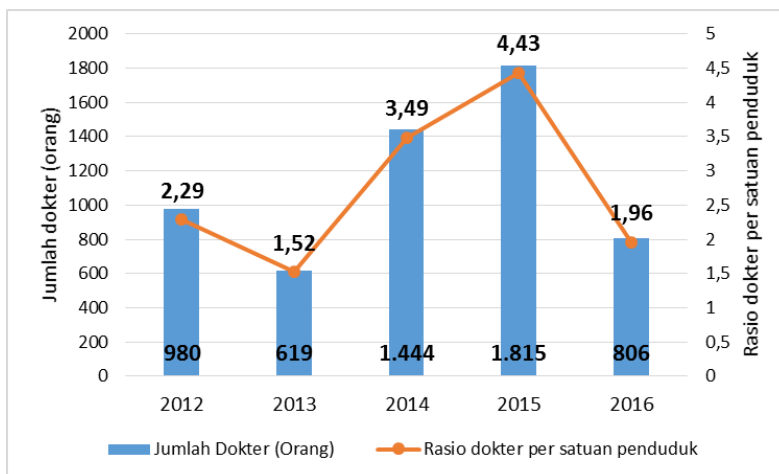
Tabel 2.3.1.B.4  
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah dokter	Orang	980	619	1.444	1.815	806	16,64
2.	Jumlah penduduk	Orang	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3.	<b>Rasio dokter per satuan penduduk</b>		<b>2,29</b>	<b>1,52</b>	<b>3,49</b>	<b>4,43</b>	<b>1,96</b>	<b>16,79</b>

Sumber:

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.4, rasio praktik dokter (baik dokter umum maupun spesialis) per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2012-2015, dan menurun pada tahun 2016. Pada tahun 2012, rasio dokter sebesar 2,29, artinya terdapat 2 – 3 dokter praktik melayani 10.000 penduduk. Rasio dokter paling tinggi yaitu 4,43 pada tahun 2015, yang berarti 4 dokter praktik melayani 10.000 penduduk atau 1 dokter melayani kurang lebih 2.500 penduduk. Peningkatan rasio dokter disebabkan karena jumlah dokter praktik juga cenderung meningkat. Pada tahun 2015, jumlah dokter praktik juga merupakan jumlah paling banyak dalam periode 2010 – 2015, yaitu 1.815 orang. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/II/2004, rasio dokter dalam suatu provinsi dapat ditetapkan dengan perbandingan 1 : 5000 sampai 1 : 2.500 (satu dokter melayani 2.500 – 5.000 penduduk). Berdasarkan hal tersebut, rasio dokter di Kota Yogyakarta telah memenuhi perbandingan tersebut, khususnya mulai tahun 2011 dan 2012 dengan rasio 1 : 5.000, tahun 2014 dengan rasio 1 : 3.000, dan tahun 2015 dengan rasio 1 : 2.500. Grafik rasio dokter di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.3.1.B.4.



Gambar 2.3.1.B.4 Grafik Rasio Praktek Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Jumlah dokter mengalami penurunan pada tahun 2013, meningkat pada tahun 2014 – 2015, dan mengalami penurunan lagi di tahun 2016. Pada tahun 2014, jumlah dokter meningkat signifikan, lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah dokter meningkat kembali pada tahun 2015. Secara umum, rasio jumlah dokter akan memiliki tren yang sama dengan jumlah dokter. Pada tahun 2013, rasio dokter berada pada nilai yang paling rendah pada periode 2010 – 2016. Sementara itu, peningkatan paling signifikan juga terjadi pada tahun 2013 ke 2014, dengan rasio yang terus meningkat pada tahun 2015.

## 5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Tenaga medis merupakan tenaga dokter baik dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang dimaksud adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah baik berstatus PNS maupun bukan. Berikut merupakan rasio tenaga medis di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

Tabel 2.3.1.B.5

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Tenaga medis	Orang	715	1014	1307	711*	863*
Rasio tenaga medis	Per 1.000	1,67	2,49	3,16	NA	NA

Sumber: Bagian Regulasi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2015

\*Terdapat perbedaan cara penghitungan, yaitu berdasarkan jumlah tenaga medias, pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan jumlah surat izin praktek

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.5, rasio tenaga medis di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun awal yaitu 2012, rasio tenaga medis sebesar 1,67 per 1.000 penduduk, artinya



setiap 10.000 penduduk ditangani oleh 1,67 tenaga medis (yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi). Atau dapat dikatakan 1-2 tenaga medis dapat melayani 1.000 penduduk atau rata-rata satu tenaga medis melayani 500 penduduk. Angka ini semakin naik dari tahun ke tahun, hingga di tahun 2014 mencapai 3,16 per 1.000 penduduk. Angka tersebut berarti bahwa sekitar tiga tenaga medis melayani 1.000 penduduk atau satu tenaga medis melayani lebih dari 300 penduduk.

Rasio tenaga medis di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang berbeda-beda. Peningkatan yang paling signifikan pada periode 2012 – 2016 yaitu pada tahun 2012 ke 2013. Rasio terus meningkat hingga pada tahun 2014 merupakan rasio tertinggi pada periode 2007 – 2014, yaitu 3,16. Rasio yang terus meningkat disebabkan jumlah tenaga medis yang terus meningkat pula. Jumlah tenaga medis pada tahun 2007 yaitu 193 orang, yang terus meningkat hingga pada tahun 2014 berjumlah 1.307. Semakin banyak tenaga medis dapat berarti semakin efektif pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

## 6. Rasio Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Per Satuan Penduduk

Rasio perawat, perawat gigi, dan bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat, perawat gigi, dan bidan terhadap jumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Perawat, perawat gigi, dan bidan merupakan tenaga medis non dokter yang juga dapat memberikan pelayanan dengan kapasitas dan spesialisasi yang berbeda. Semakin besar rasio perawat, perawat gigi, dan bidan maka dapat merepresentasikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih efektif. Rasio perawat gigi di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.6.

Tabel 2.3.1.B.6

Rasio Perawat Gigi Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah perawat gigi	Orang	68	67	74	99	91	4,49
2.	Jumlah penduduk	Orang	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3.	<b>Rasio perawat gigi per satuan penduduk</b>	<b>Per 100.000</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>6,25</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Perawat gigi adalah profesi tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional. Jumlah perawat gigi di Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, jumlah perawat gigi sebanyak 68 orang, kemudian menurun pada tahun 2013, hingga pada tahun 2014, 2015, dan 2016 meningkat. Pola yang sama terjadi pada rasio perawat gigi, dengan rasio terbesar pada tahun 2015 sebesar 24 perawat gigi per 100.000 penduduk, kemudian pada tahun 2012 – 2013 menurun menjadi 16 perawat gigi per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, rasio kembali meningkat menjadi 18 perawat gigi per 100.000 penduduk.

Perawat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Rasio perawat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat dan jumlah penduduk dalam 100.000 penduduk. Perkembangan rasio perawat di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.7.

Tabel 2.3.1.B.7

Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah perawat	Orang	3.785	2.053	2.204	827	2.192	16,04
2.	Jumlah penduduk	Orang	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
<b>3.</b>	<b>Rasio perawat per satuan penduduk</b>	<b>Per 100.000</b>	<b>885</b>	<b>505</b>	<b>532</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>-9,35</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Rasio perawat di Kota Yogyakarta fluktuatif, dengan kecenderungan menurun Jumlah perawat juga memiliki pola yang sama, sementara jumlah penduduk memiliki kecenderungan menurun. Jumlah perawat paling banyak yaitu pada tahun 2012 (3.785 orang). Jumlah perawat pada tahun 2011 sejumlah 2.003 orang meningkat signifikan pada tahun 2012, kemudian kembali menurun signifikan pada tahun 2013 (2.053 orang) dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 2.204 orang. Rasio perawat juga memiliki nilai paling tinggi pada tahun 2012, yaitu 885 perawat per 100.000 penduduk. Rasio perawat paling rendah pada tahun 2011, yaitu 455 perawat per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013 sebesar 505 dan pada tahun 2014 sebesar 532 perawat per 100.000 penduduk.

Disamping perawat, tenaga medis berupa bidan juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, khususnya untuk ibu dan anak. Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (2006) merupakan seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). Rasio bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah bidan dan jumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Jumlah dan rasio bidan di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.8.

Tabel 2.3.1.B.8

## Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah bidan	Orang	303	309	310	307	298	-0,40
2.	Jumlah penduduk	Orang	427.591	406.660	413.936	409487	411282	-0,74
3.	<b>Rasio bidan per satuan penduduk</b>	<b>Per 100.000</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>0,43</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Jumlah bidan di Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016, dengan kecenderungan menurun, meskipun dengan jumlah yang tidak begitu signifikan. Rata-rata jumlah bidan di Kota Yogyakarta yaitu 308 orang. Jumlah bidan paling banyak pada tahun 2011 yaitu 311 orang, dengan jumlah yang hampir sama yaitu pada tahun 2014 sebanyak 310 orang. Jumlah bidan paling rendah pada tahun 2012, yaitu 303 orang, sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 309 orang. Rasio bidan mengalami kecenderungan meningkat. Hal tersebut disebabkan jumlah bidan menurun dengan tidak signifikan, sedangkan jumlah penduduk juga menurun tetapi dengan penurunan yang lebih besar. Bidan pada tahun 2011 dan 2012 memiliki rasio yang sama, yaitu 71 bidan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 76 bidan per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 75 bidan per 100.000 penduduk.

## 7. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada bumil, bulin, dan bufas dengan komplikasi. Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.9.

Tabel 2.3.1.B.9

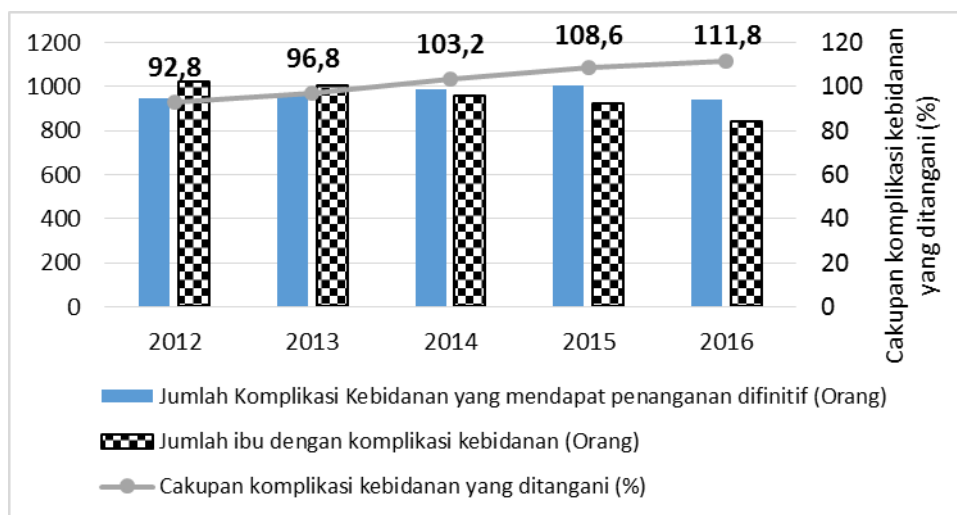
## Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat Penanganan	Orang	946	972	987	1.005	942	-0,04
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	1.020	1.005	956	925	843	-4,61
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	92,8	96,8	103,2	108,6	111,8	4,78

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.9, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012– 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat. Cakupan komplikasi kebidanan paling tinggi yaitu pada tahun 2015, sebesar 108,6 persen, sedangkan paling rendah pada tahun 2012, sebesar 92,8 persen. Semakin besar persentase menunjukkan bahwa semakin besar penanganan yang diberikan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan. Jumlah penanganan komplikasi kebidanan paling banyak yaitu pada tahun 2015, sebesar 1.005 orang, sedangkan paling sedikit pada tahun 2016, sebesar 942 orang. Dengan demikian, semakin besar terselesaikannya (penanganan) komplikasi kebidanan menunjukkan semakin baik kualitas dan kuantitas bidan dalam menangani masalah kebidanan. Grafik cakupan komplikasi kebidanan di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.3.1.B.5.



Gambar 2.3.1.B.5 Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2012, cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 92,8 persen, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2013 menjadi 96,8 persen. Setelah itu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 dan 2014 hingga mencapai 108,6 persen pada tahun 2015. Besaran cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta sudah lebih dari target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 80 persen. SPM tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

741/Menkes/Per/VII/2008, yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan dasar berupa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 persen pada tahun 2015. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar seluruh komplikasi pada ibu hamil dan melahirkan mendapat penanganan yang lebih baik.

#### 8. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan merupakan perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.10.

Tabel 2.3.1.B.10

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan  
di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

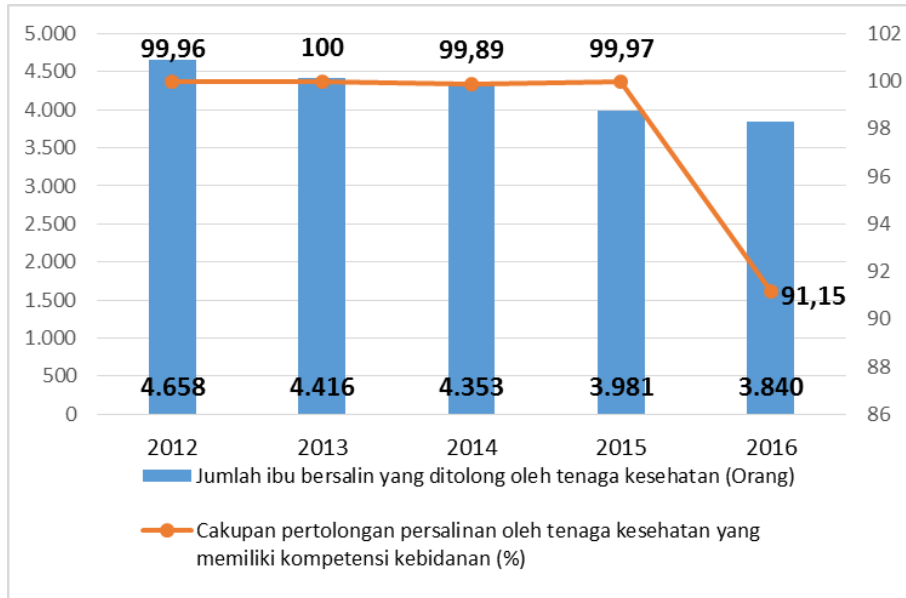
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	Orang	4.658	4.416	4.353	3.981	3.840	-0,04
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang	4.660	4.416	4.358	3.982	4.213	-4,61
3.	<b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</b>	<b>Persen</b>	<b>99,96</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>	<b>99,97</b>	<b>91,15</b>	<b>4,78</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.10, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012 – 2016 memiliki kecenderungan tetap – menurun, berada pada kisaran angka 99 – 100 persen. Persentase tersebut merepresentasikan kondisi yang baik, tetapi perlu menjadi perhatian bahwa selama tahun 2012 – 2015 pertumbuhan rata-rata cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami sedikit penurunan. Penurunan ini perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan hingga mencapai 100 persen setiap tahun,

agar seluruh ibu melahirkan mendapatkan pertolongan dengan baik, sehingga pada tahap selanjutnya akan dapat menekan angka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan. Persentase 100 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan terdapat pada tahun 2011 dan 2013, menunjukkan seluruh sasaran ibu bersalin ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Grafik cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta ditunjukkan dalam Gambar 2.3.1.B.6.



Gambar 2.3.1.B.6 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta memiliki fluktuasi yang cukup beragam setiap tahunnya. Pada tahun 2012 ke 2013 meningkat sebesar 0,04 persen menjadi 100 persen, kemudian menurun kembali sebesar 0,11 persen pada tahun 2014. Tahun 2015 persentase meningkat kembali di angka 100, sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 99,9 (turun 0,10 persen, yang merupakan persentase terendah dalam periode 2012– 2016). Tahun 2015 persentase naik 0,07 persen menjadi 99,97, Pada tahun 2015 ini, sasaran ibu bersalin sebesar 3.982 orang, sedangkan jumlah ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebesar 3.981 orang (selisih satu orang). Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka besaran cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir ini sudah melebihi target nasional, yaitu 90 persen.

## 9. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

*Universal Child Immunization* (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 – 11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Imunisasi memberikan

kontribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka harapan hidup. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Semakin besar persentase maka semakin besar pula cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization. Perkembangan cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta ditunjukkan dalam Tabel 2.3.1.B.11.

Tabel 2.3.1.B.11

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Kelurahan UCI	Unit	45	45	45	45	45	0,00
2.	Jumlah Seluruh Kelurahan	Unit	45	45	45	45	45	0,00
3.	<b>Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Sumber :

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.11, cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012– 2016 telah mencapai 100 persen, berarti bahwa seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta (45 kelurahan) termasuk dalam UCI. Angka tersebut sesuai dengan target nasional, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas, maupun rumah sakit. Kondisi ini harus dipertahankan untuk mendapatkan cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya.

#### 10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun sarana kesehatan. Perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.12.

Tabel 2.3.1.B.12

## Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Anak	120	171	165	109	96	-1,72
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	120	171	165	109	96	-1,72
<b>3.</b>	<b>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Sumber:

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.12, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100 persen). Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta sudah mampu mencapainya. Pada tahun 2015, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebesar 109 anak, yang seluruhnya mendapatkan perawatan. Beberapa upaya untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat telah dilakukan antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Operasional Rumah Pemulihan Gizi serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.

#### 11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.13.



Tabel 2.3.1.B.13

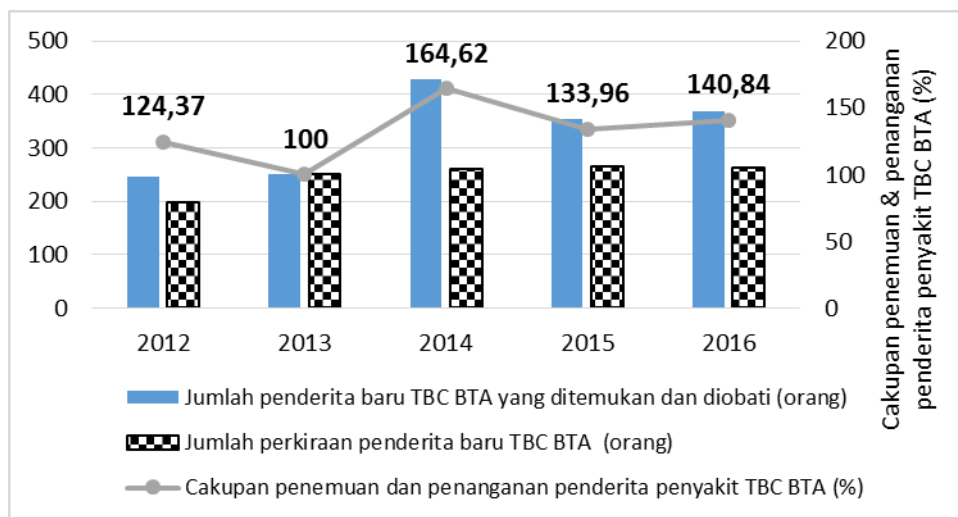
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	Orang	245	251	428	355	369	14,96
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA	Orang	197	251	260	265	262	7,95
3.	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA</b>	<b>Persen</b>	<b>124,37</b>	<b>100</b>	<b>164,62</b>	<b>133,96</b>	<b>140,84</b>	<b>7,88</b>

Sumber:

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016) ; Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.13, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuasi yang cenderung menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati semakin besar, sedangkan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA semakin berkurang. Pada tahun 2013, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA sebesar 100 persen, yang berarti bahwa jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati sama dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA, yaitu sejumlah 251 orang. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA paling rendah sebesar 70,65 persen pada tahun 2011; sedangkan paling tinggi sebesar 164,62 persen pada tahun 2014. Grafik cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta disajikan dalam Gambar 2.3.1.B.7.



Gambar 2.3.1.B.7 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2012, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA mencapai 124,37 persen, tetapi mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 100 persen. Tahun 2014, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BT kembali meningkat mencapai 164,62 persen, tetapi kemudian menurun di tahun 2015 menjadi 133,96 persen. Selanjutnya, meningkat secara signifikan di tahun 2016 menjadi 140,84 persen. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012 – 2016 telah dapat mencapainya. Akan tetapi, tetap diperlukan penanganan yang maksimal agar jumlah penderita TBC BTA tidak meningkat di masa yang akan datang.

Untuk penanganan sejak dini kasus TBC di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah membuat jejaring dengan rumah sakit se-Kota Yogyakarta, dokter praktik dan Kelompok Aisyah. Melalui jaringan tersebut, warga yang ditemukan sakit dengan segera gejala batuk selama tiga minggu dan tidak sembuh, maka akan dimotivasi untuk melakukan pemeriksaan BTA-Basil Tahan Asam. Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut.

Jika dilihat dari jumlah penemuan penderita TBC BTA, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penderita, mulai dari 245 di tahun 2012 hingga meningkat menjadi 369 penderita di tahun 2016 (jumlah penderita paling banyak). Peningkatan penemuan jumlah penderita penyakit karena didukung sistem pencatatan dan pelaporan semakin akurat, kemampuan petugas, jumlah sarana pelayanan dan kelengkapan alat untuk mendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan yang semakin baik.

## 12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama satu tahun dan jumlah

penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.14.

Tabel 2.3.1.B.14

## Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

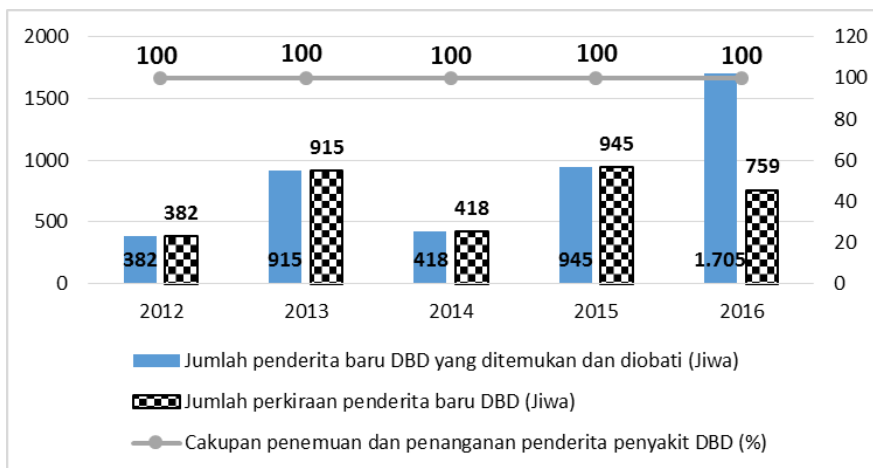
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobati	Jiwa	382	915	418	945	1.705	72,93
2.	Jumlah perkiraan penderita baru DBD	Jiwa	382	915	418	945	759	47,90
3.	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Sumber:

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016) ; Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.14, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 telah mencapai 100 persen, berarti seluruh penderita penyakit DBD yang ditemukan sudah ditangani. Meskipun secara penanganan sudah 100%, masalah DBD ini harus menjadi perhatian. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan dalam lima tahun terakhir. Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati paling banyak pada tahun 2016, sebanyak 1.705 jiwa. Pada tahun 2012, jumlah penderita penyakit DB adalah sejumlah 382 jiwa, kemudian meningkat menjadi 915 jiwa pada tahun 2013.. Pada tahun 2014, jumlah penderita menurun menjadi 418 jiwa, tetapi kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 945 jiwa. Secara lebih jelas, grafik jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.3.1.B.8.

Diperlukan upaya pemberantasan DBD untuk mengurangi kasus penderita DBD. Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes berkembang biak. Kasus penyakit DBD di Kota Yogyakarta mengalami pasang surut. Hal ini perlu adanya kewaspadaan dini dalam menanggulangi terjadinya wabah DBD karena angka bebas jentiknya (ABJ) di Kota Yogyakarta belum dapat mencapai 95 persen. ABJ di Kota Yogyakarta dengan kisaran angka 80-85 persen, masih dimungkinkan terjadinya peningkatan kasus DBD.



Gambar 2.3.1.B.8 Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan perbandingan antara jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3 dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Data cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.15.

Tabel 2.3.1.B.15

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

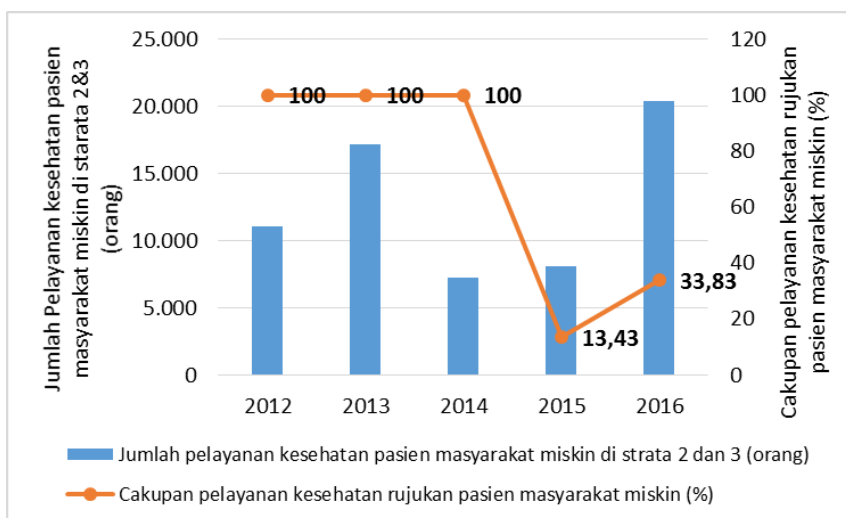
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3	Orang	11.090	17.192	7.269	165.181	20.365	520,51
2.	Jumlah masyarakat miskin yang mengakses layanan	Orang	11.090	17.192	7.269	165.181	20.365	520,51
3.	<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Sumber :

1. Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.15, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012 – 2016 menunjukkan kecenderungan meningkat. Mulai tahun 2012 hingga 2016, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 100 persen atau lebih,

menunjukkan standar pelayanan kesehatan yang baik. Cakupan pelayanan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2015 sebesar 274 persen. Hal tersebut disebabkan jumlah pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan jumlah masyarakat miskin. Pada tahun 2010, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 40,27 persen, yang artinya 40.888 masyarakat miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan kondisi pada tahun 2011, hanya sebesar 10,73 persen masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Grafik cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta disajikan dalam Gambar 2.3.1.B.9.



45Gambar 2.3.1.B.9 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2012 ke tahun 2013. Sementara itu, pada tahun 2014 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2015 meningkat kembali secara signifikan, begitu pula dengan tahun 2016. Pada tahun 2015, jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3 juga sangat tinggi, melampaui jumlah masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, jumlah masyarakat miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 juga meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta secara umum mengalami perubahan yang positif, yaitu seluruh masyarakat miskin telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen maka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta telah memenuhi standar. Dengan demikian, pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta harus dipertahankan dan dilakukan peningkatan kualitas. Di sisi lain, diperlukan pengentasan kemiskinan yang gencar untuk semakin mengurangi jumlah masyarakat miskin setiap tahunnya.

#### 14. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui efektivitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Semakin besar persentase kunjungan bayi menunjukkan semakin efektif, serta semakin baik continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.B.16

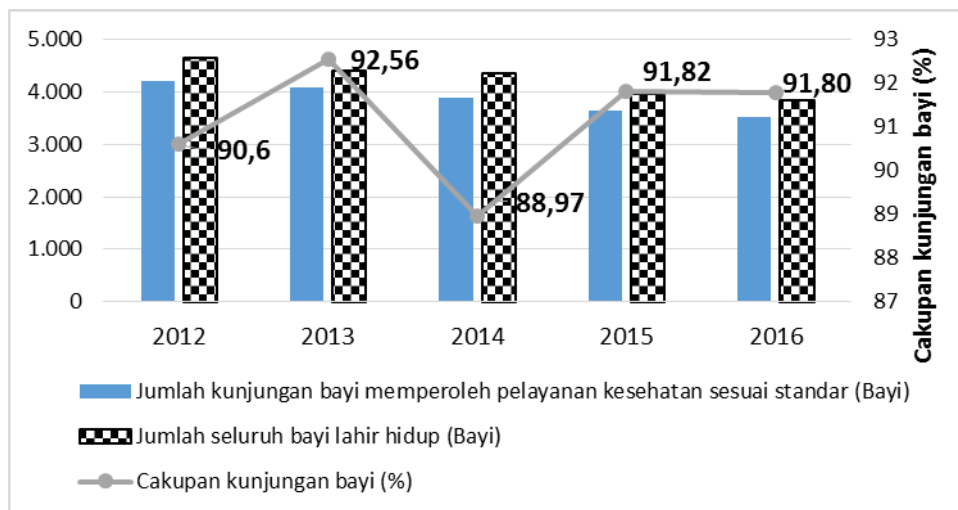
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi	4.221	4.078	3.887	3.647	3.526	-4,39
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Bayi	4.658	4.406	4.369	3.972	3.841	184,16
3.	<b>Cakupan kunjungan bayi</b>	<b>Persen</b>	<b>90,6</b>	<b>92,56</b>	<b>88,97</b>	<b>91,82</b>	<b>91,80</b>	<b>0,37</b>

Sumber:

1. Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Data cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada rentang 80 – 93 persen, dengan rata-rata 89 persen pada periode tahun 2012 – 2016. Cakupan kunjungan bayi paling tinggi pada tahun 2013, sebesar 92,56 persen; sedangkan paling rendah pada tahun 2012 sebesar 90,6 persen. Sementara itu, rata-rata jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 3.971 bayi, sedangkan rata-rata jumlah bayi adalah sebesar 4.456 bayi. Dengan demikian, terdapat gap sebanyak 485 bayi (hampir 11 persen). Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar memiliki kecenderungan menurun, begitu pula dengan jumlah bayi lahir. Penurunan jumlah kunjungan bayi tersebut disebabkan karena ada perbedaan kriteria jumlah kunjungan bayi dan kunjungan ke layanan kesehatan lain yang tidak dilaporkan. Grafik cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 2.3.1.B.10.



Gambar 2.3.1.B.10 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2012 sebesar 90,6 persen, kemudian meningkat menjadi 92,56 % pada tahun 2013. Tahun 2012 cakupan kunjungan bayi kembali meningkat hampir 10 persen, yang terus meningkat hingga pada tahun 2013. Pada tahun 2014, kembali menurun dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 91,82 persen. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan bayi sebanyak 3.647 bayi, sementara jumlah seluruh bayi sebanyak 3.972 bayi. Berdasarkan target nasional untuk cakupan kunjungan bayi yaitu 90 persen pada tahun 2010, hasil kunjungan bayi di Kota Yogyakarta telah mencapai target nasional pada tahun 2012, 2013, dan 2015;2016 meskipun pada 2014 terjadi penurunan menjadi kurang dari 90 persen.

## 15. Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Semakin besar persentase cakupan puskesmas maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Data cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.17.

Tabel 2.3.1.B.17

## Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Puskesmas	Unit	18	18	18	18	18	0,00
2.	Jumlah Seluruh Kecamatan	Unit	14	14	14	14	14	0,00
3.	Cakupan puskesmas	Persen	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	0,00

Sumber:

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.17, cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2012 – 2016 menunjukkan perkembangan yang tetap dengan cakupan puskesmas mencapai 128,57 persen. Hal tersebut menunjukkan seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, bahkan ada beberapa kecamatan yang mempunyai puskesmas lebih dari satu. Tersedianya puskesmas di setiap kecamatan memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan terdekat dan terjangkau bagi masyarakat.

#### 16. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitung berdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kota. Cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.B.18.

Tabel 2.3.1.B.18

## Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah puskesmas pembantu	Unit	10	10	8	9	9	-1,88
2.	Jumlah Kelurahan	Unit	45	45	45	45	45	0,00
3.	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	22,22	22,22	17,78	20,00	20,00	-1,87

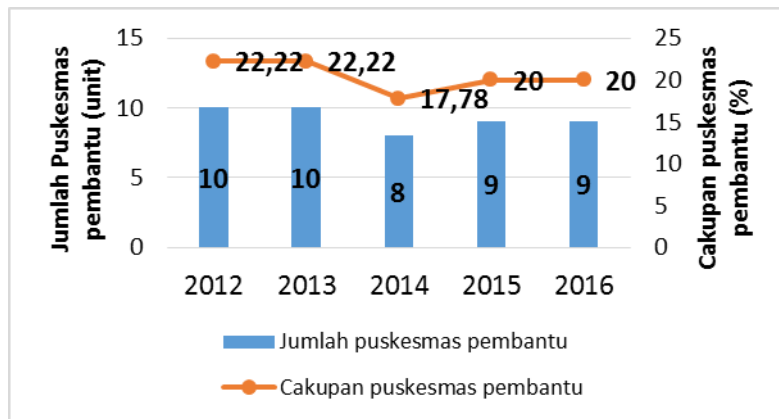
Sumber:

1. Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.B.18, cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2012 – 2013 terdapat 10 puskesmas pembantu, kemudian turun menjadi 10 puskesmas pembantu pada tahun 2013 – 2014. Pada tahun 2014, menurun lagi menjadi 8 puskesmas



pembantu, meningkat menjadi 9 puskesmas pembantu pada tahun 2015. Berkurangnya jumlah puskesmas pembantu disebabkan penutupan beberapa puskesmas pembantu yang dianggap kurang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Beberapa puskesmas pembantu juga dialihfungsikan menjadi klinik rawat inap maupun rumah sehat lansia. Grafik cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta disajikan dalam Gambar 2.3.1.B.11.



Gambar 2.3.1.B.11 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,22 persen, kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 17,78 persen, dan meningkat kembali di tahun 2015 dan 2016 menjadi 20 persen. Peran puskesmas pembantu harus dioptimalkan dalam meningkatkan jangkauan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## 17. Jaminan Kesehatan

Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah saat ini adalah BPJS. BPJS ini masih sangat baru sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang menyertainya. Kendala yang terjadi ini cukup serius mengingat berhubungan dengan kondisi kesehatan pasien. Menurut keterangan dari Bagian ADP RSUD Kota Yogyakarta beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS di RSUD Kota Yogyakarta adalah:

- 1) Verifikator merambah diagnosis dokter.

Sebagai contoh pasien di diagnosis Bronchopneumonia, namun hasil Rontgen Foto mengatakan Bronchitis, maka pihak rumah sakit diminta mengganti diagnosis menjadi Bronchitis. Seharunya jika secara klinis bronchopneumonia, rumah sakit bertahan dengan diagnosis bronchopneumonia. Namun kenyataannya kalau menurut pihak BPJS, apabila diagnosis Bronchopneumonia hasil rontgen fotonya harus menunjukkan Seperti Pneumonia (sesuai hasil dari DPM).

- 2) Permenkes tentang Kegawatdaruratan perlu ditinjau ulang karena belum semua kondisi gawat darurat terakomodir, seperti contoh Vulnus lacerasi di extrememitas.
- 3) Belum ada Juknis verifikasi klaim untuk verifikator BPJS, sehingga tidak ada dasar dalam memverifikasi (menolak klaim).

- 4) Belum ada SDM (Petugas BPJS) di Poliklinik Sore, sehingga apabila petugas tidak ada (tidak standby), maka tidak terverifikasi karena kewenangan SEP pada Petugas BPJS.
- 5) Ada beberapa kasus rawat inap yang dipaksakan untuk kasus rawat jalan tanpa mau tahu kondisi umum pasien.
- 6) Permasalahan Obat Farmasi
  - a. Ada penyakit kronis yang belum masuk kedalam kategori 10 besar penyakit kronis versi BPJS, seperti: Gastritis.
  - b. Obat-obat dari diagnosis penyerta atau komplikasi dari DM (Diabetes Melitus) tidak bisa diklaim, Seperti: Ca Carbonat, Calos, Anemolat, dll.

### C. Pekerjaan Umum

Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Susunan fungsi kawasan Kota Yogyakarta terbagi menjadi tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atau ditiadakan sehingga mampu untuk menggambarkan kondisi kinerja kewilayahan di Kota Yogyakarta. Penyesuaian indikator dilakukan karena beberapa faktor, seperti belum adanya pendataan yang dilakukan oleh instansi (SKPD) terkait maupun data pendataan pada dan atau hingga tahun tertentu.

#### 1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kondisi jalan yang baik diasumsikan mampu untuk mendukung pengembangan wilayah dari segi kegiatan ekonomi maupun pengembangan infrastruktur.

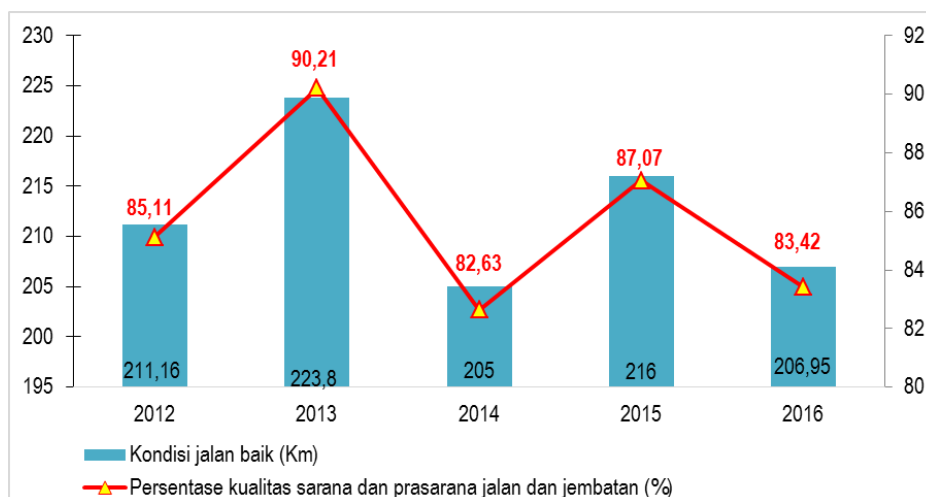
Tabel 2.3.1.C.1

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Kondisi jalan baik	Km	211,16	223,80	205,00	216	206,95	-0,31
2.	Panjang jalan penghubung pusat kota	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	0,00
3.	<b>Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan</b>	<b>Persen</b>	<b>85,11</b>	<b>90,21</b>	<b>82,63</b>	<b>87,06</b>	<b>83,42</b>	<b>-0,31</b>

Sumber: Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2016 menunjukkan kecenderungan negatif. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kondisi jalan baik di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -0,31 persen per tahun, sedangkan di tahun yang sama, panjang jalan penghubung pusat kota di Kota Yogyakarta tidak mengalami pertumbuhan (stagnan). Sehingga dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai -0,31 persen. Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) menjadi 100 persen, persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas) menjadi 100 persen, persentase jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) menjadi 100 persen, persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) menjadi 100 persen, persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan dari 80 persen menjadi 81 persen di wilayah Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.1.C.1 Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Meskipun dari tahun 2012 hingga tahun 2013 kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan khususnya pada kondisi jalan yang baik mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun 2014 kondisi jalan yang baik sempat mengalami penurunan. Di tahun 2015 kondisi jalan yang baik kembali meningkat menjadi 216 km atau 87,06 persen dari keseluruhan jalan yang ada di Kota Yogyakarta.

### 3. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pemeluk Agama

Indikator rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agama didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah pemeluk agama per 1000 penduduk. Berdasarkan tabel jumlah tempat ibadah diatas terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak dan yang selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya adalah masjid yang jumlahnya hingga tahun 2013 sebanyak 958 unit Masjid, sedangkan jumlah Gereja baik Gereja Kristen dan Katolik memiliki jumlah dengan kecenderungan tetap dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, begitu pula dengan jumlah Pura dan Vihara.

Tabel 2.3.1.C.2

Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Tempat Ibadah		961	1.015	1.033	1.033	1.033	1,47
	a. Masjid	Unit	906	958	979	979	979	1,53
	b. Gereja Kristen	Unit	41	41	41	41	41	0,00
	c. Gereja Katolik	Unit	7	7	7	7	7	0,00
	d. Pura	Unit	1	1	1	1	1	0,00
	e. Vihara	Unit	6	7	5	5	5	-2,38
2.	Jumlah Pemeluk Agama	Jiwa						-
	a. Islam	Jiwa	351.873	335.389	344.995	338.546	339.087	-0,71
	b. Kristen	Jiwa	31.193	26.478	26.995	26.564	26.452	-3,04
	c. Katolik	Jiwa	46.195	43.196	40.638	42.704	42.459	-1,58
	d. Hindu	Jiwa	803	552	565	546	536	-6,82
	e. Budha	Jiwa	2.155	1.366	1.362	1.307	1.307	-8,19
	Aliran Kepercayaan	Jiwa		16	16	15	15	-25,56

Sumber: SIPD Numerik, 2016

Jumlah tempat ibadah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami peningkatan. Jumlah tempat ibadah berupa masjid mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,53 persen, sedangkan untuk tempat ibadah lain seperti gereja (katolik dan Kristen), pura, dan vihara tidak mengalami penambahan jumlah tempat ibadah. Meskipun demikian, jumlah pemeluk agama dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Untuk mengetahui rasio ketersediaan tempat ibadah dilakukan perbandingan antara jumlah fasilitas tempat ibadah dengan jumlah pemeluk masing-masing agama dikalikan 1.000.

Tabel 2.3.1.C.3

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Rasio Tempat ibadah per 1.000 penduduk	Unit per 1000 pemeluk agama						
	a. Masjid	Unit per 1000 pemeluk agama	2,575	2,856	2,838	2,92	2,89	2,88
	b. Gereja Kristen	Unit per 1000 pemeluk agama	1,314	1,548	1,519	1,55	1,55	1,54
	c. Gereja Katolik	Unit per	0,152	0,162	0,172	0,26	0,09	0,17

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
		1000 pemeluk agama						
	d. Pura	Unit per 1000 pemeluk agama	1,245	1,812	1,770	1,81	1,87	1,82
	e. Vihara	Unit per 1000 pemeluk agama	2,784	5,857	3,671	5,12	5,36	5,00

Sumber: SIPD Numerik Tahun 2016

Secara umum, perkembangan jumlah tempat ibadah per 1.000 pemeluk agama di Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami pertumbuhan. Sesuai dengan jumlah pemeluk masing-masing agama, jumlah masjid per 1.000 pemeluk agama paling banyak dibandingkan tempat ibadah lainnya. Sebaliknya jumlah Pura paling sedikit dibandingkan dengan tempat ibadah yang lain.

### 3. Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola Pemerintah Kota

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Terdapat empat TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu TPU Sasanalaya dengan luasan sebesar 12,65 hektar yang terletak di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan; TPU Sarilaya memiliki luas sebesar 6,497 hektar yang terletak di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; TPU Pracimalaya dengan luasan sebesar 12,213 hektar yang terletak di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan; serta TPU Utaralaya yang terletak di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo dan memiliki luasan 16,764 hektar, dan kesemuanya merupakan tanah milik negara. Keempat TPU tersebut dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki daya tampung sebanyak 12.579 unit dengan rincian 4611 unit untuk TPU Sasanalaya, 1779 unit untuk TPU Sarilaya, 3632 unit untuk TPU Pracimalaya, dan 3421 unit untuk TPU Utaralaya. Melihat daya tampung TPU yang tetap ini menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umum di masa mendatang yang semakin meningkat.

Tabel 2.3.1.C.4

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Unit	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Sumber:

1. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2017
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikan dengan bilangan 1000. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk relatif tidak meningkat. Hal ini mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang cenderung menurun dari tahun 2012 sampai tahun 2016, ditambah dengan luas dan daya tampung tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta yang cenderung stagnan (tidak bertambah).

#### 4. Rasio permukiman layak huni

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasio permukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong Tengen, Jetis, dan Tegalrejo, dengan luasan sebesar 278,70 hektar. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Namun di tahun 2015 luasan kawasan tidak layak huni ini sudah relatif mengalami penurunan, sehingga di tahun 2015 tercatat luas kawasan tidak layak huni sebesar 264,89 hektar.

Tabel 2.3.1.C.5

Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
	Luas	Ha	NA	NA	278,70	264,89	177	

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
	Permukiman Kumuh							
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	NA	NA	2709,30	2723,11	2811	1,81
2.	Luas Wilayah Permukiman	Ha	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00
3.	<b>Rasio permukiman layak huni</b>		<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>90,67</b>	<b>91,23</b>	<b>94,08</b>	<b>1,81</b>

Sumber:

1. SK Walikota tentang Penetapan lokasi kawasan kumuh kota Yogyakarta tahun 2014 dan 2016
2. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2017

### 5. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk (panjang jalan yang dilalui roda 4). Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah.

Tabel 2.3.1.C.6

Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Panjang Jalan *)	km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	0,00
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3.	<b>Rasio panjang jalan per satuan penduduk</b>	<b>km/jiwa</b>	<b>0,00058</b>	<b>0,00061</b>	<b>0,00060</b>	<b>0,00060</b>	<b>0,00060</b>	<b>1,01</b>

Sumber:

1. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017, dengan Hasil Olahan
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Keterangan :

\*) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas Jalan

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana nilai tersebut menjadikan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,01 persen per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat ini diduga dipengaruhi oleh semakin menurunnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalan yang tidak bertambah dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Meskipun relatif tidak mengalami peningkatan, namun semakin meningkatnya nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk ini dapat diantisipasi dengan meningkatkan kuantitas penggunaan kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagian kota semakin padat (belum dapat dicapai dengan mudah). Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilalui roda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

#### 6. **Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan dalam Wilayah Kota (Aksesibilitas)**

Formula yang digunakan untuk menghitung jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk adalah dengan membagi jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda empat dengan jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dan dikalikan dengan bilangan 100. Namun Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta tidak melakukan pendataan mengenai formula pembagi untuk perhitungan indikator ini. Indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat) ini digunakan untuk menghitung aksesibilitas wilayah, namun pada dasarnya di Kota Yogyakarta sudah tidak terdapat lagi wilayah yang terisolir, sehingga dapat dikatakan bahwa kesemua jalan di Kota Yogyakarta dapat diakses dan atau dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Dalam indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, untuk menghitung aksesibilitas (persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota) menggunakan formula jumlah panjang jalan eksisting dibagi dengan total rencana panjang jalan dikalikan dengan bilangan 100. Panjang jalan eksisting dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sepanjang 248,09 km (panjang jalan bernomor ruas jalan), sedangkan total rencana panjang jalan yang ditetapkan di Kota Yogyakarta adalah sepanjang 248,09 km, sehingga dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2015 nilai indikator aksesibilitas di Kota Yogyakarta adalah 100 persen.

Tabel 2.3.1.C.7

Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota Yogyakarta (Aksesibilitas)  
Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Total panjang jalan eksisting	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09
2.	Total rencana panjang jalan	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09
3.	<b>Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

#### 7. **Panjang dan Kondisi Trotoar**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air adalah dengan membagi panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikalikan dengan bilangan 100. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta masih belum dapat menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase karena sulit dilakukan pendataannya, hal ini dikarenakan dalam



satu ruas jalan belum tentu terdapat drainase dan atau trotoar, atau hanya terdapat drainase dan atau trotoar di salah satu sisinya saja (ruas jalan kanan atau kiri saja), sehingga indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air diganti dengan panjang dan kondisi trotoar di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.C.8

## Jumlah Panjang Jalan yang Dilengkapi Trotoar dan Kondisi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
1.	Jumlah panjang trotoar	Km	182,72		183,12		183,65		184,10		184,41	
2.	Trotoar yang sudah ada tegel difabel	Km	10,36	5,67	15,34	8,38	18,76	10,22	20,93	11,27	26,64	14,45
3.	Trotoar yang belum ada tegel difabel	Km	172,32	94,32	167,77	91,62	164,89	89,78	163,16	87,97	157,76	85,55
4.	Kondisi trotoar											
	a. Baik	Km	107,81	59,00	111,93	61,12	115,36	62,81	117,79	63,96	118,71	64,37
	b. Sedang	Km	54,13	29,62	54,13	29,56	54,13	29,48	54,13	28,1	54,13	29,35
	c. Rusak	Km	20,76	11,36	17,04	9,31	14,15	7,71	12,17	7,42	11,56	6,27

Sumber: Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Panjang trotoar, baik yang sudah bertegel difabel dan yang belum bertegel difabel di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan dari yang semula di tahun 2013 hanya sepanjang 183,12 kilometer menjadi 184,10 kilometer di tahun 2015. Di tahun 2015 sepanjang 20,93 kilometer (11,27 persen) trotoar sudah memiliki fasilitas tegel difabel. Ditinjau dari kondisinya di tahun yang sama sebesar 63,96 persen atau sepanjang 117,79 kilometer trotoar dalam kondisi yang baik. Meskipun belum begitu signifikan, namun dari tahun ke tahun perbaikan kondisi trotoar terus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari panjang trotoar yang berada pada kondisi baik dari tahun 2013 hingga tahun 2016 yang terus meningkat.

## 8. Luas Areal Permukiman di Bantaran

Formula yang dipergunakan untuk menghitung sempadan sungai yang dipakai bangunan rumah liar adalah panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungai kota dikali dengan bilangan 100. Namun data untuk indikator tersebut tidak dapat ditemukan karena belum pernah dilakukan pendataan, sehingga indikator ini diganti dengan data mengenai luasan areal permukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.3.1.C.9

## Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Luas areal permukiman di bantaran sungai	Ha	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	0,00

Sumber: Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Luas areal permukiman di bantaran sungai wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan luasan yang sama dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Yogyakarta sendiri yang secara administratif belum memiliki Perwal mengenai panjang sempadan sungai, sehingga selama ini sempadan sungai yang ditentukan oleh Kota Yogyakarta masih mengikuti sempadan sungai yang ditetapkan oleh provinsi (15 meter dari sungai). Namun apabila ditarik garis dari sungai, sempadan sungai di Kota Yogyakarta tidak ada

yang berjarak 15 meter (bangunan di pinggir sungai tersebut melanggar aturan sempadan sungai, baik di Code, Winongo, dan Gajahwong).

Sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta berada dibawah kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, sempadan sungai sesuai PP No. 38 tahun 2011 tentang sungai kewenangan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak, sehingga data untuk sempadan sungai yang dipakai bangunan liar tidak dapat diperoleh. Selain itu pula, di Kota Yogyakarta cukup banyak bangunan yang terletak di sepanjang sungai. Namun tanah di sepanjang sungai tersebut sebagian besar merupakan tanah Magersari (tanah milik Keraton Yogyakarta).

### 9. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

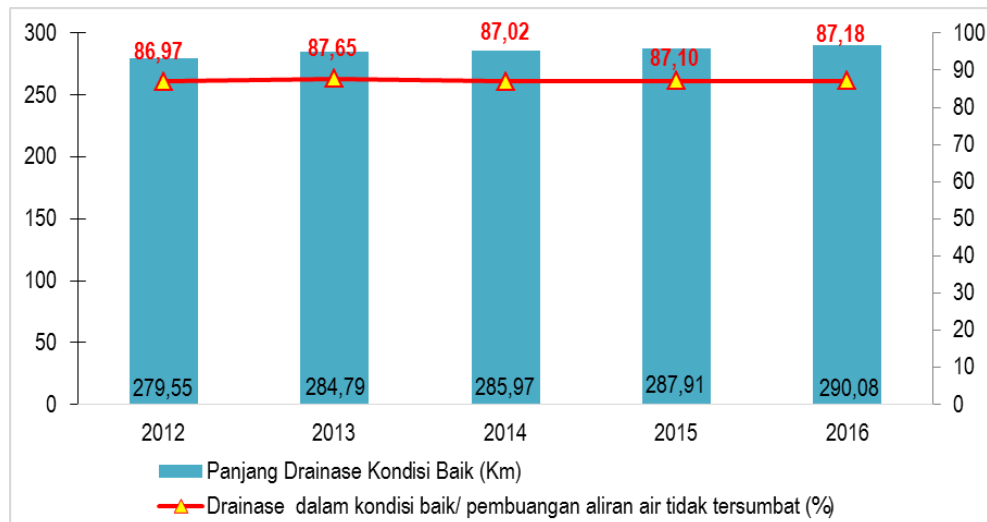
Tabel 2.3.1.C.10

Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang Drainase Kondisi Baik	Km	279,55	284,80	285,97	287,91	290,08	1,66
2.	Panjang Seluruh Drainase	Km	321,42	324,92	328,63	330,57	332,74	0,87
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	88,05	87,65	87,01	87,09	87,17	-0,25

Sumber: Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Panjang drainase kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sebesar 279,55 km (tahun 2012) meningkat menjadi 290,08 km (tahun 2016). Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan rata-rata panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan (0,06% per tahun). Kondisi ini dialami juga pada 4 tahun sebelumnya yang cenderung mengalami peningkatan. Selain faktor internal, faktor alam juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi drainase yang ada misal curah hujan yang tinggi pada bulan tertentu.



Gambar 2.3.1.C.2 Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Nilai persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta yang cenderung fluktuatif menjadi salah satu “PR” untuk pemerintah Kota Yogyakarta pada untuk lebih memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

#### 10. Persentase Kualitas Talud/Bronjong dan Saluran Pengairan

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor didapatkan dari hasil perhitungan formula jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikalikan dengan bilangan 100. Data untuk indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kota Yogyakarta tidak dapat ditemukan, hal ini dikarenakan tidak ada pembangunan turap di wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah hanya melakukan kegiatan pembangunan talud, sehingga indikator ini disesuaikan dengan kondisi di Kota Yogyakarta menjadi persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik dengan total panjang talud atau bronjong dan saluran air.

Tabel 2.3.1.C.11

Persentase Kualitas Talud atau Bronjong dan Saluran Pengairan Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik	Km	109,98	110,76	108,86	250	252,30
2.	Total panjang talud atau bronjong dan saluran air	Km	152,26	152,26	152,26	348	348
3.	<b>Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan</b>	<b>Persen</b>	<b>72,23</b>	<b>72,74</b>	<b>71,50</b>	<b>72%</b>	<b>72,5</b>

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik di Kota Yogyakarta memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni sepanjang 109,98 km (atau sebesar 72,23 persen) pada tahun

2012 menurun menjadi 108,86 km (atau sebesar 72 persen) pada tahun 2015. Meskipun demikian, kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baik di Kota Yogyakarta sudah relatif mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baik di tahun 2014. Penurunan jumlah panjang talud dalam kondisi baik ini menjadi pekerjaan rumah khususnya bagi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk berupaya meningkatkan perbaikan talud yang rusak.

#### D. Penataan Ruang

##### 1. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, diantaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubah peruntukannya.

Perbandingan dilakukan dengan melihat persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah di Kota Yogyakarta. Melalui perhitungan tersebut terlihat pertumbuhan persentase RTH yang cenderung positif. Dari data diketahui bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai yang ditunjukkan oleh persentase RTH publik terhadap luas wilayah, yakni sebesar 18,95 persen di tahun 2012 yang meningkat menjadi 19,05 persen di tahun 2016.

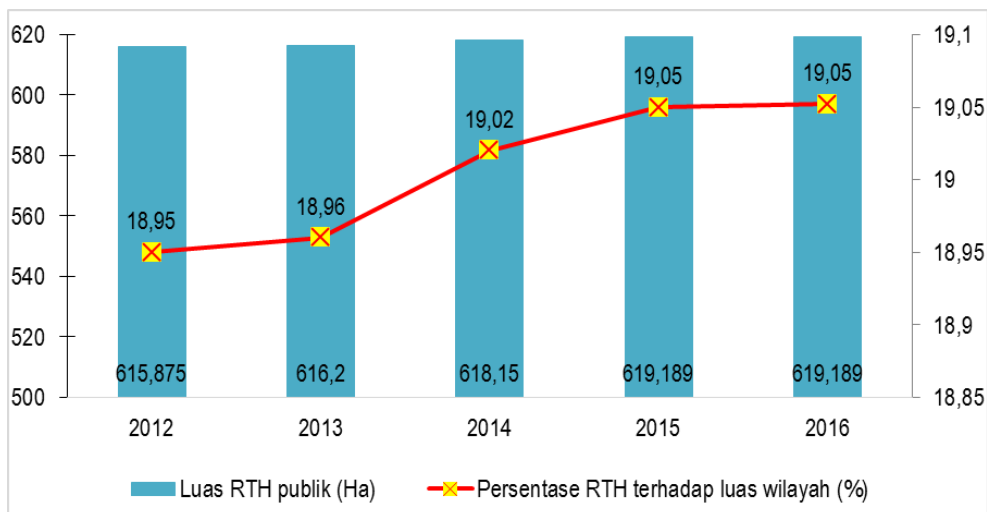
Tabel 2.3.1.D.1

Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Luas RTH publik	Ha	615,875	616,2	618,15	619,189	619,189	0.13
2.	Luas wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0.00
3.	<b>Persentase RTH terhadap luas wilayah</b>	<b>Persen</b>	<b>18,95</b>	<b>18,96</b>	<b>19,02</b>	<b>19,05</b>	<b>19,05</b>	<b>0.13</b>

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

Dibalik peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015, terdapat permasalahan dalam upaya peningkatan luasan ruang terbuka hijau untuk masa mendatang, yakni adanya kendala mengenai keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Hal tersebut mengingat luasan wilayah Kota Yogyakarta yang stagnan namun dihadapkan dengan berbagai perubahan pembangunan yang membutuhkan ruang kosong sebagai lahannya.



Gambar 2.3.1.D.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.3.1.D.2

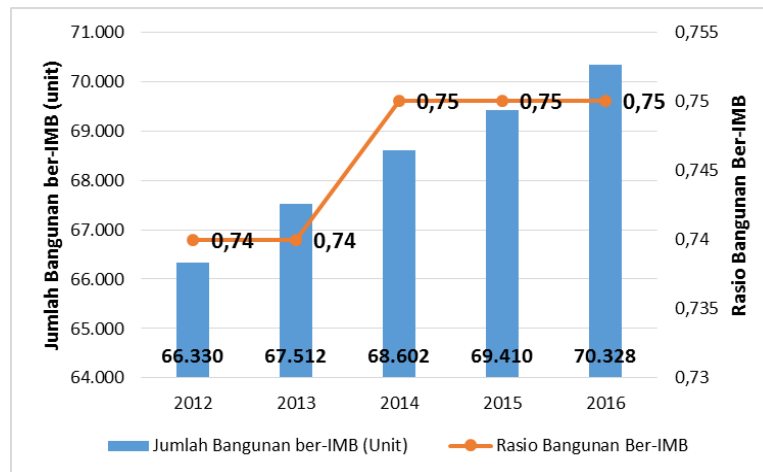
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	Unit	66.330	67.512	68.602	69.410	70.328	1,47
2.	Jumlah Bangunan	Unit	89.649	90.649	91.921	92.729	92.965	0,91
3.	<b>Rasio Bangunan</b>		<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,34</b>

Sumber:

1. Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 (Data Tahun 2010-2013)
2. LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 (Data Tahun 2014); Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2017

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan, yakni sebanyak 66.330 unit pada tahun 2012 meningkat menjadi 70.328 unit dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,47 persen per tahun. Kondisi yang meningkat juga terjadi pada jumlah bangunan di Kota Yogyakarta dengan peningkatan bangunan rata-rata sebesar 0,91 persen per tahun.



Gambar 2.3.1.D.2 Jumlah Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Kedua indikator pembentuk tersebut memiliki perbandingan lurus dengan rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang juga meningkat dalam kurun waktu yang sama (tahun 2010 hingga tahun 2015), yakni sebesar 0,74 pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,75 pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,34 persen per tahun.

### 3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Formula yang digunakan dalam perhitungan ruang publik yang berubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antara jumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publik yang tersedia. Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat pada tahun 2010 terdapat perubahan lahan seluas 27.400 m<sup>2</sup> terdapat di Giwangan, yakni perubahan Dinas Pertanian Balai Benih menjadi Sport Training Center. Kemudian di tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta juga mencatat perubahan Terminal Lama (Terminal Giwangan menjadi Pasar Seni (XT Square), dengan perubahan lahan seluas 18.398 m<sup>2</sup>. Selain itu perubahan peruntukan juga terjadi pada tahun 2013, yakni perubahan Tempat Hiburan Rakyat (THR) atau yang biasa dikenal dengan Purawisata yang terletak di jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, yang berubah menjadi bangunan hotel dengan luas 24.690 m<sup>2</sup>. Sedangkan ditahun 2012, 2014, dan 2015 tidak tercatat perubahan apapun pada ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.D.3

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi	m <sup>2</sup>	0	24.690	0	0	0

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2017

### E. Perumahan

Terdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni. Sama halnya dengan urusan sebelumnya, pada urusan perumahan

juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

### 1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah tangga pengguna air bersih adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Karena adanya keterbatasan sumber data, digunakan data rumah pengguna air bersih dengan sumber PDAM (perpipaan) untuk mewakili data rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta. Adapun data untuk faktor penyebut (jumlah rumah tangga) digunakan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

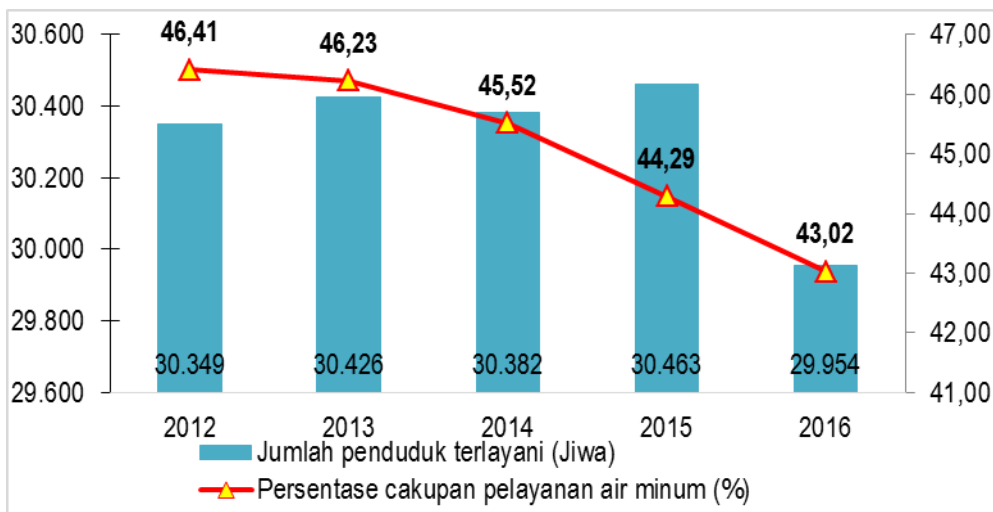
Tabel 2.3.1.E.1  
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Unit	30.349	30.426	30.382	30.463	29.954	-0,32
2.	Jumlah seluruh rumah tangga	Unit	87.707	94.092	92.965	92.965	92.965	1,52
3.	Persentase rumah pengguna air bersih	Persen	34,60	32,34	32,68	32,77	32,22	-1,72

Sumber:

1. Kinerja PDAM Tirtamarta, Tahun 2012-2015, dengan Hasil Olahan
2. SIPD Numerik, 2016

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber PDAM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang fluktuatif, yakni 30.349 rumah tangga di tahun 2012 menurun menjadi 29.954 rumah tangga di tahun 2016. Menurunnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih ini juga diikutsertai dengan penurunan jumlah rumah tangga dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Sehingga dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terjadi peningkatan persentase rumah tangga pengguna air bersih dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -0,32 persen. Minimnya jumlah pengguna air bersih dengan sumber PDAM, belum dapat mewakili jumlah rumah tangga pengguna air bersih, karena terdapat sumber-sumber air bersih lainnya yang mungkin juga digunakan oleh masyarakat seperti sumber air tanah, sumur, ataupun sumber lainnya. Namun penggunaan air bersih yang berasal dari sumber non-perpipaan juga dapat menimbulkan berbagai macam masalah khususnya terkait dengan kualitas baku mutu air yang tidak bisa terjamin. Hal ini juga menjadi salah satu kendala PDAM dalam meningkatkan jumlah persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.1.E.1 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Selanjutnya, Kota Yogyakarta juga memiliki data mengenai fasilitas air bersih/ water purifier (non perpipaan) yang bersumber dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Data tersebut memiliki nilai yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2016, yakni sebanyak 216 unit di tahun 2010 meningkat menjadi 303 unit di tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7 persen per tahun.

Tabel 2.3.1.E.2

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Fasilitas air bersih/ <i>water purifier</i> (non perpipaan)	Unit	257	266	266	303	313	5,18

Sumber: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2017

Keterbatasan data membuat data yang disajikan belum dapat mewakili keterwakilan kondisi rumah tangga pengguna air bersih secara umum di Kota Yogyakarta. Namun dari peningkatan fasilitas air bersih/ water purifier non perpipaan yang ada dari tahun ke tahun, terjadi perkembangan yang positif. Sehingga dapat diindikasikan, bahwa akses rumah tangga di Kota Yogyakarta terhadap air bersih semakin meningkat dari tahun, meskipun jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber air perpipaan (PDAM) cenderung masih kecil persentasenya dari tahun ke tahun.

## 2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator persentase rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dirasa kurang cocok apabila digunakan untuk perhitungan di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga penyebut dari formula ini yang semula adalah jumlah rumah tangga diganti menjadi jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya satu rumah yang ditinggali oleh beberapa rumah tangga.



Tabel 2.3.1.E.3

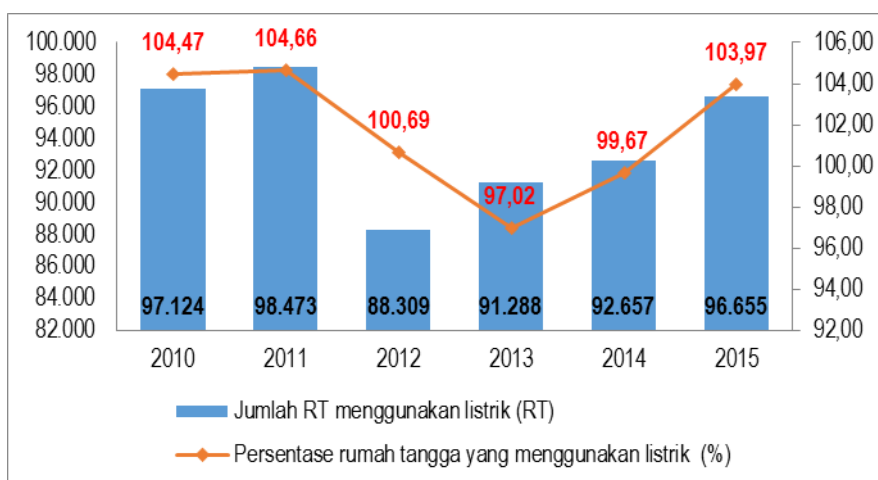
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	RT	88.309	91.228	92.657	96.655	98.688	2,82
2.	Jumlah Seluruh Rumah	Unit	87.808	94.092	92.965	92.965	92.965	1,44
3.	<b>Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik</b>	<b>Persen</b>	<b>100,69</b>	<b>97,02</b>	<b>99,67</b>	<b>103,96</b>	<b>106,16</b>	<b>1,36</b>

Sumber :

1. Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta, 2016, dengan Hasil Olahan
2. Badan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2016

Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, pertumbuhan rata-rata jumlah rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar 2,82 persen per tahun. Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif, yakni 88.309 rumah tangga di tahun 2012 meningkat menjadi 96.655 rumah tangga di tahun 2015.



Gambar 2.3.1.E.2 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di tahun 2015 memiliki nilai lebih dari 100 persen. Hal ini mungkin terjadi karena satu rumah tangga dapat memiliki lebih dari satu pengguna listrik. Penurunan besaran persentase rumah yang menggunakan listrik diduga karena adanya penyambungan listrik secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi karena selain merugikan, menyambung secara ilegal juga membahayakan, dengan dampak yang besar, seperti terjadinya konsleting bahkan kebakaran. Selain itu

masih adanya kendala dalam pendataan jumlah rumah juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka rumah tangga yang menggunakan listrik.

Tabel 2.3.1.E.4

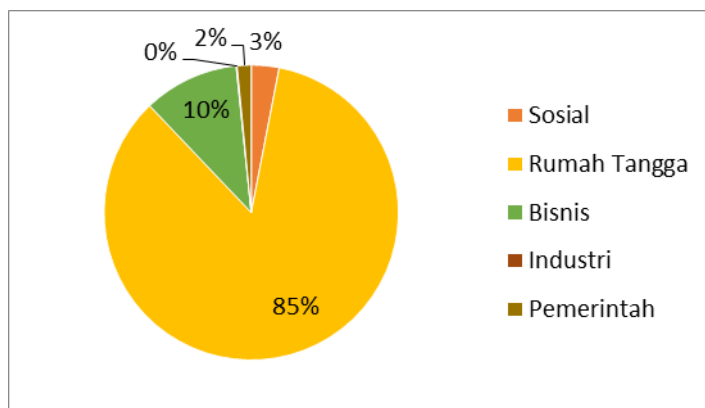
Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2016

Jenis Pelanggan	2015			2016*)		
	Pelanggan	%	Daya (MVA)	Pelanggan	%	Daya (MVA)
Sosial	3.329	3,03	42,58	3.488	3,05	47,64
Rumah Tangga	93.478	85,18	112,43	97.129	84,84	117,84
Bisnis	11.123	10,14	92,01	11.996	10,48	123,23
Industri	112	0,1	14,25	116	0,1	14,61
Pemerintah	1.705	1,55	19,56	1.761	1,54	20,95
Total	109.747	100	280,84	114.490	100	324,27

\*)Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta per 29 Februari 2016

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta, 2016, dengan Hasil Olahan

Jenis pelanggan listrik di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebanyak 109.747 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 280,84 MVA. Jenis pelanggan listrik terbanyak adalah pelanggan rumah tangga, yakni sebesar 85,18 persen dengan daya sebesar 112,43 MVA, sedangkan pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah pelanggan untuk industri yakni sebesar 0,10% dengan daya sebesar 14,25 MVA. Sedangkan di tahun 2016 terhitung per tanggal 29 Februari 2016, jumlah pelanggan listrik mencapai 114.490 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 324,27 MVA. Meskipun cenderung menurun dari tahun sebelumnya, jenis pelanggan listrik terbanyak masih dari pelanggan rumah tangga yakni sebesar 84,84% dengan daya sebesar 117,84 MVA cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah untuk industri yakni dengan jumlah 116 industri atau 0,1 persen dengan daya sebesar 14,61 MVA.



Gambar 2.3.1.E.3 Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 3. Penyediaan Sanitasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Dari definisi tersebut didapatkan

bahwa penyediaan sanitasi terbagi menjadi lima indikator, yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentase pengangkutan sampah, persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir (TPA), persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun. Kota Yogyakarta tidak memiliki TPA sehingga untuk indikator persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir tidak digunakan.

### 3.1. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai

Indikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai di lingkup wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua indikator, yakni indikator cakupan sistem air limbah setempat yang memadai dan indikator cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Indikator persentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai didapatkan dari perbandingan antara jumlah kumulatif tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) dengan jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki masyarakat.

Tabel 2.3.1.E.5

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai Tahun 2013 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kumulatif tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah)	Persen	NA	30	40	50	60
2.	Jumlah kumulatif tangki yang dimiliki masyarakat	Persen	NA	100	100	100	100
3.	Persentase cakupan sistem air limbah setempat yang memadai	%	NA	30	40	50	60

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2016

### 3.2. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

Indikator cakupan air limbah skala komunitas/kawasan/kota didapatkan dari perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayani dengan jumlah penduduk kota. Indikator ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diakibatkan oleh pencemaran lingkungan akibat pengelolaan air limbah yang tidak benar.

Tabel 2.3.1.E.6

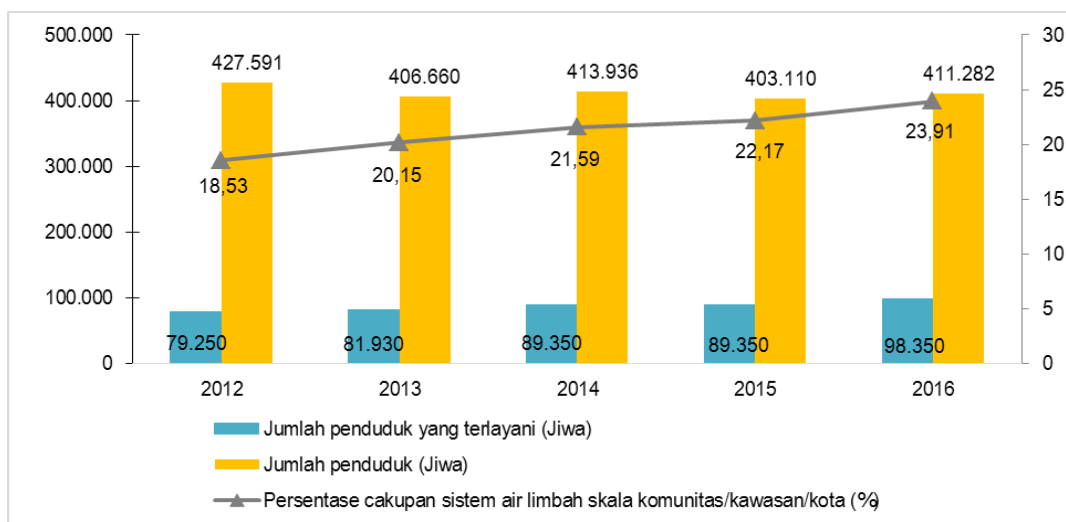
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah penduduk yang terlayani	Jiwa	79.250	81.930	89.350	89.350	98.350	5,63
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	403.110	411.282	-0,74
3.	<b>Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota</b>	<b>Persen</b>	<b>18,53</b>	<b>20,15</b>	<b>21,59</b>	<b>22,2</b>	<b>23,91</b>	<b>6,60</b>

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2016

Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 berbanding lurus dengan nilai persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota di lingkup

wilayah Kota Yogyakarta yang juga memiliki besaran dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu yang sama (tahun 2012 hingga tahun 2016), yakni 18,53 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 23,91 persen di tahun 2016 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,60 persen per tahun.



Gambar 2.3.1.E.4 Grafik Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 3.3. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

Indikator selanjutnya adalah persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) tidak lebih dari 2 kali setahun didapatkan dari perbandingan antara total luasan daerah bebas genangan dengan total luas daerah rawan genangan.

Tabel 2.3.1.E.7

Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, Selama 6 Jam) lebih dari 2 Kali Setahun Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Total luasan daerah bebas genangan	Ha	NA	10,2752	8,2348	7,1258	8,2348	-5,92
2.	Total luasan daerah rawan genangan	Ha	NA	10,2972	10,2972	10,2972	10,2972	0,00
3.	<b>Persentase Tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun</b>	<b>Persen</b>	<b>NA</b>	<b>99,79</b>	<b>79,97</b>	<b>69,20</b>	<b>79,97</b>	<b>-5,92</b>

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

Kurun waktu 2013 hingga tahun 2015 tercatat seluas 10,2972 hektar kawasan di Kota Yogyakarta masih menjadi daerah rawan genangan. Di tahun 2013, sebesar 99,79 persen luas daerah rawan genangan sudah terbebas dari genangan. Kondisi yang cenderung menurun justru terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015, secara berturut-turut terjadi penurunan persentase luas wilayah tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun yakni 79,97 persen menjadi 69,2 persen. Penurunan ini kemungkinan dapat

terjadi akibat kondisi kualitas drainase yang ada, namun selain itu kondisi curah hujan pada tahun tersebut yang cenderung sulit untuk diprediksi juga membuat penanganan genangan menjadi terhambat.

#### 4. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Indikator lingkungan permukiman kumuh memiliki kesamaan formula dengan indikator lingkungan permukiman pada urusan pekerjaan umum. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah dengan perbandingan antara luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.3.1.E.8

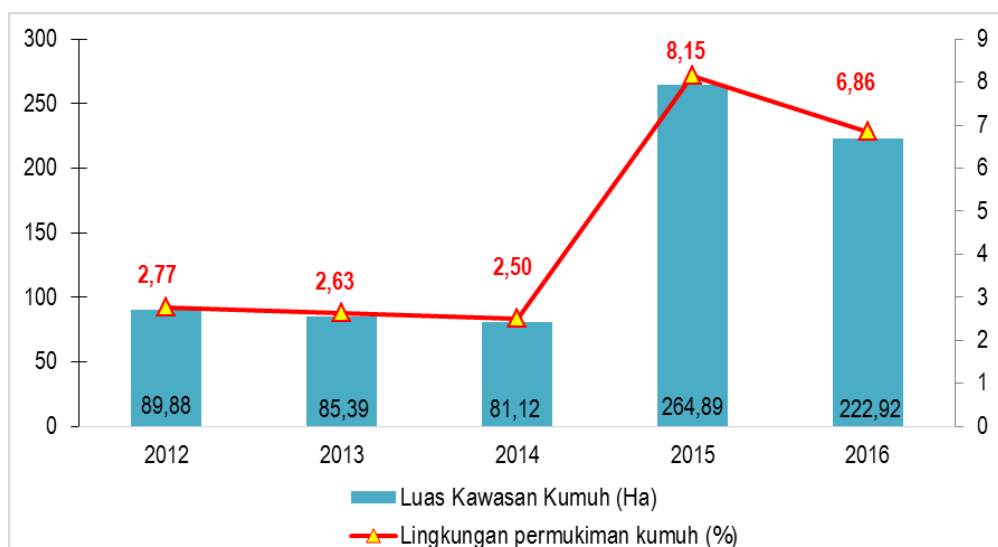
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Luas Kawasan Kumuh	Ha	89,88	85,39	81,12	264,89	177	50,18
2.	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0,00
3.	Lingkungan permukiman kumuh	Persen	2,77	2,63	2,50	8,15	6,86	50,04

Sumber:

1. SIPD Numerik, 2014 dengan Hasil Olahan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan

Luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2014 terus mengalami fluktuasi, yakni sebesar 89,88 hektar pada tahun 2012 menurun menjadi 81,12 hektar pada tahun 2014. Luasan kawasan kumuh ini justru mengalami peningkatan yang cukup drastis di tahun 2015 menjadi 264,89 hektar atau 8,15% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan SK Walikota Nomor 393 Tahun 2014, sebagian besar permukiman tersebut umumnya terdapat di sepanjang bantaran Kali Winongo, Kali Code dan Kali Gajah Wong. Peningkatan luas kawasan kumuh ini kemungkinan terjadi karena adanya pembaharuan data dengan kriteria penghitungan yang lebih detil, mengingat luasan permukiman tertata dari tahun ke tahun diketahui justru mengalami kenaikan meskipun dengan luas wilayah permukiman yang cenderung stagnan.



Gambar 2.3.1.E.5 Grafik Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk semakin mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah tidak layak huni (BSPS RTLH) di beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta.

### 5. Persentase Rumah Layak Huni

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah layak huni adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh rumah dikalikan dengan bilangan 100. Persentase yang ditunjukkan oleh indikator persentase rumah layak huni di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Tabel 2.3.1.E.9

Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014 <sup>**</sup> )	2015 <sup>**</sup> )	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah rumah layak huni	Unit	NA	NA	89.661	89.865	90.184	0,29
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit	NA	NA	92.965	92.965	92.965	0
3.	<b>Persentase rumah layak huni</b>	<b>Persen</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>96,45</b>	<b>96,67</b>	<b>97,01</b>	<b>0,29</b>

Sumber:

1. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2017

Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013 belum tersedia data yang valid karena kajian pendataan baru dilakukan pada tahun 2014.

Indikator persentase rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Yogyakarta. Indikator yang sesuai justru adalah rumah tidak layak huni. Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2004 adalah keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yang mudah rusak tertiuip angin; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan.

Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah (a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c) sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d) tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; (e) penghuninya malas dan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, maupun Gajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel kereta api, kolong-kolong jembatan, atau terminal.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni di Kota Yogyakarta. Kriteria yang dimaksudkan mengenai kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakarta diantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan gedheg, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4 maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan apabila bobot nilai berjumlah sama dengan atau lebih dari lima maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.

Tabel 2.3.1.E.10

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	NA	NA	3.304	3.100	2.781

Sumber:

Rekapitulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Bappeda Kota Yogyakarta, 2015

## F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

### 1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Keberadaan Polisi Pamong Praja mendapatkan posisi penting dalam pelayanan kemasyarakatan. Secara definisi, Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Untuk mendukung trantibum dan penegakan Perda diperlukan dukungan Satpol PP yang memadai, agar mampu menjangkau seluruh fungsi dan tugas di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu jumlah polisi pamong praja (Pol PP) perlu dipastikan, sehingga diketahui rasionalitas antara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Pol PP dengan jumlah beban kerja.

Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Pol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Pol PP pada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat dari rasio Pol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikan kepastian tentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan trantibum dan penegakan Perda, dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.3.1.F.1

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

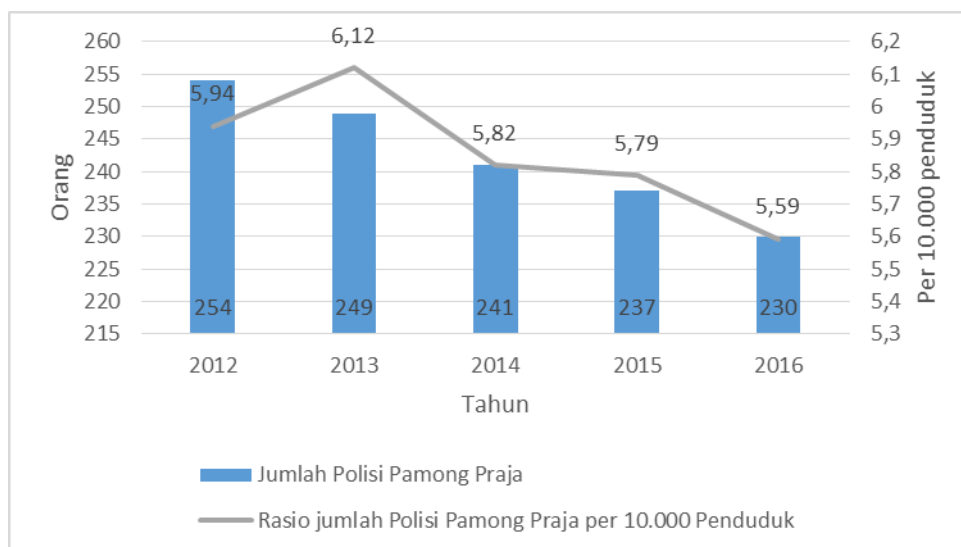
Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	254	249	241	237	230	-2,45
Jumlah Penduduk per 1000 penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
<b>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk</b>		<b>5,94</b>	<b>6,12</b>	<b>5,82</b>	<b>5,79</b>	<b>5,59</b>	<b>-1,46</b>

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017, Jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2017

Jumlah SDM S/atpol PP yang secara berangsur-angsur mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga 2016. Linearitas penurunan jumlah penduduk dengan jumlah personil Pol PP ini menyebabkan rasio antara Pol PP per 10.000 juga mengalami stagnasi, yang berada di kisaran 6 orang. Berdasarkan tabel 2.3.1.F.1, terlihat bahwa jumlah Pol PP setiap tahunnya mengalami penurunan. Tren penurunan jumlah Pol PP ini dikarenakan belum adanya rekrutmen polisi pamong praja, sementara banyak Pol PP yang sudah pensiun. Meskipun demikian, rasio jumlah Pol PP mengalami fluktuasi. Fluktuasi rasio jumlah Pol PP ini dipengaruhi oleh fluktuasi



jumlah penduduk yang jika dihitung rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami rata-rata penurunan sebesar 2,20 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya, tren menurunnya jumlah Pol PP dan fluktuasi rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk dapat dijelaskan melalui Gambar 2.3.1.F.1.



Gambar 2.3.1.F.1 Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Makna Gambar 2.3.1.F.1 adalah pada tahun 2010-2015 setiap 10.000 penduduk Kota Yogyakarta dilayani oleh kurang lebih 6 orang Pol PP. Kendati telah mengalami penurunan jumlah penduduk, akan tetapi perbandingan Pol PP tidak mengalami peningkatan sebab terjadinya pensiun dan kebijakan rotasi pegawai mempengaruhi akumulasi jumlah Pol PP, sementara kebijakan moratorium pegawai masih berlaku. Dengan demikian rekrutmen belum dilakukan untuk menambah pasukan Pol PP. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi dalam penanganan trantibum dan penegakan Perda dengan dukungan SDM yang terbatas, adalah memaksimalkan program dan kegiatan yang bersifat preventif, dengan memasukkan pembiasaan perilaku budaya tertib, sopan santun, tatakrama dan tatasusila. Sosialisasi budaya tertib di jalan, di tempat umum perlu diagendakan, agar mencegah pelanggaran trantibum dan Perda.

## 2. Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Linmas merupakan kumpulan sekelompok orang yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan guna dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan bencana, menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Peran Linmas sangat dibutuhkan khususnya daerah perkotaan. Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal

yang merugikan, seperti kerusakan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk diharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah Sumber Daya Aparatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini merupakan tabel informasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2012 hingga 2016.

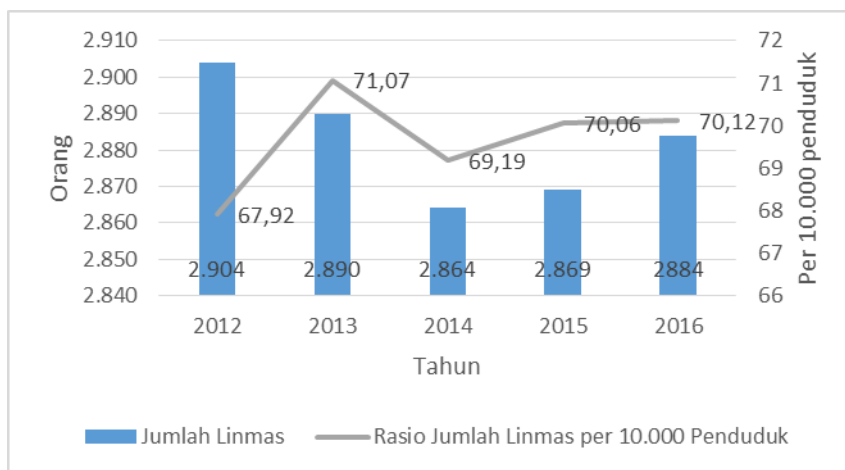
Tabel 2.3.1.F.2

## Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Linmas	Orang	2.904	2.890	2.864	2.869	2.884	-0,17
Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
<b>Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk</b>		<b>67,92</b>	<b>71,07</b>	<b>69,19</b>	<b>70,06</b>	70,12	0,83

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017, Jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2017

Tabel 2.3.1.F.2 menunjukkan bahwa jumlah petugas Linmas secara akumulatif sangat besar hingga mencapai angka ribuan, karena pelayanan Linmas menjangkau hingga di Kelurahan. Kendati demikian, jumlah petugas Linmas berangsur-angsur mengalami penurunan. Penurunan jumlah personil Linmas sesuai data merupakan penurunan yang bersifat signifikan hingga menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 2,71. Hal ini secara umum dikarenakan faktor usia yaitu pensiun dan belum ada regenerasi. Terjadinya tren penurunan jumlah petugas Linmas ini tidak diikuti dengan penurunan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk justru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Dengan terjadinya penurunan jumlah penduduk, maka rasio personil Linmas per 10.000 menjadi meningkat. Grafik di bawah ini menggambarkan penurunan jumlah personil Linmas dari tahun 2012 hingga 2016 dan fluktuasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk:



Gambar 2.3.1.F.2 Grafik Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rasio petugas Linmas yang dikonsentrasikan untuk menjalankan tugas dalam trantibmas mencapai perbandingan yang lebih baik dalam 10.000 penduduk jika dibandingkan dengan personil Pol PP. Hal ini disebabkan wilayah kerja Linmas menjangkau tingkat Kelurahan/padukuhan, sedangkan Pol PP dengan substansi trantibum dan penegakan Perda hanya menjangkau tempat-tempat umum/fasilitas umum. Dari data di atas pada saat perumbuhan penduduk negatif di tahun 2013 walaupun dengan jumlah petugas Linmas yang tetap menurun, namun dapat mencapai perbandingan yang lebih rasional. Namun pada tahun 2014 rasio petugas Linmas pada 10.000 penduduk cenderung menurun kembali yaitu berkisar 69 per 10.000 penduduk.

### 3. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

Pos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalah kelembagaan sosial terbawah yang lahir dari rembug warga sebagai inisiatif untuk menciptakan keamanan lingkungan secara bottom up. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan di kota Yogyakarta. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.F.3

Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pos Siskamling	Unit	NA	1.226	1.226	1.254	1.254
Jumlah Kelurahan	Kelurahan	45	45	45	45	45
<b>Rasio jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan</b>		<b>NA</b>	<b>27,24</b>	<b>27,24</b>	<b>27,86</b>	<b>27,86</b>

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta, 2017

Tabel 2.3.1.F.3 memperlihatkan bahwa jumlah Pos Siskamling di kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Peningkatan jumlah Pos Siskamling sempat mengalami peningkatan di tahun 2011, tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 28 unit. Sementara itu sejak tahun 2012 hingga 2016 jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta cenderung tetap.

Menurut Dinas Ketertiban, penurunan jumlah Siskamling ini terjadi karena adanya pengalihan status tanah. Penurunan jumlah Pos Siskamling mencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibat sistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yang telah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yang memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluarga kecil/inti (nucleus family), banyaknya pendatang yang kurang memiliki ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tata kehidupan bermasyarakat, dll. Meningkatnya jumlah pos siskamling pada tahun 2015 sebanyak 28 unit semoga menjadi cikal bakal meningkatnya kembali semangat gotong royong warga yang semakin lama kian terkikis. Sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menjalankan konsep kekeluargaan dan kekerabatan dalam tata kehidupan bermasyarakat.



Gambar 2.3.1.F.3 Grafik Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pos Siskamling pada tahun 2013 dan 2014 berjumlah 1226, meningkat menjadi 1254 pada tahun 2015 dan 2016. Penurunan ini mencerminkan penurunan swadaya masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan keamanan lingkungan. Sementara itu kondisi vandalism semakin marak. Untuk itulah perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan Siskamling. Pembinaan terhadap kelompok Siskamling perlu dilakukan. Monitoring dan evaluasi pihak pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Pemkot terhadap kelompok Siskamling perlu diadakan secara periodik.

#### 4. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah

Tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik semakin meningkat, salah satunya di kota Yogyakarta. Sistem informasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Sistem informasi pelayanan perizinan merupakan pelayanan strategis dalam menumbuh-kembangkan investasi daerah. Geliat perekonomian diharapkan dapat semakin dinamis dengan difasilitasi sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif. Pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu pembuka tumbuhnya investasi sehingga banyak tersedia peluang kerja, meningkatnya income per kapita dan

pendapatan asli daerah. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan menjadi sangat penting. Informasi adanya sistem pelayanan perizinan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.3.1.F.4.

Tabel 2.3.1.F.4

## Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2015	2015
1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.1.F.4 dapat diketahui bahwa tahun 2010 hingga 2015 tersedia sistem informasi pelayanan perizinan. Hasil identifikasi jenis-jenis sistem informasi pelayanan perizinan perlu dilakukan sehingga secara jelas. Sistem informasi pelayanan perizinan yang dimiliki Dinas Perizinan hingga tahun 2015 meliputi:

- a. SIM Perizinan meliputi pendaftaran, routing slip, dan cetak SK,
- b. SIM dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan),
- c. SIM IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dan
- d. SIM Pengawasan Pengaduan.

Pemanfaatan SIM pelayanan perizinan perlu dioptimalkan agar mendukung pertumbuhan investasi, peningkatan ketertiban secara luas ke dalam banyak aspek, diimbangi dengan peningkatan perilaku positif masyarakat yang taat pada regulasi dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Di samping itu peningkatan aksesibilitas SIM pelayanan perizinan perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan.

## 5. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu tugas yang melekat pada Dinas Ketertiban. Penegakan Perda menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalam mengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

Tabel 2.3.1.F.5

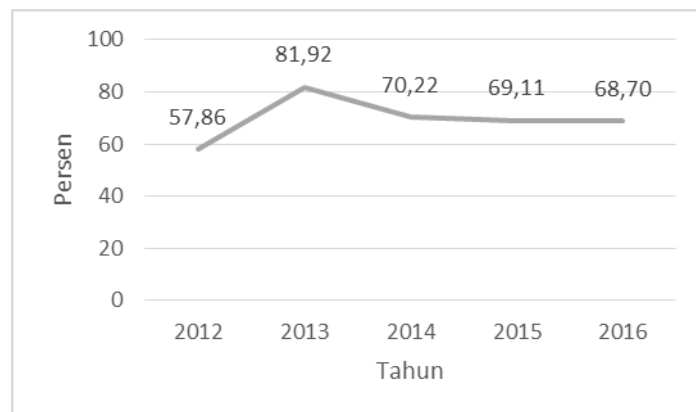
## Persentase Peningkatan Penegakan Perda di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	842	965	941	960	1.058	3,54
Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	1.455	1.178	1.340	1.389	1.540	2,31
<b>Penegakan PERDA</b>	<b>Persen</b>	<b>57,86</b>	<b>81,92</b>	<b>70,22</b>	<b>69,11</b>	<b>68,70</b>	<b>6,43</b>

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Pada tahun 2012 terlihat bahwa jumlah pelanggaran mencapai angka 1.455 dan 57,86 persen mampu diselesaikan. Namun pada tahun-tahun berikutnya angka penyelesaian Perda mengalami fluktuasi. Sementara

itu jika dilihat pada pertumbuhan rata-ratanya, jumlah penyelesaian penegakan Perda dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,54 persen per tahun, sementara tingkat pelanggaran Perda mengalami pertumbuhan sebesar 2,31 persen per tahun. Pada tahun 2015 terjadi penurunan persentase pelanggaran perda. Meskipun secara nyata jumlah penyelesaian penegakan perga meningkat menjadi 960 kasus namun hal tersebut juga diimbangi dengan jumlah pelanggaran perda yang meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan pelanggaran Perda belum diimbangi dengan peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda. Jika dianalisis, terdapat dua hal yang mempengaruhi menurunnya tingkat penyelesaian pelanggaran Perda. Pertama, banyaknya oknum pelanggar Perda yang tidak mau menghadiri persidangan. Kedua, terjadinya tren penurunan jumlah polisi pamong praja sebagai satuan petugas yang bertugas untuk menegakan pelanggaran Perda.



Gambar 2.3.1.F.4 Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Tampak pada Gambar 2.3.1.F.4 bahwa penegakan Perda di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal. Persentase penegakan perda mengalami fluktuasi sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Penurunan persentase yang tajam pada tahun 2013 dan ke tahun-tahun setelahnya. Banyaknya pelanggar Perda yang tidak hadir memenuhi panggilan persidangan perlu ditindaklanjuti dengan diikuti sanksi yang tegas. Dengan demikian, masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memenuhi ketentuan yang diatur oleh setiap Perda. Perlu adanya target tentang upaya menekan pelanggaran Perda, dan dengan tindakan yang lebih preventif dalam mensosialisasikan Perda secara intensif. Hal ini akan mampu mengantisipasi pelanggaran Perda di lapangan, dan menjadi salah satu solusi mengingat jumlah Pol PP yang terbatas, sehingga tentunya akan mengalami kesulitan jika permasalahan penegakan Perda terlalu berat di tindakan kuratif.

## 6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Satpol PP merupakan sebuah institusi yang berperan penting dalam penegakan Perda dan trantibum. Untuk memenuhi fungsi dan tugas pokok maka Pol PP perlu melakukan kegiatan patroli secara rutin. Pengamanan kondisi tempat-tempat umum dan memonitor pelaksanaan Perda dapat dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di lapangan. Indikator ini dihitung dari banyaknya kelompok patroli dikalikan tiga kali patroli dalam sehari.

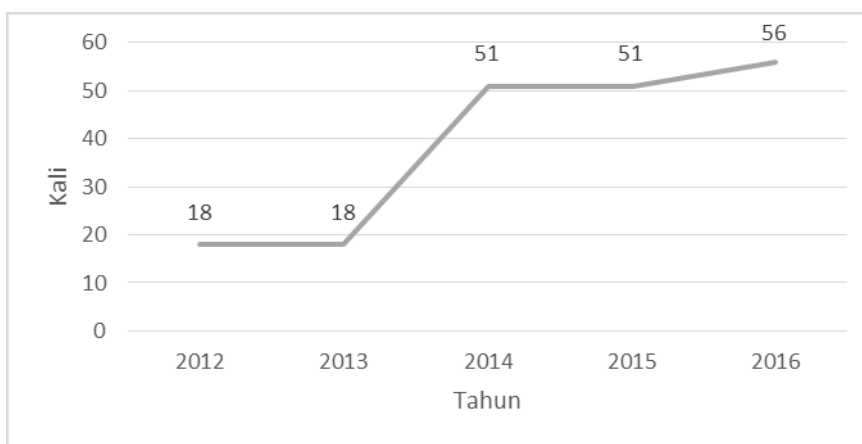
Tabel 2.3.1.F.6

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah patroli petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam		18	18	51	51	56	48,28

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Jika angka dalam Tabel 2.3.1.F.6 diperoleh dari jumlah kelompok patroli dikali tiga kali patroli, maka data di atas menunjukkan bahwa dalam rentang 2012 hingga 2013 hanya terdapat 6 kelompok patroli di Kota Yogyakarta, sementara di tahun 2014, 2015 meningkat menjadi 17 kelompok. Kenaikan jumlah kelompok juga terjadi di tahun 2016 menjadi 19 kelompok. Bertambahnya jumlah kelompok ini disebabkan oleh adanya kebijakan penempatan kelompok patroli Satpol PP di setiap kecamatan mulai tahun 2014, setiap satu kelompok patroli terdiri dari tiga hingga lima orang petugas. Sehingga, jumlah pelaksanaan patroli yang menjadi tugas Pol PP dari tahun 2012 - 2013 adalah sama yaitu 18 kali dalam 24 jam, namun pada tahun 2014 dan 2015 meningkat tajam menjadi 51 kali. Jika dibandingkan dengan jumlah Pol PP yang semakin menurun, namun jumlah patroli yang dilakukan mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat yaitu dari hanya 18 kali per 24 jam menjadi 51 kali bahkan mencapai 56 kali per 24 jam, maka ini merupakan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan rata-rata jumlah patroli adalah 48,28 persen per tahun.



Gambar 2.3.1.F.5 Grafik Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Kebutuhan patroli semakin meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2016. Hal ini sangat logis jika dikaitkan dengan terjadinya banyak pelanggaran Perda sebagaimana data penegakan perda yang dipaparkan di bagian lain. Perubahan sosial yang menurunkan semangat kebersamaan dan gotong-royong, proses monetisasi yang berjalan terus akibat tuntutan hidup semakin tinggi, maka semakin menjadi pemicu pelanggaran terhadap Perda. Untuk itulah proses preventif perlu lebih digalakkan dengan melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah lokal di Kelurahan dan koordinasi dengan SKPD terkait. Mengingat personil Pol PP yang terbatas maka perlu

ditingkatkan kemampuan Satpol PP dalam upaya mencapai koordinasi, sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. Arus koordinasi dengan Linmas dan tokoh masyarakat serta kelompok Siskamling hendaknya lebih intensif.

### 7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran K3 yang terjadi dengan jumlah penyelesaiannya. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 97,09 persen di tahun selanjutnya persentase penyelesaian K3 mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2014 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 98,95 persen dan meningkat menjadi 99,02 persen pada tahun 2015. Tahun 2016 persentase penyelesaian K3 kembali mengalami penurunan. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3.1.F.7:

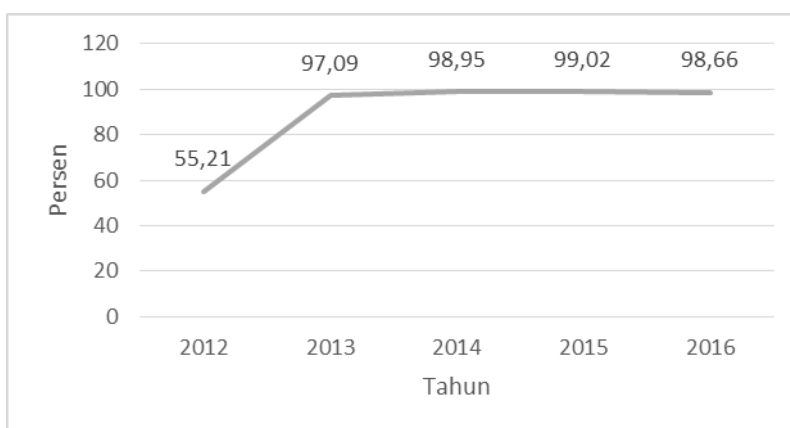
Tabel 2.3.1.F.7

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)  
di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	NA	7.113	7.252	8.568	6.529	-1,23
Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	NA	7.326	7.329	8.652	6.618	-1,81
<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b>	<b>Persen</b>	<b>NA</b>	<b>97,09</b>	<b>98,95</b>	<b>99,02</b>	<b>98,66</b>	<b>19,37</b>

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Peran serta masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan penegakan K3 perlu digalang secara intensif. Agar dalam masyarakat tumbuh kesadaran untuk saling peduli dan saling menjaga merupakan langkah strategis untuk menciptakan trantibum dan trantibmas. Kelembagaan sosial di tingkat padukuhan dan kelurahan sebaiknya dioptimalkan peran sertanya dalam menjaga penegakan K3.



Gambar 2.3.1.F. 6 Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016  
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Dilihat dari Gambar 2.3.1.F.6 tampak pencapaian penyelesaian K3 sudah sangat baik. Namun penyelesaian K3 ini memiliki beban kuratif yang sangat tinggi. Agar terjadi trantibum dan trantibmas yang efektif



maka langkah preventif dengan meningkatkan peran serta pemerintah lokal, kelembagaan sosial di masyarakat serta pemuka masyarakat maupun perorangan perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi masalah K3 dan menekan pelanggaran K3 ini perlu diprogramkan ke depan peningkatan kesadaran generasi muda dan masyarakat luas untuk menghidupkan budaya Siskamling dan kesadaran hukum (kadarkum).

Pengukuran terhadap ketertiban yang didasarkan pada penyelesaian K3 tentunya bukan merupakan indikator yang tuntas. Kinerja yang didasarkan pada output saja dapat mengantarkan pada bias pemaknaan. Jika pelanggaran K3 tidak terjadi tentunya tidak ada masalah yang perlu diselesaikan, sehingga kinerja yang dicapai berdasarkan indikator ini buruk. Sementara itu jika tidak ada pelanggaran K3 secara riil justru merupakan sebuah prestasi dalam fasilitasi ketertiban dan keamanan. Untuk itu perlu diarahkan pada indicator outcome dengan menempatkan penilaian terhadap turunnya pelanggaran K3 sampai ke nilai “nol” adalah sebagai capaian kinerja tertinggi.

Sejak tahun 2015, upaya preventif yang dilakukan Dinas Ketertiban dalam menegakkan K3 salah satunya adalah dengan memunculkan Gerakan Panca Tertib untuk Jogja Istimewa. Dalam gerakan ini seluruh lapisan masyarakat ikut menangani kasus ketertiban. Munculnya Gerakan Panca Tertib ini menjadi penting mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Ketertiban, apalagi berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja, pemenuhan kebutuhan SDM di Dinas Ketertiban baru mencapai 64 persen. Untuk menyiasati kondisi tersebut, masyarakat perlu digerakkan dan disadarkan untuk bersama-sama menegakkan K3. Gerakan Panca Tertib meliputi Tertib Sosial, Tertib Lingkungan, Tertib Daerah Pinggir Jalan, Tertib Bangunan dan Tertib Usaha.

## 8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota

Linmas merupakan petugas yang sangat dekat dengan masyarakat. Keberadaan Linmas hingga di instansi terbawah yaitu pedukuhan/kampung. Hal ini disebabkan Linmas memiliki tugas pokok dalam perlindungan masyarakat, sehingga perlu dilihat perbandingan rasional dalam pelayanan terhadap jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah petugas Linmas dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Linmas dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami penurunan dan sedikit meningkat pada tahun 2014 dan 2015. Penurunan jumlah personel ini terjadi karena sudah banyak petugas Linmas yang memasuki masa pensiun.

Tabel 2.3.1.F.8

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Petugas Linmas	Orang	2.904	2.890	2.864	2.869	2.894	-2,59
Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-2,17
<b>Persentase Jumlah Linmas</b>	<b>Persen</b>	<b>0,68</b>	<b>0,71</b>	<b>0,69</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>-0,45</b>

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2017, Satpol PP Kota Yogyakarta, 2017

Kebijakan moratorium telah menekan jumlah Linmas dari tahun ke tahun karena banyak personil yang menjalani masa pensiun. Pada tahun 2014 penurunan jumlah petugas terjadi sehingga setiap 10.000 penduduk secara rerata dilayani oleh 69 orang petugas. Secara internal Kota Yogyakarta memiliki gerakan panca tertib yang dapat mewadahi kiprah dan partisipasi masyarakat dalam melakukan perlindungan masyarakat. di samping itu secara eksternal DIY memiliki program “jaga warga” atau Civil of Police berdasarkan peraturan daerah yang dapat bersinergi dengan gerakan panca tertib.

## 9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Untuk itulah pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota Yogyakarta mencapai 100 persen. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Luas wilayah kota Yogyakarta adalah 32,5 km<sup>2</sup> dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran.

Tabel 2.3.1.F.9

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Km <sup>2</sup>	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	Km <sup>2</sup>	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
<b>3.</b>	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2017

Semua wilayah Kota Yogyakarta memiliki potensi bencana kebakaran. Dari data tersebut di atas mulai tahun 2012 hingga 2016 luas WMK 32,5 km<sup>2</sup> seluruhnya merupakan wilayah potensi bencana kebakaran. Untuk itulah baik wilayah permukiman, pertokoan, pasar, pusat pelayanan publik, tempat-tempat umum maupun jaringan jalan memiliki potensi bahaya kebakaran. Jalan raya yang dilalui oleh kendaraan bermotor yang sangat ramai juga tidak terhindar dari potensi terjadinya bencana kebakaran. Untuk itu yang perlu ditingkatkan adalah perilaku disiplin dan kesadaran untuk saling menjaga agar dapat menghilangkan potensi bencana kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta.

## 10. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap pemerintah terhadap terjadinya bahaya kebakaran. Untuk melihat daya tanggap pemerintah ini maka perlu dihitung response time rate (RTR) dalam pelayanan manajemen kebakaran. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa persentase waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran mencapai 100 persen. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus kebakaran di Kota Yogyakarta mendapatkan respon tindakan pemadam kebakaran kurang dari 15 menit setelah pelaporan.

Tabel 2.3.1.F.10

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<15 jam setelah pengaduan)	Kejadian	50	51	55	49	63	6,88
Jumlah Kejadian Kebakaran	Kejadian	50	51	55	49	63	6,88
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2017, dengan Hasil Olahan

Berdasarkan Tabel 2.3.1.F.10 diketahui bahwa mulai tahun 2012 hingga 2016 bencana kebakaran mengalami peningkatan. Namun dari seluruh aduan tentang bencana kebakaran yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2016 dapat tertangani 100 persen. Tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun adalah 11 menit. Ini merupakan perkembangan yang baik, sebab sifat bencana kebakaran sifatnya mudah menjalar dan tidak mudah teratasi.

Tabel 2.3.1.F.11

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	11	11	11	11	11	0

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta 2017

Seiring dengan kepadatan perkampungan dan jalan raya di Kota Yogyakarta waktu tanggap bencana 11 menit merupakan respons yang bagus. Dengan penambahan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, Kota Yogyakarta masih dapat meningkatkan pelayanan terhadap bahaya kebakaran. Namun demikian tidak mudah untuk mempertahankan angka 11 menit waktu tanggap bencana kebakaran pada masa mendatang. Untuk itulah teknik-teknik paling efektif selalu perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Permasalahan kemungkinan perlunya waktu tanggap bencana yang lebih panjang dapat dikelola dalam bentuk: upaya untuk memecah/membagi titik pelayanan, dengan menempatkan armada/mobil pelayanan di beberapa titik, sehingga pelayanan menjadi lebih sempit. Demikian pula mobil pelayanan pemadam kebakaran dapat ditempatkan di beberapa titik layanan, dan dengan dilengkapi dengan mobil yang berukuran lebih kecil sehingga dapat menerobos jalan yang padat. Namun demikian tentunya memecah titik pelayanan ini punya konsekuensi terhadap jumlah petugas pendukung yang perlu dikonsentrasikan di beberapa titik pelayanan tersebut.

### 11. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di Kota Yogyakarta. Data di bawah ini diperoleh dari survei terhadap 150 responden di tiap kelurahan pada tahun 2012 - 2016. Survei tersebut dilakukan dua kali dalam setahun yaitu semester pertama dan semester kedua. Tabel 2.3.2.F.12 di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas kantor kelurahan di Kota Yogyakarta dalam kondisi baik.

Tabel 2.3.1.F.12

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik  
di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Sangat Baik		4	8	10	NA	14
Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Baik		40	36	33	15	9
Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Kurang Baik		1	1	2	NA	22
Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa		45	45	45	45	45
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	88,89	80	73,33	33,33	51,11

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan, 2017

Pengukuran cakupan pada tahun 2015 menggunakan IKM. Tahun 2015, terjadi perubahan unsur yang semula 14 unsur menjadi 9 unsur dan bisa ditambah muatan lokal. Dari sembilan unsur tersebut, dimana tidak ada unsur kenyamanan lingkungan. Berdasarkan kebijakan karena di Kelurahan tidak ada biaya/tarif maka untuk khusus kelurahan, unsur biaya/tarif diganti dengan kenyamanan lingkungan. Namun dikarenakan adanya ketidaksesuaian koordinasi dan informasi yang didapat oleh pelaksana teknis pengukuran SKM, maka dari 45 kelurahan, hanya 15 kelurahan yang mengganti unsur biaya /tarif menjadi kenyamanan lingkungan. Dari 15 kelurahan, unsur kenyamanan lingkungan rata-rata : 3,148 dengan kategori B (Baik). Kemudian pada tahun 2016 perhitungan kembali seperti tahun 2012-2014 yang menghasilkan angka 51,11 persen kelurahan dalam kondisi baik dan sangat baik.

### 12. Sistem Informasi Manajemen Pemda

Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 2002. SIM ini pertama kali digunakan oleh Dinas Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memudahkan administrasi. Pembuatan SIM ini sendiri merupakan tugas yang melekat pada Sekretariat Daerah bagian Teknologi, Informasi, dan Telematika (TIT). Hingga tahun 2014 TIT minimal membuat lima SIM dalam tiap tahunnya. Berikut ini merupakan tabel informasi tentang adanya SIM Pemda Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.1.F.13

Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	54	57	63	69	41

Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017

Ketersediaan SIM Pemda sangat efektif dalam membantu memudahkan sistem administrasi. Produktivitas kerja dan prestasi kerja setiap instansi yang telah memiliki SIM dapat meningkat seiring dengan kebutuhan aksesibilitas informasi yang semakin penting. Kinerja Pemkot akan meningkat dengan adanya SIM tersebut. Akan tetapi hal yang jauh lebih sulit dibanding dengan pengadaan SIM adalah perawatan dan update data dalam SIM yang telah tersedia. Konsistensi dan semangat untuk selalu meningkatkan pelayanan secara on line juga merupakan langkah lanjut yang memerlukan dukungan kebijakan, etos kerja dan sumberdaya yang memadai.

Sistem Teknologi Informasi diperlukan oleh semua OPD sehingga membutuhkan dukungan kompetensi yang memadai untuk semua pegawai dan pejabat. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi informasi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai, sehingga beban TI dipusatkan ke bidang TI. Jika setiap pejabat/pegawai memiliki komitmen untuk pengembangan skill dalam penggunaan TI sebagai pendukung kinerja, maka pelayanan akan lebih efektif. Dengan demikian TI bukan permasalahan yang berada pada level kelembagaan, namun hanya diturunkan sebagai permasalahan aparatur terkait dengan kompetensi teknis. Sistem informasi seringkali hanya dibatasi dengan pemaknaan SIM. Namun sesungguhnya pada kepentingan yang lebih luas diperlukan sistem inovasi yang mencakup teknologi yang lebih luas seperti teknologi pangan, teknologi pengolahan, teknologi pemasaran dll. Untuk kepentingan ini maka diperlukan suatu wadah sistem teknologi inovasi.

### 13. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Survei tentang indeks kepuasan masyarakat di kota Yogyakarta sudah lama diselenggarakan. Di tahun 2012 mulai terjadi penertiban pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat untuk seluruh instansi perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu jumlah instansi perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang telah menyelenggarakan IKM dari tahun 2012 hingga 2015 berturut-turut dengan jumlah layanan mencapai 259, 326, 135 ( data per tanggal 29 Januari 2015 dari total 326 layanan), dan 216( data per tanggal 27 Januari 2016 dari total 326 layanan). Untuk survey kepuasan masyarakat tahun 2016 sejumlah 284 layanan (data per tanggal tanggal 27 januari 2017) terdiri dari kecamatan/kelurahan 56 layanan, puskesmas 34 layanan, OPD 81 layanan, dan sekolah 113 layanan.

Tabel 2.3.1.F.14

#### Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	NA	74,29	75,94	78,57	79,51

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Bagian Organisasi, 2017

Survei kepuasan masyarakat merupakan data autentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Data primer dari survei IKM ini secara umum bersifat inspiratif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu, tindak lanjut pengolahan data hasil survei IKM perlu dilakukan secara lebih serius untuk mengkritisi kualitas pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Untuk itulah identifikasi terhadap jenis survei IKM dalam bentuk layanan tertentu sebaiknya

secara lengkap dapat direkap setiap tahun. Sisi peningkatan kualitas pelayanan perlu diprogramkan untuk setiap jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan, sehingga ada peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya mencakup semua jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran IKM dilakukan secara spesifik berdasarkan kekhususan pelayanan yang diberikan, sasaran yang dilayani. Beberapa jenis pelayanan yang diberikan misalnya kesehatan, pendidikan, catatan sipil, perizinan dll.

## G. Sosial

### 1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi

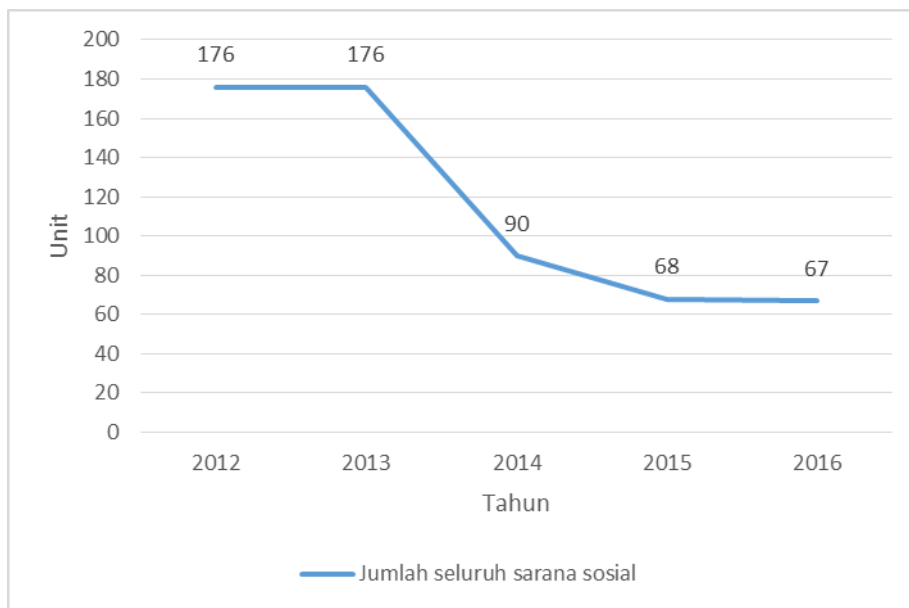
Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Data sarana sosial yang tersedia di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.1.G.1.

Tabel 2.3.1.G.1  
Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Panti Asuhan	Unit	9	9	9	9	10	2,67
2.	Panti Jompo	Unit	3	3	3	3	3	0,00
3.	Panti Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	0	-25,00
4.	Rumah Singgah	Unit	2	2	2	2	2	0,00
5.	Sarana Sosial lainnya	Unit	161	161	75	53	52	-24,61
6.	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	176	176	90	68	67	-21,45

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016, Dinas Sosial Kota Yogyakarta 2017

Dapat dilihat dalam Tabel 2.3.1.G.1 bahwa dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah sarana sosial di Kota Yogyakarta cenderung menurun, yaitu dari 176 sarana sosial menjadi 67 sarana sosial pada tahun 2016. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Kota Yogyakarta terdiri dari panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sarana sosial lainnya untuk anak cacat netra, cacat ganda dan tuna grahita. Sementara untuk panti rehabilitasi sudah tidak ada lagi di kota Yogyakarta. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.



Gambar 2.3.1.G.1 Grafik Sarana Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 2. PKMS yang memperoleh bantuan sosial

Yang termasuk sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.3.1.G.2

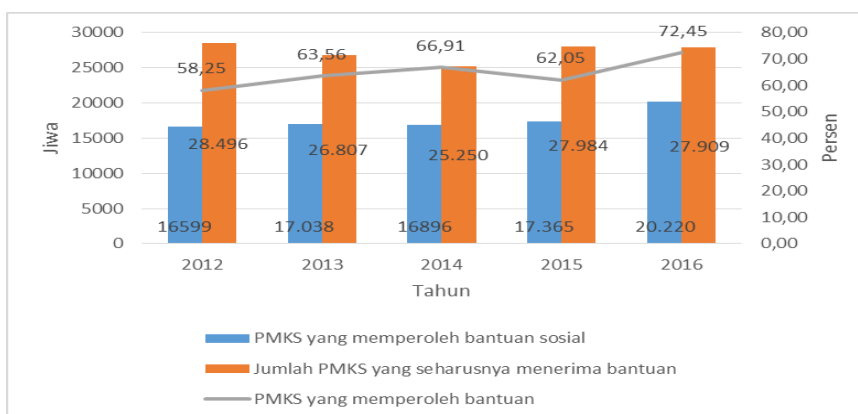
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Kelompok	16.599	17.038	16.896	17.365	20.220	5,06
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Kelompok	28.496	26.807	25.250	27.984	27.909	-0,52
3.	<b>PMKS yang memperoleh bantuan</b>	<b>Persen</b>	<b>58,25</b>	<b>63,56</b>	<b>66,91</b>	<b>62,05</b>	<b>72,45</b>	<b>5,61</b>

Sumber :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Pada Tabel 2.3.1.G.2 dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 58,25 persen, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 menjadi 72,45 persen. Penghitungan pada tahun 2016 menggunakan satuan orang yang menerima bantuan bukan lagi kelompok yang menerima bantuan. Angka PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta termasuk penerima rastra( beras kesejahteraan). Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.



Gambar 2.3.1.G.2 Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan persentase. Jumlah PMKS di Kota Yogyakarta masih tergolong cukup banyak. PMKS dapat tertangani hingga lebih dari 80 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang membaik untuk tahun mendatang PMKS dapat tertangani sepenuhnya. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Tabel 2.3.1.G.3

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	PMKS yang tertangani	Jiwa	1.697	1.944	1.279	1.950	22.899	276,78
2.	PMKS yang ada	Jiwa	7.352	6.220	6.293	5.271	28.220	101,23
3.	<b>Penanganan PMKS</b>	<b>Persen</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>81,14</b>	<b>-3,93</b>

Sumber :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017



#### 4. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina

Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Kota Yogyakarta tahun 2012 - 2016.

Tabel 2.3.1.G.4

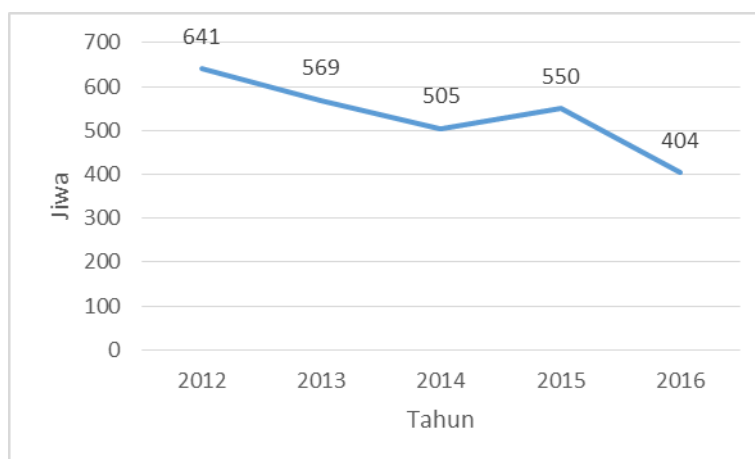
Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Anak terlantar yang dibina	Jiwa	641	569	505	550	404	-10,90

Sumber :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Data pada Tabel 2.3.1.G.4 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 641 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 404 jiwa pada tahun 2016.



Gambar 2.3.1.G.3 Grafik Anak Terlantar yang Dibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta tersaji dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.3.1.G.5

Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

NO	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tegalrejo	111	72	183
2	Jetis	95	86	181

3	Gedongtengen	145	101	246
4	Ngampilan	91	73	164
5	Danurejan	86	53	139
6	Pakualaman	40	29	69
7	Gondokusuman	130	105	235
8	Wirobrajan	107	76	183
9	Mantrijeron	97	76	173
10	Kraton	77	68	145
11	Gondomanan	36	24	60
12	Mergangsan	101	70	171
13	Umbulharjo	167	136	303
14	Kotagede	93	99	192
Jumlah se Kota YK		1.376	1.068	2.444

Sumber: Dinas Sosial, 2017

Data diatas merupakan data tahun 2014 dan pada tahun 2017 ini sedang dilakukan pendataan ulang.

## H. Perencanaan Pembangunan

### 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, karena di dalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2007. Dengan adanya dokumen RPJP ini maka pada rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 terdapat arahan perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan oleh Perda yang relevan.

Tabel 2.3.1.H.1

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah  
di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2017

Lebih dari sebagai kebutuhan administratif untuk memenuhi kewajiban sebagai ketentuan normatif, ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD. Visi Kota Yogyakarta yang dirumuskan dalam RPJPD 2005-2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan.” Dengan visi tersebut maka Kota Yogyakarta dapat mengembangkan misi yang relevan. Terkait dengan detail misi maka dalam RPJPD Kota Yogyakarta terdapat sepuluh misi yaitu:

- a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan,
- b. Mempertahankan kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan,
- c. Mewujudkan daya saing kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa,
- d. Mewujudkan kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan,
- e. Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya,
- f. Mewujudkan kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean governance (pemerintah yang bersih, berkeadilan dan berlandaskan hukum),
- g. Mewujudkan kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai,
- h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan
- i. Mewujudkan kota Yogyakarta yang sehat.

Dari sepuluh misi ini dapat menjadi arahan program pembangunan dan kegiatan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentunya dalam rentang waktu tahun 2005-2015 ini telah banyak capaian hasil pembangunan. Khususnya dalam tahun 2010-2015 beberapa pencapaian sesuai dengan arahan visi dan misi ini. Pada tahun 2015 indikator di atas tidak akan berubah sebab acuan yang digunakan relatif makro dan berlaku dari 2005-2025 Hasil evaluasi ini disampaikan pada bab-bab berikut secara terstruktur.

## **2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada**

Bertolak dari RPJPD selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007. Sedangkan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016. Sehingga dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

Tabel 2.3.1.H.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan Perda-Perda penetapan RPJMD ini selanjutnya dilakukan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yang menjadi dasar selanjutnya adalah RKPD. Jaminan keberlanjutan program akan sangat didukung oleh adanya dokumen RPJMD. Konsistensi arah pembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal.

### 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2012 hingga 2016 telah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2011 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2012
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2013
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2013 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 Tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Tabel 2.3.1.H.3

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2017

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap OPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari Tabel 2.3.1.H.3 pemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-

program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

#### 4. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk “up date” sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti Tabel 2.3.1.H.4.

Tabel 2.3.1.H.4

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	122	108	109	109	109
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	109	109	109	109	109
<b>Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>111,9</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017

Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequence antar RKPD. Oleh karena itu dengan hanya melihat jumlah program yang ada di dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD belum dapat secara substansial dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, karena bentuk program di RKPD lebih operasional, maka tentunya jumlahnya bisa lebih banyak, mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan merencanakan RKPD untuk tahun depan sudah lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.

Jumlah program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD belum memiliki perbedaan yang signifikan. Jarak perbedaan jumlah program dalam RPJMD sangat dekat dengan jumlah program dalam RKPD. Melihat fakta dan data tersebut dapat disimpulkan beberapa asumsi yaitu; pertama kecakapan dalam mendetailkan program dari RPJMD ke dalam RKPD perlu ditingkatkan; kedua kemungkinan rumusan program dalam RPJMD sudah sangat operasional sehingga tidak dapat diturunkan ke dalam nama program yang lebih spesifik, sehingga nama program di RPJMD sama dengan nama program di RKPD.

## 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

### A. Ketenagakerjaan

#### 1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai Angka Partisipasi Angkatan Kerja.

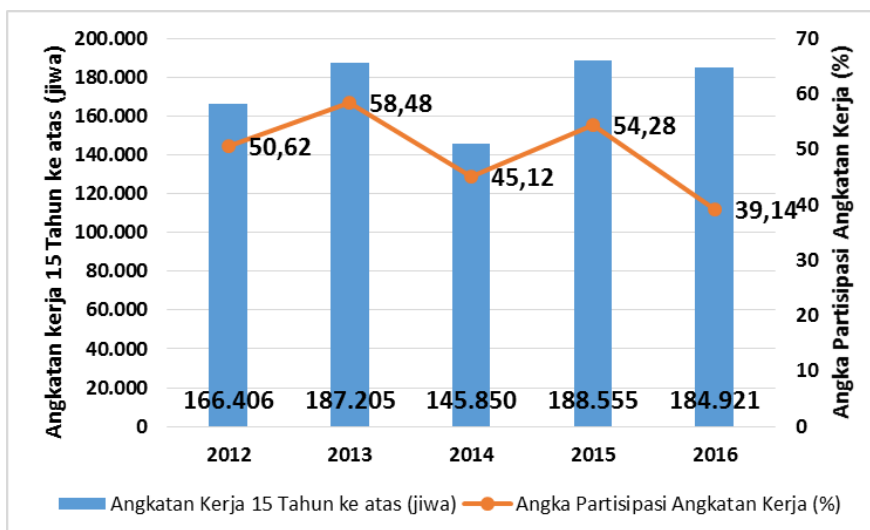
Tabel 2.3.2.A.1

Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	Jiwa	166.406	187.205	145.850	188.555	184.921	4,44
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jiwa	328.737	320.121	323.255	347.403	472.415	10,45
3	<b>Angka Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>Persen</b>	<b>50,62</b>	<b>58,48</b>	<b>45,12</b>	<b>54,28</b>	<b>39,14</b>	<b>-3,73</b>

Sumber: Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun, 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2016); DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017.

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2012-2016, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan tren terus menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,73% per tahun. Pada tahun 2012, angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar 50,62%, sedangkan pada tahun 2016, angka ini menurun hingga menjadi 39,14%. Semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.2.A.1 Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2012-2016, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -37,77 persen per tahun. Sementara itu jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta semakin meningkat dengan pertumbuhan 3,83% per tahun. Pada tahun 2012, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja mencapai 60 kasus, sempat turun hingga menjadi 35 kasus di tahun 2014, dan kembali naik menjadi 40 kasus di tahun 2016.

Tabel 2.3.2.A.2

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	kasus	60	56	35	36	40	-7,55
2	Jumlah Perusahaan	unit	1.256	1.300	1.341	1.405	1.460	3,84
3	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		47,77	43,08	26,10	25,62	27,40	-37,77

Sumber: Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2014, 2015); DiskopuKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2017.

Penurunan angka sengketa merupakan sebuah pertanda baik khususnya untuk dinamika perekonomian di Kota Yogyakarta. Turunnya angka sengketa mengindikasikan bahwa komunikasi dan kebijakan yang diterapkan di dalam perusahaan mampu mengakomodasi kepentingan antara pengusaha dan juga pekerja. Selain itu, rendahnya angka sengketa juga mencerminkan bahwa kegiatan industri yang ada cukup kondusif dan mampu menjadi nilai plus bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Yogyakarta.

### 3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dari tahun 2012-2016, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderung naik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 23,73% per tahun. Meski persentase pencari kerja yang ditempatkan terus meningkat, tetapi sebenarnya jumlah pencari kerja yang mendaftar cenderung menurun.

Tabel 2.3.2.A.3

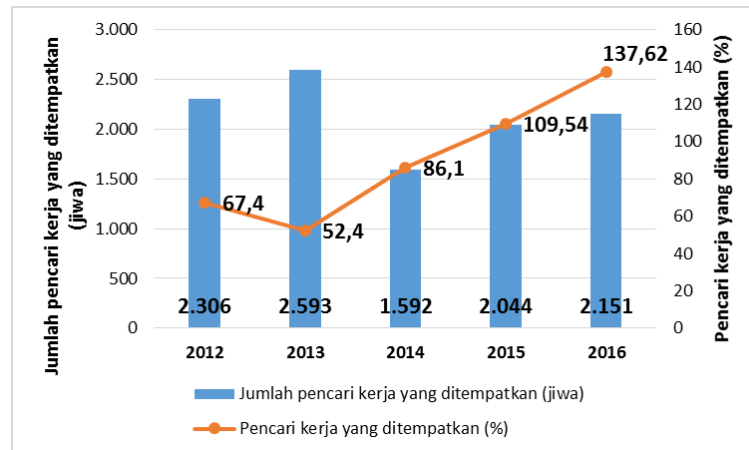
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jiwa	2.306	2.593	1.592	2.044	2.151	1,87
2	Pencari kerja yang mendaftar	Jiwa	3.422	4.950	1.849	1.866	1.563	-8,33
3	<b>Pencari kerja yang ditempatkan</b>	<b>Persen</b>	<b>67,4</b>	<b>52,4</b>	<b>86,1</b>	<b>109,54</b>	<b>137,62</b>	<b>23,73</b>

Sumber: Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2014, 2015); DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2017

Ketidaksesuaian antara jumlah pendaftar kerja dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dimana pencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah akibat dari penduduk yang mencari kerja tidak seluruhnya mencari kartu kuning. Sedangkan tenaga kerja yang mendaftar tersebut didata dari penduduk yang mencari kartu kuning. Oleh karenanya, jumlah pencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar, padahal lazimnya jumlah pencari kerja yang mendaftar adalah lebih besar atau sama dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan





Gambar 2.3.2.A.2 Grafik Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tabel 2.3.2.A.4

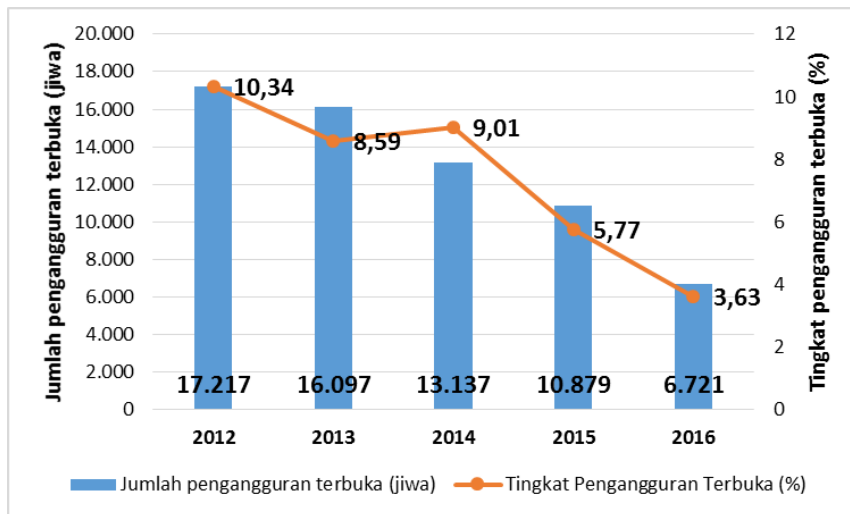
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah pengangguran terbuka	Jiwa	17.217	16.097	13.137	10.879	6.721	-20,96
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Jiwa	166.406	187.205	145.850	188.555	184.921	2,67
3	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>Persen</b>	<b>10,34</b>	<b>8,59</b>	<b>9,01</b>	<b>5,77</b>	<b>3,63</b>	<b>-23,03</b>

Sumber: Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2014); Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017

Selama tahun 2012-2016, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun. Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta adalah sebesar -23,03 persen. Pada tahun 2012, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 10,34 persen dan turun menjadi 3,63 persen pada tahun 2016. Apabila dilihat dari jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerja yang ada pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relatif lebih rendah

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



Gambar 2.3.2.A.3 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 5. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerja tersebut merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja.

Selama tahun 2012-2016, persentase keselamatan dan perlindungan yang diterapkan oleh perusahaan mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,82% per tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiring bertambahnya jumlah perusahaan dan jumlah perusahaan yang menerapkan K3. Pada tahun 2012, tercatat ada 1.016 unit perusahaan yang menerapkan K3 atau sekitar 80,89 persen dari total perusahaan sebanyak 1.256 unit. Sedangkan pada tahun 2016, dari total perusahaan sebanyak 1.460 unit, sebanyak 1.370 unit perusahaan sudah menerapkan K3 atau setara dengan 93,84 persen dari total perusahaan.

Tabel 2.3.2.A.5

Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	1.016	1.000	1.197	1.333	1.370	8,07
2	Jumlah perusahaan	Unit	1.256	1.300	1.341	1.405	1.460	3,84
3	<b>Keselamatan dan Perlindungan</b>	<b>Persen</b>	<b>80,89</b>	<b>84,62</b>	<b>89,26</b>	<b>94,88</b>	<b>93,84</b>	<b>3,82</b>

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015, 2016: dengan Hasil Olahan, 2017.

Secara umum, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menerapkan K3. Pemberian pemahaman mengenai pentingnya penerapan K3 bagi perusahaan, pekerja, dan lingkungan oleh dinas terkait kepada perusahaan turut membantu meningkatkan persentase perusahaan yang menerapkan K3 sehingga akan tercipta perlindungan kerja.

## 6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Secara umum, penyelesaian buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah penyelesaian perselisihan dan jumlah kejadian perselisihan juga cenderung menurun pada kurun waktu yang sama. Meski demikian, pada tahun 2015, terdapat satu dari dua kasus yang belum terselesaikan. Kasus tersebut terkait dengan THR yang tidak diberikan pengusaha kepada buruh.

Tabel 2.3.2.A.6

Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah penyelesaian perselisihan	Kasus	50	50	30	25	27	-12,17
2	Jumlah kejadian perselisihan	Kasus	60	56	36	30	35	-10,60
3	<b>Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha</b>	<b>Persen</b>	<b>83,33</b>	<b>89,29</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>	<b>77,14</b>	<b>-1,74</b>

Sumber: Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017: dengan Hasil Olahan.2017

## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan di dapat dari BKD, dan jumlah seluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari BKD serta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Data presentasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.3.2.B.1.

Tabel 2.3.2.B.1

Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

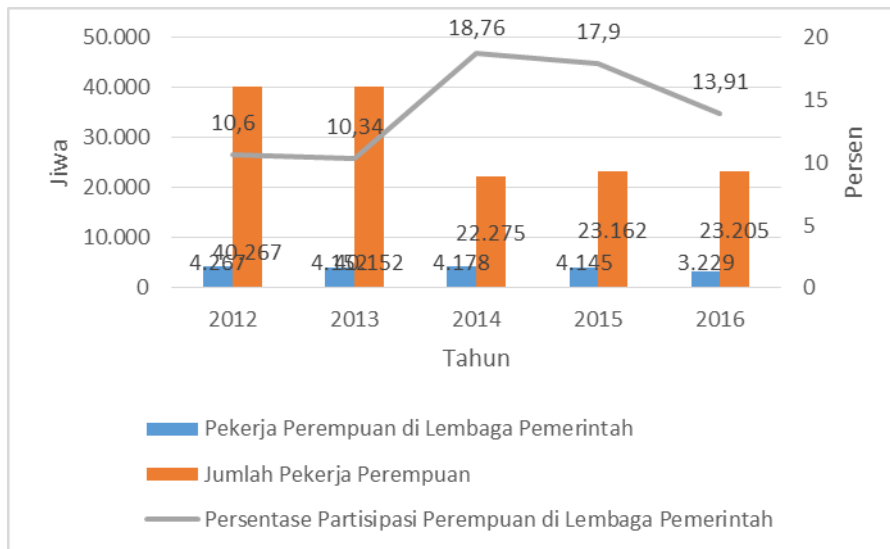
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	jiwa	4.267	4.152	4.178	4.145	3.229	-6,24
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	40.267	40.152	22.275	23.162	23.205	-10,16
3.	<b>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah</b>	<b>Persen</b>	<b>10,60</b>	<b>10,34</b>	<b>18,76</b>	<b>17,90</b>	<b>13,91</b>	<b>13,03</b>

Sumber:

1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, 2015
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
5. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.2.B.1, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan mengalami penurunan dari 4.267 jiwa di tahun 2012, menjadi 3.229 jiwa di tahun 2016. Namun, persentasenya meningkat dari 10,60 persen tahun 2012, menjadi 13,91 persen di tahun 2016, karena jumlah seluruh pekerja perempuan yang juga mengalami penurunan sebesar kurang lebih tujuh belas ribu jiwa.

Menurut Badan Kepegawaian Daerah, dari dua periode penerimaan CPNS terakhir, didominasi oleh CPNS perempuan yang diterima. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah persentase pekerja perempuan seluruhnya di Kota Yogyakarta, persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah. Melihat kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, dikabarkan akan ada penerimaan CPNS dari bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga diprediksikan pula akan ada lebih banyak pekerja perempuan di lembaga pemerintah.



Gambar 2.3.2.B.1 Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016  
Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pada indikator ini dihitung persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan pada indikator ini merupakan data yang berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan data jumlah seluruh pekerja perempuan di Kota Yogyakarta merupakan data yang didapat dari penjumlahan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.3.2.B.2.

Tabel 2.3.2.B.2

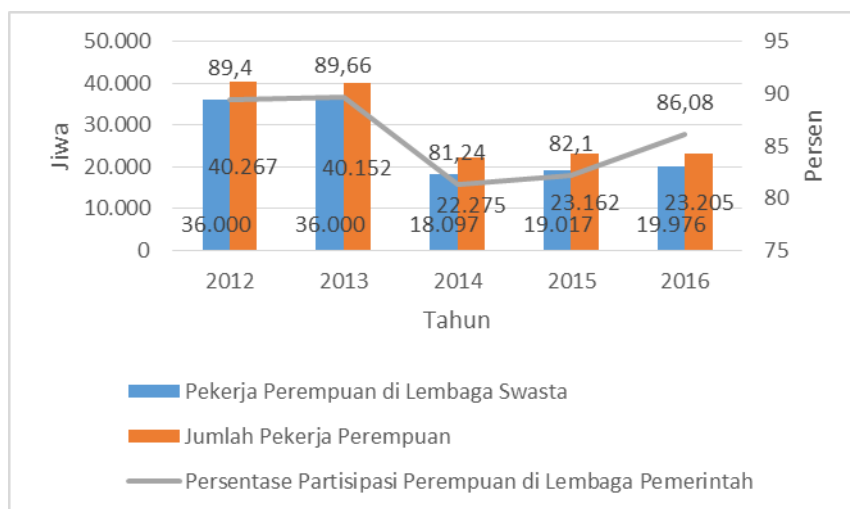
Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	Jiwa	36.000	36.000	18.097	19.017	19.976	-9,90
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	40.267	40.152	22.275	23.162	23.205	-10,16
3.	<b>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah</b>	<b>Persen</b>	<b>89,40</b>	<b>89,66</b>	<b>81,24</b>	<b>82,10</b>	<b>86.08</b>	<b>-25,92</b>

Sumber:

1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
4. Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan Tabel 2.3.2.B.2, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 - 2016 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami penurunan dari 36.000 jiwa di tahun 2012, menjadi 19.976 jiwa di tahun 2016. Begitu pula dengan persentasenya yang mengalami penurunan, dari 89,40% di tahun 2012, menjadi 86,08% di tahun 2016. Meskipun pada kurun waktu lima tahun terakhir persentase pekerja perempuan mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan data tahun 2014, jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan, begitu juga dengan persentasenya. Hal tersebut mengindikasikan makin terbuka luasnya kesempatan bekerja bagi perempuan di ranah lembaga swasta dibandingkan tahun 2014. Hal tersebut juga dapat dianggap sebagai kondisi yang baik dimana perempuan sudah mendapat kesetaraan dalam bidang ekonomi.



Gambar 2.3.2.B.2 Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

Tabel 2.3.2.B.3

Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

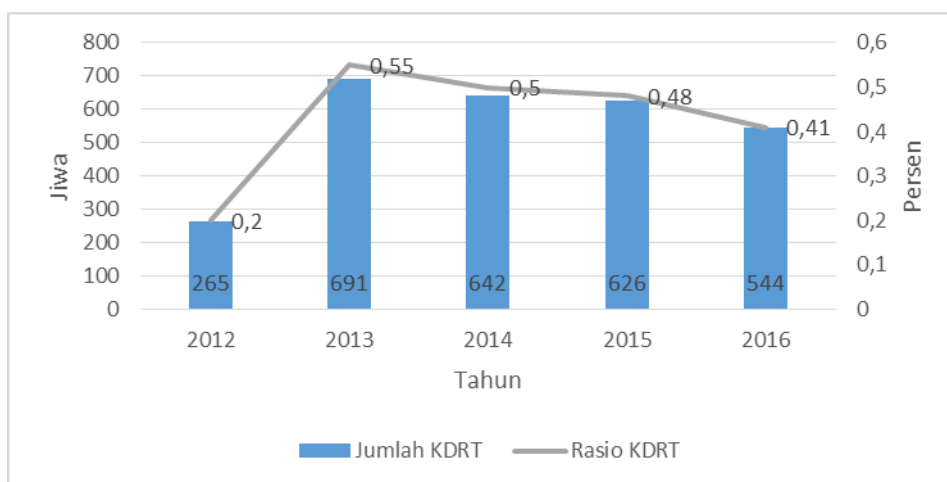
No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah KDRT	Jiwa	265	691	642	626	544	34,52

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
2.	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jiwa	129.439	124.744	128.843	129.092	131.092	0,35
3.	<b>Rasio KDRT</b>	<b>Persen</b>	<b>0,20</b>	<b>0,55</b>	<b>0,50</b>	<b>0,48</b>	<b>0,41</b>	<b>36,83</b>

Sumber:

1. Seksi Perlindungan Kelompok Rentan (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016)
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.2.B.3, rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 berada dalam kondisi yang kurang baik, ditunjukkan dengan rasio KDRT yang meningkat hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2012, ditemukan 256 kasus KDRT. Jumlah kasus ini semakin meningkat hingga mencapai 544 kasus di tahun 2016. Rendahnya kasus KDRT di tahun 2012 bukan berarti memang hanya terjadi sedikit kasus KDRT, namun disebabkan karena masyarakat belum berani melaporkan adanya tindakan KDRT atau ketidaktahuan harus melaporkan kemana. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan yang cukup besar, hal ini menandakan makin sadarnya korban KDRT untuk melaporkan kasus KDRT. Pada kurun waktu 2013-2016 terjadi penurunan rasio KDRT hal tersebut mengindikasikan adanya kondisi yang sedikit demi sedikit membaik dengan berkurangnya kasus KDRT.



Gambar 2.3.2.B.3 Grafik Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.

#### 4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

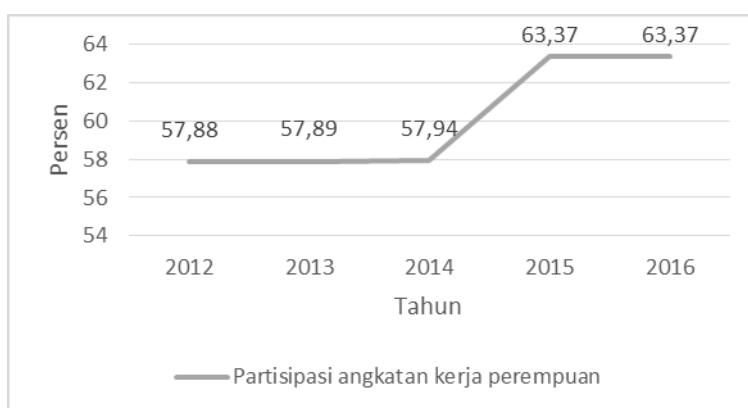
Tabel 2.3.2.B.4

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	57,88	57,89	57,94	63,37	63,37	2,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.2.B.4, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 57,88%. Kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 63,37% pada tahun 2016. Artinya, terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Sumber penghasilan keluarga tidak hanya dari suami, namun istri juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain bisa menambah penghasilan keluarga, beberapa perempuan bekerja untuk mengaktualisasikan diri, mengisi kegiatan sehari-sehari atau bersosialisasi, serta untuk menambah wawasan pengetahuan.



Gambar 2.3.2.B.4 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

#### 5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak



dari tindakan kekerasan merupakan proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.3.2.B.5.

Tabel 2.3.2.B.5

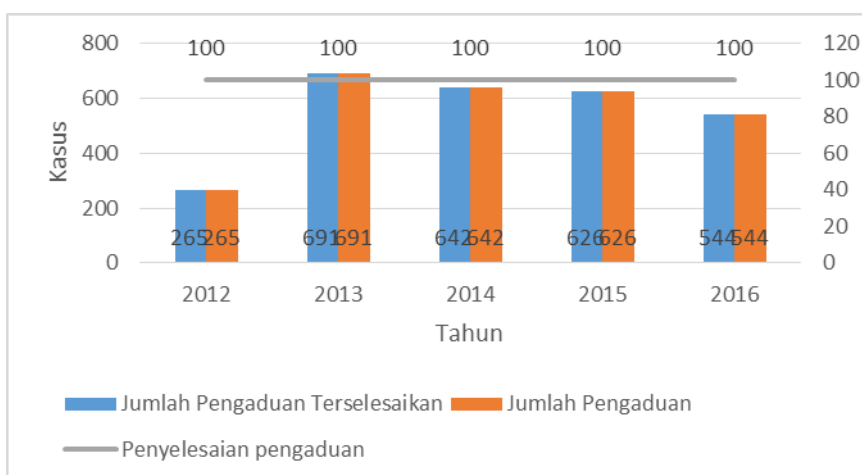
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Pengaduan Terselesaikan	Kasus	265	691	642	626	544	63,12
2.	Jumlah Pengaduan	Kasus	265	691	642	626	544	63,12
3.	<b>Penyelesaian Pengaduan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Sumber:

1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.2.B.5, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 telah terselesaikan semuanya (100 persen). Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus yang dilaporkan semakin banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya.



Gambar 2.3.2.B.5 Grafik Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut ini merupakan data IPG di Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.

Tabel 2.3.2.B.6

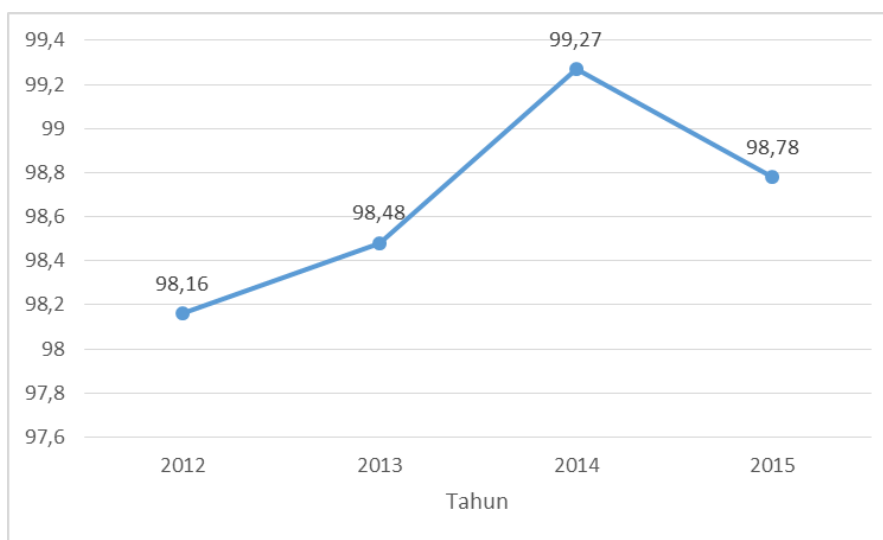
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Indeks Pembangunan Gender		98,16	98,48	99,27	98,78	NA	0,55

Sumber:

1. Badan Pusat Statistik, 2016
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2016), IPG baru dihitung sampai tahun 2015, sedangkan setelah itu belum dilakukan pembaruan perhitungan. IPG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, IPG di Kota Yogyakarta mencapai 98,16 dan mengalami peningkatan menjadi 98,78 pada tahun 2015. Jika dibandingkan IPG nasional tahun 2012 yang hanya mencapai 68,52, Kota Yogyakarta sudah mampu melampaui IPG nasional. Hal ini mengindikasikan persamaan dan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta sudah semakin tinggi. Grafik peningkatan IPG di Kota Yogyakarta disajikan dalam Gambar 2.3.2.B.6.



74Gambar 2.3.2.B.6 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut ini merupakan data IDG Kota Yogyakarta tahun 2012 - 2015.

Tabel 2.3.2.B.7

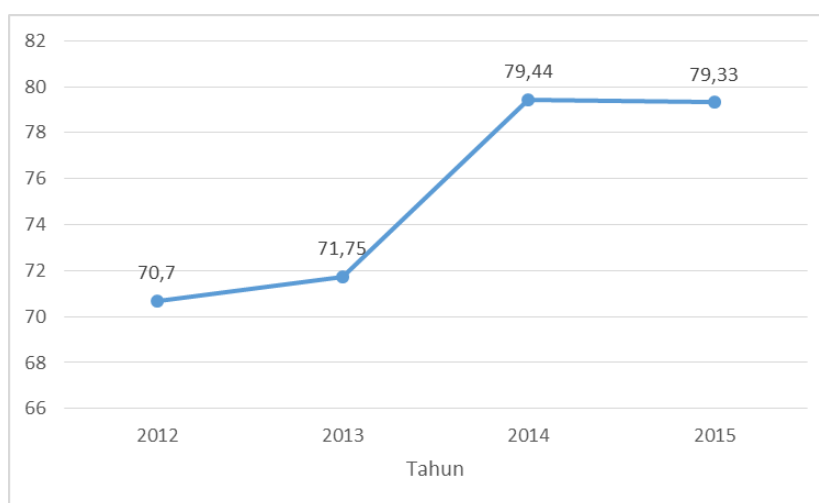
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender		70,70	71,75	79,44	79,33	NA	3,91

Sumber:

1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2015
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, IDG baru dihitung sampai tahun 2015, sedangkan setelah itu belum dilakukan perhitungan. IDG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan, dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang bernilai 3,91 persen. Pada tahun 2012, IDG Kota Yogyakarta mencapai 70,70 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 79,33 pada tahun 2015. IDG Kota Yogyakarta sudah melebihi capaian IDG nasional yang mencapai 70,5 pada tahun 2013 (BPS dalam BAPPENAS, 2014). Artinya, persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan di Kota Yogyakarta semakin tinggi.



Gambar 2.3.2.B.7 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## C. Ketahanan Pangan

### 1. Regulasi Ketahanan Pangan

Selama tahun 2010, Kota Yogyakarta telah memiliki regulasi ketahanan pangan. Regulasi ini berupa peraturan walikota yang terdiri dari Perwal No.64 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan dan Perwal No.51 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan daerah tersebut masih diberlakukan sampai pada tahun 2016.

Tabel 2.3.2.C.1

Regulasi Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017

Ketahanan pangan merupakan suatu keadaan tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah dan mutunya), aman, beragam, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Dalam suatu wilayah, diharapkan tercapai ketahanan pangan, yang juga menjadi kebutuhan dasar penduduk. Dalam Perwal Nomor 51 Tahun 2010, diungkapkan langkah-langkah operasional dalam penganekaragaman konsumsi pangan, antara lain kampanye, pendidikan konsumsi pangan, penyuluhan, pemanfaatan pekarangan, serta penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada UMKM. Sementara itu, Perwal Nomor 64 Tahun 2010 sebagai upaya dalam mengendalikan faktor makanan, orang, tempat/ bangunan, dan perlengkapannya yang dapat/ mungkin meimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan penduduk Kota Yogyakarta mendapatkan akses pangan yang baik, dari jumlah maupun mutu pangan.

### 2. Ketahanan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan rata-rata ketersediaan pangan utama mencapai 26,59 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata jumlah ketersediaan pangan yaitu sebesar 25,48 persen per tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah yang paling besar pada kurun waktu 2012 – 2016. Pada tahun 2015, ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta mencapai 143,24 kg/jiwa, sedangkan pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama turun menjadi sebesar 135,76 kg/jiwa.

Ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta berasal dari daerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayah Kota Yogyakarta. Di samping itu, perhitungan ketersediaan pangan di kota Yogyakarta didapat dari akumulasi cadangan pangan ketika bencana terjadi. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

Tabel 2.3.2.C.2

## Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Kg	22.603.000	25.882.000	23.892.000	58.656.000	56.029.000	25,48
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	412.704	-0,88
3	<b>Ketersediaan Pangan Utama</b>	<b>Kg/jiwa</b>	<b>52,86</b>	<b>63,65</b>	<b>57,72</b>	<b>143,24</b>	<b>135,76</b>	<b>26,59</b>

Sumber:

1. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2017

### 3. Pola Pangan Harapan

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut yang selama ini kita kenal dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100.

Mengacu pada PPH tersebut, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (nutritional adequacy) akan tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Pada periode 2012-2016, skor pola pangan harapan Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang cukup baik namun berfluktuasi. Skor pola pangan harapan pada tahun 2012 adalah 90. Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan menjadi 85,7 dan 75,9. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 86, 93. Pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 92,3.

### D. Pertanahan

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

### 1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah

Sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010, formula yang digunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah penduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formula tersebut dirasa kurang pas dengan bilangan pembanding adalah jumlah penduduk, sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah.

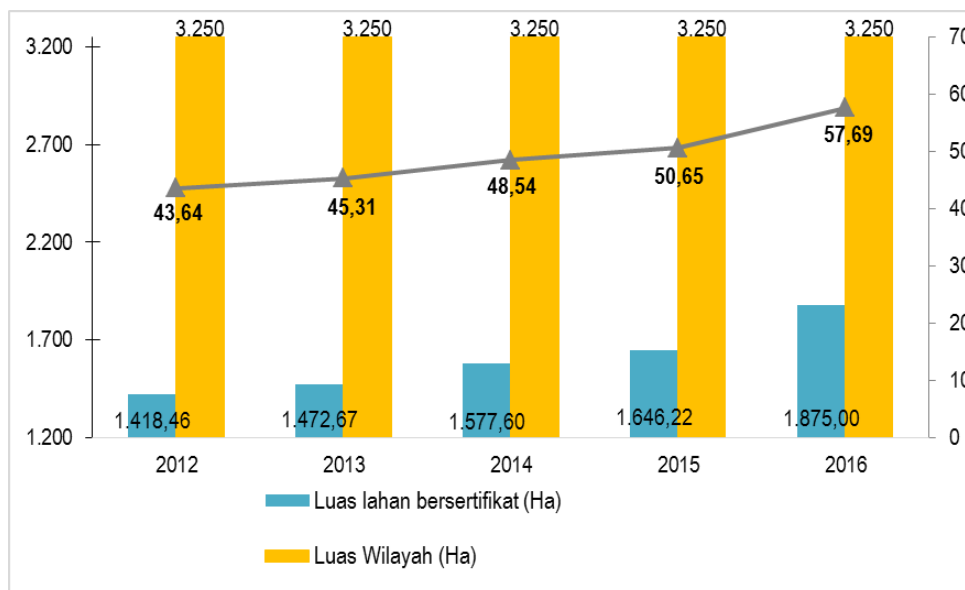
Tabel 2.3.2.D.1

Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Luas lahan bersertifikat	Ha	1.418,46	1.472,67	1.577,60	1.646,22	1.875,00	7,22
2.	Luas Wilayah	Ha	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.	<b>Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah</b>	<b>Persen</b>	<b>43,64</b>	<b>45,31</b>	<b>48,54</b>	<b>50,65</b>	<b>57,69</b>	<b>7,23</b>

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Tercatat seluas 1.418,46 hektar lahan bersertifikat di tahun 2012 kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 1.875 hektar lahan bersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,22 persen per tahun. Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah juga mengalami peningkatan yakni 43,64 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 57,69 persen pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,23 persen per tahun.



Gambar 2.3.2.D.1 Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

## 2. Penyelesaian Kasus Tanah

Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah negara adalah dengan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.3.2.D.2

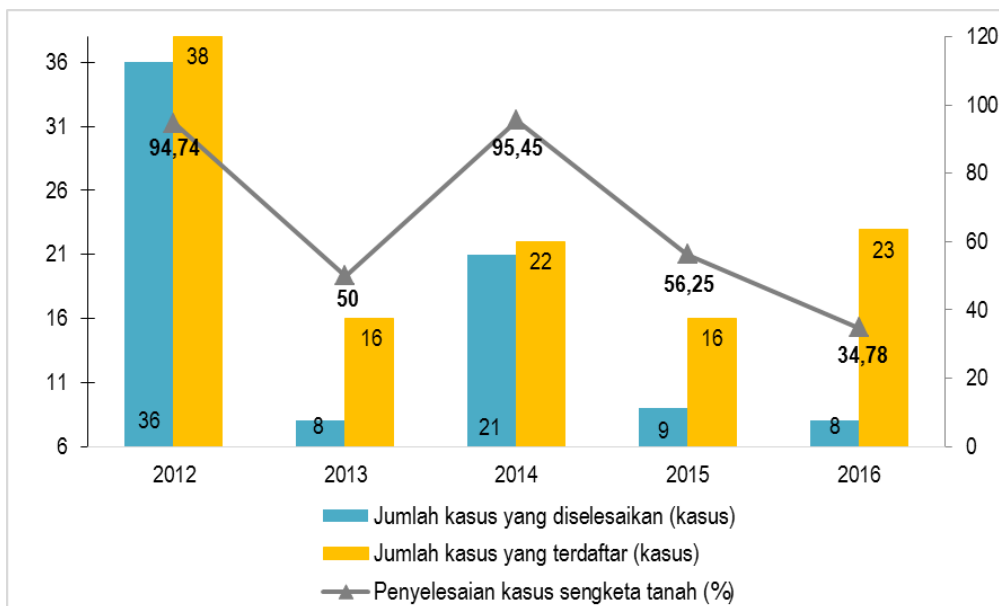
Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	Kasus	36	8	21	9	8	-31,34
2.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	Kasus	38	16	22	16	23	-11,80
3.	<b>Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah</b>	<b>Persen</b>	<b>94,74</b>	<b>50,00</b>	<b>95,45</b>	<b>56,25</b>	<b>57,69</b>	<b>-22,16</b>

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Jumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanah persil milik perorangan. Secara umum, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,16 persen per tahun. Dalam kurun waktu yang sama (tahun 2012 hingga tahun 2016), tidak ada kasus yang dapat terselesaikan seluruhnya (100 persen), bahkan pada tahun 2013 hanya 50 persen kasus tanah saja yang dapat terselesaikan. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2016 yang berhasil menyelesaikan 8 kasus sengketa tanah dari 23 kasus yang terdaftar. Meskipun demikian, jumlah kasus dari tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -11,80 persen. Hal tersebut dapat

mengindikasikan semakin berkurangnya permasalahan dibidang pertanahan yang sekaligus mengindikasikan adanya peningkatan administrasi pertanahan di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.2.D.2 Grafik Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100. Permohonan izin lokasi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 dapat seluruhnya terselesaikan

Tabel 2.3.2.D.3

Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah izin lokasi	Unit	1	1	0	1	NA
2.	Permohonan izin lokasi	Unit	1	1	0	1	NA
3.	<b>Penyelesaian izin lokasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>NA</b>

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2016 dengan Hasil Olahan

Data penyelesaian izin lokasi Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatat jumlah izin lokasi di tahun 2012 merupakan izin lokasi untuk pembangunan kondominium/hotel seluas 12.227 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; sedangkan pada tahun 2013 merupakan izin lokasi untuk pembangunan hotel (semula Purawisata) seluas 24.690 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsari. Sedangkan di tahun 2015 permohonan izin lokasi dilakukan sebatas untuk mengganti kepemilikan tanah gudang susu milik Perusahaan SGM.



## E. Lingkungan Hidup

Lampiran 1 Permendagri menyebutkan bahwa terdapat delapan indikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan.

Dari kedelapan indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, misalnya adalah indikator persentase volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang menggantikan indikator persentase penanganan sampah, indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R yang menggantikan data tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, juga indikator persentase kegiatan pengawasan limbah usaha yang menggantikan indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Terdapat beberapa indikator yang tidak dapat diisikan, juga adanya penggantian indikator hal ini dikarenakan belum adanya pendataan.

### 1. Presentase Volume Sampah yang Terangkut ke TPA

Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari perbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Indikator persentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta berdasarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta menggunakan perbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA dengan perkiraan volume sampah. Analisis terkait dengan pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan data dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Tabel 2.3.2.E.1

Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tahun 2012 – 2016

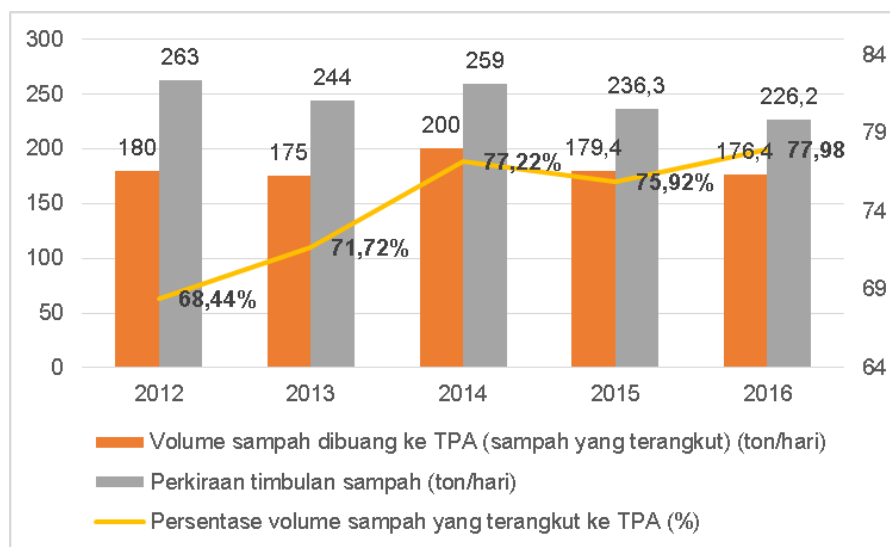
No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)	Ton/hari	180	175	200	179,4	176,4	-0,12
2.	Perkiraan timbunan sampah	Ton/hari	263	244	259	236,3	226,2	-3,53
3.	<b>Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA</b>	<b>Persen</b>	<b>68,44</b>	<b>71,72</b>	<b>77,22</b>	<b>75,92</b>	<b>77,98</b>	<b>3,37</b>

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2017

Jumlah volume sampah yang dibuang atau diangkut ke TPA dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015 cenderung fluktuatif, seperti yang disajikan pada Tabel 2.3.2.E.1. Pada periode tahun 2012 ke tahun 2013 terdapat pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 5 ton/hari, dari 180 ton/ hari menjadi 175 ton/hari. Demikian juga pada periode tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami pengurangan sebanyak 20,6 ton/hari, dari 200 ton hari menjadi 179,4 ton/hari, dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 176,4 ton/hari. Hal ini terjadi karena memang pada rentang tahun tersebut memang perkiraan timbunan sampah cenderung menurun. Perkiraan volume timbunan sampah pada tahun 2013 sebanyak 244 ton/hari, berkurang sebanyak 19 ton/hari dari tahun 2012 yang awalnya sebanyak 263 ton/hari. Pada tahun 2015 perkiraan volume

timbunan sampah juga menurun menjadi 236,3 ton/hari dari awalnya pada tahun 2014 sejumlah 259 ton/hari. Kondisi tersebut hampir sama dengan perkiraan timbunan sampah yang juga mengalami fluktuasi. Perkiraan timbunan sampah dari tahun 2012 hingga 2016, secara berturut turut adalah 263 ton/hari; 244 ton/hari; 259 ton/hari; 236,3 ton/hari; 226,2 ton/hari. Artinya, untuk dapat menilai kinerja pengangkutan sampah ke TPA dapat diketahui berdasarkan data persentase volume sampah yang dibuang ke TPA.

Gambar 2.3.2.E.1. menunjukkan secara lebih jelas perbandingan antara sampah yang diangkut ke TPA dengan perkiraan timbunan sampah. Pada gambar tersebut nampak pula dengan jelas persentase sampah yang diangkut ke TPA. Secara umum dapat dikatakan bahwa masih terdapat selisih yang cukup besar antara perkiraan volume timbunan sampah dengan pengangkutan sampah ke TPA. Pada tahun 2012, volume sampah yang diangkut mencapai 68,44%. Artinya, hampir sepertiga sampah yang diperkirakan ada di Kota Yogyakarta tidak diangkut ke TPA. Namun demikian terdapat peningkatan kinerja dalam pengangkutan sampah pada tahun setelahnya, yakni pada tahun 2013 sebesar 71,72% dan pada tahun 2014 sebesar 77,22%. Sayangnya, pada tahun 2015 persentase sampah yang diangkut ke TPA menurun menjadi 75,92, walaupun kembali meningkat menjadi 77,98% pada tahun 2016. Artinya, pengangkutan sampah ke TPA dalam kurun waktu tahun 2012-2016 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,37%.



Gambar 2.3.2.E.1. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  
Tahun 2012 – 2016  
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai OPD yang memiliki tugas dalam pengelolaan lingkungan telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat hubungannya dengan penanganan sampah. BLH telah melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang dengan prinsip 3R. Langkah ini diambil sebagai upaya agar nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Berkurangnya timbunan sampah diharapkan akan dapat diikuti dengan pengurangan TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah, karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan,

bau yang tidak sedap, serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu TPS juga akan disentralkan pada satu titik tertentu dan akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal. Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman tersebut. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan persampahannya menjadi lebih baik.

## 2. Presentase Cakupan Pelayanan Air Minum

Pelayanan air minum menjadi salah satu indikator untuk menilai kondisi lingkungan hidup. Persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Yogyakarta didapatkan dari perbandingan jumlah penduduk yang terlayani air minum dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan. Berdasarkan Tabel 2.3.2.E.2. jumlah penduduk di wilayah pelayanan yakni Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah penduduk adalah 392.330 jiwa, dan meningkat menjadi 417.774 jiwa. Artinya, dalam rentang waktu lima tahun terdapat penambahan sebanyak 25.414 jiwa, atau dengan kata lain dalam kurun waktu tahun 2012-2016 rata-rata pertambahan jumlah penduduk adalah sebesar 1,59%. Data tersebut berbeda cukup signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terlayani air bersih. Bahkan jumlah pertumbuhan penduduk tersebut lebih besar daripada pertumbuhan jumlah penduduk yang terlayani pelayanan air minum yang berada pada angka 0,13% per tahun. Secara lebih jelas data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2.E.2

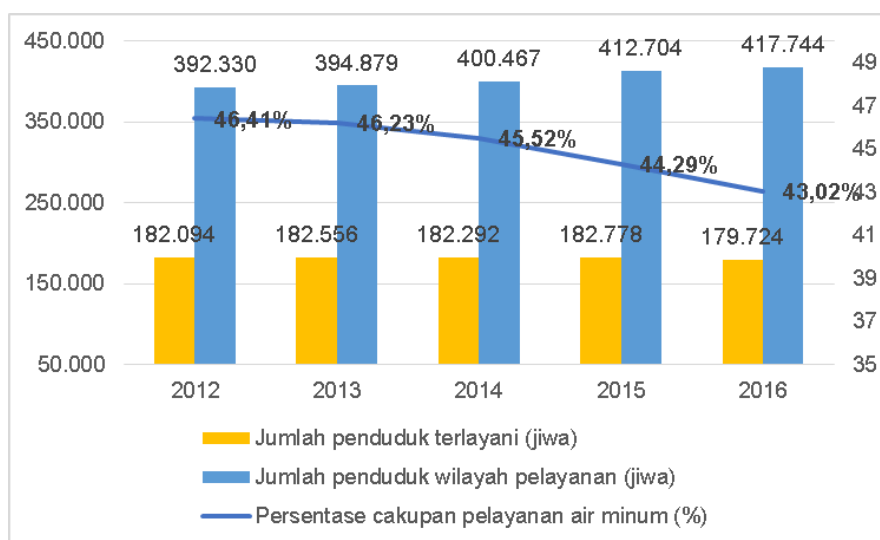
Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1	Jumlah penduduk terlayani	Jiwa	182.094	182.556	182.292	182.778	179.724	0,32
2	Jumlah penduduk wilayah pelayanan	Jiwa	392.330	394.879	400.467	412.704	417.744	1,59
3	<b>Persentase cakupan pelayanan air minum</b>	<b>Persen</b>	<b>46,41</b>	<b>46,23</b>	<b>45,52</b>	<b>44,29</b>	<b>43,02</b>	<b>-0,85</b>

Sumber: Kinerja PDAM, PDAM Tirtamarta, 2012-2016; Hasil Olahan, 2017

Data pada Tabel 2.3.2.E.2. menunjukkan penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum setiap tahunnya semakin bertambah. Hal ini disebabkan perbedaan antara peningkatan kapasitas pelayanan dengan kebutuhan pelayanan terpaut selisih yang cukup besar. Kondisi ini tentu berakibat pada semakin banyaknya penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum. Berdasarkan gambar ada tahun 2012, persentase cakupan pelayanan air minum mencapai 46,41%, dan jumlah ini terus mengalami penurunan, hingga pada tahun 2016 persentasenya menjadi 43,02%. Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum mencapai 0,85% per tahun. Artinya, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pengembangan pelayanan air minum.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang semestinya dapat terpenuhi demi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang sehat. Permasalahan pelayanan air minum di Kota Yogyakarta yang belum berjalan secara optimal perlu mendapat perhatian yang serius. Data pada tahun 2016 menurut Gambar 2.3.2.E.2. menunjukkan penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum sebesar 43,02%. Artinya, lebih dari separuh penduduk belum mendapat pelayanan air minum yang disediakan oleh pemerintah. Akses air minum penduduk pada umumnya diperoleh dari sumur baik milik pribadi maupun komunal, serta dari sumber lain yang ada di sekitar permukiman penduduk seperti mata air dan air sungai. Padahal air tanah di Kota Yogyakarta juga diketahui memiliki permasalahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas air tanah banyak yang tercemar oleh limbah, baik rumah tangga maupun dari industri. Selain itu volume air tanah juga semakin berkurang, yang dilihat dari muka air tanah yang terus mengalami penurunan. Permasalahan penyediaan air minum dengan demikian juga merupakan salah satu isu strategis lingkungan di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.2.E.2. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### 3. Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu

Air sungai merupakan salah satu sumber air yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyediakan air minum. Pelayanan jaringan air minum selama ini belum mampu melayani secara maksimal sedangkan kondisi kualitas dan kuantitas air tanah semakin menurun. Permasalahan penyediaan air minum di Kota Yogyakarta memerlukan penanganan dan inovasi dalam menemukan sumber air baku yang dapat menunjang pelayanan air minum secara optimal. Tiga sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta, yakni Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong memiliki potensi sebagai sumber air baku. Tentu saja perlu dilakukan berbagai macam upaya agar kualitas air sungai tetap baik dan memenuhi status mutu air.

Monitoring atau pengawasan status mutu air sungai harus dilakukan secara berkala. Pencemaran status mutu air didapatkan dari perbandingan antara jumlah kawasan permukiman atau industri dengan sumber mata air yang dipantau mutu airnya dibagi dengan jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air

dikalikan dengan bilangan 100. Data terkait status mutu air tidak tersedia karena memang belum pernah dilakukan kajian terkait hal tersebut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini dilaksanakan baik oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah maupun Badan Lingkungan Hidup. Indikator pencemaran status mutu air ini kemudian digantikan dengan indikator persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu. Data terkait kualitas air sungai ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait status mutu air di Kota Yogyakarta dan memberikan gambaran yang valid.

Tabel 2.3.2.E.3

Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Parameter yang memenuhi baku mutu		72	74	75	72	78
2.	Jumlah sampel parameter		100	100	135	135	136
3.	<b>Persentase kualitas air sungai sesuai baku mutu</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>55,5</b>	<b>55,33</b>	<b>57,34</b>

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2017

Indikator kualitas air sungai diukur dengan cara melakukan pengujian di laboratorium terhadap sampel air sungai dengan tiga parameter berikut, yakni BOD, COD, dan DO. Pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing sungai agar didapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tabel 2.3.2.E.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 72 sampel yang memenuhi parameter baku mutu dari sebanyak 100 sampel sehingga persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu sebesar 72%. Pada tahun 2013, tercatat sebanyak 74 sampel memenuhi parameter baku mutu dari jumlah sampel yang sama, sehingga persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu mencapai 74%. Pada tahun 2014 dan 2015, persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu turun cukup drastis ke angka sekitar 55%. Hal ini karena dari sampel yang berjumlah 135, hanya sebanyak 75 dan 72 sampel yang memenuhi baku mutu. Pada tahun 2016, data juga tidak terlalu berubah signifikan, dengan persentase kualitas air sungai sesuai baku mutu naik menjadi 57,24%. Artinya, terjadi penurunan persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu yang juga menggambarkan semakin meningkatnya pencemaran air sungai. Masih banyak limbah padat rumah tangga maupun limbah cair industri yang dibuang ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat mengingat sungai dapat menjadi sumber air baku yang potensial dikembangkan di masa depan mengingat kualitas dan kuantitas air tanah yang semakin menurun.

#### 4. Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya

Salah satu parameter aspek lingkungan adalah terkait jumlah Ruang Terbuka Hijau yang ada di bantaran sungai. Formula ini digunakan sebagai substitusi untuk menghitung cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/ 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini karena tidak tersedia data terkait dengan penghijauan di kawasan longsor dan sumber mata air, namun terdapat data tentang jumlah dan luasan taman atau RTH yang

berlokasi di bantaran sungai. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendekati kebutuhan analisis terkait kondisi lingkungan pada aspek ini.

Data dari Badan Lingkungan hidup menunjukkan adanya taman-taman yang juga memiliki fungsi sebagai RTH dan terletak di bantaran sungai, baik Sungai Code, Sungai Winongo, maupun Sungai Gajahwong. Taman-taman tersebut dibangun di bantaran sungai untuk menambah luasan RTH yang bisa diakses oleh penduduk Kota Yogyakarta sebagai sarana rekreasi, selain itu juga untuk melindungi daerah bantaran sungai dari berkembangnya bangunan liar. Keberadaan taman ini juga merupakan salah satu bentuk konservasi lingkungan khususnya bantaran sungai di Kota Yogyakarta yang di beberapa bagian memang rawan longsor, misalkan di sebagian bantaran Sungai Winongo.

Tabel 2.3.2.E.4. menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah taman mencapai 11 lokasi dengan luas sebesar 550 m<sup>2</sup>. Jumlah taman pada tahun berikutnya dari tahun 2013 bertambah satu unit menjadi 12 unit, dengan luas mencapai 640 m<sup>2</sup>. Jumlah tersebut cenderung stagnan hingga tahun 2016 dalam arti tidak ada penambahan lokasi maupun luas. Keterbatasan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak adanya perkembangan jumlah ataupun luas taman di bantaran sungai di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus melakukan perbaikan, dari segi penghijauan dengan berbagai usaha salah satunya dengan meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi-lokasi lainnya.

Tabel 2.3.2.E.4

Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan perkiraan Luasnya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah taman di bantaran sungai	Unit	11	12	12	12	12
2.	Perkiraan luas taman Pinggir Sungai	m <sup>2</sup>	550	640	640	640	640

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2017

Selain diketahui jumlah data taman yang dibangun di bantaran sungai, menurut Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa terdapat lima unit taman yang dibuat bekerjasama dengan FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri), yakni di Kricak (berupa jembatan dan ruang terbuka hijau); Pringgokusuman (berupa ruang terbuka hijau); Serangan, Notoprajan (berupa ruang terbuka hijau, pergola, flying fox, dan taman kuliner); Badran (berupa ruang terbuka hijau, kolam renang, gazebo), serta Dukuh (Gedongkiwo) yang berupa ruang terbuka hijau. Selain itu juga didapatkan data mengenai jumlah mataair yang terdapat di Kota Yogyakarta, antara lain tujuh buah mataair yang terdapat di Sungai Winongo (yang telah dikelola 3 buah mata air); 22 mataair di Sungai Gajah Wong (yang telah dikelola 4 buah mataair); dan beberapa mata air di Sungai Code.

## 5. Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha

Salah satu indikator lingkungan adalah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dihitung dengan formula jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal dikalikan dengan bilangan 100. Data dari Badan Lingkungan Hidup, yang dapat menunjukkan

kondisi tersebut adalah indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal di Kota Yogyakarta ini diganti menjadi Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha. Data terkait perusahaan yang diawasi tentang pengelolaan lingkungan disajikan pada Tabel 2.3.2.E.5. berikut.

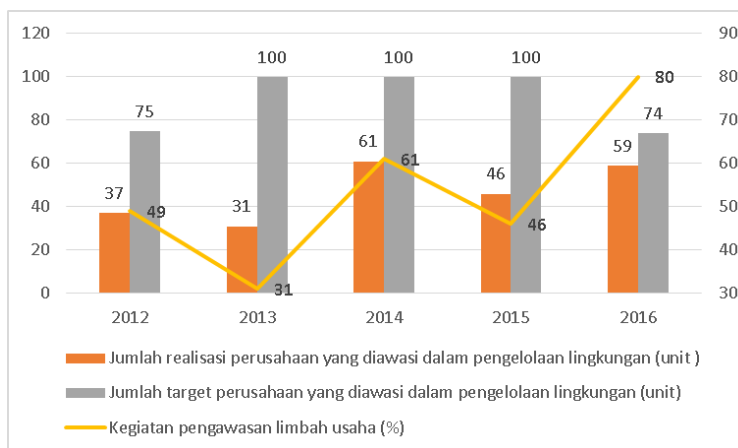
Tabel 2.3.2.E.5

Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah perusahaan yang berhasil diawasi dalam pengelolaan lingkungan	Unit	37	31	61	46	59	12,37
2.	Jumlah perusahaan yang menjadi target pengawasan pengelolaan lingkungan	Unit	75	100	100	100	74	-0,34
3.	<b>Kegiatan pengawasan limbah usaha</b>	<b>Persen</b>	<b>49,33</b>	<b>31,00</b>	<b>61,00</b>	<b>46,00</b>	<b>79,3</b>	<b>12,75</b>

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2016; Hasil Olahan, 2017

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kegiatan pengawasan limbah usaha adalah dengan perbandingan antara realisasi jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan dengan target jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan. Kegiatan pengawasan limbah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang fluktuatif (Tabel 2.3.2.E.5.). Pada tahun 2012, jumlah perusahaan yang diawasi mencapai 37 perusahaan sedangkan targetnya sebanyak 75 perusahaan. Pada tahun 2013-2015, jumlah perusahaan yang menjadi target menjadi 100 perusahaan, dengan realisasi pengawasannya yang cenderung fluktuatif, yakni 31 perusahaan pada tahun 2013, 61 perusahaan pada tahun 2014, dan 46 perusahaan di tahun 2015. Pada tahun 2016, terlihat adanya peningkatan kinerja, dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang diawasi menjadi 59 unit dari 74 yang menjadi target.



Gambar 2.3.2.E.3. Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Kinerja pengawasan limbah usaha di Kota Yogyakarta berdasarkan data pada Gambar 2.3.2.E.3. menunjukkan adanya fluktuasi. Namun, secara umum terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2016, yakni dari target kegiatan usaha sebanyak 74 unit, telah dilakukan pengawasan pada unit usaha sebanyak 59 unit. Kegiatan Pengawasan limbah usaha dalam kurun waktu lima tahun secara umum mengalami peningkatan, yakni sebesar 12,57%. Artinya, OPD terkait semakin giat mengawasi kegiatan usaha yang limbahnya berpotensi

mencemari lingkungan. Pengawasan terhadap pengolahan limbah pada unit usaha baik skala kecil, menengah maupun besar sangat penting dilakukan untuk dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik.

## 6. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R

Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju pada sistem *zero waste*. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.3.2.E.6

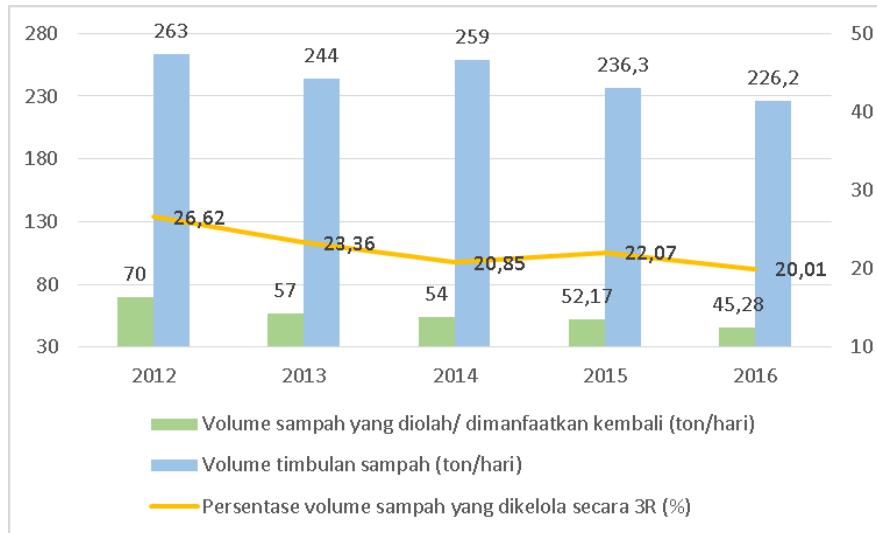
Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%. Tahun)
1	Volume sampah yang diolah/dimanfaatkan kembali	Ton/hari	70	57	54	52,17	45,28	-10,11
2	Volume timbulan sampah	Ton/hari	263	244	259	236,3	226,2	-3,53
3	<b>Persentase volume sampah yang dikelola secara 3R</b>	<b>Persen</b>	<b>26,62</b>	<b>23,36</b>	<b>20,85</b>	<b>22,078</b>	<b>20,01</b>	<b>-6,62</b>

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2016; Hasil Olahan, 2017

Tabel 2.3.2.E.6. menunjukkan data tentang pengelolaan sampah secara 3R di Kota Yogyakarta. Volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali didapatkan dari pengurangan volume timbulan sampah dengan volume sampah yang dibuang ke TPA serta volume sampah yang tidak terbuang dan tidak termanfaatkan kembali. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali cenderung menurun. Pada tahun 2012 volume sampah yang diolah mencapai 70 ton/ hari, namun kemudian berangsur menurun pada tahun berikutnya menjadi 57 ton/ hari pada tahun 2013, 54 ton/hari pada tahun 2014, menjadi 52,17 ton/hari pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 kembali menurun menjadi hanya 45,28 ton/hari. Terjadinya pengurangan volume sampah yang diolah rata-rata sebesar 10,11% per tahun. Kondisi ini berbeda dengan tren volume timbulan sampah yang cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni berturut-turut adalah 263 ton/hari, 244 ton/hari, 259 ton/hari, 236 ton/hari dan menjadi 226,2 ton/hari. Rata-rata pengurangan perkiraan timbulan sampah ini adalah sebesar 3,53%.

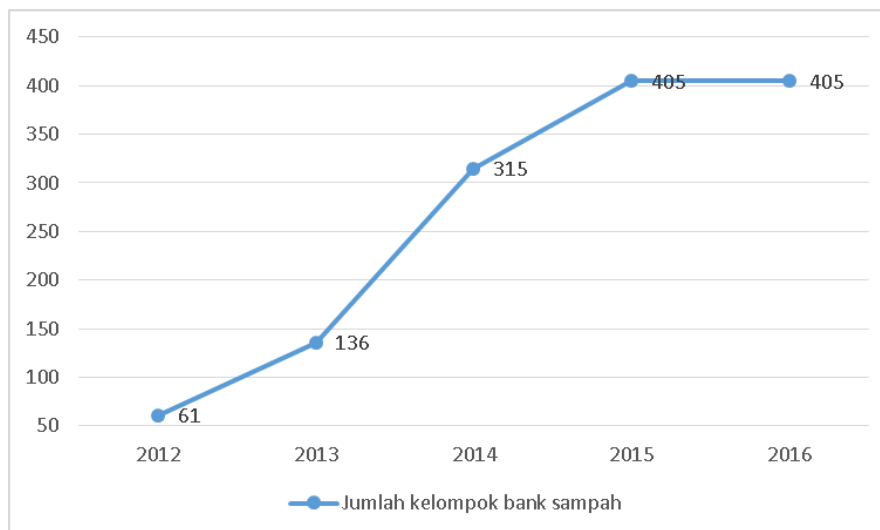




Gambar 2.3.2.E.4. Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menggalakkan gerakan pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R. Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang dapat didaur ulang sehingga diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah gerakan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam upaya pengelolaan sampah dengan unit setiap kampung atau RW. Berdasarkan data pada Gambar 2.3.2. E.5. yang diperoleh dari badan lingkungan hidup menunjukkan bahwa jumlah bank sampah di Kota Yogyakarta meningkat secara signifikan berdasarkan data dari tahun 2012 hingga 2015. Tercatat pada tahun 2012 jumlah kelompok bank sampah sebanyak 61 kelompok dan pada tahun berikutnya bertambah lebih dari dua kali lipatnya menjadi 136 kelompok, dan pada tahun 2014 juga bertambah secara signifikan menjadi 315 kelompok. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlahnya sama, yakni menjadi 405 kelompok bank sampah yang aktif mengelola sampah. Selain itu, pengelolaan TPS akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal. Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Selain itu pengelolaan sampah secara kelompok (bank sampah) juga mulai dimanfaatkan sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.



Gambar 2.3.2.E.5. Jumlah Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta , 2016; Hasil Olahan, 2017

## 7. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dihitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah kota dengan jumlah kasus lingkungan yang ada dikalikan dengan bilangan 100. Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah kasus lingkungan yang ada semuanya dapat diselesaikan, dengan kata lain penegakan hukum lingkungan di Kota Yogyakarta dapat seluruhnya terselesaikan (100%) seperti yang disajikan pada Tabel 2.3.2.E.7.. Jumlah kasus lingkungan yang terjadi di Kota Yogyakarta, yakni sebanyak 15 kasus pada tahun 2012 menurun menjadi empat (4) kasus pada tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 11 pada tahun 2016.

Tabel 2.3.2.E.7

Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	Kasus	15	3	6	4	11
2.	Jumlah kasus lingkungan yang ada	Kasus	15	3	6	4	11
3.	<b>Penegakan hukum lingkungan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2016; Hasil Olahan, 2017

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan, agar masyarakat lebih peduli pada lingkungan di sekitarnya. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melakukan laporan atau melakukan pengaduan apabila terjadi pencemaran lingkungan di wilayahnya. Selain itu juga masyarakat diharapkan senantiasa melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait apabila ada dugaan pencemaran, agar penanganan pencemaran dapat diselesaikan secepat mungkin.

## F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

### 1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kota Yogyakarta. Cara untuk mencari rasio ini menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah dengan membagi jumlah penduduk usia >17 tahun yang memiliki KTP dengan jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah (wajib KTP). Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 1,00.

Tabel 2.3.2.F.1

Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun yang Ber-KTP	Jiwa	309.060	294.863	301.035	298.204	298.222
2	Jumlah Penduduk Usia >17 atau Telah Menikah (Wajib KTP)	Jiwa	321.595	301.078	307.279	299.191	306.984
3	<b>Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk</b>		<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,997</b>	<b>0,970</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

### 2. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Cara menghitung kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Berikut merupakan data kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

Tabel 2.3.2.F.2

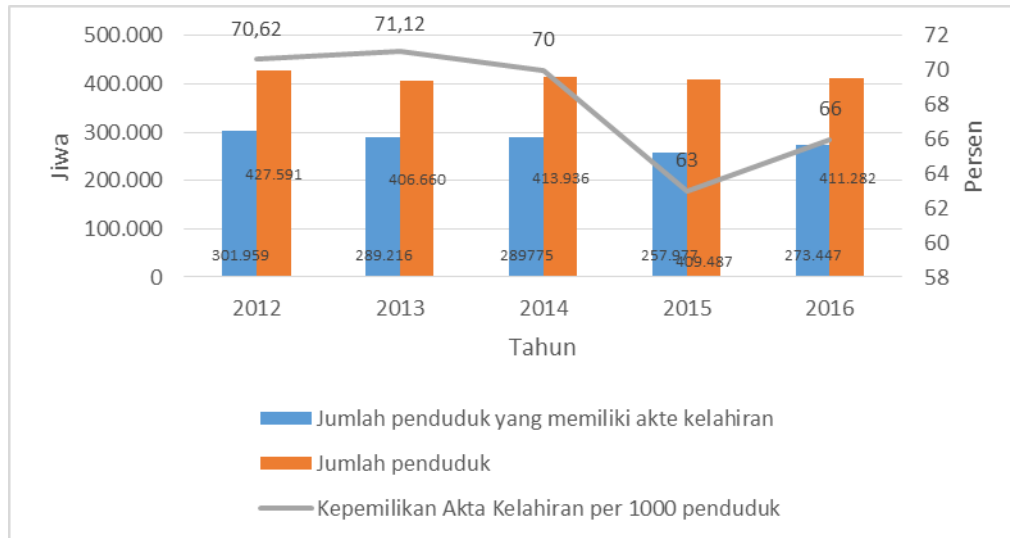
Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran	Jiwa	301.959	289.216	289.775	257.977	273.447	-2,45
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	Persen	70,62	71,12	70,00	63,00	66,00	-1,53

Sumber:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.2.F.2, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012 kepemilikan akta kelahiran sebesar 70,62 persen, kemudian mengalami peningkatan dan penurunan di tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 66,00 persen pada tahun 2016.



Gambar 2.3.2.F.1 Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui bahwa seluruh pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakte nikah. Data rasio pasangan berakte nikah di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.3.2.F.3.

Tabel 2.3.2.F.3

Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah	Jiwa	196.364	186.793	189.448	189.042	189.806	-7,74
2.	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	Jiwa	196.364	186.793	189.448	189.042	189.806	-10,75
3.	<b>Rasio Pasangan Berakte Nikah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,27</b>

Sumber:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

#### 4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Yogyakarta memiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah tersedia. Database kependudukan di Kota Yogyakarta dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kota Yogyakarta dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

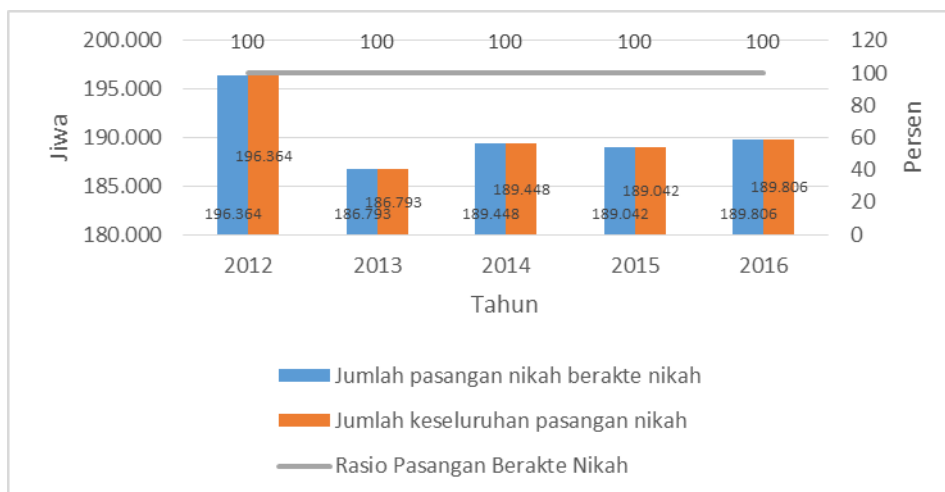
Tabel 2.3.2.F. 4

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017



Gambar 2.3.2.F.2 Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2009. Data penerapan KTP Nasional Berbasis NIK dari tahun 2012-2016 di Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3.2.F.5

Tabel 2.3.2.F.5

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017

## G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

### 1. Jumlah LPMK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Mengingat lembaga ini merupakan inisiatif masyarakat, maka bersifat mengakar secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng, tidak jauh berbeda dengan LSM. Untuk itulah maka lembaga ini juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

dihadapi oleh masyarakat lokal. Perbedaan dengan LSM adalah lembaga ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerak pembangunan secara struktural dengan organisasi kelurahan. Dengan demikian LPM menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan.

Indikator jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. Tetapi data yang diperoleh hanya menunjukkan jumlah LPMK di Kota Yogyakarta. LPMK pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan. Data Jumlah LPMK di Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.3.2.G.1 berikut ini.

Tabel 2.3.2.G.1

Jumlah LPMK di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LPMK	Kelompok	45	45	45	45	45

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan Tabel 2.3.2.G.1, seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta memiliki LPMK. Salah satu fungsi LPMK adalah mengelola dana hibah yang diberikan oleh Pemda seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk memajukan kelurahan. LPMK hendaknya menjadi mitra yang efektif dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat menjadi kontributor yang efektif. Untuk itulah pemerintah yang mampu memfungsikan LPMK ini akan mencapai tujuan pembangunan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Koordinasi yang intensif perlu dilakukan di tingkat kelurahan, agar optimalisasi peran LPMK menjadi lebih nyata kiprahnya dalam pembangunan.

## 2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, PKK memiliki 10 program pokok PKK. Dalam gerakannya PKK berorientasi kepada 10 program pokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitas dan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide, karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif. Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakan warga dalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan di tingkat kampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadah koordinasi strategis yang menyambungkan program-program Kota Yogyakarta hingga menyentuh ke masyarakat terbawah. Data rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.3.2.G.2.

Tabel 2.3.2.G.2

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)	Kelompok	5.228	5.228	5.146	5.146	5.173	-0,26
2.	Jumlah PKK	Kelompok	3.147	3.147	3.143	3.204	3.208	0,48
3.	<b>Rata-rata binaan PKK</b>		<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,64</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>-0,76</b>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Data kelompok binaan PKK yang tersedia adalah data jumlah kelompok Dasawisma yang notabene merupakan kelompok binaan PKK. Tabel 2.3.2.G.2 menunjukkan bahwa jumlah PKK di Kota Yogyakarta cukup banyak yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,48 persen per tahun. Sementara untuk data kelompok binaan PKK mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26 persen per tahun. Sehingga hal ini memengaruhi jumlah rata-rata kelompok binaan yang juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,76 persen per tahun. Penurunan jumlah tiap tahunnya menunjukkan ada beberapa dasawisma ataupun PKK yang bergabung menyesuaikan dengan RT maupun RW di lingkungannya.

Jumlah organisasi PKK didasarkan pada keberadaan kampung, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kampung dan kelurahan. Di bawah organisasi PKK ada organisasi kecil yang disebut dasa wisma. Dasa wisma yaitu kelompok yang terdiri atas sepuluh wisma (Kepala Keluarga), dengan mengambil peran ibu sebagai anggota dasa wisma. Dasa Wisma bertanggung jawab kepada PKK terbawah, sedangkan PKK tersebut dibina secara terstruktur terkait dengan integral kepada PKK di atasnya.

### 3. Jumlah LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. LSM biasanya melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat. Dilihat dari bentuknya, lembaga ini merupakan inisiatif dan bentukan dari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng. Untuk itulah maka lembaga ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang. Tabel 2.3.2.G.3 menjadikan informasi jumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016.

Tabel 2.3.2.G.3

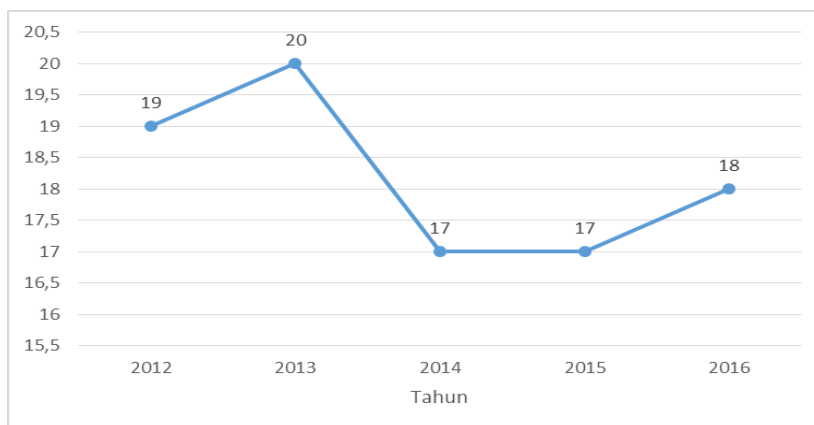
Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah LSM yang Aktif	unit	19	20	17	17	18	-1,34



Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Tabel 2.3.2.G.3 menunjukkan bahwa jumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 mengalami penurunan sebesar 1,34 persen per tahun. Penurunan terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015. Meskipun angka persentase penurunan relatif kecil akan tetapi perlu diperhatikan karena kontribusi dalam pembangunan sekecil apapun itu bermakna. Untuk itulah setiap penurunan LSM dalam masyarakat tetap diperhatikan sebagai sebuah fenomena penting yang segera perlu ditindaklanjuti.



Gambar 2.3.2.G.1 Grafik Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Gambar 2.3.2.G.1 menunjukkan penurunan jumlah LSM di Kota Yogyakarta. Belum diketahui alasan penurunan jumlah LSM ini, kemungkinan penurunan jumlah ini dikarenakan LSM bersangkutan belum melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar ke Pemkot Yogyakarta. Bentuk tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemkot adalah dengan bersikap pro aktif untuk mendata LSM secara periodik dengan mengirimkan formulir atau menyediakan pelayanan SIM secara on line. Dengan hanya bersikap menunggu adalah kurang bijak. LSM yang merupakan kelembagaan yang melekat dengan masyarakat harus dipelihara. Upaya tindak lanjut lainnya yaitu memonitor aktivitas LSM dan mendata kegiatan serta prestasi yang dicapai.

LSM sebagai organisasi yang memiliki kekuatan di akar rumput, merupakan wadah efektif untuk menggerakkan masyarakat. Jika Pemkot memberikan perhatian yang lebih baik tentunya mobilisasi energi pembangunan, seperti sumberdaya manusia, bantuan moril dan materiil akan menjadi sangat besar. Dengan memperkuat LSM ini maka akan semakin banyak kampung dan kelurahan yang lebih mandiri dalam banyak aspek.

#### 4. LPMK Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengoptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPMK untuk mendapatkan LPMK berprestasi merupakan kebijakan yang sangat startegis untuk meningktakan gerak keaktifan lemabaga-lembaga tersebut.

LPMK berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (Saat ini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Yogyakarta untuk LPMK yang memiliki prestasi baik. KPMP memiliki sepuluh kriteria dalam menentukan LPMK berprestasi, di antaranya:

- a. Ketaatan antara realisasi dengan proposal kegiatan,
- b. Ketaatan volume pekerjaan dengan proposal,
- c. Besarnya swadaya masyarakat,
- d. Perencanaan sesuai Musrenbang,
- e. Ketepatan waktu realisasi pelaksanaan,
- f. Fokus pelaksanaan,
- g. Realisasi pelaksanaan,
- h. Ketertiban administrasi,
- i. Persentase pemegang KMS, dan
- j. Persentase ketaatan membayar pajak PBB.

Tabel 2.3.2.G.4

Jumlah LPMK Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah LPMK Berprestasi	Kelompok	6	NA	6	6	NA
2.	Jumlah LPMK	Kelompok	45	45	45	45	NA
3.	<b>Persentase LPMK Berprestasi</b>	<b>persen</b>	<b>13</b>	<b>NA</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>NA</b>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Tabel 2.3.2.G.4 menunjukkan bahwa di tahun 2012, 2014 dan 2015 terdapat enam LPMK yang berprestasi. Sementara untuk tahun 2016 tidak ada data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak terkait LPMK berprestasi. Pemberian apresiasi LPMK berprestasi ini diharapkan dapat memacu semangat dan motivasi seluruh LPMK di Kota Yogyakarta untuk semakin unggul dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Namun, LPMK berprestasi ini tidak setiap tahun diselenggarakan sehingga terdapat kekosongan data di tahun 2013. Perlu dijaga rutinitas pemilihan LPMK berprestasi sehingga setiap tahun diadakan. Antara pengorbanan alokasi anggaran Pemkot untuk pemilihan LPMK berprestasi adalah tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat merangsang seluruh LPMK untuk bergerak, melakukan inovasi-inovasi di tingkat lokal. Setidaknya LPMK berhasil mempertahankan keaktifan peran serta dalam pembangunan, menjaga stabilitas kondisi di tingkat lokal itu sudah merupakan kontribusi yang sangat besar kepada pemerintah. Apalagi dengan seleksi LPMK berprestasi akan mampu mendongkrak semangat peningkatan kualitas kegiatan yang dilakukan secara rutin maupun periodik.

## 5. PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga

merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skop yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga. Data jumlah PKK aktif di Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.3.2.G.5.

Tabel 2.3.2.G.5

Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta	Kelompok	1	1	1	1	1	0,00
2.	Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta	Kelompok	14	14	14	14	14	0,00
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta	Kelompok	45	45	45	45	45	0,00
4.	Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta	Kelompok	625	625	627	615	616	-0,36
5.	Jumlah kel. PKK RT	Kelompok	2.507	2.507	2.501	2.529	2.532	0,25
6.	Jumlah kel. Dasawisma	Kelompok	5.228	5.228	5.146	5.146	5.173	-0,26

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Pada Tabel 2.3.2.G.5 di atas tampak bahwa organisasi PKK secara terstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitu dasawisma, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKK Kota Yogyakarta. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

## 6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, bahwa kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya

tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Data presentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 2.3.2.G.6.

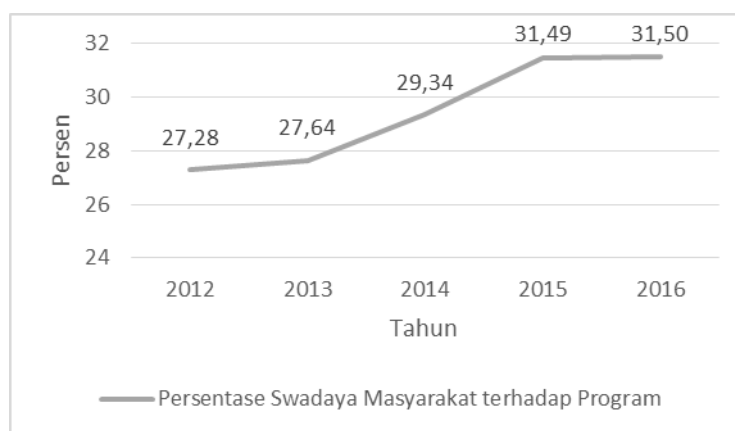
Tabel 2.3.2.G.6

Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat  
di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rp	1.046.371.829	1.060.000.694	1.125.343.579	1.207.896.050	1.308.416.080	5,75
2.	Total Program	Rp	3.835.000.000	3.835.000.000	3.835.000.000	3.835.000.000	4.218.500.000	2,41
3.	<b>Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program</b>	<b>Persen</b>	<b>27,28</b>	<b>27,64</b>	<b>29,34</b>	<b>31,49</b>	<b>31,50</b>	<b>3,66</b>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan dihitung dengan membandingkan jumlah swadaya masyarakat terhadap total stimulan yang diberikan kepada 45 LPMK di Kota Yogyakarta yang kemudian dikali 100 persen. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 jumlah swadaya masyarakat mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5,75 persen per tahun. Dana tersebut merupakan dana swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun oleh LPMK di 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta. Sementara total stimulan LPMK di 45 Kelurahan merupakan dana hibah yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dana penunjang program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Pertumbuhan persentase swadaya masyarakat terhadap program dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 dapat terlihat dalam Gambar 2.3.2.G.2.



Gambar 2.3.2.G.2 Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Grafik pada Gambar 2.3.2.G.2 menunjukkan bahwa sumbangan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan mengalami tren meningkat. Jika dirata-rata, pertumbuhan rata rata swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan mencapai 3,66 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut bukan merupakan sumbangan yang kecil. Mengingat mobilisasi dana, tenaga, pikiran yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk kekuatan bottom up maka perlu mendapatkan apresiasi. Jika pemerintah tanggap terhadap segala bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, maka semangat untuk mandiri akan semakin besar. Untuk itulah diperlukan perhatian dan kemampuan untuk memonitor, membina serta memberikan perhatian terhadap kelembagaan sosial menjadi sangat penting dan menjadi pintu strategis untuk meningkatkan inspirasi pembangunan di kalangan bawah.

## 7. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mencapai 100 persen. Angka tersebut dihasilkan dari perbandingan jumlah program pemberdayaan masyarakat dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk program yang bersangkutan pada tahun berkenaan. Tabel 2.3.2.G.7 menyajikan data pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 2.3.2.G.7

Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat		2	2	2	2	NA
2.	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		2	2	2	2	NA
3.	<b>Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NA</b>

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Program yang ada sesuai dengan program yang ada di KPMP dan kecamatan. Program pertama adalah program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat yang diampu oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang sifatnya berupa hibah dengan monitoring dan evaluasi tahunan. Sedangkan program kedua adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi tahunan juga dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Namun berdasarkan informasi dari OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat data untuk indikator ini pada tahun 2016.

Bentuk efektivitas penggunaan dana pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat memang sebaiknya diikuti dengan program pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketika dana diberikan harus disertai dengan proses pendampingan yang memberikan perhatian dan sikap proaktif dengan

rencana-rencana pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan jangan hanya dinilai dari keterserapan dana, namun hendaknya diikuti dengan monitoring dan konsultasi. Para penerima dana hibah dikumpulkan secara berkala dan diminta untuk memberikan laporan pencapaian hasil, mengkonsultasi kesulitan dan hambatan. Dengan demikian pemakaian anggaran pemberdayaan dapat tepat sasaran.

## H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

### 1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ketiga. Dari definisi tersebut didapat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Berikut merupakan data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.2.H.1

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Anak (Penduduk berusia 0-17 tahun)	Anak	118.531	11.1797	112.901	110.296	110.296	-1,75
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	129.439	124.744	128.843	129.092	131.092	0,35
3.	<b>Rata-rata jumlah anak per jiwa dalam keluarga</b>	<b>Anak</b>	<b>1,09</b>	<b>1,12</b>	<b>1,14</b>	<b>1,17</b>	<b>1,19</b>	<b>2,22</b>

Sumber:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Dalam hal ini, digunakan data jumlah penduduk dengan usia 0-17 tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Dari pendataan dari tahun 2012 – 2016 menunjukkan kecenderungan peningkatan rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil perhitungan data di atas pula, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 – 2016 cenderung menunjukkan bahwa dalam satu keluarga masih memiliki jumlah anak yang sama, yaitu satu anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi (tidak melebihi) target program keluarga berencana dengan jumlah anak tidak lebih dari dua orang.

## 2. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Tabel 2.3.2.H.2 merupakan data cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.2.H.2

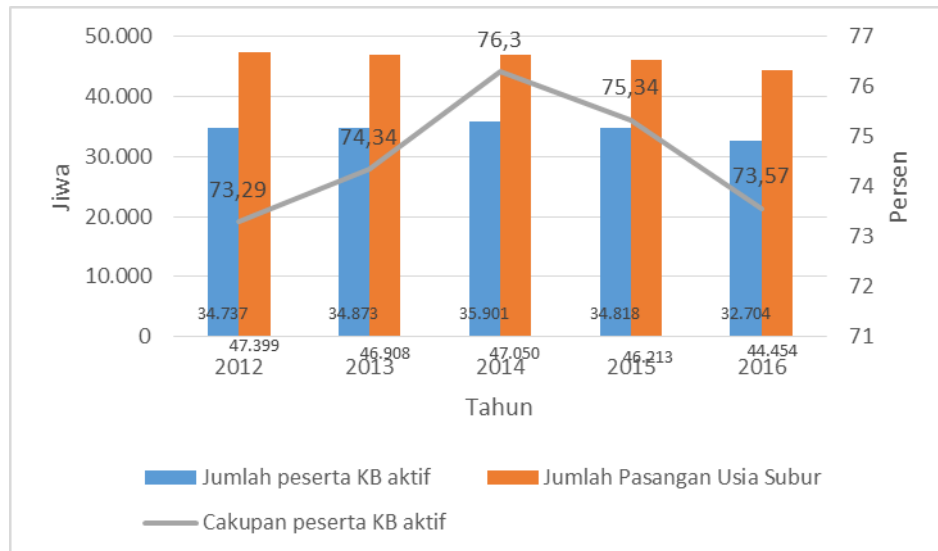
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	34.737	34.873	35.901	34.818	44.454	6,7
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jiwa	47.399	46.908	47.050	46.213	32.704	-7,94
<b>3</b>	<b>Cakupan peserta KB aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>73,29</b>	<b>74,34</b>	<b>76,3</b>	<b>75,34</b>	<b>73,57</b>	<b>0,12</b>

Sumber :

1. Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, besaran cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung menunjukkan peningkatan, namun sayangnya persentase tersebut turun di tahun 2015 dan 2016 walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2012, cakupan peserta KB aktif mencapai 73,29 persen. Kemudian mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya sehingga mencapai 73,57 persen pada tahun 2016. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana. Di masa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah penduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.



Gambar 2.3.2.H.1. Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

### 3. Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pengertian Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh kebutuhan dasar minimal yaitu dalam hal spiritual, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam hal spiritual, pangan, papan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Indikator ini tidak digunakan untuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsi keluarga menurut BKKBN, diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan.

Pada tahun 2015, tidak lagi ada penghitungan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Hal ini disebabkan penggolongan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 versi Kantor KB (atau BKKBN) tidak mengacu pada indikator ekonomi, sehingga dianggap kurang relevan lagi sebagai indikator untuk mengukur 8 fungsi keluarga. Walaupun pada saat pendataan parameter parameter yang di data masih terdapat pada lembar pendataan, namun tidak lagi digolongkan sebagai indikator keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1. Data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 ditunjukkan pada Tabel 2.3.2.H.3



Tabel 2.3.2.H.3

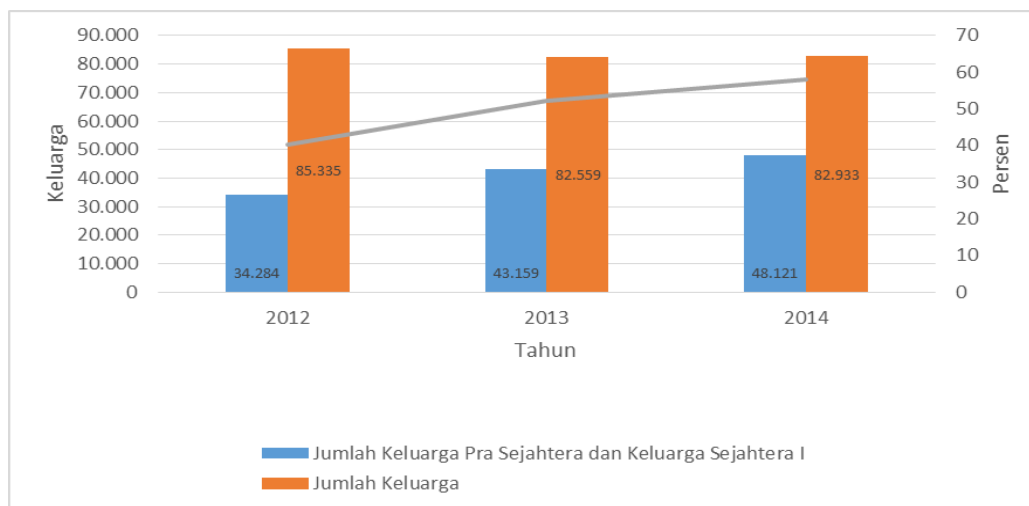
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Keluarga	34.284	43.159	48.121	NA	NA	18,69
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	85.335	82.559	82.933	NA	NA	-1,4
3.	<b>Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I</b>	<b>Persen</b>	<b>40,18</b>	<b>52,28</b>	<b>58,02</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>20,54</b>

Sumber :

1. Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, terdapat 40,18 persen keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Jumlah itu terus meningkat hingga mencapai 58,02 persen pada tahun 2014, atau terdapat 48.121 keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.



Gambar 2.3.2.H.2. Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta

Tahun 2012 – 2014

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## I. Perhubungan

Sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010, terdapat sembilan indikator pada urusan perhubungan, diantaranya adalah jumlah arus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah terminal bis, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu. Dalam urusan perhubungan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, misalnya adalah indikator

angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota yang menggantikan indikator jumlah arus penumpang umum.

#### **1. Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kota**

Indikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota merupakan indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan. Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota dengan jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 seluruh jaringan jalan kota di Kota Yogyakarta sudah terlewati angkutan umum. Sehingga persentase jaringan jalan kota terlewati angkutan umum sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 sudah mencapai 100%. Keberhasilan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan yang diukur menggunakan panjang jalan. Adapun panjang jaringan jalan di kota Yogyakarta adalah sebanyak 239.087,1 meter sedangkan jaringan jalan yang terlayani adalah 64.155 meter untuk kendaraan umum trayek dan 174.931,6 meter untuk jalur non trayek.

Angkutan umum yang melintasi Kota Yogyakarta diantaranya adalah Bis jalur 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Namun kini hanya tersisa beberapa jalur yang aktif beroperasi diantaranya adalah bis jalur 2 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Menteri Supeno – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan Sisingamangaraja – Ring Road Selatan – Jalan Parangtritis – Jalan Brigjend Katamso – Jalan Suryotomo – Abu Bakar Ali – Jalan Suroto – Jalan Cik Di Tiro – Lingkar UGM – dan kembali ke rute yang sama); bis jalur 4 (dengan rute Terminal Giwangan – Ring Road Selatan – Ngangkruk – Gedong Kuning – Jalan Kusumanegara – Jalan Suryotomo – Jalan Suroto – Lingkar UGM – Jalan C. Simanjuntak – Jalan Jendral Sudirman – Jalan P. Mangkubumi – Jalan Malioboro – Jalan P. Senopati – Jalan Kusumanegara – Gedong Kuning – Ring Road Selatan – Terminal Giwangan); bis jalur 7 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Gambiran – Jalan Veteran – Gedong Kuning – Janti – Jalan Adisucipto – Jalan Affandi – Ring Road Utara – Lingkar UGM); bis jalur 12 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Pandean – Jalan Glagah Sari – Jalan Kusumanegara – Sultan Agung – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Cokroaminoto – Jalan Tentara Pelajar – Borobudur Plaza – Jalan Wolter Monginsidi – Lingkar UGM – Jalan Wolter Monginsidi – Borobudur Plaza – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Cokroaminoto – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Sultan Agung – Jalan Suryopranoto – Jalan Mangunsarkoro – Jalan Kusumanegara – Jalan Glagah Sari – Jalan Veteran – Jalan Pramuka – Terminal Giwangan); serta bis jalur 15 (dengan rute Terminal Giwangan – Jalan Pramuka – Jalan Sisingamangaraja – Jalan Menukan – Jalan Mangkuyudan – Gading – Pojok Beteng Timur – Jalan Brigjend Katamso – Jalan Ibu Ruswo – Jalan KHA. Dahlan – Jalan Wates – Pasar Gamping – Sidoarum – Jalan Godean – Pingit – Jalan Wolter Monginsidi – Jetis – Lingkar UGM). Trayek bis perkotaan lambat laun semakin menurun karena akan digantikan dengan transportasi *massal* berbasis *service* melalui bis Trans Jogja.

Disamping bis perkotaan, terdapat pula bis Trans Jogja yang melintasi Kota Yogyakarta, diantaranya adalah Trayek 1A (dengan rute Terminal Prambanan – Bandara Adisucipto – Stasiun Tugu – Malioboro – JEC); Trayek 1B (dengan rute Terminal Prambanan – Bandara Adisucipto – JEC – Kantor Pos Besar – Pingit – UGM); Trayek 2A (dengan rute Terminal Jombor – Malioboro – Basen – Kridosono – UGM – Terminal Condong Catur); Trayek 2B (dengan rute Terminal Jombor – Terminal Condong Catur – UGM – Kridosono – Basen – Kantor Pos Besar – Wirobrajan – Pingit); Trayek 3A (dengan rute Terminal Giwangan – Kotagede – Bandara Adisucipto – Ring Road Utara – MM UGM – Pingit – Malioboro – Jukteng Kulon); Trayek 3B (dengan rute Terminal Giwangan – Jukteng Kulon – Pingit – MM UGM – Ring Road Utara – Bandara Adisucipto – Kotagede); Trayek 4A (dengan rute Terminal Giwangan – Taman Siswa – Pakualaman – Lempuyangan – Kridosono); serta Trayek 4B (dengan rute Terminal Giwangan – XT Square – SGM – Balaikota – UIN – Kridosono – Balai Yasa – UIN). Sampai tahun 2017 terdapat penambahan trayek baru Jalur 5A, 5B, 6A, 6B serta Jalur 7,8,9,10 dan 11 yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Rasio Ijin Trayek

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase izin trayek adalah jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menjelaskan bahwa izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Trayek diartikan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Indikator persentase ijin trayek untuk lingkup Kota Yogyakarta, tidak dapat diisikan datanya. Hal ini dikarenakan kewenangan ijin trayek dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi izin trayek yang melewati wilayah Kota Yogyakarta saja. Disamping itu, angkutan darat lainnya, seperti travel dan taksi juga merupakan kewenangan provinsi.

Angkutan kota yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta hanya “Si Thole” yang merupakan angkutan wisata. “Si Thole” mulai dioperasikan pada bulan November tahun 2014. Angkutan wisata ini memiliki tiga rute utama, yakni (1) dari Taman Parkir Ngabean menuju Keraton Yogyakarta, dimana rute ini melewati Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Keraton Yogyakarta, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (2) dari Taman Parkir Ngabean menuju Tamansari, dimana rute ini melintasi jalan Rotowijayan, Ngasem, Sompilan, Tamansari, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (3) dari Taman Parkir Ngabean menuju Taman Pintar, dimana rute ini melintasi Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Jalan Ibu Ruswo, Jalan Brigjen Katamso, Taman Parkir Senopati, Titik Nol Kilometer, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean.

### 3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

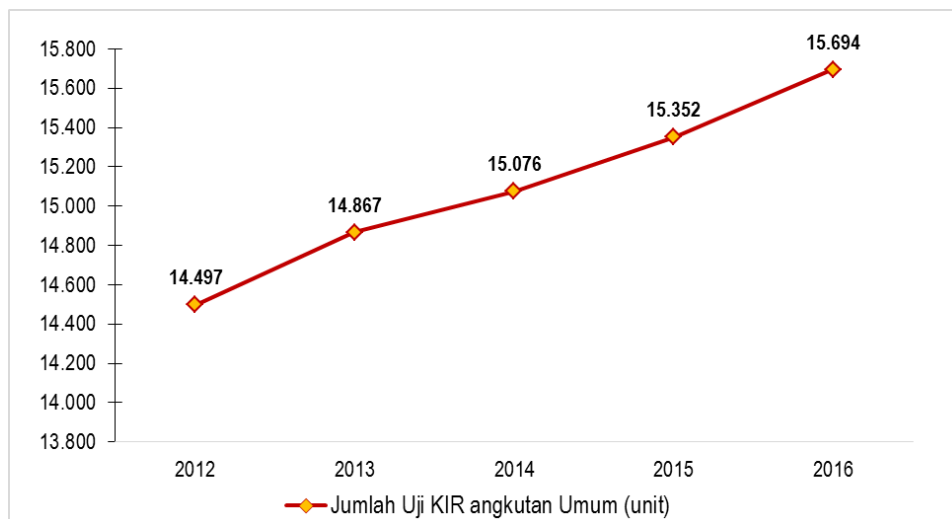
Tabel 2.3.2.1.1

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Uji KIR angkutan Umum	Unit	14.497	14.867	15.076	15.352	15.694	2,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 yang ditunjukkan pada Tabel 2.3.2.1.1 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yakni sebanyak 14.497 unit angkutan umum pada tahun 2012 meningkat menjadi 15.694 unit angkutan umum pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,00 persen/per tahun.



Gambar 2.3.2.1.1 Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang fluktuatif diduga karena dalam satu tahun, uji KIR diadakan sebanyak dua kali, dan tidak setiap kendaraan melakukan uji KIR sebanyak dua kali. Selain itu juga

pengujian KIR tidak terikat batasan administratif, sehingga angkutan maupun kendaraan yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dapat melakukan pengujian KIR di Kota Yogyakarta atau dikenal dengan istilah “numpang uji”.

#### 4. Kepemilikan KIR angkutan umum

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomilisi di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.

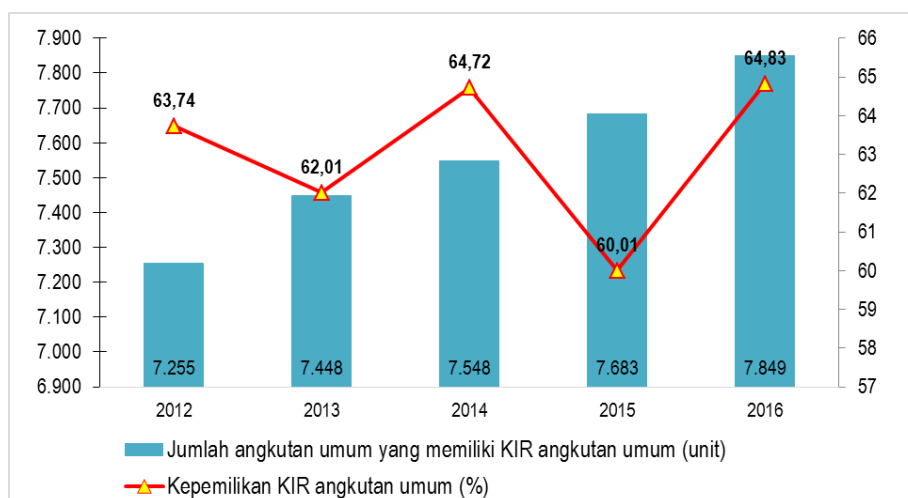
Tabel 2.3.2.1.2

Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit	7.249	7.434	7.548	7.676	7.849	1,99
2.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	11.382	12.011	11.663	12.803	12.106	1,55
3.	<b>Kepemilikan KIR angkutan umum</b>	<b>Persen</b>	<b>63,68</b>	<b>61,89</b>	<b>64,7</b>	<b>59,95</b>	<b>64,83</b>	<b>1,49</b>

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2016

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikator kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 1,99 persen per tahun.



Gambar 2.3.2.1.2. Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti uji KIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan ada angkutan umum yang mengikuti uji KIR diluar wilayah Kota Yogyakarta. Faktor pembandingan pada indikator kepemilikan KIR angkutan umum, yakni jumlah angkutan umum pada tahun n juga mengakibatkan rendahnya capaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap indikator ini. Menurut data yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di tahun 2016 jumlah populasi kendaraan wajib uji di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 9.509 kendaraan, jumlah ini cukup jauh tentunya apabila dibandingkan dengan jumlah data angkutan umum pada tahun n yang dijadikan pembandingan dalam indikator ini.

#### 5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Yogyakarta adalah 45 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 5 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 15-20 menit, penyetakan plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit untuk masing-masing kendaraan. Tabel 2.3.2.1.3 menunjukkan lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 hingga 2015.

Tabel 2.3.2.1.3

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	45	45	45	45

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2017

#### 6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Data mengenai indikator biaya pengujian kelayakan angkutan umum didapatkan dari Perda Nomor 17 Tahun 2009 yang dirinci sesuai dengan jenis kendaraan bermotornya ditampilkan dalam Tabel 2.3.2.1.4.

Tabel 2.3.2.1.4

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No.	Macam Pelayanan	Rincian Tarif Retribusi	Jumlah Tarif Retribusi
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg, dengan rincian sebagai berikut :		
	1) Biaya uji	Rp 30.000,-	
	2) Penggantian buku uji	Rp 10.000,-	
	3) Plat uji, kawat, segel	Rp 10.000,-	
	4) Tanda samping/ stiker	Rp 15.000,-	
			<b>Rp 65.000,-</b>

No.	Macam Pelayanan	Rincian Tarif Retribusi	Jumlah Tarif Retribusi
	b. Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg, dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya uji</li> <li>2) Penggantian buku uji</li> <li>3) Plat uji, kawat, segel</li> <li>4) Tanda samping/ stiker</li> </ol>	Rp 40.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,-	<b>Rp 75.000,-</b>
	c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg, dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya uji</li> <li>2) Penggantian buku uji</li> <li>3) Plat uji, kawat, segel</li> <li>4) Tanda samping/ stiker</li> </ol>	Rp 50.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 15.000,-	<b>Rp 85.000,-</b>
2.	Kendaraan uji lengkap <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya uji</li> <li>b. Penggantian buku uji</li> </ol>	Rp 30.000 Rp 10.000	<b>Rp 40.000,-</b>
3.	Pengujian khusus emisi gas buang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mobil               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya uji</li> <li>2) Stiker tanda lulus uji emisi</li> </ol> </li> <li>b. Sepeda motor               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya uji</li> <li>2) Stiker tanda lulus uji emisi</li> </ol> </li> </ol>	Rp 11.000,- Rp 4.000,-  Rp 6.000,- Rp 4.000,-	<b>Rp 15.000,-</b>  <b>Rp 10.000,-</b>
4.	Registrasi kendaraan bermotor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Baru dan mutasi masuk</li> <li>b. Mutasi keluar</li> <li>c. Modifikasi/ perubahan bentuk atau tipe</li> </ol>		<b>Rp 25.000,-</b> <b>Rp 50.000,-</b> <b>Rp 25.000,-</b>
5.	Numpang uji keluar/ masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya		<b>Sebesar biaya uji berkala</b>
6.	Penggantian tanda lulus uji : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku uji rusak</li> <li>b. Buku uji hilang</li> <li>c. Plat, kawat, dan segel rusak</li> <li>d. Plat, kawat, dan segel hilang</li> <li>e. Tanda samping rusak</li> </ol>		<b>Rp 20.000,-</b> <b>Rp 50.000,-</b> <b>Rp 10.000,-</b> <b>Rp 10.000,-</b> <b>Rp 15.000,-</b>
7.	Pengecatan identitas/ lokasi		<b>Rp 10.000,-</b>

Sumber : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009

## 7. Jumlah Terminal Bus Dan Stasiun Kereta Api

Terminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis di Kota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kecamatan Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan. Data tersebut ditunjukkan dalam Tabel 2.3.2.1.5 berikut.

Tabel 2.3.2.1.5

Jumlah Terminal Bis, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Halte Permanen Transjogja	Unit	34	34	34	34	110
3.	Jumlah Halte <i>Portable</i> Bis Transjogja	Unit	-	23	23	30	40
4.	Jumlah Stasiun Kereta Api	Unit	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2016

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, dimana terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Disamping itu juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bus Transjogja. Bus Transjogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjam pakaikan ke provinsi, sehingga semua halte sekarang dioperasikan semuanya oleh provinsi. Selain terdapat halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte *portable* untuk bus Transjogja, yakni sebanyak 23 unit dan tidak ada penambahan halte *portable* pada tahun 2014 kemudian bertambah lagi di tahun 2015 menjadi 30 halte dan di tahun 2016 menjadi 40 halte *portable*.

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan berada dibawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Danurejan. Stasiun Lempuyangan melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas ekonomi.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bis bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta. Bisa diamati tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (*sold out*) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

## 8. Presentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan

Indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator kriteria transportasi berkelanjutan, dimana indikator ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah penumpang angkutan umum dengan jumlah kendaraan. Jumlah angkutan umum dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 yang ditunjukkan dalam Tabel 2.3.2.1.6 memiliki nilai yang cenderung meningkat, dengan pertumbuhan rata-



rata sebesar 1,55 persen per tahun, hal tersebut diikuti juga dengan peningkatan jumlah kendaraan yang lebih besar dari peningkatan jumlah angkutan umum. Pada tahun 2012, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta sebanyak 257.233 unit yang meningkat hingga mencapai 626.274 unit kendaraan pada tahun 2016, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,91 persen per tahun.

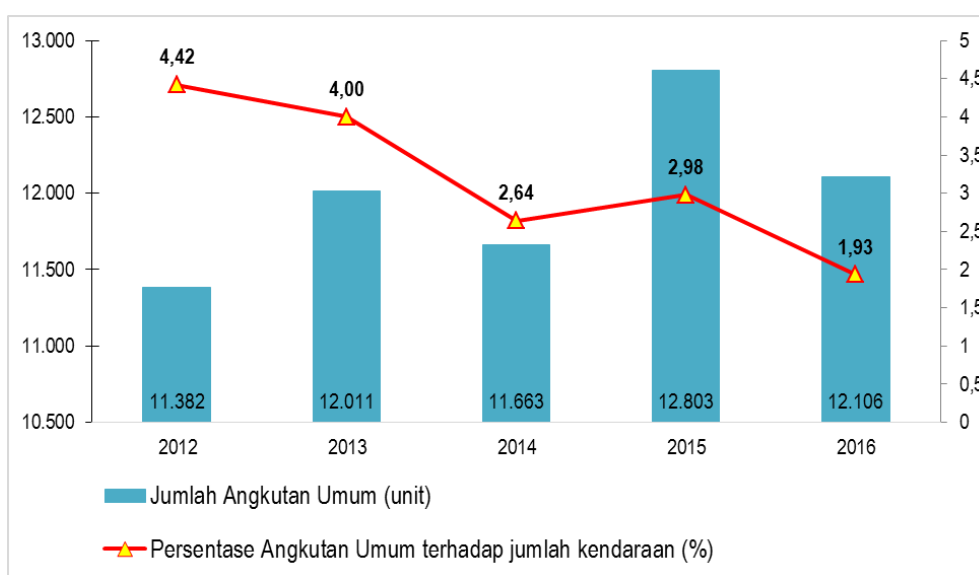
Tabel 2.3.2.1.6

Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Angkutan Umum	Unit	11.382	12.011	11.663	12.803	12.106	1,55
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	257.233	300.444	441.708	430.177	626.274	24,91
3.	<b>Persentase Angkutan Umum terhadap jumlah kendaraan</b>	<b>Persen</b>	<b>4,42</b>	<b>4,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2,98</b>	<b>1,93</b>	<b>-18,68</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2017

Nilai yang ditunjukkan oleh indikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraan memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sebesar 4,42 persen di tahun 2012 turun menjadi 1,93 persen di tahun 2016, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -18,68 persen per tahun. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, jumlah angkutan umum dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 justru cenderung bertambah. Namun dengan angka pertumbuhan rata-rata yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa penduduk banyak yang beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.



Gambar 2.3.2.1.3 Grafik Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2012 – 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 9. Pemasangan Rambu-Rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

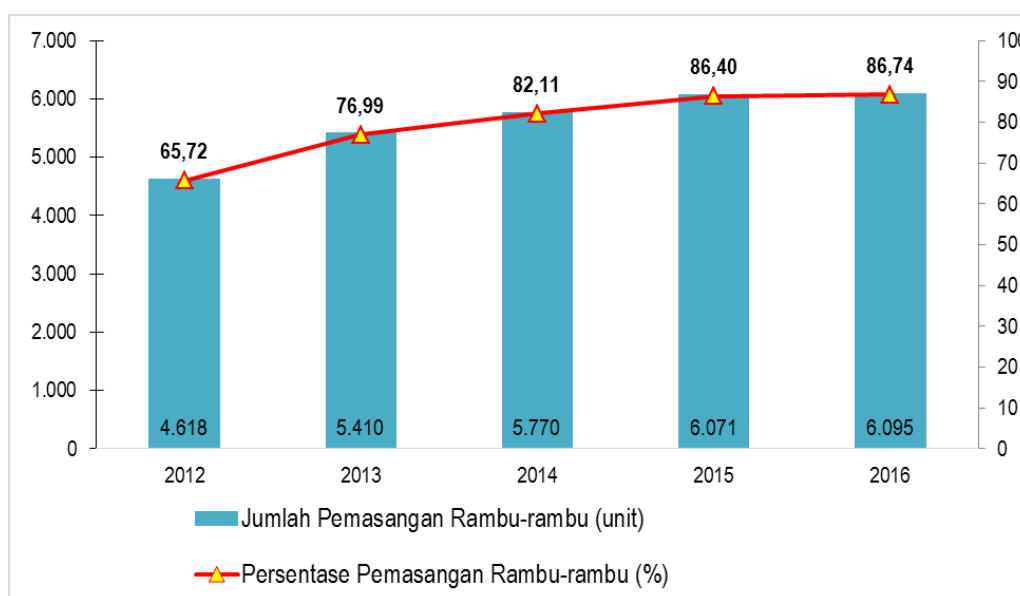
Tabel 2.3.2.1.7

Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Unit	4.618	5.410	5.770	6.071	6.095	7,35
2.	Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia	Unit	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027	0,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2017, Hasil Olahan, 2017

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikator pemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 65,72 persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,73 persen pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,18 persen per tahun.



Gambar 2.3.2.1.4. Grafik Pemasangan Rambu-rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.

## 10. Kinerja Lalu-Lintas

Analisis kinerja lalu lintas dilakukan dengan membandingkan antara volume dan kapasitas jaringan jalan yang ada (V/C ratio) dan kecepatan perjalanan dibandingkan dengan standar pada MKJI. Berdasarkan hasil survei didapatkan nilai volume lalu lintas berdasarkan masing-masing jenis kendaraan dan kecepatan perjalanan pada masing-masing ruas. Masing-masing jenis kendaraan tersebut

dikonversi untuk mendapatkan volume lalu lintas dalam satuan mobil penumpang (smp). Secara teoretis nilai derajat kejenuhan tersebut (V/C) maksimal sebesar 1. Nilai derajat kejenuhan semakin mendekati angka 1, menunjukkan kondisi lalu-lintas yang macet. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, nilai derajat kejenuhan lalu-lintas di jalan perkotaan lebih besar atau sama dengan 0,8 menunjukkan adanya kemacetan lalu-lintas .

Jaringan jalan di Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan dalam MKJI 1997 merupakan bagian dari jaringan jalan perkotaan. Segmen jalan perkotaan/semi perkotaan memiliki ciri-ciri: mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hamper seluruhnya, minimal pada satu sisi jalan tersebut, apakah itu pengembangan pita atau bukan.

Tabel 2.3.2.1.8

Nilai Rata-Rata Perbandingan Volume Lalu-lintas dengan Kapasitas Jalan Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2013

Kelas jalan	2012	2013	2014	2015	2016
Arteri Sekunder	0,56	0,58	0,44	NA	0,55
Kolektor sekunder	0,76	0,81	0,68	NA	0,55
Lokal sekunder	0,71	0,77	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Perhubungan, 2015

Kinerja lalu-lintas kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga 2013 yang ditunjukkan dalam Tabel 2.3.2.1.8 menunjukkan penurunan terlihat dari nilai rata-rata perbandingan volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan yang semakin meningkat. Semakin besar nilai V/C rasio suatu ruas jalan semakin buruk kondisi lalu-lintas nya yang ditunjukkan dengan munculnya kemacetan lalu-lintas maupun penurunan kecepatan kendaraan.

## 11. Kecepatan Lalu-Lintas Rata-Rata

Kinerja lalu-lintas dapat ditunjukkan pula dengan nilai kecepatan rata-rata yang diukur per ruas jalan. Nilai kecepatan lalu-lintas rata-rata pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kecepatan lalu lintas yang ditunjukkan dalam Tabel 2.3.2.1.9.

Tabel 2.3.2.1.9

Kecepatan Lalu-lintas Rata-rata (km/jam) Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

Kelas jalan	2012	2013	2014	2015	2016
Arteri Sekunder	NA	31,54	34,11	NA	NA
Kolektor sekunder	NA	34,55	30,30	NA	NA
Lokal sekunder	NA	36,10	27,99	NA	NA

Sumber: Dinas Perhubungan, 2015

## 12. Fasilitas Kecelakaan Lalu-Lintas

Indikator ini didasarkan pada nilai perbandingan antara jumlah korban meninggal akibat kecelakaan dengan jumlah kecelakaan. Dari tabel berikut, terlihat ada kecenderungan fatalitas kecelakaan yang meningkat meski jumlah kejadian kecelakaannya berkurang. Fatalitas sendiri mencerminkan tingkat kekerasan kejadian

kecelakaan. Dengan demikian kondisi lalu-lintas di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2013 pada Tabel 2.3.2.I.10 belum menunjukkan kinerja keselamatan lalu-lintas yang membaik.

Tabel 2.3.2.I.10 F  
Fatalitas Kecelakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan	Orang	16	32	37	45	47
2.	Jumlah kecelakaan	Kejadian	678	526	494	651	616
3.	<b>Tingkat fatalitas</b>		<b>0,0236</b>	<b>0,0608</b>	<b>0,0748</b>	<b>0,069</b>	<b>0,076</b>

Sumber: DIY Dalam Angka Tahun 2014-2017, Badan Pusat Statistik

## J. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010, urusan komunikasi dan informatika memiliki empat indikator, yakni rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, serta website milik pemerintah daerah.

### 1. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

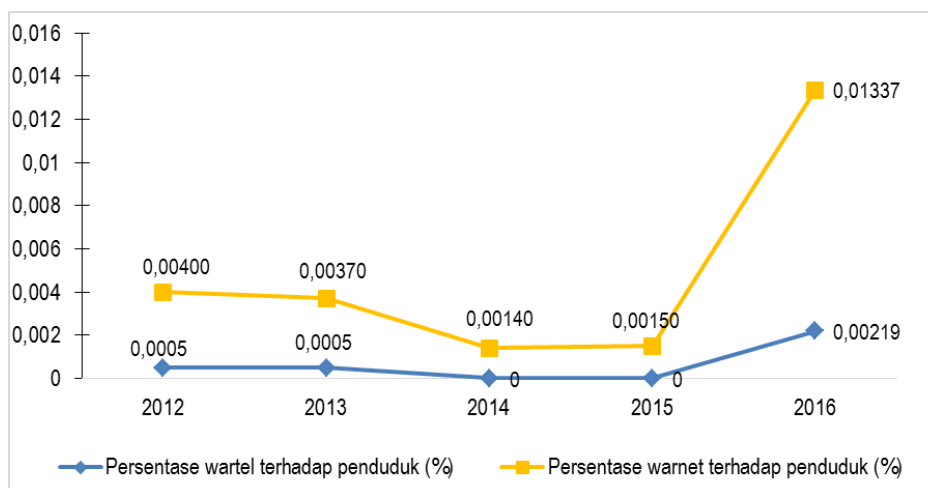
Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Sedangkan warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Tabel 2.3.2.J.1  
Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Wartel	Unit	2	2	0	0	9	-25
2.	Jumlah Warnet	Unit	17	15	6	6	55	-17,94
3.	Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
4.	<b>Persentase Wartel Terhadap Penduduk</b>	<b>Unit per 1.000 penduduk</b>	<b>0,0005</b>	<b>0,0005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0022</b>	<b>-25</b>
5.	<b>Persentase Warnet Terhadap Penduduk</b>	<b>Unit per 1.000 penduduk</b>	<b>0,0040</b>	<b>0,0037</b>	<b>0,0014</b>	<b>0,0015</b>	<b>0,0134</b>	<b>-17,42</b>

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Jumlah wartel dan warnet yang bersumber dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tersebut merupakan data wartel dan warnet yang berizin, dimana keduanya memiliki jumlah yang cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Akan tetapi, jumlah warnet dan wartel mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2016. Jumlah wartel dan warnet di Kota Yogyakarta sebenarnya masih cukup banyak (diatas jumlah yang tertulis didalam data), namun tidak memiliki izin resmi (tidak melapor ke Dinas Perizinan).



Gambar 2.3.2.J.1. Grafik Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat masyarakat dapat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi via internet. Apalagi predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sangat mendukung pertumbuhan warnet-warnet tersebut. Biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya mengakses internet di kota-kota besar lainnya. Namun, keberadaan warnet semakin terancam dengan adanya fasilitas *hotspot* di berbagai sudut Kota Yogyakarta yang menawarkan akses internet gratis. Fasilitas *hotspot* ini tersebar di berbagai tempat, mulai dari pusat pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, cafe/restoran, hingga rumah-rumah pondokan mahasiswa (kos).

## 2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Indikator jumlah surat kabar nasional dan lokal seperti yang tertulis dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 adalah jenis surat kabar nasional dan lokal yang masuk ke daerah. Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tertulis dalam tabel merupakan surat kabar yang menjadi langganan dari Dinas Komunikasi dan Persandian, yakni sebanyak 16 surat kabar. Ke-16 surat kabar yang menjadi Dinas Komunikasi dan Persandian antara lain Koran Tempo, Majalah Kabare, Harian Kedaulatan Rakyat dan Minggu Pagi, Harian Kompas, Harian Bernas, Harian Jawa Pos, Harian Republika, Harian Seputar Indonesia, Harian Jogja, Tempo edisi khusus, Tempo edisi biasa, Harian Merapi, Harian Kedaulatan Rakyat untuk 45 kelurahan, Harian Tribun Jogja, Majalah Mingguan Djoko Lodhang, serta Minggu Pagi. Surat kabar Suara Karya tidak lagi masuk ke Kota Yogyakarta karena mayoritas beritanya yang hanya memuat berita lokal Kota Bandung dan bersifat tidak rutin (tidak datang setiap hari).

Tabel 2.3.2.J.2

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Buah	17	17	17	16	16

Sumber: Dinas Komunikasi dan Persandian, 2017

### 3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Indikator jumlah penyiaran radio dan televisi lokal adalah jumlah penyiaran radio dan televisi yang masuk ke daerah. Menurut informasi yang diperoleh dari Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2010 hingga tahun 2015 bekerjasama dengan empat televisi lokal, yakni TVRI, Jogja TV, RBTv, dan Adi TV. Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan delapan radio dari beberapa radio yang sering digunakan kurang lebih 13 stasiun radio, diantaranya adalah RRI, MBS, Sonora, Geronimo, PTDI Kota Perak, Q-Radio, Arma Sebelas, EMC, Retjo Buntung, Global FM, dan Star FM.

Tabel 2.3.2.J.3

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penyiaran radio	Channel	11	10	10	13	13
2.	TV lokal	Channel	3	3	3	4	5

Sumber: Bidang Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, 2017

### 4. Website Milik Pemerintah Daerah

Kota Yogyakarta memiliki *website* yang rutin diisi oleh Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yakni *jogjakota.go.id*. *Website* tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Selain itu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (*running text*). Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengampu subdomain *kliping.jogjakota.go.id*. *Website* tersebut mengunggah (*upload*) berita-berita mengenai kabar dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dimuat pada surat kabar yang beredar di Yogyakarta. *Website kliping.jogjakota.go.id* juga diperbarui (*update*) setiap hari.

*Website jogjakota.go.id* terdapat 12 sub domain yang merupakan *website* dinas dan beberapa lembaga terkait, seperti Layanan Pengadaan Secara Online (LPSE), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Baznas Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, Kliping Berita, KPU Kota Yogyakarta, Konsultasi Belajar Siswa Dinas Pendidikan, Bidang Kerjasama Kota Yogyakarta, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan, Dinas Pendidikan, serta Perpustakaan Kota Yogyakarta. Secara konten atau isi dari sub domain tersebut secara umum cukup lengkap, misalnya *website* dari Bagian Hukum Setda. Konten dari *website* ini mencakup produk hukum baik dari pusat, provinsi, dan juga pemerintah kota sendiri. Produk hukum tersebut diantaranya terdiri dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (tahun 1951 hingga tahun 2016), Peraturan Walikota (tahun 1969, tahun 2005 hingga tahun 2016), Peraturan DPRD (tahun 2010 dan tahun 2014), serta memuat tentang Keputusan Walikota (tahun 2006, tahun 2013 hingga tahun 2016).

*Website* Dinas Pendidikan memiliki konten yang cukup lengkap, diantaranya mengenai kalender pendidikan, informasi mengenai ujian nasional, jaminan pendidikan daerah, produk hukum, serta informasi pendidikan lainnya. Selain itu juga terdapat *website* konsultasi siswa dimana *website* ini dirasa cukup membantu siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang dirasa sulit. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa dijawab dengan relatif cepat. Hingga tanggal 20 April 2015 (tanggal diaksesnya *website* konsultasi siswa), sudah terdapat 10.480 pertanyaan masuk, dan 10.158 pertanyaan yang terselesaikan (terjawab).

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki konten yang dapat dikatakan lebih lengkap dari konten *website* sub domain lainnya. Konten *website* Dinas Perizinan diantaranya berisi jenis perizinan dan jenis permohonan yang memuat mengenai syarat pengajuan, dasar hukum, hingga formulir pengajuan. Disamping itu, Dinas Perizinan memiliki online services atau pelayanan perizinan online yang dapat digunakan untuk membuat perizinan khususnya penelitian, KKN, PKL, SIUP, dan TDP yang diakses melalui <http://perizinan.jogjakota.go.id/online>. Pada web Dinas Perizinan juga memuat tentang produk hukum mengenai penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta. Berbagai *website* pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini secara keseluruhan menyajikan informasi tentang berita, agenda, serta informasi dan keluhan dari masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 2.3.2.J.4

Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Website	Website	26	27	28	30	31

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, 2017

Jumlah *website* milik Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki kecenderungan meningkat, dimana tahun 2012 berjumlah 26 *website* meningkat menjadi 31 *website* di tahun 2016.

## 5. Pameran/Expo

Indikator pameran/expo sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 merupakan jumlah yang menunjukkan banyaknya kegiatan pameran/expo yang dilaksanakan per tahun. Banyaknya pameran/expo yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana pameran dan atau expo tersebut tidak menjelaskan secara terinci jenis pameran/expo yang dilaksanakan pada tahun terkait.

Terdapat banyak jenis pameran baik yang diselenggarakan ataupun diikuti Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Namun dari data yang tersedia baru tercatat jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. Di tahun 2016 sendiri jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti oleh Disperindagkoptan Kota Yogyakarta berjumlah 17 pameran yang terdiri dari 3 pameran perindustrian dan 14 pameran perdagangan. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya berbagai kegiatan pameran baik yang ada di dalam Kota Yogyakarta maupun di luar kota. Disperindagkoptan melibatkan Usaha Kecil Menengah dalam berbagai pameran/expo yang diadakan setiap tahunnya.

Tabel 2.3.2.J.5

Jumlah Pameran/Expo Perdagangan yang Dilaksanakan per Tahun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta  
Tahun 2013-2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pameran/expo	Kali/tahun	NA	13	11	13	17
	a. perindustrian		NA	NA	NA	NA	3
	b. perdagangan		NA	NA	NA	NA	14

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017

## K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

### 1. Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan.

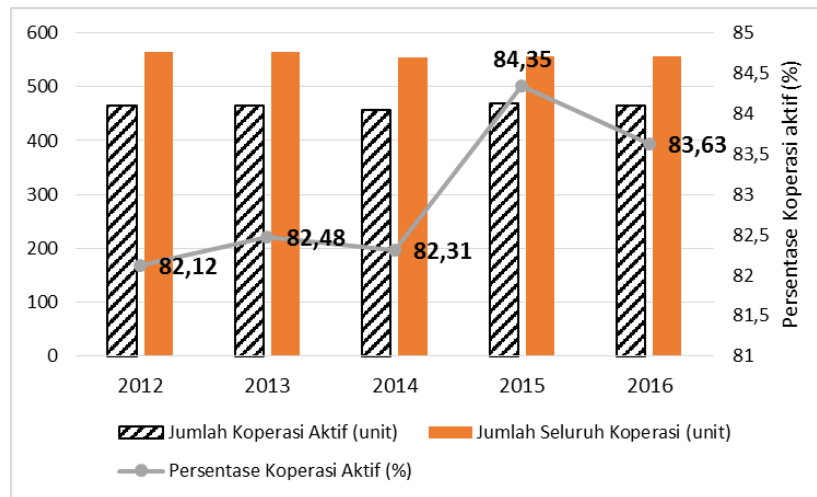
Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016 cenderung menurun. Dari 565 unit koperasi di tahun 2012, turun menjadi 556 unit koperasi pada tahun 2016. Jumlah koperasi aktif di Kota Yogyakarta cenderung naik turun tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2012, jumlah koperasi aktif yaitu sebanyak 464 unit. Jumlah tersebut sempat turun menjadi 456 unit di tahun 2014 kembali naik menjadi 469 unit di tahun 2015, dan turun lagi menjadi 465 unit di tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah koperasi aktif yaitu sebesar 83,63% dari jumlah seluruh koperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2012-2016 juga naik turun seiring jumlah koperasi aktif.

Tabel. 2.3.2.K.1  
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	464	466	456	469	465	0,07
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	565	565	554	556	556	-0,40
<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>82,12</b>	<b>82,48</b>	<b>82,31</b>	<b>84,35</b>	<b>83,63</b>	<b>0,46</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017





Gambar 2.3.2.K.1 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016  
Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 2. Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan data tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di Kota Yogyakarta, meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dari perkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umum mengalami peningkatan selama tahun 2012-2016. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya. Jumlah LKM ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah UMKM. Meski demikian, hanya Koperasi Simpan Pinjam yang meningkat jumlahnya pada tahun 2012-2016. Sedangkan jumlah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tidak meningkat jumlahnya selama tahun 2012-2016. Bahkan, jumlah UED-SP mengalami penurunan dari 27 unit di tahun 2012 menjadi 20 unit di tahun 2016. Secara umum, jumlah LKM di Kota Yogyakarta cenderung meningkat, sehingga diharapkan akan mampu mendorong perkembangan usaha kecil di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.2.K.2

Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	Unit	27	27	27	20	20	-6,48
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	Unit	14	14	14	14	14	0,00
3.	Koperasi Simpan Pinjam	Unit	28	32	44	46	47	14,67
<b>Jumlah</b>		<b>Unit</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>4,4</b>

Sumber: Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017.

### 3. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Jumlah usaha kecil dan mikro di Kota Yogyakarta sangat mendominasi dibandingkan dengan usaha menengah. Persentase usaha mikro dan kecil sangat mendominasi dari keseluruhan UKM di Kota Yogyakarta, yaitu berkisar pada 97% per tahunnya. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan persentase usaha mikro dan kecil menunjukkan nilai negatif. Jumlah seluruh UKM maupun jumlah usaha mikro dan kecil sama-sama mengalami perkembangan positif pada tahun 2012 – 2016. Hal ini merupakan sebuah sinyal yang baik bagi kegiatan perekonomian penduduk khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Tabel 2.3.2.K.3

Banyaknya Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	n.a	21.965	22.165	22.418	22.707	1,11
Jumlah seluruh UKM	Unit	n.a	22.591	22.841	23.341	23.468	1,28
<b>Usaha Mikro dan Kecil</b>	<b>Persen</b>	n.a	<b>97,23</b>	<b>97,04</b>	<b>96,05</b>	<b>96,76</b>	<b>-0,16</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: Hasil Olahan, 2017

#### L. Penanaman Modal

##### 1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi DIY dengan morfologi perkotaan.

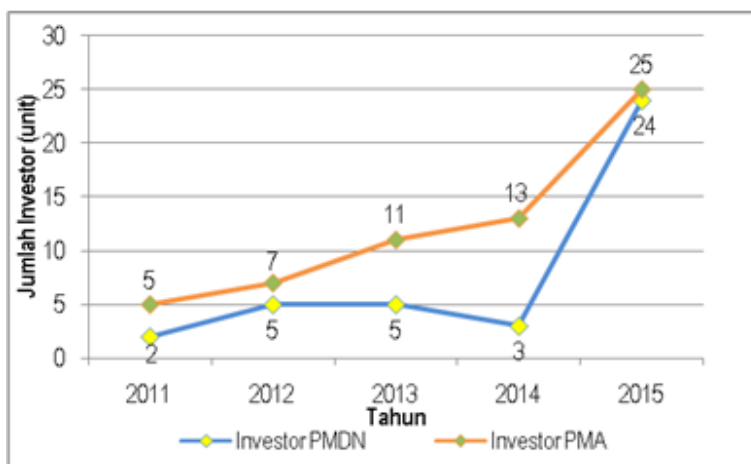
Tabel 2.3.2.L.1

Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Investor PMDN	Unit	5	5	3	24	NA	220
2	Investor PMA	Unit	7	11	13	25	NA	55,88
<b>Total</b>		<b>Unit</b>	12	16	16	49	NA	79,86

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan, 2016

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel di atas merupakan perusahaan investor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu 2012-2015 terjadi peningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 12 perusahaan penanam modal yang melakukan izin berinvestasi di Kota Yogyakarta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan. Dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebih mendominasi kegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.2.L.1 Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

## 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sebanding dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terus meningkat setiap tahun, nilai investasi yang ditanamkan di Kota Yogyakarta juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2012-2015. Pada tahun 2012, nilai investasi yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar 39.079.900 US \$, sedangkan pada tahun 2015, nilai investasi yang ditambahkan adalah sebesar 79.162.100 US \$.

Ditinjau dari kontribusinya, nilai investasi perusahaan PMDN pada tahun 2012 jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai investasi perusahaan PMA. Pada tahun 2012, nilai investasi perusahaan PMDN adalah sebesar 37.109.300 US\$, sedangkan nilai investasi perusahaan PMA adalah sebesar 1.970.600 US\$. Secara umum, jumlah nilai investasi perusahaan PMDN pada tahun 2012-2015 juga lebih besar dibandingkan

dengan perusahaan PMA. Perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN cenderung dinamis dari tahun ke tahun. Nilai investasi perusahaan PMDN pada tahun 2012 sempat mencapai 37.109.300 US\$, namun pada tahun 2015 nilai investasi dari perusahaan dengan izin baru hanya sebesar 13.563.200 US\$, padahal jumlah perusahaan PMDN baru pada tahun tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2.L.2

Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	PMDN	US \$	37.109.300	5.843.700	34.534.500	13.563.200	NA	115,3
2	PMA	US \$	1.970.600	12.884.400	3.061.900	65.598.900	NA	840,01
<b>Total</b>		<b>US \$</b>	<b>39.079.900</b>	<b>18.728.100</b>	<b>37.596.400</b>	<b>79.162.100</b>	<b>NA</b>	<b>53,08</b>

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016; dengan Hasil Olahan, 2016.

### 3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing.

Berdasarkan Tabel penambahan tenaga kerja pada perusahaan PMA terkecil terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 39 orang dengan 11 jumlah perusahaan baru. Pada tahun tersebut, rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA adalah yang paling rendah selama rentang tahun 2012-2015, yaitu sebesar 3,55. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sekitar 314 tenaga kerja mampu terserap di 7 perusahaan. Penyerapan tenaga kerja perusahaan PMA ini cenderung tersebut terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 206,73

Tabel 2.3.2.L.3

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
<b>Penanam Modal Asing (PMA)</b>								
1	Tenaga Kerja	Jiwa	314	39	160	796	NA	206,73
2	Perusahaan	Unit	7	11	13	25	NA	55,88
<b>3</b>	<b>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>		<b>44,86</b>	<b>3,55</b>	<b>12,31</b>	<b>31,84</b>	<b>NA</b>	<b>104,44</b>
<b>Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)</b>								
1	Tenaga Kerja	Jiwa	113	379	1.354	12	NA	307,34
2	Perusahaan	Unit	5	5	3	24	NA	220
<b>3</b>	<b>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>		<b>22,60</b>	<b>75,80</b>	<b>451,33</b>	<b>0,50</b>	<b>NA</b>	<b>210,31</b>
<b>Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>			<b>67,46</b>	<b>79,35</b>	<b>463,64</b>	<b>32,34</b>	<b>NA</b>	<b>136,3</b>

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016: Hasil Olahan, 2016.

Rasio daya serap tenaga kerja di perusahaan PMDN pada rentang tahun 2012-2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN pada tahun 2014

adalah yang tertinggi selama rentang tahun 2012-2015, yaitu sebesar 1.354 orang. Padahal, penambahan perusahaan PMDN pada tahun tersebut cukup kecil, yaitu sebesar 3 perusahaan. Hal ini menunjukkan kondisi yang berlawanan pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMDN hanya sebesar 0,5 dengan penambahan tenaga kerja sebesar 12 orang. Padahal, penambahan jumlah perusahaan PMDN di tahun 2015 adalah yang terbesar selama tahun 2012-2015, yaitu sebanyak 24 perusahaan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa rasio penyerapan tenaga kerja tidak bergantung pada besar atau kecilnya penambahan perusahaan investor, tetapi lebih kepada kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja.

#### 4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Secara umum, nilai realisasi PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai realisasi PMA tertinggi adalah pada tahun 2014 – 2015, yaitu sebesar 62.537.000 US\$. Sedangkan penurunan terbesar ditunjukkan pada tahun 2013-2014. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan jumlah perusahaan investor PMA. Berbeda halnya dengan nilai realisasi pada PMDN, nilai realisasi pada PMDN secara umum cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi pada PMDN terjadi pada tahun 2011 – 2012, yaitu sebesar 37.108.800 US\$. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 – 2013, yaitu sebesar 31.265.600 US\$. Penurunan nilai realisasi PMDN ini tidak sebanding dengan penambahan jumlah perusahaan PMDN.

Tabel 2.3.2.L.4

Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Variabel	Satuan	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
<b>Penanam Modal Asing (PMA)</b>							
1	Perubahan Nilai Realisasi PMA	US\$	1.720.600	10.913.800	-9.822.500	62.537.000	NA
2	Pertumbuhan	Persen	688	554	-76	2.042	NA
<b>Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)</b>							
1	Perubahan Nilai Realisasi PMDN	US\$	37.108.800	-31.265.600	28.690.800	-20.971.300	NA
2	Pertumbuhan	Persen	25	-84	491	-61	NA
<b>Total Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA</b>		<b>US\$</b>	<b>38.829.400</b>	<b>-20.351.800</b>	<b>18.868.300</b>	<b>41.565.700</b>	<b>NA</b>

Sumber: Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016; Hasil Olahan, 2016.

#### M. Kepmudaan dan Olahraga

##### 1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Tabel 2.3.2.M.1

## Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	157	162	162	64	94	-2,61

Sumber :

1. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemuda di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2012 hanya berjumlah 157 organisasi dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 162 organisasi pada tahun 2014 dan menurun menjadi 64 pada tahun 2015. Pada tahun 2015 pendataan organisasi pemuda yang dilakukan adalah dengan mendata organisasi pemuda yang aktif, sehingga antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2015 terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan cara pendataan yang sama didapatkan angka 94 organisasi pada tahun 2016

## 2. Jumlah Organisasi Olahraga

Berdasarkan informasi jumlah organisasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa organisasi olahraga yang dimaksud merupakan cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan kota. Jumlah organisasi olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2016 cenderung menunjukkan peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 2012 jumlah organisasi olahraga sejumlah 34 organisasi. Kemudian jumlah organisasi mengalami peningkatan menjadi 48 organisasi pada tahun 2015 dan 2016. Berikut merupakan data jumlah organisasi olahraga.

Tabel 2.3.2.M.2

## Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Organisasi Olahraga	organisasi	34	34	34	48	48	10,29

Sumber Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

## 3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2014, namun terdapat penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2012, jumlah kegiatan pemuda sebanyak 26 kegiatan dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 64 kegiatan pada tahun 2015. Kemudian mengalami penurunan hingga berjumlah 24 kegiatan pada tahun 2016. Angka 26 tersebut menunjukkan jenis kegiatan kepemudaan. Berikut merupakan data perkembangan jumlah kepemudaan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.2.M.3

Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	26	37	43	64	26	11,99

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

#### 4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, dijelaskan bahwa data yang tersedia hanya tahun 2013, 2014, dan 2015. Dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan jumlah organisasi olahraga, dari 221 organisasi pada tahun 2013, meningkat menjadi 227 pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 162 kegiatan olahraga kemudian menjadi 227 pada tahun 2016. Beberapa kegiatan olahraga yang ada di Kota Yogyakarta antara lain, kejuaraan kota, senam kesbang, Popnas, Popda, Tri Lomba Juang, Porkar, dan Lomba Senam. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.2.M.4

Jumlah Kegiatan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Kegiatan Olahraga	Organisasi	NA	221	227	162	227	4,73

Sumber :

1. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

#### 5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Gelanggang remaja merupakan suatu bangunan yang digunakan para remaja untuk memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Bangunan tersebut bertujuan untuk menjadi pemusatan aktivitas remaja dalam menampung dan menyalurkan minat serta bakat para remaja dengan memanfaatkan fasilitas dalam bangunan tersebut baik untuk kegiatan rutin maupun insidental. Dengan tersedianya bangunan tersebut diharapkan dapat mendorong pembentukan pribadi remaja yang mandiri dan berprestasi, terutama di kegiatan olahraga dan seni budaya.

Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dan tahun 2015 melakukan pendataan jumlah gelanggang remaja yang berlokasi di dalam wilayah kota. Menurut data yang didapat dari Kantor Kesatuan Bangsa, terdapat penurunan jumlah unit gelanggang/balai remaja dari tahun 2014 – 2015. Penurunan jumlah tersebut kemungkinan disebabkan karena pengalihfungsian gelanggang/balai remaja menjadi gedung untuk keperluan

lainnya dan juga dilakukan pemutakhiran data gelanggang/balai remaja di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan jumlah gelanggang remaja yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.2.M.5

## Gelanggang Remaja di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah gelanggang/balai remaja di kota	Unit	N/A	N/A	16	5	5
2	Jumlah penduduk	Jiwa	N/A	N/A	413.936	409.487	411.282
3	<b>Rasio jumlah gelanggang/balai remaja</b>	<b>Unit/ 1.000 iwa</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017

## 6. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan salah satu sarana pendukung bagi kegiatan warga kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah lapangan olahraga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2016. Jumlah lapangan olahraga tahun 2012 sebanyak 553 unit dan meningkat menjadi 604 unit pada tahun 2014 hingga 2016. Peningkatan tersebut juga berpengaruh pada jumlah lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Pada tahun 2012, tersedia 1,32 unit lapangan olahraga per 1.000 penduduk dan mengalami peningkatan menjadi 1,47 unit per 1.000 penduduk pada tahun 2016. Jumlah lapangan olahraga yang dimaksud adalah beragam sesuai dengan jenis kegiatan olahraga, bentuk, dan jenis lapangan olahraga, sehingga bukan hanya lapangan olahraga yang berumput. Berikut data lapangan olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3.2.M.6

## Lapangan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah lapangan olahraga	Unit	563	560	604	604	604	1,83
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3.	Lapangan olahraga per 1.000 penduduk	Unit	1,32	1,38	1,46	1,48	1,47	2,76

Sumber :

1. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
2. Hasil Olahan, 2017

## N. Kebudayaan

### 1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni Dan Budaya

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukkan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Bahkan hampir setiap bulan ada pertunjukkan kesenian dan budaya baik diselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakan data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.



Tabel 2.3.2.N.1

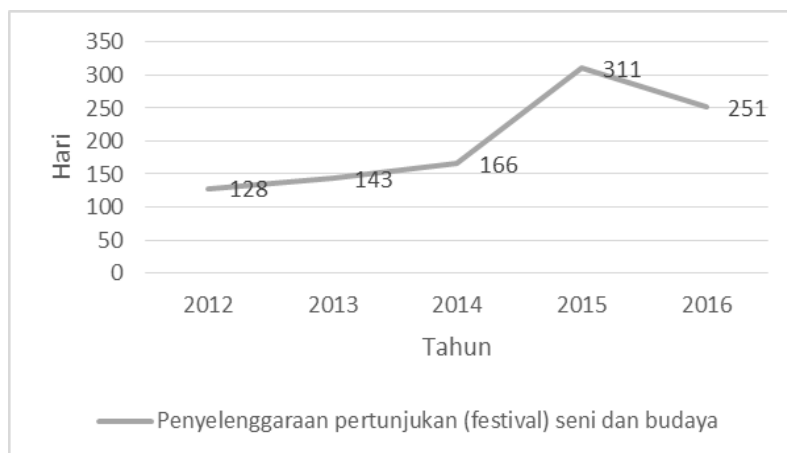
## Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Hari	128	143	166	311	251	23,96

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Kebudayaan, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Data menunjukkan bahwa jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, diselenggarakan pertunjukan seni selama 40 hari sehingga pertunjukan mencapai 311 hari di tahun tersebut. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin tingginya minat masyarakat terhadap pertunjukan seni dan budaya, karena di Kota Yogyakarta ini tidak jarang mengadakan pertunjukan seni budaya tanpa memungut biaya penonton, jika berbayarpun biayanya masih terjangkau, jadi masyarakat dapat mendapatkan hiburan yang menarik dan menghibur dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 2016 pertunjukan menurun sebab tahun tersebut merupakan tahun politik, pembatasan pertunjukan tersebut guna mengantisipasi acara yang berlangsung disisipi muatan politik kelompok tertentu. Selain itu durasi Pasar Malam Perayaan Sekaaten (PMPS) berkurang dari 40 hari menjadi 24 hari.



Gambar 2.3.2.N.1. Grafik Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## 2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta yang dimaksud adalah gedung kesenian. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Yogyakarta ada 2 unit, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Kedua tempat ini dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta sering kali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Fasilitas ini merupakan wadah untuk para seniman Kota Yogyakarta dalam menunjukkan bakat seninya, sekaligus sebagai tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Tabel 2.3.2.N.2

## Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	2	2	2	2	2	0

Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2017
3. Hasil Olahan, 2017

### 3. Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Berdasarkan data di bawah ini, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir.

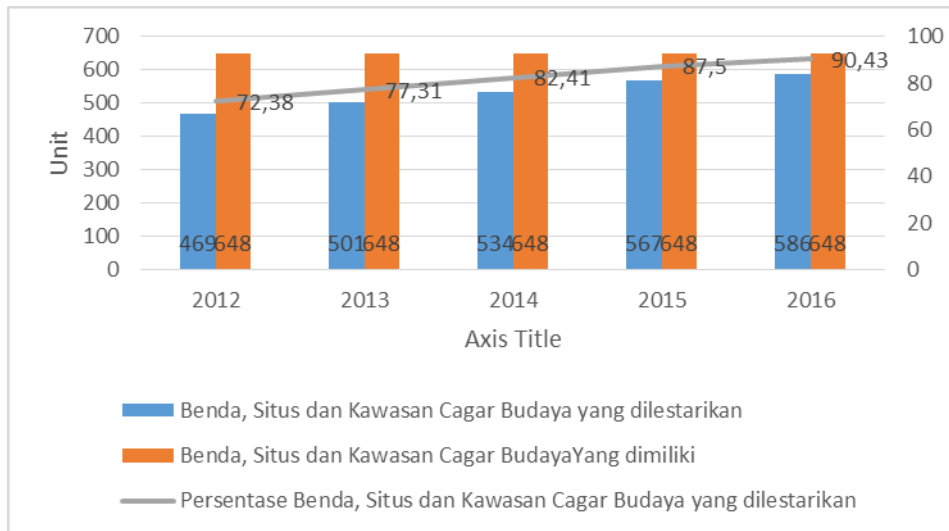
Tabel 2.3.2.N.3

## Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	469	501	534	567	586	5,73
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	Unit	648	648	648	648	648	0,00
3.	<b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>Persen</b>	<b>72,38</b>	<b>77,31</b>	<b>82,41</b>	<b>87,5</b>	<b>90,43</b>	<b>5,72</b>

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2017, Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2012, persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya mencapai 72,38 persen dan terus mengalami kenaikan hingga menjadi 90,43 persen pada tahun 2016. Kenaikan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu bukti bahwa memang Kota Yogyakarta memiliki keragaman benda budaya yang pantas dilestarikan.



Gambar 2.3.2.N.2. Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

## O. Perpustakaan

### 1. Rasio Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlah perpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan adanya *regrouping* dan beberapa sekolah swasta yang tutup. Kemudian pada tahun 2016 dimasukkan komponen baru yakni jumlah perpustakaan milik OPD yang berdampak cukup signifikan. Berikut ini merupakan tabel terperinci tentang jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016

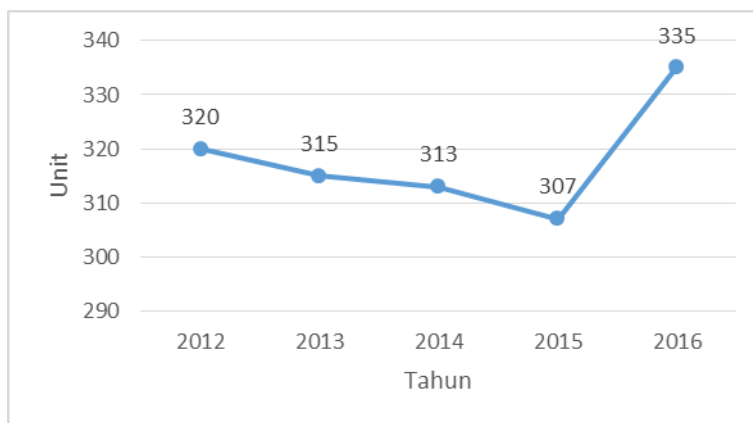
Tabel 2.3.2.O.1

Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda)	Unit	1	1	1	1	1	0
Jumlah Perpustakaan Sekolah Negeri	Unit	135	131	130	128	107	-5,41
Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda (Sekolah Swasta)	Unit	184	183	182	178	105	-11,07
Jumlah Perpustakaan Milik OPD						112	
<b>Total Jumlah Perpustakaan</b>	<b>Unit</b>	<b>320</b>	<b>315</b>	<b>313</b>	<b>307</b>	<b>335</b>	<b>1,25</b>

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Jumlah perpustakaan yang bersifat minus meskipun hanya kecil tetapi memiliki dampak yaitu berkurangnya fasilitas pelayanan pendidikan. Karena dengan berkurangnya jumlah perpustakaan tentu memiliki imbas terhadap berkurangnya garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.



Gambar 2.3.2.O.1. Grafik Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Selain menggambarkan jumlah perpustakaan perlu untuk menampilkan jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kota Yogyakarta karena keberadaan TBM yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan mudah.

Tabel 2.3.2.O.1

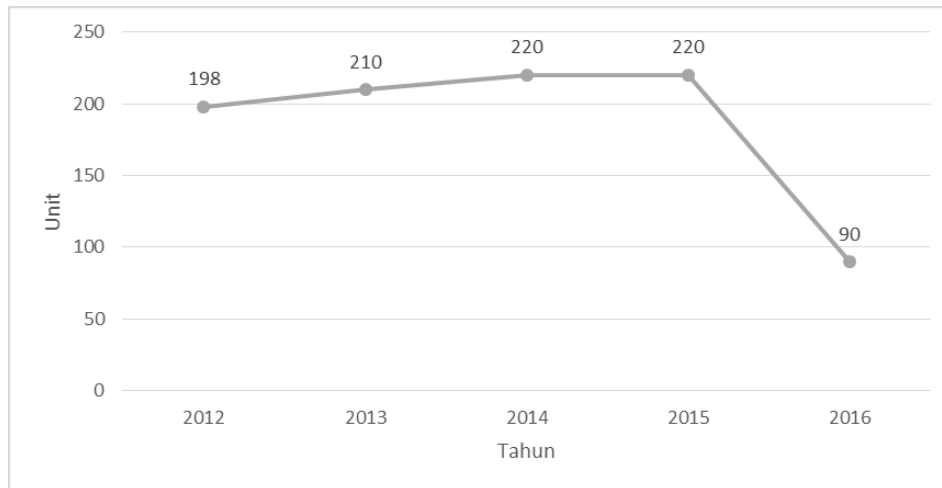
Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016*
Jumlah Perpustakaan (TBM)	unit	207	216	220	220	90

Sumber :

1. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2016
2. Dinas Pendidikan 2017

Jumlah TBM dari tahun 2012 hingga 2014 terus mengalami peningkatan dan stagnan pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2015 diperoleh informasi bahwa TBM sudah diampu oleh Dinas Pendidikan sehingga data yang tercantum di bawah merupakan data terbaru yang dimiliki oleh dinas pendidikan terkait jumlah TBM. Kecenderungan meningkatnya jumlah TBM ini memang suatu hal yang sangat baik, hal ini berarti minat membaca masyarakat dari tahun ke tahun dapat semakin lama semakin meningkat. Hal ini juga akan menambah wawasan dan informasi masyarakat. Berikut ini merupakan tabel dan grafik bertambahnya jumlah TBM di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan TBM memberikan bukti bahwa masyarakat memiliki motivasi yang besar untuk meningkatkan budaya membaca sesuai dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan tentunya budaya membaca harus dikembangkan secara terus menerus. Data pada tahun 2016 berbeda karena sudah melalui pemutakhiran data oleh Dinas Pendidikan. Sementara sumber data pada tahun 2012-2015 didapat dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.



Gambar 2.3.2.O.2. Grafik Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Jika keaktifan pelayanan perpustakaan ditingkatkan dengan alokasi buku-buku yang dibutuhkan masyarakat, maka ke depan akan semakin meningkat daya tarik perpustakaan di mata masyarakat. Kesanggupan manajemen perpustakaan yang efisien dan efektif dengan menggunakan pelayanan *on line* dan SIM yang selalu ditingkatkan maka akan menambah gairah para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk mengakses pelayanan tersebut.

## 2. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

Penting untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Meskipun jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan, rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,15 persen per tahun.

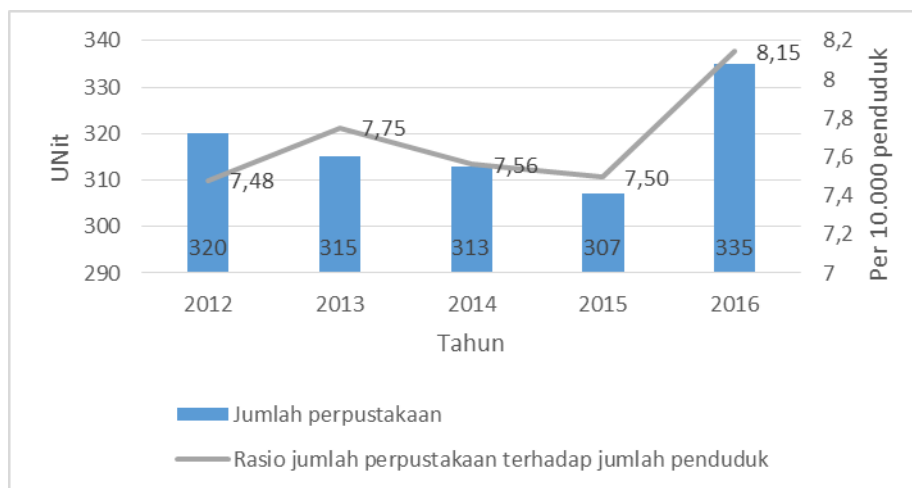
Tabel 2.3.2.O.2

Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Perpustakaan	Unit	320	315	313	307	335	1,25
Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
<b>Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk</b>		<b>7,48</b>	<b>7,75</b>	<b>7,56</b>	<b>7,50</b>	<b>8,15</b>	<b>2,26</b>

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016

Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk lebih jelasnya digambarkan melalui grafik di bawah ini. Bahwa penurunan jumlah perpustakaan di tahun 2014 dan 2015 ternyata juga menurunkan rasio perpustakaan per 10.000 penduduk. Rasio perpustakaan meningkat pada tahun 2016 karena jumlah perpustakaan juga bertambah. Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk dapat dilihat dalam grafik berikut



Gambar 2.3.2.O.3. Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012 - 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Sementara itu rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Kemudian menurun pada tahun 2016 sebab telah mengalami pemutakhiran data dari OPD baru yang menanganinya (Dinas Pendidikan). Berikut ini merupakan tabel rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk.

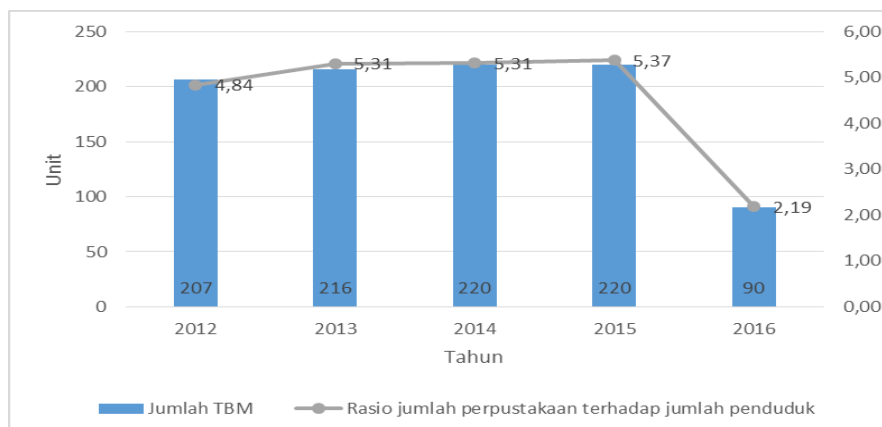
Tabel 2.3.2.O.3

Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah TBM	Unit	207	216	220	220	90	-13,22
Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
<b>Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk</b>		<b>4,84</b>	<b>5,31</b>	<b>5,31</b>	<b>5,37</b>	<b>2,19</b>	<b>-12,09</b>

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2017

Kenaikan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk ini merupakan sebuah pencapaian yang positif. Kenaikan ini berarti dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Grafik di bawah ini menggambarkan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk:



Gambar 2.3.2.O.4. Grafik Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

### 3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahun:

Tabel 2.3.2.O.4

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Jiwa	126.205	126.554	143.838	163.111	222.588	15,95

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, bahkan pada tahun 2016 lonjakan jumlah pengunjung dapat dikatakan paling menonjol dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar.

Dilihat dari data tersebut pengunjung perpustakaan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian daya tarik perpustakaan dalam memberikan pelayanan juga meningkat. Namun kondisi ini perlu ditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik, dengan melengkapi informasi yang selalu *up date* dan fasilitas yang lebih baik.

### 4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan

menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Di bawah ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016.

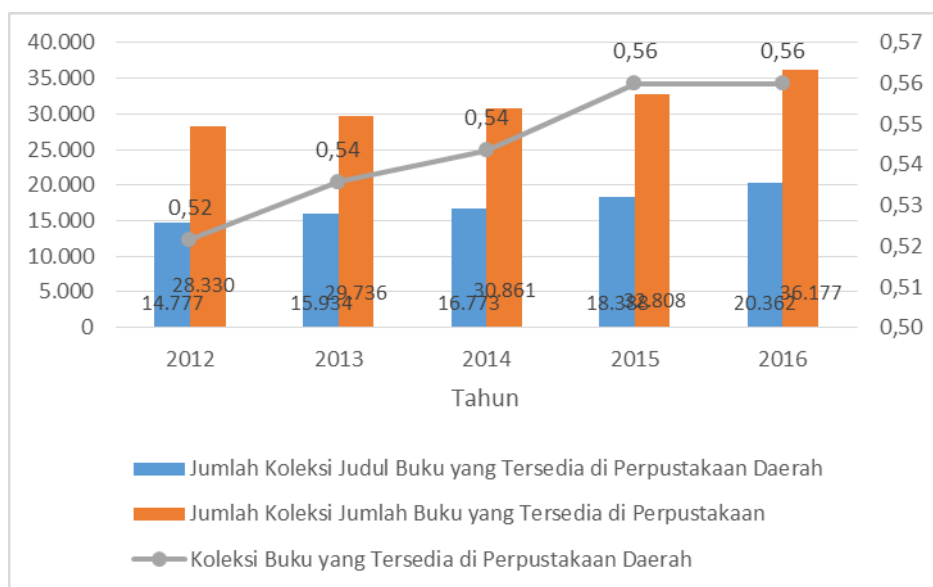
Tabel 2.3.2.O.5

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	14.777	15.934	16.773	18.388	20.362	8,36
Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	28.330	29.736	30.861	32.808	36.177	6,33
<b>Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah</b>		<b>0,52</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>1,89</b>

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Kemudian pada kurun waktu lima tahun, antara 2012 – 2016, jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata jumlah koleksi judul buku mencapai 8,36 persen per tahun. Kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan yaitu mencapai kenaikan rata-rata sebesar 6,33 persen per tahun.



Gambar 2.3.2.O.6. Grafik Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta

Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Terdapat tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi judul yang berangsur meningkat dari waktu-ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan. Sedangkan penambahan koleksi buku yaitu menambah jumlah eksemplarnya merupakan pencerminan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.



**P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

**1. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP**

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa secara rutin dua kali dalam setahun. Kegiatan pembinaan tersebut biasanya berupa sarasehan yang membicarakan tentang wawasan kebangsaan dan berbagai informasi terkait pengelolaan lembaga yang baik. Sarasehan tersebut juga seringkali melibatkan personil TNI dari Kodim, Karang Taruna, dan dosen sebagai pemantiknya.

Tabel 2.3.2.P.1

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kali	2	2	2	8	9

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017

Sejak tahun 2012 hingga 2014, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Yogyakarta berlangsung 2 kali, kemudian pada tahun 2015 meningkat drastis menjadi 8 kali dan menjadi 9 kali pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan perbaikan kantor kesatuan bangsa yang menaruh perhatian lebih besar untuk mengembangkan dan membina LSM, Ormas dan OKP yang ada di Kota Yogyakarta. Pembinaan sebaiknya mencakup substansi pengorganisasian, manajemen, perencanaan program dan model evaluasi. Pembinaan harus mampu menjawab kebutuhan pematangan organisasi dalam memfungsikan diri sebagai wahana kreatif bagi masyarakat. Mungkin bentuk forum komunikasi (Forkom) perlu ditambahkan agar antar organisasi yang tumbuh dalam masyarakat dapat terhubung satu dengan lainnya. Pemanfaatan organisasi yang kuat untuk memberikan saling asah, asih dan asuh kepada organisasi yang baru tumbuh akan sangat membantu pemerintah. Dengan memanfaatkan organisasi yang sudah berkembang untuk memberikan kontribusi kepada organisasi yang lebih lemah, akan menopang kekuatan pemerintah mengingat keterbatasan sumberdaya. Namun visi dan misi tetap tercapai dengan menyambungkan antar organisasi ini.

**2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah**

Kegiatan pembinaan partai politik daerah ini merupakan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa. Di tahun tahun 2012 hingga 2013 kegiatan pembinaan politik daerah dilakukan selama 38 kali. Banyaknya pembinaan yang diselenggarakan ini berkaitan erat dengan jumlah parpol yang ada. Banyak atau sedikitnya parpol biasanya dipengaruhi oleh siklus pemilihan umum, jumlah parpol bisa bertambah maupun berkurang ketika akan mendekati pemilihan umum. Sementara di tahun 2014 kegiatan pembinaan politik hanya diselenggarakan delapan kali, kegiatan tersebut merupakan pemberian dana bantuan kepada delapan parpol. Tentunya pemberian dana bantuan tidak cukup sebagai teknik pembinaan yang mumpuni. Pada tahun 2015 bantuan politik kepada partai politik menurun menjadi 6 sebab 2 parpol Golkar dan PPP sedang memiliki kasus sengketa di pusat. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat tajam menjadi 51 kali karena menuju pilkada serentak. Mengingat keberadaan parpol seringkali menjadi sumber mobilisasi massa besar-besarnya, maka

tentunya pembinaan hendaknya mencakup penumbuhan kepedulian parpol terhadap keharmonisan dan keselarasan lingkungan.

Tabel 2.3.2.P.2

## Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kali	38	38	8	6	51

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017

Antara kegiatan kepartaian dengan kegiatan pemerintah seringkali tidak berjalan secara linear. Hal ini dapat diatasi dengan menserasikan gerak langkah antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimanapun partai politik merupakan *base home* setiap anggota DPRD. Namun gerak langkah pembangunan pemerintah kurang didukung oleh partai politik. Komunikasi dengan partai politik tentunya akan dapat berjalan lancar jika komunikasi dengan DPRD berjalan lancar. Dengan demikian pembinaan partai politik bentuknya bukan sekedar memberikan dana bantuan, akan tetapi melakukan komunikasi yang intensif. Kesadaran partai politik hidup dalam wilayah Kota Yogyakarta yang harus ikut bertanggungjawab dalam menjaga ketertiban dan ketentraman warga dan sekitarnya perlu ditekankan. Kegiatan politik dan geliat demokrasi yang sering muncul tidak menyimpang dari tatakrama dan sopan santun sebagai penduduk kota Yogyakarta. Pembinaan terhadap sikap santun berpolitik perlu dilakukan, sebab selama ini aktivitas politik terutama ketika apel akbar dan berkampanye sangat jauh dari tatakrama dan adat istiadat. Bahkan kesan arogansi yang berlebihan yang sering muncul. Ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap partai politik perlu menekankan budaya Yogyakarta. Ke depan yang perlu diefektifkan dalam pembinaan parpol adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpolitik dan beraktivitas politik yang damai dan menjaga ketertiban lingkungan.

## Q. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang *up date*.

Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2012 hingga 2016 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

Tabel 2.3.2.Q.1

## Publikasi Buku Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Buku “Kota Dalam Angka”	Eksemplar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku “PDRB Kota”	Eksemplar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2017

Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistik Kota Yogyakarta telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhan pengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia. Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaan yang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya penyebutan jumlah eksemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalam perencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.

## R. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku, tetapi inisiatif untuk mengelola arsip secara baku sangat tergantung dari kesadaran setiap Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan oleh semua Perangkat Daerah yang ada di Kota Yogyakarta dan terus berlangsung hingga tahun 2016.

Tabel 2.3.2.R.1

Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	Unit	150	150	156	156	154
Jumlah Perangkat Daerah	Unit	150	150	156	156	154
<b>Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012,2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Terkait dengan pengelolaan arsip, pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki 21 pejabat fungsional arsiparis. Pejabat tersebut berada di Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah yang memiliki tugas keliling ke setiap Perangkat Daerah. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola kearsipan.

Tabel 2.3.2.R.2

Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kali	4	6	6	6	6

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta 2012,2015,2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini di tahun 2012 dilakukan 4 kali dalam setahun, dan diikuti oleh semua Perangkat Daerah. Empat kegiatan tersebut adalah kegiatan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan untuk penyusutan arsip-arsip dan kegiatan akuisisi.

Kegiatan peningkatan pengelolaan SDM masih terus dilakukan hingga tahun 2013, 2014, 2015 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi enam kali. Kegiatan tersebut berupa bimbingan teknis petugas arsip, bimbingan teknis pengembangan profesi Arsiparis, FKA (Forum Komunikasi Arsiparis Kota Yogyakarta), FKPK (Forum Komunikasi Petugas Kearsipan), FMK (Forum Masyarakat Kearsipan) DIY dan Pendampingan ke Perangkat Daerah.

### 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### A. Pertanian

##### 1. Peningkatan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Analisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Jika dilihat dari produksinya, padi merupakan jenis tanaman utama di Kota Yogyakarta sementara bahan pangan lokal lainnya masih memiliki kontribusi yang sangat kecil. Sedangkan apabila dilihat dari perkembangan produksi tanaman padi selama tahun 2012 – 2016, diketahui bahwa produksinya cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -10,99 persen per tahun.

Tabel 2.3.3.A.1

Produksi Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Padi	1.121	1.101	954	764	696	-10,99

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017

Penurunan produksi padi tersebut terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan umumnya disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam. Baik hasil panen maupun luasan panen menunjukkan pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya. Meski demikian, penurunan hasil panen terjadi lebih cepat dibandingkan penurunan luas panen, sehingga hal tersebut menyebabkan produktivitas padi mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel 2.3.3.A.2

Luas Panen Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Padi	169	166	149	130	108	-10,42

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017

Hasil panen padi di tahun 2016 adalah sebesar 696 ton. Jumlah tersebut merupakan penurunan yang cukup besar dari tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -10,99 persen per tahun. Luas

panen padi juga menurun dalam kurun waktu 2012-2016 dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -10,42 persen. Meskipun hal ini wajar terjadi di perkotaan, akan tetapi penurunan ini tetap harus dikelola dan dikendalikan agar Kota Yogyakarta memiliki ketahanan dalam penyediaan pangan untuk penduduknya dan tidak terlalu bergantung pada wilayah lainnya.

Tabel 2.3.3.A.3

## Total Produktivitas Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (ton/Ha)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Padi	6,63	6,63	6,4	5,88	6,4	-0,69

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

## 2. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah dapat dilihat berdasarkan kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB total. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB cenderung menurun dari tahun 2012 – 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,86 persen per tahun. Nilai PDRB sektor pertanian cenderung naik turun pada kurun waktu tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2016, nilai PDRB sektor pertanian sedikit meningkat dari tahun 2015, yaitu menjadi 36,37 miliar rupiah.

Sektor pertanian di Kota Yogyakarta merupakan sektor minoritas dan perkembangannya kalah cepat dengan sektor-sektor basis di daerah perkotaan. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan PDRB sektor pertanian bernilai positif yaitu sebesar 13,64 persen per tahun. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta semakin menurun. Pada tahun 2012, sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,18% dari total seluruh PDRB. Persentase tersebut terus menurun hingga sebesar 0,16 persen di tahun 2016. Meski kontribusi sektor pertanian cenderung menurun, pertumbuhan positif dari PDRB sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor ini masih mampu bertahan di tengah kompetisi perkembangan sektor lainnya.

Tabel 2.3.3.A.4

## Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rp	19.189.074,78	20.239.557,65	21.307.763,56	22.393.014,53	23.538.101,79	5,24
2	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Juta Rp	35.709,06	36.100,01	35.733,80	36.052,73	36.377,25	0,468
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	0,62	2,95	-1,01	0,89	0,90	13,64
4	<b>Kontribusi Pertanian terhadap PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>-2,86</b>

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

### 3. Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan)

Sektor pertanian/perkebunan memiliki beberapa sub sektor dengan kontribusi berbeda-beda. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan masih kalah besar bila dibandingkan dengan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya. Nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan pada tahun 2012 – 2016 cenderung fluktuatif, seiring dengan nilai PDRB sektor pertanian yang juga menunjukkan fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan sebesar 0,166 persen per tahun. Meski pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan tergolong lambat, tetapi pertumbuhan tahunannya cenderung positif. Sebaliknya, kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB sektor pertanian cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,32 persen per tahun.

Tabel 2.3.3.A.5

Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB ADHK Pertanian/Perkebunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	Juta Rp	35.709,06	36.100,01	35.733,80	36.052,73	36.377,25	0,468
2	Nilai PDRB Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan	Juta Rp	3.163,10	3.165,90	3.119,40	3.166,70	3.183,3	0,166
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan	Persen	0,75	0,09	-1,47	1,52	0,53	-522,47
4	<b>Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB Sektor Pertanian /Perkebunan</b>	<b>Persen</b>	<b>8,48</b>	<b>7,97</b>	<b>8,22</b>	<b>8,59</b>	<b>8,34</b>	<b>-0,32</b>

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan, 2017  
Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

#### 4. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Perkebunan) Terhadap PDRB

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor dengan kontribusi terendah kedua setelah sub sektor kehutanan. Nilai PDRB sektor ini cenderung stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,63 persen per tahun dari tahun 2012 – 2016. Sementara itu, jika ditinjau dari pertumbuhan tahunannya, sub sektor perkebunan cenderung tidak mengalami pertumbuhan (stabil). Selama kurun waktu 2012 – 2016, sub sektor perkebunan hanya tumbuh positif sebesar 0 persen di tahun 2013. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian/perkebunan juga cenderung stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0 persen per tahun. Pada tahun 2012, kontribusi sub sektor perkebunan adalah sebesar 0,01 persen dari sektor pertanian/perkebunan dan pada tahun 2016 kontribusinya tetap, yaitu sebesar 0,01 persen.

Tabel 2.3.3.A.6

Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan	Juta Rp	35.709,06	36.100,01	35.733,80	36.052,73	36.377,25	0,468
2	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan	Juta Rp	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	0,63
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
4	<b>Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap Sektor Pertanian/ Perkebunan</b>	Persen	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

### 5. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Yogyakarta. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Tabel 2.3.3.A.7

Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda	Kelompok	53	6	0	19	24	-40,59
2	Total Kelompok Petani/ Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	165	175	175	206	210	6,43

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 6,43 persen per tahun pada rentang waktu 2012 – 2016. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda, jumlahnya cenderung fluktuatif, bahkan sempat mencapai angka 0 pada tahun 2014. Ketiadaan kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun 2014



dikarenakan adanya peralihan pemerintahan (periode pergantian presiden) sehingga pada saat itu terjadi banyak perubahan sistem pada instansi-instansi pemerintah sehingga beberapa pelaksanaan program ditunda, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial. Meski demikian, jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemda kembali meningkat di tahun 2015 menjadi 19 kelompok dan di tahun 2016 terdapat 24 kelompok yang mendapat bantuan tersebut.

## B. Energi dan Sumberdaya Mineral

### 1. Perumbuhan Kontribusi Sektor Penggalian Terhadap PDRB

Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor basis di Kota Yogyakarta. Dari tahun 2012 – 2016, nilai PDRB sektor penggalian di Kota Yogyakarta hanya berada pada kisaran 830-856 juta rupiah. Rendahnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Yogyakarta disebabkan oleh sumber bahan galian berupa pasir yang hanya berasal dari endapan aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Apabila dilihat dari segi perkembangannya, nilai PDRB sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang positif meskipun lambat. Nilai sektor pertambangan ini terus meningkat setelah adanya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 0,56 persen per tahun. Pertumbuhan PDRB sektor penggalian dan pertambangan yang paling tinggi selama tahun 2012 – 2016 yaitu sebesar 1,31 persen di tahun 2014. Meski demikian, pada tahun 2012 – 2016, kontribusi sektor ini meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0 persen per tahun.

Tabel 2.3.3.B.1

Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rp	19.189.074,78	20.239.557,65	21.307.763,56	22.393.014,53	23.538.101,79	5,24
2	Nilai PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp	837,12	839,01	850,01	851,20	856,14	0,56
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Penggalian dan Pertambangan	Persen	0,70	0,23	1,31	0,14	0,58	156,85
4	Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambanga terhadap PDRB	Persen	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

## C. Pariwisata

### 1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Tabel 2.3.3.C.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kunjungan Wisman	Kunjungan	283.727	179.387	273.448	393.082	208.023	3,08
2	Kunjungan Wisnu	Kunjungan	2.611.453	2.536.093	2.733.805	2.857.599	3.053.725	4,08
<b>Jumlah</b>		<b>Kunjungan</b>	<b>2.895.180</b>	<b>2.715.480</b>	<b>3.007.253</b>	<b>3.250.681</b>	<b>3.261.748</b>	<b>3,24</b>
<b>Target Daerah</b>		<b>Kunjungan</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.812.160</b>	<b>3.041.632</b>	<b>5,03</b>
<b>Tingkat Realisasi Kunjungan</b>		<b>Persen</b>	<b>111,35</b>	<b>100,42</b>	<b>106,93</b>	<b>111,15</b>	<b>107,24</b>	<b>-0,73</b>

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Dilihat dari perkembangan realisasi kunjungan wisata, selama tahun 2012 – 2016, kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta berhasil melampaui target kunjungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, persentase tingkat realisasi kunjungan pada tahun 2012 – 2016 memiliki rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,73 persen per tahun. Pada tahun 2012, kunjungan wisatawan mencapai 2.895.180 kunjungan dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.261.748 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara cenderung naik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi. Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta tentunya tidak terlepas dari promosi wisata dan *branding* yang telah banyak dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta.

### 2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2012 – 2016, nilai PDRB akomodasi dan makan minum terus menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai -4,84 persen per tahun. Dari segi kontribusinya, sektor ini juga mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2012 – 2016. Pertumbuhan rata-ratanya mencapai 0,57 persen per tahun. Pada tahun 2012, kontribusinya sebesar 11,38 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,64 persen.

Tabel 2.3.3.C.2

Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rp	19.189.074,78	20.239.557,65	21.307.763,56	22.393.014,53	23.538.101,79	5,24
2	Nilai PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rp	2.183.269,65	2.320.365,42	2.444.064,84	2.589.749,81	2.740.135,53	5,84
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	Persen	7,18	6,28	5,59	5,99	5,81	-4,84
4	<b>Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>11,38</b>	<b>11,46</b>	<b>11,50</b>	<b>11,59</b>	11,64	<b>0,57</b>

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

#### D. Perdagangan

##### 1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Yogyakarta. Sektor perdagangan dalam PDRB Kota Yogyakarta terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdagangan besar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Dilihat dari segi pertumbuhannya, nilai PDRB sektor perdagangan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 5,72 persen per tahun. Namun, pertumbuhan tahunan dari sektor perdagangan ini cenderung menurun. Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama kurun waktu 2012 – 2016 cenderung fluktuatif dengan tren meningkat serta rata-rata pertumbuhan yang lambat yaitu sebesar 0,47 persen per tahun.

Tabel 2.3.3.D.1

## Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rp	19.189.074,78	20.239.557,65	21.307.763,56	22.393.014,53	23.538.101,79	5,24
2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Juta Rp	1.326.260,70	1.407.238,60	1.468.894,10	1.552.644,80	1.656.673,7	5,72
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,32	6,11	5,23	5,99	5,54	-2,68
4.	<b>Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>6,91</b>	<b>6,95</b>	<b>6,95</b>	<b>7,01</b>	7,04	<b>0,47</b>

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan.2017

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 6,91 persen. Kontribusi sektor perdagangan tertinggi yaitu pada tahun 2013, yaitu sebesar 6,95 persen, dan meningkat menjadi 7,04 persen di tahun 2016.

## 2. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2012 – 2016, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai -26,66 persen per tahun. Nilai ekspor di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebesar 119 juta US\$, tetapi turun menjadi 17,2 juta US\$ di tahun 2013, dan terus menurun hingga sebesar 13,5 juta US\$ di tahun 2016. Meski menurun, nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan nilai impor yang cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016. Hal ini menyebabkan ekspor bersih perdagangan juga cenderung fluktuatif, bahkan sempat mencapai -20 juta US\$ di tahun 2013 karena nilai impor di tahun tersebut dua kali lipat lebih besar dari nilai ekspor.

Tabel 2.3.3.D.2

## Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Nilai Ekspor	US \$	119.048.049	17.217.091	16.626.476	13.057.831,64	13.555.070	-26,66
2	Nilai Impor	US \$	13.061.918	37.269.427	228.241	6.832.100	8.198.257	-794,83
	<b>Ekspor Bersih Perdagangan</b>	<b>US \$</b>	<b>105.986.131</b>	<b>-20.052.336</b>	<b>16.398.235</b>	<b>6.225.731</b>	<b>5.356.813</b>	<b>-94,17</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangan kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskan untuk membantu UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perak dan pemanfaatan limbah yang dijadikan produk kerajinan. Melalui intervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha semakin baik dan berdaya saing.

### 3. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, *gap* yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satu pelaku usaha informal di Kota Yogyakarta adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari tahun 2012 – 2016, jumlah eksisting PKL di Kota Yogyakarta terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 18,63 persen per tahun. Pada tahun 2012 tercatat jumlah PKL sebanyak 3.907 unit dan meningkat menjadi 7.100 unit di tahun 2016.

Tabel 2.3.3.D.3

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Eksisting PKL	Unit	3.907	6.406	6.776	7.070	7.100	18,63
2	PKL Berizin	Unit	1.858	2.242	2.371	5.495	5.495	39,54
3	Persentase PKL Berizin	Persen	47,56	35,00	34,99	77,72	77,39	23,81

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017

Seluruh PKL di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2016 belum sepenuhnya memiliki izin dari pemerintah daerah. Persentase PKL yang berizin menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2014 – 2016 dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 23,81 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan PKL berizin jauh lebih tinggi dari jumlah eksisting PKL, sehingga diharapkan kedepannya seluruh eksisting PKL di Kota Yogyakarta memiliki izin dari pemda. Untuk mewujudkan hal itu, perlu diadakan pendataan sekaligus pembinaan PKL agar seluruh PKL yang ada di Kota Yogyakarta mendapat legalitas dalam berjualan dan mengurangi resiko perselisihan dengan pemerintah.

## E. Perindustrian

### 1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang berkontribusi paling besar dalam PDRB Kota Yogyakarta. Nilai PDRB sektor industri pengolahan mengalami kenaikan dari tahun 2012 – 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,27 persen per tahun. Pada tahun 2012, nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 2,63 triliun rupiah dan meningkat menjadi 3,12 triliun rupiah di tahun 2016. Nilai PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan positif tetapi pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Sebaliknya, kontribusi sektor industri cenderung menurun dari tahun 2012 – 2016. Pertumbuhan rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan adalah sebesar -0,81 persen per tahun. Kontribusi yang terus menurun tersebut diakibatkan

pertumbuhan sektor lainnya yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri dalam konteks PDRB Kota Yogyakarta. Berdasarkan data PDRB ADHK Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016, kontribusi terbesar dalam PDRB sektor industri disumbang dari sub sektor industri makanan dan minuman.

Tabel 2.3.3.E.1

## Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Nilai PDRB	Juta Rp	19.189.074,78	20.239.557,65	21.307.763,56	22.393.014,53	23.538.101,79	5,24
2	Nilai PDRB Sektor Industri	Juta Rp	2.630.976,60	2.813.952,70	2.943.834,50	2.995.839,50	3.123.936,80	13,27
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Persen	-2,87	6,95	4,62	1,79	4,25	-74,88
4	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	13,71	13,90	13,82	13,38	13,27	-0,81

Sumber . PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

## 2. Pertumbuhan Industri

Industri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumah tangga, kecil, sedang dan besar. Dari tahun 2012 – 2016, jumlah unit industri terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 61 persen per tahun. Pada tahun 2012, jumlah unit industri di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 4.888 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 6.968 unit pada tahun 2016. Pertumbuhan unit industri paling besar adalah pada tahun 2013, dimana pertumbuhan unit industri adalah sebesar 16,94 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.3.E.1

## Pertumbuhan Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Unit usaha industri	Unit	4.888	5.716	5.929	6.222	6.968	9,41
Pertumbuhan	Persen	6,86	16,94	3,73	4,94	12	61

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan 2017

## 3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, diketahui bahwa keseluruhan pengrajin di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 – 2016 tergabung dalam kelompok/paguyuban. Pada tahun 2012, terdapat 33 kelompok pengrajin dan pada tahun 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 50 kelompok. Semua kelompok ini mendapatkan bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk modal alat maupun

pembinaan pada tahun 2012 – 2016, tetapi pada tahun 2016, hanya 8 kelompok saja yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Jumlah kelompok pengrajin mengalami rata-rata pertumbuhan positif setiap tahunnya sebesar 11,20 persen. Peningkatan jumlah kelompok pengrajin tersebut terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang industri. Namun, jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari pemda justru menurun cukup banyak pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok pengrajin yang sudah ada, diharapkan dapat terus berkembang secara mandiri meskipun bantuan dari pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh kelompok pengrajin. Selain itu, pengawasan dan pembinaan secara terus menerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Tabel 2.3.3.E.3

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	Kelompok	33	39	40	42	8	-13,80
2	Total Kelompok Pengrajin	Kelompok	33	39	40	42	50	11,20

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017

## F. Perikanan

### 1. Produksi Perikanan Darat

Berdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatan perikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yang dibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal. Apabila dilihat dari perkembangannya selama tahun 2012 – 2016, diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, tingkat realisasi hanya sebesar 82,67 persen sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 55,59 persen. Secara umum, produksi ikan tertinggi ada di tahun 2013, yaitu sebesar 132.351 kg. Pada tahun itu pula, target daerah mencapai angka tertinggi, yaitu mencapai 90.000 kg. Pertumbuhan rata-rata produksi ikan terus mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan sebesar -4,68 persen.

Tabel 2.3.3.F.1

Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Ikan	Kg	72.662	132.351	63.000	46.183	36.132	-4.68
2	Target Daerah	Kg	88.000	90.000	65.000	65.000	65.000	-6.38
	<b>Tingkat Realisasi</b>	<b>Persen</b>	<b>82,67</b>	<b>147,06</b>	<b>96,92</b>	<b>71,05</b>	<b>55,59</b>	<b>-1.16</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

## 2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakarta merupakan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan dari daerah lain. Konsumsi ikan di Kota Yogyakarta berada pada kisaran angka 32 ton setiap tahunnya. Tingkat realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2016 cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -1,21 persen per tahun. Secara umum, realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2016 telah melebihi target yang dikehendaki. Namun, jumlah konsumsi ikan cenderung fluktuatif, sementara itu target konsumsi ikan terus meningkat. Pada tahun 2012, tingkat realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 107,07 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 102,00 persen.

Tabel 2.3.3.F.2

### Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Konsumsi Ikan	Ton	32,12	32,14	32,15	32,15	32,13	0,01
2	Target Daerah	Ton	30,00	30,50	30,50	31,50	31,50	1,23
<b>Tingkat Realisasi</b>		<b>Persen</b>	<b>107,07</b>	<b>105,38</b>	<b>105,41</b>	<b>102,06</b>	<b>102,00</b>	<b>-1,21</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017.

## 3. Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di Kota Yogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikan menjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaan terhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran. Dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016, jumlah kelompok pengusaha budidaya perikanan di Kota Yogyakarta memiliki pertumbuhan negatif sebesar -5,3 persen per tahun. Pada tahun 2012, jumlah kelompok budidaya perikanan adalah sebesar 63 kelompok dan pada tahun 2016 turun menjadi 41 kelompok. Pada tahun 2012, dari total kelompok pengusaha perikanan budidaya sebanyak 63 kelompok, hanya 5 kelompok yang mendapatkan bantuan/binaan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2016, tidak ada kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapatkan bantuan dari pemda. Sejak tahun 2014 – 2015, jumlah kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapatkan bantuan dari pemda mengalami penurunan.



Tabel 2.3.3.F.3

Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan Yang Mendapat Bantuan Pemda	Kelompok	5	8	5	1	0	-39,38
2	Total Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan	Kelompok	63	51	38	58	41	-5,3

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

## G. Ketransmigrasian

### 1. Jumlah Transmigran Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2012 – 2016, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari Kota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat kekhawatiran masyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa. Sementara itu, jumlah KK dan individu yang mengikuti transmigrasi umum pada tahun 2012 – 2016 cenderung turun naik. Pada tahun 2012, jumlah KK yang mengikuti transmigrasi umum yaitu sebesar 19 KK (64 individu) dan sempat turun menjadi hanya 5 KK saja pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 – 2016, jumlah KK dan individu yang ikut transmigrasi umum kembali meningkat.

Tabel 2.3.3.G.1

Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Transmigrasi Swakarsa</b>						
	Kepala Keluarga	KK	0	0	0	0	0
	Individu	Jiwa	0	0	0	0	0
2	<b>Transmigrasi Umum</b>						
	Kepala Keluarga	KK	19	15	5	12	13
	Individu	Jiwa	64	46	15	39	43
3	<b>Jumlah Total Transmigrasi</b>						
	Kepala Keluarga	KK	19	15	5	12	13
	Individu	Jiwa	64	46	15	39	43

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### A. Pengeluaran Konsumsi per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Selama rentang waktu tahun 2012 – 2015, pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan tertinggi ada pada kelompok pengeluaran non makanan yaitu sebesar 9,95 persen per tahun. Sebaliknya, pengeluaran untuk makanan cenderung turun naik selama 5 tahun terakhir. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan tidak lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Tabel 2.4.1.A.1

Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

Indikator	Satuan	2012	2013	2014*	2015**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Pengeluaran Makanan	Juta Rp	3.029.122	3.113.589	3.200.650	2.324.031	-7,27
Pengeluaran Non Makanan	Juta Rp	7.186.957	7.606.609	8.095.979	9.518.585	9,95
Jumlah Pengeluaran	Juta Rp	10.216.079	10.720.198	11.296.629	11.842.616	5,05
Jumlah Penduduk	Jiwa	394.012	402.679	400.467	409.487	1,20
Pengeluaran per Kapita per Tahun	Juta Rp	25,93	26,62	28,21	28,92	3,72
Pengeluaran per Kapita per Bulan	Juta Rp	2,16	2,22	2,35	2,41	3,73

Sumber: PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016): Hasil Olahan, 2017.

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

#### B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

Selama rentang tahun 2012 – 2015, diketahui bahwa pola konsumsi rumah tangga per kapita untuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanan. Lebih tingginya konsumsi non pangan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh tipologi masyarakat yang merupakan penduduk perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau dari pertumbuhannya,

persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga seluruhnya mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,67 persen per tahun.

Tabel 2.4.1.A. 2

## Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

Indikator	Satuan	2012	2013	2014*	2015**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Pengeluaran Non Makanan	Juta Rp	7.186.957	7.606.609	8.095.979	9.518.585	9,95
Jumlah Pengeluaran	Juta Rp	10.216.079	10.720.198	11.296.629	11.842.616	5,05
<b>Persentase Pengeluaran Non Pangan</b>	<b>Persen</b>	<b>70,35</b>	<b>70,96</b>	<b>71,67</b>	<b>80,38</b>	<b>4,67</b>

Sumber: PDRB Menurut Penggunaan ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016): Hasil Olahan, 2017

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

### C. Produktivitas Total Daerah

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam 3 sektor besar yaitu *agriculture*, *manufacture*, dan *services*. Sektor *agriculture* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *manufacture* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *service* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasa lainnya.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah *manufacture*, meskipun jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektor *services*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor *services* merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor *manufacture*. Meskipun demikian, produktivitas sektor *service* ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,86 persen per tahun.

Tabel 2.4.1.A. 3  
Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2015

Nilai PDRB ADHK							
Lapangan Usaha	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
<i>Agriculture</i>	Juta Rp	35.709,1	36.100,1	35.733,8	36.052,7	36.377,3	0,32
<i>Manufacture</i>	Juta Rp	4.233.608,80	4.493.200,10	4.699.987,50	4.818.686,30	3.123.936,8	4,42
<i>Service</i>	Juta Rp	14.919.757,00	15.710.257,50	16.576.422,20	17.557.436,60		5,58
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja							
Lapangan Usaha	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
<i>Agriculture</i>	Jiwa	756	471	1.314	3.200	6400	94,94
<i>Manufacture</i>	Jiwa	30.897	31.753	40.642	32.805	55.674	3,83
<i>Service</i>	Jiwa	169.987	162.512	174.212	174.044	19.102	0,90
Total Produktivitas							
Lapangan Usaha	Satuan	2012	2013	2014	2015*	2016**	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
<i>Agriculture</i>	Juta Rp/ Jiwa	47,23	76,65	27,19	11,27		-20,26
<i>Manufacture</i>	Juta Rp/ Jiwa	137,02	141,50	115,64	146,89		4,01
<i>Service</i>	Juta Rp/ Jiwa	87,77	96,67	95,15	100,88		4,86

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016, (BPS Kota Yogyakarta, 2017); Kota Yogyakarta dalam Angka 2017 Hasil Olahan, 2017.

Keterangan: (\*) Angka Sementara (\*\*) Angka Sangat Sementara

Nilai pertumbuhan rata-rata pertahun diatas dihitung dari tahun 2012-2015. Karena pada tahun 2016 ada perubahan pengelompokkan sektor PDRB dan metode penghitungannya sehingga tidak dapat dibandingkan.

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### A. Perhubungan

Aspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakni indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan indikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yang sama di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak memiliki terminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni Terminal Giwangan.

### 1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah dengan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

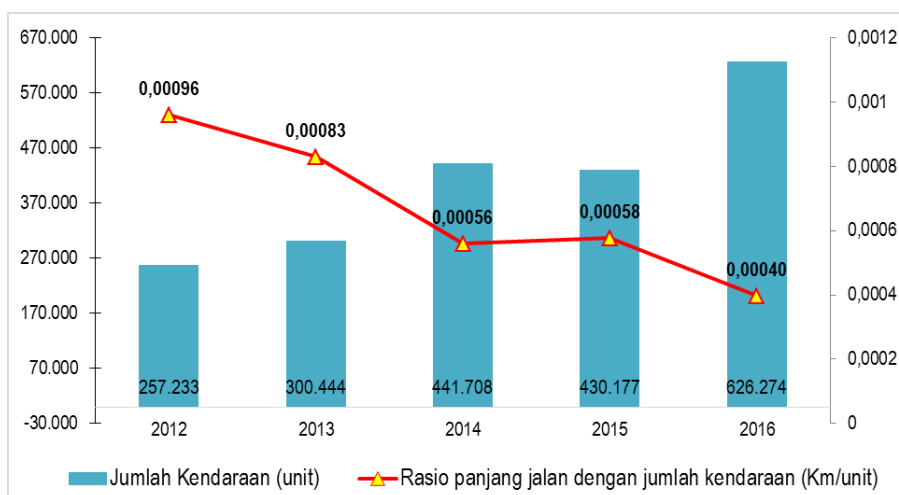
Tabel 2.4.2.A.1

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Panjang Jalan	Km	248,09	248,09	248,09	248,09	248,09	0,00
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	257.233	300.444	441.708	430.177	626.274	26,70
3.	<b>Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan</b>	<b>Km/unit</b>	<b>0,00096</b>	<b>0,00083</b>	<b>0,00056</b>	<b>0,00058</b>	<b>0,00040</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Panjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruas jalan yang dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki panjang yang sama, yakni sepanjang 248,09 km. Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta terbilang cukup tinggi setiap tahunnya yang dibuktikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 26,70% per tahun, yakni 257.233 unit kendaraan pada tahun 2012 meningkat menjadi 6.26.274 unit kendaraan pada tahun 2016. Meskipun demikian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebenarnya terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor sejumlah 11.531 unit kendaraan.



Gambar 2.4.2.A.1 Grafik Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Jumlah panjang jalan yang cenderung tetap dan jumlah kendaraan yang terus meningkat menyebabkan nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2014 memiliki kecenderungan menurun namun kembali meningkat hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahunnya cukup besar dan tidak sebanding dengan penambahan panjang jalan yang ada.

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

## 2. Rasio Angkutan Umum yang Melewati Kota Yogyakarta per 1000 Penduduk

Rasio jumlah angkutan darat per penumpang angkutan darat adalah angka yang memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio jumlah angkutan darat adalah jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat pada tahun tersebut.

Tabel 2.4.2.A.2

Rasio Jumlah Angkutan Darat per Penumpang Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1.	Jumlah angkutan darat	Unit	11.737	12.011	11.663	12.803	12.106	0,94
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa	2.324.913	2.488.859	2.364.416	2.121.076	1.970.096	-3,84
3.	<b>Rasio jumlah angkutan darat dengan penumpang angkutan darat</b>	<b>Unit/Jiwa</b>	<b>0,005</b>	<b>0,0048</b>	<b>0,0049</b>	<b>0,006</b>	<b>0,006</b>	<b>5,13</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 Hasil Olahan, 2017

Mulai tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah penumpang angkutan darat cenderung mengalami penurunan, meskipun demikian jumlah unit angkutan darat di Kota Yogyakarta tidak serta merta mengalami penurunan yang sama, namun cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 jumlah kendaraan cenderung meningkat dari yang semula di tahun 2012 hanya berjumlah 11.737 unit menjadi 12.106 unit di tahun 2016. Kenaikan jumlah ini memperbesar rasio jumlah angkutan darat dengan penumpang angkutan yang semula di tahun 2012 menunjukkan rasio 0,005 menjadi 0,006 di tahun 2016.

## 3. Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal dan Stasiun

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (*cargo*). Jumlah penumpang bis melalui terminal di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -3,84% per tahun, yakni 2.324.913 orang pada tahun 2012 menurun menjadi 1.970.096 orang pada tahun 2016.

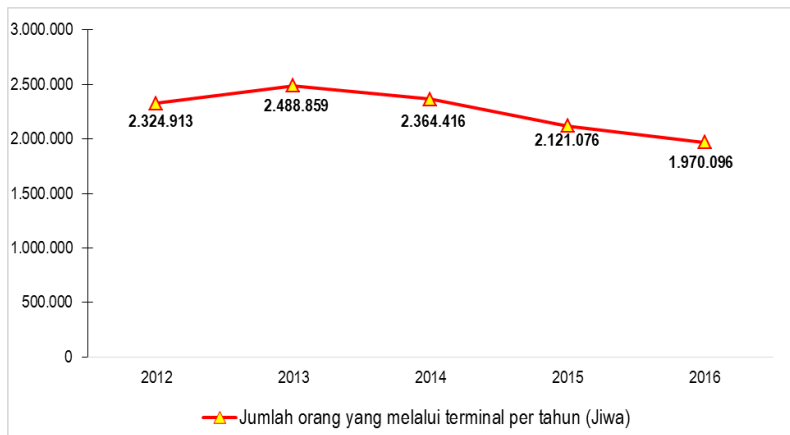
Tabel 2.4.2.A.3

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah orang yang melalui terminal per tahun	Jiwa	2.324.913	2.488.859	2.364.416	2.121.076	1.970.096	-3,84

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017, Hasil Olahan (Data Tahun 2015-2016)

Data mengenai indikator jumlah arus penumpang angkutan umum diperoleh dari jasa ruang tunggu terminal (Terminal Giwangan), bukan dari penjualan karcis sehingga tidak diketahui apakah penumpang tersebut menggunakan jasa bis antar kota atau dalam kota, sehingga diduga masih banyak penumpang angkutan umum (bis khususnya) yang tidak terhitung. Dengan kata lain, jumlah arus penumpang angkutan umum masih lebih tinggi lagi apabila dibandingkan dengan data yang terdata oleh Dinas Perhubungan tersebut, karena penumpang bis yang tidak turun ke ruang tunggu (tetap berada di dalam bis) tidak dihitung.



Gambar 2.4.2.A.2 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012 -2016

Sumber : Hasil Olahan, 2016

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan meningkat, yakni 2.648.727 penumpang pada tahun 2012 meningkat menjadi 4.073.038 penumpang pada tahun 2016. Jumlah penumpang kelas ekonomi memiliki jumlah penumpang dengan kecenderungan meningkat paling signifikan pada tahun yang sama (tahun 2012 hingga tahun 2016) yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,18 persen per tahun. Sementara itu penumpang kelas eksekutif dan kelas bisnis juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 11,77 persen per tahun dan 2,11 persen per tahun. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah penumpang kereta dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,94 persen per tahun.

Tabel 2.4.2.A.4

Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta Berdasarkan Kelasnya Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah penumpang kelas eksekutif	Orang	697.261	775.144	801.674	980.982	1080.324	11,77
2.	Jumlah penumpang kelas bisnis	Orang	612.806	590.776	590.661	654.134	662.662	2,11
3.	Jumlah penumpang kelas ekonomi	Orang	1.338.660	1.263.593	1.347.769	1.908.023	2.330.002	16,18
4.	<b>Total penumpang melalui stasiun</b>	<b>Orang</b>	<b>2.648.727</b>	<b>2.629.513</b>	<b>2.740.104</b>	<b>3.543.139</b>	<b>4.073.038</b>	<b>11,94</b>

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2017, Badan Pusat Statistik

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta juga mengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlah bahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2012 hingga tahun 2015, yakni sebanyak 166.154 ton pada tahun 2012 meningkat menjadi 190.640 ton pada tahun 2015. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun, yakni sebanyak 11.170 ton pada tahun 2012 menurun menjadi 8.910 ton pada tahun 2015 (pertumbuhan rata-rata -5,16 persen per tahun).

Tabel 2.4.2.A.5

Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Bahan bakar minyak	Ton	166.154	214.456	195.929	190.640	212.559	7,31
2.	Barang hantaran potongan	Ton	11.170	12.465	13.040	8.910	8705	-4,44
3.	<b>Total angkutan barang melalui terminal</b>	<b>Ton</b>	<b>177.324</b>	<b>226.921</b>	<b>208.969</b>	<b>199.550</b>	<b>221.264</b>	<b>6,61</b>

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik

## B. Penataan Ruang

Penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 ini terdapat enam indikator, yakni ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas



wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Seperti halnya dengan urusan yang lain, terdapat indikator yang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Yogyakarta, seperti indikator luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan, sehingga indikator wilayah perkotaan pada urusan penataan ruang ini diabaikan. Indikator tersebut lebih relevan apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten. Selain itu juga terdapat beberapa indikator yang menggunakan data isian yang lain, yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

### 1. Persentase Luas Wilayah Produktif

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah produktif adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sebagai wilayah perkotaan, wilayah produktif di Kota Yogyakarta didekati dengan penjumlahan luasan jenis penggunaan lahan perumahan, jasa, perusahaan, industri, dan pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.4.2.B.1

Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah Luas Wilayah Produktif	Ha	2.842,89	2.843,40	2.844,26	2.844,25	2.846,22	0,03
2.	Jumlah Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0,00
3.	<b>Persentase Luas Wilayah Produktif</b>	<b>Persen</b>	<b>87,47</b>	<b>87,49</b>	<b>87,52</b>	<b>87,52</b>	<b>87,58</b>	<b>0,03</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2011-2015, Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembanding dalam indikator luas wilayah produktif merupakan data yang bersumber dari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Jumlah luas wilayah produktif di Kota Yogyakarta berbanding lurus dengan persentase luas wilayah produktif yang dihasilkan, yakni memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,03 persen per tahun. Secara karakteristik wilayah, indikator yang lebih tepat digunakan untuk wilayah Kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan indikator persentase penggunaan lahan hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penggunaan lahan.

Tabel 2.4.2.B.2

Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Peruntukan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
Perumahan	Persen	64,77	64,64	64,68	64,61	64,67	-0,04
Jasa	Persen	8,60	8,63	8,65	8,66	8,66	0,17
Perusahaan	Persen	9,05	9,25	9,33	9,48	9,53	1,30
Industri	Persen	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	0,00
Pertanian	Persen	3,44	3,36	3,25	3,16	3,11	-2,49
Non Produktif	Persen	0,58	0,57	0,54	0,54	0,48	-4,52
Lain-lain	Persen	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2011-2014, Hasil Olah

Tabel 2.4.2.B.2 mengindikasikan bahwa peruntukan perumahan memiliki luasan yang menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Pertumbuhan paling tinggi yaitu Perusahaan (1,30 persen) dan berikutnya Jasa (0,17). Selain kedua peruntukan lahan tersebut, peruntukan lahan lainnya mengalami pertumbuhan negatif atau pun stagnan (tetap). Berdasarkan persentasenya, perumahan memiliki persentase paling tinggi, yaitu 64,67 persen pada tahun 2016. Persentase tertinggi kedua yaitu peruntukan lain-lain sebesar 11,94 persen. Sementara itu, peruntukan perusahaan dan jasa sebesar 9,53 persen dan 8,66 persen.

## 2. Persentase Luas Wilayah Industri

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah industri adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sama halnya dengan indikator luas wilayah produktif, perhitungan jumlah luas wilayah industri juga menggunakan sumber data dari publikasi Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.4.2.B.3

Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah luas wilayah industri	Ha	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.	<b>Persentase luas wilayah industri</b>	<b>Persen</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>

Sumber :

1. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2011-2015, Hasil Olah
2. SIPD Numerik, 2016 (Data Tahun 2015-2016)

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembanding dalam indikator luas wilayah industri juga bersumber dari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Baik jumlah luas wilayah industri maupun persentase luas wilayah industri menunjukkan nilai yang sama dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014, dengan nilai persentase luas wilayah industri sebesar 1,61 persen.

Luas wilayah industri di Kota Yogyakarta relatif kecil karena sektor industri memang bukanlah sektor utama dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Wilayah industri di Kota Yogyakarta lebih banyak berupa sentra-sentra industri skala rumah tangga dan bukan industri skala besar dengan pabrik yang modern. Menurut

informasi yang diperoleh, seharusnya tidak ada lagi wilayah industri di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan wilayah industri telah dipindahkan ke daerah pinggiran kota, misalnya ke wilayah Piyungan.

### 3. Persentase Luas Wilayah Genangan

Indikator luas wilayah kebajiran sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 adalah dengan membandingkan antara jumlah wilayah kebajiran dengan jumlah luas wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Tidak didapatkan data mengenai data luas wilayah kebajiran, sehingga data mengenai luas wilayah kebajiran diganti dengan data luasan daerah rawan genangan.

Tabel 2.4.2.B.4

Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Luasan daerah rawan genangan	Ha	NA	10,08	7,62	7,76	7,54	-8,47
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	NA	3250	3250	3250	3250	0,00
3.	<b>Persentase luas wilayah genangan</b>	<b>Persen</b>	<b>NA</b>	<b>0,31</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>	<b>-8,54</b>

Sumber: Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

Luas daerah rawan genangan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2013-2016 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan berkurang. Pada tahun 2013 luasan daerah rawan genangan mencapai 10,08 hektar, menurun hingga 7,54 hektar pada tahun 2016 dengan angka pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -8,47 persen.

Tabel 2.4.2.B.5

Jumlah Titik Genangan di Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2016

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah genangan	Titik	50	35	31	28

Sumber: Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Jumlah titik genangan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan kecenderungan menurun, yakni 50 titik pada tahun 2013 menurun menjadi 28 titik pada tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada usaha yang cepat dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaiki sistem pembuangan air hujan agar genangan-genangan yang terjadi setelah hujan dapat diminimalisir.

### C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

#### 1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Pertumbuhan rata-rata jumlah bank umum dan BPR secara umum pada tahun 2012-2015 adalah sebesar 1,86 persen per tahun. Bank umum mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan BPR. Pertumbuhan BPR yang lebih tinggi ini salah satunya disebabkan oleh bunga pinjaman dari BPR lebih kecil dibandingkan bank umum sehingga banyak masyarakat yang menggunakan BPR dibandingkan bank umum untuk memperoleh pinjaman.

Tabel 2.4.2.C.1

## Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2012 - 2016

Variabel	Satuan	Per Desember 2012	Per Desember 2013	Per Desember 2014	Per Desember 2015	Per Desember 2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
KC Bank Umum	Unit	42	44	45	46	NA	3,09
KCP Bank Umum	Unit	87	88	87	87	NA	0,00
KK Bank Umum	Unit	40	41	43	43	NA	2,46
KP BPR	Unit	9	9	9	10	NA	3,70
KC BPR	Unit	4	6	7	7	NA	22,22
KK BPR	Unit	12	12	12	12	NA	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>194</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>205</b>	<b>NA</b>	<b>1,86</b>

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2011-2015 (Bank Indonesia:2011-2015): Hasil Olahan, 2017.

## 2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berdasarkan fungsinya, terdapat empat kategori perusahaan asuransi di Kota Yogyakarta yang meliputi asuransi jiwa, kredit, kerugian dan lainnya. Pada rentang tahun 2012 - 2016, jumlah perusahaan asuransi terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 14,73 persen per tahun dengan jumlah asuransi paling banyak yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung kerugian finansial akibat meninggalnya seseorang atau terlalu lamanya hidup seseorang.

Tabel 2.4.2.C.2

## Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Jenis Perusahaan	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Asuransi Jiwa	unit	11	13	13	14	18	13,67
Asuransi Kredit	unit	0	0	1	1	1	
Asuransi Kerugian	unit	6	8	8	8	9	11,46
Asuransi Lainnya	unit	5	5	6	9	10	20,28
<b>Jumlah</b>	<b>unit</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>14,73</b>

Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2012-2017: Hasil Olahan, 2017.

### 3. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Dari tahun 2012-2016, jumlah restoran dan jasa boga di Kota Yogyakarta cenderung meningkat. Sementara itu, jumlah kafe menurun pada tahun 2016. Secara keseluruhan, jumlah restoran, kafe, dan jasa boga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,89 persen per tahun. Perkembangan kafe adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan perkembangan restoran dan jasa boga.

Tabel 2.4.2.C.3

Jumlah Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Jenis Restoran	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
Restoran	Unit	271	280	313	328	350	6,65
Kafe	Unit	2	20	16	20	11	215,00
Jasa Boga	Unit	86	92	103	118	125	9,86
<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>359</b>	<b>392</b>	<b>432</b>	<b>466</b>	<b>486</b>	<b>7,89</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2016

### 4. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terkenal dengan wisata budayanya banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Yogyakarta.

Terdapat dua jenis hotel di Kota Yogyakarta, yaitu hotel berbintang dan hotel non bintang/melati. Selama kurun waktu 2012 – 2016, jumlah hotel kelas melati jauh lebih banyak dibandingkan hotel berbintang. Pada tahun 2016, jumlah hotel kelas melati di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 358 unit, sedikit menurun dari tahun 2015. Sementara itu, jumlah hotel bintang di tahun 2015 yaitu sebanyak 62 unit. Jumlah hotel berbintang terus meningkat sejak tahun 2012-2016 dengan pertumbuhan rata-rata 20,42 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan hotel bintang lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata hotel melati yang hanya sebesar 5,05 persen per tahun.

Tabel 2.4.2.C.4

## Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Hotel Bintang	Unit	31	38	38	41	62	20,42
	Hotel Bintang 5	Unit	3	3	3	4	4	8,33
	Hotel Bintang 4	Unit	4	5	5	6	9	23,75
	Hotel Bintang 3	Unit	9	10	10	9	20	30,83
	Hotel Bintang 2	Unit	3	11	11	11	20	87,12
	Hotel Bintang 1	Unit	12	9	9	11	9	-5,24
2	Hotel Non Bintang/Melati	Unit	314	330	353	367	358	3,39
	<b>Jumlah</b>	<b>Unit</b>	<b>345</b>	<b>368</b>	<b>391</b>	<b>408</b>	<b>420</b>	<b>5,05</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2015; Direktori Hotel & Akomodasi Lain di DIY, 2016; Hasil Olahan, 2017

#### D. Komunikasi dan Informatika

Urusan terakhir pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam aspek daya saing daerah ini memiliki tiga indikator, yakni indikator rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, serta indikator persentase penduduk yang menggunakan *handphone*/telepon. Sama halnya dengan indikator-indikator sebelumnya, terdapat indikator yang tidak relevan apabila digunakan untuk lingkup perkotaan seperti Kota Yogyakarta, yakni indikator mengenai persentase penduduk yang menggunakan *handphone*/telepon, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator tersebut ditiadakan. Sedangkan indikator rumah tangga yang menggunakan listrik sudah dibahas dalam urusan perumahan pada fokus layanan urusan wajib.

##### 1. Persentase Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

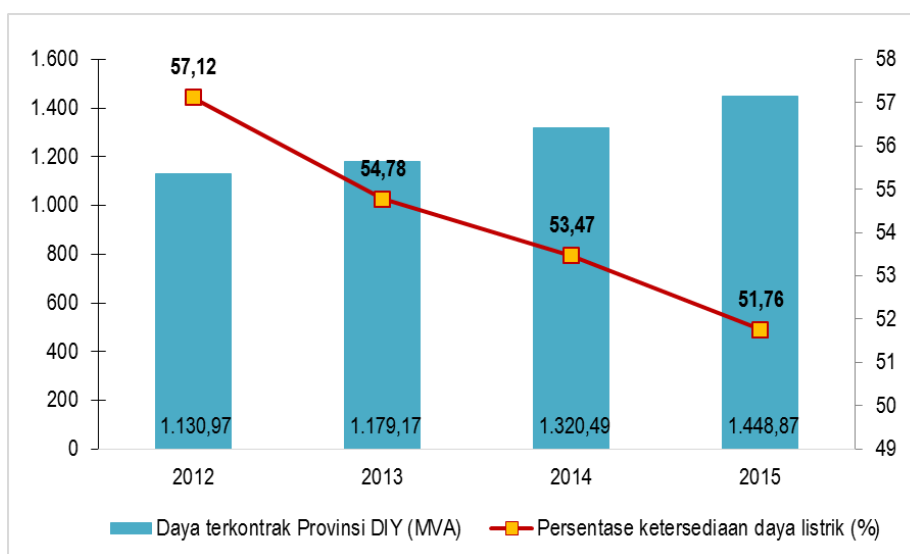
Tabel 2.4.2.D.1

## Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Daya Listrik Terpasang	MVA	646	646	706	750	NA	5,17
2.	Daya Terkontrak Provinsi DIY	MVA	1.130,97	1.179,17	1.320,49	1.448,87	NA	8,66
3.	<b>Persentase Ketersediaan Daya Listrik</b>	<b>Persen</b>	<b>57,12</b>	<b>54,78</b>	<b>53,47</b>	<b>51,76</b>	<b>NA</b>	<b>-3,23</b>

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Daya listrik terpasang di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 memiliki daya 646 MVA kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 706 MVA dan kembali meningkat di tahun 2015 sebesar 750 MVA, sehingga setiap tahun rata-rata pertumbuhan daya listrik terpasang di Kota Yogyakarta mencapai 5,17 persen. Kondisi ini dihadapkan dengan jumlah kebutuhan listrik dalam kurun waktu yang sama selalu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,66 persen per tahun, yakni 1.130,97 MVA pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.448,87MVA pada tahun 2015. Kenaikan besaran daya listrik terpasang dan juga disertai dengan pertumbuhan rata-rata kebutuhan listrik yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan rasio ketersediaan daya listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015, yakni sebesar 57,12 persen pada tahun 2012 menurun menjadi 51,76 persen di tahun 2015 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,23 per tahun.



Gambar 2.4.2.D.1 Grafik Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2015

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kota berkewajiban untuk mengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Pertumbuhan suatu daerah sangat tergantung dari kemampuan investasi. Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan. Pemerintah hendaknya memiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Kota Yogyakarta yang sudah sangat padat tentunya tidak memungkinkan lagi untuk memiliki kawasan industri. Namun demikian Kota Yogyakarta perlu meningkatkan investasi daerah dengan melalui pelayanan jasa.

Sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan melalui RPJPD 2005 – 2025 tentunya sudah memberikan arahan untuk memperbesar investasi di bidang pelayanan jasa.

Dukungan *goodwill* dan *political will* untuk meningkatkan investasi di bidang pelayanan jasa tidak terlepas dari *image* pelayanan Perangkat Daerah. Pada implementasi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diusahakan oleh daerah. Terkait dengan upaya meningkatkan iklim investasi lebih dekat dengan urusan yang bersifat konkuren atau pilihan. Keunggulan daerah khususnya dalam komoditas yang dapat mendongkrak investasi perlu dimunculkan. Jasa merupakan bagian komoditas unggulan yang dapat ditingkatkan di Kota Yogyakarta. Jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa lainnya merupakan pintu masuk investasi yang dapat ditingkatkan. Setidaknya menyambungkan antara kekayaan budaya, pariwisata, pendidikan, tata kehidupan yang tertib, aman dan damai sebagai prakondisi dalam peningkatan investasi merupakan modal dasar yang penting.

#### A. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Masalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untuk peningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali dari kekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi perlu ditumbuhkembangkan. Berikut adalah tabel mengenai angka kriminalitas di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.4.3.A.1

Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	457	2.078	1.956	2.002	1.660
Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282
<b>Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk</b>	<b>Kasus</b>	<b>10,69</b>	<b>51,1</b>	<b>47,25</b>	<b>48,89</b>	<b>39,88</b>

Sumber: Poltabes kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota 2013, 2015, 2016, SIPD Numerik 2017

Data angka kriminalitas di tahun 2013 dan 2014 dalam Tabel 2.4.3.A.1 merupakan jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta yang dicatat oleh Polresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas. Dilihat dari tabel 2.4.3.A.1. terjadi fluktuasi tindak kriminalitas sejak tahun 2012 hingga 2016, pernah rendah pada tahun 2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara itu menurun lagi pada tahun 2014 dan 2016 Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan cara perhitungan, perhitungan angka kriminalitas di tahun 2012 berbeda dengan cara perhitungan di tahun 2013, 2014 dan 2015. Angka kejahatan yang relatif tinggi akan dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Tentunya angka tersebut harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Kota Yogyakarta yang aman akan menimbulkan daya tarik investasi.

#### B. Jumlah Demo

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Di satu sisi unjuk rasa merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik, namun di sisi lain demonstrasi menjadi sebuah aktivitas yang menimbulkan



gangguan baik kecil maupun besar terhadap rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politis oleh kepentingan kelompok.

Tabel 2.4.3.B.1

Jumlah Demo di Kota Yogyakarta Tahun 2012 -2 016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Demo dalam 1 Tahun	Kasus	158	122	108	135	151

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2015; SIPD Numerik, 2017

Jumlah demonstrasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, akan tetapi cenderung menurun. Jika dilihat secara sepihak untuk memanfaatkan stabilitas sosial ekonomi akan dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi. Namun jika dilihat dari dinamika masyarakat dalam berpolitik hal ini dapat pula diartikan penurunan responsivitas terhadap perkembangan kekinian. Hal ini sangat dimungkinkan ketika masyarakat lebih fokus kepada kepentingan sendiri dibandingkan dengan upaya untuk memperjuangkan rakyat. Terlepas dari masalah tersebut turunnya angka demonstrasi ini juga dapat dibaca dari perspektif positif bahwa kemungkinan kebijakan pemerintah sudah diterima masyarakat luas.

### C. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat mendorong atau menghambat investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Jenis perizinan yang dianalisis dalam indikator ini diantaranya:

- IMB : Izin Mendirikan Bangunan
- SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
- TDP : Tanda Daftar Perusahaan
- IUI : Izin Usaha Industri dan/atau TDI (Tanda Daftar Industri)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, lama proses mengurus perizinan dalam rentang waktu 2012 – 2015 tidak banyak mengalami perubahan. Namun, pada tahun 2016, lama proses perizinan menjadi 2-4 hari lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Proses untuk pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang sebelumnya rata-rata memerlukan waktu 12 hari, kini rata-rata hanya membutuhkan 7 – 10 hari saja.

Tabel 2.4.3.C.1

Lama Proses Perizinan di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
IMB						
Bangunan sederhana	Hari	10	10	10	10	7
Bangunan tidak pakai hitungan konstruksi	Hari	14	14	14	14	10
Bangunan pakai hitungan konstruksi	Hari	17	17	17	17	15
Gangguan kecil dan sedang (non tim)	Hari	8	8	8	8	5
Gangguan besar	Hari	11	11	11	11	7
HO						
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Hari	3	3	3	3	1
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	Hari	3	3	3	3	1
IUI (Izin Usaha Industri)/TDI (Tanda Daftar Industri)	Hari	6	7	7	7	5

Sumber: Sumber :Dinas Penanaman Modal &amp; Perizinan Kota Yogyakarta, 2017

Secara umum, lama izin untuk pengurusan sebuah usaha lebih singkat dibandingkan dengan pengurusan IMB. Belum ada perubahan yang berarti sejak Kota Yogyakarta menyandang prestasi sebagai percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang efisien. Evaluasi perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan perizinan. Terkait dengan jumlah perizinan yang dilakukan dalam satu pintu juga perlu dicermati agar dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga iklim investasi dapat tetap meningkat terus.

### 1. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2016 masih konstan dengan 10 jenis pajak. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. Pajak yang mengalami perubahan pengelolaan ini antara lain adalah PBB dan pajak BPHTB. Pada tahun 2015, pajak yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, BPHTB dan PBB. Sementara itu, jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Jenis retribusi daerah yang awalnya sejumlah 15 macam, sempat meningkat menjadi 16 macam di tahun 2014 dan turun menjadi 14 macam pada tahun 2015 – 2016. Retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016

meliputi pelayanan kesehatan; persampahan; pemakaman, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah; tempat parkir khusus; rumah potong hewan; pengelolaan air limbah; penjualan produksi usaha daerah; IMBB, ijin gangguan; perijinan usaha bidang pariwisata; dan retribusi terminal.

Tabel 2.4.3.C.1

## Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pajak Daerah	Jenis	10	10	10	10	10	0,00
Retribusi Daerah	Jenis	15	15	16	14	14	-1,46
<b>Jumlah</b>	<b>Jenis</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-0,92</b>

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

Ditinjau dari besaran nilai realisasi pajak dan retribusi yang diterima oleh Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012 – 2016, penerimaan yang ada terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,15 persen per tahun. Pada tahun 2012, nilai pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 246,5 miliar rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 376,17 miliar rupiah. Apabila dilihat dari perkembangan masing-masing pajak maupun retribusi, perkembangan yang relatif lebih besar dialami oleh pajak daerah dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,70 persen per tahun dibandingkan penerimaan retribusi yang hanya meningkat sebesar 4,85 persen per tahun. Sejak tahun 2012-2016, pajak daerah banyak dihasilkan oleh pajak hotel, sedangkan retribusi tertinggi dihasilkan oleh retribusi pelayanan pasar.

Tabel 2.4.3.C.2

## Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Pajak Daerah	Juta Rp	207.703,5	227.748,9	253.461,9	304.434,5	334.057,9	12,70
2	Retribusi Daerah	Juta Rp	38.770,6	40.338,7	56.095,9	40.349,2	42.111,1	4,85
	<b>Jumlah</b>	<b>Juta Rp</b>	<b>246.474,1</b>	<b>268.087,6</b>	<b>309.557,8</b>	<b>344.783,7</b>	<b>376.169,0</b>	<b>11,18</b>

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017

## 2. Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah Perda di Kota Yogyakarta

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 terdapat dua buah perda yang mendukung iklim usaha yang merupakan perda baru. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha dapat dilihat dalam Tabel 2.4.3.A.6.

Tabel 2.4.3.C.3

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Buah	34	23	24	28	30

Sumber: Bagian Hukum Kota Yogyakarta, 2017

Ada empat buah perda yang mendukung iklim usaha yang merupakan perda baru (tambahan dari tahun 2014). Keempat perda tersebut adalah ditetapkan

1. Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015- 2035.  
Ditetapkan tanggal 2 Februari 2015,  
Diundangkan tanggal 2 Februari 2015
2. Penyelenggaraan Reklame  
Ditetapkan tanggal 18 Mei 2015,  
Diundangkan tanggal 18 Mei 2015
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025  
Ditetapkan tanggal 19 Mei 2015,  
Diundangkan tanggal 19 Mei 2015
4. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah  
Ditetapkan tanggal 22 Oktober 2015,  
Diundangkan tanggal 22 Oktober 2015

Fluktuasi jumlah perda yang mengatur tentang lalu lintas barang dan jasa dapat memberikan kejelasan tentang investasi yang penting dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Jaminan batasan waktu, kejelasan tentang hak dan kewajiban dalam perusahaan bidang usaha tertentu adalah sangat penting. Dengan demikian perekonomian bisa tumbuh dengan didukung oleh kebijakan yang positif.

#### 2.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

##### A. Ketenagakerjaan

##### 1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta. Pemaparan data dapat dilihat pada tabel di bawah yang besumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2012 rasio lulusan S1, S2, dan S3 merupakan angka yang tertinggi yaitu 1.768 per 10.000 penduduk. Tingginya rasio tersebut dikarenakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun terkait juga jumlah penduduk tertinggi selama kurun waktu 2012 – 2016. Pada tahun 2013, rasio lulusan ini hanya mencapai 1.530 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2016 rasionya bertambah menjadi 1.663 per 10.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan perubahan yang positif, meskipun jika dilihat dari pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalami penurunan sebesar 1,21 persen.

Tabel 2.4.4.A.1

## Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3	Jiwa	75.603	62.218	63.196	67.268	68.428	-1,99
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282	-0,74
3	<b>Rasio Lulusan S1, S2, dan S3</b>		<b>1.768</b>	<b>1.530</b>	<b>1.527</b>	<b>1.643</b>	<b>1.663</b>	<b>-1,21</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Sementara pada Tabel 2.4.4..1 dapat dilihat data rasio lulusan S1/S2/S3 yang didapat dari perhitungan jumlah kartu pencari kerja (AK-1) atau yang biasa disebut *kartu kuning* yang dikeluarkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 yang mengajukan permohonan penerbitan kartu AK-1 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2014 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2012, rasio lulusan ini hanya mencapai 42 sampai 43 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2015 rasionya bertambah menjadi 135 hingga 136 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.4.4.A.2

## Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2014

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jiwa	1.797	3.274	5.599	NA	NA	76,60
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	NA	NA	-1,55
3	<b>Rasio Lulusan S1/S2/S3</b>		<b>42,03</b>	<b>80,51</b>	<b>135,26</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>79,78</b>

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2015,: dengan Hasil Olahan, 2016

## 2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15 - 65 tahun dan usia tidak produktif (0 - 14 tahun dan 65 tahun keatas) maka

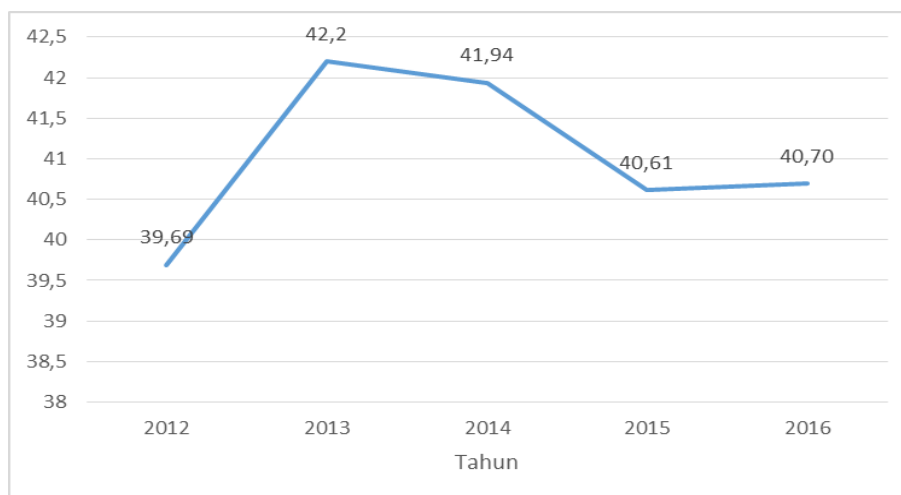
dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah 40,70 persen. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2012 hingga 2016, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 0,69 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Yogyakarta semakin besar setiap tahunnya.

Tabel 2.4.4.A.3

## Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	121.490	120.627	122.318	118.261	118.964	-0,51
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	306.101	285.827	291.648	291.226	292.318	-1,09
3	<b>Rasio Ketergantungan</b>		<b>39,69</b>	<b>42,20</b>	<b>41,94</b>	<b>40,61</b>	<b>40,70</b>	0,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta 2017: dengan Hasil Olahan.



Gambar 2.4.4.A.1 Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Sumber: Hasil Olahan. 2017

## **BAB III**

# **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

### **3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3)

pembiayaan daerah. Pendapatan maupun belanja daerah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan memiliki pengaruh terhadap ekuitas dana lancar yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya khususnya dalam konteks keuangan daerah. Sementara pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Analisis APBD Kota Yogyakarta dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2021 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2012 – 2016. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun yang tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di masa depan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Menurut permendagri 86 tahun 2017, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak pendapatan daerah. Selama periode 2012-2016, pemerintah daerah telah menetapkan berbagai arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2012-2016. Arah kebijakan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah; dan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

Secara umum rata-rata capaian realisasi pendapatan daerah telah melampaui 100 persen. Capaian realisasi pendapatan lebih dari 100 persen berarti terdapat surplus pendapatan daerah riil dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Akan tetapi, capaian realisasi pada tahun 2015 kurang dari 100 persen, yaitu sebesar 97,97 persen; dan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 98,89 persen. Sementara itu, capaian realisasi tertinggi pada periode lima tahun terakhir yaitu sebesar 120,63 pada tahun 2014. Target dan realisasi pendapatan daerah secara umum juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 terdapat penurunan target pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi realisasi pendapatan meningkat signifikan dibandingkan tahun 2013, sehingga capaian realisasi sangat tinggi pada tahun 2014. Sementara itu, target pendapatan kembali ditingkatkan pada tahun 2015, tetapi realisasi pendapatan lebih rendah dibandingkan target maupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan terjadinya gap negatif antara target dan realisasi, yaitu realisasi pendapatan yang lebih rendah dari target pendapatan daerah. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan daerah meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun 2015. Capaian realisasi pendapatan



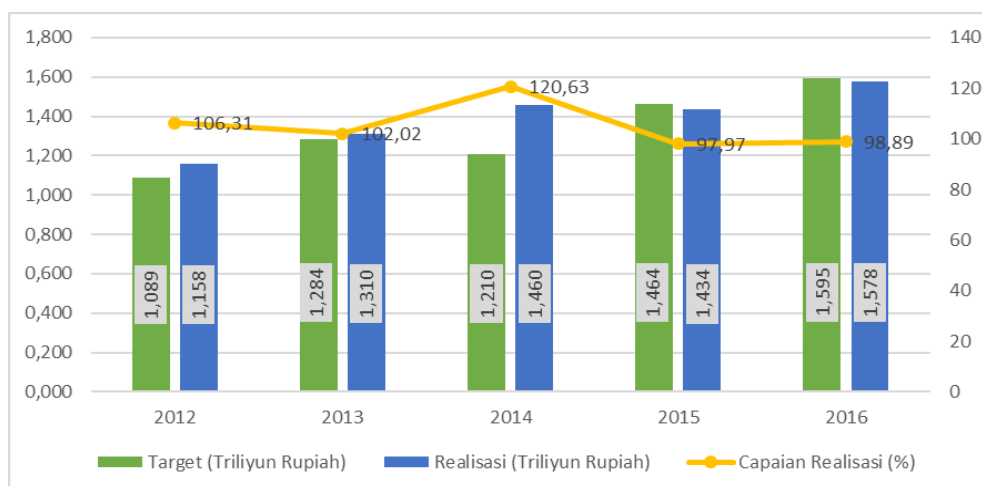
dibandingkan dengan target juga meningkat dibandingkan tahun 2015, tetapi belum mencapai 100 persen. Berikut Tabel 3.1.1.A.1 menunjukkan capaian target pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2012 – 2015.

Tabel 3.1.1.A.1  
Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
2012	1.088.827.758.053,00	1.157.578.918.317,01	106,31	68.751.160.264,01
2013	1.283.706.256.200,00	1.309.580.194.014,42	102,02	25.873.937.814,42
2014	1.210.102.185.890,00	1.459.742.435.083,81	120,63	249.640.249.193,81
2015	1.463.656.372.183,00	1.434.009.588.218,85	97,97	-(29.646.783.964,15)
2016	1.595.318.043.914,00	1.577.679.933.045,20	98,89	-(17.638.110.868,80)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 - 2016

Realisasi pendapatan daerah pada umumnya semakin meningkat, meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta mencapai 1,28 triliun rupiah dengan capaian realisasi 98,89 persen. Realisasi pendapatan tersebut berkurang sebesar 17,64 miliar rupiah jika dibandingkan dengan target sebesar 1,60 triliun rupiah. Ditargetkan realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta dapat terus meningkat, dengan capaian realisasi mencapai 100 persen atau pun lebih. Peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun pendapatan daerah yang sah lainnya. Berikut Gambar 3.1.1.A.1 menunjukkan grafik perkembangan capaian realisasi pendapatan daerah di Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016.



Gambar 3.1.1.A.1. Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016, dioah

Tabel 3.1.1.A.2

## Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

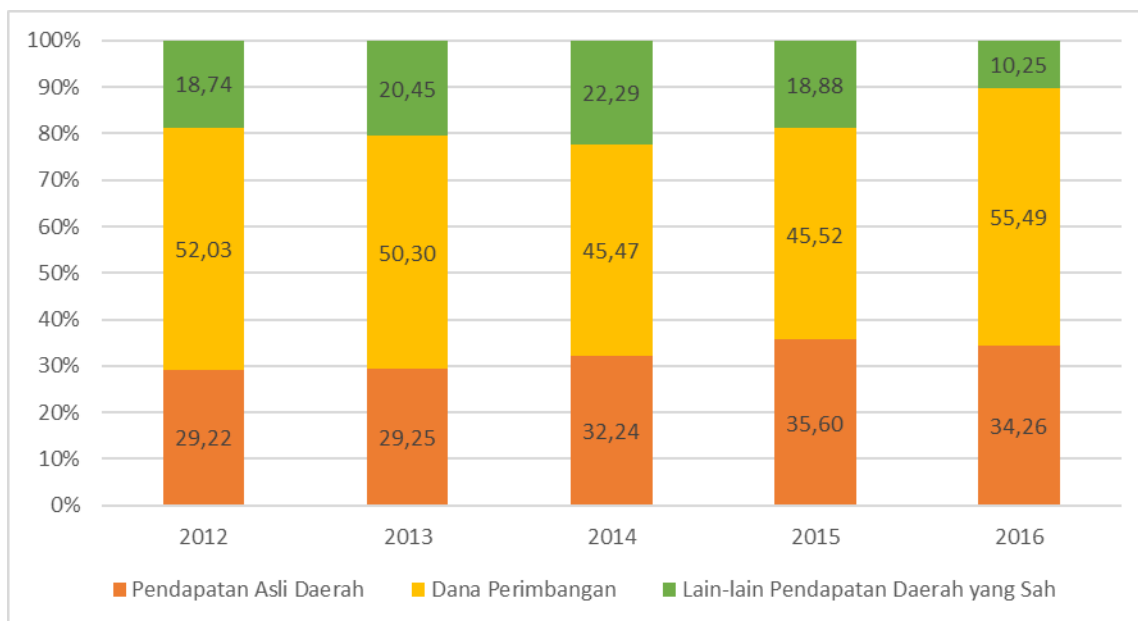
URAIAN	Realisasi Pendapatan (Rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.157.578.918.317,01</b>	<b>1.309.580.194.014,42</b>	<b>1.459.742.435.083,81</b>	<b>1.434.009.588.218,85</b>	<b>1.577.679.933.045,20</b>
<b>A. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>338.283.728.285,01</b>	<b>383.052.140.420,42</b>	<b>470.641.528.444,03</b>	<b>510.548.822.809,51</b>	<b>540.504.305.181,63</b>
1 Pajak Daerah	207.703.488.739,72	227.748.852.911,00	253.461.936.189,00	304.068.622.926,00	334.057.894.040,92
2 Retribusi Daerah	38.770.585.268,00	40.338.698.611,00	56.095.909.175,00	40.057.651.205,00	42.111.064.295,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.496.627.185,59	12.596.415.894,77	14.087.531.070,13	12.938.168.143,00	16.270.773.165,11
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.313.027.091,70	102.368.173.003,65	146.996.152.009,90	153.484.380.535,51	148.064.573.680,60
<b>B. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>602.310.071.032,00</b>	<b>658.770.838.596,00</b>	<b>663.712.266.941,00</b>	<b>652.748.113.159,00</b>	<b>875.430.545.057,00</b>
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.358.107.032,00	55.337.999.596,00	42.720.014.941,00	28.040.062.159,00	53.510.435.057,00
2 Dana Alokasi Umum	536.466.614.000,00	597.212.209.000,00	618.742.352.000,00	622.365.351.000,00	670.278.830.000,00
3 Dana Alokasi Khusus	6.485.350.000,00	6.220.630.000,00	2.249.900.000,00	2.342.700.000,00	151.641.280.000,00
<b>C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>216.985.119.000,00</b>	<b>267.757.214.998,00</b>	<b>325.388.639.698,78</b>	<b>270.712.652.250,34</b>	<b>161.745.082.806,57</b>
1 Hibah	-	-	-	-	3.093.000.000,00
2 Dana Darurat	-	-	-	-	-
3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	67.066.740.000,00	78.307.857.998,00	95.415.455.298,78	109.896.115.250,34	108.491.618.806,57
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.337.979.000,00	177.684.357.000,00	217.566.892.000,00	150.891.200.000,00	40.424.864.000,00
5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.580.400.000,00	11.765.000.000,00	12.406.292.400,00	9.925.337.000,00	9.735.600.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016

Sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok sumber pendapatan utama yang meliputi; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode tahun 2012 – 2016, proporsi kontribusi dari ketiga sumber tersebut memiliki perkembangan dengan tren yang berbeda sehingga terjadi pergeseran struktur pendapatan daerah Kota Yogyakarta (Tabel 3.1.1.A.2). PAD merupakan sumber pendapatan yang secara konsisten menunjukkan perkembangan positif. PAD terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan 12,61 persen per tahun pada periode 2012 – 2016. Peningkatan paling tinggi mencapai 22,87 persen, yaitu pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 5,87 persen dibandingkan tahun 2015. Selain itu, berdasarkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah secara umum juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 29,22 persen, meningkat hingga tahun 2016 sebesar 34,26 persen.

Sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta dari Dana Perimbangan mengalami fluktuasi, dengan tren pertumbuhan positif. Akan tetapi, rata-rata pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan PAD, yaitu 10,65 persen per tahun pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan Dana Perimbangan yang paling tinggi pada periode yang bersangkutan, yaitu 34,11 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 1,65 persen dari tahun 2014. Dana Perimbangan memegang kontribusi paling besar pada pendapatan daerah Kota Yogyakarta, dengan rata-rata kontribusi sebesar 49,76 persen pada periode 2012 – 2016. Secara umum proporsi kontribusi Dana Perimbangan Kota Yogyakarta sebesar lebih dari 50 persen, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 kontribusi Dana Perimbangan kurang dari 50 persen (45,47 persen dan 45,52 persen). Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan. Sementara itu, pada tahun 2016, kontribusi Dana Perimbangan sebesar 55,49 persen.

Berbeda dengan PAD dan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan tren pertumbuhan negatif (terus menurun), dengan rata-rata penurunan sebesar 3,03 persen per tahun pada periode 2012 – 2016. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki proporsi kontribusi yang paling kecil, yaitu rata-rata sebesar 18,12 persen pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2016, kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 10,25 persen, merupakan proporsi paling rendah pada periode 2012 – 2016. Berikut Gambar 3.1.1.A.2 menunjukkan fluktuasi kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016.



Gambar 3.1.1.A.2. Perkembangan Proporsii Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2012 – 2016  
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Masing-masing kota memiliki struktur pendapatan yang berbeda-beda. Berdasarkan struktur pendapatan daerah beberapa kota di Jawa, proporsi masing-masing komponen pendanaan yaitu: a) PAD berada pada rentang 20 – 55 persen; b) Dana Perimbangan berada pada rentang 20 – 40 persen; dan c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada rentang 10 – 25 persen. Kota Surabaya memiliki proporsi PAD yang paling tinggi dan proporsi Dana Perimbangan yang paling rendah. Sementara itu, Kota Yogyakarta cenderung memiliki keserupaan dengan Kota Surakarta dan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan PAD yang konsisten menjadikan sumber pendapatan ini memiliki posisi yang signifikan bagi struktur pendapatan daerah. Kuatnya peranan PAD dalam pembentukan pendapatan daerah mengindikasikan bahwa postur pendapatan daerah relatif kuat. Hal tersebut disebabkan pemanfaatan potensi-potensi daerah yang dimiliki telah dilakukan dengan semakin optimal. Perbedaan struktur pendapatan daerah antara Kota Yogyakarta dengan kota-kota lain dapat pula dilihat pada komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah, di mana Kota Yogyakarta memiliki proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah paling rendah (10,25 persen) diantara kota-kota lain yang disajikan pada Tabel 3.1.1.A.3.

Tabel 3.1.1.A.3  
Struktur Pendapatan Daerah Beberapa Kota di Pulau Jawa Tahun 2016

Uraian	Proporsi Pendapatan Tahun 2016 (%)					
	Bekasi	Bandung	Surakarta	Semarang	Surabaya	Yogyakarta
PAD	38,63	43,29	21,42	35,98	55,02	30,86
Dana Perimbangan	42,81	44,10	55,13	51,46	24,79	55,49
Lain-lain Pendapatan yang Sah	18,56	12,61	23,45	12,56	18,78	10,25
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2017

Selanjutnya apabila dilihat dari segi pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan, diketahui bahwa selain memiliki proporsi yang terus meningkat dalam struktur pendapatan, PAD juga merupakan komponen pendapatan dengan laju pertumbuhan yang melebihi laju pertumbuhan Pendapatan Daerah. Laju pertumbuhan PAD dalam rentang tahun 2012 – 2016 mencapai 12,61 persen, sementara laju Pendapatan Daerah adalah sebesar 8,21 persen. Tingginya laju pertumbuhan PAD dibandingkan dengan Pendapatan Daerah mengindikasikan bahwa untuk tahun-tahun mendatang, peranan PAD dalam membentuk struktur pendapatan daerah Kota Yogyakarta akan menjadi semakin signifikan. Hal ini merupakan sebuah awal yang baik mengingat kuatnya komposisi PAD menandakan bahwa sebuah daerah telah semakin mandiri secara keuangan atau pun tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat semakin kecil. Pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta paling tinggi pada 2013 – 2014 (22,87 persen), sementara pada 2015 – 2016 memiliki pertumbuhan PAD paling rendah (5,87 persen).

Komponen Dana Perimbangan memiliki laju pertumbuhan sebesar 10,65 persen, di bawah laju pertumbuhan PAD. Pertumbuhan Dana Perimbangan paling tinggi pada 2015 – 2016, yaitu 34,11 persen. Sementara itu, pada 2014 – 2015 Dana Perimbangan memiliki pertumbuhan negatif, yaitu terjadi penurunan 1,65 persen. Dana Alokasi Khusus merupakan komponen Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi, terutama pada 2015 – 2016. Hal tersebut disebabkan adanya Dana Keistimewaan Yogyakarta tahun 2016. Berbeda dengan komponen PAD dan Dana Perimbangan yang memiliki laju pertumbuhan positif, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki pertumbuhan negatif (-3,03 persen). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara umum terus mengalami penurunan, terutama pada 2015 - 2016. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami penurunan yang besar yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Sementara itu, pertumbuhan positif pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (13,13 persen). Pertumbuhan komponen Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 3.1.1.A.4.

Tabel 3.1.1.A.4

## Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Beberapa Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Pertumbuhan Pendapatan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
Pendapatan Asli Daerah	13,23	22,87	8,48	5,87	12,61
Dana Perimbangan	9,37	0,75	-1,65	34,11	10,65
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23,40	21,52	-16,80	-40,25	-3,03
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>13,13</b>	<b>11,47</b>	<b>-1,76</b>	<b>10,02</b>	<b>8,21</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terbagi atas empat komponen utama yaitu: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi PAD pada periode 2012 – 2016 melebihi target yang ditetapkan, pada tahun 2016 realisasi sebesar

104,88 persen. Struktur PAD Kota Yogyakarta dapat didasarkan pada persentase kontribusi masing-masing komponen (Tabel 3.1.1.A.5).

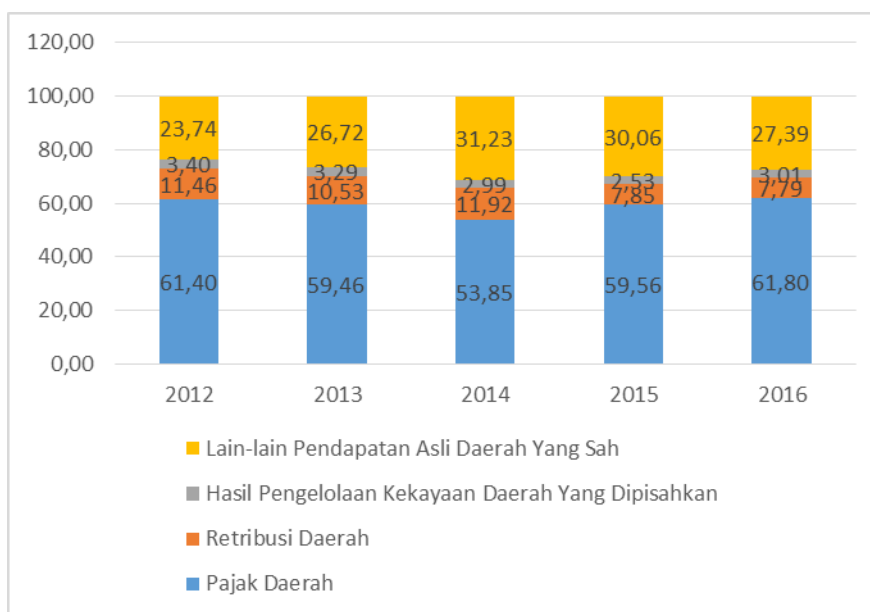
Tabel 3.1.1.A.5

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Struktur (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Daerah	61,40	59,46	53,85	59,56	61,80
Retribusi Daerah	11,46	10,53	11,92	7,85	7,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,40	3,29	2,99	2,53	3,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23,74	26,72	31,23	30,06	27,39
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Proporsi paling tinggi pada PAD Kota Yogyakarta adalah Pajak Daerah, yang berkontribusi sebesar 61,80 persen terhadap PAD pada tahun 2016. Proporsi Pajak Daerah pada tahun 2016 memiliki persentase paling tinggi pada periode 2012 – 2016. Selain Pajak Daerah, struktur PAD Kota Yogyakarta disusun oleh komponen lain, yang diurutkan berdasarkan proporsi kontribusi terhadap PAD, yaitu Lain-lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun 2016, masing-masing komponen tersebut secara berturut-turut memiliki persentase sebesar 27,39 persen; 7,79 persen; dan 3,01 persen. Masing-masing komponen PAD memiliki dinamika kontribusi terhadap PAD yang berbeda-beda per tahun (Gambar 3.1.1.A.3).



Gambar 3.1.1.A.3. Perkembangan Kontribusi Komponen PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017

Komponen PAD membentuk pola struktur PAD yang sama setiap tahunnya pada periode 2012 – 2016, meskipun masing-masing komponen mengalami fluktuasi persentase. Pola struktur PAD yang terbentuk pada periode 2012 – 2016 dengan urutan persentase paling tinggi ke paling rendah yaitu: 1)

Pajak Daerah; 2) Lain-lain PAD yang Sah; 3) Retribusi Daerah; 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain fluktuasi persentase, PAD beserta komponennya juga memiliki variasi capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Capaian PAD selalu lebih dari 100 persen setiap tahunnya pada periode 2012 – 2016. Hal tersebut berarti realisasi PAD yang didapatkan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Capaian realisasi PAD paling tinggi yaitu pada tahun 2012 sebesar 119,52 persen (338,28 miliar). Sementara itu, capaian realisasi PAD pada tahun 2016 sebesar 104,88 persen (540,50 miliar) merupakan persentase capaian paling rendah pada periode 2012 – 2016. Secara lebih detail per komponen, capaian PAD Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 3.1.1.A.6.

Tabel 3.1.1.A.6

## Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	2012		2013		2014		2015		2016	
	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)
Pajak Daerah	207.703,49	119,43	227.748,85	104,94	253.461,94	97,27	304.068,62	106,98	334.057,89	102,21
Retribusi Daerah	38.770,59	110,07	40.338,70	108,42	56.095,91	132,16	40.057,65	101,87	42.111,06	108,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.496,63	100,00	12.596,42	99,87	14.087,53	111,89	12.938,17	100,00	16.270,77	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.313,03	128,71	102.368,17	117,01	146.996,15	165,81	153.484,38	109,90	148.064,57	110,84
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>338.283,73</b>	<b>119,52</b>	<b>383.052,14</b>	<b>108,11</b>	<b>470.641,53</b>	<b>116,42</b>	<b>510.548,82</b>	<b>107,22</b>	<b>540.504,31</b>	<b>104,88</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Capaian realisasi terhadap target PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Pajak Daerah (102,21 persen); Retribusi Daerah (108,99 persen); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (100 persen); Lain-lain PAD yang Sah (110,84 persen). Secara umum, PAD berikut komponennya memiliki capaian lebih dari sama dengan 100 persen pada periode 2012 – 2016. Dua komponen PAD mengalami capaian mendekati 100 persen, yaitu Pajak Daerah sebesar 97,27 persen pada tahun 2014 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 99,87 persen pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan capaian yang tinggi pada realisasi PAD Kota Yogyakarta. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setiap tahunnya memiliki capaian tertinggi dibandingkan dengan komponen PAD lainnya pada periode 2012 – 2016.

Tabel 3.1.1.A.7

## Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

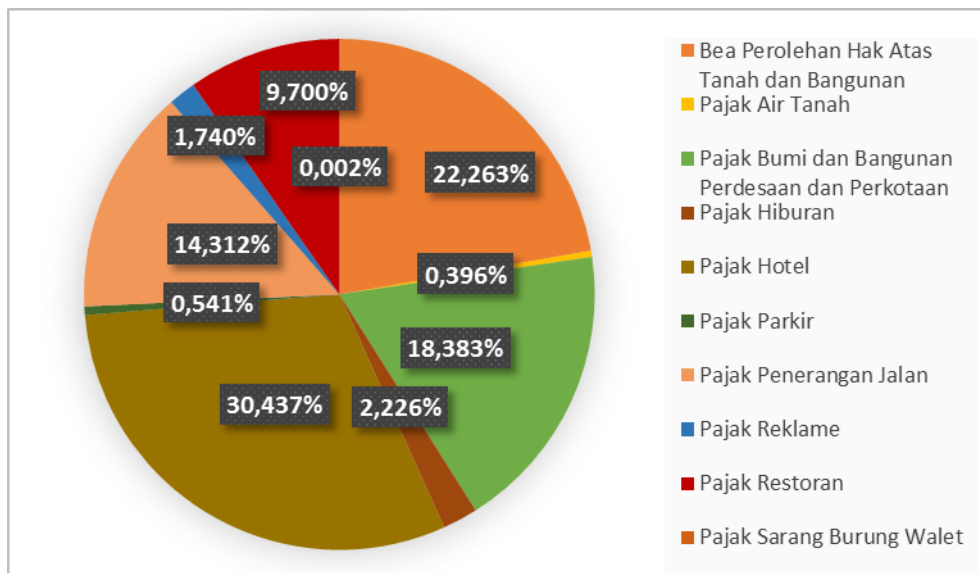
URAIAN	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
Pajak Daerah	9,65	11,29	19,97	9,86	12,69
Retribusi Daerah	4,04	39,06	-28,59	5,13	4,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,57	11,84	-8,16	25,76	9,75
Lain-lain PAD yang Sah	27,46	43,60	4,41	-3,53	17,98

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Secara umum, komponen PAD mengalami perkembangan yang baik (tren pertumbuhan positif), yang disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pada komponen PAD Kota Yogyakarta, rata-rata pertumbuhan paling tinggi pada periode 2012 – 2016 dimiliki oleh Lain-lain PAD yang Sah (17,98 persen) dan Pajak Daerah (12,69 persen). Masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi pertumbuhan, dimana pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan jumlah PAD. Dalam rangka optimalisasi PAD Kota Yogyakarta, diharapkan pertumbuhan PAD terus berjalan signifikan, sehingga struktur PAD pada pendapatan daerah Kota Yogyakarta dapat semakin menguat. Penguatan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi Pajak Daerah, sebagai komponen PAD yang memiliki kontribusi paling dominan di Kota Yogyakarta. Berikut penjabaran masing-masing komponen PAD Kota Yogyakarta.

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah memiliki kontribusi paling besar pada PAD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, besar penerimaan Pajak Daerah mencapai 61,80 persen dari total penerimaan PAD di Kota Yogyakarta. Pajak Daerah dari tahun ke tahun selalu menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 12,69 persen. Pertumbuhan paling tinggi yaitu pada 2014 – 2015, mencapai 19,97 persen. Tingginya perolehan pajak ini didukung dengan adanya penambahan jenis maupun nominal penerimaan pada pajak yang ada. Pajak Daerah masing-masing kota/ kabupaten dapat berbeda-beda, berdasarkan pada potensi daerah yang termanfaatkan. Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2016 sebesar 102,21 persen; yang berarti melebihi target. Proporsi sub komponen Pajak Daerah secara diagramatis ditunjukkan pada Gambar 3.1.1.A.4.



Gambar 3.1.1.A.4. Komponen Pajak Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, 2017; Hasil Olahan, 2017

Jumlah Pajak Daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah pajak daerah Kota Yogyakarta terus meningkat sampai pada tahun 2016, dengan persentase pertumbuhan yang beragam. Jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari: a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, b) Pajak Air Tanah, c) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, d) Pajak Hiburan, e) Pajak Hotel, f)



Pajak Parkir, g) Pajak Penerangan Jalan, h) Pajak Reklame, i) Pajak Restoran, dan j) Pajak Sarang Burung Walet. Tiga komponen Pajak Daerah yang memberikan kontribusi paling signifikan yaitu Pajak Hotel (30,44 persen); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (22,26 persen); serta Pajak Bumi dan Bangunan (18,38 persen). Hal tersebut menunjukkan perkembangan sektor perhotelan/ akomodasi yang memegang peran penting di Kota Yogyakarta, yang secara lebih lanjut dapat pula dikaitkan dengan sektor pariwisata. Selain itu, terkait tanah dan bangunan, intensifnya pemanfaatan lahan berupa bangunan di Kota Yogyakarta menjadikan kontribusi yang tinggi pada Pajak Daerah yang berasal dari pemanfaatan dan atau kepemilikan tanah maupun bangunan. Sementara itu, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah memiliki kontribusi paling rendah, yaitu 0,002 persen dan 0,396 persen.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah memiliki besaran kontribusi ketiga terhadap PAD Kota Yogyakarta, dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,91 persen pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2016, kontribusi Retribusi Daerah sebesar 7,79 persen yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Persentase Retribusi Daerah tertinggi pada tahun 2014, yaitu 11,92 persen. Rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah pada periode 2012 – 2016 yaitu 4,91 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2013 – 2014, yang kemudian kembali menurun pada tahun berikutnya. Pencapaian yang relatif tinggi pada Retribusi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2014 adalah akibat dari peningkatan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Daerah selalu menunjukkan capaian target yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta adalah sekitar 42,11 miliar rupiah atau telah berhasil mencapai target dengan persentase sebesar 108,99%.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang meliputi: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); Bank Pengkreditan Rakyat (BPR); Bank Pembangunan Daerah (BPD); serta laba Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Karena laba perusahaan bersifat terbatas dan tidak sedinamis pajak dan retribusi, maka adalah wajar bahwa perkembangan sumber pendapatan ini relatif lambat apabila dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki persentase kontribusi yang paling rendah dibandingkan dengan sub komponen PAD lainnya, dengan rata-rata 3,04 persen pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2016, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,01 persen; sementara persentase kontribusi paling tinggi yaitu 3,40 persen pada tahun 2012.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki perkembangan positif yang lebih tinggi dibandingkan Retribusi Daerah, yaitu rata-rata pertumbuhan 9,75 persen pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2012, penerimaan sumber pendapatan ini adalah sekitar 11,50 milyar rupiah, sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 16,27 milyar rupiah. Sama seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami fluktuasi dalam pertumbuhannya per tahun. Pada tahun 2012, jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terus meningkat hingga tahun 2014, kemudian mengalami

penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2016, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kembali meningkat 25,76 persen dari tahun sebelumnya.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mencakup: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; serta (g) komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan komponen PAD yang memiliki proporsi paling besar kedua setelah Pajak Daerah, yaitu dengan kontribusi rata-rata 27,83 persen pada periode 2012 – 2016. Proporsi kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah terhadap PAD Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi, yang meningkat pada tahun 2012 – 2014 hingga 31,23 persen; mengalami penurunan pada tahun 2015 – 2016 menjadi sebesar 27,39 persen. Pada tahun 2016, jumlah Lain-Lain PAD yang Sah mencapai 148,16 milyar. Sementara itu, Lain-Lain PAD yang Sah juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi pada komponen PAD, yaitu 17,98 persen per tahun pada 2012 – 2016. Pertumbuhan yang paling signifikan yaitu pada tahun 2013 – 2014, sementara pada 2015 – 2016 mengalami penurunan (pertumbuhan negatif).

## 2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: a) Dana Bagi Hasil; b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang memegang peranan penting dalam struktur pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Struktur Dana Perimbangan (Tabel 3.1.1.A.8) menunjukkan proporsi masing-masing komponen penyusun Dana Perimbangan Kota Yogyakarta. Dana Alokasi Umum merupakan komponen utama dalam struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta, yang memiliki persentase paling tinggi pada periode 2012 – 2016. Pada tahun 2016, struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta disusun oleh 76,57 persen DAU; 17,32 persen DAK; dan 6,11 persen Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak. Pada tahun 2016, proporsi DAU menurun dari tahun sebelumnya karena peningkatan yang sangat signifikan pada DAK.

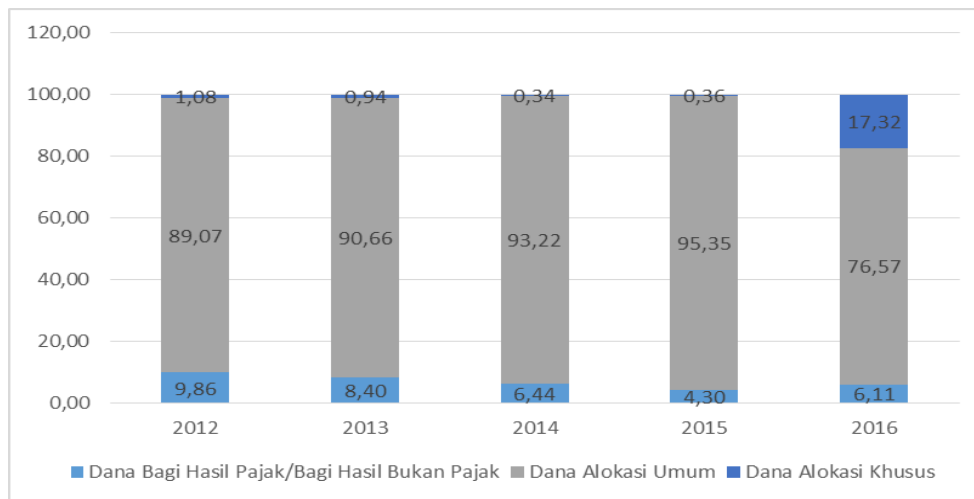
Tabel 3.1.1.A.8

### Struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Struktur (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	9,86	8,40	6,44	4,30	6,11
Dana Alokasi Umum	89,07	90,66	93,22	95,35	76,57
Dana Alokasi Khusus	1,08	0,94	0,34	0,36	17,32
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Dana Alokasi Umum pada tahun 2012 – 2015 memiliki persentase sekitar 90 – 95 persen, yang mendominasi perolehan Dana Perimbangan di Kota Yogyakarta. Persentase terbesar kedua dalam struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak. Sementara itu, DAK memiliki persentase paling kecil dalam struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta. Berbeda dengan DAU yang memiliki persentase terus meningkat pada tahun 2012 – 2015, Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan DAK menunjukkan persentase yang cenderung menurun pada rentang tahun tersebut. Hal tersebut disebabkan nominal DAU yang cenderung meningkat, sementara nominal Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan DAK cenderung menurun. Pada tahun 2016, struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jumlah (nominal) ketiga komponen meningkat, dengan peningkatan yang sangat signifikan pada DAK. Dana Alokasi Khusus berupa Dana Keistimewaan mulai diberlakukan pada tahun 2016, sehingga hal tersebut memberikan pergeseran persentase pada struktur Dana Perimbangan. Secara diagramatis struktur Dana Perimbangan Kota Yogyakarta periode 2012 – 2016 ditunjukkan pada Gambar 3.1.1.A.5.



Gambar 3.1.1.A.5. Perkembangan Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Tabel 3.1.1.A.9 menunjukkan capaian target Dana Perimbangan Kota Yogyakarta pada 2012 – 2016. Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta mencapai 95 – 103 persen, menunjukkan persentase capaian yang cukup baik karena deviasi capaian tidak melampaui 10 persen. Pada tahun 2012, capaian Dana Perimbangan sebesar 102,11 persen; sementara pada tahun 2013 – 2016 capaian Dana Perimbangan mencapai kurang dari 100 persen. Meskipun capaian cenderung menurun, realisasi nominal Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016, realisasi Dana Perimbangan mencapai 875,43 miliar rupiah. Dengan demikian, perlu dilakukan perencanaan target yang lebih tepat, sehingga capaian target menunjukkan persentase disekitar 100 persen.

Hal yang sama ditunjukkan pula oleh komponen Dana Perimbangan, dimana pada tahun 2012 semua komponen memiliki capaian seratus persen atau lebih, sedangkan pada tahun 2013 – 2016 terdapat komponen yang memiliki capaian kurang dari 100 persen. Dana Alokasi Umum memiliki capaian tetap 100 persen, dengan

realisasi yang meningkat. Pada tahun 2016, DAU mencapai 670,28 miliar rupiah. Dana Alokasi Khusus juga memiliki capaian tetap sebesar 100 persen pada 2012 – 2015, tetapi capaian DAK pada tahun 2016 kurang dari 100 persen, yaitu 82,12 persen. Realisasi DAK tahun 2016 sebesar 151,64 miliar rupiah, meningkat signifikan - dari tahun-tahun sebelumnya yang berjumlah pada kisaran 2 – 6,5 miliar rupiah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami fluktuasi realisasi maupun capaian target. Pada tahun 2012, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 59,36 miliar rupiah (capaian 126,55 persen) terus menurun hingga tahun 2015 berjumlah 28,04 miliar rupiah (capaian 54,74 persen). Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2016 kembali meningkat hingga mencapai 53,51 miliar rupiah (capaian 85,03 persen).

Tabel 3.1.1.A.9

## Capaian Target Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	2012		2013		2014		2015		2016	
	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.358,11	126,55	55.338,00	91,17	42.720,01	66,30	28.040,06	54,74	53.510,44	85,03
Dana Alokasi Umum	536.466,61	100,00	597.212,21	100,00	618.742,35	100,00	622.365,35	100,00	670.278,83	100,00
Dana Alokasi Khusus	6.485,35	100,00	6.220,63	100,00	2.249,90	100,00	2.342,70	100,00	151.641,28	82,12
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>602.310,07</b>	<b>102,11</b>	<b>658.770,84</b>	<b>99,19</b>	<b>663.712,27</b>	<b>96,83</b>	<b>652.748,11</b>	<b>96,57</b>	<b>875.430,55</b>	<b>95,38</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, DAK rata-rata pertumbuhan paling tinggi pada periode 2012 – 2016. Hal tersebut disebabkan adanya lonjakan tajam pada peningkatan jumlah DAK dari Dana Keistimewaan pada tahun 2016. Dana Alokasi umum memiliki rata-rata pertumbuhan 5,80 persen, relatif rendah jika dibandingkan komponen lain. Rendahnya laju pertumbuhan DAU merupakan sebuah indikasi yang baik dalam konteks kemandirian wilayah. Rendahnya pertumbuhan DAU yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi juga diharapkan dapat menjadi indikasi semakin baiknya keuangan daerah Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan hal penguatan PAD, kemandirian wilayah juga akan semakin terwujud dengan adanya peningkatan PAD, sehingga struktur PAD memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 3.1.1.A.10 berikut.

Tabel 3.1.1.A.10

## Pertumbuhan Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	-6,77	-22,80	-34,36	90,84	6,72
Dana Alokasi Umum	11,32	3,61	0,59	7,70	5,80
Dana Alokasi Khusus	-4,08	-63,83	4,12	6372,93	1577,28

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan yang Ditetapkan oleh Pemerintah (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya). Berdasarkan struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta (Tabel 3.1.1.A.11), komponen yang paling dominan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada tahun 2012 – 2015, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memiliki persentase yang dominan, berkisar pada 55 – 67 persen. Pada tahun 2016, terjadi pergeseran struktur, dimana Dana Bagi Hasil Pajak memiliki persentase 67,08 persen; sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 24,99 persen. Hal tersebut disebabkan terjadi perubahan nominal Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang signifikan. Persentase Bantuan Keuangan juga meningkat pada tahun 2016, menjadi sebesar 6,02 persen dari total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, pada tahun 2016 juga terdapat Hibah sebesar 3,09 miliar rupiah (1,91 persen).

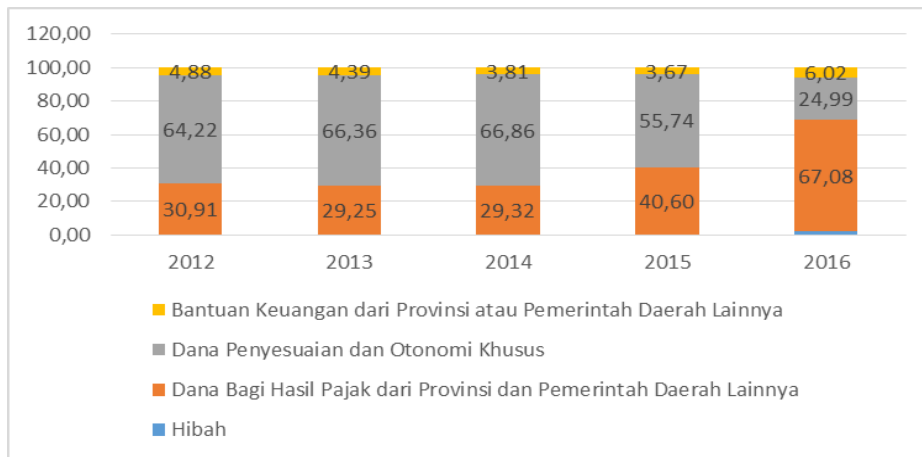
Tabel 3.1.1.A.11.

Struktur Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Struktur (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30,91	29,25	29,32	40,60	67,08
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64,22	66,36	66,86	55,74	24,99
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,88	4,39	3,81	3,67	6,02
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Dinamika struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditunjukkan diagram pada Gambar 3.1.1.A.6. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa terjadi perubahan struktur dimulai pada tahun 2015, dan yang cukup signifikan pada tahun 2016. Perubahan yang terjadi terutama pada pergeseran komponen Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Sementara itu, Hibah baru terdapat pada tahun 2016 dan tidak ada Dana Darurat pada 2012 – 2016 di Kota Yogyakarta. Pada komponen Bantuan Keuangan, meskipun persentase mengalami kenaikan, jumlah (nominal) Bantuan Keuangan cenderung menurun. Pertumbuhan masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.A.12.



Gambar 3.1.1.A.6. Perkembangan Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Tabel 3.1.1.A.12

Pertumbuhan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16,76	21,85	15,18	-1,28	13,13
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27,52	22,45	-30,65	-73,21	-13,47
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11,20	5,45	-20,00	-1,91	-1,32

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Dana Bagi Hasil Pajak memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi dan bernilai positif, dibandingkan dengan komponen lainnya, yaitu sebesar 13,13 persen per tahun. Pada tahun 2012 – 2015 selalu terjadi peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak, tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 1,28 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan memiliki rata-rata pertumbuhan bernilai negatif, yang berarti jumlahnya cenderung menurun. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan memiliki pertumbuhan positif pada tahun 2012 – 2014, sedangkan pada tahun 2014 – 2016 kedua komponen tersebut memiliki pertumbuhan negatif yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, semua komponen memiliki pertumbuhan negatif, kecuali terdapat penambahan pada Hibah. Selain pertumbuhan per tahun, capaian penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diukur untuk mengevaluasi perencanaan maupun implementasi. Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 3.1.1.A.13.

Tabel 3.1.1.A.12

## Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	2012		2013		2014		2015		2016	
	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)	Realisasi (Rp juta)	Capaian (%)
Hibah	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.093,00	100,00
Dana Darurat	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	67.066,74	100,00	78.307,86	103,30	95.415,46	115,34	109.896,12	98,39	108.491,62	99,66
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.337,98	100,00	177.684,36	100,00	217.566,89	899,50	150.891,20	80,00	40.424,86	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.580,40	110,90	11.765,00	100,00	12.406,29	91,92	9.925,34	88,20	9.735,60	100,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>216.985,12</b>	<b>100,48</b>	<b>267.757,21</b>	<b>100,94</b>	<b>325.388,64</b>	<b>270,24</b>	<b>270.712,65</b>	<b>86,89</b>	<b>161.745,08</b>	<b>99,77</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Secara umum, penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 dan 2013, capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ideal dengan persentase disekitar 100 persen. Pada tahun 2016, capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 99,77 persen dengan realisasi yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 161,75 miliar rupiah. Pada tahun 2012 dan 2013, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga secara umum memenuhi target. Sementara itu, dinamika capaian terjadi pada tahun 2014 – 2016. Pada tahun 2014, terjadi lonjakan capaian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, berikut dengan realisasinya sebesar 217,57 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2015 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus menurun signifikan dengan capaian 80 persen (realisasi 150,89 miliar rupiah). Pada tahun 2015, komponen lainnya juga memiliki capaian di bawah 100 persen, sehingga capaian total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 86,89 persen dengan realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki capaian yang baik (100 persen atau disekitarnya), meskipun dengan realisasi yang menurun.

## B. Belanja Daerah

Definisi Belanja Daerah menurut Permendagri 86 tahun 2017 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pada periode tahun 2012 – 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Arah kebijakan tersebut tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016, yaitu 1) melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja dan 2) melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran

Pada periode 2012-2016, rata-rata capaian realisasi belanja Pemerintah kota Yogyakarta sebesar 90,41 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja.

Besarnya deviasi capaian relaisasi belanja perlu diperhatikan untuk setiap tahun anggaran. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan antara lain 1) penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya terkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2) optimalisasi realisasi belanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Capaian yang baik adalah berada di sekitar 100 persen, mengindikasikan capaian yang optimal. Capaian tertinggi belanja daerah Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 yaitu sebesar 93,99 persen dengan realisasi 1,34 triliun rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2016, capaian target belanja daerah mencapai 92,49% dengan realisasi 1,67 triliun rupiah. Meskipun dengan persentase capaian bervariasi, realisasi belanja daerah maupun target yang ditetapkan terus meningkat. Tabel 3.1.1.B.1 berikut menunjukkan capaian target belanja daerah di Kota Yogyakarta.

Tabel 3.1.1.B.1

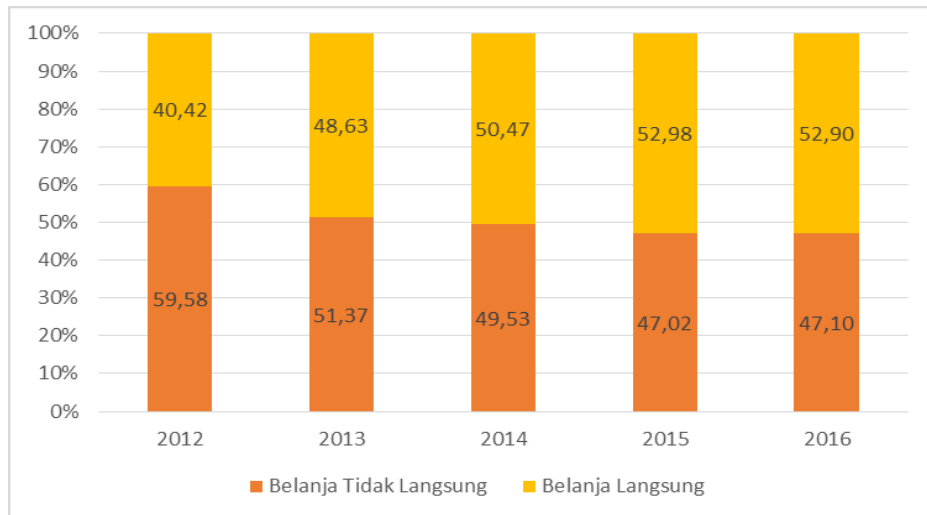
## Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
2012	1.146.288.393.816,00	1.023.803.006.143,51	89,31	-(122.485.387.672,49)
2013	1.377.414.820.394,00	1.232.911.934.134,18	89,51	-(144.502.886.259,82)
2014	1.422.093.336.380,00	1.336.610.467.867,75	93,99	-(85.482.868.512,25)
2015	1.774.573.915.911,00	1.539.699.344.285,44	86,76	-(234.874.571.625,56)
2016	1.800.707.338.425,00	1.665.420.970.708,79	92,49	-(135.286.367.716,21)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Belanja daerah dibedakan menjadi dua, yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen belanja daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan komponen belanja daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2012 – 2013 Belanja Tidak Langsung mendominasi belanja daerah, dengan persentase di atas 50 persen, yaitu 59,58 persen (tahun 2012) dan 51,37 persen (tahun 2013). Pada tahun 2014 – 2016, struktur berubah menjadi didominasi oleh Belanja Langsung. Proporsi Belanja Langsung meningkat menjadi 50,47 persen pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi 52,98 persen tahun 2015. Pada tahun 2016, proporsi Belanja Langsung sebesar 52,90 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 47,10 persen. Peningkatan proporsi komponen Belanja Langsung terhadap belanja daerah di Kota Yogyakarta dapat dikaitkan dengan penguatan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal tersebut dapat disebabkan semakin optimalnya proporsi penggunaan anggaran untuk belanja daerah terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Perkembangan proporsi belanja daerah ditunjukkan pada Gambar 3.1.1.B.1.





Gambar 3.1.1..B.1. Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Tabel 3.1.1.B.2

## Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN		Realisasi Belanja (Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>1.023.803.006.143,51</b>	<b>1.232.911.934.134,18</b>	<b>1.336.610.467.867,75</b>	<b>1.539.699.344.285,44</b>	<b>1.665.420.970.708,79</b>
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>609.959.214.302,71</b>	<b>633.327.757.674,18</b>	<b>662.059.134.664,75</b>	<b>724.041.324.573,83</b>	<b>784.378.707.695,00</b>
1	Belanja Pegawai	566.336.888.447,00	590.478.800.556,00	615.751.844.198,00	669.675.278.786,83	716.343.371.571,00
2	Belanja Bunga	118.865.519,71	75.486.097,18	32.401.772,75	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	39.429.732.250,00	34.287.663.050,00	40.179.300.498,00	47.372.262.832,00	62.046.692.034,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000,00	6.045.181.000,00	3.060.900.000,00	4.534.392.000,00	1.545.555.000,00
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	2.306.652.086,00	2.421.465.086,00	2.490.776.524,00	2.434.210.440,00	3.031.139.346,00
8	Belanja Tidak Terduga	257.076.000,00	19.161.885,00	543.911.672,00	25.180.515,00	1.411.949.744,00
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>413.843.791.840,80</b>	<b>599.584.176.460,00</b>	<b>674.551.333.203,00</b>	<b>815.658.019.711,61</b>	<b>881.042.263.013,79</b>
1	Belanja Pegawai	102.387.009.400,00	123.582.680.214,00	127.625.790.224,00	143.505.508.220,50	163.774.278.478,28
2	Belanja Barang dan Jasa	223.120.891.103,00	308.921.754.042,00	353.847.263.385,00	415.757.355.058,11	457.678.643.111,66
3	Belanja Modal	88.335.891.337,80	167.079.742.204,00	193.078.279.594,00	256.395.156.433,00	259.589.341.423,85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016

Pada tahun 2012 – 2013 dengan proporsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung, sedangkan pada tahun 2014 – 2016 proporsi berlaku sebaliknya. Dapat dilihat pada Tabel 3.1.1.B.2, kedua komponen belanja daerah tersebut terus mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun meskipun dengan proporsi yang berubah,. Pada tahun 2016, jumlah Belanja Tidak Langsung mencapai 784,38 miliar rupiah; sementara jumlah Belanja Langsung mencapai 881,04 miliar rupiah. Pertumbuhan Belanja Langsung di Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung Kota Yogyakarta memiliki rata-rata pertumbuhan 21,58 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 6,52 persen per tahun. Sementara itu, secara umum rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 adalah sebesar 13,05 persen. Secara lebih detail pertumbuhan per tahun belanja daerah dan komponennya ditunjukkan pada Tabel 3.1.1.B.3.

Tabel 3.1.1.B.3

Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Pertumbuhan Belanja (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
Belanja Tidak Langsung	3,83	4,54	9,36	8,33	6,52
Belanja Langsung	44,88	12,50	20,92	8,02	21,58
<b>Belanja Daerah</b>	<b>20,42</b>	<b>8,41</b>	<b>15,19</b>	<b>8,17</b>	<b>13,05</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Komponen Belanja Tidak Langsung memiliki persentase pertumbuhan yang terus meningkat, sedangkan komponen Belanja Langsung memiliki persentase pertumbuhan yang fluktuatif. Belanja Tidak Langsung memiliki persentase pertumbuhan yang paling tinggi pada puncaknya tahun 2014 – 2015, yaitu 9,36 persen. Komponen Belanja Langsung memiliki persentase pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2013, yaitu 44,88 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan Belanja Langsung berada di bawah belanja daerah pada tahun 2016, yaitu sebesar 8,02 persen. Pertumbuhan Belanja Langsung harus terus dipertahankan maupun ditingkatkan guna mendukung optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebagai komponen belanja daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari delapan (8) unsur, yaitu: a) Belanja Pegawai, b) Belanja Bunga, c) Belanja Subsidi, d) Belanja Hibah, e) Belanja Bantuan Sosial, f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik, serta h) Belanja Tidak Terduga. Proporsi masing-masing unsur tersebut disajikan pada Tabel 3.1.1.B.4.

Tabel 3.1.1.B.4

## Struktur Belanja Tidak Langsung Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Struktur (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Pegawai	92,85	93,23	93,01	92,49	91,33
Belanja Bunga	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	6,46	5,41	6,07	6,54	7,91
Belanja Bantuan Sosial	0,25	0,95	0,46	0,63	0,20
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	0,38	0,38	0,38	0,34	0,39
Belanja Tidak Terduga	0,04	0,00	0,08	0,00	0,18
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Lebih dari 90 persen struktur Belanja Tidak Langsung didominasi oleh Belanja Pegawai, yang pada tahun 2016 memiliki persentase sebesar 91,33 persen. Masing-masing komponen memiliki fluktuasi persentase pada struktur Belanja Tidak Langsung Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016. Persentase terbesar kedua pada struktur Belanja Tidak Langsung Kota Yogyakarta yaitu Belanja Hibah, yang pada tahun 2016 mencapai 7,91 persen. Sementara itu, tidak terdapat komponen Belanja Subsidi dan Belanja Bagi Hasil pada struktur Belanja Tidak Langsung Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016.

## 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam komponen belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari tiga (3) unsur, yaitu: a) Belanja Pegawai, b) Belanja Barang dan Jasa, serta c) Belanja Modal. Jumlah Belanja Barang dan Jasa merupakan jumlah paling besar dalam Belanja Langsung, disebabkan terkait dengan barang dan jasa yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Masing-masing memiliki nominal yang terus meningkat, Belanja Barang dan Jasa mencapai 457,68 miliar rupiah. Berikut Tabel 3.1.1.B.5 menunjukkan persentase komponen Belanja Langsung yang menunjukkan struktur Belanja Langsung Kota Yogyakarta periode 2012 – 2016.

Tabel 3.1.1.B.5

## Struktur Belanja Langsung Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Struktur (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Pegawai	24,74	20,61	18,92	17,59	18,59
Belanja Barang dan Jasa	53,91	51,52	52,46	50,97	51,95
Belanja Modal	21,35	27,87	28,62	31,43	29,46
<b>Belanja Langsung</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Belanja Barang dan Jasa mendominasi struktur Belanja Langsung Kota Yogyakarta, mencapai lebih dari 50 persen. Persentase paling tinggi kedua adalah pada komponen Belanja Modal, dengan persentase berkisar antara 21 – 32 persen pada periode 2012 – 2016. Sementara itu, Belanja Pegawai memiliki persentase antara 17 – 24 persen. Pada tahun 2016, struktur Belanja Langsung Kota Yogyakarta disusun oleh 51,95 persen

Belanja Barang dan Jasa; 29,46 persen Belanja Modal; dan 18,59 persen Belanja Pegawai. Optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dapat menjadi upaya efisiensi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

### C. Pembiayaan Daerah

Definisi Pembiayaan Daerah dalam Permendagri 86 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Capaian target pembiayaan netto Kota Yogyakarta periode 2012 – 2016 ditunjukkan pada Tabel 3.1.1.C.1.

Tabel 3.1.1.C.1

Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
2012	57.460.635.763	90.746.396.176,01	157,93	33.285.760.413,01
2013	93.708.564.194	226.708.830.676,65	241,93	133.000.266.482,65
2014	211.991.150.490,00	311.265.887.511,99	136,63	99.274.737.021,99
2015	310.917.543.728,00	311.031.926.378,05	100,04	114.382.650,05
2016	205.389.294.511,00	205.392.523.805,46	100,00	3.229.294,46

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nominal pembiayaan netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi pengeluaran pembiayaan dikarenakan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, pembiayaan netto di Kota Yogyakarta selama tahun 2012 hingga 2016 selalu menunjukkan capaian positif. Capaian pembiayaan netto mencapai 100 persen atau lebih. Pada tahun 2013, capaian meningkat hingga 241,93 persen. Pada tahun 2014, capaian menurun menjadi 136,63 persen, tetapi dengan nilai realisasi yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, mencapai 311,27 miliar rupiah. Capaian yang ideal mendekati 100 persen dicapai pada tahun 2015 dan 2016, dengan realisasi sebesar 311,03 miliar rupiah pada tahun 2015, yang kemudian menurun menjadi 205,39 miliar rupiah pada tahun 2016. Berikut Tabel 3.1.1.C.2 menunjukkan perkembangan pembiayaan di Kota Yogyakarta pada 2012 – 2016.

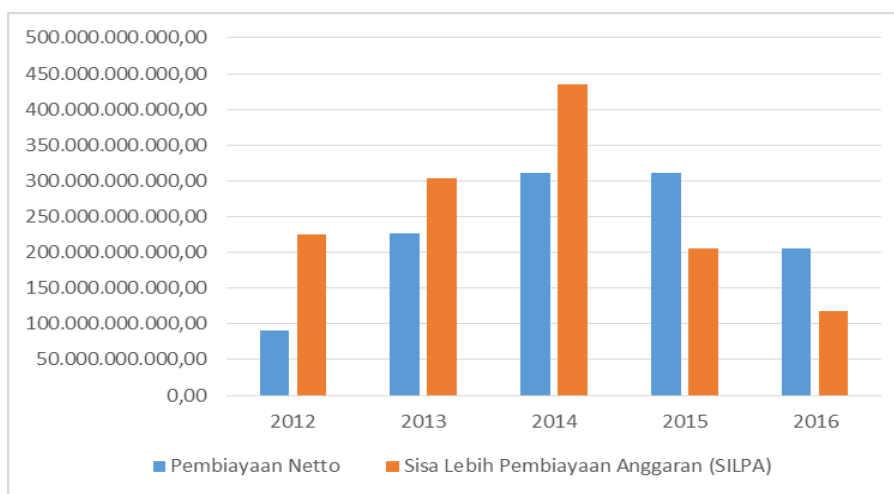
Tabel 3.1.1.C.2

## Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Realisasi (Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>A. Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>96.108.048.330,87</b>	<b>227.222.574.831,51</b>	<b>311.627.539.666,89</b>	<b>434.785.926.378,05</b>	<b>205.392.523.805,46</b>
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	95.445.407.301,87	224.522.308.349,51	303.377.090.556,89	434.397.854.728,05	205.342.170.311,46
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	2.220.200,00	386.608.928,00	388.071.650,00	50.353.494,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	662.641.029,00	2.698.046.282,00	7.863.840.182,00	-	-
<b>B. Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>5.361.652.154,86</b>	<b>513.744.154,86</b>	<b>361.652.154,90</b>	<b>123.754.000.000,00</b>	<b>-</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	-	-	123.754.000.000,00	-
3.	Pembayaran Pokok Utang	361.652.154,86	513.744.154,86	361.652.154,90	-	-
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	-	-	-	-
<b>C. Pembiayaan Netto</b>		<b>90.746.396.176,01</b>	<b>226.708.830.676,65</b>	<b>311.265.887.511,99</b>	<b>311.031.926.378,05</b>	<b>205.392.523.805,46</b>
<b>D. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>224.522.308.349,51</b>	<b>303.377.090.556,89</b>	<b>434.397.854.728,05</b>	<b>205.342.170.311,46</b>	<b>117.651.486.141,87</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016

Penerimaan pembiayaan Kota Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Tingginya penerimaan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta banyak didukung oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan proporsi yang selalu berada di atas 97 persen, sementara penerimaan pembiayaan lainnya berasal dari Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada tahun 2016, penerimaan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta mencapai 205,39 miliar rupiah. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan di Kota Yogyakarta pada umumnya terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah memegang proporsi paling besar dalam pengeluaran pembiayaan daerah Kota Yogyakarta, terutama pada tahun 2012 dan 2015. Persentase pengeluaran pembiayaan daerah di Kota Yogyakarta hanya berkisar 0 – 29 persen dari penerimaan pembiayaan daerah. Dengan demikian, pembiayaan netto dan SILPA yang dihasilkan cukup besar, sehingga diperlukan perencanaan dan realisasi keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Berikut Gambar 3.1.1.C.1 yang menunjukkan perkembangan pembiayaan netto dan SILPA Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada tahun 2012 sebesar 224,52 miliar rupiah terus meningkat hingga hampir dua kali lipat pada tahun 2014 menjadi 434,40 miliar rupiah. Pada tahun 2015, menurun menjadi 205,34 miliar rupiah dan kemudian menurun lagi menjadi 117,65 miliar rupiah pada tahun 2016.



Gambar 3.1.1..C.1. Perkembangan Pembiayaan Netto dan SILPA Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

Sumber Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Pertumbuhan komponen pembiayaan daerah Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 3.1.1.C.1, yang ditekankan pada pertumbuhan pembiayaan netto dan SILPA. Pembiayaan netto mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013, dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 149,83 persen. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan netto pada tahun-tahun setelahnya terus mengalami penurunan, terutama pada tahun 2014 – 2015 dan 2015 – 2016 yang bernilai negatif, menunjukkan penurunan nilai pembiayaan netto. Begitu pula dengan SILPA Kota Yogyakarta yang memiliki pola yang cenderung sama.

Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu SILPA meningkat sebesar 43,19 persen dari tahun 2013. Pada tahun 2015 dan 2016, SILPA terus berkurang yang ditunjukkan dengan pertumbuhan negatif.

Tabel 3.1.1.C.1

## Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

URAIAN	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	
Pembiayaan Netto	149,83	37,30	-0,08	-33,96	38,27
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	35,12	43,19	-52,73	-42,70	-4,28

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Neraca daerah Kota Yogyakarta secara rinci ditunjukkan pada Tabel 3.1.2.2.

#### A. Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (*current asset*) dan aset non lancar/ tetap (*long-term asset*). Pada umumnya, jumlah aset Kota Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik aset lancar maupun aset tetap. Pada tahun 2016, jumlah aset Kota Yogyakarta mencapai 3,75 triliun rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya 6,34 persen pada 2012 – 2016. Komponen aset dengan jumlah paling dominan yaitu Aset Tetap, sebesar 3,12 triliun rupiah (83,21 persen dari total aset) pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,88 persen. Pada tahun 2016, komponen lainnya yaitu Aset Lancar sebesar 215,96 miliar rupiah (5,76 persen dari total aset); Investasi Jangka Panjang sebesar 354,52 miliar rupiah (9,45 persen dari total aset); Dana Cadangan sebesar 7,26 miliar rupiah (0,19 persen dari total aset); dan Aset Lainnya sebesar 51,91 miliar rupiah (1,38 persen dari total aset). Pada komponen Aset Tetap, jalan, irigasi, jaringan, tanah, dan bangunan gedung memiliki dominasi nilai aset. Sementara itu, berdasarkan pertumbuhan komponen aset paling tinggi yaitu Piutang PAD Lainnya – Denda dan kemudian Aset Lain-lain..

#### B. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka



pendek dan jangka panjang. Total kewajiban dalam neraca daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebesar 18,48 miliar rupiah, yang berarti jumlah aset lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban daerah. Total kewajiban secara umum mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2016 mengalami peningkatan lebih dari dua ratus persen tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan kewajiban daerah Kota Yogyakarta yaitu 78,91 persen per tahun pada periode 2012 – 2016. Seluruh kewajiban berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek, dimana 72,32 persennya merupakan Utang Belanja.

### C. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Jumlah ekuitas dana Kota Yogyakarta sebesar 3,73 triliun rupiah pada tahun 2016. Pertumbuhan rata-rata ekuitas dana sebesar 6,23 persen pada 2012 – 2016. Pertumbuhan ekuitas dana paling besar adalah pada tahun 2013, yang meningkat sebesar 17,37 persen dari tahun 2012.

Analisis rasio keuangan (Tabel 3.1.2.1) diantaranya terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio total hutang terhadap total aset, dan lainnya. Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio lancar Kota Yogyakarta pada tahun 2012 – 2016 menunjukkan perbandingan yang besar antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2016, rasio lancar sebesar 11,69, yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai rasio lancar yang tinggi menunjukkan bahwa nilai aset jauh melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya. Rata-rata pertumbuhan rasio lancar sebesar -16,16 persen per tahun pada 2012 – 2016, dengan pertumbuhan melebihi 50 persen (50,26 persen) pada tahun 2013 – 2014. Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Nilai rasio tersebut sangat rendah, menunjukkan bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Pada tahun 2016, rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,005. Rasio total hutang terhadap total ekuitas menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Nilai rasio hutang terhadap ekuitas hampir sama dengan nilai rasio hutang terhadap aset, disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama, dengan nilai kewajiban yang relatif rendah dibandingkan aset maupun ekuitas. Dalam rasio keuangan, rasio lancar termasuk dalam analisis Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*), yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, rasio hutang terhadap aset maupun ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, ditujukan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan analisis neraca daerah dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dipertahankan maupun ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Tabel 3.1.2.1

## Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
<b>Rasio Likuiditas</b>						
Rasio Lancar	94,316	128,075	192,445	48,909	11,688	-16,16
<b>Rasio Solvabilitas</b>						
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,001	0,001	0,001	0,002	0,005	92,10
Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas	0,001	0,001	0,001	0,002	0,005	92,41

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Tabel 3.1.2.1.

## Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
I	<b>ASET</b>						
	<b>ASET LANCAR</b>						
	Kas dan Setara Kas	227.358,37	305.738,54	437.000,89	215.199,21	132.612,72	-2,93
	Piutang Pajak	12.173,00	19.851,57	33.447,64	39.550,60	40.564,52	38,09
	Piutang Retribusi	2.678,01	1.963,45	1.412,80	854,11	743,17	-26,82
	Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	181,62	594,87	681,57	225,91	12,80	20,23
	Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	780,00	199,00	199,00	247,76	247,76	-12,50
	Bagian Lancar Tagihan Sewa	479,84	630,85	880,78	756,34	869,32	17,97
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	21,62	51,34	117,85	117,33	32,89	48,65
	Piutang Transfer - Dana Bagi hasil	-	-	1.730,00	-	678,41	-60,79
	Piutang PAD Lainnya - Denda	-	-	6,76	0,61	7.292,69	597.665,99
	Piutang Lainnya	772,02	709,12	2.317,51	5.210,61	6.156,79	90,42
	Persediaan	26.547,77	24.571,68	27.153,72	31.232,02	26.752,11	0,94
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>270.992,25</b>	<b>354.310,43</b>	<b>504.948,52</b>	<b>293.394,51</b>	<b>215.963,18</b>	<b>1,24</b>
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
	Investasi Non Permanen						
	Investasi Non Permanen Lainnya	737,60	270,62	-	-	-	-
	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>737,60</b>	<b>270,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-63,31</b>
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	205.406,04	201.825,83	214.086,44	344.583,32	354.519,02	17,04
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>205.406,04</b>	<b>201.825,83</b>	<b>214.086,44</b>	<b>344.583,32</b>	<b>354.519,02</b>	<b>17,04</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>206.143,64</b>	<b>202.096,45</b>	<b>214.086,44</b>	<b>344.583,32</b>	<b>354.519,02</b>	<b>16,95</b>
	<b>ASET TETAP</b>						
	Tanah	496.208,26	610.739,13	615.564,08	625.764,51	1.790.212,40	52,90
	Peralatan dan Mesin	269.404,74	318.169,28	335.835,16	392.475,25	529.056,37	18,83
	Bangunan Gedung	634.414,37	741.324,34	814.830,08	1.016.324,18	1.034.056,98	13,31
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.681.667,23	1.715.523,09	1.762.112,05	1.818.593,60	1.868.812,68	2,67
	Aset Tetap Lainnya	32.133,15	29.691,12	28.227,01	33.025,13	36.264,42	3,57

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.355,48	-	73.750,18	4.796,28	14.487,16	54,28
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	(2.044.169,27)	(2.152.316,19)	5,29
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.122.183,23</b>	<b>3.415.446,95</b>	<b>3.630.318,54</b>	<b>1.846.809,68</b>	<b>3.120.573,81</b>	<b>8,88</b>
	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.636,97</b>	<b>5.951,05</b>	<b>6.378,31</b>	<b>6.828,38</b>	<b>7.259,00</b>	<b>6,53</b>
	<b>ASET LAINNYA</b>						
	Tagihan Pemberian Pinjaman	1.000,00	499,93	-	-	-	-50,01
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	2.997,00	2.798,00	2.599,00	2.338,25	2.090,50	-8,60
	Tagihan Sewa	174,00	104,10	31,00	149,25	353,50	101,98
	Tuntutan Ganti Rugi	84,36	65,64	47,18	28,41	-	-30,03
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	36.661,76	36.661,76	36.661,76	36.661,76	36.661,76	0,00
	Aset Lain-lain	495,00	260.466,03	7.930,36	9.529,62	3.110,58	13093,81
	Aset Tidak Berwujud	1.651,18	2.058,71	9.319,94	6.874,32	9.693,08	98,04
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>43.063,29</b>	<b>302.654,17</b>	<b>56.589,24</b>	<b>55.581,61</b>	<b>51.909,42</b>	<b>128,28</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.648.019,40</b>	<b>4.280.459,06</b>	<b>4.412.321,05</b>	<b>2.547.197,51</b>	<b>3.750.224,43</b>	<b>6,34</b>
II	<b>KEWAJIBAN</b>						
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
	Utang kepada Pihak Ketiga	-	2,73	-	-	-	-
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.815,98	2.358,58	2.603,03	3.122,51	3.064,59	14,59
	Utang Bunga	75,49	32,40	-	-	-	-57,08
	Bagian Lancar Utang dalam Negeri Pemerintah Pusat	361,65	361,65	-	-	-	0,00
	Pendapatan Diterima di Muka	-	-	-	1.771,00	2.049,10	15,70
	Utang Belanja	-	-	-	824,75	13.363,66	1520,33
	Utang Premi	-	-	-	280,54	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	620,12	11,05	20,83	-	-	-4,86
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>2.873,24</b>	<b>2.766,42</b>	<b>2.623,86</b>	<b>5.998,80</b>	<b>18.477,35</b>	<b>81,94</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
	Utang dalam Negeri Pemerintah Pusat	394,05	-	-	-	-	-
	Utang jangka Panjang lainnya	6,06	1,24	7,44	-	-	210,23
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>400,12</b>	<b>1,24</b>	<b>7,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,15</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.273,36</b>	<b>2.767,65</b>	<b>2.631,30</b>	<b>5.998,80</b>	<b>18.477,35</b>	<b>78,91</b>

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
III	<b>EKUITAS DANA</b>						
	<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>3.644.746,04</b>	<b>4.277.691,40</b>	<b>4.409.689,76</b>	<b>2.541.198,70</b>	<b>3.731.747,08</b>	<b>6,23</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.648.019,40</b>	<b>4.280.459,06</b>	<b>4.412.321,05</b>	<b>2.547.197,51</b>	<b>3.750.224,43</b>	<b>6,34</b>

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2015; Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2015

### 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

#### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Yogyakarta, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Berikut Tabel 3.2.1.1 menunjukkan proporsi belanja kebutuhan aparatur di Kota Yogyakarta.

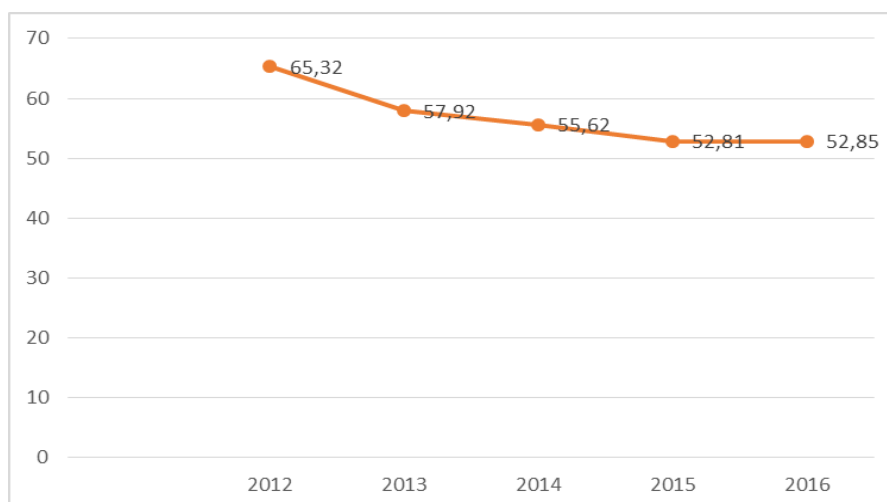
Tabel 3.2.1.1

Proporsi Belanja Aparatur Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Tahun	Belanja Aparatur (Rupiah)			Total Belanja (Rupiah)	Proporsi Belanja Aparatur (%)
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		
2012	566.336.888.447,00	102.387.009.400,00	668.723.897.847,00	1.023.803.006.143,51	65,32
2013	590.478.800.556,00	123.582.680.214,00	714.061.480.770,00	1.232.911.934.134,18	57,92
2014	615.751.844.198,00	127.625.790.224,00	743.377.634.422,00	1.336.610.467.867,75	55,62
2015	669.675.278.786,83	143.505.508.220,50	813.180.787.007,33	1.539.699.344.285,44	52,81
2016	716.343.371.571,00	163.774.278.478,28	880.117.650.049,28	1.665.420.970.708,79	52,85

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Pada tahun 2016, jumlah Belanja Aparatur sebesar 880,12 miliar rupiah, terdiri dari 716,34 miliar rupiah (81,39 persen) Belanja Tidak Langsung dan 163,77 miliar rupiah (18,61 persen) Belanja Langsung. Berdasarkan proporsi belanja aparatur terhadap total belanja, menunjukkan tren negatif yang berarti Belanja Aparatur semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah. Proporsi Belanja Aparatur Kota Yogyakarta masih berada lebih dari 50 persen. Pada tahun 2012, proporsi Belanja Aparatur sebesar 65,32 persen, terus menurun menjadi 57,92 persen pada tahun 2013 dan 55,62 persen pada tahun 2014. Penurunan proporsi Belanja Aparatur paling besar adalah pada 2012 – 2013, yaitu menurun sebesar 11,33 persen. Pada tahun 2015 proporsi Belanja Aparatur semakin menurun menjadi 52,81 persen, yang kemudian sedikit meningkat menjadi 52,85 persen pada tahun 2016. Secara diagramatis, perkembangan proporsi belanja aparatur ditunjukkan pada Gambar 3.2.1.1.



Gambar 3.2.1.1. Perkembangan Proporsi Belanja Aparatur Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2012 – 2016

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta ditinjau berdasarkan surplus atau pun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Tabel 3.2.2.1 menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit di Kota Yogyakarta.

Tabel 3.2.2.1

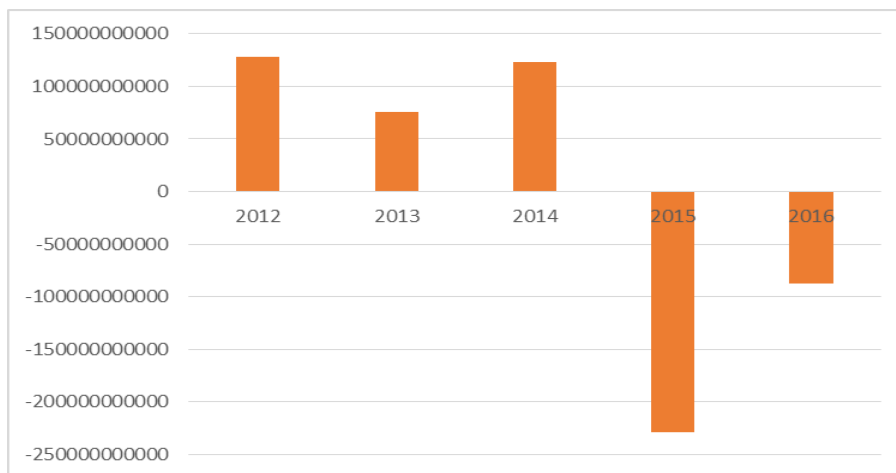
Defisit dan Surplus Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Daerah	1.157.578.918.317,01	1.309.580.194.014,42	1.459.742.435.083,81	1.434.009.588.218,85	1.577.679.933.045,20
Belanja Daerah	1.023.803.006.143,51	1.232.911.934.134,18	1.336.610.467.867,75	1.539.699.344.285,44	1.665.420.970.708,79
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.361.652.154,86	513.744.154,86	361.652.154,90	123.754.000.000,00	0,00
Surplus/ (Defisit) Riil	128.414.260.018,64	76.154.515.725,38	122.770.315.061,16	(229.443.756.066,59)	(87.741.037.663,59)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

Kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta pada periode 2012 – 2016 mengalami tiga kali surplus riil dan dua kali defisit riil berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2012 – 2014, sedangkan defisit anggaran terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2012, terdapat surplus anggaran sebesar 128,41 miliar rupiah, kemudian surplus menurun menjadi 76,15 miliar rupiah pada tahun 2013. Surplus anggaran daerah kembali meningkat menjadi 122,77 miliar rupiah pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi defisit anggaran yang cukup besar, yaitu 229,44 miliar rupiah.

Nilai defisit anggaran menurun pada tahun 2016 menjadi sekitar 87,74 miliar rupiah. Kondisi surplus dan defisit anggaran daerah Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Gambar 3.2.2.1.



Gambar 3.2.1.1. Dinamika Surplus dan Defisit Anggaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016  
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penuaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah. Defisit riil di Kota Yogyakarta dapat dipenuhi dengan SiLPA. Hal tersebut disebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki proporsi dari total defisit riil sebesar lebih dari 100 persen. Pada tahun 2015, nilai SiLPA tahun anggaran 2014 sebesar 434,40 miliar rupiah atau 189,33 persen dari defisit riil. Pada tahun 2016, nilai SiLPA tahun anggaran 2015 menurun (karena adanya defisit tahun sebelumnya) menjadi 205,34 miliar rupiah atau 234,03 persen dari defisit riil. Sementara itu, komponen lain dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta yaitu Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, yaitu sebesar 388,07 miliar rupiah (tahun 2015) dan 50,35 miliar rupiah (tahun 2016). Tabel 3.2.2.2 menunjukkan komposisi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat digunakan sebagai penutup defisit riil.

Tabel 3.2.2.2  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2016

Uraian	Nilai (Rupiah)		Proporsi dari Total Defisit Riil (%)	
	2015	2016	2015	2016
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	434.397.854.728,05	205.342.170.311,46	189,33	234,03
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Nilai (Rupiah)		Proporsi dari Total Defisit Riil (%)	
	2015	2016	2015	2016
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	388.071.650,00	50.353.494,00	0,17	0,06
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2012 – 2016; Hasil Olahan, 2017.

### 3.3. KERANGKA PENDANAAN

#### 3.3.1. Proyeksi Keuangan 2017-2022

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kota Yogyakarta bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi, dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel proyeksi keuangan Kota Yogyakarta 2017 – 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.3.1.1.

Tabel 3.3.1.1

## Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

URAIAN		Proyeksi (Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.586.451.305.811</b>	<b>1.600.068.925.032</b>	<b>1.657.150.815.502</b>	<b>1.715.508.707.193</b>	<b>1.776.769.352.281</b>	<b>1.840.882.065.167</b>
<b>A. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>557.709.068.666</b>	<b>547.827.533.822</b>	<b>559.612.443.000</b>	<b>571.445.443.000</b>	<b>583.549.443.000</b>	<b>595.683.443.000</b>
1	Pajak Daerah	346.906.500.000	356.806.500.000	363.406.500.000	370.856.500.000	378.806.500.000	386.956.500.000
2	Retribusi Daerah	37.522.457.605	33.095.152.896	33.100.000.000	33.500.000.000	33.900.000.000	34.000.000.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.109.251.810	24.531.504.087	28.105.943.000	30.388.943.000	33.142.943.000	36.126.943.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	114.071.217.915	133.394.376.839	135.000.000.000	136.700.000.000	137.700.000.000	138.600.000.000
<b>B. DANA PERIMBANGAN</b>		<b>904.664.547.867</b>	<b>931.206.701.932</b>	<b>971.757.802.546</b>	<b>1.014.660.777.138</b>	<b>1.080.088.362.615</b>	<b>1.108.227.674.250</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.428.848.000	62.454.190.000	64.327.815.700	66.257.650.171	68.245.379.676	70.292.741.066
2	Dana Alokasi Umum	658.504.186.000	658.504.186.000	678.259.311.580	698.607.090.927	719.565.303.655	741.152.262.765
3	Dana Alokasi Khusus	183.731.513.867	210.248.325.932	229.170.675.266	249.796.036.040	272.227.679.283	296.782.670.419
<b>C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>124.077.689.278</b>	<b>121.034.689.278</b>	<b>125.780.569.956</b>	<b>129.402.487.055</b>	<b>133.131.546.667</b>	<b>136.970.947.917</b>
1	Hibah	1.815.000.000	0	0	0	0	0
2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	113.534.689.278	113.534.689.278	116.940.729.956	120.448.951.855	124.062.420.411	127.784.293.023
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	7.500.000.000	7.575.000.000	7.650.750.000	7.727.257.500	7.804.530.075
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.228.000.000	0	1.264.840.000	1.302.785.200	1.341.868.756	1.382.124.819
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>1.666.195.785.675</b>	<b>1.718.090.204.088</b>	<b>1.753.949.449.363</b>	<b>1.789.925.870.557</b>	<b>1.826.836.868.763</b>	<b>1.864.709.034.137</b>
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>676.448.297.294</b>	<b>787.972.403.125</b>	<b>795.928.114.371</b>	<b>803.163.895.515</b>	<b>810.472.034.470</b>	<b>817.853.254.815</b>

URAIAN		Proyeksi (Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Belanja Pegawai	605.384.395.410	712.243.324.455	719.365.757.700	726.559.415.277	733.825.009.429	741.163.259.524
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	63.603.861.400	67.222.228.500	68.000.000.000	68.000.000.000	68.000.000.000	68.000.000.000
5	Belanja Bantuan Sosial	1.890.400.000	1.836.200.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	1.244.662.418	4.170.650.170	4.212.356.672	4.254.480.238	4.297.025.041	4.339.995.291
8	Belanja Tidak Terduga	4.324.978.066	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>989.747.488.381</b>	<b>930.117.800.963</b>	958.021.334.992	986.761.975.042	1.016.364.834.293	1.046.855.779.322
1	Belanja Pegawai	174.032.215.976					
2	Belanja Barang dan Jasa	497.374.265.916					
3	Belanja Modal	318.341.0006.489					
<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>		<b>(79.744.479.864)</b>	<b>(118.021.279.056)</b>	<b>(96.798.633.861)</b>	<b>(74.417.163.363)</b>	<b>(50.067.516.482)</b>	<b>(23.826.968.970)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
<b>A. Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>117.651.486.142</b>	<b>124.114.272.778</b>	<b>121.798.633.861</b>	<b>116.417.163.363</b>	<b>100.067.516.482</b>	<b>88.826.968.970</b>
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117.651.486.142	124.114.272.778	121.798.633.861	116.417.163.363	100.067.516.482	88.826968.970
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0

URAIAN		Proyeksi (Rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
<b>B. Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>37.907.006.278</b>	<b>6.092.993.722</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	37.907.006.278	6.092.993.722	25.000.000.000	42.000.000.000	50.000.000.000	65.000.000.000
3.	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
<b>C. Pembiayaan Netto</b>		<b>79.744.479.864</b>	<b>118.021.279.056</b>	<b>96.798.633.861</b>	<b>73.892.153.000</b>	<b>50.067.516.482</b>	<b>23.826.968.970</b>
<b>D. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2017

APBD Kota Yogyakarta pada periode 2017-2022 direncanakan seperti pada tabel 3.3.1.1. Rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tersebut direncanakan sebesar 2.12 persen. Rencana kenaikan tersebut masih didominasi oleh pajak daerah. Pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta direncanakan untuk naik rata-rata 2.21 persen setiap tahunnya. Kontribusi terbesar dari pajak tersebut masih diharapkan dari pajak hotel dan restoran. Sektor pajak lain yang diperkirakan naik adalah pajak parkir. Hal ini terkait perubahan pola parkir dari *on street* menuju *off street*, yang berakibat pada perubahan pengelolaan keuangan dari retribusi menjadi pajak. Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan yang baru sebagai akibat dari kenaikan kelas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, besarnya permintaan keringanan pajak dari masyarakat membuat sektor pajak ini sulit untuk ditargetkan untuk naik. Pajak BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang selama ini menjadi salah satu sumber PAD yang cukup besar diperkirakan tidak berkembang dikarenakan pemindahan hak atas tanah dan bangunan pada tahun sebelumnya cukup banyak terjadi. Berdasarkan data pada periode 2012-2016, sektor pajak lain masih diperkirakan *stagnan*. Dari sektor retribusi, yang diprediksi akan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0.68% per tahun. Kenaikan yang relatif kecil tersebut diasumsikan pada kenaikan tarif yang tidak bisa besar karena lebih memprioritaskan pelayanan pada masyarakat.

Data PAD pada tabel 3.3.1.1 menunjukkan adanya penurunan PAD dari tahun 2017 ke 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah mengalami penurunan disebabkan tingginya angka retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2017, yang diperkirakan tidak akan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Selain itu, penurunan retribusi daerah terkait penghapusan ijin gangguan. Namun pada 2018-2022 retribusi daerah diprediksi untuk naik dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 0,68 persen. Nilai Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 diprediksi adanya penurunan nilai deviden dari PDAM dan BPD. Penurunan deviden PDAM disebabkan karena penurunan jumlah pelanggan, sedangkan penurunan deviden BPD disebabkan adanya penurunan kontribusi saham Kota Yogyakarta dibandingkan D.I.Yogyakarta maupun kabupaten di D.I.Yogyakarta. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2018, pada periode 2018-2022 nilai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diprediksi mengalami kenaikan 10, 19 persen. Nilai Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018 dikarenakan pada tahun 2017 ada pengembalian terkait proses pilkada yang telah dilakukan serta realisasi pendapatan denda, dimana hal tersebut tidak dapat ditargetkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Namun, pada periode 2018-2022, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diprediksi naik dengan rata-rata kenaikan 0,96 persen per tahun.

Rata-rata kenaikan Dana Perimbangan pada periode 2017-2022 diprediksi pada angka 4,14 persen. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak diprediksi naik setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan 3 persen. Dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2017 dan 2018 mempunyai angka yang sama dengan asumsi belum ada perubahan yang signifikan pada tahun 2018 dibandingkan 2017. Namun untuk periode 2018-2022 DAU diprediksi naik dengan rata-rata kenaikan 3 persen. Dana alokasi khusus (DAK) diprediksi naik pada angka 9 persen untuk setiap tahunnya. Prediksi peningkatan DAK ini berdasarkan asumsi peningkatan DAK pendidikan.

Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan yang didukung dengan peningkatan jumlah PAUD ber-NPSN berpeluang untuk meningkatkan DAK Pendidikan yang masuk dalam kategori DAK non fisik. Selain dari DAK non fisik dari sektor pendidikan, penunjukan RS Jogja sebagai rumah sakit rujukan regional tipe B pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan alokasi DAK. Peningkatan DAK fisik sektor kesehatan yang diharapkan, merupakan wujud komitmen dari pemerintah pusat atas penunjukan tersebut.

Nilai lain-lain pendapatan daerah yang sah diprediksi dengan peningkatan rata-rata 3,14 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya diprediksi naik setiap tahunnya pada angka 3 persen. Dana penyesuaian otonomi khusus diprediksi untuk naik sebesar 1 persen setiap tahunnya. Kenaikan yang rendah ini disebabkan semakin banyaknya pemerintah daerah yang mampu memenuhi syarat untuk meraih dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Dari segi belanja, belanja daerah Kota Yogyakarta pada periode 2017-2022 diprediksi mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan 2,28 persen per tahun. Pada periode 2018-2022 belanja tidak langsung peningkatan rata-rata per tahun di prediksi pada angka 0,93 persen. Angka peningkatan belanja tidak langsung dari 2017 ke 2018 cukup signifikan karena adanya pemindahan belanja pegawai dari belanja langsung kepada belanja tidak langsung. Hal ini terkait kebijakan penghapusan honor pada kegiatan di belanja langsung dan pemberian tunjangan kinerja pegawai pada belanja tidak langsung. Pada periode 2018-2022 belanja pegawai pada belanja langsung diprediksi naik sebesar 1 persen setiap tahunnya, kenaikan ini mendasarkan pada asumsi adanya peningkatan jumlah ASN melalui mekanisme mutasi pegawai, namun belum memperhitungkan kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutment ASN. Hibah dan bansos direncanakan stagnan karena adanya perubahan paradigma pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui hibah dan bansos akan dialihkan pada pemberdayaan masyarakat melalui belanja langsung kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/dan Pemerintah Desa, Partai Politik diprediksi mengalami peningkatan yang relatif kecil dengan asumsi peningkatan sharing pembiayaan ke Balai Pisamp. Sedangkan bantuan untuk partai politik, tidak mengalami kenaikan karena pada tahun 2018 sudah mengalami kenaikan sebesar 500 persen dibanding tahun 2017. Bantuan tidak terduga diprediksi tetap sebesar 2,5 Miliar. Secara umum belanja langsung naik sebesar 3 persen.

Secara keseluruhan APBD Kota Yogyakarta 2017-2022, defisit belanja belanja dapat ditutup dari besarnya penerimaan pembiayaan. Besarnya penerimaan pembiayaan, memungkinkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan investasi dengan melakukan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Secara umum, SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya) menunjukkan tren yang turun diimbangi dengan batas defisit yang turun dan lebih menunjukkan perencanaan yang lebih mendekati realisasi.

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

#### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta antara lain :

##### 4.1.1. Kesenjangan Ekonomi

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jika dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik. Selama kurun waktu 2012 – 2016, PDRB per kapita Kota Yogyakarta meningkat dari Rp 48.702.000,- di tahun 2012 menjadi Rp 56.346.000,- di tahun 2016. Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita DIY. Walaupun begitu, peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Besaran rasio Gini, besaran bagian pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan terendah, dan besaran indeks Williamson menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk dan antar kecamatan. Selama kurun waktu 2012 – 2016, rasio Gini meningkat dari 0,3603 menjadi 0,42 dan indeks Williamson meningkat dari tahun 2012 hingga 2014 yaitu 0,506 menjadi 0,517. Meskipun demikian indeks Williamson menunjukkan penurunan angka pada tahun 2015 menjadi 0,505. Sementara itu, bagian pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan terendah mengalami penurunan dari 17,97 persen di tahun 2012 menjadi 13,09 persen di tahun 2016.

Tabel 4.1.1.1  
PDRB Per Kapita dan Pemerataan Pendapatan Kota Yogyakarta

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB perkapita (Rp)	48.702.000	50.262.000	53.207.000	54.259.000	56.346.000
Pemerataan Pendapatan Antar Penduduk:					
a. Bagian PDRB yang diterima 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah (persen)	17,97	15,57	15,18	14,01	13,09
b. Rasio Gini	0,3603	0,4366	0,3959	0,4431	0,42
Pemerataan Pendapatan Antar Kecamatan:					
Indeks Williamson	0,506	0,513	0,517	0,505	NA

Sumber:

1. PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017, BPS Kota Yogyakarta
2. Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016, BPS Kota Yogyakarta
3. Hasil Olahan 2017

Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY, dan cenderung meningkat. Selama kurun 2012 – 2016, Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62 persen menjadi 93,30 persen dan juga lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan

DIY. Pada pendekatan mikro, masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta terlihat lebih jelas. Dengan kriteria 17 parameter miskin (Keputusan Walikota Yogyakarta no 244/KEP/2012), maka di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 terdapat 18.881 keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin ini menurun dari tahun sebelumnya namun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51 persen menjadi 14,65 persen namun meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 (13,11 persen). Secara spasial, proporsi keluarga miskin di atas rata-rata Kota Yogyakarta (14,65 persen), sebagian besar terletak di daerah aliran sungai, yaitu Kecamatan Tegalgrejo (17,33 persen), Kecamatan Jetis (18,26 persen), Kecamatan Danurejan (21,21 persen), Kecamatan Gedongtengen (16,24 persen), Kecamatan Wirobrajan (17,12 persen), Kecamatan Gondomanan (14,69 persen), Kecamatan Pakualaman (15,11 persen), dan Kecamatan Mergangsan (21,08 persen), kecuali Kecamatan Kraton (17,97 persen) yang bukan termasuk daerah aliran sungai.

Tabel 4.1.1.2  
Jumlah dan Proporsi Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2011 – 2014

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin				Proporsi Keluarga Miskin (persen)			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Tegalgrejo	1.754	2.029	2.021	1.984	14,71	17,34	18,16	17,33
2	Jetis	1.264	1.816	1.825	1.613	14,00	20,70	21,81	18,26
3	Gondokusuman	1.511	2.000	1.920	1.793	10,92	14,47	15,04	13,59
4	Danurejan	1.035	1.459	1.521	1.422	15,20	21,02	23,51	21,21
5	Gedongtengen	1.180	1.352	1.320	1.086	17,82	20,32	20,30	16,24
6	Ngampilan	817	839	772	611	14,02	14,74	13,72	10,65
7	Wirobrajan	1.299	1.572	1.473	1.475	15,11	18,51	17,75	17,12
8	Mantrijeron	1.328	1.693	1.584	1.580	11,77	14,58	14,42	13,77
9	Kraton	1.019	1.251	1.301	1.284	14,05	17,52	20,03	17,97
10	Gondomanan	771	887	708	705	15,97	18,51	15,23	14,69
11	Pakualaman	559	654	642	523	15,68	18,60	18,85	15,11
12	Mergangsan	1.612	2.137	2.022	2.104	16,07	21,34	20,94	21,08
13	Umbulharjo	1.875	2.150	1.989	1.461	9,16	10,49	9,95	7,04
14	Kotagede	994	1.460	1.383	1.240	10,15	14,91	14,27	12,39
	Kota Yogyakarta	17.018	21.299	20.481	18.881	13,11	16,45	16,51	14,65

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2015, diolah

Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkat pendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikap mental) keluarga miskin. Kemiskinan di perkotaan erat kaitannya dengan terbatasnya peluang kerja yang produktif. Kota menjadi magnet bagi pendatang untuk harapan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Penduduk maupun pendatang sama-sama bersaing untuk memanfaatkan kehidupan kota. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki program-program bantuan untuk masyarakat miskin terutama bagi mereka yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan, selain program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat tentunya. Namun, adakalanya bantuan yang diperoleh oleh warga miskin malah membuahkan ketergantungan. Warga miskin cenderung menjadi malas berusaha karena sudah merasakan kenyamanan



akibat mendapat bantuan. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemberdayaan untuk mengubah sikap warga miskin agar mampu berkarya dan memperoleh penghasilan, diantaranya sebagai berikut.

#### **4.1.2. Kemampuan Bersaing Pelaku Perdagangan Kecil Masih Relatif Rendah Dibandingkan dengan Pelaku Perdagangan Besar**

Perekonomian tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran pelaku usaha tingkat kecil. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, prasarana perdagangan juga bertumbuh terutama pusat perbelanjaan dan pasar modern. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah, lengkap, dan selalu tersedia. Sampai dengan tahun 2013, sarana perdagangan di Kota Yogyakarta terdiri dari 31 pasar tradisional, 319 toko, 412 kios, 613 warung. Sementara itu, sampai dengan tahun 2014 terdapat 92 toko modern berdasarkan izin HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Keberadaan pasar modern ini dianggap menguntungkan konsumen serta mampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini, di Kota Yogyakarta, pendirian pasar modern sudah diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba mini Market di Kota Yogyakarta. Perwal ini mengatur baik jumlah pasar/toko modern maupun jarak antar pasar modern dan jarak dengan pasar tradisional. Pembatasan jumlah dan jarak ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat antar pedagang.

Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modern membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakah pemodal ini merupakan warga Kota Yogyakarta atau berasal dari luar. Selain itu, pekerja berasal dari mana karena sebenarnya diharapkan keberadaan toko modern harus dapat memberikan manfaat dalam pengembangan usaha mikro kecil dengan adanya kerjasama dengan UKM di Kota Yogyakarta di sekitar toko modern tersebut serta mampu menyerap tenaga kerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaan pasar tradisional juga diharapkan mampu menyerap pengusaha dan tenaga kerja lokal sebagai penggerak perekonomian kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung tumbuhnya pasar tradisional maupun pasar/toko modern agar keduanya bertumbuh bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan inovasi pelayanan yang diberikan oleh pedagang pasar tradisional maupun toko-toko berskala kecil agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

#### **4.1.3. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Belum Optimal**

Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa yang pada akhirnya pada Perpres Nomor 92 tahun 2011 menjadi dasar hukum terbentuknya Badan baru yang mengurus ekonomi kreatif (Bekraf) yang merupakan bagian dari

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peluang dan pangsa pasar yang dijanjikan oleh ekonomi kreatif masih terbuka lebar. Fokus dari ekonomi kreatif, yang mencakup industri kreatif, adalah penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Pada tahun 2015 berdasarkan Perpres Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif terdapat 16 bidang yang dikoordinasikan oleh Bekraf yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1) aplikasi dan game developer; 2) arsitektur; 3) desain interior; 4) desain komunikasi visual; 5) desain produk; 6) fashion; 7) film, animasi dan video film; 8) kriya; 9) kuliner; 10) fotografi; 11) musik ;12) penerbitan; 13) periklanan; 14) seni pertunjukan ;15) seni rupa ; 16) televise dan radio.

Pendekatan industri saat ini telah bergerak ke arah industri berorientasi konsumen sehingga muncul era produksi non-massal dengan faktor kandungan khusus, unik dan khas. Industri kreatif yang sarat kandungan karakteristik dan daya kreatifitas disainernya dapat mendorong perkembangan industri ini menjadi unggulan. Pasar konsumsi produk dan jasa industri kreatif relatif besar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Data dari PBB tahun 2003, menunjukkan 50% dari belanja konsumen di negara G7 adalah belanja untuk produk-produk hasil industri kreatif. Sementara itu, penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi pasar yang besar pula. Pada tahun 2010, ekonomi kreatif di Indonesia menciptakan nilai tambah sebesar 4,68 triliun rupiah atau 7,29% dari PDB nasional (Renstra Kemenparekraf 2012-2014). Ekonomi kreatif juga menyerap 8,6 juta tenaga kerja atau 7,9% dari total nasional.

Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Dalam komponen pariwisata, ekonomi kreatif dapat masuk melalui penciptaan produk-produk inovatif khas daerah, atau melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal (Suparwoko, 2010). Keterkaitan antara sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kualitas kepariwisataan dimana ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa kreatif sebagai suvenir dan sebagai hiburan
- 2) Penciptaan daya tarik wisata dimana kuliner, seni pertunjukan, musik, fesyen yang unik dapat dikembangkan sebagai wisata.
- 3) Promosi dimana produk dan jasa kreatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi wisata, sedangkan daya tarik wisata dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya kreatif yang unik.

Untuk pengembangan industri kreatif di Kota Yogyakarta diperlukan kemitraan dengan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya dan kreatifitas pelaku usaha. Industri kreatif yang diunggulkan pada penilaian mandiri kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) yang dilaksanakan oleh Bekraf pada bulan Agustus 2017 diperoleh data untuk Kota Yogyakarta sub sektor yang menjadi unggulan adalah seni pertunjukan, kriya dan aplikasi dan game developer. Unggulan tersebut dilihat dari besaran omset, serapan tenaga kerja dan daya ungit.

#### 4.1.4. Perlunya Peningkatan Potensi Pariwisata

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan yang terus meningkat. Selama sepuluh tahun terakhir hanya ada dua pembangunan objek dan daya tarik wisata dengan skala besar, yaitu Taman Pintar dan XT-Square. Pembangunan berfokus pada pembangunan kampung wisata. Jumlah kampung wisata sampai dengan tahun 2016 ada 17 kampung wisata. Kampung wisata belum optimal dalam meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Oleh karena itu perlu adanya program untuk meningkatkan kelayakan kampung wisata sebagai daerah tujuan wisata. Selain itu diperlukan juga pembangunan objek dan daya tarik wisata baru dengan skala besar mengingat pembangunan objek dan daya tarik wisata baru di kabupaten-kabupaten sekitar Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menambah atraksi malam guna menjaga tingkat rata-rata lama menginap tamu di Kota Yogyakarta.

Peningkatan objek dan daya tarik wisata baru di kabupaten-kabupaten sekitar Kota Yogyakarta berdampak positif terhadap perkembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di kota Yogyakarta. Hal tersebut tercermin dalam nilai PDRB Kota Yogyakarta dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bernilai 2,32 triliun pada tahun 2013 meningkat sampai dengan 2,74 triliun pada tahun 2016. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada periode 2014-2016 selalu lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor dengan perkembangan yang cepat. Selain pertumbuhan yang cepat, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Yogyakarta juga besar. Rata-rata kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Yogyakarta adalah 11,54 persen.

Tabel 4.1.1.4  
Kontribusi Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (juta rupiah)	2,320,365.42	2,444,064.84	2,589,749.81	2,740,135.53
Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan minum terhadap PDRB	11.46%	11.47%	11.56%	11.64%
Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	6.28%	5.33%	5.96%	5.81%
Pertumbuhan Ekonomi	5.47%	5.28%	5.09%	5.11%

Sumber: BPS yang Diolah, 2017

Kontribusi dan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendekatan sektor pariwisata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapat masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini nampak pada angka gini ratio yang masih menunjukkan adanya ketimpangan

di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mampu menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Yogyakarta.

#### **4.1.5. Pengawasan Perizinan Investasi Belum Optimal**

Kegiatan investasi sangat terkait dengan prosedur perizinan mendirikan usaha yang berlaku di daerah. Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang terbaik dalam kemudahan pendirian usaha (*Doing Business di Indonesia 2012, World Bank*). Indikator pengukurannya adalah jumlah prosedur, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap prosedur, biaya yang dibutuhkan, serta persyaratan modal disetor minimum. Oleh karena itu, kemudahan mendirikan usaha di Kota Yogyakarta ini sebaiknya diikuti dengan peningkatan investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data, jumlah PMA dan PMDN yang masuk ke Kota Yogyakarta pada tahun 2014 adalah 13 PMA dan 3 PMDN. Data penanaman Modal (PMA/PMDN) Kota Yogyakarta tersebut masih menggunakan data yang bersumber dari Gerai P2T (Perizinan) di DIY. Data tersebut merupakan inputan dari SPIPISE yang link dengan BKPM RI. Secara nasional, data realisasi penanaman modal mengacu pada hasil SPIPISE tersebut, meskipun tidak dapat mencerminkan nilai investasi sesungguhnya karena ada perusahaan yang tidak mendaftarkan izin prinsipnya ke BKPM tetapi langsung mengurus izin daerah seperti izin HO, IMD, IUP, dan TDP. Berdasarkan Perka Nomor 5 Tahun 2013, kategori perusahaan yang termasuk PMDN adalah yang memiliki total investasi minimal 500 juta rupiah, sedangkan PMA 10 Milyar rupiah (bentuk badan usaha PT). Pada umumnya, perusahaan yang mengurus izin prinsip (izin penanaman modal) ke BKPM adalah yang membutuhkan fasilitas untuk ekspor dan impor atau menggunakan tenaga kerja asing sehingga perusahaan yang dalam operasinya tidak membutuhkannya cenderung langsung mengurus izin-izin di daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta belum menyelenggarakan perizinan penanaman modal sehubungan dengan belum terbentuknya kelembagaan yang mengampu penanaman modal sehingga pengawasan terhadap kegiatan investasi juga belum dapat dilakukan.

#### **4.1.6. Masih Adanya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, warga sudah berani untuk melapor.

Kesadaran kaum perempuan di Kota Yogyakarta untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah kejadian dilaporkan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2016, kasus KDRT yang terjadi di Kota

Yogyakarta mencapai 544 kasus. Data kekerasan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2013, meningkat dari 265 kasus di tahun 2012 menjadi 691 kasus. Kondisi ini kemudian membaik (menurun) hingga tahun 2016, meskipun jumlah kasus masih relatif tinggi jika dibandingkan tahun 2012.

Kekerasan yang terjadi tidak hanya dilakukan kepada orang dewasa ke anak-anak, tetapi sekarang terjadi pada anak dengan korban anak. Kekerasan dengan pelaku anak-anak, dimungkinkan karena faktor pendidikan dan penggunaan teknologi informasi seperti dari *game*, tontonan dan media sosial yang tidak didampingi. Dari kasus kekerasan tersebut tidak semuanya diselesaikan secara hukum, dan biasanya korban kekerasan hanya minta untuk dimediasi. Melalui UPT Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, korban dapat melaporkan dan biaya perkara ke pengadilan bagi korban kekerasan akan ditanggung dari pemerintah kota melalui dana APBD termasuk biaya penanganan khusus seperti di rumah sakit. Kegiatan penanganan di rumah sakit, biaya perkara di pengadilan, sampai dengan pendampingan sudah ada peraturan walikota yang mengatur pembiayaan tersebut, yaitu Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2012.

Rasio kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta meningkat dari 0,20 tahun 2012 menjadi 0,55 tahun 2013, kemudian rasio KDRT mengalami penurunan terus hingga 2016 (sebesar 0,41). Meningkatnya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; ketidaksetaraan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; kepatuhan istri pada suami; penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.

Sementara itu penyebab utama kekerasan terhadap anak ialah pola asuh yang tidak tepat oleh orang tua. Selain itu permasalahan dalam perlindungan anak tersebut muncul, antara lain, karena belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak yang ditunjukkan dengan: (1) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (2) masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Rekso Dyah Utami", dibentuk sebagai wujud kepedulian untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 14 (ayat 1) huruf a dan pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. P2TP2A berfungsi memfasilitasi pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan pendampingan terhadap korban. Biaya penyelenggaraan P2TP2A "Rekso Dyah Utami" bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **4.1.7. Masih Rendahnya Sarana Prasarana Pendukung Olahraga dan Kepemudaan**

Berdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 1,94 pada tahun 2013 menjadi 0,48 pada tahun 2014. Hal ini diikuti dengan menurunnya jumlah klub olahraga pada tahun 2013 dan 2014, yaitu dari 70 klub di tahun 2013 menjadi 20 klub di tahun 2014. Selain itu jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) juga mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016, penurunan tersebut terjadi dari 16 gelanggang/balai remaja pada tahun 2014 menjadi 5 gelanggang/balai remaja pada tahun 2016. Sementara itu jumlah organisasi pemuda juga menurun dari 157 organisasi tahun 2012 menjadi 94 organisasi tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan olahraga dan kepemudaan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat Kota Yogyakarta.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga, antara lain: (1) terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; (2) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (3) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; serta (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

#### **4.1.8. Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik**

Di era yang semakin moderen ini komunikasi sosial yang riil semakin terbatas, sedangkan komunikasi jejaring sosial semakin berkembang. Sumber konflik tidak saja berada pada tataran riil dalam kehidupan nyata yang dapat diamati secara visual, akan tetapi dapat diakibatkan oleh konflik sosial di dunia maya, yang justru memiliki dampak yang lebih luas (cenderung tidak terbatas). Untuk itulah meskipun prestasi yang diperoleh dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tataran baik, namun masih dihadapkan pada permasalahan. Untuk itu diperlukan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Identifikasi permasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut adalah: belum optimalnya pengendalian potensi konflik. Hal ini terkait dengan usaha preventif dalam menghindari konflik dan penanganan saat dan pasca konflik. Dalam melakukan usaha preventif terdapat keterbatasan frekuensi pembinaan dan kunjungan. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP hanya 2 kali tiap tahunnya, sedangkan pembinaan politik daerah 38 kali tiap tahunnya (Lakip Kantor Kesbangpol Kota Yogyakarta, 2014). Pemberian konsekuensi dari pelaku konflik harus dapat memberikan efek jera sehingga tidak terulang, tetapi fokus yang lebih diutamakan adalah pada usaha preventif sebelum terjadinya konflik.

#### **4.1.9. Masalah Ketertiban dan Keamanan**

Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang baik, agar semua dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban ini masih menghadapi

beberapa permasalahan. Untuk itu diperlukan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan Keamanan Ketertiban. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan penelusuran data dokumen, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

**a. Keterbatasan pembentukan rescue linmas**

Jumlah linmas terus mengalami penurunan, pada tahun 2012 berjumlah 2.904 linmas, menurun menjadi 2.890 linmas pada tahun 2013, dan menurun kembali menjadi 2.864 linmas pada tahun 2014 (Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 2015). Hal ini dikarenakan penurunan jumlah petugas linmas karena faktor pensiun dan belum ada regenerasi.

**b. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial**

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi. Menurut Lakip Dinas Ketertiban tahun 2014 adalah 1455 pelanggaran pada tahun 2012, pada tahun 2013 menurun menjadi 1.178 pelanggaran. Kemudian pada tahun 2014 menjadi 1340 pelanggaran. Melihat angka pelanggaran yang cukup tinggi tersebut, sudah dimulai pelaksanaan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Gerakan panca tertib meliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Gerakan ini didukung Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Hingga saat ini terdapat 3 kampung yang menjadi laboratorium percontohan kampung panca tertib yakni kampung Pandeyan, Kampung Gamelan, dan Kampung Pakualaman. Gerakan kampung panca tertib adalah aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan.

**c. Penurunan kualitas siskamling di Kota Yogyakarta**

Jumlah pos siskamling mengalami penurunan dari 1305 unit pada tahun 2011, menjadi 1.226 unit pada tahun 2013 dan 2014. Terjadinya penurunan jumlah siskamling sebesar 6,05 persen ini menurut Dinas Ketertiban adalah karena pengalihan status tanah. Penurunan jumlah pos siskamling mencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibat sistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yang telah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modern yang memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dan keluarga kecil/inti (*nucleus family*), banyaknya pendatang yang kurang memiliki

ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tata kehidupan bermasyarakat, dll.

#### **4.1.10. Tingginya Minat untuk Bersekolah di Kota Yogyakarta**

Secara kuantitatif, besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Yogyakarta dari tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan angka di atas 100 persen, angka demikian menunjukkan bahwa semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu apabila dilihat dari indikator APK. Sementara itu, APM yang menunjukkan tingginya minat warga untuk melanjutkan pendidikan juga menunjukkan angka yang sangat menggembirakan dimana angkanya lebih besar dari 100 persen dan rerata pertumbuhannya juga menunjukkan besaran angka yang positif. Hal tersebut menunjukkan banyaknya siswa dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta serta menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang baik serta partisipasi masyarakat yang lebih besar dari penduduk usia sekolah setiap jenjang pendidikan.

#### **4.1.11. Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Belum Optimal**

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya dari aspek kesehatan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat tersebut, antara lain angka kematian ibu, bayi, balita, prevalensi gizi buruk, dan usia harapan hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun sejak 2014 hingga 2016 yaitu dari 14,19 menjadi 7,81. Menurunnya kematian bayi menunjukkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat terutama pada golongan rawan yaitu remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan bayi.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 sebesar 45,8 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan masih adanya kasus kematian pada ibu melahirkan. Angka Kematian Ibu di tahun 2014 ini sudah sangat baik jika dibandingkan tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 204,3. Meskipun demikian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 125,88 dan kembali turun menjadi 104,14 pada tahun 2016. Pada dasarnya penurunan AKI Kota Yogyakarta berhasil tercapai, pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk menekan angka kematian ibu tersebut.

Banyak program kesehatan yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, namun berdasarkan data masih terdapat kasus gizi buruk dan kematian pada balita. Kedua indikator ini saling berkaitan. Peran gizi di masa pertumbuhan sangatlah penting. Anak yang tidak mendapat asupan gizi yang tepat dan cukup akan menjadikan dirinya rentan terhadap penyakit. Pihak Dinas Kesehatan berharap, tidak hanya mencapai target namun sebisa mungkin kasus gizi buruk bisa ditekan hingga 0 persen. Meskipun demikian angka prevalensi balita gizi buruk masih ada di Kota Yogyakarta, bahkan dari tahun 2013-2016 angka ini cenderung naik (0,59 persen menjadi 0,94 persen). Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain kualitas kehamilan yang buruk, kehamilan risiko tinggi dan Berat Bayi Lahir Rendah



(BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi juga terjadi pada keluarga tergolong mampu. Hal ini dimungkinkan karena pola makan kurang tepat yang disebabkan salah satunya karena pola asuh telah beralih ke orang lain, sehingga orang tua kurang memperhatikan. Gizi buruk pada balita juga dapat disebabkan adanya penyakit penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi saat ini juga mengalami penurunan, karena adanya isu berkaitan agama dan kekhawatiran terkena efek samping dari vaksin, sehingga anak lebih rentan terkena penyakit dan berat badan rendah, bahkan kematian.

#### **4.1.12. Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera Belum Optimal**

Berdasarkan data, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini tidak digunakan untuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsi keluarga menurut BKKBN, di antaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, sehingga seharusnya persentase indikator ini diharapkan semakin menurun yang artinya status keluarga menjadi sejahtera, namun pada kenyataannya persentase semakin meningkat dari tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2012, terdapat 40,18 persen keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Jumlah itu terus meningkat hingga mencapai 58,02 persen pada tahun 2014, atau terdapat 48.121 keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perlu adanya upaya untuk mengaktifkan fungsi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama lintas sektoral yang baik diperlukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada.

#### **4.1.13. Jumlah Taman dan RTH Belum Menunjukkan Peningkatan**

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup adanya taman-taman yang juga memiliki fungsi sebagai RTH dan terletak di bantaran sungai, baik Sungai Code, Sungai Winongo, maupun Sungai Gajahwong dalam kurun waktu 2013 hingga 2016 belum menunjukkan penambahan baik jumlah maupun luas taman di bantaran sungai. Keterbatasan ketersediaan lahan dan juga pengembangan taman khususnya di bantaran Sungai Code, Sungai Winongo, maupun Sungai Gajahwong menjadi kendala utama. Peningkatan jumlah dan luas taman di bantaran sungai Kota Yogyakarta hanya terjadi pada tahun 2012 menuju 2013, yaitu 11 unit menjadi 12 unit taman dengan luas 550 m<sup>2</sup> menjadi 640 m<sup>2</sup>.

RTH memiliki fungsi untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota Yogyakarta, keberadaan RTH dapat memperbaiki iklim mikro kota dan estetika kota. Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan dan dapat menjadi isu masih penting untuk diangkat pada lima tahun mendatang. Luas RTH di Kota Yogyakarta sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang sebesar 30 persen dari luas wilayah belum mencapai target. Meskipun terjadi peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 (sebesar 18,95 persen meningkat menjadi 19,05 persen), akan tetapi tantangan untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta akan cukup berat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan luas RTH di Kota

Yogyakarta tahun 2015 hingga 2016 yang belum mengalami penambahan luas. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dapat mendekati kepada target luasan RTH sesuai standar yaitu 30% dari luas wilayah.

#### **4.1.14. Meningkatnya Pemanfaatan Lahan untuk Jasa dan Perusahaan**

Pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan terus mengalami peningkatan, sedangkan lahan pertanian semakin menurun. Luas penggunaan lahan sektor jasa yaitu 279,59 Hektar pada tahun 2012, meningkat sebesar 0,62 persen menjadi 281,33 Hektar pada tahun 2015. Sementara itu, luas penggunaan lahan untuk perusahaan sebesar 294,19 Hektar pada tahun 2012, meningkat sekitar 5,30 persen menjadi 309,77 Hektar pada tahun 2015. Lahan pertanian memiliki penurunan luasan yang cukup besar, yakni 111,81 hektar pada tahun 2012 menjadi 101,10 hektar pada tahun 2016 atau menurun 9,58 persen dalam periode 2012 – 2016. Berdasarkan luas wilayah produktif tahun 2012 – 2016 di Kota Yogyakarta, pertumbuhan rata-rata (persen/tahun) penggunaan lahan untuk Jasa sebesar 59,35 persen dan untuk Perusahaan sebesar 64,15 persen. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata penggunaan lahan produktif lainnya di Kota Yogyakarta. Untuk itu perlu upaya pengendalian supaya alih fungsi di masa yang akan datang tidak merugikan kepentingan warga Kota Yogyakarta.

#### **4.1.15. Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal**

Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kota Yogyakarta. Jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2016 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di atas 200 ton/hari. Meskipun angka timbulan sampah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 263 ton/hari (pada tahun 2012) menjadi 226,2 ton/hari (pada tahun 2016), akan tetapi belum diimbangi dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA. Keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah mengakibatkan belum seluruh sampah terangkut ke TPA, hanya 77,98 persen volume sampah yang terangkut ke TPA (data tahun 2016).

Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta adalah rendahnya presentase sampah yang dikelola secara 3R. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (*reduce, reuse, recycle*), berdasarkan data persentase volume sampah yang diolah secara 3R terus menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mulai dari 26,62 persen menjadi 20,01 persen.

Selain permasalahan sampah, masalah Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta juga belum optimal. Kinerja pengawasan limbah usaha di Kota Yogyakarta masih menunjukkan presentase yang belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pengawasan limbah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 yang masih fluktuatif. Pengawasan limbah usaha di Kota Yogyakarta belum seluruhnya terawasi. Pada tahun 2012 – 2016 rata-rata realisasi pengawasannya masih di bawah angka 50

persen, meskipun pada tahun 2014 dan 2016 mengalami peningkatan kinerja dengan jumlah perusahaan yang diawasi menjadi 61 persen pada tahun 2014 dan 80 persen pada tahun 2016.

#### **4.1.16. Kinerja Pelayanan Air Minum/Air Bersih Masih Rendah**

Penyediaan air bersih di Kota Yogyakarta didapat dari jaringan perpipaan (PDAM) maupun dari jaringan non perpipaan yang di luar PDAM. Aktifitas penduduk Kota Yogyakarta terkait konsumsi air minum masih belum seluruhnya menggunakan jasa PDAM. Sebagian besar penduduk masih menggunakan sumur-sumur yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sebagai air minum, untuk memasak, maupun untuk mencuci. Meskipun demikian, indikator pelayanan air minum yang bersih untuk penduduk perlu semakin diperhatikan mengingat padatnya permukiman dan buruknya sanitasi di kawasan permukiman terutama bantaran sungai, membuat sumur warga di kawasan tersebut tercemar bakteri E. coli dan nitrat. Pada tahun 2012 – 2016 persentase cakupan pelayanan air minum PDAM untuk penduduk di Kota Yogyakarta masih di bawah 50 persen dan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan rata-rata pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta (1,59 persen/tahun) lebih besar dari rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk terlayani PDAM (0,32 persen/tahun). Dalam rentang tahun 2012-2016, persentase cakupan pelayanan air minum mencapai 34,6 persen dan jumlah ini terus mengalami penurunan hingga persentasenya menjadi 32,22 persen. Penurunan rata-rata persentase cakupan pelayanan air minum dari tahun 2012 – 2016 mencapai 0,595 persen per tahun.

#### **4.1.17. Pencemaran Air Sungai Masih Terjadi**

Tiga sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta, yakni Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong masih belum dapat memenuhi syarat sebagai sumber air baku. Persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu masih cukup rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan kualitas air sungai dari tahun 2012 hingga 2015. Berdasarkan hasil pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing sungai, kualitas air sungai yang sesuai baku mutu masih di bawah 75 persen. Pada tahun 2012 persentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu sebesar 72 persen dan menurun hingga tahun 2015 menjadi 55,33 persen. Meskipun pada tahun 2016 presentase kualitas air sungai yang sesuai baku mutu mengalami kenaikan menjadi 57,34 persen, akan tetapi kualitas air sungai di Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong belum menunjukkan kualitas air yang lebih baik.

#### **4.1.18. Permasalahan Transportasi Perkotaan**

Andalan utama pergerakan dan perpindahan orang dan barang di perkotaan Yogyakarta masih mengandalkan transportasi berbasis jalan yang dipresentasikan oleh arus lalu lintas dengan kendaraan bermotor. Hampir tidak ada penambahan ruas jalan di perkotaan Yogyakarta, namun di sisi lain jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan semakin meningkat. Akibatnya daya tampung (kapasitas) jalan akan semakin menurun. Akumulasi dari ini semua akan berdampak kepada biaya transportasi menjadi mahal, kebutuhan lahan parkir yang besar, serta berbagai dampak turunan lainnya tidak saja bagi pengguna tapi

juga bagi non-pengguna. Angkutan umum seperti Trans Jogja maupun angkutan umum lainnya yang beroperasi di perkotaan Yogyakarta ternyata belum mampu untuk mengurangi peran kendaraan pribadi sebagai moda angkutan orang. Penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat karena berbagai alasan. Keterbatasan layanan angkutan umum menjadi alasan utama. Belum terjangkaunya halte dari tempat tinggal merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Di samping itu ketepatan waktu layanan juga menjadi faktor penyebab hal tersebut. Aspek layanan transportasi di Kota Yogyakarta juga belum menunjukkan kinerja yang bagus, khususnya untuk layanan transportasi perkotaan (angkutan umum darat). Ketersediaan (*supply*) layanan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta masih belum menarik minat masyarakat. Permasalahan transportasi bisa dianalogikan sebagai sebuah siklus yang saling mempengaruhi. Kurangnya pelayanan transportasi umum perkotaan memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi. Trans Jogja yang menjadi moda transportasi angkutan darat utama di Kota Yogyakarta masih belum bisa menjadi solusi bagi angkutan umum darat. Masih belum optimal layanan ini berkaitan dengan ketersediaan moda, jalur trayek dan juga ruang jalan.

Permasalahan transportasi yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta juga dialami oleh beberapa kota besar lain. Transportasi berkorelasi dengan perkembangan suatu wilayah, apabila terdapat masalah dengan transportasi maka akan mempengaruhi sektor lain terutama sektor ekonomi dan perhubungan. Kurangnya infrastruktur transportasi, pengelolaan sistem transportasi yang buruk serta lemahnya kebijakan pengembangan transportasi yang berkelanjutan merupakan penyebab utama permasalahan tersebut. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kemacetan lalu lintas, penurunan keselamatan lalu lintas dan polusi oleh emisi kendaraan. Dampak dari permasalahan transportasi tidak hanya terbatas sampai permasalahan kemacetan dan keselamatan lalu lintas, namun juga akan berpengaruh pada degradasi lingkungan. Berbagai permasalahan transportasi di Kota Yogyakarta telah memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah terjadinya kemacetan lalu lintas (yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai V/C rasio dari 0,44 - 0,81) di beberapa ruas jalan pada jam-jam sibuk maupun pada akhir pekan atau masa liburan.

Berdasarkan data dan hasil survei dari dinas Perhubungan tahun 2016 diketahui bahwa saat hari sabtu atau libur kerja rata-rata kecepatan perjalanan di setiap ruas jalan utama di kota Yogyakarta adalah sekitar 10 km/jam – 20 km/jam. Hal ini mengidentifikasi bahwa kota Yogyakarta selalu padat atau ramai lancar, walupun tidak terjadi kemacetan atau kecepatan perjalanan yang rendah. Begitu juga rata-rata kecepatan yang terjadi pada hari kerja pada ruas jalan utama kota Yogyakarta sama seperti saat hari sabtu atau libur kerja kecepatan rata-rata yang terjadi di setiap ruas adalah sekitar 10 km/jam – 20 km/jam.

Degradasi lingkungan tersebut juga bisa ditunjukkan oleh penurunan keselamatan lalu lintas. Jalan-jalan yang semrawut dipenuhi berbagai jenis kendaraan pribadi serta penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir mengakibatkan kenyamanan berlalu lintas berkurang dan kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat. Kondisi lalu lintas Kota Yogyakarta yang merupakan lalu lintas tercampur (*mix traffic*) antara kendaraan lambat dan kendaraan cepat semakin memperberat permasalahan keselamatan lalu lintas. Di samping itu, kualitas lingkungan yang diukur berdasarkan parameter kualitas udara Kota Yogyakarta

mengalami penurunan, meski sebagian besar masih di bawah ambang batas. Kecenderungan penurunan kualitas udara diperparah pula dengan peningkatan kemacetan lalu lintas yang memberikan tambahan kontribusi terhadap jumlah polutan udara.

Penurunan penggunaan angkutan umum perkotaan di Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kemudahan dalam mendapatkan/memiliki sepeda motor dan mobil pribadi. Apabila jumlah kendaraan semakin padat, penggunaan ruang jalan menjadi tidak efisien. Kepadatan lalu lintas semakin tinggi, kinerja pergerakan lalu lintas terjadi degradasi sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di berbagai titik. Kepadatan yang tinggi mempengaruhi keselamatan lalu lintas yang juga semakin menurun dengan tidak diikuti dengan perilaku berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas cenderung berkembang semakin tinggi setiap tahun. Dari aspek lingkungan, tidak berkembangnya angkutan umum dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh semakin banyak polutan yang dihasilkan oleh jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat.

Selain moda transportasi, masalah transportasi di Kota Yogyakarta juga terletak pada keterbatasan prasarana transportasi seperti ketersediaan jalan dan rambu lalu lintas. Panjang jaringan jalan yang ada di Kota Yogyakarta relatif tidak bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun dikarenakan keterbatasan ruang untuk pembangunan. Hal ini berbanding terbalik dengan penambahan jumlah kendaraan pribadi mengakibatkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun dari 0,00096 pada tahun 2012 menjadi 0,00040 pada tahun 2016. Selain menimbulkan kemacetan, kondisi tersebut sangat berpotensi terhadap penurunan keselamatan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari kinerja lalu lintas yang direpresentasikan dengan nilai V/C rasio yang makin membesar (dari 0,44 menjadi 0,80). Semakin besar nilai V/C rasio semakin buruk kinerja lalu lintas yang ditunjukkan dengan penurunan kecepatan atau peningkatan kemacetan jalan. Kondisi ini seringkali diikuti dengan penurunan keselamatan lalu lintas ditunjukkan dengan naiknya fatalitas kecelakaan dari 491 kejadian di tahun 2014 menjadi 616 kejadian pada tahun 2016.

Ketersediaan jalan harus diikuti oleh ketersediaan fasilitas penunjang jalan. Berdasarkan data yang tersedia, ketersediaan fasilitas penunjang jalan hanya berupa rambu dan trotoar. Secara fisik ketersediaan trotoar di Yogyakarta pada tahun 2014 sudah mencapai 81,34 persen, artinya panjang jalan yang sudah dilengkapi trotoar telah mencapai 81,34 persen. Meskipun demikian, masih banyak trotoar yang tidak dapat digunakan dengan baik dan benar. Konstruksi trotoar yang rusak dapat membahayakan pengguna. Sejumlah pejalan kaki seringkali tidak tertampung semua di trotoar, penyalahgunaan ruang trotoar yang dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan juga menjadi masalah sehingga pejalan kaki terpaksa memanfaatkan badan jalan untuk berjalan kaki. Hal ini juga menyangkut keselamatan pejalan kaki dan pada akhirnya akan mengganggu arus lalu lintas.

Sebagai salah satu kota tujuan wisata yang tidak pernah sepi wisatawan, di saat liburan panjang akan terjadi penambahan atau peningkatan volume lalu lintas yang tinggi sehingga melebihi kapasitas jalan atau dengan kata lain terjadi macet. Kemacetan merupakan salah satu masalah pada sektor transportasi. Ada beberapa penyebab kemacetan yang terjadi di Kota Yogyakarta antara lain lebar jalan di kawasan perkotaan yang relatif sempit, jarak simpang yang berdekatan, hambatan samping yang tinggi, meningkatnya

volume kendaraan, kegiatan parkir *on the street*, kegiatan *manuver* dan *crossing* kendaraan di beberapa titik tertentu serta kegiatan kendaraan tidak bermotor.

Selain dari hal-hal yang disebutkan di atas, masih ada permasalahan terkait kebijakan dari pemerintah pusat mengenai rencana penutupan perlintasan sebidang yang sudah dibangun *flyover* maupun *underpass*. Adanya rencana penutupan tersebut membawa permasalahan baru di Kota Yogyakarta di kawasan perlintasan Lempuyangan. Sebagai gambaran kondisi yang ada di jalan Dr. Sutomo saat ini merupakan salah satu dari 10 ruas jalan yang ada di Kota Yogyakarta dengan kinerja terburuk. Apabila ditambah dengan penutupan perlintasan sebidang di bawah flyover Lempuyangan maka akan menambah beban di jalan tersebut.

#### **4.1.19. Belum Optimalnya Pelayanan Terkait Kebencanaan**

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperoleh dalam pelayanan kebencanaan antara lain meliputi bencana kebakaran, gempa bumi, puting beliung, banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Merapi, dan bencana abu vulkanik akibat erupsi Gunung Kelud. Pemasalahan kebencanaan ini dirumuskan berdasarkan analisis data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luas. Hal ini perlu diperharikan sebab semua wilayah termasuk jalan memiliki potensi kebakaran. Luas potensi wilayah kebakaran 32,5 km<sup>2</sup> (Lakip BPBD 2014). Kemudian terkait potensi terjadinya bencana alam, optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana perlu dilakukan mengingat potensi kebencanaan lokal yang dimiliki Kota Yogyakarta diantaranya gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu mekanisme yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam penanganan bencana. Hingga saat ini mekanisme CSR dari swasta yang dapat dikerjasamakan dengan BPBD belum terlaksana. Ke depannya mekanisme CSR kebencanaan dapat menjadi pilihan dalam penanganan kebencanaan yang lebih optimal.

#### **4.1.20. Masalah Tertib Administrasi Kependudukan dan Kepadatan Penduduk**

Belum semua penduduk Kota Yogyakarta memiliki akte kelahiran. Data menunjukkan bahwa kepemilikan akte kelahiran warga Kota Yogyakarta yang tercatat memiliki adalah 66 persen pada tahun 2016. Masih ada sekitar 34 persen warga Kota Yogyakarta yang belum memiliki akte kelahiran, yang dimungkinkan terjadi karena kelompok usia di atas 50 tahun mungkin belum memiliki akte kelahiran namun masih berupa surat kenal lahir. Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,53 persen. Sedangkan untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sudah melakukan upaya seperti “jemput bola” sehingga penduduk menjadi sadar mengenai arti penting kepemilikan dokumen

kependudukan. Hal ini dikarenakan, akte kelahiran dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan serta untuk mendapatkan pelayanan sosial ekonomi lainnya, seperti untuk pendaftaran sekolah.

Selain masalah catatan sipil, kepadatan penduduk yang terus meningkat juga menjadi permasalahan pembangunan di Kota Yogyakarta. Kajian kependudukan memposisikan angka kelahiran dan kematian sebagai komponen internal dalam perhitungan data dasar kependudukan. Data menunjukkan bahwa angka kelahiran hidup dan ibu melahirkan dari tahun ke tahun semakin bertambah/membaik. Kondisi ini menggambarkan bahwa angka kelahiran yang semakin bertambah dipengaruhi oleh jumlah pasangan usia subur, ataupun boleh jadi indikasi adanya kasus pernikahan dini yang semakin bertambah. Dalam kajian kependudukan perkotaan, satu aspek yang seringkali digunakan sebagai parameter pembangunan perkotaan adalah angka migrasi penduduk di sebuah Kota. Di Kota Yogyakarta, angka migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar pada tahun 2014 (9.293 jiwa) dan 2015 (11.781 jiwa). Namun, kondisi berkebalikan dapat dilihat di tahun 2012 hingga 2013 angka migrasi keluar ternyata menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan angka migrasi masuk. Kondisi demikian disebabkan karena penduduk lebih memilih untuk berpindah domisili dan menetap di Kota Yogyakarta. Kondisi ini nampaknya disebabkan oleh faktor daya tarik kota yang menawarkan berbagai fasilitas kota, seperti fasilitas pendidikan, ekonomi, ataupun hunian/permukiman. Meningkatnya angka migrasi masuk (pertumbuhan rata-rata sebesar 34,61 persen per tahun) menjadi permasalahan kependudukan di Kota Yogyakarta, sedangkan migrasi keluar (pertumbuhan rata-rata sebesar 10,27 persen per tahun).

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 mencapai 12.854 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan permukiman, ruang publik, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Apabila dilihat dari rerata angka kepadatannya, terdapat beberapa kecamatan yang besaran kepadatan penduduknya melampaui angka kepadatan Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan Jetis, Danurejan, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan, Pakualaman, dan Mergangsan. Sementara itu, terdapat tiga kecamatan yang angka kepadatan penduduknya lebih kecil dari angka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan Gondokusuman, Mantrijeron, Umbulharjo, Kraton, Gondomanan, dan Kotagede. Hal yang menarik adalah adanya satu pola penurunan angka kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini diduga karena adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk mulai tahun 2012, dan 2014 yang disebabkan adanya kebijakan e-KTP dengan pencatatan domisili tunggal kepada para warga negara. Selain itu, ditengarai bahwa pertambahan kawasan terbangun (*built-up areas*) nampaknya menyebabkan warga untuk berpindah tempat tinggal.

#### **4.1.13. Belum Optimalnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tata pemerintahan merupakan bidang yang sangat strategis untuk menghasilkan sebuah penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara luas, dengan sebuah sistem yang terstruktur. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi yang didasarkan pada upaya penelusuran data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang

diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan secara akumatif maka diketahui permasalahan tersebut antara lain:

**a. Perubahan regulasi yang berlangsung secara cepat, inkonsistensi peraturan perundang-undangan, dan hubungan antar perangkat daerah dan unit kerja menghadapi kompleksitas untuk mencapai sinkronisasi baik pada level perencanaan, implementasi, penyerapan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan maupun evaluasi.**

Bertolak dari hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan ini bersumber pada perubahan regulasi yang berlangsung di pusat khususnya mengenai pemerintahan daerah. Jika ditelusur secara historis dari UU No. 32 Tahun 2004, menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan dewasa ini telah ada revisi yaitu UU No 9 Tahun 2015. Perubahan-perubahan ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga mengharuskan untuk melakukan adaptasi secara cepat. Di dalam sistem perencanaan peraturan yang disusun oleh Kemendagri dan Bappenas seringkali mengandung perbedaan, sehingga menyulitkan daerah untuk mengacu dan mengakomodasi peraturan tersebut ke dalam perencanaan daerah. Bahkan dalam beberapa peraturan perundangan yang mengatur hingga tingkat operasional masih dijumpai perbedaan-perbedaan prinsip. Tidak adanya sinkronisasi peraturan perundangan yang memudahkan daerah untuk melakukan konsolidasi baik dalam perencanaan, implementasi, penganggaran, pengawasan dan evaluasi. Kondisi semacam ini menjadikan isu yang mendasar serta secara luas dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dalam regulasi pemerintahan daerah juga sangat mengganggu dalam proses koordinasi antar unit kerja maupun perangkat daerah, sehingga beberapa permasalahan muncul terkait dengan kesulitan untuk mengkonsolidasi baik di level perencanaan, perumusan indikator, pembagian urusan maupun pengawasan internal, serta penyerapan SILPA. Hingga saat ini belum ada ketentuan/peraturan yang jelas dan sah yang mengatur pengelolaan SILPA. Artinya, langkah administratif dalam rencana kerja pada tahun anggaran selanjutnya dalam penyerapan kembali SILPA bukan merupakan kebijakan yang tuntas.

Pada level pengawasan belum tersedia pemetaan urusan pengawasan internal yang jelas dan terkonsolidasi. Keterlibatan Inspektorat sebagai pengawas internal belum optimal dalam implementasinya. Meskipun jika dilihat dari data indikator persentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kota Yogyakarta tahun 2015 dengan target 3 persen sudah terealisasi 2,99 persen, dan pada indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memiliki target 88 persen, realisasinya sebesar 95,09 persen (Lakip Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2014). Kemudian dalam rekaman data prestasi pemerintah Kota Yogyakarta telah mendapatkan wajar tanpa pengecualian selama 8 tahun berturut-turut dari tahun 2010 hingga tahun 2017.



**b. Agenda road map reformasi birokrasi yang belum selesai dari segi implementasi**

Dokumen *road map* reformasi birokrasi merangkum agenda 8 bidang yang cukup ideal dan mendapatkan penghargaan terbaik di tingkat nasional. *Road map* reformasi yang mencakup delapan bidang tersebut berisi rencana pola perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 nilai *road map* reformasi birokrasi kota Yogyakarta adalah 77,86 persen sehingga masih perlu dituntaskan. Angka tersebut diperoleh dari laporan mandiri *road map* reformasi birokrasi dan dilaporkan secara *online* dan rutin. Roadmap reformasi birokrasi yang disusun oleh Kota Yogyakarta dirasa cukup ideal dan rinci. Belum ada kota lain yang mampu membuat *road map* reformasi birokrasi selengkap dan serinci Kota Yogyakarta. Akan tetapi pada implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan kelembagaan yang perlu diakomodasi. Dari tujuh bidang yang menjadi area perubahan, diantaranya yang masih belum mencapai 100 persen adalah penataan sistem manajemen SDM yang masih 51,83 persen dan penguatan pengawasan 66,42 persen.

**c. Belum optimalnya sistem monitoring evaluasi/forum komunikasi di dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehingga kurang terakomodasinya rekam jejak pemberdayaan yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh**

Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif antar perangkat daerah masih perlu dioptimalkan. Pendataan yang dilakukan secara terkoordinasi antar perangkat daerah yang ditunjukkan dengan data pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2007 hingga 2014 belum teridentifikasi (Lakip Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2014). Karena sistem komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan, maka belum ada mekanisme dukungan yang terpadu mulai dari perencanaan, penyiapan *action plan*, implementasi, dan monitoring evaluasi. Dengan demikian database tentang rekam jejak pemberdayaan secara utuh menyeluruh belum dapat terpenuhi.

**d. Keberlanjutan inovasi daerah**

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan. Potensi ide inovasi sebenarnya sudah dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Inovasi bukan merupakan hal yang terputus namun harus dilakukan terus menerus. Artinya dalam setiap perencanaan daerah perlu dilakukan inovasi dalam segala lini untuk tujuan peningkatan pelayanan publik.

#### **4.1.13. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah**

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi pemerintah, oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain:

**a. Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar kompetensi**

Pola karir pegawai sedang dalam proses rumusan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Pada tahun 2016 direncanakan pola karir ini akan selesai dibentuk. Implementasi pola karir ini diproyeksi belum optimal pasca diselesaikannya pola karir tersebut. Pemasalahan yang diproyeksi muncul adalah implementasi pola karir bagi pegawai yang maksimal. Sebab tujuan pengembangan pegawai tidak serta merta terselesaikan dengan pembentukan pola karir. Namun lebih pada agenda yang akan dilakukan pasca dibentuknya pola karir.

**b. Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi**

Menurut FGD yang dilakukan bersama dengan BKPP Kota Yogyakarta, proporsi pegawai negeri sipil di kota Yogyakarta hingga tahun 2014 baru terpenuhi 64 persen. Pada tahun 2014, usulan formasi yang dibutuhkan adalah 642 formasi tetapi yang disetujui hanya 74 formasi. Kesenjangan kompetensi yang ditetapkan di dalam analisis jabatan (Anjab) dengan realitas penempatan jabatan masih banyak ditemui. Khususnya kebutuhan pemenuhan kompetensi pendidikan yang sesuai jenjangnya, khususnya untuk jabatan struktural belum dapat ditepati secara menyeluruh.

#### **4.1.13. Belum Optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Produk Hukum**

Hukum merupakan bagian penting dalam tata laksana pemerintahan Kota Yogyakarta. Untuk itulah permasalahan yang dihadapi di urusan hukum penting untuk ditekankan. Pemasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan obyek hukum.

Pada implementasinya, pembentukan produk hukum terkendala permasalahan responsivitas antar perangkat daerah belum optimal terhadap kompleksitas permasalahan daerah. Perubahan regulasi dari pusat yang relatif cepat juga mengakibatkan proses adaptasi menjadi sulit mengingat permasalahan di daerah merupakan permasalahan yang lebih kompleks. Kendala lain yang dihadapi adalah, kekurangan back up data produk hukum dalam bentuk soft file. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya sosialisasi produk hukum ke masyarakat. Data LAKIP Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta tahun 2014 menunjukkan 92,63 persen masyarakat dapat mengakses produk hukum. Hal tersebut dikarenakan masih 7,37 persen produk hukum tidak memiliki arsip dalam bentuk soft file untuk diunggah sehingga dapat diakses secara online bagi masyarakat.

#### **4.1.13. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi**

Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian, seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaan informasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan informasi.

##### **a. Belum optimalnya fasilitasi teknologi informasi kepada seluruh Perangkat Daerah**

Hal ini berhubungan dengan keterbatasan anggaran sehingga kemampuan fasilitasi kepada teknologi informasi untuk perangkat daerah belum mencukupi. Jumlah kebutuhan untuk mengembangkan teknologi informasi semakin meningkat, namun sumber daya terbatas. Namun jika dilihat dari sisi pengelolaan, pemerintah Kota Yogyakarta cukup baik. Terbukti dengan pencapaian 98,23 persen dalam indikator pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk *e-government* (LAKIP bagian TIT, Setda Kota Yogyakarta, 2014). Pada sistem informasi kebencanaan belum membentuk jaringan kerjasama yang luas dalam penanganan kebencanaan secara menyeluruh. Terkait sistem informasi manajemen kebencanaan. Berdasarkan FGD bidang Pemerintahan yang dilakukan bulan Juli, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengatakan bahwa BPBD membutuhkan teknologi informasi untuk mengelola arsip dan informasi kebencanaan. Akan tetapi memang tidak semua perangkat daerah diarahkan berbasis teknologi informasi, artinya jika memang dibutuhkan maka perangkat daerah perlu mengajukan ke Dinas Kominfo Persandian untuk dibuatkan software kemudian perangkat daerah yang bersangkutan dapat mengoperasikan teknologi informasi secara swakelola ataupun diserahkan ke pihak ketiga.

##### **b. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**

Didalam pengelolaan arsip dinamis aktif faktor penghambat yang dirasakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah keterbatasan petugas arsiparis dalam pendampingan yakni 1 arsiparis yang harus mendampingi 7 hingga 8 perangkat daerah (1 arsiparis : 8 Perangkat Daerah- 0,125). Selain itu hingga saat ini Kantor Arpusda baru mampu mengurus arsip aktif saja. Sebab tidak ada waktu karena adanya tambahan tugas lain. Kendala selanjutnya adalah belum ada sarana (depo inaktif untuk menyimpan arsip inaktif, rak arsip, boks arsip di masing-masing perangkat daerah). Hingga tahun 2015, arsip statis di perangkat daerah belum tertata. Penataan arsip statis dan inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang.

##### **c. Belum optimalnya pemanfaatan arsip sebagai bagian dari audit**

Audit yang dilakukan untuk perangkat daerah masih terbatas pada keuangan. Hal ini memerlukan perhatian khusus mengingat masih banyaknya arsip yang masih tersebar di luar kantor arsip yang perlu diidentifikasi.

## **4.2. ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis pembangunan jangka menengah daerah untuk mewujudkan Kota Yogyakarta dengan brand **JOGJA NGANGENI DAN KEREN**:

### **4.2.1. Kemiskinan**

Kemiskinan perkotaan masih menjadi isu yang dihadapi oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta. Walaupun secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh karena secara kuantitas presentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta terus meningkat. persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta juga lebih tinggi dibandingkan DIY. Padahal isu kemiskinan di DIY juga menjadi perhatian dalam Pembangunan Provinsi DIY 5 tahun mendatang (2017-2022) karena jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sekitar 13,02 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen. Dengan kata lain, Kota Yogyakarta menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan di DIY yang besar dibandingkan Kabupaten lain. Perhatian juga perlu diberikan terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi.

Adanya kesenjangan data antara penerima manfaat penjaminan, sehingga mengakibatkan intervensi penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran. Ke depan diharapkan adanya sinkronisasi data dengan mewujudkan mekanisme pendataan mandiri. Intervensi penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui sinkronisasi program antar perangkat daerah. Kemiskinan harus dilihat dalam berbagai dimensi, bukan semata dimensi ekonomi saja sehingga penyelesaiannya harus mencakup berbagai bidang. Kecenderungan kemiskinan di Kota Yogyakarta terjadi karena kurangnya kesempatan, keterbatasan kepemilikan aset/barang, serta akses terhadap pelayanan sosial. Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kepala keluarga dan anggotanya, dan akan menjadi lebih parah ketika kepala keluarga atau anggotanya tidak bekerja. Sementara itu, kepemilikan aset juga terbatas, yang berarti orang miskin akan menempati kawasan-kawasan kurang layak huni dengan fasilitas yang terbatas sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kemiskinan yang tidak kunjung teratasi dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan dan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat kerap dipicu oleh tekanan

kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan akses pemberdayaan yang mengacu kepada karakter, kapasitas dan potensi penerima manfaat.

Salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial guna menjamin warganya yang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak adalah dengan pengelolaan jaminan dan bantuan sosial. Dengan cara memfasilitasi penyaluran bantuan sosial bagi usia lanjut yang terlantar, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Lebih lanjut, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memprioritaskan advokasi dan rehabilitasi sosial kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak atau miskin secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Untuk meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu DPMP2A, Dinas PUPKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM Nakertrans, Dinas Perindag, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kecamatan.

#### **4.2.2. Keberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara mengoptimalkan swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan organisasi perempuan dan meningkatkan pelatihan kelompok rintisan usaha baru yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas perempuan di Kota Yogyakarta. Dengan mengoptimalkan organisasi perempuan ke depannya dapat mengurangi jumlah kekerasan yang seringkali menimpa kaum perempuan dan anak.

Jumlah perempuan dan anak yang cukup besar, yaitu 213.899 jiwa perempuan dan 81.092 jiwa anak, membuat Kota Yogyakarta dihadapkan dengan permasalahan yang begitu kompleks. Salah satunya isu-isu gender yang masih beredar dikalangan masyarakat dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tiap tahun meningkat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih di era terbuka dan informasi yang kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian cenderung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan menghambat anak berprestasi di sekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus KDRT, baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga bukan saja berarti bagi pelaku KDRT, melainkan utamanya bagi korban KDRT dan masyarakatnya secara lebih luas. Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari lemahnya kondisi ekonomi serta semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota

keluarga 3 yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.

#### **4.2.3. Ketahanan Pangan Masyarakat**

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (UU Pangan, 2012). Ketersediaan pangan merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kebutuhan makanan sebagai kebutuhan dasar manusia. Apalagi melihat perkembangan masyarakat yang kian meningkat, kebutuhan akan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi tuntutan. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terus menerus, dengan cara meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan dan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan. Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil kehewan dan perikanan serta peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian perlu mendapat perhatian khusus, karena secara keseluruhan saling bersinergi satu dengan yang lain. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dengan adanya program pembinaan ketahanan pangan, program pembinaan kehewan dan perikanan dan program pembinaan pertanian diharapkan mampu untuk terus mendorong akan ketersediaan dan mutu pangan di Kota Yogyakarta. Selama rentang waktu tahun 2012 – 2015, pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta pada kelompok pengeluaran untuk makanan cenderung turun naik selama 5 tahun terakhir yaitu -7,27% pada tahun 2015. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan tidak lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

#### **4.2.4. Ketimpangan Pendapatan**

Basis data terpadu Badan Pusat Statistik tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk 40 persen pendapatan terendah secara persentase terhadap jumlah penduduk per kecamatan paling banyak ada di kecamatan Gedongtengen, Jetis dan Gondomanan. Tiga kecamatan tersebut berdasarkan tipologi Klassen mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Kota Yogyakarta. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang ada di 3 kecamatan tersebut belum mampu mendorong pendapatan penduduk 40 persen pendapatan terendah. Selain ketimpangan pendapatan, ketimpangan antarwilayah juga menjadi permasalahan di Kota Yogyakarta. Jika dilihat dari angka PDRB per kapita kecamatan-kecamatan dengan PDRB per kapita tinggi

berada di sisi utara wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi selatan kota Yogyakarta, salah satunya dengan pengembangan Science Center.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah perlu disinergikan dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan yang terus meningkat. Selama sepuluh tahun terakhir hanya ada dua pembangunan objek dan daya tarik wisata dengan skala besar, yaitu Taman Pintar dan XT-Square. Pembangunan berfokus pada pembangunan kampung wisata. Jumlah kampung wisata sampai dengan tahun 2016 ada 17 kampung wisata. Kampung wisata belum optimal dalam meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Oleh karena itu perlu adanya program untuk meningkatkan kelayakan kampung wisata sebagai daerah tujuan wisata. Selain itu diperlukan juga pembangunan objek dan daya tarik wisata baru dengan skala besar mengingat pembangunan objek dan daya tarik wisata baru di kabupaten-kabupaten sekitar Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menambah atraksi malam guna menjaga tingkat rata-rata lama menginap tamu di Kota Yogyakarta.

Peningkatan objek dan daya tarik wisata baru di kabupaten-kabupaten sekitar Kota Yogyakarta berdampak positif terhadap perkembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di kota Yogyakarta. Hal tersebut tercermin dalam nilai PDRB Kota Yogyakarta dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bernilai 2,32 triliun pada tahun 2013 meningkat sampai dengan 2,74 triliun pada tahun 2016. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada periode 2014-2016 selalu lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor dengan perkembangan yang cepat. Selain pertumbuhan yang cepat, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Yogyakarta juga besar. Rata-rata kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Yogyakarta adalah 11,54 persen.

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (juta rupiah)	2,320,365.42	2,444,064.84	2,589,749.81	2,740,135.53
Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan minum terhadap PDRB	11.46%	11.47%	11.56%	11.64%
Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	6.28%	5.33%	5.96%	5.81%
Pertumbuhan Ekonomi	5.47%	5.28%	5.09%	5.11%

Kontribusi dan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendekatan sektor pariwisata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapat masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini nampak pada persentase pendapatan dari 40 persen penduduk

berpendapatan terendah yang terus menurun. Oleh karena itu, diperlukan program-program yang mampu menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Yogyakarta.

Intervensi lain untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yaitu dengan cara memberdayakan UMKM. Kemitraan UMKM dengan pelaku sektor pariwisata menjadi prioritas yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Selain itu peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperlukan untuk memberdayakan UMKM di Kota Yogyakarta sehingga tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan daerah. Tujuan yang lebih besar dari BUMD adalah untuk meningkatkan perekonomian di wilayah. BUMD yang ada di Kota Yogyakarta mempunyai peran masing masing dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Dua BUMD Kota Yogyakarta, yaitu Bank Jogja dan PT Jogjatama Vishesha (XT Square) diberikan tugas berperan untuk membantu pengembangan UMKM.

Dalam Perda 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja disebutkan kewajiban Bank Jogja untuk menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 40 persen dari kredit paling lambat dipenuhi untuk tahun 2025. Target sampai dengan tahun 2016 adalah 9 persen dan sudah terpenuhi sebesar 11 persen. Untuk mendukung kinerja Bank Jogja, Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyertakan Modal sebesar 100 M. Sampai dengan tahun 2016, realisasi penyertaan modal mencapai 61 M. Kewajiban penyertaan Modal akan dipenuhi 100 persen pada tahun 2018 dengan skema 37,9 M pada tahun 2017 dan 1,1 M pada tahun 2018. Pengembangan Bank Jogja dapat melihat kondisi minat masyarakat yang meningkat terhadap sistem pengelolaan perbankan syariah sehingga diperlukan pembentukan BPR Syariah.

Peran serta PT Jogjatama Vishesha (XT Square) lebih kepada pemasaran dari produk dari UMKM. Terdapat 14 gerai yang disediakan bagi forum komunikasi UMKM kecamatan dan 3 gerai bagai Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Dari segi pengunjung yang merupakan pasar bagi produk UMKM, XT Square merupakan tempat yang cukup potensial. Data Realisasi pengunjung pada tahun 2016 dari target 1 juta pengunjung terealisasi 1,4 juta pengunjung. Dalam hal kunjungan wisata, diharapkan XT Square mampu membuat program-program yang menarik wisatawan sehingga mampu mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisata maupun lama tinggal wisata di Kota Yogyakarta.

Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran serta perluasan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan menjadi penting untuk menghadapi persaingan di pasar kerja. Di Kota Yogyakarta, sebagian besar penganggur merupakan penganggur dengan pendidikan SLTA ke atas. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang nyaman merupakan magnet bagi pencari kerja dari luar untuk mencari pekerjaan. Selain itu, fenomena banyaknya pencari kerja terdidik ini juga karena ada kecenderungan menunggu pekerjaan yang baik sehingga rela menganggur lebih lama. Oleh karena itu, perluasan lapangan kerja melalui investasi yang masuk perlu dioptimalkan disertai dengan perbaikan informasi antara penyedia kerja dan pencari kerja. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta cenderung berkurang, akan tetapi belum diikuti dengan peningkatan angka partisipasi angkatan



kerja yang justru menunjukkan angka yang terus berkurang dengan pertumbuhan rata-rata (persen/tahun) - 3,73 persen. Hal ini menunjukkan penduduk pada usia kerja masih belum banyak yang terfasilitasi atau belum bekerja. Dampak dari rendahnya angka partisipasi angkatan kerja adalah akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta.

Keterampilan tambahan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri juga perlu didorong untuk memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan usaha baru dalam bentuk UMKM juga perlu difasilitasi karena diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja. UMKM memiliki sifat yang mudah berkembang karena tidak membutuhkan modal besar, menggunakan teknologi yang sederhana, menggunakan input lokal, dan mengandalkan kreativitas pelaku. Hal tersebut menjadikan UMKM lebih tahan terhadap krisis dan bahkan mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar, merupakan ancaman bagi UMKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar.

Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan, mencetak ratusan lulusan berpendidikan tinggi setiap tahunnya. Namun, nampaknya lulusan tersebut masih berorientasi untuk bekerja di luar kota. Dalam hal ini, daya saing tenaga kerja berpendidikan tinggi perlu ditingkatkan. Pemberian insentif kepada para lulusan berpendidikan tinggi merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat bermigrasi keluar Yogyakarta.

Sebagai kota yg luasnya tidak seberapa dan tidak mempunyai sumber daya alam, pengembangan menjadi Kota Pusat Jasa dan ekonomi kreatif adalah menjadi mutlak. Maka pengembangan Kampung Kreatif dan pembangunan Rumah Kreatif yang berfungsi sebagai arena *display* dan produksi, promosi, konsultasi, ruang rapat dan pertemuan para pelaku ekonomi kreatif maupun anak-anak muda. Dengan demikian rumah kreatif bisa berkembang dan berfungsi sebagai kamar dagang, arena berkumpul, Youth Centre dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Yogyakarta untuk menopang gerak laju perekonomian. Rumah Kreatif tersebut akan menjadi simpul untuk bisa tumbuh kembangnya kemitraan 5K (Pemerintah Kota, kampung, komunitas, kampus dan Korporasi) dalam konsep **Gandeng Gendong**, yaitu saling bergandengan dan saling menggendong (membantu dan menopang) untuk kemajuan. Untuk mengkondisikan terbangunnya Kampung Kreatif yang hidup dan dinamis berdasarkan potensi kampung setempat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan di kelurahan melalui kegiatan RT, RW dan LPMK. Kinerja kampung dalam kelurahan tersebut akan dievaluasi setiap tahun, yang akan mempengaruhi besaran anggaran yang akan diterima.

#### 4.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada periode 2012-2016 menunjukkan hal yang positif jika dibandingkan dengan angka D.I.Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan D.I.Yogyakarta. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan penggerak ekonomi salah satunya melalui investasi.

PDRB Kota Yogyakarta masih didominasi oleh sektor tersier. Salah satu sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Yogyakarta ADHK 2010 adalah industri pengolahan. Pengelolaan Industri pengolahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh Usaha Kecil Mikro (UKM). Hal ini ditunjukkan dengan jumlah UKM yang berjumlah hampir 23 ribu. Namun, penyerapan tenaga kerja dari UKM di Kota Yogyakarta masih rendah. Oleh karena itu diperlukan penataan UKM di Kota Yogyakarta baik secara sumber daya pelaku, manajemen, maupun kemitraan.

#### **4.2.6. Investasi Di Kota Yogyakarta**

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan kejelasan dan kepastian kepada calon investor atas pemanfaatan lahan di Kota Yogyakarta melalui Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 yang menjabarkan status kawasan, pemanfaatan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang. Tidak kalah penting dalam mendukung iklim investasi adalah penyederhanaan prosedur perizinan, kejelasan untuk persyaratan perizinan dan waktu penyelesaian maksimal dalam pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan harus sesuai dengan prosedur. Adanya Kliper (Klinik Perizinan) akan membantu calon investor yang mengalami hambatan ketika akan mengajukan perijinan. Gerai Investasi dan Advice Planning sebagai fasilitas pelayanan investor juga memberikan kemudahan terkait peluang investasi yang ada di Kota Yogyakarta dan konsultasi lokasi usaha di Kota Yogyakarta yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang.

Kemudahan perizinan di Kota Yogyakarta telah diakui oleh berbagai kalangan, diantaranya adalah Survei Doing Business di Indonesia tahun 2010 dan 2012 yang selalu menempatkan Kota Yogyakarta sebagai kota dengan peringkat terbaik dalam Kemudahan Mendirikan Usaha. Survei ini terlaksana atas kerjasama International Finance Corporation, World Bank Group, The World Bank, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Dengan berbagai kemudahan izin usaha di Kota Yogyakarta iklim investasi menjadi sangat kondusif. Dengan luas wilayah administratif yang hanya 32,50 km<sup>2</sup>, diharapkan mampu menarik banyak investor kecil maupun besar ke dalam wilayah Kota Yogyakarta.

#### **4.2.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 terdapat 1.660 kasus, hal ini lebih besar dari jumlah kasus kriminalitas tahun 2012 (terdapat 457 kasus). Dengan demikian kasus kriminalitas di Kota Yogyakarta cenderung meningkat. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian di Kota Yogyakarta ketentraman dan ketertiban umum didukung adanya Polisi Pamong Praja, Limnas, dan Sarana Pos Siskamling di setiap kelurahan.

Masalah keamanan dan ketertiban merupakan kerjasama terpadu antar pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun,

sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban. Namun hal ini belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya untuk menurunkan K3 bahkan mencegahnya. Sementara itu terjadi penurunan prasarana keamanan dan ketertiban khususnya poskamling sebesar 6,05 persen.

Adanya sifat kependudukan Kota Yogyakarta yang kompleks dan heterogen ini menjadikan kerja bidang kesatuan bangsa dan politik diperlukan semakin besar. Meskipun budaya Yogyakarta sebagai masyarakat Jawa yang mengutamakan tutur kata yang halus, akan tetapi masyarakat pendatang yang memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda perlu diantisipasi. Sebagai kota pendidikan setiap tahun dibanjiri pendatang untuk keperluan menuntut ilmu. Untuk itu potensi konflik perlu diperhatikan secara serius. Banyaknya asrama mahasiswa daerah dapat menjadi salah satu potensi untuk menyulut perbedaan yang ekstrim. Bertolak dari masalah ini maka perlu upaya preventif dan pengendalian konflik di Kota Yogyakarta. Di sisi lain Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan YME dalam melaksanakan kegiatannya.

#### **4.2.8. Kualitas Pendidikan**

Pembangunan pendidikan di Yogyakarta merupakan satu dari sekian yang terbaik di Indonesia. Hal ini terlihat dari citra Kota Yogyakarta yang lebih dikenal sebagai Kota Pendidikan. Berbagai fasilitas pendidikan dari sisi jumlah yang bervariasi dan mutu pendidikan yang bagus menjadi jaminan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu yang terbaik di negeri ini. Hal ini diindikasikan dengan tingginya minat dari para penduduk yang berasal dari dalam Kota Yogyakarta dan luar Kota Yogyakarta untuk menyekolahkan putra atau putrinya di Kota Yogyakarta. Dari sisi potensi, terlihat bahwa dari sisi akses dan mutu merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pembangunan kependidikan Kota Yogyakarta dengan mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif). Dengan mengusung misi bahwa tidak ada siswa yang tidak sekolah maka upaya-upaya pembangunan dari sisi formal, informal, ataupun pendidikan kemasyarakatan selalu digalakan dalam rangka pencapaian program wajib belajar masyarakat. Sementara itu, aspek mutu yang terlihat dari sisi kualitas pengajar melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, dan prestasi merupakan nilai tambah pembangunan pendidikan Kota Yogyakarta.

Namun, kendala atau permasalahan masih dijumpai di bidang pendidikan, yaitu tingginya minat penduduk untuk bersekolah di Kota Yogyakarta dan penurunan angka partisipasi sekolah tingkat dasar. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta (terutama tingkat SD/MI dan SMP/MTs) mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2015, akan tetapi terjadi kenaikan/peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun 2016. Hal ini dapat dikarenakan akses pendidikan dan jarak tempat tinggal dengan sekolah menjadi pertimbangan dalam memilih sekolah yang berada di wilayah sekitar Kota Yogyakarta. Target sasaran utama pembangunan nasional 2015 – 2019 kedepan adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan partisipasi sekolah

anak usia 7-15 tahun yang mendekati angka 100 persen. Tantangan ini tentu menjadi semangat bagi Kota Yogyakarta agar Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan.

Sementara itu, dari sisi eksternal, kajian terhadap pembangunan kependidikan dapat terlihat dari aspek peluang dan ancaman. Dari sisi peluang, terlihat bahwa kesepakatan MEA akan membawa konsekuensi kepada peningkatan daya saing lulusan dari berbagai macam tingkatan pendidikan, berikutnya adalah kesiapan dari lulusan pendidikan formal dan informal yang bersertifikat sesuai dengan standar KKNI, terakhir adalah dengan akan dimulainya muatan revolusi mental sebagai misi pemerintah untuk perbaikan semangat kebangsaan akan mulai dirintis dari tingkatan PAUD ataupun pendidikan anak-anak. Namun, dari sisi ancaman yang dimungkinkan adalah peralihan kewenangan pendidikan menengah atas yang nantinya akan dikelola oleh provinsi membawa beberapa konsekuensi seperti daya serap dari siswa lulusan SMP Kota Yogyakarta untuk mendapatkan akses SMA di Kota Yogyakarta yang terkenal mutunya. Diharapkan nantinya siswa lulusan SMP tersebut dapat melanjutkan studinya di dalam Kota Yogyakarta dengan antisipasi bahwa peningkatan daya saing untuk berkompetisi dengan lulusan dari luar Kota Yogyakarta dalam rangka mendapatkan kursi di tingkat SMA.

#### **4.2.9. Harapan Hidup Masyarakat**

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh Dinas Kesehatan didukung *stakeholder* lain di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, dan partisipasi aktif masyarakat Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya beberapa penghargaan terkait bidang kesehatan, yaitu Manggala Karya Kencana (2003), Manggala Karya Bakti Husada (2004), Swasti Saba Wiwerda (2005), Ksatria Bakti Husada (2006), Swasti Saba Wistara (2007), Manggala Karya Bakti Husada Arutala (2008), Swasti Saba Wistara (2009), Manggala Karya Bakti Husada ADITYA (2010), Swasti Saba Wistara (2011), Ksatria Bakti Husada Kartika (2011), Swasti Saba Wistara (2013), Ksatria Bakti Husada Arutala (2013), Sertifikat Eliminasi Malaria (2014), Kepatuhan Standar Pelayanan Publik untuk Dinas Kesehatan (2014), Penghargaan AKOPSI (2014) untuk kategori Regulasi Dalam Peningkatan Pencapaian Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Ksatria Bakti Husada Kartika (2014). Indikator keberhasilan program lain dalam bidang kesehatan adalah meningkatnya angka harapan hidup di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun, bahkan angka harapan hidup masyarakat kota Yogyakarta tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sudah mendukung tercapainya target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang ditandai dengan angka harapan hidup yang tinggi. Walaupun demikian, masih perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil diskusi dalam pertemuan FGD dengan *stakeholder* yang terkait di bidang kesehatan dan data yang ada, beberapa hal terkait isu strategis kesehatan yang cukup penting adalah sebagai berikut:

**a. Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: a) peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia; b) percepatan perbaikan status gizi masyarakat; c) pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; d) perilaku hidup bersih dan sehat; dan lain-lain. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah target nasional. Jumlah kematian pada balita secara umum mengalami penurunan dalam 5 tahun ini. Begitu pula masih ditemui kematian ibu karena kehamilan, melahirkan dan nifas, walaupun pada tahun 2014 telah menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya dan secara umum mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kasus kematian bayi dan ibu hingga mencapai 0 persen. Oleh karena itu, perlu terobosan baru untuk mencapai angka 0 persen, termasuk pembaruan input data untuk memilah penduduk dengan KTP Kota Yogyakarta dan yang tidak ber-KTP Kota Yogyakarta. Hal ini mengingat salah satu faktor yang menjadi penyebab peningkatan angka kematian bayi dan masih adanya kematian ibu melahirkan adalah individu yang meninggal dan tercatat sebagai penduduk Kota Yogyakarta namun tidak berdomisili di Kota Yogyakarta, sehingga tidak dapat dipantau selama proses kehamilan hingga persalinan. Pemeliharaan kesehatan ibu berkorelasi dengan angka kematian ibu. Kesehatan ibu biasanya banyak diperhatikan pada saat masa kehamilan, saat proses persalinan dan pasca melahirkan. Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kematian ibu, yakni terlalu tua saat hamil, terlalu muda untuk hamil, terlalu sering hamil, dan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jika keempat itu bisa diperbaiki maka angka kematian ibu bisa diturunkan. Upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan menurunkan kematian ibu harus dilaksanakan secara bersama-sama, tidak hanya pihak pemerintah saja akan tetapi lingkungan keluarga juga memiliki peran yang mampu memberikan dukungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan siswa sekolah mulai dari SD hingga SMA. Selain itu juga menanamkan norma dan budaya bahwa menikah itu idealnya hingga usia 24-25 tahun. Kasus gizi buruk secara umum mengalami penurunan, bahkan penanganan kasus gizi buruk telah mencapai 100persen. Target Dinas Kesehatan untuk mengeliminasi kasus gizi buruk harus didukung semua pihak, sehingga nantinya tidak ditemukan kasus gizi buruk di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dicapai dengan program pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, seperti aktif mengikuti program posyandu yang salah satunya penimbangan balita secara teratur sehingga bisa dicegah sejak dini, dan memberikan edukasi yang sesuai.

**b. Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Isu strategis nasional mengenai pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, di dalamnya juga termasuk pengendalian penyakit menular. Di Kota Yogyakarta pengendalian penyakit menular terutama kasus DBD, leptospirosis dan tuberkulosis perlu ditingkatkan. Pengembangan strategi pencegahan dan pemberantasan kasus penyakit menular ini perlu kerjasama semua komponen pelayanan bidang kesehatan maupun *stakeholder* lainnya, mengingat faktor geografis, iklim, kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan, permukiman dan lain-lain akan mempengaruhi keberhasilan program. Berbagai strategi perlu dikembangkan, seperti memberdayakan peran kader kesehatan, eliminasi kasus dengan mengurangi faktor risiko terjadinya penularan penyakit, strategi pendampingan kasus khusus pada kelompok berisiko tinggi melalui pendekatan personal, dan promosi informasi yang efektif dengan memberikan informasi secara optimal sesuai sasaran, selain perlu juga inovasi deteksi dini penegakan diagnosis dengan tes cepat, akurat, murah dan mudah didapat, ketersediaan pengobatan yang tepat dan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan yang tepat. Terutama untuk kasus tuberkulosis perlu diwaspadai meningkatnya kasus TB *Multi Drug Resistant* (TB MDR). Oleh karena itu, manajemen terpadu dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan keuangan dalam pengendalian penyakit menular harus dilakukan secara berkesinambungan. Peningkatan kasus HIV-AIDS dalam 5 tahun terakhir, dan belum terpenuhinya target RPJMD bagi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS merupakan pekerjaan rumah dan tantangan yang harus dihadapi. Meskipun begitu, peningkatan kasus HIV-AIDS ini juga menunjukkan keberhasilan program penemuan penderita HIV-AIDS, sekaligus keprihatinan karena dapat berdampak buruk pada masa depan individu penderita, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Diharapkan dengan penemuan sedini mungkin kasus HIV-AIDS segera dapat ditangani. Perlu inovasi terobosan baru untuk keberhasilan upaya promotif dan preventif yang tepat sasaran dengan kondisi yang ada.

Usia harapan hidup masyarakat Yogyakarta tertinggi di Indonesia. Pada satu sisi hal ini menunjukkan keberhasilan program bidang kesehatan, di sisi lain peningkatan jumlah lansia menyebabkan terjadi pergeseran pola penyakit beberapa tahun terakhir ini, yaitu dari penyakit infeksi menular menjadi penyakit tidak menular (degeneratif). Sepuluh besar penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta didominasi penyakit degeneratif. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan dampak meningkatnya jumlah lansia supaya dapat diantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan baru, sehingga diharapkan dengan keberhasilan suatu program akan diikuti dengan keberhasilan program-program yang lainnya.

Tingginya jumlah remaja usia 15-24 tahun menjadikan dua hal bertentangan. Pertama, tingginya jumlah remaja akan menjadi permasalahan jika tidak dikendalikan kualitasnya dengan baik. Seperti yang dipaparkan pada sub bab permasalahan kesehatan, bahwa tingginya jumlah

remaja diikuti dengan cepatnya kemajuan teknologi dan informasi seringkali disikapi kurang bijak oleh para remaja, sehingga akan menyebabkan perilaku menyimpang pada remaja (misalnya narkoba, seks bebas, kehamilan di luar nikah). Di sisi lain, perlu dipertimbangkan bahwa pada usia tersebut remaja seringkali belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang berumah tangga, dan mendidik anak. Kekhawatiran yang muncul adalah meningkatnya pernikahan usia dini yang dilakukan tanpa kesiapan ilmu dan kesiapan mental pelakunya sehingga berdampak pada buruknya kualitas keluarga yang dibentuk dan kualitas anak-anak yang dilahirkan. Kemungkinan buruk munculnya permasalahan kehamilan yang tidak diinginkan pun bertambah karena ketidaksiapan dalam berumah tangga ataupun kesalahan pergaulan hingga mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Namun, jika tingginya jumlah remaja ini dapat disikapi, dikontrol, dan dibina dengan baik justru akan menjadi potensi unggul sumber daya manusia di masa depan karena tonggak pemerintahan dan kepemimpinan nantinya akan dipegang oleh remaja-remaja ini. Di sini, peran keluarga akan sangat penting dan utama dalam membentuk karakter-karakter remaja, mengingat keluarga adalah madrasah pertama dan benteng pertahanan pertama dari pengaruh buruk lingkungan sekitar. Sehingga perlu diperhatikan pembinaan terhadap keluarga sebagai pendidik utama, serta pembinaan pada remaja itu sendiri sebagai calon orang tua.

Kesehatan masyarakat baik kesehatan jasmani maupun rohani merupakan modal yang sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan. Kesehatan jiwa juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena menurut studi yang dilakukan 2-3 tahun belakangan terjadi peningkatan kasus kejadian gangguan jiwa di Kota Yogyakarta (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017).

**c. Pengelolaan Limbah Medis**

Pengelolaan limbah yang dalam hal ini di Kota Yogyakarta adalah limbah medis, merupakan bagian dari isu penyehatan lingkungan yang juga menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan nasional. Pengelolaan limbah menjadi salah satu syarat keluarnya ijin dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tidak hanya rumah sakit, namun juga puskesmas, klinik serta praktek pribadi. Meskipun demikian, perlu dilaksanakan pemantauan terhadap proses pengelolaan limbah medis baik padat maupun cair. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta sebagian besar dilakukan oleh pihak ketiga. Proses pengolahan limbah B3 dengan cara pembakaran akan sangat mengganggu mengingat posisi fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Kota dan berdekatan dengan perumahan warga dan perkantoran. Pengolahan limbah padat medis rumah sakit, puskesmas, klinik serta praktek pribadi di Kota Yogyakarta belum efektif dikarenakan sebagian besar masih belum mempunyai Insinerator, serta menyerahkan proses pembakarannya limbah infeksius oleh pihak ketiga. Dinas Kesehatan berupaya untuk

mengetahui masalah yang dihadapi secara teknis di lapangan terkait pengelolaan limbah medis dan aturan-aturan yang harus dipahami oleh pengelola limbah Rumah Sakit, serta potensi pemanfaatan limbah medis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Risiko pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada penyakit menular, yang mengakibatkan menurunnya kualitas mutu lingkungan, dengan akibat lanjutannya adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut.

**d. Pemenuhan Standar Layanan Kesehatan**

Untuk memenuhi layanan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta dengan mewujudkan sarana dan prasarana sesuai standarisasi layanan kesehatan masyarakat. Antara lain dengan meningkatkan mutu Rumah Sakit Jogja sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional. Untuk itu diperlukan koordinasi lebih lanjut secara internal untuk perbaikan standar layanan maupun secara eksternal dengan perangkat daerah lain yang terkait, misalnya terkait kemudahan dan kenyamanan akses dari dan menuju Rumah Sakit Jogja.

**e. Jaminan Layanan Kesehatan bagi Seluruh Warga Kota Yogyakarta**

Jaminan layanan kesehatan dalam *Universal Health Coverage* (UHC) adalah kepesertaan minimal mencapai 95 persen dari total penduduk. Dengan jumlah penduduk 410.262 jiwa dan jumlah peserta JKN-KIS sebanyak 389.749 jiwa (95 persen) maka di Kota Yogyakarta telah tercapai *Universal Health coverage* (UHC) per 1 November 2017.

#### **4.2.10. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya**

Untuk mendukung keberadaan Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya masyarakat perlu dilibatkan dalam aspirasi, partisipasi, dan pelestarian budaya. Hal ini juga diperkuat dengan peran Kota Yogyakarta dalam keistimewaan sebagai ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam penataan Kawasan Cagar Budaya, Pemerintah Kota Yogyakarta bersinergi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dana Keistimewaan. Dalam pengelolaan Dana Keistimewaan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah DIY melakukan koordinasi untuk menentukan pembagian kewenangan. Secara bertahap, Kawasan Cagar Budaya tersebut akan ditangani sebagai bagian dari upaya penguatan peran Kota Yogyakarta sebagai ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta.



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta 2010 – 2029 menetapkan kawasan strategis citra kota untuk Kepentingan Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu meliputi:

1. Kawasan Kotagede di Kecamatan Kotagede pada sebagian Kelurahan Prenggan dan Purbayan; Rencana penanganan Kawasan Kotagede dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya, pariwisata budaya, dan industri kerajinan yang menyiratkan citra budaya;
2. Kawasan Malioboro di Kecamatan Danurejan pada sebagian Kelurahan Suryatmajan dan Tegalpanggung, Kecamatan Gondomanan pada sebagian Kelurahan Ngupasan, dan Kecamatan Gedongtengen pada sebagian Kelurahan Sosromenduran. Rencana penanganan Kawasan Malioboro dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya dan perdagangan dan jasa yang menyiratkan citra budaya, pariwisata, dan perjuangan;
3. Kawasan Kotabaru yang terletak di Kecamatan Gondokusuman pada sebagian Kelurahan Kotabaru. Rencana penanganan Kawasan Kotabaru dilakukan melalui pengembangan zona perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pendidikan yang menyiratkan citra pendidikan dan perjuangan;
4. Kawasan Kraton yang terletak pada Kecamatan Kraton pada sebagian Kelurahan Panembahan, Patehan, dan Kadipaten. Rencana Kawasan Kraton dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya yang menyiratkan citra filosofi dan peninggalan sejarah budaya;
5. Kawasan Pura Pakualaman yang terletak pada Kecamatan Pakualaman pada sebagian Kelurahan Purwokinanti dan Gunungketur. Rencana Kawasan Pura Pakualaman dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya yang menyiratkan citra filosofi peninggalan sejarah budaya.
6. Satuan Strategis Sumbu Filosofi yang meliputi zona inti berupa garis yang ditandai dengan jalan antara Tugu-Keraton-Panggung Krapyak, dan zona penyangga di sekitar zona inti dengan batasan Tugu di sebelah selatan, Sungai Winongo di sebelah barat, dan sungai Code di sebelah timur.

#### **4.2.11. Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena masih belum optimalnya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, sehingga masih diperlukan waktu untuk menjadikan instansi ini menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Dalam skala nasional, RPJMN tahun 2015-2019 juga mencantumkan perlunya peningkatan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis melalui peran dan kerjasama beberapa instansi lintas sektor.

Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Peran lembaga khusus yang menangani pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan mampu fokus kepada masalah penataan ruang. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Tersedianya lembaga khusus untuk menangani penataan ruang diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik,

ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan ke depan. Keterbatasan lahan ini juga menyebabkan masalah untuk penyediaan tanah pemakaman yang menurut Kajian Pengelolaan Pemakaman akan habis terpakai dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Yogyakarta harus segera menyusun Peraturan Daerah mengenai Pemakaman dan menyediakan lahan pemakaman setidaknya dalam waktu 4 tahun ke depan, baik melalui optimalisasi lahan maupun pengadaan lahan di luar wilayah Kota Yogyakarta.

#### 4.2.12. Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang bahwa alokasi 30 persen ruang terbuka hijau yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Private dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih jauh dari yang ditetapkan sebesar 30%. Perhitungan Ruang Terbuka Hijau terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, didapati bahwa ruang terbuka hijau untuk Kota Yogyakarta sebesar 18,77% (RTH public sebesar 5,83 % dan RTH privat 12,93%). Terjadinya penurunan perhitungan RTH Kota Yogyakarta dari yang sebelumnya bahwa RTH Kota Yogyakarta 31,65% yang terdiri dari RTH public sebesar 17,16% dan RTH Private sebesar 14,49% (berdasarkan perhitungan 2010) dikarenakan adanya perbedaan metode perhitungan. Perhitungan sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang memasukkan komponen Kebun Binatang dan Kebun Raya, lapangan parkir, lapangan upacara dan panjang rta lebar jalan pada jalur hijau dimasukkan dalam perhitungan Ruang Terbuka Hijau Publik. Sedangkan hasil dari perhitungan terbaru yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, komponen-komponen yang sebelumnya dihitung sebagai RTH Publik masuk pada kategori RTH privat. Di samping itu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, tanah tegalan dan tanaman semusim tidak masuk dalam RTH publik. Fakta yang lain, bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan pada citra satelit dengan system digitasi memang terdapat perubahan-perubahan pada komponen RTH publik dari yang dulu hijau menjadi non hijau. Sehingga kenaikan persentase RTHP sesuai regulasi ke depan perlu dilakukan dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setidaknya RTHP kawasan perkotaan dapat mencapai 20% dari luasan wilayah kota.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman. Melalui konsep **Jogja Kota Pedestrian**, upaya agar *public space* atau ruang publik tetap berfungsi sebagaimana namanya, dan dapat berkembang menjadi *public*

*sphere* atau ruang dialog. Ketika ruang publik menjadi ruang dialog, maka aktivitas komersial harus menyesuaikan dan mengubah diri untuk membuka menjadi ruang dialog. Konsep menuju kota pedestrian tidak akan menghilangkan aktivitas komersial dari ruang publik, tetapi akan menata dan membatasi agar bisa berkembang menjadi ruang dialog. Hal ini diikuti dengan penataan dan pembatasan ruang parkir dan pedagang kaki lima dalam rangka menjadikan kota lebih nyaman huni.

#### **4.2.13. Infrastruktur Wilayah**

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasannya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Kota Yogyakarta tidak dapat berdiri sendiri dalam perencanaan pembangunan karena dalam berbagai hal selalu terhubung dengan keberadaan kabupaten yang mengelilinginya, dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi pada di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah yang satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Sekretariat Bersama KARTAMANTUL (Yogyakarta, Sleman, Bantul) merupakan sebuah lembaga yang menjembatani terwujudnya kerjasama yang setara, adil, partisipatif, transparan dan demokratis untuk mewujudkan perkotaan yang nyaman, indah dan sehat yang didukung oleh sarana-prasarana dan pelayanan yang memadai disertai dengan tingkat kesadaran dan peran masyarakat yang sangat tinggi. Sekretariat Kartamantul mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan sesuatu yang adil;
2. Melakukan mediasi penyelesaian permasalahan;
3. Melakukan koordinasi manajemen dan implementasi;
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan;
5. Membangun jaringan kerja yang kuat;
6. Memberikan inisiasi perubahan dan
7. Memberikan rekomendasi kebijakan.

Di dalam Sekretariat Bersama Kartamantul, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Kerjasama dalam pengelolaan air bersih berupa pengembangan sarana prasarana (bangunan pengambilan, pipa transmisi air baku, instalasi pengolahan air bersih, pipa transmisi, reservoir air bersih). Air menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat terelakkan bagi setiap makhluk hidup termasuk manusia. Tidak heran masalah penyediaan air terkadang menjadi rumit terutama untuk kawasan perkotaan yang semakin berkembang. Ketersediaan air yang layak sangat terkait dengan permasalahan kesehatan dan kebersihan

masyarakat. Ketercukupan air baku akan mendorong peningkatan kualitas hidup menyangkut faktor kesehatan yang menjadi salah satu indikator dalam *Human Development Indeks (HDI)*.

Cakupan pelayanan yang telah dilayani oleh PDAM Tirta Marta Yogyakarta telah mencapai 100% wilayah yang ada di Kota Yogyakarta termasuk 14 Kecamatan, dengan tingkat pelayanan 43,02% dari seluruh penduduk Kota Yogyakarta yang disuplai melalui 10 sub sistem pelayanan. Capaian layanan air minum di Kota Yogyakarta tahun 2016 sebesar 84,86% dengan target pencapaian universal access tahun 2019 sebesar 100% menyisakan 15,14% yang perlu pengembangan, terutama sambungan rumah perpipaan. Umur pipa PDAM Kota Yogyakarta yang sudah lama dan dari segi usia teknis dan bahan yang digunakan kurang layak. Hal lain adalah kurang kesesuaian antara pompa (tekanan) yang digunakan dengan elevasi daerah pelayanan. Disamping itu terjadi juga menurunnya kapasitas sumber air yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirtamarta sehingga perlu penambahan sumber air. Masih ada wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM terutama pada kawasan bantaran sungai dimana masyarakatnya masih menggunakan sumber air beresiko tercemar dan sumber air tidak aman. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah terjadinya penurunan sambungan rumah PDAM yang cukup signifikan beralih ke penggunaan sumber air individual. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyertaan modal dalam pengadaan pipa distribusi.

Penggunaan Fasilitas Penyediaan Air Bersih Masih Didominasi oleh Fasilitas Non Perpipaan Individual. Hal ini menimbulkan kondisi yang rentan terhadap degradasi lingkungan karena sumber air yang digunakan rentan terhadap pencemaran yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat pengguna. Di lain pihak penggunaan non perpipaan komunal, debit air yang dibutuhkan dan debit air yang tersedia tidak bisa terukur secara pasti jumlahnya. Hal ini menyebabkan belum dapat direncanakan secara pasti terhadap pengguna air yang belum dapat terlayani oleh jaringan air perpipaan. Jumlah air tanah pada akuifer dalam Yogya – Sleman secara kuantitas mencukupi jumlahnya bahkan berlebih, dengan penggunaan saat ini baru mencapai 0,3 %. Namun hal ini bukan berarti penggunaan akuifer air tanah dalam dapat dieksploitasi secara besar-besaran mengingat air tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan. Fungsi kontrol didalam pelaksanaan konstruksi sumur bor harus dapat diawasi secara ketat agar pada saat pemasangan *screen* untuk pengambilan air tanah sesuai dengan rekomendasi teknis dari institusi yang mengeluarkan rekomendasi teknis tersebut termasuk pada saat pemasangan pompa *submersible* untuk pengambilan air tanah tidak melebihi ketentuan seperti tertuang dalam rekomendasi teknis.

Lemahnya fungsi pengawasan pada saat pelaksanaan konstruksi sumur dalam dapat menyebabkan kecurangan oleh pelaku usaha yang melakukan pengeboran sumur untuk kebutuhan air mereka terutama pada saat pemasangan *screen* dan pemasangan pompa *submersible* pada akuifer permukaan. Hal ini akan mengakibatkan kemungkinan terjadi perebutan sumber air tanah akuifer permukaan, oleh masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan data, PDAM Tirta Marta sebagai penyedia air bersih hanya mampu melayani 32,22 persen dari jumlah penduduk sedangkan sisanya masih menggunakan sumur gali permukaan, sumur bor dan non perpipaan komunal. Memastikan masyarakat agar mendapatkan air bersih dapat menjadi salah

satu prioritas pelayanan terkait akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa air bersih. Hal ini sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019 yang menjadikan akses dan penjangkauan pelayanan dasar (air bersih) menjadi isu strategis nasional.

Sistem non PDAM adalah merupakan sistem penyediaan air minum yang langsung dikelola oleh masyarakat terutama untuk wilayah yang belum terjangkau, belum terlayani oleh jaringan PDAM, terutama wilayah yang kekurangan air. Sistem PAM komunal ini umumnya sarana dan prasarana dibangun oleh Dinas terkait yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat. Jumlah penduduk yang terlayani dari sistem penyediaan air minum komunal yang sarana dan prasarananya disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Perkotaan Kota Yogyakarta 11.636 jiwa atau 2,98% dari seluruh penduduk Kota Yogyakarta.

Selain air minum, isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kota Yogyakarta yaitu isu sanitasi (air limbah, sampah dan drainase). Hingga saat ini layanan sanitasi layak sudah mencapai 98,74% yang terdiri Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) 14,08% dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 83,95%. Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sudah menjangkau ke seluruh wilayah kota Yogyakarta kecuali Kecamatan Kotagede dan wilayah bantaran sungai di 3 (tiga) Sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code dan Sungai Gajah Wong. Berkaitan dengan pencemaran limbah permukiman dan rumah tangga dan akan menyebabkan penurunan kualitas air tanah akibat dari masyarakat Kota Yogyakarta yang mempunyai jamban tanpa pengolahan atau septik tank (dibuang ke badan air yaitu sungai, saluran irigasi/drainase), efluent dari outlet IPAL Komunal belum memenuhi standard yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah DI Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah dan hampir semua tanki septik tank individual yang dimiliki masyarakat tidak pernah dikuras/disedot. Limbah yang saat ini pengelolaannya terpusat di IPAL Sewon, Bantul saat ini hampir mencapai *idle capacity* dengan jumlah pengguna mayoritas dari Kota Yogyakarta. Selain itu masih terdapat area permukiman dengan kondisi kumuh, terlihat dari luas permukiman kumuh 81,12 Ha, yang sebagian besar berlokasi di pinggir sungai (menempati sempadan sungai), sepanjang rel kereta api dan di bawah jembatan, serta masih terdapat 3.304 unit rumah yang termasuk dalam kategori tidak layak huni (tahun 2014). Sementara itu RPJMN 2015-2019 menargetkan area permukiman kumuh menjadi 0 persen sebagai target nasional di akhir tahun 2019. Kerjasama di sektor limbah terkait dengan pengelolaan Balai IPAL (Instalasi Pengelolaan Limbah) Sewon serta koordinasi terkait Sambungan Rumah. IPAL sendiri mempunyai jaringan pipa yang terdiri dari jaringan induk dan lateral sepanjang 183 km. Pipa sepanjang 52 km ditangani Balai IPAL, sedangkan sisanya sepanjang 131 km dikelola pemerintah Kota Yogyakarta.

Isu strategis lain yaitu mengenai persampahan, yang terkait dengan pengelolaan persampahan. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan menciptakan permasalahan lingkungan baru pada sektor sanitasi termasuk persampahan. Volume sampah yang terangkut ke TPA mencapai 86,99% dan masih ada 1,37% yang belum tertangani di masyarakat. Masih ada sampah yang belum terangkut ke TPA disebabkan kondisi geografis yang tidak memungkinkan sarana pengelolaan sampah milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Kondisi ini memerlukan inovasi sarana khusus dan pembukaan akses jalan di sejumlah kawasan

di Kota Yogyakarta terutama pada bantaran sungai. Timbulan volume sampah di Kota Yogyakarta tidak murni dari penduduk administrasi Kota Yogyakarta saja tetapi juga berasal dari penduduk pada siang hari Kota Yogyakarta yang bekerja di Kota Yogyakarta berasal dari luar Kota Yogyakarta. Selain itu dijumpai juga penduduk luar Kota Yogyakarta yang membuang sampah di TPS Kota Yogyakarta dikarenakan fasilitas pembuangan sampah di kabupaten yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta banyak yang tidak memadai. Pengadaan Bank sampah pada level Rukun Warga belum dapat mendorong penurunan volume sampah yang diangkut ke TPA. Hal ini disebabkan karena Bank sampah yang ada belum dapat dijalankan secara optimal berdasarkan karakter wilayah. Dibutuhkan perubahan perilaku dan edukasi dari masyarakat mengenai pengelolaan persampahan lingkungan mereka.

Dibidang persampahan adanya kerjasama dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Pengelolaan TPA Piyungan sendiri sepakat untuk dikelola DIY mengingat posisi TPA Piyungan yang merupakan TPA regional yang melayani 3 daerah. Namun demikian hal ini tidak menghilangkan peran dari masing-masing kabupaten/kota. Terkait pengelolaan oleh DIY ini perlu diperhatikan bahwa Kabupaten Bantul yang merupakan lokasi tempat TPA Piyungan berada justru penyumbang sampah terkecil. Namun jika terjadi suatu permasalahan justru Kabupaten Bantul menjadi penanggung beban terbesar.

Dari segi kualitas drainase perkotaan sudah mulai diperbaiki dengan banyaknya rehabilitasi atau peningkatan kapasitas dan kualitas drainase yang ada. Persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar 87,17 persen. Berdasarkan data kawasan rawan genangan tahun 2016 hanya sebesar 7,54 hektar (0,232 persen) pada 28 titik genangan di wilayah Kota Yogyakarta. Permasalahan drainase perkotaan ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya integrasi dari wilayah sekitar terutama Kabupaten Sleman (bagian hulu) dan Kabupaten Bantul (daerah hilir). Integrasi sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DIY dan Nasional untuk mewujudkan ketahanan air dan ketahanan nasional (RPJMN 2015-2019). Kerjasama drainase antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sudah dilakukan dalam 10 tahun terakhir yang ditandai dengan adanya SKB drainase. Dalam SKB terbaru, secara total ada 35 ruas jalan yang dikerjasamakan untuk jaringan drainasenya. Dari keseluruhan ruas jalan tersebut, 30 ruas adalah ruas jalan yang sebelumnya telah dikerjasamakan dan sisanya sebanyak 5 adalah ruas jalan baru. Dengan adanya kerjasama di sektor drainase ini, diharapkan nantinya fungsi saluran drainase akan semakin optimal. Keberadaan drainase tentu tidak dapat dipungkiri lagi perannya, terlebih pada musim penghujan seperti sekarang ini. Saluran drainase yang melintas di suatu kawasan acapkali dikaitkan dengan keberadaan genangan di kawasan tersebut. Inilah yang salah satunya melatarbelakangi pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta untuk melakukan kerjasama di sektor drainase berdasar keberadaan genangan terutama di daerah perbatasan. Jumlah genangan yang ada semakin berkurang sehingga bentuk pelayanan dari pemerintah kota/kabupaten terhadap kenyamanan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

Berbicara mengenai infrastruktur pelayanan publik tidak lepas dari penataan transportasi. Dalam mengantisipasi perkembangan Kota Yogyakarta yang tumbuh cepat menjadi kota besar, diperlukan solusi yang baik dan berkelanjutan agar permasalahan transportasi yang ada tidak menimbulkan permasalahan

lain. Identifikasi permasalahan transportasi yang terjadi di Kota Yogyakarta saat ini akan menjadi pijakan bagi penyelesaian masalah dan pengembangan sistem transportasi ke depan. Untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di Kota Yogyakarta yang sangat kompleks menuju terciptanya sistem transportasi berkelanjutan (*sustainable transport*) yang efisien, maka dibutuhkan: (1) pemahaman akan permasalahan, tantangan, peluang dan potensi untuk memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan saat ini dan akan datang; (2) kebijakan dan/atau peraturan yang mendukung *sustainable transport*; (3) keberkelanjutan dan terintegrasinya program jangka pendek, menengah dan panjang; (4) masterplan transportasi untuk perencanaan yang berkelanjutan, terintegrasi dan sinergi dari berbagai aspek transportasi yang sangat luas (termasuk tata ruang, infrastruktur dan pengelolaan); dan yang tidak kalah pentingnya adalah (5) komitmen dari seluruh pihak dan stakeholders terkait terhadap kebijakan transportasi yang telah ditetapkan.

Pembangunan transportasi perkotaan Yogyakarta yang mengarah pada transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation*) yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Yogyakarta. Pengembangan dan penataan transportasi Kota Yogyakarta untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang layak huni dimana masyarakat dapat menikmati berjalan kaki dan bersepeda di jalan perkotaan serta transportasi publik yang nyaman. Konsep transportasi perkotaan berkelanjutan di Kota Yogyakarta, antara lain :

- 1) mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi;
- 2) membangun fasilitas sepeda dan pejalan kaki yang memadai;
- 3) mengembangkan kawasan yang berorientasi transit;
- 4) menerapkan *traffic demand management* ;
- 5) mengembangkan transportasi wisata yang berkelanjutan;

Kemacetan lalu lintas di kota Yogyakarta dari hari ke hari semakin meresahkan warga dan menjadi masalah serius karena menurunkan tingkat kenyamanan mobilitas masyarakat di Yogyakarta yang berujung pada penurunan kualitas hidup sehat. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas karena banyak waktu terbuang, stress dalam berkendara, meningkatnya kecelakaan lalulintas, semakin besar biaya operasional kendaraan, menurunnya kualitas lingkungan (polusi udara, kebisingan, getaran), dan meningkatnya masalah pernapasan akibat tingkat polusi meningkat. Oleh karena itu, perlu penataan transportasi untuk dapat menumbuhkan kembali kehidupan kota Yogyakarta sebagai kota yang manusiawi dan berkelanjutan guna mendukung kota Yogyakarta sebagai kota budaya, pariwisata, dan pelajar.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah pengembangan transportasi perkotaan Yogyakarta yang berkelanjutan, seperti tertuang dalam kajian transportasi perkotaan yaitu dengan meningkatkan mobilitas orang dan aksesibilitas dengan cara :

- 1) Menciptakan angkutan umum massal yang terintegrasi, ekonomis dan mudah dijangkau sehingga meningkatkan penggunaan transportasi umum dan kendaraan tidak bermotor (berjalan kaki dan bersepeda).
- 2) Upaya-upaya implementasinya menggunakan 3 pendekatan utama : *Traffic Demand Management* (TDM), *Transit Oriented Development* (TOD) dan Manajemen Lalu lintas.

- 3) Dilakukan dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, diatur oleh kebijakan dan regulasi yang detil, didukung dengan teknologi terkini *Intelligent Transport System (ITS)* dan ramah lingkungan, disinergikan dengan pembangunan tata ruang kota yang menarik dan berorientasi transit.

Meskipun tidak menutup kemungkinan pengembangan tersebut di atas bukan merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Yogyakarta namun dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi yang lebih intens baik ke Pemda DIY maupun pemerintah pusat.

Keterbatasan prasarana transportasi juga ditunjukkan dengan keterbatasan fasilitas parkir. Fasilitas parkir merupakan elemen pendukung pergerakan lalu lintas perkotaan yang sangat vital. Setiap kendaraan yang bergerak akan membutuhkan ruang atau fasilitas untuk menyimpan/meletakkan kendaraan pada saat berhenti. Waktu yang digunakan kendaraan untuk berhenti setelah melakukan perjalanan di perkotaan, lebih panjang dibandingkan waktu untuk bergerak. Situasi ini menuntut tersedianya fasilitas/ruang parkir yang besar. Jenis fasilitas parkir yaitu gedung parkir dan pelataran parkir. Kedua jenis fasilitas parkir tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas di Kota Yogyakarta. Sebagian besar kendaraan masih parkir di badan jalan. Kondisi ini berdampak besar pada pengurangan lebar efektif jalan yang sangat besar, menurunkan kapasitas jalan, menimbulkan kesemrawutan dan meningkatkan jumlah kecelakaan. Untuk penanganan masalah parkir bisa dilakukan dengan pembangunan dan mengoptimalkan tempat khusus parkir yang sudah ada serta penataan parkir *on street*. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan mengembangkan tempat parkir swasta, sehingga bisa menambah penghasilan daerah dari perolehan pajak.

Selain layanan transportasi angkutan umum perkotaan, Kota Yogyakarta memiliki layanan transportasi kereta api. Layanan transportasi kereta api untuk perkotaan di Yogyakarta akan dikembangkan seiring dengan rencana pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian terintegrasi ke bandara NYIA dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur sudah mulai direncanakan oleh Pemerintah Daerah DIY yang direncanakan melewati kota Yogyakarta, sehingga nantinya Pemerintah Kota Yogyakarta akan terkena dampak dari pengembangan tersebut.

. Isu terkait kemacetan dan keselamatan yang ada di Kota Yogyakarta lainnya adalah rencana penutupan perlintasan sebidang. Dari sisi keamanan dan keselamatan, kondisi lalu lintas jalan saat ini yaitu pintu perlintasan yang bersinggungan langsung dengan rel kereta api memang tidak direkomendasikan. Langkah awal guna mengantisipasi keselamatan lalu lintas kendaraan di perlintasan sebidang yang dapat dilakukan adalah melengkapi rambu-rambu di 7 titik perlintasan sebidang sepanjang jalur kereta api yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya perlintasan sebidang jembatan Lempuyangan menjadi prioritas. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat mengenai penutupan perlintasan sebidang yang sudah dibangun *flyover/underpass* sebagai tindak lanjut program nasional pengurangan kecelakaan lalu lintas. Untuk perlintasan sebidang di jembatan Lempuyangan perlu dikaji lebih lanjut terkait dampak lalu lintasnya jika perlintasan tersebut ditutup sekaligus manajemen



rekayasa lalu lintas yang diperlukan. Selain itu diperlukan juga kajian mengenai kondisi jembatan Lempuyangan terkait daya tahan/kekuatan jembatan untuk mengetahui langkah-langkah penanganan selanjutnya.

Prasarana jalan merupakan salah satu fasilitas infrastruktur transportasi yang paling strategis. Untuk mempertahankan kinerjanya, maka prasarana jalan perlu dikelola sedemikian rupa sehingga kondisinya dapat terpelihara semaksimal mungkin dengan pendanaan yang optimal. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala akan menjaga kualitas jalan dan memperpanjang usia layanannya. Kerusakan jalan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun kondisi cuaca, namun disebabkan pula oleh banyak faktor, antara lain kurangnya pengawasan saat perbaikan drainase dan penggalian kabel optik. Kondisi jalan yang sudah rusak karena pelaksanaan proyek tersebut harus segera diperbaiki karena sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan.

Bentuk kerjasama lain yang dilakukan adalah di sektor jalan, di antaranya adalah Jalan Jambon merupakan kerjasama antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, yang menghubungkan antara tempat dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi yakni Jalan Magelang dan *Ringroad* Barat. Jalan Jambon juga bersimpangan dengan jalan Kabupaten yang juga merupakan jalur yang cukup ramai sehingga jalan ini dapat digunakan sebagai jalur alternatif. Selain itu kerjasama di bidang transportasi juga dilakukan di Jalan Godean yang memiliki peranan penting sebagai akses masuk ke Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta merupakan kawasan yang dirangkai oleh keberadaan 3 sungai besar, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajah Wong. Di sisi lain, dengan luasan kota yang sempit dan kepadatan penduduk yang tinggi, kawasan tepi sungai pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Kota Yogyakarta. Untuk itu diperlukan konsep besar penanganan kawasan sungai supaya ke depannya selain bisa mengatasi masalah yang sudah ada, juga bisa memberikan nilai tambah bagi warganya. Selain itu akan diinisiasi MoU dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai pihak yang berwenang mengenai pengelolaan kawasan sungai, agar terjadi pembagian kewenangan yang jelas dengan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Isu strategis lain terkait penataan permukiman yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Penuntasan untuk program Kotaku sebagian besar terletak di daerah sempadan sungai di Kota Yogyakarta serta beberapa titik di daerah permukiman kampung. Program perbaikan rumah dan lingkungan, sanitasi, membuka akses jalan serta melakukan revitalisasi sungai adalah program fisik untuk menata permukiman yang layak. Permukiman dan lingkungan yang layak akan bisa dikembangkan menjadi kampung yang produktif dengan membangun *waterfront area* (optimalisasi pemanfaatan air), *riverside pedestrian* (area pedestrian di pinggir sungai), dan *integrated ecotourism* (mengintegrasikan kawasan ekologi untuk area hijau). Dengan demikian kawasan yang sebelumnya kumuh, terutama di sekitar sungai, bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata, kuliner, dan olahraga. Program M3K (mundur, munggah, madhep kali) bagi warga di sepanjang sungai serta revitalisasi kawasan sungai termasuk program penting untuk menuju kawasan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Guna menyelaraskan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan hidup, maka dilaksanakan pengembangan program *ecodistrict* di Kota Yogyakarta (Program Pembangunan Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan). Pengembangan *ecodistrict* pada kawasan Selatan Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan Selatan. Pembangunan program *Ecodistrict* pada kawasan Selatan Kota Yogyakarta diharapkan fasilitas infrastruktur dapat menjangkau kawasan Selatan Yogyakarta sehingga kebutuhan dasar infrastruktur masyarakat dapat tercukupi dan permasalahan lingkungan, terutama yang terkait sampah, air bersih, pencemaran air sungai bisa teratasi dan Ruang Terbuka Hijau semakin bertambah.

Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Keberhasilan dalam penanggulangan bencana kebakaran masih bertumpu pada ketersediaan sumber daya pemadam kebakaran. Upaya pemadaman kebakaran yang dapat menjangkau hingga kampung perlu ditingkatkan, baik dalam hal inovasi maupun peran serta masyarakat. Kemampuan masyarakat masih cukup rendah dalam penggunaan APAR juga perlu menjadi perhatian agar penanggulangan bencana kebakaran di masyarakat dapat dilakukan mandiri terlebih dahulu. Di sisi lain, instalasi proteksi kebakaran juga harus disosialisasikan pada semua gedung-gedung, terutama pada fasilitas umum.

Untuk kepentingan lebih luas dalam penanganan kebencanaan secara umum belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional. Perancangan sistem terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan. Hal yang tidak kalah penting terkait meminimalisir risiko bencana di Kota Yogyakarta adalah kesadaran masyarakat dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Simulasi tanggap darurat bencana juga sudah dilaksanakan, meskipun belum secara menyeluruh dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta. Pelaksanaan simulasi tanggap darurat bencana ini sangat berguna agar masyarakat teredukasi dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tertuang dalam isu strategis nasional dalam RPJMN 2015-2019 terkait kawasan rawan bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan konsep terintegrasi yaitu mengurangi risiko bencana – menanggulangi bencana secara cepat – membangun kembali masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana.

#### **4.2.14. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintah yang baik dan bersih di Kota Yogyakarta selaras dengan misi Gubernur DIY tahun 2017-2022 pada misi 4 dan 5 yang menegaskan bahwa tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta perilaku bermartabat dari aparatur sipil penyelenggara pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih sesuai dengan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional yaitu "Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar diukur dari akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah. Pencapaian target di dalam urusan tata pemerintahan telah mencapai hasil yang baik. Pencapaian indikator kinerja secara umum telah mencapai batasan yang relatif baik. Lebih dari itu beberapa prestasi dan penghargaan telah diraih oleh pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan dokumen perencanaan, pencapaian hasil penilaian Sakip, pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal, bahkan capaian hasil pemeriksaan keuangan dapat mencapai WTP secara berkelanjutan. Banyaknya penghargaan yang diterima di dalam urusan tata pemerintahan ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta, yang secara strategis membantu dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pada tingkat provinsi dan nasional diperlukan sinkronisasi antara RPJMD Kota Yogyakarta dengan RPJMD Pemda DIY serta RPJMN. Secara integral diperlukan penyesuaian dengan beberapa dokumen perencanaan sehingga tingkat capaian yang diperoleh di Kota Yogyakarta secara akumulatif merupakan sumbangan yang berarti kepada Pemda DIY serta di level nasional. Keistimewaan DIY sebagai acuan yang melandasi pembangunan di Kota Yogyakarta, dan Nawacita diakomodasi dalam sistem pembangunan Kota Yogyakarta.

Isu strategis nasional yang menjadi penekanan pada kebijakan tata kelola Pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah. Reformasi Birokrasi menjadi isu strategis bidang Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (good and clean goverment), peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dituangkan dalam dokumen roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2016. *Road map* reformasi mencakup delapan bidang tersebut berisi rencana pola perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. *Road map* reformasi birokrasi ini mencakup 8 bidang yakni:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang undangan
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Penataan Tatalaksana
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- f. Penguatan Akuntabilitas
- g. Penguatan Pengawasan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun capaian indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2015	2016
<b>I</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	5	3,13	3,16
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	1,66	1,82
4	Penataan Tatalaksana	5	3,09	3,09
5	Penataan Sistem Manajemen Aparatur	15	11,67	11,50
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,15	3,15
7	Penguatan Pengawasan	12	6,79	7,69
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4,20	4,35
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60</b>	<b>37,39</b>	<b>37,47</b>
<b>II</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14		9,81
2	Nilai Kapasitas Organisasi (survey Internal)	6		5,20
3	Nilai Persepsi Korupsi (survey eksternal)	7		6,07
4	Opini BPK	3		3
5	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan ( Survey Eksternal)	10		8,30
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40</b>		<b>32,38</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi ( A+B)</b>	<b>100</b>	<b>62,32</b>	<b>69,85</b>

#### a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan yang dilakukan oleh kota Yogyakarta diawali dengan internalisasi nilai-nilai budaya SATRIYA yang diharapkan dapat mengubah *mindset* dan perilaku para aparatur pemerintahan di lingkungan Kota Yogyakarta. Disamping itu seluruh Aparatur Sipil Negara telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen integritas Aparatur dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Salah satu bentuk perubahan *mindset* dan Culture Set Aparatur Sipil Negara adalah penerapan Hospitality Management dalam rangka peningkatan pelayanan prima. Adapun capaian area manajemen Perubahan dari tahun 2012-2016 sebagai berikut :

No	Area	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.	Manajemen Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Pengarah Kebijakan Reformasi Birokrasi rutin dilaksanakan setiap tahun dan melaksanakan ketugasan sesuai rencana kerja</li> <li>Pembentukan Tim Pokja 8 area Reformasi Birokrasi rutin dilaksanakan setiap tahun dan melaksanakan ketugasan</li> </ul>

		<p>sesuai rencana kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepwal Nomor 406/KEP.2016 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2012 sampai 2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta</li> <li>• Kepwal Nomor 441 Tahun 2014 tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta</li> <li>• Sosialisasi Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta</li> <li>• Pembentukan Kelompok Budaya Kerja setiap Perangkat Daerah</li> <li>• Penyusunan Rencana Aksi Kelompok Budaya Kerja setiap Perangkat Daerah</li> </ul>
--	--	---

Dalam Reformasi Birokrasi area Manajemen Perubahan terdapat isu strategis yang merupakan catatan Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan agen perubahan sebagai upaya untuk melakukan perubahan mindset Aparatur. Hal ini merupakan agenda prioritas tindak lanjut Reformasi Birokrasi. Adapun Capaian tindak lanjut sampai 2017 melalui :

No	Catatan	Tindak Lanjut
1.	Belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan agen perubahan sebagai upaya untuk melakukan perubahan mindset Aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Melakukan Monev keputusan Walikota tentang Agen of Change .</li> <li>■ Perubahan Keputusan Walikota agent of change dan penambahan agent of change pada setiap Perangkat Daerah dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Nomor 324 Tahun 2017.</li> <li>■ Mengintegrasikan ketugasan agent of change dengan kelompok budaya pemerintahan.</li> <li>■ Menyusun Rencana Aksi Budaya Pemerintahan &amp; <i>agent of change</i></li> <li>■ <i>Merencanakan workshop agent of change tahun 2018</i></li> </ul>

**b. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah kurang harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum saat ini dikarenakan aturan dari Pusat tidak sesuai dengan implementasi di daerah. Hubungan vertikal antara ketentuan hukum di pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan, dengan demikian tidak terjadi saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu koherensi hukum di tingkat pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota hendaknya dilakukan secara optimal. Untuk itu maka diperlukan penyesuaian antara hukum di pusat, provinsi dan daerah. Permasalahan di produk hukum, dan sosialisasinya akan dapat mengiringi, jika produk hukum memiliki koherensi yang kuat. Berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, maka perlu dilakukan upaya untuk mencapai koherensi sistem hukum di tingkat lokal, dengan provinsi dan tingkat nasional, sehingga belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan obyek hukum.

Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah. Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2016 area Penataan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

No	Area	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah melakukan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang berlaku sekali</li> <li>• Telah melakukan pemetaan produk hukum daerah yang dicabut.</li> <li>• Telah melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah</li> <li>• Updating dan pengembangan Situs Hukum SJDJ .</li> </ul>

Namun dari Capaian tersebut terdapat isu strategis yang menjadi catatan dari Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu kajian atas peraturan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimal terutama terkait dengan identifikasi berbagai kebijakan yang tidak selaras, tidak lagi diperlukan, serta kebijakan yang bersifat lintas sektor dan Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala. Hal ini merupakan agenda prioritas tindak lanjut Reformasi Birokrasi. Adapun Capaian tindak lanjut sampai 2017 melalui :

No	Catatan	Tindak lanjut
1.	Kajian atas peraturan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimal terutama terkait dengan identifikasi berbagai kebijakan yang tidak selaras, tidak lagi diperlukan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Peraturan Walikota tentang proses penyusunan produk hukum daerah untuk level kota sesuai dengan Permendagri No.80 Tahun 2015;</li> <li>• Melaksanakan Harmonisasi Produk Hukum</li> </ul>

	serta kebijakan yang bersifat lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pendataan produk hukum yang berupa perda dan perwal yang masih berlaku.</li> <li>• Menyusun rancangan SOP Produk hukum daerah.</li> </ul>
2.	Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala	

**c. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki aturan yang rigid dalam realisasi pembentukan lembaga baru. Aturan tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah mendasarkan pada PP 41 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2016. Dasar pembentukan sebuah lembaga sesuai dengan PP 41 Tahun 2007 harus memenuhi syarat berikut:

1. Merupakan urusan yang riil. (Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007)
2. Harus melalui kajian akademik.
3. Harus jelas ukuran beban kerja untuk menentukan besaran rumah.
4. Benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan Evaluasi kelembagaan di Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan secara rutin melalui evaluasi struktur kelembagaan, Evaluasi Tugas, Pokok dan Fungsi. Pada Tahun 2016, dilakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh untuk mewujudkan restrukturisasi / penataan tugas dan fungsi Perangkat Daerah menjadi organisasi yang rightsizing dan sebagai tindak lanjut dari keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga keluarlah Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Adapun Capaian Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Penataan dan Penguatan Organisasi sebagai berikut :

No	Area	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan evaluasi kelembagaan secara rutin melalui evaluasi struktur kelembagaan</li> <li>• Dilakukan evaluasi kelembagaan secara rutin melalui evaluasi tugas,pokok dan fungsi</li> <li>• Dilakukan kajian kelembagaan dengan pihak ketiga dalam rangka penataan kelembagaan</li> <li>• Dilakukan evaluasi kinerja organisasi melalui SPEKOP</li> </ul>

Dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat isu strategis yang menjadi catatan penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Struktur organisasi belum sepenuhnya relevan dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD. Hal ini merupakan agenda prioritas tindak lanjut Reformasi Birokrasi. Adapun Capaian tindak lanjut sampai 2017 melalui :

No	Catatan	Tindak lanjut
1.	Struktur organisasi belum sepenuhnya relevan dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kelembagaan disesuaikan dengan RPJMD pada tanggal 20 September 2017 dengan Fasilitasi Biro Organisasi DIY</li> <li>• Evaluasi Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, sudah menjadi Perwal berjumlah 2 Perangkat Daerah</li> <li>• Proses Penataan Kelembagaan UPT, proses validasi di Pemda DIY</li> </ul>

**d. Penataan Tata Laksana**

Dalam rangka mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dibuatlah sistem, prosedur dan mekanisme ketatalaksanaan. Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dengan diterapkannya Penataan Ketatalaksanaan (*Process Bussiness*) dan SOP. Selain itu untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung pemberian layanan kepada masyarakat melalui penggunaan sistem Informasi melalui E-Government. Adapun capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana sebagai berikut :

No	Area	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.	Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disusunnya peta proses bisnis pada perangkat daerah dan penerapannya</li> <li>• Proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP dan telah diterapkan.</li> <li>• Evaluasi Proses Bisnis dan SOP</li> <li>• Pengembangan E-Government</li> <li>• Penerapan sistem keterbukaan informasi publik melalui PPID.</li> </ul>

Namun dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat isu strategis yang menjadi catatan penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Baru sebagian kecil unit organisasi yang telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan Hasil evaluasi atas Bisnis proses dan SOP belum menunjukkan efisiensi



dan efektifitas. Hal ini merupakan agenda prioritas tindak lanjut Reformasi Birokrasi. Adapun Capaian tindak lanjut sampai 2017 melalui :

No	Catatan	Tindak lanjut
1.	Baru sebagian kecil unit organisasi yang telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan proses bisnis untuk semua perangkat daerah.</li> <li>• Evaluasi SOP dengan penyederhanaan nama jabatan dan mekanisme .</li> <li>• Pengembangan E-Governmnet</li> <li>• Penyusunan draft Perwal E-Office</li> <li>• Pengintegrasian sistem SIM Perencanaan, SIM Keuangan, dan SIM Pelaporan</li> </ul>
2.	Hasil evaluasi atas Bisnis proses dan SOP belum menunjukkan efisiensi dan efektifitas	

#### e. Penataan Sistem Manajemen Aparatur

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumberdaya aparatur, maka perlu menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Penataan Sistem Managemen SDM Aparatur menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Organisasi. Dukungan Bagian Organisasi adalah pada tingkat penyiapan regulasi dan pembenahan pegawai melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mengenai implementasi regulasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur harus dilakukan melalui :

##### 1. **Perencanaan pegawai,**

yang mencakup mulai dari visi dan misi organisasi terkait dengan program-program kebijakan pegawai kedepan, *blue print/master plan* perencanaan kepegawaian dalam jangkapendek-menengah-panjang, dan sikap pimpinan terhadap program kebijakan perencanaan kepegawaian.

##### 2. **Seleksi dan Rekrutmen pegawai,**

yang mencakup pada semua aspek tahapan seleksi dan rekrutmen pegawai mulai dari panitia seleksi dan rekrutmen, system pengumuman lowongan pegawai, system pelamaran pegawai, system seleksi pegawai, system penentuan kelulusan pegawai, system pengumuman kelulusan pegawai, system orientasi pegawai, dan system penempatan pegawai.

##### 3. **Pengembangan pegawai,**

yang mencakup pada aspek penerapan pengembangan kualitas (pengetahuan, keahlian, dan keterampilan) serta pengembangan karier (rekrutmen jabatan, pengangkatan jabatan, dan mutasi jabatan).

**4. Kinerja pegawai,**

yang mencakup pada aspek system kinerja, budaya kerja, motivasi kerja, *output* (hasil kerja) dan *outcome* (manfaat kerja, serta system penilaian kinerja pegawai).

**5. Kompensasi dan Disiplin pegawai**

Adalah penilaian pada instansi peserta yang mencakup pada aspek pemberian penghargaan, tunjangan kinerja, dan kesejahteraan sedangkan aspek pemberian hukuman seperti hukuman disiplin, penegakan kode etik, dan motivasi disiplin

**6. Pemberhentian dan pensiun pegawai,**

yang mencakup pada prosedur pemberhentian pegawai dan system pelayanan pensiun pegawai. Penataan Sistem Manajemen SDM akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM yang selanjutnya akan berdampak pula pada peningkatan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Di tahun 2015 mendasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003 Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan Formasi melalui Sistem E-Formasi Ke Men-PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara sebanyak 3346 formasi, Namun dengan adanya surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 dan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/501/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Sanggahan terkait dengan adanya jadwal penerimaan CPNS Tahun 2016. Dengan adanya Penundaan Penambahan Pegawai ASN dan dengan adanya Pegawai ASN yang pensiun rata – rata pertahun 350 orang berdampak pada pemenuhan pegawai di setiap SKPD hanya rata – rata 60 %. Dalam mengatasi kekurangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta melakukan penataan pegawai secara proporsional atau redistribusi pegawai.

Adapun Capaian Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi area Penataan Sistem manajemen Aparatur sebagai berikut :

No	Area	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.	Penataan Sistem Manajemen Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja rutin setiap tahun.</li> <li>• Penerimaan Pegawai secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN</li> <li>• Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi baik melalui diklat, standar kompetensi jabatan, asesment pegawai, talent pool</li> <li>• Promosi jabatan secara terbuka</li> </ul>

No	Area	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan SKP Pegawai</li> <li>• Penegakan aturan disiplin, kode etik pegawai</li> <li>• Pelaksanaan Evaluasi Jabatan</li> <li>• Updating dan Pengembangan SIMPEG</li> </ul>

Dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat isu strategis yang menjadi catatan penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu belum dilakukan asesment pada seluruh pegawai, kinerja individu belum seluruhnya memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja level di atasnya dan penilaian kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi. Hal ini merupakan agenda prioritas tindak lanjut Reformasi Birokrasi. Adapun Capaian tindak lanjut sampai 2017 melalui :

No	Catatan	Tindak lanjut
1.	Belum dilakukan asesment pada seluruh pegawai, kinerja individu belum seluruhnya memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja level di atasnya dan penilaian kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan assesment terhadap pejabat administrasi maupun fungsional dari tahun 2017-2021. Tahun 2017 dengan target 196, terealisasi 155 sampai dengan bulan September. Tahun 2018 sebanyak 120. Tahun 2019-2021 masing-masing 180.</li> <li>• Membentuk UPT assesment center (proses validasi di Pemda DIY)</li> <li>• Assesment untuk calon JPT: Tahun 2017 ada kekosongan sejumlah 11 orang, tahun 2018 ada 13 kekosongan, tahun 2019 ada 5 kekosongan, tahun 2020 ada 1 kekosongan, dan tahun 2021 ada 3 kekosongan. (jumlah yang akan diassesment untuk JPT sejumlah calon yang melamar)</li> <li>• Form Uraian Jabatan yang akan menjadi data awal untuk penyusunan indikator kinerja individu</li> <li>• Proses penyusunan draft Perwal TPP berbasis kineja</li> </ul>

Di satu sisi UU ASN memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang masih dibatasi oleh kebijakan moratorium pegawai, yaitu tidak diperkenankan melakukan pengangkatan pegawai hingga penyerapan anggaran rutin dapat proporsional dibandingkan dengan anggaran pembangunan. Dengan demikian para pegawai/pejabat yang berusia 56 tahun

masih dapat dikaryakan sampai umur 58 tahun. Namun demikian keterbatasan jumlah pegawai masih dirasakan sebagai masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Sedangkan besarnya penyerapan anggaran rutin di Kota Yogyakarta disebabkan oleh besarnya jumlah guru, sedangkan pembebanan alokasi tunjangan sertifikasi guru dimasukkan dalam komponen alokasi dana rutin Kota Yogyakarta, sehingga memperbesar serapan anggaran rutin tersebut. Kondisi ini yang perlu ditinjau ulang dalam kebijakan khususnya moratorium di Kota Yogyakarta.

Kualitas SDM tidak hanya diukur secara administratif melalui sasaran kinerja pegawai, akan tetapi juga perlu diikuti dengan wujud nyata kualitas SDM yang juga memiliki etika, martabat serta etos kerja yang baik. Peningkatan kualitas SDM aparatur sipil negara di Kota Yogyakarta memiliki kesamaan dengan konsep yang diangkat DIY dalam, yaitu Trilogi SDM-DIY yang meliputi Etos, Etika, dan Kualitas. Dalam UU ASN menuntut peningkatan kualitas manajemen SDM pegawai, baik penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP), pemenuhan kompetensi, profesionalitas, sistem seleksi terbuka, pemenuhan standar kinerja, manajemen karir. Semua ini dapat dilakukan jika telah terkondisi sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada sistem merit secara penuh. Untuk kebutuhan merit sistem diperlukan analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kompetensi, evaluasi kompetensi pegawai, pendidikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Dengan demikian kebutuhan pegawai, kebutuhan jabatan dan kompetensi semua dapat dipersiapkan. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang maka dalam hal urusan kepegawaian perlu penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang berbasis kompetensi.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN merupakan unsur penting dalam pengelolaan negara. Ia adalah sumberdaya yang akan melaksanakan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Pegawai ASN disertai tugas pokok untuk memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Tanpa kehadiran pegawai ASN maka suatu negara akan mengalami kekacauan. Di sisi lain, meskipun suatu Negara memiliki pegawai ASN, tetapi berkualitas buruk, Negara tersebut akan mengalami tata pemerintahan yang buruk (*bad governance*). Kondisi ini akan berujung pada lambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Menyadari peranan penting pegawai ASN yang sangat strategis, Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, diperlukan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari Pegawai ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dalam rekrutmen, pengangkatan, penataan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan karier PNS dilakukan juga dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan Manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur, maka salah satu isu strategis sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui pengembangan SDM ASN yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Isu strategis manajemen kepegawaian tersebut diperkuat dalam Buku Panduan Menghitung dan Mengukur Indeks Profesionalitas ASN (BKN) Jakarta (2016) yang menunjukkan permasalahan utama manajemen kepegawaian, yaitu: masih rendahnya kompetensi, belum sesuai kebutuhan/penempatan dalam jabatan, kinerja/produktivitas yang belum optimal, integritas PNS yang masih rendah; dan sistem remunerasi yang belum layak dan berbasis kinerja.

Dalam upaya mengantisipasi tantangan yang muncul sebagaimana tersebut dalam isu strategis di atas maka dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Menyusun analisa kebutuhan diklat dan analisa kesenjangan antara profil PNS dengan syarat jabatan dalam rangka peningkatan kompetensi PNS agar sesuai dengan syarat jabatan yang diemban;
2. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil analisa kebutuhan diklat dan analisa kesenjangan profil PNS dengan syarat jabatan;
3. Melaksanakan pengiriman tugas belajar dan izin belajar;
4. Pemberdayaan pegawai dengan memperkaya tugas yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Melakukan distribusi pegawai dengan berpedoman pada Keputusan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil agar memperoleh PNS yang

tepat baik secara kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusinya secara proporsional sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata;

6. Upaya untuk meningkatkan kinerja SDM yang ada dengan pemberian *reward and punishment*;
7. Membuka mutasi PNS dari seluruh Indonesia secara selektif;
8. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai perwujudan **Jogja Smart City**;

Upaya sebagaimana tersebut diatas menjadi lebih maksimal dengan didukung oleh :

- Penyusunan uraian jabatan, petajabatan, dan analisis beban kerja untuk mendukung perencanaan dan pembinaan karier PNS berbasis pada kompetensi sehingga PNS dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan jumlah kebutuhannya;
- Penataan Sistem Manajemen SDM secara efektif dan efisien sehingga dapat memangkas rantai birokrasi yang ada dan dapat meminimalisir jumlah kebutuhan SDM yang ada.
- Penataan kelembagaan yang berpengaruh terhadap kebutuhan SDM.

Untuk itu, langkah-langkah tersebut perlu untuk dilakukan dalam upaya mewujudkan **merit system** sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem ini bertujuan untuk mensinkronkan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon pegawai yang akan direkrut, diangkat, ditempatkan, dan dipromosikan pada jabatan tersebut sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### f. Penguatan Akuntabilitas

Dalam kurun waktu 2012-2016 perkembangan nilai predikat akuntabilitas di Pemerintah Kota Yogyakarta dimulai tahun 2012 mendapatkan predikat CC, tahun 2013 mendapatkan predikat CC, Tahun 2014 mendapatkan predikat B, Tahun 2015 mendapatkan predikat BB dan Tahun 2016 mendapatkan predikat BB. Predikat BB menunjukkan bahwa tingkat efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menunjukkan hasil yang baik. Dalam kurun waktu tersebut terjadi peningkatan perolehan nilai dikarenakan selalu ada perbaikan tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan terus melakukan inovasi dalam penerapan SAKIP dalam rangka meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Adapun capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas sebagai berikut :

No	Area	Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan perencanaan berbasis kinerja terpadu mulai dari perumusan RPJMD hingga renstra SKPD.rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD dijabarkan ( cascade down) kedalam berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja di Renstra SKPD.</li> <li>• Menetapkan IKU, Perjanjian Kinerja dan melakukan pengukuran secara berkala atas target yang direncanakan.</li> <li>• Pengembangan sistem SAKIP</li> <li>• Evaluasi implementasi SAKIP oleh inspektorat</li> </ul>

Namun dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat isu strategis yang menjadi catatan penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Sasaran dan indikator kinerja beberapa SKPD masih belum berorientasi hasil, Tujuan belum dilengkapi dengan indikator dan target, Monitoring atas rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala, belum dilakukan perjanjian kinerja secara berjenjang/cascade. Hal ini merupakan agenda prioritas tindak lanjut Reformasi Birokrasi. Adapun Capaian tindak lanjut sampai 2017 melalui :

No	Catatan	Tindak lanjut
1. 2. 3. 4.	<p>Sasaran dan indikator kinerja beberapa SKPD masih belum berorientasi hasil,</p> <p>Tujuan belum dilengkapi dengan indikator dan target,</p> <p>Monitoring atas rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala</p> <p>Belum dilakukan perjanjian kinerja secara berjenjang/cascade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penyusunan dan penyesuaian RPJMD.</li> <li>• Melaksanakan Penyusunan Cascading</li> <li>• Menyusun perjanjian kinerja berjenjang pada level eselon II hingga eselon IV sehingga terkait langsung dengan pencapaian kinerja organisasinya;</li> <li>• Melaksanakan monitoring rencana aksi secara berkala.</li> <li>• Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga dapat menggambarkan kinerja SKPD yang sebenarnya serta memberikan rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja;</li> </ul>

#### **g. Penguatan Pengawasan**

Penguatan Pengawasan yang telah dilaksanakan inspektorat Kota Yogyakarta terbukti dengan telah diraihinya predikat/ opini WTP bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 8 kali berturut-turut. Disamping itu Zona integritas sudah dicanangkan pada tahun 2011 untuk mendukung pakta integritas Pegawai di Kota Yogyakarta harus bebas dari korupsi. Pada tahun 2014 ada 2 (dua) OPD yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi di Kota Yogyakarta yakni Dinas Perizinan dan Kantor Pengelolaan Taman Pintar.

#### **h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam hal pelayanan publik, Kota Yogyakarta telah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perbaikan berkelanjutan dilakukan melalui penyusunan SPP, Pelaksanaan Survey Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan aduan melalui Unit Pengelolaan Informasi dan Keluhan, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Evaluasi Perwal Penyelenggaraan Perizinan.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kota Yogyakarta saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep *JOGJA SMART CITY*. Konsep ini akan menempatkan Kota Yogyakarta sebagai kota cerdas yang merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara daring yang sudah lama dilakukan, menjadi lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel. Hal itu bisa terwujud dengan terbangun dan terkelolanya sistem data besar, *command centre*, pengelolaan lalu lintas dan parkir, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, Wi-Fi gratis di *public space* secara daring dan digital, serta pengembangan aplikasi yg lebih mudah dan sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini tidak hanya berhenti pada digitalisasi pengelolaan pemerintah dan pelayanan ke masyarakat melalui daring. Jogja Smart City pada tindak lanjutnya juga menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas, yaitu ekosistem yang lingkungan yg tertata dan nyaman bagi siapa saja.

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka peningkatan informasi publik. Hal ini juga mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam isu strategis tatakelola RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini maka penduduk di Kota Yogyakarta diharapkan dapat memperlancar informasi dan semakin memudahkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, tidak cukup hanya dengan melaksanakan ketugasan secara normatif, namun perlu dilakukan inovasi agar pelayanan publik semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1 VISI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi yang telah disampaikan saat pemilihan sebelumnya. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini akan diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

**MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan.

**Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni adalah:**

1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

**Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat adalah:**

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan

komunikasi, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.

2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya aktifitas sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama pelayanan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota dan regional.
5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

**Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat adalah:**

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih.
3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan yaitu cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman dan mencerahkan.
4. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif.
5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

**Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan adalah:**

1. Berkembangnya pemerintah, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
4. Berkembangnya semangat "Jogja Berkemajuan" dalam penyelenggaraan pembangunan kota berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Jogja.

## 5.2 MISI

Upaya untuk mewujudkan visi **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”** dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

## 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5. 1.

## Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Yogyakarta

**Visi: “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,7	7,7	7,58	7,35	7,34	7,29	7,1	7,1
			Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	55,41	55,41	55,93	56,53	57,13	57,74	58,34	58,34
			Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86	86
2	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,42	0,42	0,41	0,40	0,397	0,395	0,390	0,390
			Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,13%	5,13%	5,16%	5,19%	5,20%	5,21%	5,23%	5,23%
			Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	1,04%	1,04%	1,30%	1,50%	1,70%	1,90%	2,10%	2,10%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	1.660	1.660	1.628	1.596	1.564	1.532	1.500	1.500
				Angka pelanggaran Perda	6.000	6.000	5.800	5.600	5.400	5.200	5.000	5.000
4	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	11,42 th	11,42 th	11,43 th	11,43 th	11,44 th	11,44 th	11,45 th	11,45 th
				Angka harapan lama sekolah	16,89 th	16,89 th	16,95 th	17,01 th	17,22 th	17,28 th	17,33 th	17,33 th
			Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,30 th	74,30 th	74,32 th	74,34 th	74,36 th	74,38 th	74,4 th	74,4 th
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	44%	44%	50%	56%	61%	67%	72%	72%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	63,55%	63,55%	68,6%	73,4%	76,7%	79,6%	82,5%	82,5%
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,64	50,64	50,84	51,04	51,24	51,44	51,64	51,64
6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	39,32	39,32	40,29	41,29	42,34	43,36	44,41	44,41
7	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## **BAB VI**

# **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Yogyakarta

**Visi: “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”**

<b>Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Kemiskinan masyarakat menurun	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
			Meningkatkan pelayanan Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo
			Meningkatkan pelayanan Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budi Dharma
		Peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial	Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
			Mengoptimalkan kinerja Komite Perlindungan dan Hak-Hak Disabilitas
			Meningkatkan kualitas data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Keberdayaan masyarakat meningkat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kelembagaan kemasyarakatan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung
		Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Mengoptimalkan organisasi perempuan
			Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan
			Meningkatkan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Peningkatan Perlindungan Anak	Meningkatkan pengarusutamaan hak anak		
	Meningkatkan penanganan terhadap anak korban kekerasan		



<b>Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			Fasilitasi Taman Pendidikan Anak
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gedongtengen	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondokusuman	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondomanan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

<b>Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Jetis	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Kotagede	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Kraton	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Mantriheron	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat	
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat	
		Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat	

<b>Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Mergangsan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan kewilayahan kecamatan Ngampilan pemberdayaan masyarakat berbasis	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Pakualaman	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Tegalrejo	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat	
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat	
		Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat	

<b>Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Umbulharjo	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Wirobrajan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan
			Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
		Peningkatan pembinaan budidaya dan produk kehewanian dan perikanan	Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan
			Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa
Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan			
Peningkatan pembinaan budidaya dan produk hasil pertanian		Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian	
	Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian		

<b>Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Meningkatkan produktifitas tenaga kerja
			Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
			Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
			Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur
			Mengoptimalkan penempatan transmigrasi
		Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja
			Meningkatkan upah minimum kota
			Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
		Pengoptimalan kualitas koperasi	Meningkatkan pembinaan kelembagaan koperasi
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK	Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)
			Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
			Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall, dsb
			Meningkatkan pengelolaan kebersihan pasar
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar	Meningkatkan pengelolaan pengamanan dan penertiban pasar
			Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana pasar
			Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar
Peningkatan penataan, pengembangan		Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar	

Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan pendapatan pasar	Meningkatkan penataan lahan dan pedagang
			Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional
		Peningkatan pengembangan pusat bisnis	Meningkatkan pendapatan UPT Pusat Bisnis
		Pengotimalan pembinaan dan pengendalian perdagangan	Meningkatkan Pengembangan Kemitraan dengan Toko Modern
			Pembatasan toko berjejaring
			Meningkatkan pengawasan pengendalian harga
			Meningkatkan tata titik lokasi PKL
		Pengoimalan pembinaan perindustrian	Meningkatkan promosi produk UMKM
			Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian
			Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian
			Meningkatkan pameran industri kreatif
			Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM
		Peningkatan pengembangan industri logam	Meningkatkan pembinaan sentra industri
			Meningkatkan pendapatan UPT logam dengan perbaikan kualitas produk yang mengarah ke industri kreatif dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
		Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta
			Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
			Meningkatkan pembinaan kampung wisata
			Meningkatkan wisata sejarah
		Mengoptimalkan pengelolaan kawasan Malioboro	

<b>Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Pengembangan Taman Pintar	Meningkatkan operasional layanan Taman Pintar
			Mengembangkan science center di kawasan selatan
		Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
			Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata
			Meningkatkan pengembangan atraksi pariwisata
		Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan
	Menerbitkan izin sesuai dengan prosedur		
	Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan		Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi
			Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal
	Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan		Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan
			Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan
			Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan
	Pengembangan penanaman modal		Meningkatkan pengembangan SIM Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal
Meningkatkan promosi penanaman modal			
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal			

<b>Misi 3: Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat
			Meningkatkan publikasi pesan moral kepada masyarakat
			Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di kota Yogyakarta
			Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial
			Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik
			Meningkatkan organisasi ber-SKT
		Pengembangan kepemudaan	Memberikan edukasi kepada pemuda melalui Pemilihan Pemuda Pelopor, Kemah Bakti Pemuda Nusantara, dan Pemuda Jogja Mencari Bakat
			Memfasilitasi seleksi dan pendidikan parkibraka
			Membentuk karakter pemuda anti NAPZA
			Mengoptimalkan lembaga kepemudaan
		Pengembangan keolahragaan	Meningkatkan edukasi olahraga melalui Kelas Khusus Olahraga
			Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat, termasuk kaum disabilitas
			Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, termasuk untuk kaum disabilitas
			Mengoptimalkan lembaga keolahragaan



<b>Misi 3: Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			Mengoptimalkan pengelolaan aset olahraga
		Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
			Meningkatkan penertiban vandalisme
			Memberikan edukasi melalui patroli bina pelajar
			Meningkatkan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah
			Mengoptimalkan petugas intel Pol PP
		Peningkatan perlindungan kepada masyarakat	Meningkatkan pembinaan petugas perlindungan masyarakat
			Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
			Mengoptimalkan gerakan kampung Panca Tertib
		Penegakan peraturan perundangan	Mengoptimalkan operasi penertiban umum
			Menegakkan produk hukum daerah
			Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
		Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan	Meningkatkan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
			Meningkatkan pengkajian peraturan perundang-undangan

<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kualitas pendidikan meningkat	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah dasar	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah dasar (SD)
			Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi
			Meningkatkan akreditasi SD
		Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SD	
		Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah menengah pertama (MP)
			Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi
			Meningkatkan akreditasi SMP
		Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SMP	
		Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal	Melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket A, B dan C
	Meningkatkan pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)		
	Meningkatkan pemberdayaan pendidikan masyarakat berbasis kampung		
	Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	Fasilitasi pendidikan berbasis budaya keistimewaan		
Meningkatkan kualitas pendidikan vokasional			
Meningkatkan akreditasi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal			

<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatkan pengembangan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
			Meningkatkan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)
			Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
			Meningkatkan pengelolaan sekolah inklusi
		Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan kota
			Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan keliling
			Meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan kota, sekolah dan khusus
			Meningkatkan budaya gemar membaca
			Meningkatkan Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku
			Mengembangkan perpustakaan di wilayah Yogya selatan
	Optimalisasi pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan koleksi pustaka dan naskah kuno	
		Meningkatkan jumlah judul bahan pustaka	
		Meningkatkan pengelolaan sistem perpustakaan	
		Meningkatkan pengelolaan otomasi dan digital library	
	Harapan hidup masyarakat meningkat	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan puskesmas
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan		Meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit Pratama	

<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan upaya pelayanan kesehatan	Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
			Meningkatkan kepastian kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Warga Kota Yogyakarta
			Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah
			Meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dalam memenuhi standar
			Meningkatkan pendampingan rumah sakit
			Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan
			Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji
			Menambahkan layanan puskesmas 24 jam dengan layanan rawat inap persalinan
		Peningkatan regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar
			Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin
			Meningkatkan sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang terakreditasi laik sehat
			Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi
			Meningkatkan tenaga penyehat tradisional yang terdaftar
			Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes
			Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil
			Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar
			Mengoptimalkan pelayanan sesuai standar bagi bayi yang baru lahir
			Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengoptimalkan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
			Meningkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
			Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR
			Mengoptimalkan cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)
			Meningkatkan rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan
			Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi kesehatan
			Meningkatkan institusi yang melaksanakan UKK
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	Mengoptimalkan pelayanan TB sesuai standar bagi penderita TB
			Mengoptimalkan layanan pemeriksaan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS
			Mengoptimalkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
			Meningkatkan cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>
			Meningkatkan penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar
			Mengoptimalkan cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
			Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit Jogja

<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>		
			Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan		
			Mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi ( <i>Integrated Health Information System</i> )		
		Pengendalian penduduk	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat		
			Meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)		
			Meningkatkan pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi		
		Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)		
			Meningkatkan kepesertaan KB		
			Meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan		
			Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi		
			Meningkatkan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, Bina keluarga lansia		
		Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi
					Meningkatkan pelestarian Tata Nilai Budaya
Meningkatkan pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman					
Mengoptimalkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya					
Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan sejarah				
	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra				
	Optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi		Meningkatkan kampanye sadar budaya		
			Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Seni dan Film		

<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Adat dan Tradisi
			Mengoptimalkan pembentukan rintisan kelurahan budaya

<b>Misi 5: Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan</b>					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>		
Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang	Meningkatkan ketentuan teknis implementasi peraturan tata ruang		
			Meningkatkan pemahaman peraturan tata ruang		
			Meningkatkan pelaksanaan ketentuan peraturan tata ruang		
		Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang	Meningkatkan basis data tata ruang		
			Optimalisasi pengelolaan pertanahan	Meningkatkan kepemilikan tanah pemerintah	
				Meningkatkan ketertiban dokumen administrasi pertanahan	
		Meningkatkan basis data pertanahan			
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan
					Meningkatkan konservasi air tanah
Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan					
Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah				
	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan				
	Meningkatkan pantauan pada perusahaan dalam menaati dokumen lingkungan				
Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara				
	Meningkatkan pembangunan RTH Publik				
	Meningkatkan pengelolaan RTH publik				
					Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan



<b>Misi 6: Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan	
			Meningkatkan kualitas penerangan jalan umum	
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Meningkatkan pembangunan saluran pengairan/penyediaan bangunan talud	
			Meningkatkan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud	
			Mengoptimalkan penataan kawasan sungai	
		Penambahan pembangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	
		Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
				Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
				Meningkatkan pengelolaan Rusunawa
				Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
				Mengoptimalkan pengelolaan air minum
				Mengoptimalkan pengelolaan pemakaman
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah	Meningkatkan volume sampah yang didaur ulang
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
				Meningkatkan kebersihan jalan
				Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas
		Peningkatan pengelolaan lalu lintas	Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				Meningkatkan pembinaan juru parkir, petugas parkir dan pedagang TKP
		Peningkatan pengelolaan perpajakan		

<b>Misi 6: Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			Meningkatkan sarana dan prasarana perparkiran
			Mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran
			Meningkatkan penertiban parkir liar
		Peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor
			Meningkatkan kualitas sarana transportasi publik.
			Mengoptimalkan pembinaan alat transportasi tradisional
			Meningkatkan edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar dan masyarakat
			Meningkatkan Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional
		Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam	Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
			Meningkatkan kampung tangguh bencana
			Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana
			Meningkatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana
		Peningkatan pencegahan kebakaran	Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran
			Meningkatkan pengelolaan hidrant kering
			Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran
		Peningkatan penanggulangan kebakaran	Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran
			Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
			Meningkatkan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran

<b>Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Meningkatkan pengamanan batas wilayah kota
			Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan
			Meningkatkan Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji
			Meningkatkan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan
			Meningkatkan Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan
		Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan
			Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD
			Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
			Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
			Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum
			Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
		Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			Meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah
			Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD
	Membentuk BPR syariah		
	Mengoptimalkan peran XT square terhadap pemberdayaan UMKM		
	Meningkatkan kualitas kerjasama daerah		

<b>Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan
			Meningkatkan pengendalian Kontrak Kritis
			Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
		Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa
			Meningkatkan pengelolaan proses pelelangan
			Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan
			Meningkatkan penyelesaian permasalahan pengadaan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur
			Meningkatkan kualitas Pematapan Ketatalaksanaan
			Meningkatkan pembinaan pelayanan publik
			Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik perangkat daerah
			Meningkatkan pematapan kelembagaan perangkat daerah
			Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN
		Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Meningkatkan kualitas pelayanan kerumahtanggaan
			Meningkatkan kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
			Meningkatkan kualitas Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta
		Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta

<b>Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang fisik	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang fisik
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang fisik
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang sosial	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang sosial
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang sosial
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
		Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
			Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
			Mengoptimalkan pengendalian anggaran
		Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
			Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
			Meningkatkan pengelolaan dana transfer
		Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
Meningkatkan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			

<b>Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah
			Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
			Optimalisasi Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
		Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
			Mengoptimalkan penerapan sistem e-tax
			Meningkatkan pelayanan pajak daerah
		Pengoptimalan pembukuan & penagihan pajak daerah	Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah
			Meningkatkan pembinaan wajib pajak daerah
			Meningkatkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur	Optimalisasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur
			Meningkatkan pembinaan kepatuhan aparatur
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset	Optimalisasi pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset
			Meningkatkan kualitas Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan fisik	Optimalisasi pengawasan bidang pembangunan fisik
			Meningkatkan kualitas Review Pengadaan Barang dan Jasa
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang sosial ekonomi budaya	Optimalisasi pengawasan bidang sosial ekonomi budaya
Meningkatkan kualitas Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja			
Peningkatan dan evaluasi pengawasan	Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal		
	Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)		

<b>Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan pengembangan karir aparatur sipil negara	Optimalisasi penyediaan data formasi pegawai
			Meningkatkan pengelolaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN)
			Meningkatkan pengembangan karier ASN melalui talent pool
			Optimalisasi pengisian formasi jabatan ASN
			Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian
		Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatkan pengelolaan mutasi data kepegawaian
			Meningkatkan pembinaan jabatan fungsional
			Meningkatkan pembinaan ASN
			Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan ASN
			Optimalisasi penatausahaan kepegawaian
		Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	Optimalisasi analisa kebutuhan diklat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
			Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk
			Meningkatkan Pelaksanaan Mobile KTP EL untuk lansia dan keterbatasan fisik
			Meningkatkan pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
		Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
			Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Kewarganegaraan

<b>Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Meningkatkan kerjasama administrasi kependudukan
			Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Kependudukan
			Meningkatkan kapasitas SDM Teknologi informasi dan komunikasi
		Peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan	Meningkatkan pengelolaan arsip
			Meningkatkan sarana prasarana kearsipan
			Meningkatkan kapasitas pengelola arsip
		Peningkatan perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip	Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
			Meningkatkan edukasi kearsipan bagi masyarakat
			Meningkatkan pengelolaan Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
		Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
			Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
		Peningkatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD
			Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat
		Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
			Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
			Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik



<b>Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Peningkatan komunikasi publik	Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
			Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
		Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
			Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
			Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
			Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
		Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
			Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Tabel 6.2.1  
Program Pembangunan  
MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Program Perangkat Daerah						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta</b>	<b>Indeks Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>76,81</b>					<b>78,39</b>							
<b>Sasaran: Kemiskinan masyarakat menurun</b>	<b>Angka kemiskinan</b>	<b>7,7</b>	<b>7,58</b>	<b>7,35</b>	<b>7,34</b>	<b>7,29</b>	<b>7,1</b>							
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	80%	80%	80%	80%	85%	85%	3.677.041.994	3.718.886.244	3.830.452.831	3.945.366.416	4.063.727.409	4.185.639.231	Dinas Sosial
Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	70%	70%	75%	75%	80%	80%	1.367.411.200	1.534.485.000	1.580.519.550	1.627.935.137	1.676.773.191	1.727.076.386	
Program data, informasi dan pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif	80%	80%	82%	82%	85%	85%	1.880.101.400	1.929.847.635	1.987.743.064	2.047.375.356	2.108.796.617	2.172.060.515	
<b>Sasaran: Keberdayaan masyarakat meningkat</b>	<b>Indeks keberdayaan masyarakat</b>	<b>55,41</b>	<b>55,93</b>	<b>56,53</b>	<b>57,13</b>	<b>57,74</b>	<b>58,34</b>							
Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1.423.299.240	816.250.990	840.738.520	865.960.675	891.939.496	918.697.680	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	47%	53%	59%	66%	72%	78%	1.236.413.034	1.255.747.730	1.293.420.162	1.332.222.767	1.372.189.450	1.413.355.133	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	24%	36%	47%	58%	69%	80%							
	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	74%	76%	78%	80%	82%	84%							
Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	31%	53%	66%	77,7%	88,8%	100%	1.480.408.748	1.709.686.045	1.760.976.626	1.813.805.925	1.868.220.103	1.924.266.706	
	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Puskesmas Ramah Anak	60%	70%	80%	85%	90%	100%							
	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	18,5%	35%	52%	68%	86%	100%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	Nilai survei kepuasan masyarakat	77	78	79	80	82	82	2.242.266.144	2.083.424.176	2.145.926.901	2.210.304.708	2.276.613.850	2.344.912.265	Kecamatan Danurejan
	Tingkat swadaya masyarakat	15%	16%	17%	18%	19%	20%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Nilai survei kepuasan masyarakat	70	71	72	73	74	75	1.426.710.840	1.285.706.160	1.324.277.345	1.364.005.665	1.404.925.835	1.447.073.610	Kecamatan Gedongtengen
	Tingkat swadaya masyarakat	20%	21%	22%	23%	24%	25%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis	Nilai survei kepuasan masyarakat	76,5	77	77,5	78	78,5	79	3.091.074.592	3.436.953.316	3.540.061.915	3.646.263.773	3.755.651.686	3.868.321.237	Kecamatan Gondokusuman

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Program Perangkat Daerah						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Tingkat swadaya masyarakat	10%	11%	12%	13%	14%	15%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Nilai survei kepuasan masyarakat	87	87,02	87,04	87,07	87,09	88	1.483.504.754	1.343.710.988	1.384.022.318	1.425.542.987	1.468.309.277	1.512.358.555	Kecamatan Gondomanan
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	11%	12%	13%	14%	15%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	2.224.541.638	2.194.436.950	2.260.270.059	2.328.078.160	2.397.920.505	2.469.858.120	Kecamatan Jetis
	Tingkat swadaya masyarakat	15,00%	17,00%	19,00%	21,00%	23,00%	25,00%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede	Nilai survei kepuasan masyarakat	88,31	88,70	89,00	89,40	89,90	90,50	2.220.361.412	2.435.920.722	2.508.998.344	2.584.268.294	2.661.796.343	2.741.650.233	Kecamatan Kotagede
	Tingkat swadaya masyarakat	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton	Nilai survei kepuasan masyarakat	75,19	75,69	76,19	76,69	77,19	77,69	2.120.628.450	2.184.247.304	2.249.774.723	2.317.267.964	2.386.786.003	2.501.385.535	Kecamatan Kraton
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%	12%	12%	14%	15%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mantriweron	Nilai survei kepuasan masyarakat	83,37	83,67	83,97	84,27	84,57	84,87	2.305.653.508	2.546.070.525	2.622.452.641	2.701.126.220	2.782.160.007	2.865.624.807	Kecamatan Mantriweron
	Tingkat swadaya masyarakat	41,07%	41,57%	42,07%	42,57%	43,07%	43,57%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai survei kepuasan masyarakat	70	71	71	73	74	75	2.194.360.664	2.375.739.598	2.447.011.786	2.520.422.140	2.596.034.804	2.673.915.848	Kecamatan Mergangsan
	Tingkat swadaya masyarakat	20%	21%	22%	23%	24%	25%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,11	82,25	83,20	83,80	84,15	85,00	1.434.913.385	1.334.422.868	1.374.455.554	1.415.689.221	1.458.159.897	1.501.904.694	Kecamatan Ngampilan
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%	11%	11%	12%	12%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Nilai survei kepuasan masyarakat	79,66	79,86	80,06	80,26	80,46	80,66	1.127.819.298	1.170.638.275	1.205.757.423	1.241.930.146	1.279.188.050	1.317.563.692	Kecamatan Pakualaman
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	11%	12%	13%	14%	15%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Nilai survei kepuasan masyarakat	75	76	77	78	79	80	2.965.592.078	3.095.249.390	3.188.106.872	3.283.750.078	3.382.262.580	3.483.730.458	Kecamatan Tegalrejo
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	11%	12%	13%	14%	15%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Nilai survei kepuasan masyarakat	80	80,25	80,5	81	81,5	82	4.277.356.188	4.870.298.401	5.016.407.353	5.166.899.574	5.321.906.561	5.481.563.758	Kecamatan Umbulharjo
	Tingkat swadaya masyarakat	5%	7%	9%	11%	13%	15%							
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,5	82,6	82,7	82,8	82,9	83,0	2.449.655.344	2.515.990.622	2.591.470.341	2.669.214.451	2.749.290.884	2.831.769.611	Kecamatan Wirobrajan
	Tingkat swadaya masyarakat	11%	12%	13%	14%	15%	16%							

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Program Perangkat Daerah						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Sasaran: Ketahanan pangan masyarakat meningkat</b>	<b>pola pangan harapan</b>	<b>85</b>	<b>85,2</b>	<b>85,4</b>	<b>85,6</b>	<b>85,8</b>	<b>86</b>							
Program pembinaan ketahanan pangan	Angka ketersediaan energi makanan	2.400 kkal/kapita/hari	2.450 kkal/kapita/hari	2.500 kkal/kapita/hari	2.500 kkal/kapita/hari	2.500 kkal/kapita/hari	2.500 kkal/kapita/hari	937.402.480	662.590.920	682.468.648	702.942.707	724.030.988	745.751.918	Dinas Pertanian & Pangan
Program pembinaan kehewan dan perikanan	Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.326.496.801	1.351.670.550	1.392.220.667	1.433.987.286	1.477.006.905	1.521.317.112	
	Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	40	35	30	25	20	15							
	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	10%	8%	6%	4%	2%	0%							
Program pembinaan pertanian	Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian	25%	24%	23%	22%	21%	20%	696.305.700	1.353.870.480	1.394.486.594	1.436.321.192	1.479.410.828	1.523.793.153	

Tabel 6.2.2  
Program Pembangunan  
MISI 2: Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Program Perangkat Daerah						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Tujuan:</b> Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,42					0,39							
<b>Sasaran:</b> Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,42	0,41	0,4	0,397	0,395	0,39							
Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	60,74%	62,50%	64,15%	66,50%	68,00%	70,00%	3.968.932.400	4.118.288.650	4.241.837.310	4.369.092.429	4.500.165.202	4.635.170.158	Dinas Koperasi, UKM & Nakertrans
	Persentase penempatan transmigran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	32,65%	34,46%	36,24%	38,06%	39,74%	41,45%	883.930.950	722.468.325	744.142.375	766.466.646	789.460.645	813.144.465	
	Persentase peningkatan upah minimum kota	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%							
Program peningkatan kualitas koperasi	Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina	4,70%	4,75%	4,80%	4,80%	4,85%	4,90%	959.857.200	752.924.400	775.512.132	798.777.496	822.740.821	847.423.045	
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	Persentase peningkatan omset UKM yang dibina	5%	5%	5%	5%	5%	5%	2.428.656.215	2.281.002.000	2.349.432.060	2.419.915.022	2.492.512.472	2.567.287.847	
<b>Tujuan:</b> Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	PDRB Perkapita	58.533.946,64					70.643.023,38							
	Inflasi	2,29%					2,29%							
<b>Sasaran:</b> Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,13%	5,16%	5,19%	5,20%	5,21%	5,23%							
Program pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	10,0%	13,3%	16,7%	20,0%	23,3%	26,7%	8.852.561.161	9.763.022.049	10.055.912.710	10.357.590.092	10.668.317.795	10.988.367.328	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Program penataan, pengembangan dan pendapatan pasar	Pendapatan retribusi pasar	15.335.808.505	15.535.808.505	15.585.808.505	15.635.808.505	15.685.808.505	15.735.808.505	7.386.073.747	6.065.881.913	6.247.858.370	6.435.294.122	6.628.352.945	6.827.203.534	
Program pengembangan pusat bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	4.625.112.300	4.914.315.650	4.915.003.150	4.920.993.775	4.955.332.491	4.965.244.655	9.307.778.510	5.845.093.501	6.020.446.306	6.201.059.695	6.387.091.486	6.578.704.231	
Program pembinaan dan pengendalian perdagangan	Persentase peningkatan Omset UKM yang dibina	2,00%	4,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	3.749.150.190	3.116.088.510	3.209.571.165	3.305.858.300	3.405.034.049	3.507.185.071	
	Persentase titik lokasi PKL yang tertata	2,68%	6,00%	9,39%	12,75%	16,10%	19,46%							
Program pembinaan perindustrian	Persentase peningkatan omset IKM yang dibina	5%	6%	8%	8%	9%	9%	4.297.197.700	3.698.411.950	3.809.364.309	3.923.645.238	4.041.354.595	4.162.595.233	
Program pengembangan industri logam	Pendapatan UPT Logam	490.027.216	1.088.068.000	1.155.750.000	1.532.000.000	1.702.500.000	2.010.150.000	7.660.288.716	3.058.499.800	3.150.254.794	3.244.762.438	3.342.105.311	3.442.368.470	
Program pengembangan dan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	3.646.519	3.828.845	10.257.698.294	8.327.120.767	8.576.934.390	8.834.242.422	9.099.269.695	9.372.247.785	Dinas Pariwisata
Program pengembangan Taman Pintar	Jumah Pengunjung Taman Pintar	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000	900.000	16.711.464.736	14.500.000.000	14.935.000.000	15.383.050.000	15.844.541.500	16.319.877.745	
Program peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata	80,00	81,59	83,18	84,77	86,36	87,95	3.474.449.150	2.188.489.040	2.254.143.711	2.321.768.023	2.391.421.063	2.463.163.695	

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Program Perangkat Daerah						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Sasaran: Investasi di Kota Yogyakarta meningkat</b>	<b>Persentase peningkatan nilai investasi</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,90%</b>	<b>2,10%</b>							
Program pelayanan penanaman modal dan perizinan	persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	30%	35%	40%	45%	50%	55%	2.590.634.515	337.572.265	347.699.433	358.130.416	368.874.328	379.940.558	Dinas Penanaman Modal & Perizinan
Program pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	Persentase kesesuaian antara pelaksanaan izin terhadap izin yang diawasi	60%	60%	60%	60%	60%	60%	495.590.000	56.474.000	58.168.220	59.913.267	61.710.665	63.561.985	
Program penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan	Persentase regulasi pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	611.863.750	280.040.000	288.441.200	297.094.436	306.007.269	315.187.487	
Program pengembangan penanaman modal	Persentase realisasi investasi	8,75%	9,00%	11,00%	13,00%	15,00%	17,00%	888.390.850	562.305.000	579.174.150	596.549.375	614.445.856	632.879.231	

Tabel 6.2.3  
Program Pembangunan  
MISI 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Program						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Tujuan: Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Angka Kriminalitas	1.660					1.500							
	Jumlah pelanggaran Perda	6.000					5.000							
Sasaran: Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	1.660	1.628	1.596	1.564	1.532	1.500							
	Jumlah pelanggaran Perda	6.000	5.800	5.600	5.400	5.200	5.000							
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	79%	79%	80%	82%	84%	85%	697.344.664	1.305.170.277	1.344.325.385	1.384.655.147	1.426.194.801	1.468.980.645	Kantor Kesbang
Program pengembangan kepemudaan	Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	64%	69%	77%	85%	92%	100%	1.697.474.659	1.922.844.332	1.980.529.662	2.039.945.552	2.101.143.918	2.164.178.236	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program pengembangan olahraga	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	76%	88%	90%	93%	97%	98%	2.560.442.959	3.815.287.504	3.929.746.129	4.047.638.512	4.169.067.668	4.294.139.698	
Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60%	70%	75%	85%	95%	100%	5.430.352.000	2.620.811.000	2.699.435.330	2.780.418.390	2.863.830.942	2.949.745.870	Satpol PP
Program perlindungan masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	57,60%	59,10%	60,60%	62,50%	64,00%	65,50%	2.826.870.496	3.149.089.674	3.243.562.364	3.340.869.235	3.441.095.312	3.544.328.172	
Program Penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban,	80%	85%	90%	95%	98%	100%	3.001.622.416	4.029.311.193	4.150.190.529	4.274.696.245	4.402.937.132	4.535.025.246	
Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	60%	69%	78%	86%	95%	100%	452.464.332	475.980.236	490.259.643	504.967.432	520.116.455	535.719.949	

Tabel 6.3.4  
Program Pembangunan  
Misi 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Tujuan:</b> Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks pembangunan manusia	84,56					85							
	Angka Rata-rata lama sekolah	11,42 th	11,43 th	11,43 th	11,44 th	11,44 th	11,45 th							
<b>Sasaran:</b> Kualitas pendidikan meningkat	Angka harapan lama sekolah	16,89 th	16,95 th	17,01 th	17,22 th	17,28 th	17,33 th							
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	82%	83%	84%	85%	86%	86%	25.658.840.779	25.717.389.600	26.428.606.002	27.283.578.627	28.102.085.985	28.945.148.565	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional	6 medali	6 medali	7 medali	7 medali	8 medali	8 medali							
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A	74%	74%	74,5%	74,5%	75%	75%	22.570.367.638	22.678.994.250	23.359.364.078	24.060.145.000	24.781.949.350	25.525.407.830	
	Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional	3 medali	4 medali	4 medali	5 medali	5 medali	6 medali							
Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	70%	70,5%	71,0%	71,5%	72,0%	72,5%	4.925.601.954	5.399.835.338	5.561.830.398	5.728.685.310	5.900.545.869	6.077.562.246	
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	71%	71,5%	72,0%	72,5%	73,0%	73,5%							
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	72%	72,5%	73,0%	73,5%	74,0%	74,5%							
	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	20 lbg	25 lbg	30 lbg	35 lbg	40 lbg	45 lbg							
	Jumlah LKP terakreditasi	5 lbg	8 lbg	11 lbg	12 lbg	13 lbg	14 lbg							
Program pengembangan pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	92,37%	92,47%	92,57%	92,67%	92,77%	92,87%	90.335.764.600	93.174.652.748	95.969.892.330	98.848.989.100	101.814.458.773	104.868.892.536	
	Jumlah sekolah inklusi	41 Sekolah	44 Sekolah	47 Sekolah	50 Sekolah	53 Sekolah	56 Sekolah							
Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	50	100	150	200	250	300	1.239.832.485	1.282.561.729	1.321.038.581	1.360.669.738	1.401.489.830	1.443.534.525	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	75	75,5	76	76,5	77	77,5							
Program pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1000	1000	1000	1000	1000	1000	96.779.000	247.238.000	254.655.140	262.294.794	270.163.638	278.268.547	
<b>Sasaran:</b> Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,30 th	74,32th	74,34th	74,36th	74,38th	74,4th							
Program pelayanan kesehatan dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	77	78	79	80	80,5	81	44.977.616.015	42.437.902.806	43.711.039.890	45.022.371.087	46.373.042.219	47.764.233.486	Dinas Kesehatan
Program pelayanan kesehatan rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	65	70	71	72,5	75	77	28.227.037.801	28.723.404.270	29.585.106.398	30.472.659.590	31.386.839.378	32.328.444.559	
Program upaya pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21.407.884.196	35.667.151.251	36.737.165.789	37.839.280.762	38.974.459.185	40.143.692.961	
	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	88%	94%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi	95%	95%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	57,14%	66,67%	76,19%	85,71%	95,24%	100,00%							



Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	91%	92%	93%	94%	95%	96%							
	Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	80%	82%	84%	86%	88%	90%	10.703.668.095	11.811.801.960	12.166.156.019	12.531.140.699	12.907.074.920	13.294.287.168	
	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	70%	75%	80%	85%	90%	90%							
	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	55%	65%	75%	85%	96%	96%							
	Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	80%	85%	90%	93%	95%	96%							
	Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	60%	65%	70%	75%	80%	80%							
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	95%	96%	97%	98%	98%	98							
	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	85%	90%	90%	90%	90%	90							
Program peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.416.454.806	4.134.617.345	4.258.655.865	4.386.415.541	4.518.008.008	4.653.548.248	
	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	364	384	404	424	444	464							
	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	22%	33%	44,4%	55,0%	66,0%	77,0%							
	Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85,00%	85,20%	85,50%	85,70%	86,00%	86,20%							
	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	85,2%	85,4%	85,6%	85,8%	86,00%	86,20%							

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	60%	70%	80%	87%	94%	100%							
Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.810.585.351	3.419.428.870	3.522.011.736	3.627.672.088	3.736.502.251	3.848.597.318	
	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Program pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;	25%	35%	40%	45%	50%							60%
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi ( <i>Integrated Health System</i> )		16	18	20	22	24	26							

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Program pengendalian penduduk	CBR (Crude Birth Ratio)	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	1.489.452.000	1.544.366.800	1.590.697.804	1.638.418.738	1.687.571.300	1.738.198.439	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,66%	73,72%	73,77%	73,83%	73,94%	74,00%	2.684.983.294	2.156.098.150	2.220.781.095	2.287.404.527	2.356.026.663	2.426.707.463	
	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,40%	11,34%	11,28%	11,22%	11,16%	11,10%							
	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	27,15%	28,28%	29,70%	31,12%	32,54%	33,96%							
<b>Tujuan: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya</b>	<b>Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat</b>	44%					72%							
<b>Sasaran: Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat</b>	<b>Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif</b>	44%	50%	56%	61%	67%	72%							
Program pelestarian warisan dan nilai budaya	Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi	70%	75%	78%	81%	84%	87%	1.000.185.965	755.482.080	778.146.542	801.490.939	825.535.667	850.301.737	Dinas Kebudayaan
Program pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan :	3 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	15 dokumen	18 dokumen	468.075.500	417.812.960	430.347.349	443.257.769	456.555.502	470.252.167	
Program pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi	Persentase rintisan kelurahan budaya	40%	42%	44%	47%	49%	51%	731.607.950	1.055.476.000	1.087.140.280	1.119.754.488	1.153.347.123	1.187.947.537	

Tabel 6.2.5  
Program Pembangunan  
MISI 5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Tujuan: Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	63,55%					82,50%							
Sasaran: Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	63,55%	68,60%	73,40%	76,70%	79,60%	82,50%							
Program pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	52,30%	61,40%	72,00%	79,40%	86,50%	88,48%	957.496.916	1.702.576.826	1.753.654.131	1.806.263.755	1.860.451.667	1.916.265.217	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Pengendalian tata ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	43,50%	50,25%	56,50%	61,75%	68,00%	75,45%	578.020.416	1.001.031.810	1.031.062.764	1.061.994.647	1.093.854.487	1.126.670.121	
Program pengelolaan pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.	29,40%	36,70%	44,00%	51,30%	58,59%	65,89%	34.155.168.712	17.014.161.015	17.524.585.845	18.050.323.421	18.591.833.123	19.149.588.117	
	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	31,38%	31,92%	32,47%	33,02%	33,56%	34,11%							
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	50,64					51,64							
Sasaran: kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,64	50,84	51,04	51,24	51,44	51,64							
Program penataan dan pengendalian dampak lingkungan	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	49,23%	53,55%	60,63%	67,50%	74,15%	80,61%	1.758.204.230	1.607.277.400	1.655.495.722	1.705.160.594	1.756.315.411	1.809.004.874	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5,65%	7,98%	10,08%	11,98%	13,70%	15,28%							
Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Persentase sekolah berwawasan lingkungan.	78,88%	84,16%	88,20%	92,24%	96,27%	100,00%	2.475.084.560	1.781.678.700	1.835.129.061	1.890.182.933	1.946.888.421	2.005.295.073	
	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.	23,62%	27,58%	31,36%	34,98%	38,45%	41,77%							
	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	11,11%	15,56%	20,00%	24,44%	28,89%	33,33%							
Program pengelolaan ruang terbuka hijau publik	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	41,58%	41,92%	42,25%	42,57%	42,90%	43,22%	7.346.910.636	7.323.848.551	7.543.564.008	7.769.870.928	8.002.967.056	8.243.056.067	
	Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	66,31	67,81	69,31	70,81	72,31	73,81							

Tabel 6.2.6  
Program Pembangunan  
MISI 6: Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Tujuan:</b> Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>	<b>39,32</b>					<b>44,41</b>							
<b>Sasaran:</b> Infrastruktur wilayah meningkat	<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>	<b>39,32</b>	<b>40,29</b>	<b>41,29</b>	<b>42,34</b>	<b>43,36</b>	<b>44,41</b>							
Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	82%	84%	86%	88%	90%	92%	65.795.425.134	44.081.670.685	45.404.120.806	46.766.244.430	48.169.231.763	49.614.308.715	Dinas PUPKP
	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	21%	30%	40%	50%	60%	70%							
Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	73%	73,50%	74%	74,50%	75%	75,50%	37.022.404.586	36.866.264.370	37.972.252.301	39.111.419.870	40.284.762.466	41.493.305.340	
	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	90,73%	91,29%	91,85%	92,42%	92,98%	93,54%							
Program pembangunan gedung pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	86%	87%	88%	89%	90%	91%	37.669.331.247	22.665.575.000	23.345.542.250	24.045.908.518	24.767.285.773	25.510.304.346	
Program penataan perumahan permukiman dan tata bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	91,8%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%	13.219.790.300	13.824.166.148	14.238.891.132	14.666.057.866	15.106.039.602	15.559.220.790	
	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	83,22%	84%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%							
Program pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18.956.983.770	16.837.875.660	17.343.011.930	17.863.302.288	18.399.201.356	18.951.177.397	DLH
	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	68,61	70,11	71,61	73,11	74,61	76,11							
Program pengelolaan lalu lintas	Kinerja lalu lintas jalan kota (V/C Rasio)	0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798	4.737.095.250	4.378.075.489	4.509.417.753	4.644.700.286	4.784.041.294	4.927.562.533	Dinas Perhubungan
	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	20 km/jam	21 km/jam	22 km/jam	23 km/jam	24 km/jam	25 km/jam							
Program pengelolaan parkir	Indeks ketertiban penyelenggaraan parkir	78%	81%	84%	87%	89%	91%	7.599.991.500	7.350.066.000	7.570.567.980	7.797.685.019	8.031.615.570	8.272.564.037	
Program angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas	Persentase kendaraan umum yang berizin	78%	80%	82%	84%	86%	88%	1.867.279.233	2.095.701.069	2.158.572.101	2.223.329.264	2.290.029.142	2.358.730.016	
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kampung tangguh bencana	40%	44%	49%	53%	58%	62%	2.557.247.634	2.435.238.550	2.508.295.707	2.583.544.578	2.661.050.915	2.740.882.442	BPBD

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	75%	77%	79%	81%	83%	85%							
	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	80%	82%	84%	86%	88%	90%							
Program pencegahan kebakaran	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%	100%	1.846.140.000	868.170.701	894.215.822	921.042.297	948.673.566	977.133.773	Dinas Kebakaran
	Persentase edukasi proteksi kebakaran	95%	96%	96%	97%	97%	98%							
Program penanggulangan kebakaran	Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.709.545.000	854.428.000	880.060.840	906.462.665	933.656.545	961.666.242	

Tabel 6.2.7  
Program Pembangunan  
MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Tujuan:</b> Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	69,85					72							
<b>Sasaran:</b> Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	BB	BB	BB	A							
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	75%	77%	79%	81%	83%	85%	2.098.430.683	3.355.122.841	3.455.776.526	3.559.449.822	3.666.233.317	3.776.220.316	Sekretariat Daerah
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang							
Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.028.474.850	1.471.532.004	1.515.677.964	1.561.148.303	1.607.982.752	1.656.222.234	
Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Rp545 milyar	Rp547 milyar	Rp559 milyar	Rp571 milyar	Rp583 milyar	Rp595 milyar	1.307.360.415	681.645.793	702.095.167	723.158.022	744.852.762	767.198.345	
Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93,0%	93,5%	94,0%	94,5%	95,0%	95,5%	902.900.434	636.147.456	655.231.880	674.888.836	695.135.501	715.989.566	
Program pelayanan pengadaan barang/jasa	persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	70,0%	72,5%	75,0%	77,5%	80,0%	82,5%	1.660.847.064	732.645.185	754.624.541	777.263.277	800.581.175	824.598.610	
	persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	70,0%	72,5%	75,0%	77,5%	80,0%	82,5%							
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	60%	70%	80%	90%	95%	100%	3.948.688.916	1.847.483.192	1.902.907.688	1.959.994.918	2.018.794.766	2.079.358.609	
Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0	80,5	2.768.716.377	2.673.413.507	2.753.615.912	2.836.224.390	2.921.311.121	3.008.950.455	
Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80	80,25	80,45	80,65	80,75	81	1.732.840.446	1.728.433.859	1.780.286.875	1.833.695.481	1.888.706.345	1.945.367.536	
Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91,00%	91,20%	91,40%	91,60%	91,80%	92,00%	407.102.850	519.594.700	535.182.541	551.238.017	567.775.158	584.808.412	Bappeda
Program perencanaan dan pengendalian bidang fisik	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91%	91,20%	91,40%	91,60%	91,80%	92,00%	1.992.811.146	903.437.300	930.540.419	958.456.632	987.210.331	1.016.826.640	

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Program perencanaan dan pengendalian bidang sosial	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91%	91,20%	91,40%	91,60%	91,80%	92,00%	1.676.892.608	739.267.700	761.445.731	784.289.103	807.817.776	832.052.309	
Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat	91%	91,20%	91,40%	91,60%	91,80%	92,00%	3.494.806.150	2.243.583.800	2.310.891.314	2.380.218.053	2.451.624.595	2.525.173.333	
Program penelitian dan pengembangan	Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	80	82	84	86	88	90	1.278.548.850	1.791.047.000	1.844.778.410	1.900.121.762	1.957.125.415	2.015.839.178	
Program perencanaan dan pengendalian anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	363.465.765	181.059.200	186.490.976	192.085.705	197.848.276	203.783.725	BPKAD
Program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	Persentase penyerapan belanja daerah	92,49%	92,50%	92,60%	92,70%	92,80%	92,90%	586.023.406	107.919.417	111.157.000	114.491.709	117.926.461	121.464.255	
Program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	75,00%	77,27%	79,54%	81,81%	84,08%	86,35%	1.197.115.406	550.800.817	567.324.842	584.344.587	601.874.924	619.931.172	
Program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	90%	92%	94%	96%	98%	100%	17.806.011.990	4.961.313.499	5.110.152.904	5.263.457.491	5.421.361.216	5.584.002.052	
Program pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	1.934.471.170	819.518.620	844.104.179	869.427.304	895.510.123	922.375.427	
Program pembukuan & penagihan pajak daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	13,97%	14,00%	14,50%	15,00%	15,50%	16,00%	3.679.647.000	2.314.271.955	2.383.700.114	2.455.211.117	2.528.867.451	2.604.733.474	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	80%	83%	85%	87%	89%	91%	837.218.500	247.833.550	255.268.557	262.926.613	270.814.412	278.938.844	Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	80%	83%	85%	87%	89%	91%	562.100.000	62.984.000	64.873.520	66.819.726	68.824.317	70.889.047	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik	80%	83%	85%	87%	89%	91%	291.210.000	52.119.000	53.682.570	55.293.047	56.951.839	58.660.394	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	80%	83%	85%	87%	89%	91%	456.740.000	64.641.200	66.580.436	68.577.849	70.635.185	72.754.240	
Program peningkatan dan evaluasi pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	-	83%	85%	87%	89%	91%	0	92.809.163	95.593.438	98.461.241	101.415.078	104.457.531	
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 2 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 3 elemen penilaian)	level 3 (untuk 4 elemen penilaian)	level 3 (untuk 5 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)							



Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Program pengembangan karir aparatur sipil negara	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	70%	71%	72%	73%	74%	75%	1.303.875.500	1.346.442.800	1.386.836.084	1.428.441.167	1.471.294.402	1.515.433.234	BKPP
Program pelayanan administrasi kepegawaian	persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	91%	92%	93%	94%	95%	95%	1.125.283.500	474.934.625	489.182.664	503.858.144	518.973.888	534.543.105	
Program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75%	76%	77%	78%	79%	80%	4.027.064.450	3.769.457.350	3.882.541.071	3.999.017.303	4.118.987.822	4.242.557.456	
Program pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,50%	99,75%	99,75%	99,75%	99,75%	99,75%	1.393.899.570	411.914.640	424.272.079	437.000.242	450.110.249	463.613.556	Dinas Dukcapil
Program pelayanan pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	80,00%	83,75%	87,50%	91,25%	95,00%	98,75%	891.166.310	418.924.570	431.492.307	444.437.076	457.770.189	471.503.294	
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	1.277.109.890	881.568.305	908.015.354	935.255.815	963.313.489	992.212.894	
Program pengelolaan pengembangan kearsipan	jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	26 perangkat daerah /unit kerja	52 perangkat daerah /unit kerja	78 perangkat daerah /unit kerja	114 perangkat daerah /unit kerja	140 perangkat daerah /unit kerja	152 perangkat daerah /unit kerja	446.051.000	293.216.887	302.013.394	311.073.795	320.406.009	330.018.190	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
Program perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	200	360	520	680	840	1000	415.946.606	360.582.687	371.400.168	382.542.173	394.018.438	405.838.991	
Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	24.405.971.000	25.138.150.130	25.892.294.634	26.669.063.473	27.469.135.377	Sekretariat DPRD
Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	19.323.970.000	19.903.689.100	20.500.799.773	21.115.823.766	21.749.298.479	
Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleran DPRD		100%						1.589.107.000						
Program Penguatan Kapasitas DPRD		100%						33.958.247.500						
Program pengelolaan informasi dan statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.722.743.714	1.536.852.505	1.582.958.080	1.630.446.823	1.679.360.227	1.729.741.034	Dinas Kominfo & Persandian

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target						Pembiayaan (Rp)						Perangkat Daerah Utama
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Program peningkatan komunikasi publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	94,00%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	97,00%	1.327.447.242	1.168.344.025	1.203.394.346	1.239.496.176	1.276.681.061	1.314.981.493	
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	19,93%	30,43%	40,93%	51,43%	61,93%	71,80%	13.044.563.264	12.527.410.573	12.903.232.890	13.290.329.877	13.689.039.773	14.099.710.966	
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	57,32%	63,69%	69,43%	75,16%	80,89%	86,62%							
Program peningkatan pelayanan persandian	Persentase pengamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	844.854.450	1.007.644.600	1.037.873.938	1.069.010.156	1.101.080.461	1.134.112.875	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	19%	28%	38%	48%	57%	76%							

## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1.1  
Urusan Wajib

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Pendidikan</b>																	
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	82%	82%	25.658.840.779	83%	25.717.389.600	84%	26.488.911.288	85%	27.283.578.627	86%	28.102.085.985	86%	28.945.148.565	86%	162.195.954.844	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional	6 medali	6 medali		6 medali		7 medali		7 medali		8 medali		8 medali		8 medali		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A	74%	74%	22.570.367.638	74%	22.678.994.250	74,5%	23.359.364.078	74,5%	24.060.145.000	75%	24.781.949.350	75%	25.525.407.830	75%	142.976.228.145	Dinas Pendidikan
	Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional	3 medali	3 medali		4 medali		4 medali		5 medali		5 medali		6 medali		6 medali		
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	70,00%	70,00%	4.925.601.954	70,50%	5.399.835.338	71,00%	5.561.830.398	71,50%	5.728.685.310	72,00%	5.900.545.869	72,50%	6.077.562.246	72,50%	33.594.061.115	Dinas Pendidikan
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	71,00%	71,00%		71,50%		72,00%		72,50%		73,00%		73,50%		73,50%		
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	72,00%	72,00%		72,50%		73,00%		73,50%		74,00%		74,50%		74,50%		
	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	20 lbg	20 lbg		25 lbg		30 lbg		35 lbg		40 lbg		45 lbg		45 lbg		
	Jumlah LKP terakreditasi	5 lbg	5 lbg		8 lbg		11 lbg		12 lbg		13 lbg		14 lbg		14 lbg		
Program Pengembangan Pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	92,37%	92,37%	90.335.764.600	92,47%	93.174.652.748	92,57%	95.969.892.330	92,67%	98.848.989.100	92,77%	101.814.458.773	92,87%	104.868.892.536	92,87%	585.012.650.086	Dinas Pendidikan
	Jumlah sekolah inklusi	41 Sekolah	41 Sekolah		44 Sekolah		47 Sekolah		50 Sekolah		53 Sekolah		56 Sekolah		56 Sekolah		
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	12.512.694.172	100%	13.697.335.554	100%	14.108.255.620	100%	14.531.503.289	100%	14.967.448.388	100%	15.416.471.839	100%	85.233.708.863	Dinas Pendidikan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Kesehatan</b>																	
Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	77	77	44.977.616.015	78	42.437.902.806	79	43.711.039.890	80	45.022.371.087	80,5	46.373.042.219	81	47.764.233.486	81,00	270.286.205.504	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	65	65	28.227.037.801	70	28.723.404.270	71	29.585.106.398	72,5	30.472.659.590	75	31.386.839.378	77	32.328.444.559	77,00	180.723.491.996	Dinas Kesehatan
Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	21.407.884.196	100%	35.667.151.251	100%	36.737.165.789	100%	37.839.280.762	100%	38.974.459.185	100%	40.143.692.961	100%	210.769.634.143	Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	88%	88%		94%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi	95%	95%			95%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	57,14%	57,14%			66,67%		76,19%		85,71%		95,24%		100,00%		100,00%		
	Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	91%	91%			92%		93%		94%		95%		96%		96%		
	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	80%	80%	10.703.668.095		82%	11.811.801.960	84%	12.166.156.019	86%	12.531.140.699	88%	12.907.074.920	90%	13.294.287.168	90%	73.414.128.861	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang berjin	70%	70%			75%		80%		85%		90%		90%		90%		
	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	55%	55%			65%		75%		85%		96%		96%		96%		
	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi	80%	80%			85%		90%		93%		95%		96%		96%		
	Persentase tenaga penyehat tradisional yang terdaftar	60%	60%			65%		70%		75%		80%		80%		80%		
	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	95%	95%			96%		97%		98%		98%		98%		98%		
	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	85%	85%			90%		90%		90%		90%		90%		90%		
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	100%	6.416.454.806		100%	4.134.617.345	100%	4.258.655.865	100%	4.386.415.541	100%	4.518.008.008	100%	4.653.548.248	100,00	28.367.699.813	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100,00		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100,00		
	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100,00		
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100,00		
	Jumlah wilayah yang melaksanakan KTR	364	384		404		424		444		464		464		444,00			
	Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)	22%	33%		44,4%		55,0%		66,0%		77,0%		77,0%		66,60			
	Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85,00%	85,20%		85,50%		85,70%		86,00%		86,20%		86,20%		86,00			
	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	85,2%	85,4%		85,6%		85,8%		86,00%		86,20%		86,20%		86,00			
	Persentase institusi yang melaksanakan UKK	60%	70%		80%		87%		94%		100%		100%		94,00			
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	1.810.585.351	100%	3.419.428.870	100%	3.522.011.736	100%	3.627.672.088	100%	3.736.502.251	100%	3.848.597.318	100%	19.964.797.614	Dinas Kesehatan	
	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	4.501.950.692	100%	4.381.711.819	100%	4.513.163.174	100%	4.648.558.069	100%	4.788.014.811	100%	4.931.655.255	100%	27.765.053.819	Dinas Kesehatan	
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;	25%	25%	122.954.080.800	35%	129.383.000.000	40%	133.264.490.000	45%	137.262.424.700	50%	141.380.297.441	60%	145.621.706.364	60%	809.865.999.305	Rumah Sakit Jogja	
	Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	76,69%	76,69%		78,00%		79,00%		80,00%		81,00%		82,00%		82,00%			
	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	16	16		18		20		22		24		26		26			
<b>URUSAN WAJIB</b>																		
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																		
Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	82%	82%	65.795.425.134	84%	44.081.670.685	86%	45.404.120.806	88%	46.766.244.430	90%	48.169.231.763	92%	49.614.308.715	92%	299.831.001.532	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	21%	21%		30%		40%		50%		60%		70%		70%			
Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	73%	73%	37.022.404.586	73,50%	36.866.264.370	74%	37.972.252.301	74,50%	39.111.419.870	75%	40.284.762.466	75,50%	41.493.305.340	75,50%	232.750.408.934	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	90,73%	90,73%		91,29%		91,85%		92,42%		92,98%		93,54%		93,54%			
Program pembangunan gedung pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	86%	87%	37.669.331.247	88%	22.665.575.000	89%	23.345.542.250	90%	24.045.908.518	91%	24.767.285.773	91%	25.510.304.346	91%	158.003.947.134	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	3.097.787.490	100%	2.882.192.320	100%	2.968.658.090	100%	3.057.717.832	100%	3.149.449.367	100%	3.243.932.848	100%	18.399.737.947	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	12%	12%	18.956.983.770	13%	16.837.875.660	14%	17.343.011.930	15%	17.863.302.288	16%	18.399.201.356	17%	18.951.177.397	17%	108.351.552.401	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	68,61	68,61		70,11		71,61		73,11		74,61		76,11		76,11		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	41,58%	41,58%	7.346.910.636	41,92%	7.323.848.551	42,25%	7.543.564.008	42,57%	7.769.870.928	42,90%	8.002.967.056	43,22%	8.243.056.067	43,22%	46.230.217.245	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	66,31	66,31		67,81		69,31		70,81		72,31		73,81		73,81		
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	52,30%	52,30%	957.496.916	61,40%	1.702.576.826	72,00%	1.753.654.131	79,40%	1.806.263.755	86,50%	1.860.451.667	88,48%	1.916.265.217	88,48%	9.996.708.512	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Pengendalian tata ruang	Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	43,50%	43,50%	578.020.416	50,25%	1.001.031.810	56,50%	1.031.062.764	61,75%	1.061.994.647	68,00%	1.093.854.487	75,45%	1.126.670.121	75,45%	5.892.634.245	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.044.485.860	100%	1.309.109.840	100%	1.348.383.135	100%	1.388.834.629	100%	1.430.499.668	100%	1.473.414.658	100%	7.994.727.791	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Ketahanan Pangan</b>																	
Program pembinaan ketahanan pangan	Angka ketersediaan energi makanan	2.400 kkal/kapita/hari	2.400 kkal/kapita/hari	937.402.480	2.450 kkal/kapita/hari	662.590.920	2.500 kkal/kapita/hari	682.468.648	2.500 kkal/kapita/hari	702.942.707	2.500 kkal/kapita/hari	724.030.988	2.500 kkal/kapita/hari	745.751.918	2.500 kkal/kapita/hari	4.455.187.661	Dinas Pertanian dan Pangan



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pertanian dan Pangan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.481.290.328	100%	2.258.447.606	100%	2.326.201.034	100%	2.395.987.065	100%	2.467.866.677	100%	2.541.902.677	100%	14.471.695.388	Dinas Pertanian dan Pangan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan</b>																	
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>																	
Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	91,8%	91,8%	13.219.790.300	93,0%	13.824.166.148	94,2%	14.238.891.132	95,5%	14.666.057.866	96,7%	15.106.039.602	98,0%	15.559.220.790	98,0%	86.614.165.840	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	83,22%	83,22%		84%		84,06%		85,09%		86,21%		87,62%		87,62%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan</b>																	
Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	80%	80%	3.001.622.416	85%	4.029.311.193	90%	4.150.190.529	95%	4.274.696.245	98%	4.402.937.132	100%	4.535.025.246	100%	24.393.782.760	Satpol PP
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentrangan Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentrangan masyarakat	60%	60%	5.430.352.000	70%	2.620.811.000	75%	2.699.435.330	85%	2.780.418.390	95%	2.863.830.942	100%	2.949.745.870	100%	19.344.593.531	Satpol PP
Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	60%	60%	452.464.332	69%	475.980.236	78%	490.259.643	86%	504.967.432	95%	520.116.455	100%	535.719.949	100%	2.979.508.048	Satpol PP
Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	57,60%	57,60%	2.826.870.496	59,10%	3.149.089.674	60,60%	3.243.562.364	62,50%	3.340.869.235	64,00%	3.441.095.312	65,50%	3.544.328.172	65,50%	19.545.815.253	Satpol PP
Program Internal Perangkat Daerah (Satpol PP)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	3.958.634.059	100%	4.828.977.419	100%	4.973.846.742	100%	5.123.062.144	100%	5.276.754.008	100%	5.435.056.628	100%	29.596.331.000	Satpol PP
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pencegahan Kebakaran	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	95%	95%	1.846.140.000	96%	868.170.701	97%	894.215.822	98%	921.042.297	99%	948.673.566	100%	977.133.773	100%	6.455.376.158	Dinas Kebakaran
	Persentase edukasi proteksi kebakaran	95%	95%		96%		96%		97%		97%		98%		98%		
Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%	100%	1.709.545.000	100%	854.428.000	100%	880.060.840	100%	906.462.665	100%	933.656.545	100%	961.666.242	100%	6.245.819.292	Dinas Kebakaran
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Kebakaran)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	3.278.929.441	100%	2.644.994.074	100%	2.724.343.896	100%	2.806.074.213	100%	2.890.256.439	100%	2.976.964.133	100,00	17.321.562.197	Dinas Kebakaran
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100,00				
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100,00				
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100,00				
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kampung tangguh bencana	40%	40%	2.557.247.634	44%	2.435.238.550	49%	2.508.295.707	53%	2.583.544.578	58%	2.661.050.915	62%	2.740.882.442	62%	15.486.259.826	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	75%	75%		77%		79%		81%		83%		85%		85%		
	Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	80%	80%		82%		84%		86%		88%		90%		90%		
Program Internal Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	905.156.225	100%	692.567.500	100%	713.344.525	100%	734.744.861	100%	756.787.207	100%	779.490.823	100%	4.582.091.140	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>URUSAN WAJIB</b>																			
<b>Sosial</b>																			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	80%	80%	3.677.041.994	80%	3.718.886.244	80%	3.830.452.831	80%	3.945.366.416	85%	4.063.727.409	85%	4.185.639.231	85%	23.421.114.125	Dinas Sosial		
Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	70%	70%	1.367.411.200	70%	1.534.485.000	75%	1.580.519.550	75%	1.627.935.137	80%	1.676.773.191	80%	1.727.076.386	80%	9.514.200.463	Dinas Sosial		
Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	80%	80%	1.880.101.400	80%	1.929.847.635	82%	1.987.743.064	82%	2.047.375.356	85%	2.108.796.617	85%	2.172.060.515	85%	12.125.924.587	Dinas Sosial		
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.037.541.150	100%	2.187.341.211	100%	2.252.961.447	100%	2.320.550.291	100%	2.390.166.799	100%	2.461.871.803	100%	13.650.432.702	Dinas Sosial		
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	100%
<b>URUSAN WAJIB</b>																			
<b>Tenaga Kerja</b>																			
Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	60,74%	60,74%	3.968.932.400	62,50%	4.118.288.650	64,15%	4.241.837.310	66,50%	4.369.092.429	68,00%	4.500.165.202	70,00%	4.635.170.158	70,00%	25.833.486.148	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		
	Persentase penempatan transmigran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	32,65%	32,65%	883.930.950	34,46%	722.468.325	36,24%	744.142.375	38,06%	766.466.646	39,74%	789.460.645	41,45%	813.144.465	41,45%	4.719.613.406	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		
	Persentase peningkatan upah minimum kota	5,00%	5,00%		5,50%		6,00%		6,50%		7,00%		7,50%		7,50%				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																	
Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	1%	1%	1.423.299.240	1%	816.250.990	1%	840.738.520	1%	865.960.675	1%	891.939.496	1%	918.697.680	1%	5.756.886.601	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	47%	47%	1.236.413.034	53%	1.255.747.730	59%	1.293.420.162	66%	1.332.222.767	72%	1.372.189.450	78%	1.413.355.133	78%	7.903.348.276	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	24%	24%		36%		47%		58%		69%		80%		80%		
	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	74%	74%		76%		78%		80%		82%		84%		84%		
Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	31%	31%	1.480.408.748	53%	1.709.686.045	66%	1.760.976.626	78%	1.813.805.925	89%	1.868.220.103	100%	1.924.266.706	100%	10.557.364.153	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Puskesmas Ramah Anak	60%	60%		70%		80%		85%		90%		100%		100%		
	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	18,5%	18,5%		35,0%		52%		68%		86%		100%		100%		
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	891.846.848	100%	994.397.355	100%	1.024.229.276	100%	1.054.956.154	100%	1.086.604.839	100%	1.119.202.984	100%	6.171.237.455	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Pertanahan</b>																	
Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.	29,40%	29,40%	34.155.168.712	36,70%	17.014.161.015	44,00%	17.524.585.845	51,30%	18.050.323.421	58,59%	18.591.833.123	65,89%	19.149.588.117	65,89%	124.485.660.234	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	31,38%	31,38%		31,92%		32,47%		33,02%		33,56%		34,11%		34,11%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Lingkungan Hidup</b>																	
Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	49,23%	49,23%	1.758.204.230	53,55%	1.607.277.400	60,63%	1.655.495.722	67,50%	1.705.160.594	74,15%	1.756.315.411	80,61%	1.809.004.874	80,61%	10.291.458.231	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5,65%	5,65%		7,98%		10,08%		11,98%		13,70%		15,28%		15,28%		
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	78,88%	78,88%	2.475.084.560	84,16%	1.781.678.700	88,20%	1.835.129.061	92,24%	1.890.182.933	96,27%	1.946.888.421	100,00%	2.005.295.073	100,00%	11.934.258.748	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase perusahaan yang telah mentaati dokumen lingkungan	23,62%	23,62%		27,58%		31,36%		34,98%		38,45%		41,77%		41,77%		
	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang telah terakreditasi	11,11%	11,11%		15,56%		20,00%		24,44%		28,89%		33,33%		33,33%		
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	4.382.148.081	100%	4.861.161.720	100%	5.006.996.572	100%	5.157.206.469	100%	5.311.922.663	100%	5.471.280.343	100%	30.190.715.847	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>																	
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	99,50%	99,50%	1.393.899.570	99,75%	411.914.640	99,75%	424.272.079	99,75%	437.000.242	99,75%	450.110.249	99,75%	463.613.556	99,75%	3.580.810.336	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	80,00%	80,00%	891.166.310	83,75%	418.924.570	87,50%	431.492.307	91,25%	444.437.076	95,00%	457.770.189	98,75%	471.503.294	98,75%	3.115.293.746	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	50,00%	50,00%	1.277.109.890	60,00%	881.568.305	70,00%	908.015.354	80,00%	935.255.815	90,00%	963.313.489	100,00%	992.212.894	100,00%	5.957.475.747	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.010.502.201	100%	1.030.006.285	100%	1.060.906.474	100%	1.092.733.668	100%	1.125.515.678	100%	1.159.281.148	100%	6.478.945.453	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																	
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Danurejan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	77	77	2.242.266.144	78	2.083.424.176	79	2.145.926.901	80	2.210.304.708	82	2.276.613.850	82	2.344.912.265	82	13.303.448.044	Kecamatan Danurejan
	Tingkat swadaya masyarakat	15%	15%		16%		17%		18%		19%		20%		20%		
Kecamatan Danurejan	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	942.710.041	100%	937.110.179	100%	965.223.484	100%	994.180.189	100%	1.024.005.595	100%	1.054.725.762	100%	5.917.955.250	Kecamatan Danurejan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Gedongtengen)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	70	70	1.426.710.840	71	1.285.706.160	72	1.324.277.345	73	1.364.005.665	74	1.404.925.835	75	1.447.073.610	75	8.252.699.456	Kecamatan Gedongtengen
	Tingkat swadaya masyarakat	20%	20%		21%		22%		23%		24%		25%		25%		
Kecamatan Gedongtengen	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	771.330.723	100%	773.946.742	100%	797.165.144	100%	821.080.099	100%	845.712.502	100%	871.083.877	100%	4.880.319.086	Kecamatan Gedongtengen
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Gondokusuman)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	76,5	76,5	3.091.074.592	77	3.436.953.316	77,5	3.540.061.915	78	3.646.263.773	78,5	3.755.651.686	79	3.868.321.237	79	21.338.326.519	Kecamatan Gondokusuman
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%		11%		12%		13%		14%		15%		15%		
Kecamatan Gondokusuman	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.309.814.180	100%	1.253.654.360	100%	1.291.263.991	100%	1.330.001.911	100%	1.369.901.968	100%	1.410.999.027	100%	7.965.635.436	Kecamatan Gondokusuman
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Gondomanan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	87	87	1.483.504.754	87,02	1.343.710.988	87,04	1.384.022.318	87,07	1.425.542.987	87,09	1.468.309.277	88	1.512.358.555	88	8.617.448.879	Kecamatan Gondomanan
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%		11%		12%		13%		14%		15%		15%		
Kecamatan Gondomanan	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	820.765.907	100%	823.846.546	100%	848.561.942	100%	874.018.801	100%	900.239.365	100%	927.246.546	100%	5.194.679.106	Kecamatan Gondomanan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Jetis)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,5	82,5	2.224.541.638	82,7	2.194.436.950	82,9	2.260.270.059	83,1	2.328.078.160	83,3	2.397.920.505	83,5	2.469.858.120	83,5	13.875.105.432	Kecamatan Jetis
	Tingkat swadaya masyarakat	15,00%	15,00%		17,00%		19,00%		21,00%		23,00%		25,00%		25,00%		
Kecamatan Jetis	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	652.599.391	100%	955.239.995	100%	983.897.195	100%	1.013.414.111	100%	1.043.816.534	100%	1.075.131.030	100%	5.724.098.256	Kecamatan Jetis
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Kotagede)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,31	88,31	2.220.361.412	88,70	2.435.920.722	89,00	2.508.998.344	89,40	2.584.268.294	89,90	2.661.796.343	90,50	2.741.650.233	90,50	15.152.995.347	Kecamatan Kotagede
	Tingkat swadaya masyarakat	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		
Kecamatan Kotagede	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	872.878.513	100%	819.927.078	100%	844.524.890	100%	869.860.637	100%	895.956.456	100%	922.835.150	100%	5.225.982.724	Kecamatan Kotagede
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%	0	100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%	0	100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%	0	100%		100%		100%		100%		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Kraton)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	75,19	75,19	1.864.121.000	75,69	2.120.628.450	76,19	2.184.247.304	76,69	2.249.774.723	77,19	2.317.267.964	77,69	2.386.786.003	77,69	13.122.825.444	Kecamatan Kraton
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%		10%		12%		12%		14%		15%		15%		
Kecamatan Kraton	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	916.149.800	100%	865.947.000	100%	891.925.410	100%	918.683.172	100%	946.243.667	100%	974.630.977	100%	5.513.580.027	Kecamatan Kraton
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Mantrijeron)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,37	83,37	2.305.653.508	83,67	2.546.070.525	83,97	2.622.452.641	84,27	2.701.126.220	84,57	2.782.160.007	84,87	2.865.624.807	84,87	15.823.087.707	Kecamatan Mantrijeron
	Tingkat swadaya masyarakat	41,07%	41,07%		41,57%		42,07%		42,57%		43,07%		43,57%		43,57%		
Kecamatan Mantrijeron	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	910.886.772	100%	744.050.460	100%	766.371.974	100%	789.363.133	100%	813.044.027	100%	837.435.348	100%	4.861.151.714	Kecamatan Mantrijeron
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Mergangsan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	70	70	2.194.360.664	71	2.375.739.598	71	2.447.011.786	73	2.520.422.140	74	2.596.034.804	75	2.673.915.848	75	13.199.246.001	Kecamatan Mergangsan
	Tingkat swadaya masyarakat	20%	20%		21%		22%		23%		24%		25%		25%		
Kecamatan Mergangsan	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	855.106.062	100%	767.500.759	100%	790.525.782	100%	814.241.555	100%	838.668.802	100%	863.828.866	100%	4.929.871.826	Kecamatan Mergangsan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Ngampilan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	81,11	81,11	1.434.913.385	82,25	1.334.422.868	83,20	1.374.455.554	83,80	1.415.689.221	84,15	1.458.159.897	85,00	1.501.904.694	85,00	8.519.545.619	Kecamatan Ngampilan
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%		10%		11%		11%		12%		12%		12%		
Kecamatan Ngampilan	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	880.110.713	100%	875.731.637	100%	902.003.586	100%	929.063.694	100%	956.935.605	100%	985.643.673	100%	5.529.488.907	Kecamatan Ngampilan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Pakualaman)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	79,66	79,66	1.127.819.298	79,86	1.170.638.275	80,06	1.205.757.423	80,26	1.241.930.146	80,46	1.279.188.050	80,66	1.317.563.692	80,66	7.342.896.884	Kecamatan Pakualaman
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%		11%		12%		13%		14%		15%		15%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kecamatan Pakualaman	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	583.864.681	100%	565.896.245	100%	582.873.132	100%	600.359.326	100%	618.370.106	100%	636.921.209	100%	3.588.284.700	Kecamatan Pakualaman
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tegalrejo)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	75	75	2.965.592.078	76	3.095.249.390	77	3.188.106.872	78	3.283.750.078	79	3.382.262.580	80	3.483.730.458	80	17.190.300.875	Kecamatan Tegalrejo
	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%		11%		12%		13%		14%		15%		15%		
Kecamatan Tegalrejo	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	937.309.472	100%	886.858.810	100%	913.464.574	100%	940.868.512	100%	969.094.567	100%	998.167.404	100%	5.645.763.339	Kecamatan Tegalrejo
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan (Kecamatan Umbulharjo)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80	80	4.277.356.188	80,25	4.870.298.401	80,5	5.016.407.353	81	5.166.899.574	81,5	5.321.906.561	82	5.481.563.758	82	30.134.431.834	Kecamatan Umbulharjo
	Tingkat swadaya masyarakat	5%	5%		7%		9%		11%		13%		15%		15%		
Kecamatan Umbulharjo	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.262.146.298	100%	1.617.754.825	100%	1.666.287.470	100%	1.716.276.094	100%	1.767.764.377	100%	1.820.797.308	100%	10.851.026.371	Kecamatan Umbulharjo
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan (Kecamatan Wirobrajan)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,5	82,5	2.449.655.344	82,6	2.515.990.622	82,7	2.591.470.341	82,8	2.669.214.451	82,9	2.749.290.884	83,0	2.831.769.611	83,0	15.807.391.253	Kecamatan Wirobrajan
	Tingkat swadaya masyarakat	11%	11%		12%		13%		14%		15%		16%		16%		
Kecamatan Wirobrajan	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	763.193.082	100%	762.380.452	100%	785.251.866	100%	808.809.422	100%	833.073.704	100%	858.065.915	100%	4.810.774.441	Kecamatan Wirobrajan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																	
Program Pengendalian Penduduk	Crude Birth Ratio	11-10 CBR	11-10 CBR	1.489.452.000	11-10 CBR	1.544.366.800	11-10 CBR	1.590.697.804	11-10 CBR	1.638.418.738	11-10 CBR	1.687.571.300	11-10 CBR	1.738.198.439	11-10 CBR	9.688.705.082	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,66%	73,66%	2.684.983.294	73,72%	2.156.098.150	73,77%	2.220.781.095	73,83%	2.287.404.527	73,94%	2.356.026.663	74,00%	2.426.707.463	74,00%	14.132.001.192	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,40%	11,40%		11,34%		11,28%		11,22%		11,16%		11,10%		11,10%		
	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	27,15%	27,15%		28,28%		29,70%		31,12%		32,54%		33,96%		33,96%		
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	738.622.527	100%	739.437.806	100%	761.620.940	100%	784.469.568	100%	808.003.655	100%	832.243.765	100%	4.664.398.262	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Perhubungan</b>																	
Program Pengelolaan Lalu Lintas	Kinerja lalu lintas jalan kota (V/C Rasio)	0,8	0,8	4.737.095.250	0,8	4.378.075.489	0,799	4.509.417.753	0,799	4.644.700.286	0,798	4.784.041.294	0,798	4.927.562.533	0,798	27.980.892.605	Dinas Perhubungan
	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	20 km/jam	20 km/jam		21 km/jam		22 km/jam		23 km/jam		24 km/jam		25 km/jam		25 km/jam		
Program Pengelolaan Perparkiran	Indeks ketertiban penyelenggaraan perparkiran	78%	78%	7.599.991.500	81%	7.350.066.000	84%	7.570.567.980	87%	7.797.685.019	89%	8.031.615.570	91%	8.272.564.037	91%	46.622.490.106	Dinas Perhubungan
Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase kendaraan umum yang berizin	78%	78%	1.867.279.233	80%	2.095.701.069	82%	2.158.572.101	84%	2.223.329.264	86%	2.290.029.142	88%	2.358.730.016	88%	12.993.640.824	Dinas Perhubungan
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.790.172.999	100%	2.729.922.388	100%	2.811.820.059	100%	2.896.174.661	100%	2.983.059.901	100%	3.072.551.698	100%	17.283.701.707	Dinas Perhubungan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Komunikasi dan Informatika</b>																	
Program Peningkatan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	94,00%	94,00%	1.327.447.242	95,00%	1.168.344.025	95,50%	1.203.394.346	96,00%	1.239.496.176	96,50%	1.276.681.061	97,00%	1.314.981.493	97,00%	7.530.344.344	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	19,93%	19,93%	13.044.563.264	30,43%	12.527.410.573	40,93%	12.903.232.890	51,43%	13.290.329.877	61,93%	13.689.039.773	71,80%	14.099.710.966	71,80%	79.554.287.344	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	57,32%	57,32%		63,69%		69,43%		75,16%		80,89%		86,62%		86,62%		
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	1.514.821.414	100%	1.347.401.205	100%	1.387.823.241	100%	1.429.457.938	100%	1.472.341.677	100%	1.516.511.927	100%	8.668.357.402	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.229.124.420	100%	1.515.894.653	100%	1.561.371.493	100%	1.608.212.637	100%	1.656.459.016	100%	1.706.152.787	100%	9.277.215.006	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
<b>URUSAN WAJIB</b>																		
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																		
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina	4,70%	4,70%	959.857.200	4,75%	752.924.400	4,80%	775.512.132	4,80%	798.777.496	4,85%	822.740.821	4,90%	847.423.045	4,90%	4.957.235.094	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro	Persentase peningkatan omset UKM yang dibina	5%	5%	2.428.656.215	5%	2.281.002.000	5%	2.349.432.060	5%	2.419.915.022	5%	2.492.512.472	5%	2.567.287.847	5%	14.538.805.616	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.757.037.610	100%	2.492.537.950	100%	2.567.314.089	100%	2.644.333.511	100%	2.723.663.516	100%	2.805.373.422	100%	14.990.260.098	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
<b>URUSAN WAJIB</b>																		
<b>Penanaman Modal</b>																		
Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	30%	30%	2.590.634.515	35%	337.572.265	40%	347.699.433	45%	358.130.416	50%	368.874.328	55%	379.940.558	55%	4.382.851.516	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan	Persentase kesesuaian antara pelaksanaan izin terhadap izin yang diawasi	60%	60%	495.590.000	60%	56.474.000	60%	58.168.220	60%	59.913.267	60%	61.710.665	60%	63.561.985	60%	795.418.136	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman	Persentase regulasi pelayanan perizinan	100%	100%	611.863.750	100%	280.040.000	100%	288.441.200	100%	297.094.436	100%	306.007.269	100%	315.187.487	100%	2.098.634.142	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
Program Pengembangan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	8,75%	8,75%	888.390.850	9,00%	562.305.000	11,00%	579.174.150	13,00%	596.549.375	15,00%	614.445.856	17,00%	632.879.231	17,00%	3.873.744.462	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modan dan Perizinan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.904.320.239	100%	3.017.660.952	100%	3.108.190.781	100%	3.201.436.504	100%	3.297.479.599	100%	3.396.403.987	100%	18.925.492.062	Dinas Penanaman Modan dan Perizinan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Kepemudaan dan Olahrag</b>																	
Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	64%	64%	1.697.474.659	69%	1.922.844.332	77%	1.980.529.662	85%	2.039.945.552	92%	2.101.143.918	100%	2.164.178.236	100%	11.906.116.359	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Olahraga	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	76%	76%	2.560.442.959	88%	3.815.287.504	90%	3.929.746.129	93%	4.047.638.512	97%	4.169.067.668	98%	4.294.139.698	98%	22.816.322.469	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	750.632.580	100%	2.320.353.661	100%	2.389.964.271	100%	2.461.663.199	100%	2.535.513.095	100%	2.611.578.488	100%	13.069.705.293	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Statistik</b>																	
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	207.922.300	100%	189.451.300	100%	195.134.839	100%	200.988.884	100%	207.018.551	100%	213.229.107	100%	1.213.744.981	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Persandian</b>																	
Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Persentase pengamanan informasi	100%	100%	844.854.450	100%	1.007.644.600	100%	1.037.873.938	100%	1.069.010.156	100%	1.101.080.461	100%	1.134.112.875	100%	6.194.576.480	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	19%	19%		28%		38%		48%		57%		76%		76%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Kebudayaan</b>																	
Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Persentase bangunan budaya sesuai rekomendasi	70,00	70,00	1.000.185.965	75,00	755.482.080	78,00	778.146.542	81,00	801.490.939	84,00	825.535.667	87,00	850.301.737	87,00	5.011.142.930	Dinas Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasikan	3,00	3,00	468.075.500	6,00	417.812.960	9,00	430.347.349	12,00	443.257.769	15,00	456.555.502	18,00	470.252.167	18,00	2.686.301.248	Dinas Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	Persentase rintisan kelurahan budaya	40,00	40,00	731.607.950	42,00	1.055.476.000	44,00	1.087.140.280	47,00	1.119.754.488	49,00	1.153.347.123	51,00	1.187.947.537	51,00	6.335.273.378	Dinas Kebudayaan
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Kebudayaan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	783.233.190	100%	728.040.526	100%	749.881.742	100%	772.378.194	100%	795.549.540	100%	819.416.026	100%	4.648.499.218	Dinas Kebudayaan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Perpustakaan</b>																	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	50	50	1.239.832.485	100	1.282.561.729	150	1.321.038.581	200	1.360.669.738	250	1.401.489.830	300	1.443.534.525	1050	8.049.126.889	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	75	75		75,5		76		76,5		77		77,5		77,5		
Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1000	1000	96.779.000	1000	247.238.000	1000	254.655.140	1000	262.294.794	1000	270.163.638	1000	278.268.547	6000	1.409.399.119	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.057.205.171	100%	2.285.274.444	100%	2.353.832.677	100%	2.424.447.658	100%	2.497.181.087	100%	2.572.096.520	100%	14.190.037.557	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN WAJIB</b>																	
<b>Kearsipan</b>																	
Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	jumlah perangkat daerah/unit kerja yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	26 perangkat daerah /unit kerja	26 perangkat daerah /unit kerja	446.051.000	52 perangkat daerah /unit kerja	293.216.887	78 perangkat daerah /unit kerja	302.013.394	114 perangkat daerah /unit kerja	311.073.795	140 perangkat daerah /unit kerja	320.406.009	152 perangkat daerah /unit kerja	330.018.190	152 perangkat daerah /unit kerja	2.002.779.275	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	200	200	415.946.606	360	360.582.687	520	371.400.168	680	382.542.173	840	394.018.438	1000	405.838.991	3600,00	2.330.329.062	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 7.1.2  
Urusan Pilihan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
<b>Pariwisata</b>																	
Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	3.000.000	3.000.000	10.257.698.294	3.150.000	8.327.120.767	3.307.500	8.576.934.390	3.472.875	8.834.242.422	3.646.519	9.099.269.695	3.828.845	9.372.247.785	3.828.845	54.467.513.353	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Taman Pintar	Jumah Pengunjung Taman Pintar	800.000	800.000	16.711.464.736	820.000	14.500.000.000	840.000	14.935.000.000	860.000	15.383.050.000	880.000	15.844.541.500	900.000	16.319.877.745	900.000	93.693.933.981	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata	80,00	80,00	3.474.449.150	81,59	2.188.489.040	83,18	2.254.143.711	84,77	2.321.768.023	86,36	2.391.421.063	87,95	2.463.163.695	87,95	15.093.434.682	Dinas Pariwisata
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	742.308.400	100%	1.940.400.708	100%	1.998.612.729	100%	2.058.571.111	100%	2.120.328.244	100%	2.183.938.092	100%	11.044.159.285	Dinas Pariwisata
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
<b>Pertanian</b>																	
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Persentase penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100%	100%	2.326.496.801	100%	1.351.670.550	100%	1.392.220.667	100%	1.433.987.286	100%	1.477.006.905	100%	1.521.317.112	100%	9.502.699.321	Dinas Pertanian dan Pangan
	Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	40	40		35		30		25		20		15		15		
	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	10%	10%		8%		6%		4%		2%		0%		0		
Program Pembinaan Pertanian	Nilai pendapatan gapoktan	268.649.997	268.649.997	696.305.700	271.336.497	1.353.870.480	274.049.862	1.394.486.594	276.790.361	1.436.321.192	279.558.264	1.479.410.828	282.353.847	1.523.793.153	282.353.847	7.884.187.947	Dinas Pertanian dan Pangan
<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
<b>Perdagangan</b>																	
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Keterlibatan Pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar	10,0%	10,0%	8.852.561.161	13,3%	9.763.022.049	16,7%	10.055.912.710	20,0%	10.357.590.092	23,3%	10.668.317.795	26,7%	10.988.367.328	26,7%	60.685.771.135	Dinas Perindustri dan Perdagangan
Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pasar	15.335.808.505	15.335.808.505,00	7.386.073.747	15.535.808.505	6.065.881.913	15.585.808.505	6.247.858.370	15.635.808.505	6.435.294.122	15.685.808.505	6.628.352.945	15.735.808.505	6.827.203.534	15.735.808.505	39.590.664.631	Dinas Perindustri dan Perdagangan
Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	4.625.112.300	4.625.112.300	9.307.778.510	4.914.315.650	5.845.093.501	4.915.003.150	6.020.446.306	4.920.993.775	6.201.059.695	4.955.332.491,00	6.387.091.486	4.965.244.655,00	6.578.704.231	4.965.244.655	40.340.173.729	Dinas Perindustri dan Perdagangan
Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Persentase peningkatan mset UKM yang dibina	2%	2%	3.749.150.190	4%	3.116.088.510	6%	3.209.571.165	7%	3.305.858.300	8%	3.405.034.049	9%	3.507.185.071	9%	20.292.887.286	Dinas Perindustri dan Perdagangan
	Persentase titik lokasi PKL yang tertata	2,68%	2,68%		6%		8%		9,39%		16,1%		19,46%		19,46%		
Program Internal Perangkat Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	5.095.138.391	100%	7.427.275.296	100,00	7.650.093.555	20,0%	7.879.596.362	100,00	8.115.984.252	100,00	8.359.463.780	100	44.527.551.636	Dinas Perindustri dan Perdagangan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100,00		100,00		100,00		100,00		100		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100,00		100,00		100,00		100,00		100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
<b>Perindustrian</b>																	
Program Pembinaan Perindustrian	Prosentase peningkatan omset IKM yang dibina	5%	5%	4.297.197.700	6%	3.698.411.950	8%	3.809.364.309	9%	3.923.645.238	9%	4.041.354.595	9%	4.162.595.233	9%	23.932.569.024	Dinas Perindustriam dan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Logam	Pendapatan UPT Logam	490.027.216	490.027.216	7.660.288.716	1.088.068.000	3.058.498.800	1.155.750.000	3.150.254.794	1.532.000.000	3.244.762.438	1.702.500.000	3.342.105.311	2.010.150.000	3.442.368.470	2.010.150.000	23.898.279.529	Dinas Perindustriam dan Perdagangan
<b>URUSAN PILIHAN</b>																	
<b>Transmigrasi</b>																	
Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase jumlah pengangguran	5,43%	5,43%	412.427.800	5,25%	491.176.000	5,25%	505.911.280	5,05%	521.088.618	4,96%	536.721.277	4,86%	552.822.915	4,86%	3.020.147.891	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Tabel 7.1.3  
Urusan Penunjang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																	
<b>Perencanaan</b>																	
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91%	91%	407.102.850	91,20%	519.594.700	91,40%	535.182.541	91,60%	551.238.017	91,80%	567.775.158	92,00%	584.808.412	92,00%	3.165.701.678	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91%	91%	1.992.811.146	91,20%	903.437.300	91,40%	930.540.419	91,60%	958.456.632	91,80%	987.210.331	92,00%	1.016.826.640	92,00%	6.789.282.468	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91%	91%	1.676.892.608	91,20%	739.267.700	91,40%	761.445.731	91,60%	784.289.103	91,80%	807.817.776	92,00%	832.052.309	92,00%	5.601.765.227	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	91%	91%	3.494.806.150	91,20%	2.243.583.800	91,40%	2.310.891.314	91,60%	2.380.218.053	91,80%	2.451.624.595	92,00%	2.525.173.333	92,00%	15.406.297.245	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Internal Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.099.281.172	100%	1.252.191.370	100%	1.289.757.111	100%	1.328.449.824	100%	1.368.303.319	100%	1.409.352.419	100%	7.747.335.215	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		0		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														0		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		0		
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																	
<b>Keuangan</b>																	
Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	363.465.765	100%	181.059.200	100%	186.490.976	100%	192.085.705	100%	197.848.276	100%	203.783.725	100%	1.324.733.647	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase penyerapan belanja daerah	92,49%	92,49%	586.023.406	92,50%	107.919.417	92,60%	111.157.000	92,70%	114.491.709	92,80%	117.926.461	92,90%	121.464.255	92,90%	1.158.982.247	
Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	75,00%	75,00%	1.197.115.406	77,27%	550.800.817	79,54%	567.324.842	81,81%	584.344.587	84,08%	601.874.924	86,35%	619.931.172	86,35%	4.121.391.748	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	90%	90%	17.806.011.990	92%	4.961.313.499	94%	5.110.152.904	96%	5.263.457.491	98%	5.421.361.216	100%	5.584.002.052	100%	44.146.299.152	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pelayanan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	2,5%	2,5%	1.934.471.170	2,5%	819.518.620	2,5%	844.104.179	2,5%	869.427.304	2,5%	895.510.123	2,5%	922.375.427	2,5%	6.285.406.822	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pembukuan & Penagihan Pajak Daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	13,97%	13,97%	3.679.647.000	14,00%	2.314.271.955	14,50%	2.383.700.114	15,00%	2.455.211.117	15,50%	2.528.867.451	16,00%	2.604.733.474	16,00%	15.966.431.110	
Program Internal Perangkat Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	8.350.279.274	100%	8.165.991.023	100%	8.410.970.754	100%	8.663.299.876	100%	8.923.198.873	100%	9.190.894.839	100%	51.704.634.638	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																	
<b>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>																	
Program Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	70%	70%	1.303.875.500	71%	1.346.442.800	72%	1.386.836.084	73%	1.428.441.167	74%	1.471.294.402	75%	1.515.433.234	75%	8.452.323.186	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	91%	91%	1.125.283.500	92%	474.934.625	93%	489.182.664	94%	503.858.144	95%	518.973.888	95%	534.543.105	95%	3.646.775.925	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75%	75%	4.027.064.450	76%	3.769.457.350	77%	3.882.541.071	78%	3.999.017.303	79%	4.118.987.822	80%	4.242.557.456	80%	24.039.625.451	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Internal Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.457.760.200	100%	1.365.233.204	100%	1.406.190.200	100%	1.448.375.906	100%	1.491.827.183	100%	1.536.581.999	100%	8.705.968.692	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																	
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>																	
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	80	80	1.278.548.850	82	1.791.047.000	84	1.844.778.410	86	1.900.121.762	88	1.957.125.415	90	2.015.839.178	90	10.787.460.615	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2017		2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada Akhir	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																	
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																	
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	79%	79%	697.344.664	79%	1.305.170.277	80%	1.344.325.385	82%	1.384.655.147	84%	1.426.194.801	85%	1.468.980.645	85%	7.626.670.920	Kantor Kesbang
Program Internal Perangkat Daerah (Kantor Kesbang)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	414.757.342	100%	701.355.062	100%	722.395.714	100%	744.067.585	100%	766.389.613	100%	789.381.301	100%	4.138.346.617	Kantor Kesbang
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																	
<b>Inspektorat</b>																	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	80%	80%	837.218.500	83%	247.833.550	85%	255.268.557	87%	262.926.613	89%	270.814.412	91%	278.938.844	91%	2.153.000.475	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	80%	80%	562.100.000	83%	62.984.000	85%	64.873.520	87%	66.819.726	89%	68.824.317	91%	70.889.047	91%	896.490.610	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik	80%	80%	291.210.000	83%	52.119.000	85%	53.682.570	87%	55.293.047	89%	56.951.839	91%	58.660.394	91%	567.916.849	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	80%	80%	456.740.000	83%	64.641.200	85%	66.580.436	87%	68.577.849	89%	70.635.185	91%	72.754.240	91%	799.928.910	Inspektorat
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	-	-	-	83%	92.809.163	85%	95.593.438	87%	98.461.241	89%	101.415.078	91%	104.457.531	91%	492.736.451	Inspektorat
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 2 (untuk 6 elemen penilaian)	-		level 2 (untuk 6 elemen penilaian)		level 3 (untuk 3 elemen penilaian)	0	level 3 (untuk 4 elemen penilaian)		level 3 (untuk 5 elemen penilaian)		level 3 (untuk 6 elemen penilaian)		level 3 (untuk 6 elemen penilaian)		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Internal Perangkat Daerah (Inspektorat)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.569.104.968	100%	1.205.697.050	100%	1.241.867.962	100%	1.279.124.000	100%	1.317.497.720	100%	1.357.022.652	100%	7.970.314.352	Inspektorat
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
<b>URUSAN PENUNJANG</b>																	
<b>Sekretariat Daerah</b>																	
Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	75%	75%	2.098.430.683	77%	3.355.122.841	79%	3.455.776.526	81%	3.559.449.822	83%	3.666.233.317	85%	3.776.220.316	85%	19.911.233.505	Bagian Tata Pemerintahan
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang	Berkembang		Berkembang		Berkembang	0	Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	409.897.744	100%	784.279.720	100%	807.808.112	100%	832.042.355	100%	857.003.626	100%	882.713.734	100%	4.573.745.291	Bagian Tsta Pemerintahan
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase aparatur dengan kapasitas meningkat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp545 milyar	Rp545 milyar	1.307.360.415	Rp547 milyar	681.645.793	Rp559 milyar	702.095.167	Rp571 milyar	723.158.022	Rp583 milyar	744.852.762	Rp595 milyar	767.198.345	Rp595 milyar	4.926.310.504	Bagian Perekonomian
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Perekonomian)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	731.459.896	100%	659.149.884	100%	678.924.381	100%	699.292.112	100%	720.270.875	100%	741.879.002	100%	4.230.976.149	Badan Perekonomian
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93,0%	93,0%	902.900.434	93,5%	636.147.456	94,0%	655.231.880	94,5%	674.888.836	95,0%	695.135.501	95,5%	715.989.566	95,5%	4.280.293.673	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100,00	100,00	364.992.064	100,00	383.802.718	100,00	395.316.800	100,00	407.176.304	100,00	419.391.593	100,00	431.973.340	100,00	2.402.652.818	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	70,0%	70,0%	1.660.847.064	72,5%	732.645.185	75,0%	754.624.541	77,5%	777.263.277	80,0%	800.581.175	82,5%	824.598.610	82,5%	5.550.559.852	Bagian Layanan Pengadaan
	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	70,0%	70,0%		72,5%		75,0%		77,5%		80,0%		82,5%		82,5%		
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Layanan Pengadaan)	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	100,00	660.351.895	100,00	1.163.875.885	100,00	1.198.792.162	100,00	1.234.755.926	100,00	1.271.798.604	100,00	1.309.952.562	100,00	6.839.527.034	Badan Layanan Pengadaan
	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase aparatur dengan kapasitas meningkat																
	Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	60%	60%	3.948.688.916	70%	1.847.483.192	80%	1.902.907.688	90%	1.959.994.918	95%	2.018.794.766	100%	2.079.358.609	1,00	13.757.228.089	Bagian Organisasi
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Organisasi)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	609.579.541	100%	830.564.812	100%	855.481.756	100%	881.146.209	100%	907.580.595	100%	934.808.013	100%	5.019.160.927	Badan Organisasi
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	3.028.474.850	100%	1.471.532.004	100%	1.515.677.964	100%	1.561.148.303	100%	1.607.982.752	100%	1.656.222.234	100%	10.841.038.105	Bagian Hukum



Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Hukum)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	637.442.070	100%	537.019.887	100%	553.130.484	100%	569.724.398	100%	586.816.130	100%	604.420.614	100%	3.488.553.582	Badan Hukum
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi, keuangan dan sekretariat daerah dan kerumahanggaan	78,00	78,00	2.768.716.377	78,50	2.673.413.507	79,00	2.753.615.912	79,50	2.836.224.390	80,00	2.921.311.121	80,50	3.008.950.455	80,50	16.962.231.762	Bagian Umum
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Umum)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	707.380.926	100%	692.101.274	100%	712.864.312	100%	734.250.242	100%	756.277.749	100%	778.966.081	100%	4.381.840.584	Bagian Umum
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,00	80,00	1.732.840.446	80,25	1.728.433.859	80,45	1.780.286.875	80,65	1.833.695.481	80,75	1.888.706.345	81,00	1.945.367.536	81,00	10.909.330.542	Bagian Protokol
Program Internal Perangkat Daerah (Bagian Protokol)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.682.794.532	100%	1.959.962.426	100%	2.018.761.299	100%	2.079.324.138	100%	2.141.703.862	100%	2.205.954.978	100%	12.088.501.234	Bagian Protokol
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Informasi, Humas dan Keprotokoleraan DPRD		100%	100%	1.589.107.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.589.107.000	DPRD
Program Penguatan Kapasitas DPRD		100%	100%	33.958.247.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.958.247.500	DPRD
Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	-	100%	24.405.971.000	100%	25.138.150.130	100%	25.892.294.634	100%	26.669.063.473	100%	27.469.135.377	100%	129.574.614.614	DPRD
Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%	100%	-	100%	19.323.970.000	100%	19.903.689.100	100%	20.500.799.773	100%	21.115.823.766	100%	21.749.298.479	100%	102.593.581.118	DPRD
Program Internal Perangkat Daerah (Sekretariat DPRD)	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	5.768.156.621	100%	11.266.408.598	100%	11.604.400.856	100%	11.952.532.882	100%	12.311.108.868	100%	12.680.442.134	100%	65.583.049.959	Sekretariat DPRD
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100,00		100,00		

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Kota Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat								
	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,7	7,58	7,35	7,34	7,29	7,1
	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	55,41	55,93	56,53	57,13	57,74	58,34
	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85	85,2	85,4	85,6	85,8	86
MISI 2: Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta								
	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,42	0,42	0,41	0,40	0,397	0,395
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,13%	5,16%	5,19%	5,20%	5,21%	5,23%
	Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	1,04%	1,3%	1,5%	1,7%	1,9%	2,1%
MISI 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta								
	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	1.660	1.628	1.596	1.564	1.532	1.500

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Jumlah pelanggaran Perda	6.000	5.800	5.600	5.400	5.200	5.000
MISI 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya								
	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,42 th	11,43 th	11,43 th	11,44 th	11,44 th	11,45 th
		Angka harapan lama sekolah	16,89 th	16,95 th	17,01 th	17,22 th	17,28 th	17,33 th
	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,30 th	74,32th	74,34th	74,36th	74,38th	74,4th
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	44%	50%	56%	61%	67%	72%
MISI 5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan								
	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	63,55%	68,6%	73,4%	76,7%	79,6%	82,5%
	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,64	50,84	51,04	51,24	51,44	51,64
MISI 6: Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman								
	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	39,32	40,29	41,29	42,34	43,36	44,41

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih								
	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	BB	BB	BB	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Selain adanya penetapan indikator kinerja daerah terdapat juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan  
Kota Yogyakarta

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat										
Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	77	77	77	79,1	79,1	83,5	83,5	83,5	Dinas Sosial
Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	26,15%	26,15%	27%	28%	29%	30%	31%	31%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan perempuan dan anak meningkat	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,65%	0,65%	0,64%	0,63%	0,62%	0,61%	0,60%	0,60%	
	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,74%	0,74%	0,73%	0,72%	0,71%	0,70%	0,69%	0,69%	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan	340	340	343	346	349	352	352	352	Kecamatan Danurejan
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen	360	360	361	362	363	364	365	365	Kecamatan Gedongtengen
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman	350	350	352	354	356	358	360	360	Kecamatan Gondokusuman
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan	350	350	352	354	356	358	360	360	Kecamatan Gondomanan



Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	332	335	338	341	344	347	347	Kecamatan Jetis
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede	350	350	351	352	353	354	355	355	Kecamatan Kotagede
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton	300	300	305	310	315	320	325	325	Kecamatan Kraton
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron	359	359	362	365	368	371	374	374	Kecamatan Mantrijeron
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan	340	340	345	350	355	360	365	365	Kecamatan Mergangsan

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Mergangsan meningkat	Mergangsan									
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan	350	350	352	354	356	358	360	360	Kecamatan Ngampilan
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	310	310	311	312	313	314	315	315	Kecamatan Pakualaman
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo	349	349	350	351	352	353	354	354	Kecamatan Tegalrejo
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	350	351	352	353	354	355	355	Kecamatan Umbulharjo

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan	345	345	351	352	353	354	355	355	Kecamatan Wirobrajan
Ketersediaan dan mutu pangan meningkat	Indeks Pertanian dan Pangan	87,58	87,58	89,2	90,83	91,66	92,49	93,32	93,32	Dinas Pertanian dan Pangan
MISI 2: Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta										
Angka pengangguran menurun	persentase jumlah penganggur	5,08%	5,08%	5,03%	4,98%	4,94%	4,90%	4,86%	4,86%	Dinas Koperasi, UKM & Nakertrans
Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat	indeks kinerja perdagangan dan perindustrian	9,42	9,42	16,33	23,51	27,69	32,11	36,28	36,28	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	Dinas Pariwisata

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Lama tinggal wisatawan meningkat	Length of Stay (LoS)	2 hari	2 hari	2,02 hari	2,04 hari	2,06 hari	2,08 hari	2,1 hari	2,1 hari	Dinas Pariwisata
Nilai Investasi meningkat	Nilai investasi	172.494.473.519	172.494.473.519	174.736.901.675	177.357.955.200	180.373.040.438	183.800.128.207	187.659.930.899	187.659.930.899	Dinas Penanaman Modal & Perizinan
MISI 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta										
Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	70%	70%	72%	76%	77%	80%	82%	82%	Kantor Kesatuan Bangsa
Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	70	70	79	83	89	94	99	99	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	65,52%	65,52%	72,07%	77,12%	83,75%	89,70%	93,10%	93,10%	Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
MISI 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya										
Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Rerata UASDA SD/MI se-Kota Yogyakarta	67	67	68	69	70	71	72	72	Dinas Pendidikan
	Rerata UN SMP/MTs se-Kota Yogyakarta	65	65	66	67	68	69	70	70	
Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	142,61 %	142,61 %	142,64 %	142,67 %	142,70 %	142,73 %	142,76 %	142,76 %	
	Angka partisipasi kasar SMP	141,11 %	141,11 %	141,17 %	141,22 %	141,31 %	141,39 %	141,50 %	141,50 %	
	Angka partisipasi murni SD	128,98 %	128,98 %	129,00 %	129,02 %	129,04 %	129,06 %	129,06 %	129,06 %	
	Angka partisipasi murni SMP	105,97 %	105,97 %	106,01 %	106,23 %	106,29 %	106,35 %	106,40 %	106,40 %	
	Angka partisipasi sekolah	95%	95%	95,05%	95,1%	95,1%	95,15%	95,15%	95,15%	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat	Jumlah kunjungan pemustaka	233.000	233.000	245.000	257.000	270.000	284.000	293.000	293.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Mutu Fasilitas Kesehatan Meningkat	Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	61,54%	61,54%	69,23%	71,79%	74,36%	76,92%	79,49%	79,49%	Dinas Kesehatan
Keluarga sehat meningkat	Cakupan Keluarga dengan indikator keluarga sehat	40%	40%	42%	45%	47%	50%	52%	52%	
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	
Kelahiran penduduk terkendali	rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	44%	44%	50%	56%	61%	67%	72%	72%	Dinas Kebudayaan
MISI 5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan										
Kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	47,90	47,90	55,83	64,25	70,58	77,25	81,97	81,97	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tertib administrasi pertanahan meningkat	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	30,07	30,07	35,07	40,08	45,08	50,08	55,08	55,08	
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	50,2	50,2	50,4	50,6	50,8	51	51,2	51,2	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	66,85	66,85	67,05	67,25	67,45	67,65	67,85	67,85	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Luasan RTH Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	29,19%	29,19%	29,51%	29,68%	29,85%	30,02%	30,19%	30,19%	
MISI 6: Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman										
Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	73,20	73,20	75,56	78,07	80,58	83,10	85,61	85,61	Dinas PUPKP
Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	89,23	89,23	90,17	91,16	92,38	93,55	94,89	94,89	
Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase pengurangan sampah	14,84%	14,84%	17,53%	18,18%	18,43%	18,65%	18,9%	18,9%	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pengangkutan sampah	91,26%	91,26%	92,17%	93,99%	95,82%	97,65%	99,47%	99,47%	



Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	0,8	0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798	0,798	Dinas Perhubungan
Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	58,50	58,50	61,72	64,94	68,17	71,39	74,61	74,61	Badan Penganggulangan Bencana Daerah
Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	97	97	97,60	97,90	98,50	98,80	99,40	99,40	Dinas Kebakaran
MISI 7: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih										
Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sekretariat Daerah
Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,74%	7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	2,12%	2,08%	2,08%	
	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	86,1	86,1	87,2	88,3	89,4	90,5	91,6	91,6	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	79,75	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81	81	
Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Indeks Perencanaan Pembangunan	91	91	91,20	91,40	91,60	91,80	92	92	Bappeda
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89,37	89,37	90,44	91,54	92,63	93,72	94,81	94,81	BPKAD
Pendapatan pajak daerah meningkat	Kontribusi pajak terhadap PAD	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	59%	
Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	80%	80%	83%	85%	87%	89%	91%	91%	Inspektorat
Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Indeks kualitas aparatur sipil negara	75,70	75,70	76,70	77,70	78,70	79,70	80,50	80,50	BKPP

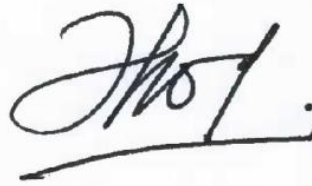
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Sasaran Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	89,75	89,75	91,75	93,63	95,50	97,38	99,25	99,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Indeks tata kelola arsip daerah	90%	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	70	70	71	72	73	74	75	75	Sekretariat DPRD
Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	61,98	61,98	67,24	72,21	77,18	82,15	86,93	86,93	Dinas Kominfo Persandian
Keamanan Informasi meningkat	Indeks pengamanan informasi	75,70	75,70	78,40	81,40	84,40	87,10	92,80	92,80	

## **BAB IX PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota – Wakil Walikota terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Menyusun RPJMD ini sudah melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, top down-bottom up, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA



HARYADI SUYUTI